RENCANA KERJA TAHUN 2025

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS
Jalan Diponegoro III No.1 Telp.(0537) 32773 - Kuala Kurun 74511
e-mail: *transnakerkopukm1@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Secara umum, Renja merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Sedangkan secara spesifik, Renja ini memuat isu strategis khususnya dalam pembangunan Bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM di Kabupaten Gunung Mas. Melalui dokumen Renja ini juga Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah/strategi dan sasaran strategi yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Pada akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Renja ini.

Kuala Kurun, 16 Juli 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI UKM

SUDIN, S.E
Pembina Utama Muda
NIP.196409061998031003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra 9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan 25

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 27

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 36

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran 37

3.3. Program dan Kegiatan 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 47

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan 47

4.2. Prioritas Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi 47

4.3. Prioritas Perangkat Daerah 48

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 10

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas 26

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas .. 28

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 34

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 38

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 39

Tabel 4.1. Prioritas Perangkat Daerah 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

i. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
ii. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah kedalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025; dan
iii. Renja Perangkat Daerahjuga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Renja disusun untuk periode jangka pendek satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi UKM, strategi, program, kegiatan, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gunung Mas. Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas memperhatikan dan mensinergikan selain dengan RPJM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementerian Koperasi dan UKM RI, RPJM Propinsi Kalimantan Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah, serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah.

Fungsi Renja Kerja adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SOPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis. Rencana Kerja memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana

Strategis. Dengan demikian Rencana Kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Renja 2025 ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan UKM.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas dan rencana Strategis (Renstra) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas berakhir di tahun 2024, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 yang merupakan dokumen perencanaan transisi karena masa jabatan Bupati Gunung Mas berakhir pada bulan Juni Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Terakhir pada Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 580);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dimaksud untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor transmigrasi, tenaga kerja, koperasi dan UKM tahun yang akan datang. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Perangkat Daerah. Gambaran tersebut dimaksud untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Perangkat Daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja penyusunan rencana program kegiatan;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan bidang Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan
4.2. Prioritas Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi
4.3. Prioritas Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, jadi setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengevaluasi dokumen perencanaan tahun lalu atau sebelumnya. Hal ini bertujuan tidak lain untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renstra

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 melaksanakan 2 urusan, yaitu : Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri dari 10 program dan 19 kegiatan yang menjadi program wajib. Dari 10 (sepuluh) program yang telah ditetapkan tersebut 1 (satu) diantaranya adalah merupakan urusan rutin kesekretariatan, sedangkan 9 (tujuh) program merupakan program urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang mencakup Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dengan anggaran (pagu murni) sebesar Rp.7.057.754.311,- dan pagu perubahan sebesar Rp.7.871.053.678,. Realisasi evaluasi Renja Tahun 2023 dengan realisasi keuangan (belanja operasi dan belanja modal) sebesar Rp.7.474.065.377,- atau mencapai 94,96%.

Untuk review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	-	-	100%	97,37%	97,37%	100%	51,23%	51,23%
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	-	-	100%	97,37%	97,37%	100%	51,23%	51,23%
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	1 dokumen	100%	100%	1 dokumen	51,23%	51,23%
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100%	95,79%	100%	99,22%	99,22%	100%	11,77%	11,77%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	11,77%	11,77%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan	10 orang	10 orang	25 orang	25 orang	100%	30 orang	11,77%	11,77%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi								
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	100%	97,23%	100%	97,97%	97,97%	100%	-	-
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan informasi pasar kerja TKA	102 orang	102 orang	102 orang	102 orang	100%	108 orang	-	-
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100%	97,63%	100%	99,26%	99,26%	100%	61,98%	61,98%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data ketenagakerjaan	100%	98,32%	100%	99,58%	99,58%	100%	60,80%	60,80%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	60,80%	60,80%
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	62,44%	62,44%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	61,67%	61,67%
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 perkara	5 perkara	5 perkara	5 perkara	100%	5 perkara	69,14%	69,14%
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	73 unit usaha	88 unit usaha	77 unit usaha	89 unit usaha	115%	80 unit usaha	61,60%	61,60%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	48,27%	1 kegiatan	61,60%	61,60%
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitasi Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	15 unit usaha	-	-
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perudang-Undangan Kewenagan Kabupaten/Kota	14 unit usaha	14 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	100%	17 unit usaha	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	95%	94,32%	95%	100%	105%	95%		
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
2.17. 05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 orang	25 orang	30 orang	30 orang	100%	25 orang	-	-
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kompetensi SDM pelaku usaha	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-
2.17. 05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha	Jumlah SDM yang Memahami	25 orang	25 orang	20 orang	20 orang	100%	25 orang	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan								
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	95%	98,40%	95%	99,73%	99,73%	95%	15,42%	15,42%
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang terdata	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	15,42%	15,42%
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	500 unit usaha	155 unit usaha	530 unit usaha	510 unit usaha	96,22%	500 unit usaha	15,42%	15,42%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3.32.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	95%	96,05%	95%	95,73%	95,73%	95%	57,44%	57,44%
3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	95%	96,40%	95%	97,55%	97,55%	95%	36,24%	36,24%
3.32.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 dokumen	42,42%	42,42%
3.32.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
3.32.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
3.32.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	99,65%	100%
3.32.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan	95%	95,41%	95%	94,77%	94,77%	95%	57,76%	57,76%
3.32.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	33 orang	32 orang	35 orang	109%	33 orang	57,90%	57,90%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	65,74%	65,74%
3.32.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	98,87%	100%
3.32.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	17,71%	17,71%
3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian	95%	94,34%	95%	99,86%	99,86%	95%	89,32%	89,32%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	-	2 orang	-	-	10 orang	89,32%	89,32%
3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen umum	95%	99,57%	95%	99,84%	99,84%	95%	79,21%	79,21%
3.32.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	57,26%	57,26%
3.32.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	48,52%	48,52%
3.32.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	50,89%	50,89%
3.32.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	61,58%	61,58%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	88,39%	88,39%
3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	95%	99,69%	95%	97,67%	97,67%	95%	99,87%	99,87%
3.32.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	5 unit	2 unit	2 unit	100%	4 unit	99,87%	100%
3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%	95,68%	95%	95,33%	95,33%	95%	47,69%	47,69%
3.32.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	54,55%	54,55%
3.32.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	37,17%	37,17%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100%	18 laporan	51,57%	51,57%
3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	95%	98,22%	95%	98,16%	98,16%	95%	17,12%	17,12%
3.32.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	32,31%	32,31%
3.32.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	44,53%	44,53%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit	32 unit	32 unit	100%	35 unit	41,17%	41,17%
3.32.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	0	0
3.32.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP	95%	97,63%	95%	96,32%	96,32%	95%	99,50%	99,50%
3.32.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	99,50%	100%
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	80%	99,40%	80%	99,55%	99,55%	86%	45,78%	45,78%
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	45,78%	45,78%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	57,73%	
3.32.02.2.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100%	1 kawasan	38,23%	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	80%	98,46%	80%	99,38%	99,38%	86%	56,08%	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1 kegiatan	98,46%	1 kegiatan	99,38%	99,38%	1 kegiatan	56,08%	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	400 KK	300 KK	400 KK	300 KK	75%	400 KK		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di tahun 2023, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja pelayanan sesuai sasaran yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	-	90	90	90	69,5	71,06	-	-	-	
2	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	1,07	1,05	1,03	2,96	3,24	-	-	-	
3	Jumlah lulusan S1/S2/S3	-	-	1.413	1.418	1.425	1.084	864	-	-	-	
4	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	-	98,92	98,92	98,92	76,17	98,92	-	-	-	
5	Koperasi aktif	-	-	73	77	80	88	89	-	-	-	
6	Jumlah UMKM	-	-	3.013	3.027	3.050	3.227	3.663	-	-	-	
7	Jumlah industri	-	-	375	400	425	371	439	-	-	-	
8	Jumlah pasar desa/kecamatan	-	-	4	4	4	4	3	-	-	-	
9	Persentase koperasi yang modal dan SHU meningkat	-	-	42	45	47,50	8,08	6,18	-	-	-	
10	Persentase UMKM yang modal dan omzet meningkat	-	-	72	73,5	75	70	73	-	-	-	
11	Persentase ketersediaan dan terkelolanya prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi	-	-	93,22	93,22	93,22	75	75	-	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Beberapa Isu penting yang perlu di jadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah antara lain :

a. Terhambatnya usulan sarana prasarana dan instruktur pelatihan gedung BLK akibat belum adanya Peraturan Bupati;
b. Belum ada pelatihan transmigrasi untuk kegiatan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
c. Belum ada kegiatan pengukuran produktivitas tingkat daerah Kabupaten;
d. Masih ada pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja;
e. Banyaknya kesempatan kerja yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja akibat ketidaksesuainya kompetensi akibat tidak ada pelatihan kerja disektor prioritas;
f. Masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja; dan
g. Pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja terdiri dari 3 Program dan 4 Kegiatan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 3 Program dan 10 Kegiatan, dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi terdiri dari 2 Program dan 2 Kegiatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	100.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	100.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kuala Kurun	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kuala Kurun	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1 dokumen	100.000.000	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100 %	284.553.290	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100 %	284.553.290	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kuala Kurun	Meningkatkan SDM	1 kegiatan	284.553.290	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kuala Kurun	Meningkatkan SDM	1 kegiatan	284.553.290	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	100 %	150.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kuala Kurun	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	100 %	150.000.000	
2.07.04.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terwujudnya pelayanan antar kerja	1 kegiatan	100.000.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerh Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terwujudnya pelayanan antar kerja	1 kegiatan	100.000.000	
2.07.04.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kuala Kurun	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	1 kegiatan	50.000.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kuala Kurun	Terlaksananya pengelolaan informasi pasar kerja	1 kegiatan	50.000.000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Kuala Kurun	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100 %	177.145.220	Program Hubungan Industrial	Kuala Kurun	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	100 %	177.145.220	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	Kuala Kurun	Tersedianya data ketenagakerjaan	100 %	49.756.530	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja	Kuala Kurun	Tersedianya data ketenagakerjaan	100 %	49.756.530	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	1 kegiatan	127.388.690	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	1 kegiatan	127.388.690	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kuala Kurun	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.325.275.312	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kuala Kurun	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.325.275.312	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen perencanaan	100 %	38.146.272	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen perencanaan	100 %	38.146.272	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen keuangan	100 %	4.926.351.698	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen keuangan	100 %	4.926.351.698	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen kepegawaian	100 %	69.020.460	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen kepegawaian	100 %	69.020.460	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen umum	100 %	536.645.559	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen umum	100 %	536.645.559	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kuala Kurun	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	100 %	56.832.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kuala Kurun	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	100 %	56.832.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kuala Kurun	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	354.054.119	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kuala Kurun	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	354.054.119	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kuala Kurun	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	340.842.569	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kuala Kurun	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	340.842.569	
2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen LAKIP	100 %	3.382.635	Penataan Organisasi	Kuala Kurun	Tersusunnya dokumen LAKIP	100 %	3.382.635	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kuala Kurun	Persentase peningkatan izin usaha simpan pinjam	90 %	50.000.000	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Kuala Kurun	Persentase peningkatan izin usaha simpan pinjam	90 %	50.000.000	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi	1 kegiatan	25.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terfasilitasinya penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi	1 kegiatan	25.000.000	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terfasilitasinya penerbitan izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	1 kegiatan	25.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Terfasilitasinya penerbitan izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam	1 kegiatan	25.000.000	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kuala Kurun	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	100 %	150.000.000	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Kuala Kurun	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	100 %	150.000.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kuala Kurun	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan	1 kegiatan	150.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Kuala Kurun	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan	1 kegiatan	150.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kuala Kurun	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	100 %	55.630.188	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Kuala Kurun	Peningkatan SDM Koperasi dan pelaku usaha mikro	100 %	55.630.188	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi	1 kegiatan	55.630.188	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Meningkatkan kompetensi SDM koperasi	1 kegiatan	55.630.188	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kuala Kurun	Terlindungnya koperasi yang sehat dan aktif	95 %	150.000.000	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kuala Kurun	Terlindungnya koperasi yang sehat dan aktif	95 %	150.000.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1 kegiatan	150.000.000	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kuala Kurun	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1 kegiatan	150.000.000	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kuala Kurun	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	95 %	400.000.000	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Kuala Kurun	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	95 %	400.000.000	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kuala Kurun	UMKM yang terdata	1 kegiatan	400.000.000	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kuala Kurun	UMKM yang terdata	1 kegiatan	400.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Kuala Kurun	Peningkatan perekonomian UMKM dan UKM	90 %	150.000.000	Program Pengembangan UMKM	Kuala Kurun	Peningkatan perekonomian UMKM dan UKM	90 %	150.000.000	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kuala Kurun	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1 kegiatan	150.000.000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kuala Kurun	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1 kegiatan	150.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	80 %	129.045.220	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	80 %	129.045.220	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1 kegiatan	129.045.220	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	1 kegiatan	129.045.220	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	80 %	77.145.220	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	80 %	77.145.220	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kuala Kurun	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1 kegiatan	77.145.220	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kuala Kurun	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	1 kegiatan	77.145.220	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu data yang penting sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan termasuk dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Kecamatan, Forum OPD serta Reses/maupun pokok-pokok pikiran DPRD adalah data informasi program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan. Hasil kajian terhadap program/kegiatan dalam musrenbang maupun yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas.

Usulan program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2025 telah diakomodir dalam program kegiatan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Usulan	Lokasi Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Bidang	Program/ Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelatihan Menjahit	Kel.Kurun	Kurun	Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Program: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Kel.Tampang Tumbang Anjir	Kurun			
		Desa Tumbang Tariak	Kurun			
		Desa Penda Pilang	Kurun			
		Desa Tusang Raya	Rungan Barat			
		Desa Sare Rangan	Tewah			
		Desa Penda Rangas	Kahayan Hulu Utara			
		Desa Takaoi	Kahayan Hulu Utara			
		Desa Tumbang Ponyoi	Kahayan Hulu Utara			
2	Pelatihan Tata Rias	Desa Rabauh	Sepang			
		Desa Batu Puter	Rungan Hulu			
		Kel.Rabambang	Rungan Barat			
		Desa Tumbang Takaoi	Kahayan Hulu Utara			
3	Pelatihan Perbengkelan	Kel.Kurun	Kurun			
		Kel.Tampang Tumbang Anjir	Kurun			
		Desa Tumbang Tariak	Kurun			
		Desa Tumbang Tambirah	Kurun			
		Desa Sepang Kota	Sepang			
		Desa Rabauh	Sepang			
		Desa Batu Puter	Rungan Hulu			
		Desa Talangkah	Rungan			
		Desa Jalemu Raya	Rungan Barat			
		Desa Tusang Raya	Rungan Barat			
		Desa Mangkawuk	Rungan Barat			
		Desa Sei Riang	Tewah			
		Desa Tumbang Sian	Kahayan Hulu Utara			
		Kel.Tumbang Marikoi	Damang Batu			
4	Pelatihan Operator Alat Berat	Desa Tumbang Tambirah	Kurun			
5	Pelatihan komputer	Desa Tumbang Tambirah	Kurun			
		Desa Rabauh	Sepang			
		Desa Tanjung Karitak	Sepang			
		Kel.Tumbang Marikoi	Damang Batu			
6	Pelatihan Meubeler	Desa Batu Puter	Rungan Hulu			
		Desa Jalemu Raya	Rungan Barat			

No	Usulan	Lokasi Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Bidang	Program/ Kegiatan	Catatan
7	Pelatihan Membuat Rangkaian Bunga	Tumbang Samui	Manuhing Raya			
8	Mengikuti Kegiatan Kursus Electronik	Desa Sepang Kota	Sepang			
9	Pelatihan Tari dan Musik	Desa Batu Puter	Rungan Hulu			
10	Pelatihan Tenaga Kerja	Desa Bereng Jun	Manuhing			
11	Pengadaan Mesin Jahit	Kel.Kurun	Kurun			
		Kel.Tampang Tumbang Anjir	Kurun			
12	Pelatihan Pembuatan Kue	Kel.Kurun	Kurun	Kelembagaan, Pemberdayaaan, Pengawasan Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)/ Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		Kel.Tampang Tumbang Anjir	Kurun			
13	Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong	Masyarakat Desa, Kab. Gunung Mas	Mihing Raya			
14	Pelatihan UKM	Kel.Rabambang	Rungan Barat			
15	Diklat Usaha Kelompok Masyarakat	Kel.Tampang Tumbang Anjir	Kurun			
16	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Usaha	Desa Pamatang Limau	Sepang			
17	Pelatihan Pengolahan Makanan Industri Rumah Tangga	Tumbang Samui	Manuhing Raya			
18	Bantuan Keuangan bagi Pelaku UMKM	Desa Karetau Rambangun	Damang Batu			
19	Bantuan Rak Barang dari Besi	Desa Tumbang Jutuh	Rungan			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema pembangunan "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dimana arah kebijakan pemerintah menjabarkan dalam RKP 2025 yaitu 8 Prioritas Nasional (PN), yakni :

PN 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

PN 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru

PN 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

PN 4 : Memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas

PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

PN 6 : Upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan

PN 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

PN 8 : Memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;

2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan insfrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif yang berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi. Dukungan tersebut terdapat dalam **PN 3 : "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi"**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi dengan berbagai program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi, artinya bahwa berbagai program yang dirancang diharapkan agar tidak tumpang tindih, namun saling mendukung. Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan yang sesuai dengan sasaran daerah yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 ini didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	2,8
2	Peningkatan perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	Persentase	6,5

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				7.628.692.632	APBD			7.628.692.632
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.422.502.192	APBD			7.422.502.192
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				581.181.660	APBD			581.181.660
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	Kuala Kurun	100 %	99.483.150	APBD	-	100 %	99.483.150
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	Kuala Kurun	100 %	99.483.150	APBD	-	100 %	99.483.150
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kuala Kurun	1 dokumen	99.483.150	APBD	-	1 dokumen	99.483.150
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	Kuala Kurun	100 %	284.553.290	APBD	-	100 %	284.553.290
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatkan SDM	Kuala Kurun	1 kegiatan	284.553.290	APBD	-	1 kegiatan	284.553.290
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kuala Kurun	20 orang	284.553.290	APBD	-	20 orang	284.553.290
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Pelaksanaan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	Kuala Kurun	100 %	177.145.220	APBD	-	100 %	177.145.220
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	Tersedianya data ketenagakerjaan	Kuala Kurun	100 %	49.756.530	APBD	-	100 %	49.756.530

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Mas	1 laporan	49.756.530	APBD	-	1 laporan	49.756.530
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	Seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Mas	1 kegiatan	127.388.690	APBD	-	1 kegiatan	127.388.690
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Mas	5 perkara	114.324.020	APBD	-	5 perkara	114.324.020
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Gunung Mas	5 perkara	13.064.670	APBD	-	5 perkara	13.064.670
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				6.861.320.532	APBD			6.861.320.532

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian kebutuhan penunjang urusan pemerintahan	Kuala Kurun	100 %	6.325.275.312	APBD	-	100 %	6.325.275.312
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kuala Kurun	100 %	38.146.272	APBD	-	100 %	38.146.272
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuala Kurun	1 dokumen	27.609.890	APBD	-	1 dokumen	27.609.890
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Kurun	1 dokumen	3.205.642	APBD	-	1 dokumen	3.205.642
2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Kurun	1 dokumen	3.090.020	APBD	-	1 dokumen	3.090.020
2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kuala Kurun	1 dokumen	2.122.120	APBD	-	1 dokumen	2.122.120
2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kuala Kurun	1 dokumen	2.118.600	APBD	-	1 dokumen	2.118.600
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen keuangan	Kuala Kurun	100 %	4.926.351.698	APBD	-	100 %	4.926.351.698
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kuala Kurun	48 orang	4.833.263.892	APBD	-	48 orang	4.833.263.892

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kuala Kurun	1 laporan	58287.856	APBD	-	1 laporan	58287.856
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kuala Kurun	2 laporan	2.915.130	APBD	-	2 laporan	2.915.130
2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kuala Kurun	1 dokumen	31.884.820	APBD	-	1 dokumen	31.884.820
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen kepegawaian	Kuala Kurun	100 %	69.020.460	APBD	-	100 %	69.020.460
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kuala Kurun	10 orang	69.020.460	APBD	-	10 orang	69.020.460
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen umum	Kuala Kurun	100 %	536.645.559	APBD	-	100 %	536.645.559
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kuala Kurun	1 paket	7.028.520	APBD	-	1 paket	7.028.520

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kuala Kurun	1 paket	31.468.500	APBD	-	1 paket	31.468.500
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kuala Kurun	5 dokumen	11.258.730	APBD	-	5 dokumen	11.258.730
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kuala Kurun	1 paket	113.050.089	APBD	-	1 paket	113.050.089
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kuala Kurun	1 laporan	373.839.720	APBD	-	1 laporan	373.839.720
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin	Kuala Kurun	100 %	56.832.000	APBD	-	100 %	56.832.000
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kuala Kurun	4 unit	56.832.000	APBD	-	4 unit	56.832.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kuala Kurun	100 %	354.054.119	APBD	-	100 %	354.054.119
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kuala Kurun	1 laporan	3.300.000	APBD	-	1 laporan	3.300.000
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kuala Kurun	1 laporan	96.074.412	APBD	-	1 laporan	96.074.412

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kuala Kurun	1 laporan	254.679.707	APBD	-	1 laporan	254.679.707
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	Kuala Kurun	100 %	340.842.569	APBD	-	100 %	340.842.569
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kuala Kurun	1 unit	41.171.871	APBD	-	1 unit	41.171.871
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kuala Kurun	8 unit	83.119.388	APBD	-	8 unit	83.119.388
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kuala Kurun	12 unit	19.492.500	APBD	-	12 unit	19.492.500
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi	Kuala Kurun	1 unit	197.058.810	APBD	-	1 unit	197.058.810
2.17.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen LAKIP	Kuala Kurun	100 %	3.382.635	APBD	-	100 %	3.382.635
2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kuala Kurun	1 dokumen	3.382.635	APBD	-	1 dokumen	3.382.635
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tertibnya koperasi yang sehat dan aktif	Kuala Kurun	100 %	133.045.220	APBD	-	100 %	133.045.220

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan	Kuala Kurun	1 kegiatan	133.045.220	APBD	-	1 kegiatan	133.045.220
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Kuala Kurun	10 unit	133.045.220	APBD	-	10 unit	133.045.220
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	Kuala Kurun	95 %	403.000.000	APBD	-	95 %	403.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	UMKM yang terdata	Kuala Kurun	1 kegiatan	403.000.000	APBD	-	1 kegiatan	403.000.000
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Se - Kabupaten Gunung Mas	500 unit usaha	403.000.000	APBD	-	500 unit usaha	403.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				206.190.440	APBD			206.190.440
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				206.190.440	APBD			206.190.440

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Tersediannya pemetaan potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi	Kuala Kurun	80 %	129.045.220	APBD	-	80 %	129.045.220
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasi potensi kawasan transmigrasi, advokasi dan musyawarah penetapan kawasan	Kuala Kurun	1 kegiatan	129.045.220	APBD	-	1 kegiatan	129.045.220
3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Kuala Kurun	1 dokumen	50.000.000	APBD	-	1 dokumen	50.000.000
3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kuala Kurun	1 kawasan	79.045.220	APBD	-	1 kawasan	79.045.220
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keluarga di kawasan transmigrasi yang meningkat usaha produktifnya	Kuala Kurun	80 %	77.145.220	APBD	-	80 %	77.145.220
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Tersedianya kegiatan penguatan SDM	Kuala Kurun	1 kegiatan	77.145.220	APBD	-	1 kegiatan	77.145.220
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	Kecamatan Rungan	400 KK	77.145.220	APBD	-	400 KK	77.145.220

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 - 2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

4.2. Prioritas Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta desentralisasi maupun dekonsentrasi di Bidang Transmigrasi, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas secara langsung mendukung Prioritas Provinsi dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Provinsi dimaksud.

4.3. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah

No	Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00 %	Kabupaten Gunung Mas	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.553.290	
				2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	284.553.290	
			Kabupaten Gunung Mas	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	49.756.530	
				2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.756.539	
2	Pendapatan per Kapita	11,4 juta/ kapita/ tahun	Kabupaten Gunung Mas	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	403.000.000	
				2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	403.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kuala Kurun, 16 Juli 2024

Kepala Dinas,

SUDIN, S.E

Pembina Utama Muda

NIP.196409061998031003

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN 2025

Jl. Pangeran Diponegoro Kuala Kurun (74511)
Email : dipenda_kabgumas@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, merupakan gambaran kegiatan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di Tahun 2025. Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unit Eselon II di Kabupaten Gunung Mas dan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran Pendapatan Asli Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan sepanjang Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan akan bermanfaat didalam pengambilan kebijakan, agar :

1. Kebijakan yang muncul dapat tetap fokus dan selaras dengan pencapaian di akhir Tahun 2025.
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada waktu yang akan datang. Dan juga kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kuala Kurun, 01 Juli 2024
Kepala Badan,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPENDA GUNUNG MAS

EDISON, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750113 19903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 9
1.3. Maksud dan Tujuan 11
1.4. Sistematika Penulisan 12

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU . 17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah 38
3.3. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 42

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V. PENUTUP 58
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 58
5.2. Rencana Tindak Lanjut 59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas s/d Tahun 2024	18
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	28
Tabel 2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas	32
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Bapenda Kabupaten Gunung Mas	46
Tabel 4.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	55
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur dengan jelas tentang kewenangan konkuren bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan daerah tersebut diikuti dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menetapkan pembentukan perangkat daerah baru berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan daerah.

Sebagai konsekuensi dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah, sehingga perlu disusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Kewenangan Urusan Penunjang pada Bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dimana dokumen tersebut memuat Substansi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Pendanaan dan Sumber Pendanaan.

Sebagai bagian dari rangkaian perencanaan tahun pertama periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratis

yang dipadukan dengan usulan politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2025-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat Kebijakan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 merupakan Tahap Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2029. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Keempat, RPJMD Tahap Keempat ini ditujukan untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah melalui Pengembangan dan Percepatan Pembangunan Daerah secara menyeluruh di berbagai bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan Rencana Tahun Pertama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 yang harus memuat rencana pencapaian indikator-indikator menuju Gunung Mas yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Adil, pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta muatan lokal lainnya. Adapun khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka indikator tujuan yang harus dicapai adalah **Rasio Pendapatan Asli Daerah**.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Kepala BAPPEDA LITBANG menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah perihal Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD;

(2) Surat Edaran Kepala Daerah memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum PD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada Kepala BAPPEDA LITBANG untuk dilakukan verifikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja PD Tahun 2025 yang sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 yang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Disamping mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025- 2026. Diharapkan rancangan Renja yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan PD akan menjadi bahan penyusunan dan penyempurnaan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Selain itu Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 juga mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Anggaran Belanja, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, memuat kerangka Pengelolaan Anggaran Pendapatan, Pengelolaan Anggaran Belanja, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dilengkapi dengan lampiran yang berisi Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Volume

Sub Kegiatan dan Usulan Biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 di Kabupaten Gunung Mas.

Renja Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2025-2026 yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah **Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel.**

Tujuan diatas mendudukan masyarakat Kabupaten Gunung Mas sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dibawah kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni : Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

Sasaran disusun dengan memperhatikan Tujuan serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024-2026, maka sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai LAKIP/SAKIP.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks SPBE.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Pejabat (Pj.) Kepala Daerah Tahun 2025-2026 tersebut dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 berkontribusi dalam **Sasaran ke-4.11 (empat titik sebelas)** yaitu ***Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas*** secara tidak langsung membantu kinerja Pejabat (Pj.) Kepala Daerah agar ***Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*** meningkat dari nilai awal 61,6424 menjadi 70, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya PAD maka derajat otonomi fiscal semakin membaik.

Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, diarahkan pada Prioritas keempat yaitu Mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan peningkatan intensif aparatur untuk Kalteng amanah, penuntasan prioritas pembangunan sektoral dan prioritas pembangunan kewilayahan, dimana prioritas pembangunan sektor (common goals) membutuhkan sinergitas lintas bidang dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik

pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan, khususnya di Bidang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Rasio PAD
    1. Presentase Realisasi PAD
        1. Presentase Capaian Target PAD
        2. Presentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025- 2026.
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ..... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah untuk memaduserasikan antara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan pada Rencana Strategi (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025- 2026 dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah :

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan ketersediaan sumberdaya dalam Tema **mr y r – l ” w l ”** , dengan fokus kepada **)v)))m))“** dengan maksud bahwa perwujudan dari pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan peningkatan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata.;
b. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, Perubahan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas 2025-2026 dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

a. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
d. Faktor- factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dan melampirkan tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan dan melampirkan tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan. Adapun beberapa Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 diantaranya :

(1) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;

(2) Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;

(3) Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;

(4) Reformasi Birokrasi;

(5) Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan;

(6) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(7) Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan

(8) GERMAS untuk Pencegahan Stunting.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025,

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda dan melampirkan tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD;

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,

Pada bagian ini, program, kegiatan dan sub kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan melampirkan tabel 3.3. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.W

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah pada Tahun 2024 dan prakiraan Tahun 2025 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Penyajian indikator ini mengacu pada Bab VII Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 sesuai dengan bidang urusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB V PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, yang telah memenuhi target ataupun yang melampaui target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang bersangkutan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 berdasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS S/D TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Bapenda Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen teknis perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersusun	80 Buku/Dokumen	40 Buku	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	5 Dokumen	48 Buku/Dokumen	60%
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah jenis potensi pajak daerah yang teranalisa	80 Jenis/Dokumen	40 Jenis	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	22 Dokumen	81 Jenis/Dokumen	101%
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani dan terdampingi	294.625 WP/Layanan	145.204 WP	7 Layanan	7 Layanan	100%	7 Layanan	145.218 WP/Layanan	49%
		Persentase Realisasi Target Pendapatan Pajak Daerah yang dicapai	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah	2.500 Orang/Laporan	1.000 Orang	7 Laporan	7 Laporan	100%	3 Laporan	1.010 Orang/Laporan	40%
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang terdata dan masuk kedalam daftar Wajib Pajak Daerah	294.625 WP/Laporan	145.204 WP	19 Laporan	19 Laporan	100%	22 Laporan	145.245 WP/Laporan	49%
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Wajib Pajak PBB-P2 dan BPHTB yang masuk dalam daftar penilaian	117.000 WP/OP	57.000 WP	29.500 OP	29.500 OP	100%	30.000 OP	116.500 WP/OP	100%
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang masuk dalam daftar ketetapan	294.625 WP/Dokumen	145.204 WP	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	22 Dokumen	145.245 WP/Dokumen	49%
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang berhasil ditagih sesuai tanggal jatuh tempo	294.625 WP/Dokumen	145.204 WP	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	22 Dokumen	145.245 WP/Dokumen	49%
		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang disediakan	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana pungut, SPPT, STTS, SPOP, LSPOP dan sarana pungut lainnya yang dibutuhkan	28 Jenis/Unit	14 Jenis	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	28 Jenis/Unit	100%
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dikelola	12 Aplikasi/Laporan	6 Aplikasi	3 Laporan	3 Laporan	100%	22 Laporan	31 Aplikasi/Laporan	258%
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang diteliti dan terverifikasi	294.625 WP	145.204 WP	73.998 WP	73.998 WP	100%	22 Dokumen	219.224 WP/Dokumen	74%
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi daerah yang terbina dan terawasi	372.486 WR/Laporan	178.128 WR	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	178.136 WR/Laporan	48%
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan atas pajak daerah yang diselesaikan	12.410 WP/Dokumen	7.416 WP	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	7.420 WP/Dokumen	60%
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah penunggak pajak daerah yang berhasil ditagih	12.410 WP/Dokumen	7.416 WP	19 Dokumen	19 Dokumen	100%	22 Dokumen	7.457 WP/Dokumen	60%

5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**ersentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku perencanaan strategi dan kerja yang tersusun	140	Buku/Dokumen	70	Buku	7	Dokumen	7	Dokumen	100%	4	Dokumen	81	Buku/Dokumen	58%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah buku RKA-SKPD yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	23	Buku/Dokumen	58%
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah buku Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	23	Buku/Dokumen	58%
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah buku DKA-SKPD yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	23	Buku/Dokumen	58%
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah buku Perubahan DKA-SKPD yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	1	Dokumen	23	Buku/Dokumen	58%
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah buku LKIP, Tapkin dan IKU yang tersusun	160	Buku/Laporan	80	Buku	5	Laporan	5	Laporan	100%	5	Laporan	90	Buku/Laporan	56%
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang perlu disediakan Gaji dan Tunjangannya	132	Orang/Bulan	66	Orang	35	Orang/Bulan	35	Orang/Bulan	100%	35	Orang/Bulan	136	Orang/Bulan	103%
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	48	Buku/Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	24	Dokumen	100%	24	Dokumen	72	Buku/Dokumen	150%
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	24	Buku/Dokumen	60%
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun	40	Buku/Dokumen	20	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	24	Buku/Dokumen	60%
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah buku RKBU dan RKPBU yang tersusun	80	Buku/Dokumen	40	Buku	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	44	Buku/Dokumen	55%
5	02	01	2.03	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Dokumen	-	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	4	Dokumen/Laporan	100%
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang dibutuhkan	264	Stel	132	Stel	66	Stel	66	Stel	100%	67	Stel	265	Stel	100%
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang memerlukan peningkatan kualitas SDM Aparatur	28	Kali/Orang	14	Kali	7	Orang	7	Orang	100%	7	Orang	28	Kali/Orang	100%
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	32	Jenis/Paket	16	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	18	Jenis/Paket	56%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat/bahan untuk kegiatan kantor yang diperlukan	12	Jenis/Paket	6	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	8	Jenis/Paket	67%
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang diperlukan	76	Jenis/Paket	38	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	40	Jenis/Paket	53%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang perlu disediakan	20	Media Cetak/Dokumen	10	Media Cetak	5	Dokumen	5	Dokumen	100%	5	Dokumen	20	Media Cetak/Dokumen	100%
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang diperlukan	288	Jenis/Paket	144	Jenis	2	Paket	2	Paket	100%	2	Paket	148	Jenis/Paket	51%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dan konsultasi yang dilaksanakan didalam daerah dan luar daerah	300	Kali/Laporan	150	Kali	50	Laporan	50	Laporan	100%	50	Laporan	250	Kali/Laporan	83%

5 02 01 2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Keterwadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set unit peralatan dan mesin lainnya yang diperlukan	90 Unit/Set	40 Unit	2 Jenis	2 Jenis	100%	9 Jenis	50 Unit/Jenis	45%
5 02 01 2.07 07	Pengadaan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan prasarana kerja yang diperlukan	21 Set/Unit	7 Set	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	9 Set/Unit	43%
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Jasa Narasumber	Jumlah bulan kegiatan acara narasumber yang diperlukan	6.000 Lembar/Laporan	2.500 Lembar	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2.501 Lembar/Laporan	50%
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang diperlukan	10 Rekening/Laporan	8 Rekening	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	11 Rekening/Laporan	100%
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional yang memerlukan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	184 Unit	52 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	26 Unit	104 Unit	100%
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang memerlukan pemeliharaan	476 Unit	238 Unit	120 Unit	120 Unit	100%	120 Unit	478 Unit	100%
5 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang memerlukan pemeliharaan	4 Gedung/Unit	2 Gedung	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	4 Gedung/Unit	100%
5 02 01 2.12	Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
5 02 01 2.12 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	6 Dokumen	- Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kuala Kurun, 01 Juli 2024

Kepala Badan,

EDISON, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750113 199903 1 004

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan dari 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 42 (empat puluh satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, hampir seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan dapat dilihat pada uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya berikut ini :

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 80 Buku/Dokumen dan terealisasi 48 Buku/Dokumen atau sebesar 60%;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan target 80 Jenis/Dokumen Pajak dan terealisasi 81 Jenis/Dokumen Pajak atau sebesar 101%;
3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan target 294.625 WP/Layanan dan terealisasi 145.218 WP/Layanan atau sebesar 49%;
4. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target 2.500 Orang/Laporan dan terealisasi 1.010 Orang/Laporan atau sebesar 40%;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah dengan target 294.625 WP/OP dan terealisasi 145.245 WP/OP atau sebesar 49%;
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target 117.000 WP/OP dan terealisasi 116.500 WP/OP atau sebesar 100%;

7. Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan target 294.625 WP/Dokumen dan terealisasi 145.223 WP/Dokumen atau sebesar 49%;
8. Penagihan Pajak Daerah dengan target 294.625 WP/Dokumen dan terealisasi 145.245 WP/Dokumen atau sebesar 49%;
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target 28 Jenis/unit Sarana Pungut dan terealisasi 28 Jenis/Unit Sarana Pungut atau sebesar 100%;
10. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan target 12 Aplikasi/Laporan dan terealisasi 31 Aplikasi/Laporan atau sebesar 258%;
11. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan target 294.625 WP dan terealisasi 219.224 WP atau sebesar 74%;
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target 372.486 WR/Laporan dan terealisasi 178.136 WR/Laporan atau sebesar 48%;
13. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan target 12.410 WP/Dokumen dan terealisasi 7.420 WP/Dokumen atau sebesar 60%;
14. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan target 12.410 WP/Dokumen dan terealisasi 7.457 WP/Dokumen atau sebesar 60%.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 140 Buku/Dokumen dan terealisasi 81 Buku/Dokumen atau sebesar 58%;

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 23 Buku/Dokumen atau sebesar 58%;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 23 Buku/Dokumen atau sebesar 58%;
4. Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 23 Buku/Dokumen atau sebesar 58%;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 23 Buku/Dokumen atau sebesar 58%;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 160 Buku/Dokumen dan terealisasi 90 Buku/Dokumen atau sebesar 56%

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 132 Orang/Bulan dan terealisasi 136 Orang/Bulan atau sebesar 103%;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 48 Buku/Dokumen dan terealisasi 72 Buku/Dokumen atau sebesar 150%;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 24 Buku/Dokumen atau sebesar 60%;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dengan target 40 Buku/Dokumen dan terealisasi 24 Buku/Dokumen atau sebesar 60%.

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan target 80 Buku/Dokumen dan terealisasi 44 Buku/Dokumen atau sebesar 55%.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target 4 Dokumen dan terealisasi 4 Dokumen atau sebesar 100%.

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

1. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya dengan target 264 Stel dan terealisasi 265 Stel atau sebesar 100%;
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 28 Kali/Orang dan terealisasi 28 Kali/Orang atau sebesar 100%.

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 32 Jenis/Paket dan terealisasi 18 Jenis/Paket atau sebesar 56%;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 Jenis/Paket dan terealisasi 8 Jenis/Paket atau sebesar 67%;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 76 Jenis/Paket dan terealisasi 40 Jenis/Paket atau sebesar 53%;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 20 Media Cetak/Dokumen dan terealisasi 20 Media Cetak/Dokumen atau sebesar 100%;
5. Penyediaan Bahan/Material dengan target 288 Jenis/Paket dan terealisasi 148 Jenis/Paket atau sebesar 51%;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 300 Kali/Laporan dan terealisasi 250 Kali/Laporan atau sebesar 83%.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 80 Unit/Jenis dan terealisasi 50 Unit/Jenis atau sebesar 63%.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 21 Set/Unit dan terealisasi 9 Set/Unit atau sebesar 43%

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 6.600 Lembar/Laporan dan terealisasi 3.302 Lembar/Laporan atau sebesar 50%;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 16 Rekening/Laporan dan terealisasi 16 Rekening/Laporan atau sebesar 100%.

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 104 Unit dan terealisasi 104 Unit atau sebesar 100%;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 476 Unit dan terealisasi 478 Unit atau sebesar 100%;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 4 Gedung/Unit dan terealisasi 4 Gedung/Unit atau sebesar 100%.

IX. Penataan Organisasi :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan dengan target 6 Dokumen dan terealisasi 6 Dokumen atau sebesar 100%;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019. Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 terdiri dari :

1. Indikator Tujuan : Rasio PAD.
2. Indikator Sasaran : 1. Persentase Realisasi PAD.
3. Indikator Program : 1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah.
   2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan.

Berkenaan dengan beberapa Tujuan dan Sasaran Pejabat (Pj.) Kepala Daerah Tahun 2025-2026 tersebut dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 berkontribusi dalam **Sasaran ke-4.11 (empat titik sebelas)** yaitu ***Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas*** secara tidak langsung membantu kinerja Pejabat (Pj.) Kepala Daerah agar ***Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah*** meningkat dari nilai awal 61,6424 menjadi 70, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya PAD maka derajat otonomi fiscal semakin membaik. Sementara itu berkenaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 1 (satu) Indikator, yaitu :

1. Persentase Realisasi PAD

Hasil analisis kinerja pelayanan PD disajikan dalam Table 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, berikut ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas

No.	Indikator	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	7	8	9	10	11
1.	Rasio PAD	4,53%	7,86%	7,92%	8,00%	8,10%	6,62%	7,47%	7,01%	2,81%	6,47%	6,01%	Indikator Tujuan, Sasaran dan Program sejak Tahun 2021 mengalami perubahan sebagai langkah untuk mengimplementasikan PMDN 90 Tahun 2019 dan untuk pencapaian realisasi Tahun 2024 diperkirakan masih sudah mulai stabil dikarenakan kemampuan pelaku usaha maupun wajib pajak perorangan untuk memenuhi kewajibannya sudah pulih
	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	13.644.500.000	47.194.850.000	47.896.850.000	48.983.850.000	49.885.850.000	31.303.502.703	46.899.170.549	30.959.702.645	11.888.728.187	49.885.850.000	48.983.850.000	
	2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	3.222.430.000	4.830.080.000	5.220.080.000	5.950.080.000	6.350.080.000	3.891.823.946	2.684.075.000	4.510.815.060	5.788.751.837	6.350.080.000	5.950.080.000	
	3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipashkan	7.524.000.000	9.333.000.000	9.950.000.000	10.150.000.000	10.950.000.000	7.738.215.980	7.524.000.000	12.683.801.108	81.147.429	10.950.000.000	10.150.000.000	
	4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	21.475.040.000	21.665.040.000	22.365.040.000	22.865.040.000	23.665.000.000	23.316.589.909	25.289.364.007	30.061.435.889	18.188.588.540	23.665.000.000	22.865.040.000	
	1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,14%	98,90%	100,00%	100%	
	2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100,00%	73,05%	79,25%	100,00%	100%	
	3. Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0%	0%	100,00%	0%	0%	0%	0%	99,90%	0%	0%	0%	

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
4. Pengelolaan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Asli Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (membayar pajak sesuai ketentuan);

2. Belum adanya mobil operasional pelayanan PBB;
3. Belum adanya pelayanan pembayaran pajak keliling (Mobil);
4. Belum optimalnya system pengelolaan data base pajak daerah yang ada;
5. Masih terbatasnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
6. Terbatasnya saranan dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan asli daerah;
7. Belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan pemungutan penerimaan daerah yang teritergrasi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Badan Pendapatan Daerah bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah disajikan pada Tabel 2.4. di berikut ini:

Tabel 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN GUNUNG MAS

NAMA PERANGKAT DAERAH : **BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

Lembar ..... dari .....

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	**Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah**	**100%**	**2.649.256.377**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	**Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah**	**100%**	**2.649.256.377**	-
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	**Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali**	**100%**	**513.086.576**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	-	**Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali**	**100%**	**513.086.576**	-
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen	144.973.456	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen	144.973.456	-
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	22 Dokumen	242.848.560	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	22 Dokumen	242.848.560	-
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	125.264.560	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	125.264.560	-
			Persentase Realisasi Target Pendapatan Pajak Daerah yang dicapai	**100%**	**1.087.446.418**			**Persentase Realisasi Target Pendapatan Pajak Daerah yang dicapai**	**100%**	**1.087.446.418**	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	108.662.888	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	108.662.888	-
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22 Laporan	133.731.620	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22 Laporan	133.731.620	-
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	35.000 OP	227.677.920	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	35.000 OP	227.677.920	-
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	22 Dokumen	81.170.420	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	22 Dokumen	81.170.420	-
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	22 Dokumen	536.203.570	Penagihan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	22 Dokumen	536.203.570	-
		Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	**Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang disediakan**	**100%**	**1.048.723.383**		Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	**Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang disediakan**	**100%**	**1.048.723.383**	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	366.633.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	366.633.000	-
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22 Laporan	429.780.360	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22 Laporan	429.780.360	-
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	22 Dokumen	72.190.437	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	22 Dokumen	72.190.437	-
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	51.288.420	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	51.288.420	-
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	12.116.120	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	12.116.120	-
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen	116.715.046	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen	116.715.046	-
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**9.045.144.220**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**9.045.144.220**	-
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100%**	**140.802.714**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	**ersentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**100%**	**140.802.714**	-
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.631.738	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.631.738	-
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500	-
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.717.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.717.500	-
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500	-
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.308.576	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.308.576	-
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	59.265.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	59.265.900	-

5	02	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi**		**100%**	**7.204.768.845**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi**		**100%**	**7.204.768.845**	-
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	7.096.013.485	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan	7.096.013.485	-
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	99.193.820	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	99.193.820	-
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.288.040	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.288.040	-
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	4.273.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	4.273.500	-
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**6.896.430**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**100%**	**6.896.430**	-
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2.264.400	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2.264.400	-
5	02	01	2.03	06	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.632.030	Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4.632.030	-
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**133.151.720**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	**Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**133.151.720**	-
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67	Paket	59.867.850	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67	Paket	59.867.850	-
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	73.283.870	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang	73.283.870	-
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas**		**100%**	**797.820.963**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	**Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas**		**100%**	**797.820.963**	-
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	23.522.121	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	23.522.121	-
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.928.945	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	14.928.945	-
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	120.690.517	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	120.690.517	-
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	17.629.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	17.629.500	-
5	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	290.296.555	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	290.296.555	-
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	330.753.325	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan	330.753.325	-
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persentase Capaian Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah**		**100%**	**279.659.050**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	**Persentase Capaian Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah**		**100%**	**279.659.050**	-
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	157.980.750	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	157.980.750	-
5	02	01	2.07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	121.678.300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	121.678.300	-
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**204.672.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**204.672.500**	-
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Jurat Menyurat	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	16.500.000	Penyediaan Jasa Jurat Menyurat	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	16.500.000	-
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	188.172.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Laporan	188.172.500	-
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola**		**100%**	**269.601.998**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola**		**100%**	**269.601.998**	-
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	Unit	200.759.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26	Unit	200.759.200	-
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	53.187.870	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	Unit	53.187.870	-
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15.654.928	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	15.654.928	-
5	**02**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	-	**Persentase Capaian Dokumen Administrasi Penataan Organisasi**		**100%**	**7.770.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100%**	**7.770.000**	-
5	02	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	7.770.000	Penyediaan Jasa Jurat Menyurat	Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3	Dokumen	7.770.000	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, yang dipadukan dengan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026 terutama keterpaduan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta sasaran target yang akan dicapai.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah (PD) yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah mengarah pada Perumusan Kebijakan dan Koordinasi yang selaras dengan Kebijakan Nasional yang mendukung 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan, antara lain :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing ;
4. Revolusi Mental dan Pembanguan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Selain itu, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, selaras dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu:

1. Mempercepat pengembangan kawasan food estate, mempercepat peningkatan UMKM, Peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat untuk Kalteng Kuat;
2. Memperkuat falsafah Hyma Betang, menerbitkan peraturan dan hukum adat dan memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni;
3. Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok;
4. Mengoptimalkan penerapan e-government, peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan peningkatan intensif aparatur untuk Kalteng Amanah;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur mendukung penanganan pembangunan ekonoomi untuk Kalteng Bermartabat; dan
6. Pengembangan rumah ibadah, institusi pendidikan keagamaan dan komunitas adat, memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dan meningkatkan insntif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan untuk Kalteng Religius.

Dalam membangun transparansi dan akuntabiltas kinerja pemerintahan sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen

birokrasi secara modern. Adapun arah kebijakan dan strategi dari sasaran yang dituju adalah sebagai berikut:

1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain:
   a. Penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
   b. Pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah;
   c. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik;
   d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik, penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota, dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah;

3) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :

a. Penguatan kebijakan *e-government*;

b. Harmonisasi kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;

c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM;

d. Penetapan *quick wins* penerapan *e-government*;

e. Pengendalian pegembangan sistem dan *e-government*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, bahwa tema Kabupaten Gunung Mas adalah **mr y r – l ” w l ”** , dengan fokus kepada **Peningkatan Infrstruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Merata** dengan maksud bahwa perwujudan dari pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan peningkatan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2025-2026 yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah **Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel** .

Tujuan diatas mendudukan masyarakat Kabupaten Gunung Mas sebagai subyek pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Upaya tersebut adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Dibawah kepemimpinan Bupati, peningkatan kualitas dan

kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional, akuntabel dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni : Pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

Sasaran disusun dengan memperhatikan Tujuan serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024-2026, maka sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai LAKIP/SAKIP.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks SPBE.
3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Pejabat (Pj.) Kepala Daerah Tahun 2025-2026 tersebut dituangkan dalam program-program Pembangunan Daerah dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 berkontribusi dalam **Sasaran ke-4.11 (empat titik sebelas)** yaitu ***Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas*** secara tidak langsung membantu kinerja Pejabat (Pj.) Kepala Daerah agar ***Indeks***

Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat dari nilai awal 61,6424 menjadi 70, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah, hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin meningkatnya PAD maka derajat otonomi fiscal semakin membaik.

Tujuan 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, bersih dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	51,66 (CC)	52,6	53,5
Sasaran 4.11	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,6424	67	70

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah **Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Mengurangi Ketergantungan dari Pusat dalam Membiayai Pembangunan Daerah**, dengan Indikator Tujuan yakni **Rasio Pendapatan Asli Daerah.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu : **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Non Migas , dengan indikator kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi PAD.

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 adalah ***"Berkelanjutan"*** dan Fokus **) v))) m))"** . Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi masyarakat, infrastruktur, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup. Dengan Pembangunan ini diharapakan masyarakat Kabupaten Gunung Mas menjadi masyarakat yang handal, tangguh dan berperilaku baik. Sehingga menjadi masyarakat yang beradat, bermartabat dan terhormat.

Dalam rangka Sinkronisasi terhadap Program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dituangkan didalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, maka Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Kabupaten Gunung Mas menjadi kabupaten yang berdaya saing, mandiri, sejahtera dan bermartabat;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Gunung Mas yang memiliki keunggulan lokal;
4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Pertama terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dikategorikan kedalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lokasilitas OPD, berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026.

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

I. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
4. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
8. Penagihan Pajak Daerah;
9. Penyediaan Srana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
10. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
11. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;

12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah;
13. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
14. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 9 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan DKA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD;
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

1. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya;

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyediaan Bahan/Material;
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

IX. Kegiatan Penataan Organisasi :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Adapun rincian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat dilihat dalam Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					BADAN PENDAPATAN DAERAH								11.694.400.598,00					11.894.400.598,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								11.694.400.598,00					11.894.400.598,00
5	02				KEUANGAN								11.694.400.598,00					11.894.400.598,00
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9.045.144.221,00					9.245.144.221,00
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								140.802.714,00					140.802.714,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Dokumen	100 %	62.631.738,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	62.631.738,00
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.939.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500,00
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.717.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.717.500,00
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.939.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.939.500,00

5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %	4.308.576,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.308.576,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Persentase Realisasi Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Laporan	100 %	59.265.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	59.265.900,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.204.768.845,00					7.204.768.845,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35 Orang/bulan	100 %	7.096.013.485,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	7.096.013.485,00
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	24 Dokumen	100 %	99.193.820,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	99.193.820,00
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	5.288.040,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.288.040,00

5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	4.273.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.273.500,00
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								6.896.430,00					6.896.430,00
5	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	2.264.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.264.400,00
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	4.632.030,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.632.030,00
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								133.151.720,00					133.151.720,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	67 Paket	100 %	59.867.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket	59.867.850,00
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Orang	100 %	73.283.870,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	73.283.870,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								797.820.964,00					797.820.964,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	23.522.121,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.522.121,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	14.928.945,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.928.945,00

5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Paket	100 %	147.835.737,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	147.835.737,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	17.629.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	17.629.500,00
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Paket	100 %	263.151.336,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	263.151.336,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pendukung untuk Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Laporan	100 %	330.753.325,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	330.753.325,00
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								279.659.050,00					379.659.050,00
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Ketersedian Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Unit	100 %	157.980.750,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	257.980.750,00
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Capaian Ketersedian Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	121.678.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	121.678.300,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								204.672.500,00					304.672.500,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Laporan	100 %	16.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	16.500.000,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	188.172.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	288.172.500,00

5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								269.601.998,00					269.601.998,00
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Capaian Pemerliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	26 Unit	100 %	200.759.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	200.759.200,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Capaian Pemerliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	120 Unit	100 %	53.187.870,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	53.187.870,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Capaian Pemerliharaan Barang Milik Daerah yang dikelola	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Unit	100 %	15.654.928,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.654.928,00
5	02	01	2.13		Penataan Organisasi								7.770.000,00					7.770.000,00
5	02	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
						Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Capaian Dokumen Administrasi Penataan Organisasi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	7.770.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	7.770.000,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								2.649.256.377,00					2.649.256.377,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								2.649.256.377,00					2.649.256.377,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	5 Dokumen	100 %	144.973.456,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen	144.973.456,00
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Dokumen	100 %	242.848.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	21 Dokumen	242.848.560,00
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %	108.662.888,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	108.662.888,00

5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Unit	100 %	366.633.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	366.633.000,00
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Laporan	100 %	133.731.620,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	21 Laporan	133.731.620,00
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Laporan	100 %	429.780.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	21 Laporan	429.780.360,00
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	35000 Obyek Pajak	100 %	227.677.920,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	35000 Obyek Pajak	227.677.920,00
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Dokumen	100 %	81.170.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	21 Dokumen	81.170.420,00
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 Layanan	100 %	125.264.560,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan	125.264.560,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Dokumen	100 %	72.190.437,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	21 Dokumen	72.190.437,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Dokumen	100 %	536.203.570,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	21 Dokumen	536.203.570,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah													
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %	12.116.120,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	12.116.120,00

5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	21 Dokumen	100 %	116.715.046,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	21 Dokumen	116.715.046,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
						Persentase Realisasi PAD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhasil digali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	4 Laporan	100 %	51.288.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	51.288.420,00
												TOTAL	**11.694.400.598,00**					**11.894.400.598,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah ketersediaan Indikator Kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategi adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategi 2025-2026. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategi ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah mengacu kepada Indikator Kinerja Sasaran Rencana Startegi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi PAD.

Yang secara rinci Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Prakiraan maju 2026 berserta target capaiannya dikemukakan pada Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Rencana Tahun 2025	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Catatan Analisis
				Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	7	9
1.	Persentase Realisasi PAD	Persen	48,36	100	100	Indikator Tujuan, Sasaran dan Program sejak Tahun 2021 mengalami perubahan sebagai langkah untuk mengimplementasikan PMDN 90 Tahun 2019 dan untuk pencapaian realisasi Tahun 2025 diperkirakan sudah mulai stabil dikarenakan kemampuan pelaku usaha maupun wajib pajak perorangan untuk memenuhi kewajibannya sudah pulih

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 per Urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah terambil dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Tujuan terdiri dari 1 indikator, yaitu :

1. Rasio PAD.

Indikator Sasaran terdiri dari 4 indikator, yaitu :

1. Persentase Realisasi PAD.

Indikator Program terdiri dari 2 indikator, yaitu :

1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah.
2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 per Urusan yang mengacu pada Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Program Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 tersebut berserta target capaiannya dituangkan dalam bentuk Tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4.2.
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode		Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Catatan Analisis
				Capaian Kinerja	Target / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Target / Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Target / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Non Migas	Meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai Pembangunan Daerah	Rasio PAD	2,81%	35.947.215.994	6,01%	80.221.390.775	6,16%	82.221.390.775	Indikator Tujuan, Sasaran dan Program sejak Tahun 2021 mengalami perubahan sebagai langkah untuk mengimplementasikan PMDN 90 Tahun 2019 dan untuk pencapaian realisasi Tahun 2025 diperkirakan sudah mulai stabil dikarenakan kemampuan pelaku usaha maupun wajib pajak perorangan untuk memenuhi kewajibannya sudah pulih
			1. Persentase Realisasi PAD	48,36%	35.947.215.994	100%	80.221.390.775	100%	82.221.390.775	
			1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	98,90%	2.861.097.705	100%	2.649.256.377	100%	2.649.256.377	
			2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	79,25%	8.917.902.853	100%	9.045.144.221	100%	9.245.144.221	

BAB V

P E N U T U P

Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, guna mendukung tercapainya Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

Dalam rangka mencapai target sebagai Kabupaten yang Berdaya Saing, Mandiri, Sejahtera dan Bermatabat, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh Target Pembangunan Periode Tahun 2025-2026 sesuai dengan yang dicita-citakan.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai salah satu Perangakat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas secara Bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewajibannya;
   b. Menjaga Konsistensi antara RKPD, renja dan dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Melakukan Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Akhirnya kata, kami ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dan terlibat langsung dalam penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Kuala Kurun, 01 Juli 2024
Kepala Badan,

EDISON, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750113 199903 1 004

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

KUALA KURUN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerja. Dengan ini diharapkan pelaksaanaan pemerintah lebih berhasil guna dan berdaya guna, bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daeah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang menggambarkan pencapaian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas, serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat kebijakan dan program/kegiatan prioritas dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini di susun dengan harapan kiranya dapat dijadikan acuan Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, terima kasih.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

CHAMPILI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660803 199803 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR……...i

DAFTAR ISI…….ii

BAB I. PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang.……1

B. Landasan Hukum.....2

C. Maksud dan Tujuan .....……..5

D. Sistematika Penulisan ….....5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...7

A. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....7

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…….10

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH….....11

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....11

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Gunung Mas. 12

C. Program dan Kegiatan….....13

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH…….....16

BAB V. PENUTUP ……..……19

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Mas Merupakan pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Penyusunan RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Mas merupakan penjabaran dari Renstra OPD. Program dan Kegiatan yang ada di RENJA OPD harus tercantum dalam Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada BPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasi dan Fungsional pada Sekretariat, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural BPBD Kabupaten Gunung Mas dirangkum menjadi RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk pembahasan dan

kesepakatan dengan Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan RENJA OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan RENJA OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan RENJA OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen RENJA OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan RENJA OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi unit Perangkat Daerah tiap tahun dalam memprogramkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Perangkat Daerah yang fungsinya untuk memprogramkan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dalam menentukan kegiatan prioritas dan sasaran kegiatan pembangunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274).
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Derah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20)

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Bupati Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Dengan adanya RENJA PD, maka Satuan Kerja telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung Perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk memenuhi peraturan perundangan undangan tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta prisip–prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun tujuan dibuatnya RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di BPBD Gunung Mas agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di BPBD Gunung Mas .
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Dengan demikian dokumen RENJA BPBD Kabupaten Gunung Mas sebagai pedoman dan arah di dalam penyusun anggaran BPBD Kabupaten Gunung Mas dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA tahun 2025 oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gunung Mas.

D. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rancangan Akhir RENJA PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RENJA PD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

B. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Gunung Mas

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam RENJA PD Tahun 2024, BPBD Kabupaten Gunung Mas melaksanakan 3 program yang dijabarkan ke dalam 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang akhirnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024.

Pelaksanaan program tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 51,29% dengan masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didalamnya memuat kegiatan rutin tercapai sebesar 58,48%.
2. Program Penanggulangan Bencana tercapai sebesar 28,39%.
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran tercapai sebesar 59,18%.

Adapun rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Gunung Mas sampai dengan triwulan II tahun 2024 secara terinci dalam semua sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

RINCIAN REALISASI APBD PER PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Indikator			Realisasi s/d 30 Juni 2024					KET
			Output (keluaran) dan Outcome (Hasil)	Volume	Satuan	Volume	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9 = 8/3 x 100 %	10	11
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,521,474,033						3,229,096,771	58.48%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,744,682						36,458,400	33.53%		
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,857,140	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	20	dokumen	20	dokumen	2,856,000	99.96%		
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,697,520	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	40	dokumen	40	dokumen	4,696,000	99.97%		
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,697,520	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-	40	dokumen	-	dokumen	-	0.00%		
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	96,492,502	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	laporan	6	laporan	28,906,400	29.96%		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,498,773,044						2,110,898,943	60.33%		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,498,773,044	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	44	orang	41	orang	2,110,898,943	60.33%		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	320,428,340						237,854,566	74.23%		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51,825,900	Jumlah paket pakaian dinas	58	paket	56	paket	49,840,000	96.17%		
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	268,602,440	Jumlah orang yang mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan	19	orang	19	orang	188,014,566	70.00%		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	881,064,357						512,539,194	58.17%		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,874,120	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	paket	3	paket	2,929,500	49.87%		
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214,172,744	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	paket	5	paket	161,973,687	75.63%		
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,769,968	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	paket	4	paket	19,958,000	48.95%		
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,774,200	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	paket	3	paket	10,273,200	39.86%		
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11,182,140	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1,460	dokumen	730	dokumen	5,400,000	48.29%		
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29,953,085	Jumlah paket bahan/material yang disediakan (Pameran Pembangunan HUT Kabupaten Gunung Mas)	1	paket	1	paket	17,785,000	59.38%		
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	553,336,100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	6	bulan	294,219,807	53.17%		
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423,866,570						190,990,668	45.06%		
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	laporan	1	laporan	3,500,000	50.00%		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,714,000	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	laporan	3	laporan	20,793,590	32.64%		
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353,152,570	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	laporan	2	laporan	166,697,078	47.20%		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,597,040						140,355,000	48.63%		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237,792,628	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diperihara dan dibayarkan pajaknya	21	unit	21	unit	101,701,000	42.77%		
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,575,180	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29	unit	15	unit	11,150,000	49.39%		
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28,229,232	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	1	unit	27,504,000	97.43%		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2,115,086,163						600,444,552	28.39%		
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,285,249,589						214,783,196	16.71%		
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	15,336,315	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	35	orang	-	orang	-	0%		
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	401,118,000	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	1	dokumen	-	dokumen	16,046,800	4%		
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	22,163,404	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	Orang	100	Orang	5,815,000	26.24%		
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	401,118,000	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	dokumen	-	dokumen	-	0%		
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	136,463,600	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas	4	unit	4	unit	60,035,000	43.99%		
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	309,050,270	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalop) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggal	2	laporan	2	laporan	132,886,396	43.00%		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	359,473,574						175,279,012	48.76%		
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	32,887,367	Terlaksananya posko pemantauan bencana	14	hari	-	hari	-	0.00%		
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	326,586,207	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	12	Orang	1	orang	175,279,012	53.67%		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	470,363,000						210,382,344	44.73%		
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	42,879,200	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kota dan lintas perangkat daerah Kab/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	12	orang	6	orang	28,112,410	65.56%		
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	427,483,800	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkanRencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2	Kegiatan	1	kegiatan	182,269,934	42.64%		

1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**1,101,293,932**						**651,717,750**	**59.18%**		
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**597,579,513**						**306,983,750**	**51.37%**		
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39,388,400	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	laporan	-	laporan	-	0.00%		
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	84,200,600	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran danPenyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	13	Desa/ Kel.	7	Desa/ Kel.	51,490,000	61.15%		
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	256,756,875	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar TeknisTerkait	25	unit	25	unit	255,493,750	99.51%		
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	217,233,638	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar WilayahKabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan	2	dokumen	-	dokumen	-	0.00%		
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**503,714,419**						**344,734,000**	**68.44%**		
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	192,375,416	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan danPenanggulangan	170	orang	-	orang	98,744,000	51.33%		
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	311,339,003	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	25	Desa/ Kel.	-	Desa/ Kel.	245,990,000	79.01%		
	TOTAL	**8,737,854,128**						**4,481,259,073**	**51.29%**		

B. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam menyelenggaran pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2025.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang target keberhasilan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan IKU daerah yang memberi gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Pada tabel ini disajikan indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan BPBD Kabupaten Gunung Mas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-	
				2025	2026
1.	Efektifnya setiap penanggulangan bencana	Meningkatnya Efektifitas Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Sadar Bencana	25 Kelompok	25 Kelompok
			Rata-Rata Jumlah Waktu Tanggap Darurat Bencana	1,5 Jam	1,5 Jam
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Kawasan Terdampak Bencana	2 Kegiatan	2 Kegiatan
2.	Peningkatan Nilai SAKIP	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BB	BB

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis tahun 2019-2024 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melaui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dalam renstranya memfokuskan pada kegiatan Penguatan, penyusunan dan penyelarasan Regulasi, Penguatan Kapasitas para pihak dalam penanggulangan Bencana serta Perencanaan dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Terpadu. Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Kalimantan Tengah antara lain:

a. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.
f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan hasil telaahan renstra BNPB dan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui fokus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Gunung Mas dengan BPBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun BNPB dan Kementerian Dalam negeri di tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang terdiri atas :

a. Pelayanan informasi rawan bencana;
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dengan telah diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diikuti dengan diterbitkannya Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka semakin jelas bahwa pemerintah kabupaten wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Standar pelayanan minimal yang wajib diberikan kepada masyarakat juga memuat jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, serta mutu pelayanan dasar yang memuat kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Gunung Mas.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sudah sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yaitu :

1) Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah;
2) Pemerataan infrastruktur wilayah;
3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan, pesisir dan pantai;
4) Stabilitas ekonomi daerah;
5) Peningkatan pendapatan masyarakat;
6) Peningkatan kualitas reformasi birokrasi;
7) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
8) Pengelolaan industri pariwisata;
9) Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan;
10) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Adapun tema RKPD Tahun 2023 disesuaikan dengan Visi Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Pembangunan Gunung Mas”.

Prioritas Pembangunan tahun 2023, yaitu :

1. Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman;
2. Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas;
3. Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya;
4. Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi;
5. Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat;
6. Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
7. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik;
8. Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan; dan
9. Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.

Untuk menuju sasaran terwujudnya wilayah tangguh bencana di kabupaten Kebumen, maka peningkatan kapasitas desa tangguh bencana yang telah dibentuk pada renstra yang lalu menjadi prioritas utama dalam renstra BPBD tahun 2021-2026. Desa tangguh bencana yang telah terbentuk akan selalu ditingkatkan kapasitasnya, sehingga desa yang masuk dalam klasisifikasi Desa Tangguh Utama dan madya semakin banyak, sedangkan Desa Tangguh Pratama semakin sedikit. Peningkatan Kapasitas desa tangguh bencana akan diprioritaskan bagi desadesa/kelurahan yang memiliki risiko bencana yang tinggi, dengan tidak mengkesampingkan desa-desa/kelurahan yang berada di kawasan yang risiko bencananya rendah.

C. Program dan Kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan program, kegiatan dan sub- kegiatan di tahun 2024 sebagi berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Kegiatan/Sub Kegiatan :
   1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   f. Penyediaan Bahan/Material
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penanggulangan Bencana, yang terdiri atas Kegiatan/Sub Kegiatan :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   a. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
   b. Penyusunan Rencana Kontijensi

c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
   b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   a. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
   b. Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
   c. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
   c. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
   d. Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
   a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
   b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
   c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutahirannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
   a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
   b. Program Penanggulangan Bencana;
   c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Target capaian pembangunan Tahun 2024 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas

FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	2024
9	**Penanggulangan Bencana**		
09.01	Terbangunnya budaya sadar bencana (kelompok)	kelompok	15
09.02	Meningkatnya rapid respon (waktu kecepatan ke tempat bencana/jam)	jam	1,5
09.03	Meningkatnya tingkat pemulihan pasca bencana non manusia (%)	(%)	100

Rencana Kerja BPBD Tahun 2025

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8,736,561,260**				**8,953,191,500**
1.05.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**5,414,427,933**				**5,523,191,500**
1.05.01.2.01	Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				108,744,682	APBD			116,000,000
1.05.01.2.01.0002	Koordianasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung Mas	20 Dokumen	2,857,140			20 Dokumen	4,000,000
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas	40 Dokumen	4,697,520			40 Dokumen	6,000,000
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas	40 Dokumen	4,697,520			40 Dokumen	6,000,000
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung Mas	12 Laporan	96,492,502			12 Laporan	100,000,000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,486,772,040	APBD			3,486,772,040
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung Mas	44 Orang	3,486,772,040			44 Orang	3,486,772,040
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				265,349,220	APBD			253,523,320
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Gunung Mas	58 Stell	71,825,900			58 Stell	60,000,000
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunung Mas	19 Kali	193,523,320			19 Kali	193,523,320
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				585,938,381	APBD			618,182,140
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	3 Paket	5,874,120			3 Paket	7,000,000
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	5 Paket	69,881,868			5 Paket	80,000,000
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	4 Paket	40,769,968			4 Paket	50,000,000
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	3 Paket	25,774,200			3 Paket	30,000,000
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	1460 Dokumen	11,182,140			1460 Dokumen	11,182,140
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	1 Paket	29,953,085			1 Paket	30,000,000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi baik itu di Propinsi, Pusat dan Dalam Daerah	Kab. Gunung Mas	12 Bulan	402,503,000			12 Bulan	410,000,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				479,026,570	APBD			523,714,000
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunung Mas	1 Laporan	7,000,000			1 Laporan	10,000,000
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	3 Laporan	63,714,000			3 Laporan	63,714,000
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	2 Laporan	408,312,570			2 Laporan	450,000,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				488,597,040	APBD			525,000,000
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gunung Mas	21 Unit	237,792,628			21 Unit	250,000,000
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunung Mas	29 Unit	22,575,180			29 Unit	25,000,000
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunung Mas	1 Unit	28,229,232			1 Unit	50,000,000
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunung Mas	1 Unit	200,000,000			1 Unit	200,000,000

1.05.03	**Program Penanggulangan Bencana**				**2,204,781,795**				**2,120,000,000**
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150,000,000				150,000,000
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kab. Gunung Mas	100 Orang	150,000,000			100 Orang	150,000,000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				909,102,789	APBD			935,000,000
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab. Gunung Mas	35 Orang	15,336,315			35 Orang	20,000,000
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Gunung Mas	1 Dokumen	450,000,000			1 Dokumen	450,000,000
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab. Gunung Mas	100 Orang	22,163,404			100 Orang	25,000,000
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Gunung Mas	4 Unit	136,463,600			4 Unit	140,000,000
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai	Kab. Gunung Mas	2 Laporan	285,139,470			2 Laporan	300,000,000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				464,239,174	APBD			390,000,000
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Gunung Mas	1 Dokumen / 14 Hari	52,887,367			1 Dokumen / 14 Hari	40,000,000
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Gunung Mas	12 Orang	411,351,807			12 Orang	350,000,000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				681,439,832	APBD			645,000,000
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kab. Gunung Mas	12 Orang	42,879,200			12 Orang	45,000,000
1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Gunung Mas	1 Dokumen	150,000,000			1 Dokumen	150,000,000
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Gunung Mas	2 Kegiatan	488,560,632			2 Kegiatan	450,000,000
1.05.04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**				**1,117,351,532**				**1,310,000,000**
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				356,880,238	APBD			460,000,000
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kab. Gunung Mas	2 Dokumen	39,388,400			2 Dokumen	40,000,000
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	Kab. Gunung Mas	1 Laporan	200,233,638			1 Laporan	250,000,000
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa dibSecara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kab. Gunung Mas	13 Desa/Kelurahan	100,258,200			13 Desa/Kelurahan	150,000,000
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Gunung Mas	2 Dokumen	17,000,000			2 Dokumen	20,000,000
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				760,471,294	APBD			850,000,000
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran SetiapTahunnya	Kab. Gunung Mas	170 Orang	192,375,415			170 Orang	200,000,000
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kab. Gunung Mas	25 Desa/Kelurahan	311,339,003			25 Desa/Kelurahan	350,000,000
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kab. Gunung Mas	25 Dokumen	256,756,876			25 Dokumen	300,000,000

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam tahun anggaran 2025.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

CHAMPILI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660830 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS SOSIAL
Jalan Letjen Soeprapto No 06 Kuala Kurun. Kode Pos 74511
Telepon (0537) 3032751, Fax (0537) 3032768

RENJA T.A. 2025

DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerja. Dengan ini diharapkan pelaksaanaan pemerintah lebih berhasil guna dan berdaya guna, bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Kerja (RENJA) untuk Tahun Anggaran 2025, dengan maksud meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah ini terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah beserta Sumbernya berdasarkan Pagu Indikatif, Sumber Dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan yang menggambarkan pencapaian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) ini memuat kebijakan dan program/kegiatan prioritas dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini di susun dengan harapan kiranya dapat dijadikan acuan Rencana Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, terima kasih.

Kuala Kurun, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GUNUNG MAS,

JHONSON AHMAD,S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 199403 1 014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.3.1. Maksud 4
1.3.2. Tujuan 5
1.4. Sistem Matika Penulisan 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai akhir tahun dan Capaian Renstra Perangat Daerah 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13
2.2.1. Sumber Daya Manusia 13
2.2.2. Sarana dan Prasarana 15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15
2.3.1. Isu-isu Strategis 15
2.3.1. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 18
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 18

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAR DAERAH 20

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 22
3.2.1. Tujuan RENJA 22
3.2.2. Sasaran RENJA 23
3.3. Program dan Kegiatan 24

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 29

4.1. Program dan Kegiatan 29
4.1.1. Faktor-Faktor Bahan Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan 29
4.1.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan 30

BAB V. PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan yang mutlak bagi penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan tersebut merupakan refleksi dari peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, disamping pengaruh globalisasi yang harus direspon secara positif oleh pemerintah dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awalyangharus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi unit Perangkat Daerah tiap tahun dalam memprogramkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Perangkat Daerah yang fungsinya untuk memprogramkan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dalam menentukan kegiatan prioritas dan sasaran kegiatan pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun, yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang definitif. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan dengan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang–undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang–undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
14. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236).
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud :

Maksud dari Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja (RENJA), adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Satuan Kerja telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung Perencanaan tahunan Perangkat Daerah untuk memenuhi peraturan perundangan undangan tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional serta prisip–prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan Publik.

1.3.2. Tujuan :

Tujuan dari Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD ini adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam rencana operasional;
b. Terwujudnya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas;
c. Mengarahkan Proses penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah;
d. Mengkaji kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Millenium Development Goals (MDGs);
e. Instrumen bagi Dinas untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan fungsi urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
f. Instrumen bagi Dinas untuk mengukur capaian target kinerja Program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi Dinas untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
h. Sebagai acuan LPPD kepada Pemerintah Daerah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai akhir tahun dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
2.3. Isu–isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan akhir tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD.

Metode pengukuran Kinerja program yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator input, output maupun outcome dari seluruh kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa – masa mendatang.

Pelaksanaan tugas serta kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 cukup optimal, hal tersebut terlihat dari hasil pencapaian kinerja beberapa kegiatan yang terlaksana / terealisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas memiliki beberapa fungsi antara lain :

1. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Bupati;

b. Penetapan kebijakan, penyusunan, perencanaan, kerjasama dan pembinaan di bidang sosial skala Kabupaten;
c. Identifikasi dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
d. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PMKS);
e. Penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan tenega pekerja sosial, penganugerahan tanda kehormatan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
f. Penanggulangan korban bencana skala Kabupaten, pengumpulan uang dan barang;
g. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
h. Pelaksanaan program/kegiatan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
i. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas mengelola anggaran dari APBD Perubahan Kabupaten Gunung Mas untuk Alokasi Anggaran Belanja Operasi sebesar **Rp. 7.371.869.482,-** (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu)* dan Anggaran Belanja Modal sebesar **Rp. 262.831.047**,- *(Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Satu Ribu Empat Tujuh Rupiah).*

Penyerapan anggaran Belanja Operasi dengan jumlah pagu angaran sebesar **Rp. 7.093.520.999,-** *(Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah),* atau sekitar 96,24 %.

Dan Penyerapan anggaran Belanja Modal dengan jumlah **Rp. 253.385.700,-** *(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah*, atau sekitar 96,40 %. Berikut secara terperinci dapat dilihat pada tabel :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon sebagai berikut :

- Eselon II.b	=	1	orang
- Eselon III.a	=	1	orang
- Eselon III.b	=	3	orang
- Eselon IV.a	=	9	orang
Jumlah	**=**	**14**	**orang**

Jumlah Pengawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

- Sarjana (S1)	=	6	orang
- Sarjana (S2)	=	13	orang
- SLTA	=	6	orang
- SLTP	=	0	orang
Jumlah	**=**	**25**	**orang**

Berdasarkan unit kerja yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- Bagian Sekretariat	=	9	orang
- Bidang PJS	=	5	orang
- Bidang FM	=	6	orang
- Bidang RS	=	5	orang
Jumlah	**=**	**25**	**orang**

Sedangkan menurut golongannya adalah sebagai berikut :

- Golongan IV	=	5	orang
- Golongan III	=	17	orang
- Golongan II	=	3	orang
Jumlah	**=**	**25**	**orang**

Selain jumlah di atas terdapat pula pegawai kontrak sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut:

- S-1	=	6	orang
- SLTA	=	4	orang
- SMPS	=	2	orang
Jumlah	**=**	**12**	**orang**

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Ruang.

Gol/ Ruang	USIA (Tahun)														KET
	≤ 30		31 – 40		41 – 45		46- 50		51 – 55		≥ 55		JUMLAH		
	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**	-	
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**	-	
IV/a	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	**1**	**1**	
III/d	-	-	1	2	1	2	2	1	1	2	-	-	**5**	**7**	
III/c	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**	
III/b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**	-	
III/a	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	**2**	**1**	
II/d	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	**1**	**1**	
II/c	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**	
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JLH....	**-**	**-**	**2**	**4**	**3**	**5**	**-**	**4-**	**3**	**2**	**-**	**-**	**12**	**13**	

2. Menurut Pangkat / Golongan

PANGKAT / GOLONGAN																				
	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV				
	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh
Jlh	-	-	-	-	**-**	-	-	1	2	**3**	3		3	1	**17**	3	1	1	-	**5**
Jlh	**-**					**3**					**17**					**5**				

3. Munurut Jabatan

Funsional		Pelaksana		Eselon IV.a		Eselon III.a		Eselon III.b		Eselon II.c		JUMLH	
(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)
		5	6	5	4	1	2	1	-	1	-	15	9
JUMLAH		**11**		**9**		**3**		**1**		**1**		**25**	

4. Menurut Pendidikan

IJAZAH / STTB							
	SD	SLTP	SLTA	D.III	S.1	S.2	Jumlah
	-	-	6	-	13	6	**25**
Jumlah	-	-	**6**	**-**	**13**	**6**	**25**

5. Menurut Status Kepegawaian (Termasuk Pegawai Kontrak)

STATUS								
	PNS		CPNS		PTT		JUMLAH	
	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)
	12	13	-	-	6	6	18	19
Jumlah	25		-		12		37	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang operasional kantor Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Tanah kantor : Luas
b. Gedung Kantor : Luas
c. Kendaraan :
   - Roda 4 (Empat) : 3 (Tiga) Buah
   - Roda 2 (Dua) : 13 (Sebelas) Buah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Isu – isu Strategis

Secara umum isu-isu Strategis sifatnya refleksi dari hasil kajian terhadap beberapa faktor antara lain :

1. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan Masyarakat.

   a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat.

      Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah sosial masih tergantung dari bantuan, banyaknya masyarakat penyandang kesejahteraan sosial belum dapat tertangani secara maksimal dikarenakan mobilitasi penduduk dari kota lain misalnya seperti gelandangan, psikotis, dan lain sebagainya, Sedangkan data bantuan seperti masih tergantung dari pusat.

Dalam menangani urusan sosial terutama pada kaum Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adaanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor.

Adanya pendataan berbasis system informasi Teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga kewilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

2. Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang, dan ancaman baik yang bersifat *existing* maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang. Dalam penyelenggaraan kegiatan program Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yang menjadi isu strategis dan permasahan mendasar pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah:

a). Permasalahan :

1. Kurangnya tenaga Pegawai / karyawan sehingga suatu pekerjaan menumpuk terkadang terbengkalai;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan, seperti kendaraan operasional, perumahan pegawai dan lain-lain.

b). Hambatan :

Hambatan dalam birokrasi sering terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dengan demikian isu-isu strategis pada dasarnya menjadi gambaran komprehensif mengenai *existing* pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas saat ini sekaligus menjadi agenda dimana pemikiran, tenaga, dan anggaran akan dicurahkan guna memberikan kontribusi dalam memperbaiki program.

2.3.2. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Trend global perubahan di segala bidang dalam banyak hal, mendorong Dinas/Badan menuju ke arah penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi kepada misi pemberdayaan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai bidang, demi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dilandasi oleh penghormatan dan perlindungan atas hak – hak asasi manusia;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas (RTRW) Kabupaten merupakan salah satu pedoman dalam perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal pemanfaatan ruang.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Gunung Mas Renstra Kabupaten Gunung Mas 2019 – 2024 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Gunung Mas, merupakan acuan bagi Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit Kerja dalam menyusun rencana program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sampai dengan lima tahunan. Hal ini dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial dalam menyusun progam – program Dinas dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Peraturan Perundang-undangan;
6. Kepastian Hukum.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak baik terpisah dalam tahapan penyusunanRancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan di propinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi–asosiasi, Lembaga Pendidikan maupun dari OPD Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Unit Kerja Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Kabupaten, dari penilitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Kecendrungan pergeseran interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat di tandai dengan semakin meningkatnya peranan sektor swasta dan Lembaga – lembaga swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan tugas – tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh pemerintah atau sektor publik.

Kenyataan ini disatu sisi merupakan perkembangan baru yang perlu dicermati dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain hal tersebut menunjukkan fakta adanya keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah untuk memenuhi aneka ragam pelayanan publik.

Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu melakukan inovasi kebijakan dan praktek administrasi publik yang baru, yang lebih mampu menjawab tantangan perkembangan interaksi sosial tersebut, melalui kerjasama atau kolaborasi yang efektif dengan sektor swasta dan masyarakat (*society)* pada umumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Kebijakan pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ditegaskan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada keadaan yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu :

1). Kemiskinan;
2.) Ketunaan;
3). Kecacatan;
4). Keterlantaran,
5). Ketunaan Sosial / penyimpangan perilaku;
6). Korban bencana, korban tindak kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi.

Masalah kemiskinan merupakan program prioritas secara nasional, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas mengacu pada kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus dilaksanakan sinergis dan terintegrasi.

Disamping masalah kemiskinan masalah-masalah lainnya yang mengarah pada upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut di atas, juga menjadi prioritas pembangunan nasional, maka penangnan masalah tersebut juga menjadi tujuan dan sasaran program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dari keenam prioritas kebijakan Nasional serta sasaran Pembangunan Milenium (MDGs) yang di jabarkan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telaah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1.

TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

NO	PRIORITAS NASIONAL	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PROGRAM SKPD	
1	*2*	*3*	*4*	
1.	**KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	1.	Program Pemberdayaan Sosial
			2.	Program Rehabilitasi Sosial
			3.	Program Perlindungan Sosial
			4.	Program Penanganan Bencana

TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI

MISI :

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur secara adil dan proporsional;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan sumber daya saing ekonomi wilayah;
4. Mempercepat reformasi birokrasi;
5. Penegakkan dan penjaminan kepastian hukum;
6. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal;
7. Pembangunan berkelanjutan.
8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.2.1. TUJUAN RENJA

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan yang ingin di capai Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah :

1. Mewujudkan Pemberdayaan Fakir Miskin, Penerima Bantuan dan Program Pengentasan Kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran;

2. Mewujudkan kaum Penyandang Masalah Kesejahteraan Ssosial (PMKS) masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakaat;

3.2.2. Sasaran RENJA

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Terlaksananya Pendampingan dan Penyaluran Bantuan untuk warga miskin;
2. Meningkatnya penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

TABEL : 3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	*2*	*3*	*4*
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial.	Menggambarkan suatu hasil dari serangkaian rencana dan pekerjaan yang dilaksanakan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan bathin.	Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satuataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gununung Mas yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.

Perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.
3. Prioritas peningkatan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang diwujudkan dalam kegiatan.

4.1.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Rancangan Renja Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Pada tahun 2025 direncanakan ada 5 (Lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 33 sub kegiatan, adapun tujuan dan Rencana Kerja tahun 2025 sasaran program/kegiatan 2025 ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang terlampir :

BAB V
P E N U T U P

Demikianlah Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dalam tahun anggaran 2025.

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggung-jawabkan akuntabilitasnya.

Kuala Kurun, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,

JHONSON AHMAD,S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 199403 1 014

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 berdasarkan sumber dana APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
A. BAGIAN SEKRETARIAT					
1. Terselenggaranya kegiatan pelayanan Administrasi dengan baik pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas	1. Administrasi Kepegawaian	1. Terhimpunnya data kepegawaian 2. Tersediannya daftar urut Kepegawaian DUK /data kepegawaian 3. Terselenggaranya pemberian DP3 tepat waktu 4. Pengusulan kenaikan pangkat/golongan tepat waktu 5. Pengusulan kenaikan gaji berkala tepat waktu 6. Kehadiran pegawai tepat waktu.	1. Mengumpulkan data kepegawaian 2. Menyusun DUK 3. Memberikan pembinaan kepada pegawai 4. Membuat daftar masa kenaikan pangkat dan masa kenaikan gaji berkala 5. Meningkatkan disiplin pegawai	1. Meningkatkan pelayanan Kinerja Administrasi kepegawaian	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Pelayanan Administrasi Tata Laksana (pelayanan umum)	1. Tersedianya buku inventaris barang. 2. Tersedianya kartu inventaris barang. 3. Adanya kartu barang inventaris ruangan 4. Perawatan dan penghapusan barang 5. Tersedianya barang kebutuhan kantor.	1. Membuat bukti inventaris barang inventaris. 2. Membuat buku golongan barang inventaris. 3. Membuat barang inventaris. 4. Melakukan perawatan dan penghapusan barang 5. Pengadaan Barang.	1. Melaksanakan penataan administrasi barang inventaris kantor. 2. Membuat rencana kebutuhan	
	3. Administrasi Keuangan	1. Tersedianya RKA dan DPA 2. Permintaan pembayaran dan pertanggung-jawaban tepat waktu 3. Adanya pembukuan bukti penerimaan dan pengeluaran	Menyusun RKA dan DPA Menyusun rencana tahap permintaan /pembayaran gaji (per triwulan). Mencatat / membukukan keuangan.		
	4. Administrasi Perlengkapan (sarana dan prasarana)	1. Pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat waktu dan memuaskan	1. Menempatkan Pegawai yang sesuai dengan keterampilan.	1. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada	

(- 3 -)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. BIDANG SOSIAL					
1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat potensi sumber kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan sistem dan usaha Kesejahteraan sosial.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 2. Meningkatkan peran aktif organisasi sosial masyarakat dibidang Kesos 3. Tersedianya data dan informasi tentang PMKS 4. Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat 5. Tersedianya sarana dan informasi usaha kesejahteraan berupa booklet, leaplet, brosur	1. Pemantapan data PMKS dan PSKS serta penyebarluasan informasi pembangunan Kesos 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam UKS secara terarah, terorganisasi dan dasar swadaya dan lembaga atas ke gotong royongan. 3. Meningkatkan koordinasi intern dan antar lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang semakin adil dan merata.	1. Penyempunaan data dan pengembangan sistem informasi Kesos 2. Penyuluhan sosial 3. Parisipasi sosial masyarakat. 4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Kesos. 5. Pembinaan dan peningkatan Kesos Masyarakat.	

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
B. BIDANG SOSIAL					
2. Pemberdayaan sosial peran keluarga.	1. Terwujudnya usaha kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat	1. Tumbuh dan berkembangnya organisasi–organisasi sosial yang bergerak dibidang usaha Kesos. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Kesos	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memperluas jangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan usaha kesejahteraan sosial yang semakin adil dan merata	1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial keluarga	
3. Pemberdayaan sosial karang taruna / organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).	1. Meningkatkan derajat kesejahteraan	1. Teratasi terbentuknya penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Terciptanya lapangan kerja dan tersedianya modal usaha. 3. Meningkatkan kemampuan dalam kebutuhan hidup sehari-hari.	1. Meningkatkan ketahanan sosial keluarga. 2. Mendayagunakan potensi keluarga	1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 2. Bimbingan Kesos Keluarga (BKSK) 3. Bimbingan peningkatan UEP keluarga muda mandiri KUBE-KMM 4. KKSK	Sosialisasi tentang peran dan fungsi keluarga

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B. BIDANG SOSIAL					
4. Memulihkan kemapuan fisik mental serta meningkatkan kemandirian penyandang cacat / anak cacat.	1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial keluarga sebagai unit sosial kecil dalam tatanan kehidupan masyarakat.	1. Menurunnya jumlah keluarga yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial 2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan komunitasnya dalam pemecahan permasalahan keluarga.	1. Memantapkan kibijakan teknis dan program sosial karang taruna organisasi sosial 2. Meningkatkan kualitas serta kinerja karang taruna, organisasi dan LSM.	1. Peningkatan kemampuan manajemen organisasi dan keterampilan teknis, pelayanan sosial karang taruna, organisasi sosial/LSM	
5. Meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga fakir miskin	1. Untuk meningkatkan kualitas dan peran organisasi /LSM dan karang taruna dalam mencegah dan mengatasi masalah sosial.	1. Semakin meningkatnya kinerja karang taruna 2. Meningkatkan kemampuan keluarga dan komunitasnya dalam pemecahan permasalahan keluarga.	1. Memantapkan teknis dan standar pelayan dan kesos anak cacat melalui keluarga, masyarakatdan pusat rehabilitasi anak cacat / paca. 2. Meningkatkan kualitas serta kinerja karang taruna, organisasi dan LSM.	1. Pendataan 2. Pengembangan dan pembelajaran 3. Pelayanan kesos panti 4. Pelatihan tenaga pelayanan sosial	

Program dan kegiatan tersebut diatas telah sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta pembangunan 5 (lima) tahun terutama dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas yaitu menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	URAIAN	Lokasi	APBD		PUSAT				JUMLAH (Rp)
					KAB	PROV	DAK	DEKON	TP	BLN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
	1 ***Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				**28,500,000**						**28,500,000**
	1 Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan DPA-SKPD	Tersedianya sumberdaya air, listrik, da telpon/ Internet	Kuala Kurun	15,000,000						15,000,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapaian Laporan Kinerja	Tersedianya Dokumen Kerja Kantor	Kuala Kurun	13,500,000						13,500,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3,842,400,000**						**3,842,400,000**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kerja ASN Dinas Sosial	Tersedianya formulir dan barang-barang Cetakan	Kuala Kurun	3,800,950,000						3,800,950,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya pelaporan akhir Tahun	Kuala Kurun	2,000,000						2,000,000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Keuangan	Terlaksananya pelaporan keuangan Bulanan/Semester dan Akhir Tahun	Kuala Kurun	39,450,000						39,450,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**2,000,000**						**2,000,000**
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Inventaris	Dokumen Laporan Barang Inventaris	Kuala Kurun	2,000,000						2,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**57,000,000**						**57,000,000**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas ASN Dinas Sosial	Tercapaiannya Kebutuhan Kerja PNS	Kuala Kurun	30,000,000						30,000,000
	2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-undangan	Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial	Meningkatnya SDM Pegawai Dinas Sosial	Kuala Kurun	27,000,000						27,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**612,498,000**						**612,498,000**

	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung	Tersedianya komponen jaringan listrik dan lampu penerangan gedung kantor	Kuala Kurun	6,500,000						6,500,000
	2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gumas	152,000,000						152,000,000
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kuala Kurun	58,883,000						58,883,000
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya formulir dan barang-barang Cetakan	Kuala Kurun	14,615,000						14,615,000
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan koordinasi kedalam daerah	Kabupaten Gumas	350,000,000						350,000,000
	6	Penyediaan Bahan Material	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tersedianya Sarana Pendukung Pameran	Kuala Kurun	30,500,000						30,500,000
	7	Penyediaan bahan Bacaan dan Bahan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya Surat Kabar dan Buku Perundangan	Kuala Kurun	-						-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**294,308,000**						**294,308,000**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan benda pos lainnya	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos	Kuala Kurun	33,808,000						33,808,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PenyediaanKomponen Listrik atau Penerangan Gedung	Teredianya Komponen Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Gedung Kantor	Kuala Kurun	81,500,000						81,500,000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kuala Kurun	179,000,000						179,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**495,500,000**						**495,500,000**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas / operasional Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kuala Kurun	170,500,000						170,500,000
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor	Tersedianya Komponen Kantor	Kuala Kurun	25,000,000						25,000,000
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kantor	Kuala Kurun	300,000,000						300,000,000

		4	**Penataan Organisasi**				**33,000,000**						**33,000,000**
		5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	ANJAB dan SOP	Dokumen Anjab dan SOP	Kuala Kurun	33,000,000						33,000,000
II			***PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL***										
			Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				**0**						**0**
		1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Tersedianya KAT	Pelaksanaan KAT	Kab. Gunung Mas	0						0
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				**1,280,500,000**						**1,280,500,000**
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif untuk Petugas PSM	Penyediaan insentif dan transportasi PSM	Kab. Gunung Mas	560,500,000						560,500,000
		2	Peningkatan Kemempuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif untuk Petugas TKSK	Penyediaan insentif dan transportasi TKSK	Kab. Gunung Mas	235,000,000						235,000,000
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bansos	Tersediannya Bantuan Untuk KPM	Kab. Gunung Mas	289,500,000						289,500,000
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Karang Taruna	Penyediaan Bahan Kegiatan Karang Taruna	Kab. Gunung Mas	195,500,000						195,500,000
III			***PROGRAM REHABILITASI SOSIAL***										
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				**767,516,100**						**767,516,100**
		1	Penyediaan Permakanan	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	50,000,000						50,000,000
		2	Penyediaan Sandang	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	26,500,000						26,500,000
		3	Penyediaan Alat Bantu	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	136,180,000						136,180,000

		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	68,536,100						68,536,100
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	21,000,000						21,000,000
		6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	215,500,000						215,500,000
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	69,800,000						69,800,000
		8	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	20,000,000						20,000,000
		9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Kab. Gunung Mas	80,000,000						80,000,000
		10	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Pemulangan Orang Terlantar	Kab. Gunung Mas	80,000,000						80,000,000
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				**208,800,000**						**208,800,000**
		1	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Bahan Permakanan	Pernyediaan Permakanan Permakanan	Kab. Gunung Mas	94,300,000						94,300,000
		2	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang	Penyediaan Sandang	Kab. Gunung Mas	35,000,000						35,000,000
		3	Penyediaan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya Layanan Rujukan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Layana Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Gunung Mas	19,500,000						19,500,000
		4	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraaan	Penyediaan Kerja sama antar lembvaga dan kemitraan	Kuala Kurun	60,000,000						60,000,000

IV			***Program Pelindungan dan Jaminan Sosial***									
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				**1,380,000,000**					**1,380,000,000**
		1	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Tersedianya Data Fakir Miskin Yang Akurat	Kab. Gunung Mas	1,350,000,000					1,350,000,000
		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Tersedianya Data Fakir Miskin Yang Akurat	Kab. Gunung Mas	30,000,000					30,000,000
V			***PROGRAM PENANGANAN BENCANA***									
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota				**195,000,000**					**195,000,000**
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersedianya Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksdanaan Taruna Siaga Bencana	Penyediaan koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung Mas	195,000,000					195,000,000
			Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				199,000,000					199,000,000
		1	Penyediaan Makanan	Tersedianya Bahan Makanan	Penyediaan Makanan	Kab. Gunung Mas	199,000,000					199,000,000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN SKPD TAHUN 2025							**9,396,022,100**					**9,396,022,100**

Kuala Kurun, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,

JHONSON AHMAD,S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 199403 1 014

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 KABUPATEN GUNUNG MAS

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS

Kode	Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Keluaran (output) Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
		Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**28,500,000**			**31,500,500**
	1	Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA dan DPA-SKPD	Tersedianya sumberdaya air, listrik, da telpon/ Internet	Lancarnya keg. perkantoran & akses informasi elektronik	Kuala Kurun	15,000,000		100 %	16,500,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapaian Laporan Kinerja	Tersedianya Dokumen Kerja Kantor	Terlaksana laporan kinerja kantor	Kuala Kurun	13,500,000		100 %	15,000,500
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**3,842,400,000**			**3,991,950,000**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kerja ASN Dinas Sosial	Tersedianya formulir dan barang-barang Cetakan	Kelancaran pembuatan dokumen & administrasi	Kuala Kurun	3,800,950,000		100 %	3,950,000,000
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya pelaporan akhir Tahun	Tersediannya Lapporan Akhir Tahun	Kuala Kurun	2,000,000		100 %	2,500,000
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Keuangan	Terlaksananya pelaporan keuangan Bulanan/Semester dan Akhir Tahun	tersedianya dokumen laporan keuangan	Kuala Kurun	39,450,000		100 %	39,450,000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					**2,000,000**			**3,000,000**
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Inventaris	Dokumen Laporan Barang Inventaris	Dokumen Laporan Barang Inventaris	Kuala Kurun	2,000,000		100 %	3,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**57,000,000**			**47,000,000**
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penyediaan Pakaian Dinas ASN Dinas Sosial	Tercapaiannya Kebutuhan Kerja PNS	25 Pakaian Serta Kelengkapannya	Kuala Kurun	30,000,000		100 %	20,000,000
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan-undangan	Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial	Meningkatnya SDM Pegawai Dinas Sosial	Tersediannya Pakaian Dinas ASN	Kuala Kurun	27,000,000		100 %	27,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					**612,498,000**			**625,998,000**

		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/penerangan gedung	Tersedianya komponen jaringan listrik dan lampu penerangan gedung kantor	Tercukupi penerangan bangunan gedung kantor	Kuala Kurun	6,500,000		100 %	7,000,000
		2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Gumas	152,000,000		100 %	165,000,000
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kelancaran administrasi Kantor	Kuala Kurun	58,883,000		100 %	58,883,000
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya formulir dan barang-barang Cetakan	Kelancaran pembuatan dokumen & administrasi	Kuala Kurun	14,615,000		100 %	14,615,000
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan konsultasi	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan koordinasi kedalam daerah	Kelancaran pelaksanaan koordinasi luar daerah	Kabupaten Gumas	350,000,000		100 %	350,000,000
		6	Penyediaan Bahan Material	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Tersedianya Sarana Pendukung Pameran	Kelancaran Kegiatan Pameran	Kuala Kurun	30,500,000		100 %	30,500,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**294,308,000**			**296,500,000**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan benda pos lainnya	Tersedianya jasa surat menyurat dan benda pos	Kelancaran pelayanan surat menyurat	Kuala Kurun	33,808,000		100 %	35,000,000
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PenyediaanKomponen Listrik atau Penerangan Gedung	Teredianya Komponen Jaringan Listrik dan Lampu Penerangan Gedung Kantor	Tercukupi Penerangan Gedung Kantor	Kuala Kurun	81,500,000		100 %	82,500,000
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Peralatann kantor terawat secara rutin/berkala	Kuala Kurun	179,000,000		100 %	179,000,000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**495,500,000**			**557,500,000**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas / operasional Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas terawat secara rutin/berkala	Kuala Kurun	170,500,000		100 %	177,500,000
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor	Tersedianya Komponen Kantor	Terlaksannya Belanja Pemeliharaan Komponen Alat Kantor	Kuala Kurun	25,000,000		100 %	30,000,000
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	Kuala Kurun	300,000,000		100 %	350,000,000
			Penataan Organisasi					**33,000,000**			**33,000,000**
		1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	ANJAB dan SOP	Dokumen Anjab dan SOP	Dokumen Anjab dan SOP	Kuala Kurun	33,000,000		100 %	33,000,000
II			***PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL***								
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					**1,280,500,000**			**1,264,019,364**
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif untuk Petugas PSM	Penyediaan insentif dan transportasi PSM	Tersedianya insentif dan transportasi PSM	Kab. Gunung Mas	560,500,000		100 %	560,500,000
		2	Peningkatan Kemempuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya insentif untuk Petugas TKSK	Penyediaan insentif dan transportasi TKSK	Tersedianya insentif dan transportasi TKSK	Kab. Gunung Mas	235,000,000		100 %	224,119,364

		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga Penerima Manfaat Penerima Bansos	Tersediannya Bantuan Untuk KPM	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat	Kab. Gunung Mas	289,500,000		100 %	289,500,000
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Karang Taruna	Penyediaan Bahan Kegiatan Karang Taruna	Tersediannya Data Karang Taruna	Kab. Gunung Mas	195,500,000		100 %	189,900,000
III			***PROGRAM REHABILITASI SOSIAL***								
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					**767,516,100**			**796,715,000**
		1	Penyediaan Permakanan	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Terpenuhinya Kebutuhan Penyandang Kesejahteraan Sosial	Kab. Gunung Mas	50,000,000		100 %	55,500,000
		2	Penyediaan Sandang	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang Yang Diserahkan Untuk Masyarakat	Kab. Gunung Mas	26,500,000		100 %	29,000,000
		3	Penyediaan Alat Bantu	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Tersediannya Barang Yang di Serahkan Kepada Masyarakat	Kab. Gunung Mas	136,180,000		100 %	145,000,000
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial Orang Terlantar	Kab. Gunung Mas	68,536,100		100 %	71,500,000
		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Tersedianya Bimbingan Fisik Mental dan Spritual dan Sosial	Kab. Gunung Mas	21,000,000		100 %	23,000,000
		6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Tercapaiannya Penanganan Bimbingan Sosial Bagi Keluarga	Kab. Gunung Mas	215,500,000		100 %	215,500,000
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Tercapainya Penanganan Fasilitas Pembuatan NIK,Akta Kelahiran,Surat Nikah	Kab. Gunung Mas	69,800,000		100 %	72,115,000
		8	Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Terlaksannya Peningkatan Layan Pendidikan Bagi Anak	Kab. Gunung Mas	20,000,000		100 %	23,550,000
		9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar Yang di Bina	Meningkatnya Fungsi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Rasio Anak Terlantar Yang di Bina	Terlaksananya Penelusuran Keluarga	Kab. Gunung Mas	80,000,000			81,550,000
		10	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan	Penyediaan Layanan Rujukan Pemulangan Orang Terlantar	Terlaksananya Layanan Rujukan Pemulangan Orang Terlantar	Kab. Gunung Mas	80,000,000		100 %	80,000,000

			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					**208,800,000**			**214,850,000**
		1	Penyediaan Permakanan	Tersedianya Bahan Permakanan	Pernyediaan Permakanan Permakanan	Tersediannya Bahan Permakanan	Kab. Gunung Mas	94,300,000		100 %	94,300,000
		2	Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang	Penyediaan Sandang	Tersedianya Bahan Sandang	Kab. Gunung Mas	35,000,000		100 %	37,550,000
		3	Penyediaan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya Layanan Rujukan Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Layana Pembekalan Kesehatan di Luar Panti	Terlaksananya Layanan Pembekalan Bagi Lanjut Usia	Kab. Gunung Mas	19,500,000		100 %	23,000,000
(1)			*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
		4	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Tersedianya Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraaan	Penyediaan Kerja sama antar lembvaga dan kemitraan	tersedianya Bahan dana kerja sama antar lembaga dan kemitraan	Kuala Kurun	60,000,000		100 %	60,000,000
IV			***Program Pelindungan dan Jaminan Sosial***								
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					**1,380,000,000**			**1,490,000,000**
		1	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Tersedianya Data Fakir Miskin Yang Akurat	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Kab. Gunung Mas	1,350,000,000		100 %	1,455,000,000
		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Tersedianya Data Fakir Miskin Yang Akurat	Tersedianya Data DTKS Yang Valid	Kab. Gunung Mas	30,000,000		100 %	35,000,000
V			***PROGRAM PENANGANAN BENCANA***								
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota					**195,000,000**			**205,000,000**
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersedianya Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksdanaan Taruna Siaga Bencana	Penyediaan koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tersediannya Data Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Gunung Mas	195,000,000		100 %	205,000,000
			Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					**199,000,000**			**215,500,000**
		1	Penyediaan Makanan	Tersedianya Bahan Makanan	Penyediaan Makanan	Tersedianya Penyaluran Bahan Makanan Untuk Masyarakat Korban Bencana	Kab. Gunung Mas	199,000,000		100 %	215,500,000
JUMLAH TOTAL ANGGARAN SKPD TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026								**9,396,022,100**			**9,772,532,864**

Kuala Kurun,31 Januari 2024
KEPALA DINAS,

JHONSON AHMAD,S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 199403 1 014

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS

OPD : DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
				(Rp)	%	
1	*2*		*6*	*7*	*8*	*9*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	1	***Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**37,821,980.00**			**349,700**
	1	Koordinasidan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,476,900.00			81,650
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22,345,080.00			268,050
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,743,112,720.00**			**122,702,745**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,700,201,256.00			121,697,795
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	42,911,464.00			1,004,950
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**19,916,000.00**			**2,000**
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,916,000.00			2,000

		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	**81,723,000.00**			**24,000,000**
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	54,723,000.00			0
	2	Bimbingan Teknis Implemntasi Peraturan Perundang-undangan	27,000,000.00			24,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**734,161,150.00**			**7,337,352**
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,842,500.00			33,500
	2	Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor	262,831,047.00			9,445,347
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56,748,893.00			13,893
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18,821,110.00			(757,890)
	5	Penyediaan Bahan Material	4,689,600.00			1,365,750
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	386,228,000.00			(2,763,248)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**211,817,855.00**			**12,359,266**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33,570,264.00			786,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65,985,000.00			6,448,467
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112,262,591.00			5,124,799
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**247,381,260.00**			**4,126,268**
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154,310,979.00			3,570,587

		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,473,281.00			523,281
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69,597,000.00			32,400
		4	**Penataan Organisasi**	**34,741,864.00**			**5,630,122**
		5	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	34,741,864.00			5,630,122
II			***PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL***				
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**1,288,447,916.00**			**4,964,800**
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	419,891,200.00			5,630,122
		2	Peningkatan Kemempuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	267,425,708.00			(3,104,600)
		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	394,119,108.00			5,069,116
		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	207,011,900.00			15,268,180
III			***PROGRAM REHABILITASI SOSIAL***	***1,547,216,628.00***			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**431,427,964.00**			**48,391,200**
		1	Penyediaan Permakanan	45,845,200.00			1,412,600
		2	Penyediaan Sandang	13,302,700.00			2,147,700
		3	Penyediaan Alat Bantu	212,139,000.00			24,372,600
		4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52,603,300.00			3,937,800

		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9,567,200.00			2,380,400
		6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	732,600.00			200
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	908,400.00			0
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1,481,300.00			1,481,300
		9	PemberianPelayanan Penelusuran Keluarga	11,800,800.00			5,774,800
		10	Pemberian Layanan Rujukan	83,047,464.00			6,883,800
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**1,115,788,664.00**			**14,635,425**
		1	Penyediaan Permakanan	970,267,100.00			5,009,025
		2	Penyediaan Sandang	61,792,200.00			937,200
		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4,186,400.00			146,400
		4	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	79,542,964.00			8,542,800
IV			***Program Pelindungan dan Jaminan Sosial***				
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**483,297,556.00**			**2,398,356**
		1	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	438,519,556.00			1,765,356
		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44,778,000.00			633,000

V			***PROGRAM PENANGANAN BENCANA***	***327,846,600.00***			***23,663,900***
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/Kota	**275,454,600.00**			**15,202,400**
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	170,670,600.00			15,202,400
			Perlindungan Sosial Korban Bancana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**52,392,000.00**			**8,461,500**
		1	Penyediaan Makanan	52,392,000.00			8,461,500
TOTAL				**7,652,700,529.00**			**287,793,830**

Kuala Kurun,31 Januari 2024

KEPALA DINAS,

JHONSON AHMAD,S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 199403 1 014

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, merupakan dokumen perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan target sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta evaluasi hingga Tahun Anggaran 2022.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja pemerintahan, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, terima kasih.

Kuala Kurun, Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RICHARD, S.T.
Pembina Utama Madya
NIP 196909301995031003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **7**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **37**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38

3.3 Program dan Kegiatan 39

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **49**

BAB V. PENUTUP **66**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah, tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan

II. Hasil Evaluasi Renja Tahun lalu

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

IV. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

1.2. Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rayat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. Sekretaris Daerah

II. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
    1. Bagian Pemerintahan
        a. Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan
        b. Kerjasama dan Otonomi Daerah
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
        a. Bina Mental Spiritual
        b. Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
    3. Bagian Hukum
        a. Perundang-undangan
        b. Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Informasi

III. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
        a. Perekonomian, SDA dan Pembinaan BUMD dan BLUD
        b. Penyusunan Program
        c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

IV. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Umum
a. Sub Bagian Protokol, Komunikasi dan Dokumentasi
b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
2. Bagian Organisasi
a. Kelembagaan dan Analisis Jabatan
b. Pelayanan Publik dan Tata Laksana
c. Kinerja dan Reformasi Birokrasi

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Renja Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan

Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki 4 program, 22 kegiatan dan 67 sub kegiatan, yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan:
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyediaan Bahan/Material
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala

10. Fasilitasi Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah
    a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
    b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
    c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

11. Penataan Organisasi;
    a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
    d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
    a. Fasilitasi Keprotokolan

b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

II. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, dengan kegiatan:
1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santuan Tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
   a. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

III. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, denga Kegiatan:
1. Administrasi Tata Pemerintahan
   a. Penataan Administrasi Pemerintahan
   b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
   c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
   a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
   b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
   c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.
   a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
   b. Fasilitasi Bantuan Hukum
   c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
   a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

IV. Program Perekonomian Dan Pembangunan, dengan kegiatan:
1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   a. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
   b. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
   a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Dalam pengukuran kinerjanya, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indicator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	> 90 % sampai dengan 100 %	Berhasil
III	> 80 % sampai dengan 90 %	Cukup Berhasil
IV	Sampai Dengan 80 %	Kurang Berhasil

Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Realisasi (%)	Capaian Target
1	2	3	4	5	6
1. Terwujudnya pelayanan urusan hukum	1. Terwujudnya pelayanan urusan hukum 2. Mengkoordinasikan urusan publikasi, sosialisasi, serta mengumpulkan bahan dokumentasi produk-produk hukum dan pelayanan perpustakaan hukum dan memperhatikan permasalahan HAM 3. Pengembangan penyelesaian sengketa hukum, memberikan bantuan dan perlindungan hukum	98%	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	97,25	99,23
2. Terwujudnya pelayanan urusan Organisasi	1. Melakukan analisa jabatan dan kelembagaan 2. Menyusun ketata laksanaan dan pelaporan kepegawaian 3. Mendayagunakan aparatur dan	98%	Penataan Organisasi Administrasi Kepegawaian	96,86 93,37	98,84 95,28

	kepegawaian		Perangkat Daerah		
3. Terwujudnya pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarkatan	1. Pengembangan pembinaan agama, pendidikan dan kebudayaan 2. Pengembangan administrasi pemuda, olah raga dan seni 3. Pengembangan administrasi pembinaan kepada kesejahteraan masyarakat	98%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94,03	95,95
4. Terwujudnya pelayanan administrasi perekonomian dan sumber daya alam	1. Pengembangan administrasi pengembangan dan potensi daerah 2. Pengembangan administrasi sara dan prasana perekonomian 3.Pengembangan aministrasi produksi dan distribusi	98%	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	96,92	98,90
5. Terwujudnya pelayanan administratif pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien dan terpercaya	1. Menjadikan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai pusat keunggulan (center of excelent) pengadaan di Kabupaten Gunung Mas	98%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	98,42	100,43
6. Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan umum.	1. Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah 2. Meningkatnya ketertiban umum dan kerjasama antar daerah 3. Meningkatnya pelayanan penanganan sengketa dan tata batas 4. Meningkatnya pelayanan administrasi pendataan sertifikat tanah milik pemda Gunung Mas, pelayanan administrasi pengusulan sertifikat bagi permohonan masyarakat miskin, pelayanan administrasi pembebasan tanah	98%	Administrasi Tata Pemerintahan PenerbitanIzin Membuka Tanah	96,17 84,69	98,13 86,42
7. Terwujudnya pelayanan Administrasi Pembangunan	1. Pengembangan administrasi perencanaan dan program 2. Pengembangan administrasi pengendalian dan pelaporan pembangunan 3. Pengembangan administrasi monitoring dan evaluasi pembangunan	98%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	79,14	80,76
8. Terwujudnya pelayanan pengelolaan urusan umum	1. Meningkatnya pelayanan urusan rumah tangga dan tata usaha	98%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,95	100,97

			Penyediaan JasaPenunjag Urusan Pemerintahan Daerah	96,77	98,74
	2. Meningkatnya pelayanan kebutuhan perlengkapan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	98,41	100,42
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	102,04
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,98	84,67
	3. Meningkatnya pelayanan protokoler dan perjalanan		Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	97,96	99,96
9. Terwujudnya pelayanan pengelolaankeuangan Sekretariat Daerah	1. Meningkatnya pelayanan verifikasi keuangan	98%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,18	92,02
	2. Meningkatnya pelayanan Perbendaharaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,86	98,84
	3. Meningkatnya pelayanan akuntansi dan pelaporan		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	89,82	91,65
Rata – rata persentase (%) capaian				**93,82**	**95,74**

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.09	PROGRAM PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase luas lahan bersertifikat	10.216.225.100	676.572.302	283.456.928	278.133.835	98,12	246.187.484	1.200.893.621	11,75
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten	10.216.225.100	676.572.302	283.456.928	278.133.835	98,12	246.187.484	1.200.893.621	11,75
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	10.216.225.100	676.572.302	283.456.928	278.133.835	98,12	246.187.484	1.200.893.621	11,75
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		45.375.000		45.375.000	23.217.403	51,17	-	23.217.403	51,17
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		45.375.000	-	45.375.000	23.217.403	51,17	-	23.217.403	51,17
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	terlaksananya tindak lanjut dan evaluasi	45.375.000	-	45.375.000	23.217.403	51,17	-	23.217.403	51,17
2.16.02.2.01.0002	Pelayanan Informasi Publik	PMPZI Kabupaten Gunung Mas	45.375.000	-	45.375.000	23.217.403	51,17	-	23.217.403	51,17
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Terlaksanaanya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	118.149.371.459	67.727.557.343	28.595.154.612	27.616.749.330	96,58	24.780.940.436	120.125.638.009	101,67
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Terlaksanaanya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.072.703.379	1.390.899.410	363.144.096	345.296.363	95,08	350.163.425	2.086.356.198	67,90
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	387.872.350	128.177.845	52.287.000	52.128.563	99,72	46.534.000	227.550.408	58,67
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54.556.030	23.752.500	8.596.080	8.002.500	93,09	10.077.264	41.832.264	76,68
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	54.556.030	23.441.500	8.596.080	8.595.500	99,99	10.077.264	42.114.264	77,19
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	54.556.030	21.617.240	7.572.000	7.568.400	99,95	7.572.000	36.757.640	67,38
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	55.493.630	21.097.280	7.572.000	7.555.500	99,78	7.572.000	36.224.780	65,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah	2.465.669.309	1.172.113.045	278.521.336	261.433.900	93,86	268.329.897	1.701.876.842	69,02
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**	**41.385.045.560**	**25.052.065.879**	**9.128.924.557**	**8.296.310.889**	**90,88**	**8.988.913.841**	**42.317.289.809**	**102,30**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40.810.964.158	24.799.534.243	9.104.595.397	8.272.826.889	90,86	8.973.489.361	41.954.970.493	102,80
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	295.363.200	167.254.136	16.576.920	16.555.200	99,87	7.752.240	191.561.576	64,81
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	278.518.202	175.277.500	7.752.240	7.728.800	99,69	7.752.240	190.757.741	68,49
4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Peran**	**Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1.467.917.139**	**351.888.015**	**84.018.600**	**83.010.400**	**98,80**	**84.018.600**	**518.917.015**	**35,35**
4.01.01.2.03.0002	Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	362.535.654	67.557.080	42.602.800	41.987.200	98,56	42.602.800	152.147.080	41,97
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	633.405.850	120.422.315	15.000.200	14.639.600	97,75	15.000.200	150.082.115	23,69
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	471.975.635	163.908.700	26.415.600	26.363.600	99,80	26.415.600	216.687.900	45,91
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksanaya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**	**3.567.070.160**	**1.355.072.121**	**341.026.487**	**309.399.300**	**90,73**	**317.654.647**	**1.982.126.068**	**55,57**
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakot Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	113.850.000	311.460.000	199.207.287	194.635.300	97,70	199.912.332	706.007.632	620,12
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	402.323.428	194.532.251	22.659.200	22.659.000	100,00	16.649.000	233.840.251	58,12
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.890.585.842	415.153.430	6.660.000	6.660.000	100,00	4.995.000	426.808.430	39,14
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksanantya Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional (SOP) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	393.195.970		-	-	#DIV/0!	0	-	0,00
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	645.002.420	197.426.400	-	-	#VALUE!	28.998.315	#VALUE!	#VALUE!
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	522.112.500	326.500.000	112.500.000	85.445.000	75,95	67500000	479.445.000	91,83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-1)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**	**36.340.570.333**	**16.109.143.804**	**6.058.852.778**	**5.995.308.903**	**98,95**	**3.681.393.751**	**25.885.846.458**	**71,23**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	328.183.706	86.000.000	33.500.000	33.517.000	99,78	33.591.000	154.008.000	46,94
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7.696.340.730	1.540.351.752	1.384.559.871	1.366.748.950	98,72	951.598.949	3.858.699.651	50,14
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mulai Januari sampai Desember	3.004.830.832	1.354.373.312			94,09	-	1.354.373.312	45,07
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.868.214.636	3.948.366.300	1.375.611.135	1.373.149.720	99,82	919.031.840	6.240.547.860	217,58
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.104.924.462	690.178.000	186.593.300	186.590.600	100,00	88.833.300	885.801.900	80,17
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	145.521.000		153.562.950	153.456.000	99,93	145.521.000	298.977.000	205,45
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan Material yang Disediakan	6.584.564.879	808.454.100	180.262.842	121.231.556	67,26	180.227.942	1.109.893.592	16,91
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.473.959.868	1.292.402.244	382.573.200	380.124.400	99,36	322.047.800	1.994.573.644	36,44
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.565.498.230	6.272.155.356	2.400.462.100	2.419.917.283	100,81	1.000.010.100	9.692.082.739	113,15
4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	588.693.990	215.862.340	41.756.372	40.403.409	96,98	40.532.620	296.858.360	50,44
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah**	**2.869.388.411**	**547.600.800**	**1.446.355.863**	**1.441.493.000**	**99,66**	**1.590.297.000**	**3.578.790.000**	**124,72**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	646.000.000		708.427.863	707.808.000		852.369.000	1.560.169.000	241,51
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.284.928.080	547.600.800	737.928.000	733.685.600	99,43	737.928.000	2.018.621.000	157,10
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Gedung Lainnya	938.460.331		-	-		0	-	0,00
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah**	**3.958.460.142**	**8.914.524.549**	**3.891.678.450**	**4.370.084.248**	**112,29**	**3.497.180.828**	**16.781.789.617**	**423,95**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330.147.987	121.139.694	36.030.360	36.030.000	100,00	30.030.300	187.199.994	56,70
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	725.305.306	1.873.397.221	631.260.000	591.178.915	93,65	631.260.000	3.095.836.136	426,83

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perbitungan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.903.906.449	6.919.987.634	3.224.388.130	3.742.875.325	116,08	2.835.890.528	13.498.753.487	464,99
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah**	**11.270.661.719**	**5.684.664.700**	**2.767.868.405**	**2.737.977.593**	**98,92**	**2.385.669.181**	**10.728.311.474**	**95,19**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	661.403.212	502.029.230	271.554.110	249.890.335	92,02	197.702.631	949.622.196	143,58
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya atau lapangan	5.037.650.509	2.550.205.445	1.130.991.553	1.108.135.228	97,98	1.114.490.753	4.772.831.426	94,74
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	521.343.321	350.573.000	134.175.912	133.868.000	99,77	112.930.912	596.571.912	114,51
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.994.135.417	2.201.857.025	1.221.146.830	1.246.084.030	101,21	960.944.885	4.408.885.940	88,28
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksanannya rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	56.129.260		-	-		0	-	0,00
4.01.01.2.011	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	**3.084.321.170**	**1.273.686.152**	**1.469.449.000**	**1.257.090.118**	**85,55**	**1.022.314.000**	**3.553.090.270**	**115,20**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	672.455.000	568.331.424	691.955.000	568.331.474	82,13	672.455.000	1.809.117.898	269,03
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakat Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1.509.306.170	65.990.000	88.134.000	87.991.000	99,84	29.859.000	183.840.000	12,18
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	902.560.000	639.364.728	689.360.000	600.767.644	87,15	320.000.000	1.560.132.372	172,86
4.01.01.2.012	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan**	**6.855.990.348**	**3.327.344.844**	**1.292.269.474**	**1.088.905.400**	**84,26**	**1.386.048.223**	**5.802.898.467**	**84,64**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pakat Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	2.385.884.984	1.428.558.139	687.275.720	541.164.800	78,74	687.275.720	2.656.978.656	111,36
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakat Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2.803.589.557	1.478.455.802	479.353.853	440.150.600	91,82	573.772.602	2.492.339.804	88,90
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pakat Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1.666.515.807	420.350.905	125.639.901	107.590.000	85,63	125.639.901	653.580.807	39,22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.01.2.013	**Penataan Organisasi**	**terlaksanaanya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah terwujudnya koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah**	**3.694.660.469**	**2.863.655.517**	**906.138.345**	**850.343.186**	**93,84**	**780.365.055**	**3.694.363.758**	**99,99**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.220.775.000	660.535.388	288.511.545	268.923.164	92,52	213.284.299	1.149.710.851	94,18
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.099.192.342	311.491.725	328.074.595	312.374.241	95,21	280.232.549	904.098.515	43,07
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	117.022.727		119.726.729	114.125.881		117.022.727	231.148.608	197,52
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	257.670.400	1.082.658.404	169.825.480	150.921.990	92,40	169.825.480	1.409.405.784	546,98
4.01.01.2.014	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpina**	**Terlaksanaanya keprotokolan dan kumunikasi pimpinan**	**581.582.625**	**1.637.912.252**	**845.428.185**	**841.623.738**	**99,55**	**696.322.885**	**3.175.858.875**	**546,07**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	437.074.729	1.637.912.252	601.917.385	600.016.151	99,68	551.814.585	2.789.743.388	638,21
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144.507.900	-	243.510.800	241.607.587		144.507.900	386.115.487	267,19
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**	**46.772.134.496**	**18.259.892.676**	**19.674.276.844**	**19.058.596.527**	**96,87**	**16.271.297.454**	**53.589.786.657**	**114,58**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.**	**1.526.733.176**	**2.375.868.866**	**1.254.798.990**	**1.348.174.490**	**99,47**	**1.042.085.656**	**4.666.125.012**	**305,63**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	705.455.000	631.119.452	419.268.218	416.705.748	99,39	282.216.374	1.330.045.574	188,54
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	421.275.000	921.269.664	340.703.052	338.631.040	98,51	334.946.084	794.828.788	188,67
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah otonomi daerah	400.003.276	1.223.479.750	694.827.720	692.847.702	99,72	624.923.198	2.541.250.650	635,31
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan evaluasi dan capaian kinerja**	**41.842.988.700**	**14.653.245.258**	**17.582.818.811**	**16.954.627.918**	**96,65**	**14.663.385.889**	**45.691.259.065**	**109,20**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	31.122.688.620	12.306.937.582	16.651.232.111	16.125.780.418	96,84	13.810.391.389	42.243.109.389	135,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	5.940.466.580	1.726.307.676	107.755.209	106.594.100	98,92	73.161.000	1.906.062.776	19,17
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga,	779.833.500		823.833.500	762.253.400	92,53	779.833.500	1.542.086.900	197,75
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum**	**2.335.165.920**	**1.572.635.483**	**773.720.903**	**754.521.919**	**97,52**	**502.893.769**	**2.829.451.171**	**121,17**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	941.722.200	599.168.518	305.349.900	301.335.451	98,69	114.518.000	1.015.221.969	107,80
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.026.918.720	540.558.024	206.377.155	198.521.720	96,68	146.323.555	886.403.299	86,32
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	366.525.000	432.108.941	261.993.848	251.664.748	96,06	241.852.194	927.825.883	253,14
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah kerjasama dalam daerah**	**1.067.246.600**	**278.743.669**	**62.932.140**	**61.276.200**	**97,37**	**62.932.140**	**402.951.409**	**37,76**
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dalam daerah	1.067.246.600	278.743.669	62.932.140	61.276.200	97,37	62.932.140	402.951.409	37,76
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**	**13.208.491.540**	**4.371.908.026**	**1.925.035.131**	**1.783.895.170**	**92,67**	**1.941.085.462**	**8.096.896.258**	**61,30**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**terwujudnya kebijakan dan peningkatan dalam pengembangan sarana**	**6.805.365.070**	**1.422.410.523**	**384.756.555**	**356.979.398**	**92,78**	**310.560.790**	**2.289.950.711**	**33,65**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	63.306.120	-	**92.905.420**	**65.632.000**		63.306.120	128.938.120	203,67
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6.742.058.950	1.422.410.523	291.851.135	291.347.398	99,83	247.254.670	2.161.012.591	32,05
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah**	**405.494.110**	**409.649.089**	**664.918.646**	**495.637.378**	**98,00**	**455.088.479**	**1.529.374.946**	**374,94**
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	175.134.030	282.581.529	372.340.858	363.389.778	97,55	382.241.991	1.028.553.298	587,28
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	230.360.080	327.067.560	92.578.588	91.927.600	99,84	72.846.488	491.841.648	213,51

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelauaran Kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian dan Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian dan Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi**	**5.945.938.560**	**2.139.848.414**	**1.075.359.930**	**971.276.394**	**90,32**	**1.123.741.993**	**4.234.866.801**	**71,22**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.655.607.020	477.109.057	338.767.320	337.682.713	99,68	338.767.471	1.153.559.241	69,68
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.398.792.780	647.035.227	196.378.218	191.459.152	97,50	256.378.218	1.094.872.597	78,27
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.891.538.760	1.015.704.130	540.214.392	442.134.529	81,84	528.596.304	1.986.434.963	68,70
4.01.03.2.04	**Pemantauan KebijakanSumber Daya Alam**	**Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah**	**51.693.800**					**51.693.800**	**130.688.100**	**252,81**
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	51.693.800	-	78.994.300	78.994.300	0,00	51.693.800	130.688.100	252,81

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki 9 sasaran, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sampai dengan Tahun 2022 Sekretariat daerah Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Target (%)	Capaian (%)
1. Terwujudnya pelayanan urusan hukum	98	99,23
2. Terwujudnya pelayanan urusan Organisasi	98	97,06
3. Terwujudnya pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarkatan	98	95,95
4. Terwujudnya pelayanan administrasi perekonomian dan sumber daya alam	98	98,90
5. Terwujudnya pelayanan administratif pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien dan terpercaya	98	100,43
6 Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan umum.	98	93,16
7 Terwujudnya pelayanan Administrasi Pembangunan	98	80,76
8. Terwujudnya pelayanan pengelolaan urusan umum	98	97,80
9. Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah	98	94,17

Dalam tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki 9 (sembilan) sasaran dan 5 (empat) Program yang harus dilaksanakan. Dari 9 (sembilan) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat diikhtisarkan bahwa 95,74% indicator kinerja sasaran berkategori *Berhasil*, dengan Realisasi Anggaran 94,79% berkategori *Berhasil*.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien		60	63	65	68	71	60	50,01	65	69	
2.	Nilai SAKIP		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	
3.	Opini BPK		Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4.	Indek Kepuasan Masyarakat		Nilai Kualitas Pelayanan Masyarakat		77,53	83,30	84,15	85,00	85,39	77,53	77,28	84,15	85,00	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isutrategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isustrategis bagi Sekretariat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Sekretariat Daerah

Berikut ini isu isu penting dari perubahan lingkungan internal dan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah :

1. Analisis Internal.
    a. Kekuatan (Strengths).
        1). Adanya sumber dana untuk melaksanakan kegiatan;
        2). Adanya kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
        3). Adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
        4). Adanya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
        5). Adanya sarana dan prasarana kerja.
    b. Kelemahan (Weakness).
        1). Sarana dan prasarana kerja yang belum maksimal.
        2). Masih kurangnya kualitas sumberdaya aparatur.
        3). Dana yang tersedia relatif terbatas.

4). Kurangnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas.

5). Belum optimal pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

6). Kurangnya operasional untuk kedaerah-daerah yang susah untuk dijangkau dengan fasilitas biasa sebagai pendukung pekerjaan.

2. Analisis Eksternal.

a. Peluang (opportunity).

1). Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah.

2). Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat teknis, fungsional dan struktural.

3). Adanya Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4). Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi.

5). Adanya mekanisme koordinasi dan tata kerja antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Ancaman (Threats).

1). Ketertinggalan dalam penggunaan teknologi informasi dan pengolahan data.

2). Tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang baik.

3). Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih, transparan dan akun tabel.

4). Belum optimalnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5). Sering terjadinya pergantian dan perubahan peraturan perundang-undangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Dalam hal penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan prioritas pembangunan seperti tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026.

Penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk implementasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
3		4	6	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**		**Presentase luas lahan bersertifikat**		**246.187**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**		**Presentase luas lahan bersertifikat**	**100%**	**250.600**	
1	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**		**Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten**		246.187	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**		**Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten**	**1 keg**	**250.600**	
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		246.187	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 dok	250.600	
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terlaksanonya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**25.128.941**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Terlaksanonya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**25.289.842**	
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksanonya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**358.162**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksanonya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dok**	**408.584**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		46.534	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	48.907	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10.077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	12.791	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10.077	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	12.791	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		7.572	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	11.291	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		7.572	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	11.291	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah		268.330	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah	12 laporan 1 laporan	311.514	
3	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**		**8.988.914**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 dok**	**8.988.914**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kwlh Kotan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.973.409	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kwlh Kotan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 org	8.973.409	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		7.752	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	7.752	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi		7.752	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kwlh Kotan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 dok	7.752	
4	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah**		**84.019**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah	3 keg	**84.019**	
	Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD		42.003	Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah SKPD		42.003	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian		15.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi	1 Lap	15.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		26.416	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Keg	26.416	
5	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Terlaksanya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah		**317.655**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Terlaksanya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	5 Dok	**317.655**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kwlh Kotan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		199.912	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kwlh Kotan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pstn	199.912	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kwlh Kotan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		16.649	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Kwlh Kotan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	16.649	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kwlh Kotan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4.995	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kwlh Kotan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4.995	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		28.598	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	40 peserta	28.598	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		67.500	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 ASN 3 hari	67.500	
6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**		**3.891.394**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		**3.891.394**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kuala Kurun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		33.591	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kuala Kurun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		33.591	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		951.599	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kuala Kurun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 jenis	951.599	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		919.032			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		919.032	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kuala Kurun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		88.833	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kuala Kurun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		88.833	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		145.521	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		145.521	
	Penyediaan Bahan/Material	Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		180.228	Penyediaan Bahan/Material	Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		180.228	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kuala Kurun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		322.047	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kuala Kurun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		322.047	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.210.010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	1.210.010	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis		40.533	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dok	40.533	
7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah**		**1.590.297**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	7 unit	**1.590.297**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		852.369	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	852.369	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		737.928	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	737.928	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah**		**3.497.181**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah**	1 kegiatan	**3.570.941**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kode Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		30.030	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kode Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Surat	26.402	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kode Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		631.260			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang		631.260	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kode Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2.835.891	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kode Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 orang	2.913.278	
9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat**		**2.385.669**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat		**2.385.669**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kode Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan		197.703	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kode Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		197.703	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kode Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya atau lapangan		1.114.491	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kode Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya atau lapangan		1.114.491	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kode Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		112.531	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kode Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		112.531	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kode Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		960.943	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kode Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		960.943	
10	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**		**1.022.314**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**	2 orang	**1.022.314**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala		672.455	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	2 orang	672.455	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		29.859			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		29.859	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		320.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	320.000	
11	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Fasilitasi Kerumahtanggan**		**1.486.648**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan**	3 jabatan	**1.486.648**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		687.276	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	687.276	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		573.733	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	573.733	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		225.640	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kuala Kurun	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	225.640	
12	**Penataan Organisasi**		**terlaksanannya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah**		**780.366**	**Penataan Organisasi**		terlaksanannya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah	38 PD	**817.085**	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		213.285	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dok 26 SKPD	250.004	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		280.233	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Lap	280.233	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		117.023	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	117.023	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		169.825	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap/Dok	169.826	
13	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan**		**726.323**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**		**Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan**		**726.323**	
	Fasilitasi Keprotokolan	Daerah, Provinsi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		551.815	Fasilitasi Keprotokolan	Daerah, Provinsi dan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Lap	551.815	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		174.508	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Lap	174.508	
III.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**		**15.931.297**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**		**Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**16.189.459**	
14	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan		**1.141.705**	**Administrasi Tata Pemerintahan**		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan	8 Dok	**1.114.255**	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		281.944	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Keg, 100%, 70 buku	596.558	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		334.974	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dok	210.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah otonomi daerah		724.787	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah otonomi daerah	3 Keg	507.697	
15	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat**		**14.154.719**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat**	**50 Sasaran**	**14.232.999**	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		13.301.725	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40 Kelembagaan dan tempat ibadah	13.301.725	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		73.161	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1Kegiatan	283.999	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantiban Linmas		779.834	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantiban Linmas	7 Kegiatan/Sasaran	643.775	
16	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum**		**571.941**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**		**Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum**	**40 produk hukum**	**684.881**	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		114.718	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Gunung Mas	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	40 produk Hukum Daerah	401.855	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunung Mas	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		216.324	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunung Mas	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1Laporan	216.324	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Gunung Mas	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		240.899	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Gunung Mas	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	40 produk Hukum Daerah	66.702	
17	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Jumlah kerjasama dalam daerah**		**62.932**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**		**Jumlah kerjasama dalam daerah**	**1 kegiatan**	**157.324**	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Gunung Mas	Jumlah kerjasama dalam daerah		62.932	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Gunung Mas	Jumlah kerjasama dalam daerah	100%	157.324	
IV.	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**		**2.031.085**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**		**2.297.684**	
18	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**terwujudnya kebijakan dan peningkatan dalam pengembangan sarana**		**335.561**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**terwujudnya kebijakan dan peningkatan dalam pengembangan sarana**	**5 dokumen**	**531.717**	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		88.306	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	98.614	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		247.255	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 kegiatan	433.103	
19	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah**		**495.088**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		Terlaksanannya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah	3 laporan	**495.088**	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		422.242	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 dokumen	422.242	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		72.846	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunung Mas	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 kegiatan	72.846	
10	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya**		**1.123.742**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**		**Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya**	**150 paket**	**1.194.185**	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		538.767	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Paket	538.767	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		255.379	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Gunung Mas	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Kegiatan	322.653	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		528.596	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Kegiatan	532.764	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah**		**76.694**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**		**Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah**	**85 dokumen**	**76.694**	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		76.694	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Daerah, Provinsi dan Pusat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	85 dokumen	76.694	
					43.329.510					**44.027.585**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses pengusulan program dan kegiatan partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kecamatan. Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran (RKP) dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun.

Melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan, Perangkat Daerah menghimpun usulan- usulan dari masyarakat yang dengan menyesuaikan usulan program dan kegiatan dengan tupoksi dari masing-masing Perangkat Daerah.

Untuk usulan yang masuk pada kegiatan Musrenbang tahun 2024 usulan untuk tahun 2025 pada Sekretariat Daerah berjumlah 44 usulan dari 11 Kecamatan terdiri dari 32 Desa/Kelurahan, 1 Kecamatan tidak ada usulan untuk Sekretariat Daerah yaitu dari Kecamatan Damang Batu, dengan rincian dapat dilihat pada table 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gunung Mas

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Usulan	Permasalahan
1	Tewah	Desa Teluk Lawah	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Tewah	Desa Teluk Lawah	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan Tiang Listrik
3	Tewah	Desa Sarerangan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan Pastori Gereja EFFATA dan Gereja Soteria Desa Sare Rangan
4	Tewah	Desa Tumbang Pajangei	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Penambahan Jaringan Listrik ke RT. 03
5	Tewah	Desa Tumbang Pajangei	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (6)	Pembangunan Gereja GKE - Betang Pandohop Tumbang Pajangei
6	Tewah	Kelurahan Tewah	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Umum luas = 15 Ha.
7	Tewah	Desa Sandung Tambun	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Perlunya Jariangan Listrik di Desa Sandung Tambun
8	Kahayan Hulu Utara	Desa Tumbang Korik	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Permintaan Pemasangan Jaringan Listrik
9	Kahayan Hulu Utara	Desa Tumbang Ponyoi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	perlunya penerangan jalan umum desa tumbang ponyoi berupa tenaga surya
10	Kahayan Hulu Utara	Desa Tumbang Ponyoi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Penerangan Jalan umum di Sepanjang Desa Tumbang Ponyoi
11	Miri Manasa	Kelurahan Tumbang Napoi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Penambahan PJU sebanyak (25 Unit) akibat kurangnya penerangan jalan sering terjadi kecelakaan
12	Miri Manasa	Kelurahan Tumbang Napoi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (2)	Pembuatan Sanitasi di Lingkungan Gereja GPT (P=100 M dan L=40 cm) akibat sering adanya genangan air yg menyebabkan lokasi Gereja semakin memprihatinkan
13	Miri Manasa	Desa Bontoi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan pastori untuk pelayanan kegamaan Desa Bantoi
14	Miri Manasa	Desa Rangan Hiran	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan PLTMH sebanyak 1 unit untuk menunjang kebutuhan masyarakat Desa Rangan Hiran
15	Miring Raya	Desa Rangan Tate	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Membutuhkan lampu Penerangan Dimuara jalan permukiman penduduk sebanyak 20 Titik
16	Sepang	Kelurahan Sepang Simin	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Lampu Penerangan Jalan
17	Sepang	Kelurahan Sepang Simin	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Lampu Penerangan Jalan

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Usulan	Permasalahan
18	Sepang	Desa Rabaah	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (2)	Sebagian Masyarakat Belum mendapatkan Fasilitas Penerangan Listrik Karena Terapu Listrik tidak memadai (hanya 1 terapu)
19	Sepang	Desa Tanjung Karitak	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Lampu Penerangan Jalan
20	Rungan Hulu	Desa Jangkit	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan jaringan listrik PLN desa
21	Rungan Hulu	Desa Batu Puter	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Pengadaan Sarana Tanah Kuburan
22	Rungan Barat	Desa Hujung Pata	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pemasangan Listrik PLN untuk Desa Hujung Pata
23	Rungan Barat	Desa Tumbang Kuayan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Desa Tumbang Kuayan Sebanyak 15 Unit.
24	Rungan Barat	Desa Tumbang Kuayan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan Penerangan Jalan Umum Desa Tumbang Kuayan Sebanyak 15 Unit.
25	Rungan Barat	Desa Tumbang Bahanei	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Jaringan Listrik Desa (PLN) Tercitanya Penerangan Bagi Seluruh Masyarakat Desa Tumbang Bahanei
26	Rungan Barat	Desa Tusang Raya	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan Jaringan dan Instalasi Listrik
27	Rungan	Desa Talangkah	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Tidak tersedianya tempat tinggal utk penjaga Masjid.Volume 4x6 meter
28	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Dengan semakin berkembangnya ibukota Kecamatan Rungan maka semakin banyak pula para pendatang yang tinggal di Ibukota Kecamatan Rungan yang akan meningkatkan produksi sampah akan tetapi tidak diimbangi dengan keberadaan TPA (Tempat Pem buangan Akhir) sehingga diperlukan Pengadaan Tanah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Seluas 2 Hektar.
29	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah	Kondisi saat ini Tempat Pemakaman Umum yang ada sudah hampir penuh dikarenakan lokasi yang ada luasanya sudah tidak dapat dikembangkan lagi karena dikelingi oleh tanah msyarakat sehingga diperlukan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Seluas 2 Hektar.
30	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	Pembangunan Rumah Pastori GKE Gloria ukuran 12 X 12,5 M
31	Rungan	Kelurahan Jakatan Raya	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	Pemasangan Keramik Untuk Gereja GPT "Kristus Raja Damai "Seluas 60 M2

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Usulan	Permasalahan
32	Manuhing	Kelurahan Tumbang Talaken	Masih Rendahnya kualitas layanan publik	Tidak adanya Penerangan Jalan Umum menyebabkan terjadinya kecelakaan pada malam hari diKelurahan Tumbang Talaken
33	Manuhing	Desa Tumbang Sepan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Penyambungan saluran Listrik PLN dari Kelurahan Tumbang Talaken ke Desa Tumbang Sepan
34	Manuhing	Desa Takaras	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan Sarana Keagamaan Gedung Gereja sebanyak 1 Unit
35	Manuhing	Desa Taringen	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Perlunya pemeliharaan lingkungan desa dengan pengadaan 8 titik penerangan di jalan Desa Taringen
36	Manuhing	Desa Gohong	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pembangunan Balai Ibadah Hindu Kaharingan sebanyak 1 Unit
37	Manuhing	Desa Bereng Balawan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	perlunya pemasangan instalasi jaringan listrik PLN untuk desa sebanyak 40 rumah untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar
38	Mahuning Raya	Kelurahan Tehang	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan generator set kantor Kelurahan Tehang 1 unit
39	Mahuning Raya	Kelurahan Tehang	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan listrik tenaga surya 1 unit
40	Mahuning Raya	Kelurahan Tehang	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Pengadaan PJU 30 unit
41	Mahuning Raya	Kelurahan Tehang	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	pembangunan instalasi jaringan listrik negara 1 paket
42	Mahuning Raya	Kepala Desa Tumbang Oroi	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (5)	Masyarakat desa Tumbang Oroi masih belum menikmai aliran listrik, sehingga perlu pembangunan jaringan listrik PLN di desa.
43	Kurun	Kepala Desa Tumbang Manyangan	Belum Meratanya Pembangunan dan Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah (4)	Pembangunan rumah ibadah (gereja) Kristen Pantekosta
44	Kurun	Lembaga	Masih rendahnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Belum adanya panti rehabilitasi bagi masyarakat yang terikat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gunung Mas

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan didaerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

RKP 2025 bertema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Dan Berkelanjutan,"** melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;

2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Tema RKP 2025 dijabarkan dalam 3 arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu:

1. SDM Berkualitas, *SDM Berdaya Saing dan Produktif*.

2. Infrastruktur Berkualitas, *Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas*.

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, *Pertumbahan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan.*

Pertumbahan ekonomi pada 2025 ditargetkan pada kisaran 5,3% - 5,6%. Sementara itu, tingkat kemiskinan dipatok 7% - 8%. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditarget turun menjadi 4,5% - 5% dan proyeksi rasio ini sebesar 0,379 - 0,382. Indeks modal manusia ditargetkan sebesar 0,56 dan penurunan intensitas gas rumah kaca sebesar 38,6% pada tahun depan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas :

3.2.1. Tujuan

1. Terwujudnya pelayanan urusan hukum
2. Terwujudnya pelayanan urusan organisasi
3. Terwujudnya pelayanan administrasi perekonomian dan sumber daya alam
4. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah
5. Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan umum
6. Terwujudnya pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
7. Terwujudnya pelayanan administrasi pembangunan
8. Terwujudnya pelayanan pengelolaan urusan umum
9. Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah

3.2.2. Sasaran

1. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
2. Melayani bantuan hukum dan sengketa hukum
3. Melakukan analisa jabatan dan kelembagaan
4. Menyusun ktata laksanaan dan pelaporan kepegawaian
5. Pembinaan aparatur dan kepegawaian melalui kegiatan Bimtek dan pelatihan
6. Melaksanakan administrasi pengembangan dan potensi daerah
7. Melaksanakan administrasi sarana dan prasarana perekonomian
8. Memberikan pelayanan urusan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah
9. Memberikan pelatihan pengadaan barang dan jasa
10. Melaksanakan administrasi pemerintahan daerah

11. Melaksanakan administrasi tatabatas kecamatan dan desa
12. Inventarisasi tanah pemda se Kab. Gunung Mas dan mengusulkan permohonan pembuatan sertifikat
13. Melaksanakan pembinaan agama, pendidikan dan kebudayaan
14. Melaksanakan pembinaan kepada pemuda, olah raga dan seni
15. Penyelenggaraan safari keagamaan
16. Melaksanakan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah
17. Melaksanakan pelaporan kegiatan Sekretariat Daerah
18. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan
19. Mengelola urusan rumah tangga KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah
20. Mengelola urusan perlengkapan dan asset Sekretariat Daerah
21. Mengelola urusan ke protokolan dan pengamanan KDH/WKDH
22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun

3.3. Program dan Kegiatan

Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk menyusun kerangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sehingga di anggap perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah. Selain itu, renja juga bermaksud sebagai standart dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dan penetapan RKA SKPD dalam melaksakan penyusunan RKA dengan menggunakan pagu sementara.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki 6 (enam) Program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan. Dana yang dianggarkan untuk program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas atau pagu indikatif Perangkat Daerah yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp. 56.054.425.520,00 (Lima Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Ratus Dua Puluh Rupiah).

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2 10 09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Presentase luas lahan bersertifikat**			**246.187.484**				**435.000.000**
2 10 09 2.01	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Penataan Penguasaan Tanah pemerintah Kabupaten**		97%	**246.187.484**			97%	**435.000.000**
2 10 09 2.01 0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Gunung Mas	97%	246.187.484	DTU - DBH		97%	435.000.000
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah**		98%	**25.120.941.090**			98%	**26.081.344.337**
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat**		98%	**350.162.425**			98%	**405.497.992**
4 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kuala Kurun	98%	46.534.000	DTU - DBH		98%	96.968.095
4 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kuala Kurun	98%	10.077.264	DTU - DBH		98%	11.400.000
4 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kuala Kurun	98%	10.077.264	DTU - DBH		98%	11.400.000
4 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kuala Kurun	98%	7.572.000	DTU - DBH		98%	8.700.000
4 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kuala Kurun	98%	7.572.000	DTU - DBH		98%	8.700.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah	Kuala Kurun	98%	268.329.897	DTU - DBH		98%	268.329.897
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah**		99%	**8.988.913.841**			99%	**9.816.204.480**
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kuala Kurun	98%	8.973.409.361	DTU - DAU		98%	9.800.700.000
4 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kuala Kurun	99%	7.752.240	DTU - DBH		99%	7.752.240
4 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kuala Kurun	99%	7.752.240	DTU - DBH		99%	7.752.240
4 01 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah pengadministrasian barang milik daerah pada perangkat daerah		99%	**84.018.600**			99%	**84.018.600**
4 01 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	99%	42.602.800	DTU - DBH		99%	42.602.800
4 01 01 2.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Gunung Mas	99%	15.000.200	DTU - DBH		99%	15.000.200
4 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunung Mas	98%	26.415.600	DTU - DBH		98%	26.415.600
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksannya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah**		97%	**317.654.647**			97%	**568.829.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kuala Kurun	99%	199.912.332	DTU - DBH		99%	240.000.000
4 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kuala Kurun	98%	16.649.000	DTU - DBH		98%	16.750.000
4 01 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi	Kuala Kurun	98%	4.995.000	DTU - DBH		98%	5.000.000
4 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Gunung Mas	96%	28.598.315	DTU - DBH		96%	28.780.000
4 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Daerah, Provinsi dan Pusat	95%	67.500.000	DTU - DBH		95%	80.000.000
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah**		98%	**3.891.393.751**			98%	**5.945.177.391**
4 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kuala Kurun	98%	33.591.000	DTU - DBH		98%	33.591.000
4 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kuala Kurun	97%	951.598.949	DTU - DBH		97%	1.282.459.861
4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kuala Kurun	99%	919.031.840	DTU - DBH		99%	1.150.899.000
4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kuala Kurun	98%	88.833.300	DTU - DBH		98%	89.000.000
4 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	145.521.000	DTU - DBH		99%	145.521.000
4 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Daerah, Provinsi dan Pusat	98%	180.227.942	DTU - DBH		98%	210.960.000
4 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kuala Kurun	99%	322.047.000	DTU - DBH		99%	450.667.000
4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	100%	1.210.010.100	DTU - DBH		100%	2.541.033.800
4 01 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Daerah, Provinsi dan Pusat	97%	40.532.620	DTU - DBH		97%	41.045.730

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah		100%	**1.590.297.000**			100%	**1.590.297.000**
4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	100%	852.369.000	DTU - DBH		100%	852.369.000
4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	100%	737.928.000	DTU - DBH		100%	737.928.000
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah**		95%	**3.497.180.828**			95%	**3.497.180.828**
4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kuala Kurun	97%	30.030.300	DTU - DBH		97%	30.030.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan		99%	631.260.000	DTU - DBH		99%	631.260.000
4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Kuala Kurun	90%	2.835.890.528	PAD		90%	2.835.890.528
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah pada perangkat daerah		97%	**2.385.669.151**			97%	**2.679.084.625**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Gunung Mas	95%	197.702.631	DTU - DBH		95%	265.011.050
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya atau Inpangan	Kab. Gunung Mas	98%	1.114.490.753	DTU - DBH		98%	1.486.750.000
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Gunung Mas	98%	112.530.912	DTU - DBH		98%	126.573.575
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Gunung Mas	98%	960.944.855	DTU - DBH		98%	800.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**terlaksananya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**		96%	**1.022.314.000**			96%	**1.022.955.000**
4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Gunung Mas	95%	672.455.000	PAD		95%	672.455.000
4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Gunung Mas	99%	29.859.000	DTU - DBH		99%	30.500.000
4 01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	95%	320.000.000	DTU - DBH		95%	320.000.000
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Fasilitasi Kerumahtanggan**		98%	**1.486.648.223**			98%	**1.486.648.223**
4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kuala Kuran	98%	687.275.720	DTU - DBH		98%	687.275.720
4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kuala Kuran	98%	573.732.602	DTU - DBH		98%	573.732.602
4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kuala Kuran	99%	225.639.901	DTU - DBH		99%	225.639.901
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	**terlaksananya pengelolaan kelembagaan dan analis jabatan, fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah terwujudnya koordinasi dan ezyusunan laporan kinerja pemerintah**		**99%**	**780.365.739**			**99%**	**938.212.938**
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Daerah, Provinsi dan Pusat	98%	213.284.983	DTU - DBH / PAD		98%	262.427.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Daerah, Provinsi dan Pusat	98%	280.232.549	DTU - DBH / PAD		98%	385.162.500
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	117.022.727	DTU - DBH / PAD		99%	120.797.564
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	169.825.480	DTU - DBH		99%	169.825.874
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan**		99%	**726.322.885**			99%	**726.322.885**
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	551.814.985	DTU - DBH		99%	551.814.985
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	174.507.900	DTU - DBH		99%	174.507.900
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat**			**15.931.296.800**				**16.085.621.231**
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.		**98%**	**1.141.704.864**			**98%**	**1.177.091.096**
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Gunung Mas	98%	281.944.056	DTU - DBH / PAD		98%	281.944.056
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Gunung Mas	98%	134.973.768	DTU - DBH / PAD		98%	176.360.000
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Gunung Mas	97%	724.787.040	DTU - DBH / PAD		97%	724.787.040
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah pembinaan mental spiritual, kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat**		96%	**14.154.719.135**			96%	**14.172.374.635**
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Gunung Mas	92%	13.301.724.635	DTU - DBH / PAD		92%	13.301.724.635

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Gunung Mas	99%	73.161.000	DTU - DBH		99%	75.650.000
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Gunung Mas	98%	779.833.500	DTU - DBH		98%	795.000.000
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah ketersediaan produk hukum dan peningkatan pemahaman hukum dan bantuan hukum**		98%	**571.940.661**			98%	**671.155.500**
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Gunung Mas	98%	114.718.020	DTU - DBH		98%	180.500.000
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Gunung Mas	98%	216.323.555	DTU - DBH		98%	240.055.500
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Gunung Mas	98%	240.899.086	DTU - DBH / PAD		98%	250.600.000
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Jumlah kerjasama dalam daerah**		96%	**62.932.140**	APBD DAU		96%	**65.000.000**
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dalam daerah	Kab. Gunung Mas	96%	62.932.140	DTU - DBH		96%	65.000.000
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Daerah**			**2.031.085.062**				**2.120.962.493**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**terwujudnya kebijakan dan peningkatan dalam pengembangan sarana**		97%	**335.560.790**	APBD/ DAU		97%	**350.500.500**
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Daerah, Provinsi dan Pusat	95%	88.306.120	DTU - DBH		95%	90.206.500
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Daerah, Provinsi dan Pusat	98%	247.254.670	DTU - DBH		98%	260.300.000
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi serta program dan kerjasama pembangunan daerah		98%	**495.088.479**			98%	**506.520.000**
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Gunung Mas	97%	422.241.991	DTU - DBH / PAD		97%	430.870.000
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Gunung Mas	98%	72.846.488	DTU - DBH		98%	75.650.000
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Pengadaan Barang Dan Jasa dan Sumberdaya Aparatur yang memiliki kompetensi**		98%	**1.123.741.993**			98%	**1.123.741.993**
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	98%	338.767.471	DTU - DBH		98%	338.767.471
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Gunung Mas	98%	256.378.218	DTU - DBH		98%	256.378.218
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Gunung Mas	97%	528.596.304	DTU - DBH / PAD		97%	528.596.304
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Pemantauan kebijakan sumberdaya Listrik Daerah**		99%	**76.693.800**			99%	**140.200.000**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Daerah, Provinsi dan Pusat	99%	76.693.800	DAU - DBH		99%	140.200.000
					43.329.510.436				44.722.928.061

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi, penerapan prinsip-prinsip dimaksudakan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan factor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Renja-PD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap

berikutnya. Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

Rincian rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DAERAH KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								98.894.425.519,00							59.336.655.911,00	
		SEKRETARIAT DAERAH														
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.761.912.000,00							2.761.912.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2.761.912.000,00							2.761.912.000,00	
1	2.10.03	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			1	2.761.912.000,00							2.761.912.000,00	
	2.10.03.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.761.912.000,00				Mengkoordinasikan kebijakan teknis dan prosedural umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	2.761.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.761.912.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Mengkoordinasikan kebijakan teknis dan prosedural umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	2.761.912.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	2.10.04	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-	-			-	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Guntai) di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00				Mengkoordinasikan kebijakan teknis dan prosedural umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah														
			Laporan Data Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah (Guntai) di Kabupaten/Kota				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pelayanan pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.04.2.01.0003	Koordinasi Pengadaan TORA (Guntai) di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL.OMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Area Pondokan/ Pengusulan TORA paten 1 Satu Kabupaten/Kota				1 Sarana Area	14.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER (BELUM DANA BAGI HASIL		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pengelolaan pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						350.511.512,00							350.000.000,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						350.511.512,00							350.000.000,00	
1.	3.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN DAN MEMBUKA Tanah	-	-			-	350.511.512,00						-	350.000.000,00	
	3.10.09.2.01	Penertiban dan Membuka Tanah		-			-	[illegible]			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dari usia pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang bermutu, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	[illegible]	SEKRETARIAT DAERAH
	3.10.09.2.01.0000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	290.511.512,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dari usia pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang bermutu, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						53.894.368.952,00							68.832.680.328,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						53.894.368.952,00							68.832.680.328,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	21.998.283.838,00						-	31.940.783.168,00	
	4.01.01.2.01	Pelaksanaan, Pengenggunan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	[illegible]			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dari usia pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang bermutu, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-	[illegible]	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET SPaPBD PERIODE BERKENA ORD	REALISASI CAPAIAN KEPALA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KEPALA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BAGU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang merdeka secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, partisipatif, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang merdeka secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, partisipatif, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang merdeka secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, partisipatif, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang merdeka secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter, partisipatif, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0029	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	7.870.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Mampu mejadi kecerdasan-kreatif dan prasarana untuk secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang kompetensi			7.870.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0030	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD														

NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD Tahun 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IKIasi Realisasi Kinerja OKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	288.326.616,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Mempercepat koordinasi serasi dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi			288.326.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	11.951.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-	11.951.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/Kolam	11.951.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-		11.951.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD				1 Laporan		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-				-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Penggunaan Barang Milik Daerah OKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROGRAM/ CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						RELEVANSI SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0000	Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pemakaiankan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pemakaiankan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	35.411.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			28.470.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.20	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	330.944.980,00				Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			330.944.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.09.0002	Pengaturan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penataan dan Pengaturan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Penataan dan Pengaturan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berilmu, berbagai, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0004	Koordinasi dan Pelaporan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET (X+1/E) PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Dalam Informasi Kependudukan				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menciptakan dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memberi secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman bertaqwa, cerdas, terbuki dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	32.398.450.00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mengoptimalkan produktivitas pemerintahan dan pengendalian yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Pembangunan dan pemanfaat infrastruktur Kesyatan Publik Lokal Jembatan, Gl Bendi, Sedilas, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		32.398.450.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	80.804.810.00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mengoptimalkan produktivitas pemerintahan dan pengendalian yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		180.804.813.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	6.473.861.803.00			-	Memprioritaskan kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	6.473.861.803.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan komputer Jaringan														
			Jumlah Paket Komputer Jaringan Lainnya/Perangkat Jaringan Kantor yang Disediakan				1 Paket	33.000.800.00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Memprioritaskan kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		33.000.800.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.199.888.283.00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Memprioritaskan kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.199.888.283.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.707.187.864.00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Memprioritaskan kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.707.187.864.00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD Tahun 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RENJA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROKTIS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Penggandaan yang Disebarkan				2 Paket	99.101.584,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		99.101.584,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0000	Penyediaan Jasa Surat dan Perbitan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disebarkan				4 Dokumen	105.521.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		105.521.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Pengadaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disebarkan				3 Paket	344.498.742,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		344.498.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Penyediaan Kelengkapan Tamu														
			Jumlah Laporan Penyediaan Kelengkapan Tamu				1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				126 Laporan	2.481.976.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.481.976.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	48.532.935,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		48.532.935,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	1.247.808.836,00			-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.247.808.836,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengelolaan Pelayanan Perkantoran Dinas atau Kantornya Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan				1 Unit	325.936.464,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan koordinasi rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		325.936.464,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PENAFSIRAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET SEMUA PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROYEKSI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PERKIRAAN BELUJ RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVINSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.01.2023	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	621.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan Daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		621.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.439.860.740,00			-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	3.439.860.740,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Pelayanan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Layanan Pengadaan Jasa Surat Menyurat				3 Layanan	30.036.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.036.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Layanan	691.260.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		691.260.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Layanan	2.888.582.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan dan pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) lagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		2.888.582.440,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.302.242.417,00			-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	3.302.242.417,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Perjalanan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dilayankan Pajaknya				10 Unit	197.973.014,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kesekretariatan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		197.973.014,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET setelah PERUBAHAN RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PROSENTASE CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROSENTASE			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	1.149.275.982,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.149.275.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	112.500.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			112.500.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1.862.492.411,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.862.492.411,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	1.833.314.000,00				Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.833.314.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	872.450.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			872.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Rekam Dinas dan Ambat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Pakaian Rekam Dinas dan Ambat Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	39.864.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			39.864.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	320.000.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			320.000.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.552.368.923,00				Menyelenggarakan kesekapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			1.552.368.923,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PROVITSI			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	552.995.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		552.995.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	573.732.402,00	Kab. Gunung Mas, Kecm. Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		573.732.402,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	325.638.801,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		325.638.801,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi	-	-	-	-	-	1.161.028.144,00			-	-	-	-	1.161.028.144,00	SEKRETARIAT DAERAH
																Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital
	4.01.01.2.13.0001	Penyelenggaraan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	443.989.529,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		443.989.529,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	295.221.529,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		295.221.529,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	182.021.730,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		182.021.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	316.820.784,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Menyelenggarakan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		316.820.784,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TRANSFER MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (RP)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	-	-			-	596.126.800,00			-	Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	596.126.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Kerjasama														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kerjasama				12 Laporan	851.847.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	851.847.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	344.473.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Penegakan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	344.473.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN MASYAT	-	-			-	10.396.983.038,50						-	12.556.983.464,50	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Kemasyarakatan	-	-			-				-	Membangun dan mengembangkan budaya pemerintahan yang memiliki sistem nilainya dan sikap pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berimen, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				12 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pemerintahan yang memiliki sistem nilainya dan sikap pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berimen, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan				1 Dokumen	287.474.082,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pemerintahan yang memiliki sistem nilainya dan sikap pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berimen, berbasis, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pelayanan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	287.474.082,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	995.419.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM, DANA BAGI HASIL		Memasyarakatkan kebutuhan secara dini prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			995.419.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	4.000.000.000,0			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki sekolah swasta dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang berimtak bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	1.000.000.000,0	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DESENTRALISASI ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki sekolah swasta dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang berimtak bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0000	Fasilitasi Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesatuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	[illegible]	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki sekolah swasta dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang berimtak bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan penerapan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan yang berkelanjutan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	[illegible]	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	[illegible]	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang memiliki sekolah swasta dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk meningkatkan masyarakat yang berimtak bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan penerapan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan yang berkelanjutan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	[illegible]	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Kemampuan untuk Menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Luhur														
			Jumlah keluarga yang Meningkat Peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan kemampuan untuk Menyediakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Luhur				10 Keluarga	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan kemitraan yang inklusif antara pemerintah daerah dan masyarakat serta pengelolaan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat sipil pencegahan dan penghapusan kekerasan meninggalkan konflik sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesetaraan bagi Masyarakat	-	-	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAKJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	INDIKATIF			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	44.004.768,00			-	Meningkatkannya produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	44.004.768,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				40 Dokumen	164.713.256,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	164.713.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Ditindaklanjuti Fasilitasi Bantuan Hukum				4 Kasus	249.519.180,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	249.519.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.05.0005	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				40 Dokumen	183.887.340,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	183.887.340,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	111.832.148,00			-	Memperjelas kecukupan variasi dan prioritas untuk secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	111.832.148,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	111.832.148,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Memperjelas kecukupan variasi dan prioritas untuk secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	111.832.148,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	**PROGRAM PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-			-	**2.102.839.864,00**						-	**2.102.839.864,00**	
	4.01.03.2.01	Fasilitasi Kerjasama Pembangunan	-	-			-	533.475.484,00			-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terikat antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terikat usaha dan antar daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	533.475.484,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	206.280.624,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terikat antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terikat usaha dan antar daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	206.280.624,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengelolaan dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	RANCANGAN RANJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET (R23)	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				5 Laporan		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Meningkatnya pelayanan pemerintahan Koperasi dan UKM serta unit usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah Penegakan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-									SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen		Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENJABARAN APBD DAERAH (PAD)		Memperoleh pendapatan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jaringan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya				SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.03.0005	Pengelolaan Pelaporan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	82.840.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jaringan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya			82.840.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	884.214.978,00				Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			884.214.978,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				159 Dokumen	208.267.267,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			208.267.267,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				5 Dokumen	390.331.380,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM,DANA BAGI HASIL		Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			208.220.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.05.2.04.0003	Pembinaan dan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Advokasi Pengelolaan Barang dan Jasa				14 Orang	485.734.711,65	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mempersiapkan kelancaran sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			485.734.711,65	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemeliharaan Kebijakan Sumber Daya Air	-	-			-	126.859.882,00				-			126.859.882,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi kebijakan Irigasi Energi dan Air, Pelayanan Umum dan Perairan Ruang, Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perkasihan				1 Dokumen	126.636.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN BAGI HASIL		Mempersiapkan kelancaran sarana dan prasarana umum secara integratif dan komplemental dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya			126.636.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
			JUMLAH					98.061.635.629,65							58.595.386.800,00	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2026.

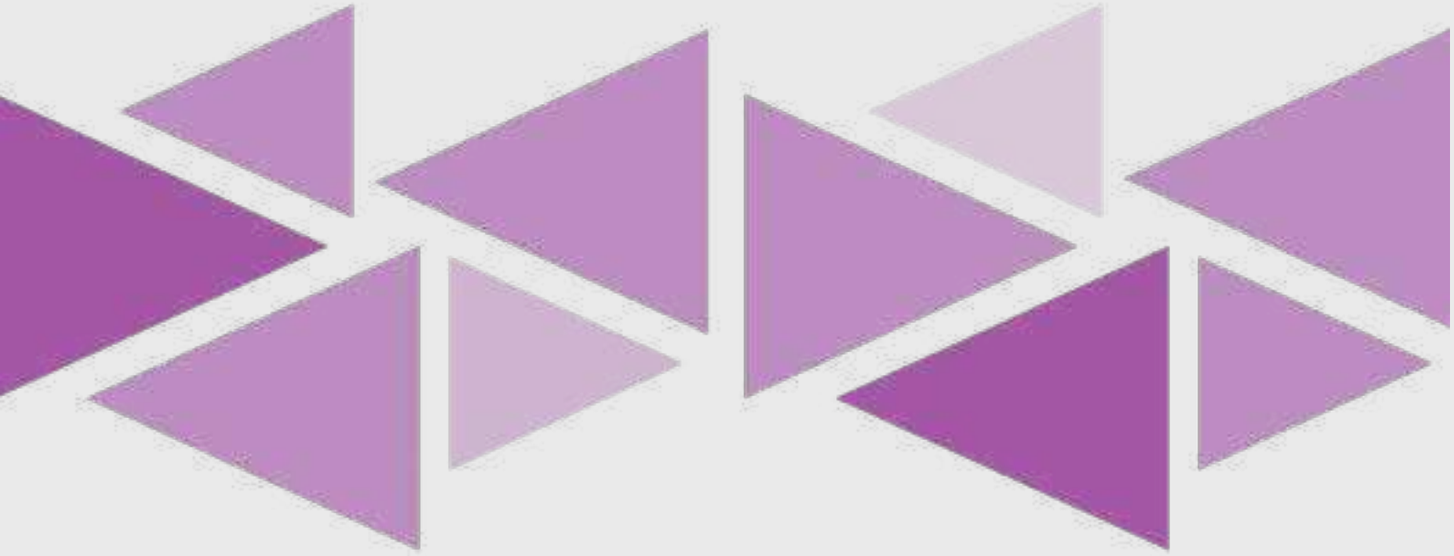
Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 6 (enam) Program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 70 (tujuh puluh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 56.054.425.520,00 (Lima Puluh Enam Milyar Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Ratus Dua Puluh Rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman/acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas ini masih terdapat

kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami juga menerima saran dan pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten yang kiranya dapat membantu kami dalam penyusunan Rencana Kerja ini, untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf, semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas ini dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, terimakasih.





RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan penyertaanNyalah kami dapat menyelesaikan Rancangan Akhir RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menentukan arah pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini dan kami mengharapkan semoga dapat berguna bagi kita semua.

Kuala Kurun, Juni 2024
Kepala Dinas,

RODY ARISTO ROBINSON, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196712191996031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Maksud dan Tujuan 5

D. Sistematika Penulisan 7

BAB II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu **10**

A. Struktur Organisasi dan Tupoksi 10

B. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah

Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah 14

C. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 41

E. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 43

F. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat 43

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah **45**

A. Telaahan terhadap kebijakan Nasional 46

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 52

C. Program dan Kegiatan 53

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 62

BAB V Penutup 68

Lampiran Lampiran

I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai pedoman rencana kinerja yang memuat tentang susunan yang ingin dicapai dalam tahun 2025, arah kebijakan, program dan kegiatan dan capaian program.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas ini disusun untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sebagai penyelenggara urusan Pemerintah

bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan didaerah sesuai kewenangan yang didelegasikan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas.

Rencana Kerja Tahun 2025 adalah merupakan kunci keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas dengan mengakomodir usulan dari kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dan kabupaten.

I. 2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rayat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

I. 3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan jangka pendek pada tahun 2025 sebagai penjabaran dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 disusun adalah untuk :

Meningkatkan pelakasanaan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pemberian perijinan, sosialisasi/ penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan pengendalian serta evaluasi pelaporan dibidang perhubungan.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

I. 4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses pembandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, PT maupun dari perangkat daerah yang ditujukan kepada perangkat

daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2 Program dan Kegiatan

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran-Lampiran

II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II. 1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi dan Personalia Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud diatas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam penataan dan penaatan lingkungan, kehutanan dan perhubungan di Kabupaten Gunung Mas;
b. Pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan limbah berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas hidup;
c. Perencanaan lingkungan hidup, kehutanan dan perhubungan;
d. Pengendalian dan penegakan hukum terhadap lingkungan hidup guna menghindari pencemaran dan pengrusakan;
e. Pelaksanaan perencanaan dan sistem informasi pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
f. Perlindungan dan pemanfaatan kawasan Tahura;
g. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, Membawahkan
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
    3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang terdiri dari :
    1. Bidang Penataan dan Penataan PLH, membawahkan :
        a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
        b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
    2. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahkan:
        a. Seksi Pengelolaan Sampah;
        b. Seksi Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
    3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
        a. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan
        b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan
    4. Bidang Pengelolaan Tahura, membawahkan:
        a. Seksi Penataan dan Rencana Pengelolaan
        b. Seksi Pemanfaatan Pengelolaan dan Pemberdayaan Masyarakat
        c. Seksi Perlindungan dan Pengawetan

5. Bidang Perhubungan, membawahkan:
   d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
   a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan
   b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Personil pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas sebanyak 123 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 41 orang berstatus PNS, 7 orang berstatus PPPK, dan 75 orang berstatus Non PNS (Pegawai tidak tetap). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas menunjukkan 41 orang atau PNS telah menamatkan pendidikan kesarjanaan (D.III hingga S2), sedangkan 7 orang PNS lainnya masih memiliki tingkat pendidikan non kesarjaanaan (D.II hingga SLTA). Pegawai PNS dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan pada dasarnya memiliki tingkat kesiapan individu yang masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan, khususnya di luar urusan administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas masih sangat diperlukan, baik kebutuhan untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun kebutuhan terhadap pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Tabel II.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-3	-	-	
2	S-2	3	3	6
3	S-1	21	5	26
4	D-3	2		2
5.	D-2	-	-	
6.	D-1	-	-	
7.	SMA	3	4	7
Jumlah		29	12	41

Tabel II.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	GOLONGAN	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	1	2
3	Golongan III	23	8	31
4	Golongan IV	6	2	8
Jumlah		30	11	41

Tabel II.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	GOLONGAN	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	1	6
3	Eselon IV	3	1	4
Jumlah		9	2	11

II. 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (RENSTRA)

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkugan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Gunung Mas. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkugan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas, maka keberhasilan pembangunan dibidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan mencapai prosentase kinerja yang maksimal.

Dinas Lingkugan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Evaluasi Renja 2023 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, realisasi kinerja

pada tahun anggaran 2023 adalah seperti tercantum dalam **Tabel II.4**

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas yang telah direncanakan pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Tahura berupa :

   Penyusunan Desain Tapak

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya pada tahun anggaran 2023 telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran.

   Adapun kegiatan tersebut antara lain :

   Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

   Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

   Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Bukti Lulus uji Pengujian Berkala kendaraan bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secarta Elektronik

Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA

Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota

Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota

Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Perencanaan Pengelolaan TAHURA

3. Realisasi program/kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan pada Renja tahun 2023 dan melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada DPA tahun anggaran 2023.

   Adapun kegiatan tersebut antara lain :

   Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

4. Faktor-faktor yang penyebab tidak terpenuhinya, tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain :

   Program/kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran disebabkan antara lain : Karena minimnya pagu indikatif yang diberikan kepada OPD dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani.

   Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran disebabkan oleh bertambahnya alokasi anggaran atas kegiatan tersebut.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

   Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah :

   Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Tanah
   Menurunnya Pencemaran Air, Udara dan Tanah
   Terpeliharanya Kawasan Tahura Lapak Jaru
   Menurunnya lahan kritis dikawasan Tahura Lapak Jaru
   Peningkatan jumlah sarana prasarana perhubungan.
   Peningkatan fasilitas keselamatan transportasi jalan.
   Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.
   Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keselamatan lalu lintas.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam

perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah :

Pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Indentifikasi sasaran prioritas program dan target kinerja program sebelum diusulkan di dalam Renja.

Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Air	skor	52,80	50,00	94,69 %
2.	Indeks Kualitas Udara	skor	83,65	89,64	107,16 %
3.	Indeks Tutupan Lahan	skor	71,75	70,66	98,48 %
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	69,45	70,58	101,62 %

Dari hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas, indeks pencemaran air ditahun 2023 50,00 dengan tingkat capaian 94,69%, (kategori IKLH Cukup) Indeks Pencemaran Udara di

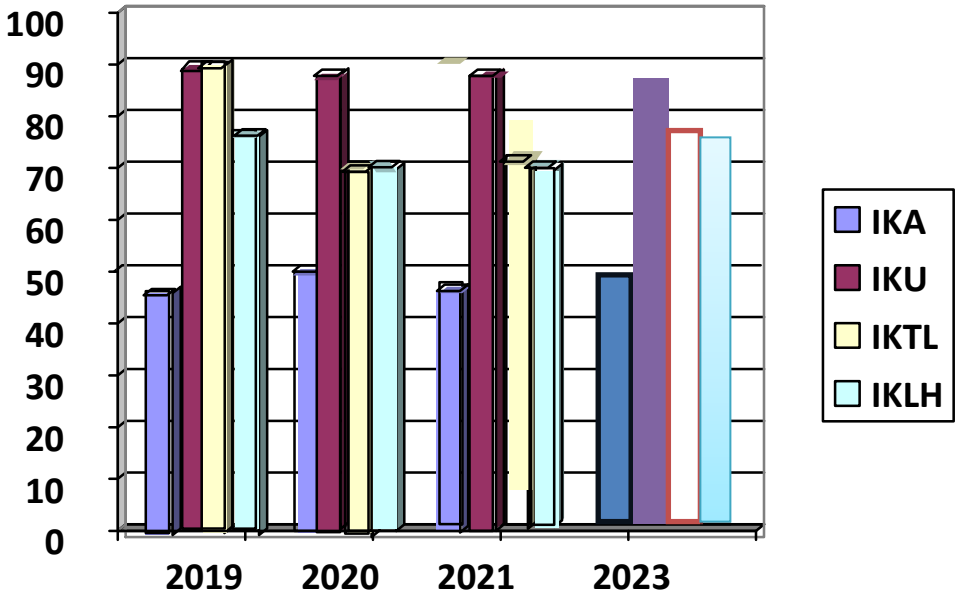
tahun 2023 89,64 dengan tingkat capaian 107,16%, (kategori IKLH sangat baik) sedangkan untuk Indeks Tutupan Lahan di tahun 2023 70,66 dengan tingkat capaian 98,48 % (kategori IKLH Baik).

Persentase rencana tingkat realisasi dan capaian yang belum optimal dikarenakan akibat aktifitas pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di Daerah Aliran Sungai sehingga berpengaruh terhadap indeks pencemaran air.

Berikut hasil analisis pencapaian sasaran tahun terakhir :

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Air	skor	52,70	45.00	85,38%
2.	Indeks Kualitas Udara	skor	83,55	87.75	105,02%
3.	Indeks Tutupan Lahan	skor	70,02	71.25	101,75%

Grafik
3.A1
Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4 Tahun Terakhir



Hal-hal yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain adalah :

1. Unit kerja belum mampu merencanakan program dan atau kegiatannya sekaligus pengeluarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, skala prioritas dan sasaran dan indikator kinerja
2. Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih bergantung pada pekerjaan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI).
3. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan belum sesuai arah kebijakan dan perencanaan daerah

B. Bidang Kehutanan

Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator	Capaian 2021	2023		Capaian %
			Target	Realisasi	
1	Luas kawasan Tahura Lapak Jaru yang terpelihara dan terjaga kebersihannya	96,73 Ha	37,65 Ha	41,28 Ha	100%

Dari hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas, Luas kawasan Tahura Lapak Jaru yang terpelihara dan terjaga kebersihannya ditahun 2023 41,28 Ha dengan tingkat capaian 100%, (kategori sangat berhasil).

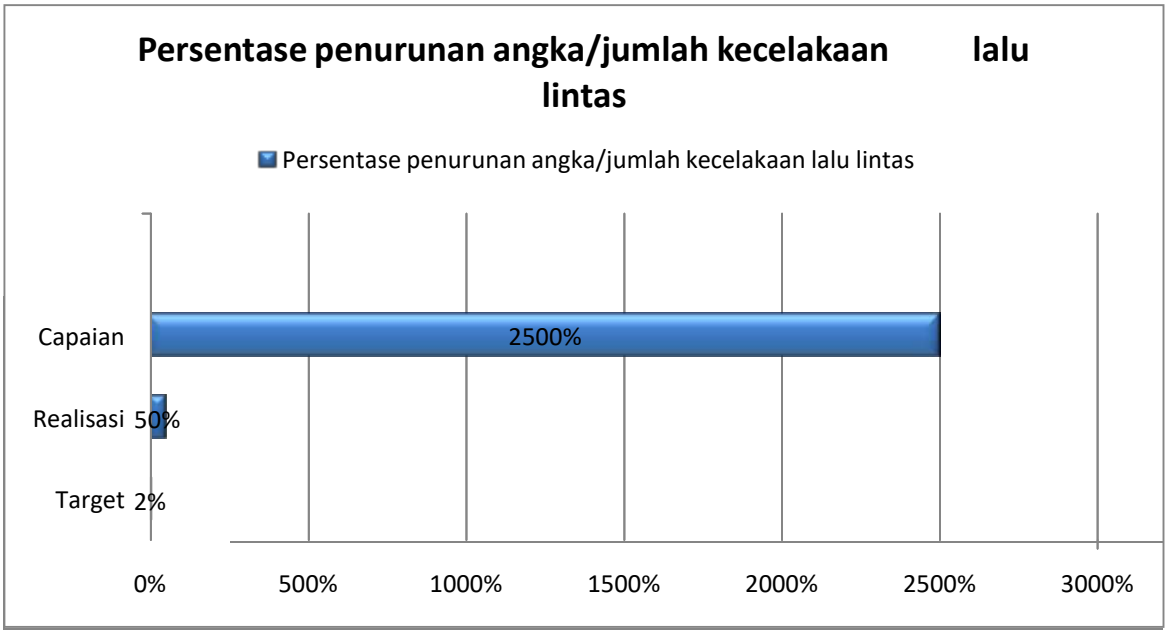
C. Bidang Perhubungan

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

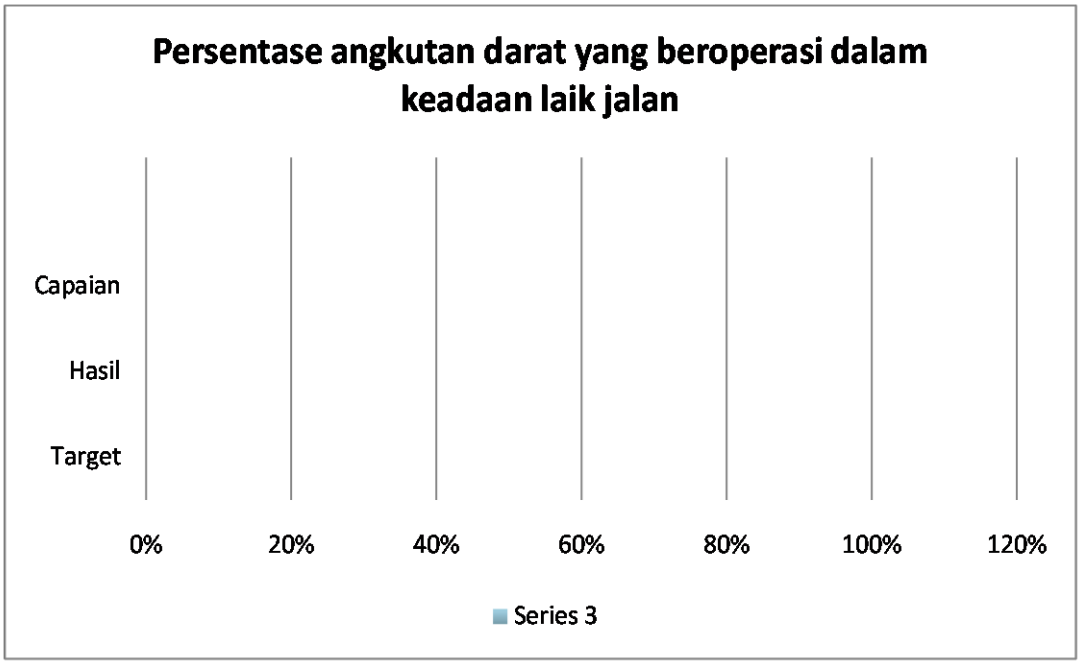
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya keamanan dan keselamatan Transportasi	Persentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas	2%	50%	2500%	Sangat Berhasil
		Persentase angkutan darat yang	40%	45,14%	112,8%	Sangat Berhasil

		beroperasi dalam keadaan laik jalan				

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.



INDIKATOR KINERJA UTAMA 2



NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Persentase ratio fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang	-%	-%	-%	-
		Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas				
2.	Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Persentase peningkatan Uji KIR Angkutan Darat Tepat Waktu	45%	40%	98%	Sangat Berhasil

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
.	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas terpasang	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	- Unit	- Unit	-%	-
.	Tersedianya material Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah material pengujian kendaraan bermotor	400 Kartu	400 Kartu	100%	Sangat Berhasil
.	Terwujudnya kesadaran pengguna kendaraan terhadap uji	Jumlah kendaraan Uji KIR baru	200 Unit	106 Unit	53%	Cukup Berhasil

	kelaikan kendaraan bermotor					
.	**Terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor Bagi Wajib Uji (KBWU)**	**Jumlah Kendaraan yang Melakukan Pengujian**	**1000 Unit**	**598 Unit**	**59,8%**	**Cukup Berhasil**

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas dapat dijelaskan sebagai berikut :

"SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI"

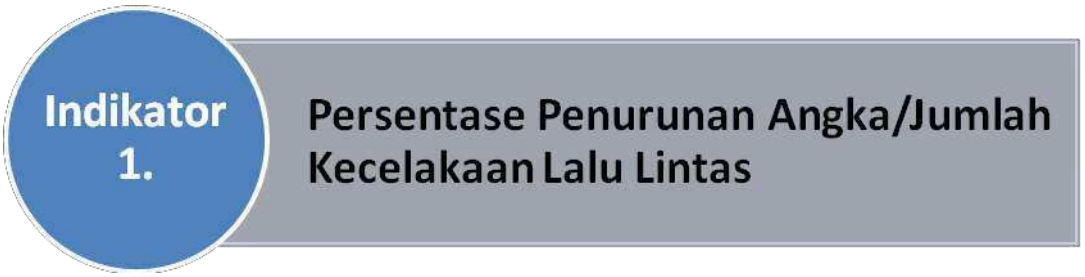
Sasaran ini merupakan upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas, Penanggungjawab atas pencapaian sasaranMeningkatnya keamanan dan keselamatan lalu lintas untuk meningkatkan pemenuhan prasarana dan keselamatan dan keamanan transportasi darat serta menurunkan tingkat kecelakaan tersebut.

Untuk mendukung keberhasian pencapaian sasaran ini telah ditetapkan dengan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. • Persentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas
2. • Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan

Pada sasaran strategis "Meningkatnya keselamatan dan keamanan dan lalu lintas" dengan 2 (dua) indikator diatas, dengan kategori capaian tidak berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran strategis diatas terlaksana dengan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2023.



Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Perhubungan sejauh mana dapat menurunkan/menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Pencapaian indikator persentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas dengan target dan realisasi sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	% Capaian Kinerja 2021	% Target 2022	% Realisasi 2022	% Capaian 2022	% Reali-sasi Tw.I 2022	% Reali-sasi Tw.2 2022	% Reali-Sasi Tw.3 2022	% Reali-sasi Tw.4 2022
1.	**Persentase penurunan angka/ jumlah kecelakaan lalu lintas.**	%	(25%)	2	50%	2500%	-	-	-	-

Pencapaian Indikator kinerja ini diperoleh dengan membandingkan angka/kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2023 terhadap angka/kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

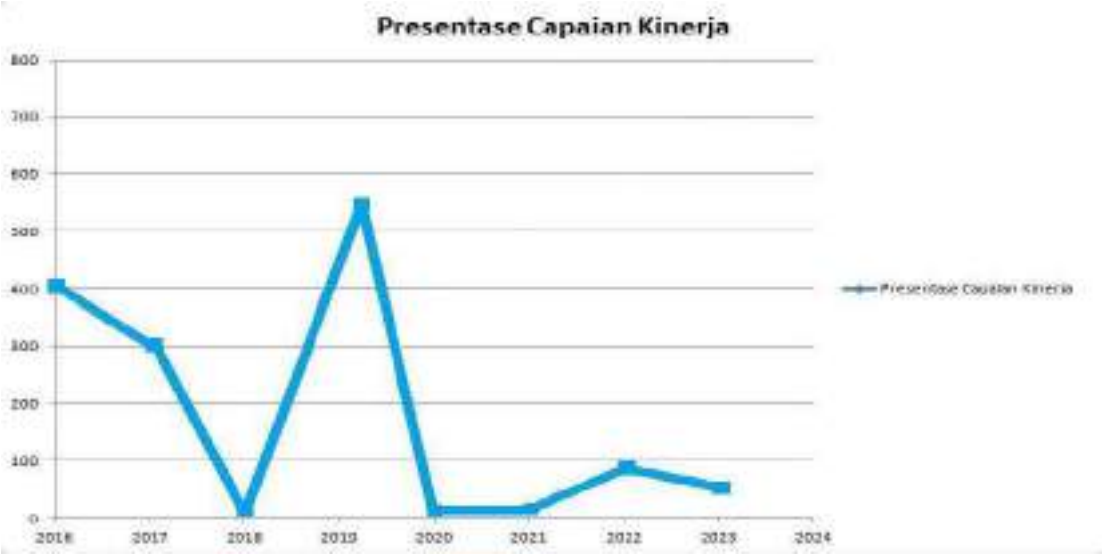
Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja atas indikator Persentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas **sebesar 50% dari target kinerja indikator** yang sebesar 2%, sehingga capaian kinerja atas indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 2500% dan dikatakan ***Sangat Berhasil.*** Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022, capaian kinerja tahun 2023 mengalami Kenaikan , dimana

jumlah kasus kecelakaan tahun 2023 sebanyak 32 kasus, jumlah kecelakaan tahun 2022 yaitu 15 kasus kecelakaan lalu lintas.

Dari data diketahui pada tahun 2023 terjadi 32 kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 15 korban meninggal dunia, 12 Korban luka berat dan 28 korban luka ringan yang menimbulkan kerugian material senilai Rp, 331.800.000, kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022.

Jika dibandingkan dengan target 2022 kasus kecelakaan lalu lintas harus dapat diturunkan, dari 32 kasus menjadi 15 kasus kecelakaan, sehingga realisasi capaian 2023 terhadap target capaian hingga tahun 2023 adalah sebesar 50%. Karena itu masih diperlukan upaya yang konsisten, sistematis dan terencana dari semua pihak terkait.

Grafik 3.1
Perkembangan Capaian Kinerja Utama

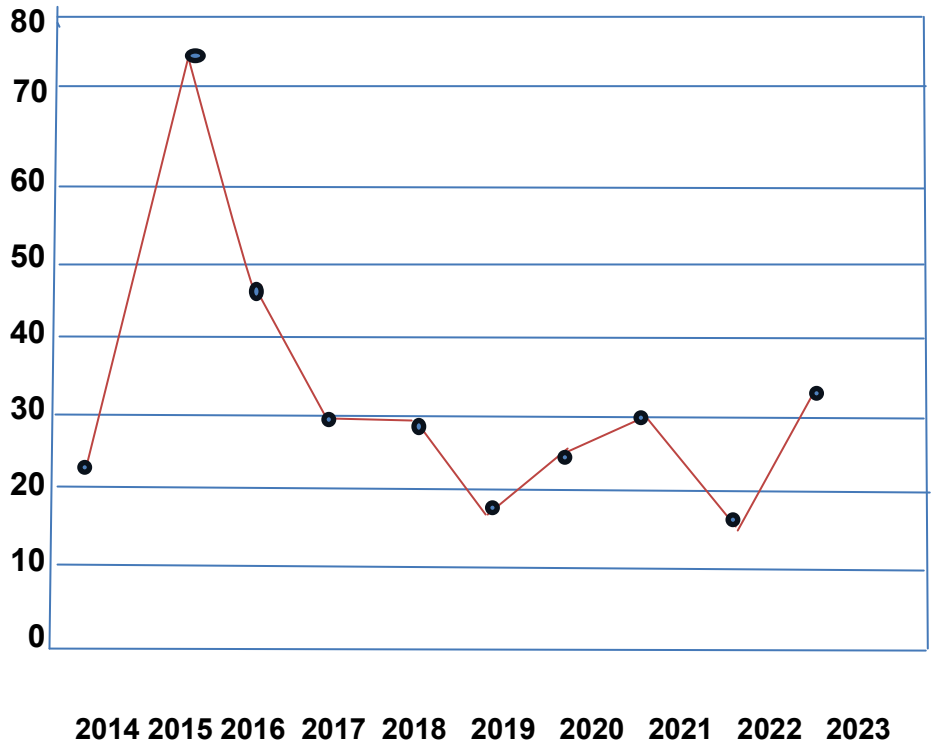


Tabel 3.2
Data Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Gunung Mas

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	45	30	29	14	24	30	15	32

2	Kerugian Material	346 Juta	239 Juta	103 Juta	60,5 juta	197,5 juta	388 juta	166,5 Juta	331.800 Juta

Grafik 3.2
Perkembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Gunung Mas



Pencapaian target indikator kinerja persentase penurunan angka/jumlah kecelakaan lalu lintas dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA 2022	TW.I 2022	TW.II 2022	TW.III 2022	TW.IV 2022
1.	Persentase ratio fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang	-%	-%	-%	-%	-	-	-	-
2.	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	- %	-	-	-	-	-	-	-

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini juga didukung dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja program, adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama antara lain yaitu : **Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas.**

Sasaran dari pelaksanaan program tersebut adalah Meningkatnya keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja program :

1. **Persentase(rasio) fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang,**

   Indikator ini diukur dengan memperhitungkan jumlah fasilitas keselamatan jalan terpasang terhadap jumlah kebutuhan fasiltas keselamatan jalan.

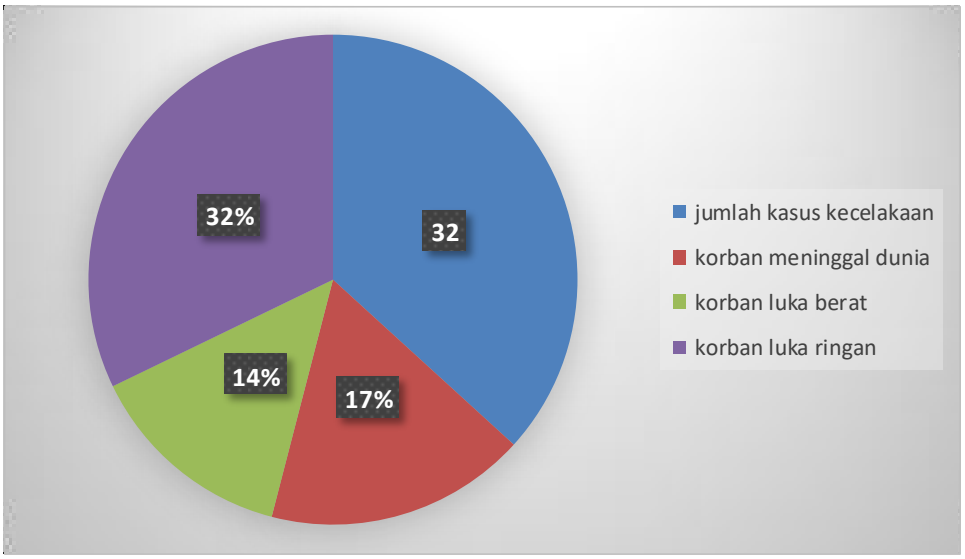
   Pencapaian indikator persentase (rasio) fasilitas keselamatan LLAJ terpasang adalah 0% atau 0% dari target yang sebesar 0%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori capaian **"tidak berhasil".**

   Jika dibandingkan dengan tahun 2020 Pencapaian indikator persentase (rasio) fasilitas keselamatan LLAJ terpasang adalah -%, tidak ada peningkatan capaian kinerja sebesar -% dari tahun 2021.

Tabel 3.3
Data Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

No.	Jenis Fasilitas Keselamatan	Satuan	TAHUN							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rambu Lalu Lintas	Unit	75	-	85	85	85	85	-	-
2	RPPJ	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Warning Lamp	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Rambu Papan Keselamatan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Paku Jalan	Buah	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Marka Jalan	Meter	-	6200	4500	-	-	-	-	-
7	APILL	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-

Grafik 3.3
Data Korban Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023



Pencapaian Indikator Kinerja Program didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan sasaran kegiatan tersedianya rambu lalu lintas terpasang, dengan indikator kinerja kegiatan jumlah rambu lalu lintas terpasang, capaian indikator ini mencapai 0 unit atau 0% dari target sebesar 0 unit tidak terlaksana karena terbatasnya anggaran.

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas menargetkan pada tahun anggaran berikutnya dapat mengupayakan pencapaian indikator ini sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, upaya pencaipaian target pada tahun anggaran berikutnya diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan penambahan anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sehingga dapat mengalokasikan anggaran yang bertambah pada kegiatan peningkatan fasilitas keselamatan transportasi di wilayah

Kabupaten Gunung Mas dengan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan, serta upaya lain antara lain Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan yang ada di Palangka Raya untuk kemungkinan mendapatkan bantuan fasilitas keselamatan jalan.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur diatas, penurunan angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 juga didukung oleh kegiatan yang tidak terkait pembangunan infrastruktur:

a) **Pengawasan dan Pengendalian Rutin Arus Lalu Lintas dan Angkutan**

   Kegiatan ini berupa pemantauan terhadap arus lalu lintas mudik dan arus balik pada saat hari raya besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri dan Natal), kegiatan ini untuk memastikan kelancaraan arus lalu lintas kendaraan yang mengantarkan masyarakat untuk mudik dan balik pada periode ini, serta memberikan bantuan penanganan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

b) **Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

   Forum ini beranggotakan antara lain Satlantas Polres Gunung Mas, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, BP3D, Satpol PP, kegiatan rapat koordinas yang dilakukan setiap bulannya secara bergantian untuk melakukan evaluasi penyebab kecelakaan lalu lintas dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta bentuk lain adalah melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah mengenai keselamatan berlalu lintas dalam wujud pengenalan rambu lalu lintas.

Secara umum capaian kinerja menurunnya angka/jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 adalah **Sangat Berhasil**, namun kedepan untuk tetap berusaha meningkatkan capaian indikator ini pada tahun berikutnya, beberapa hal dianggap perlu dilaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalulintas dan angkutan jalan serta sarana danprasarana lalu lintas.

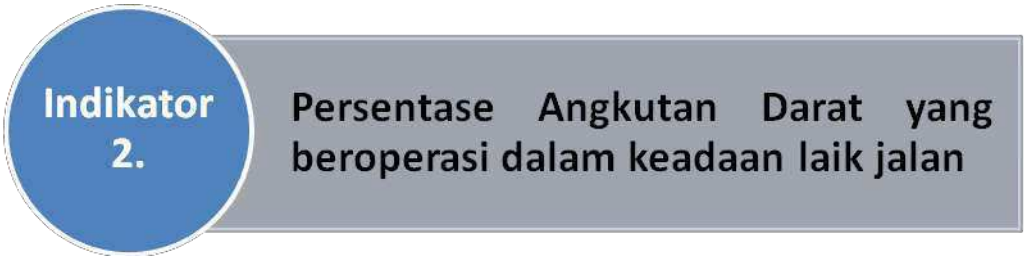
2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakatmelalui berbagai media antara lain :

   penyuluhan langsung seperti ke sekolah-sekolah

   siaran radio

   spanduk, poster, leaflet, stiker, website

3. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan dijalan bekerja sama dengan Polres Gunung Mas.
4. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas,marka jalan, APILL, Flashing Lamp, guardraill) dan fasilitas pendukungkeselamatan lalu lintas (LPJU).
5. Koordinasi dengan DPU untuk pelaksanaan perbaikan jalan



Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan sejauh mana dapat meningkatkan persentase jumlah angkutan darat yang lulus uji KIR. Pencapaian indikator persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.

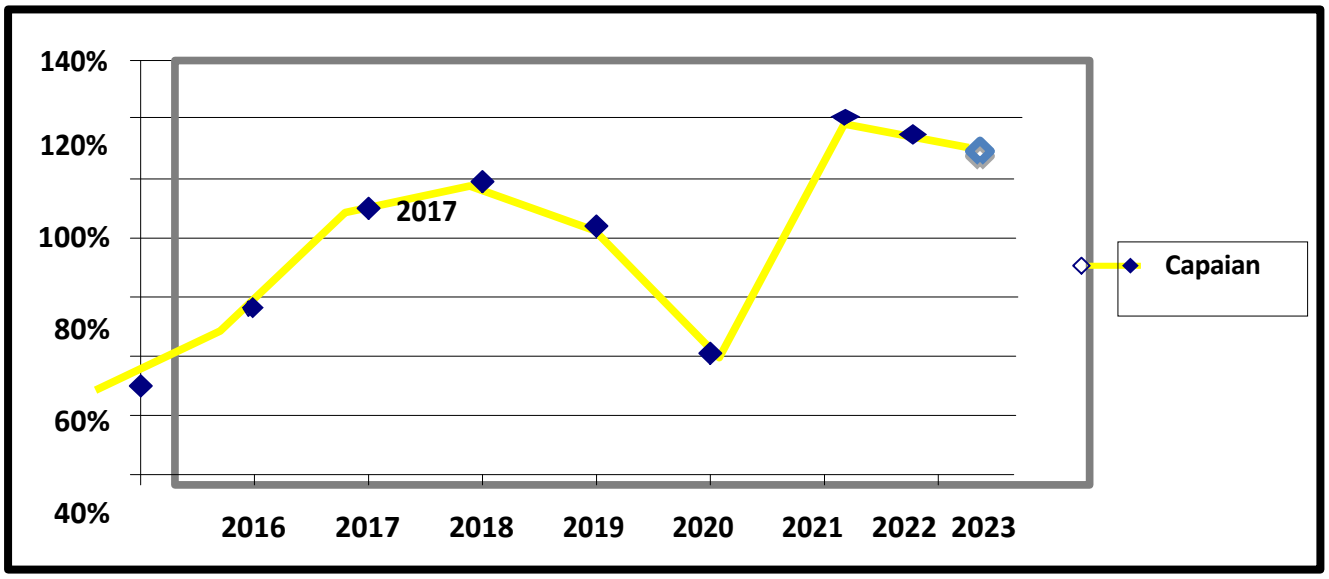
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	% Capaian Kinerja 2021	% Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Kinerja 2023	Capaian Tw.I	Capaian Tw.II	Capaian Tw.III	Capaian Tw.IV
1.	**Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan**	%	48	112,8	40%	45,14%	112,8 %	-	-	-	-

Pencapaian Indikator kinerja ini diperoleh dengan membandingkan jumlah angkutan darat yang lulus uji KIR pada tahun 2023 terhadap jumlah angkutan darat yang beroperasi diwilayah Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2023.

Realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan **sebesar 45% atau 112% dari targetnya** yang sebesar 40%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil.**

Dari data yang tersaji capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 30%, meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 50% dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 90%, tahun 2018 mencapai 99,2%, tahun 2019 mencapai 84% , pada tahun 2020 mencapai 41% artinya terjadi penurunan sebesar 43% dan pada tahun 2021 terealisasi 48 % dari target 40% dengan capaian 120%.

Grafik 3.4
Capaian Kinerja Persentase Angkutan Darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan



Pencapaian target indikator kinerja persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja program dan
indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	TRI WULAN I	TRI WULAN II	TRI WULAN III	TRI WULAN IV
1.	Persentase peningkatan Uji KIR Angkutan Darat Tepat Waktu	112%	45%	40%	98%	32	20	33	13
2.	Jumlah material pengujian kendaraan bermotor	100%	600 Kartu	598 Kartu	99,6%				598
3.	Jumlah kendaraan Uji KIR baru	70%	200 Unit	106 Unit	53%				106
4.	Jumlah kendaraan yang melakukan pengujian	67,4%	1000 Unit	598 Unit	59,8 %				598

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran ini juga didukung dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja program, adapun Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja utama antara lain yaitu: **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.**

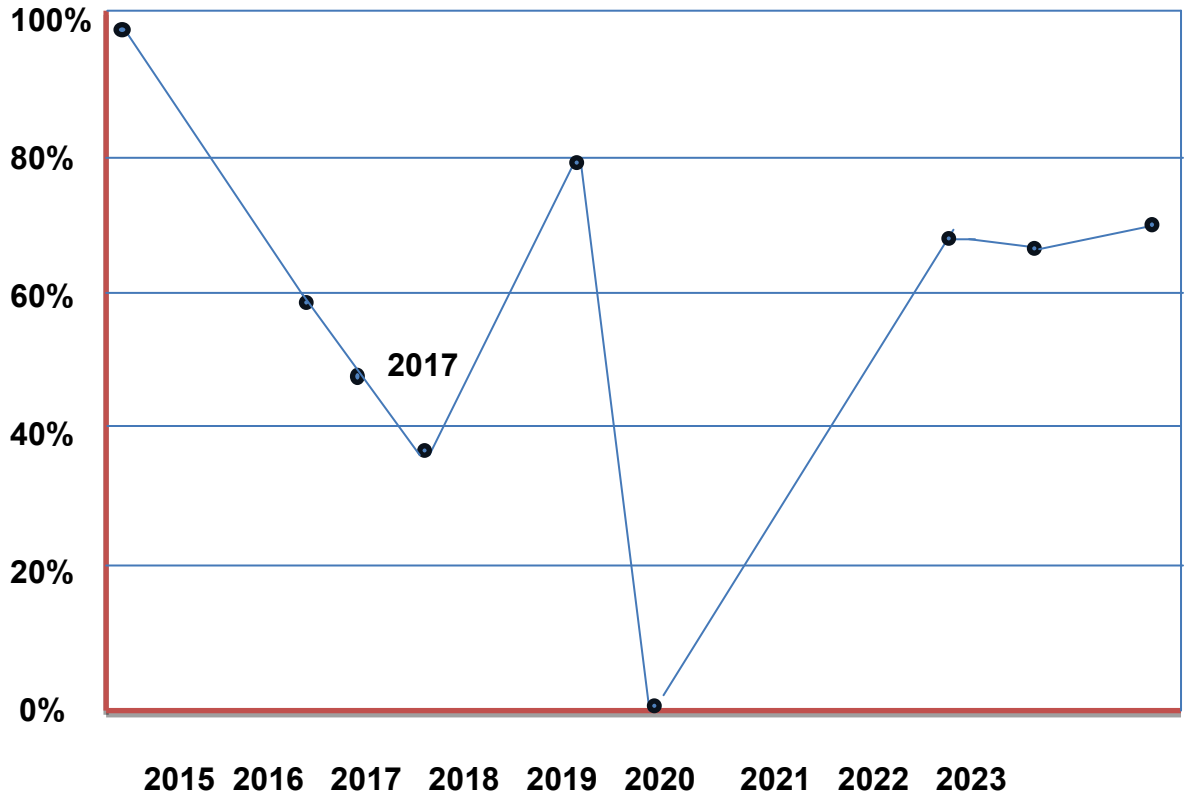
Sasaran dari pelaksanaan program tersebut adalah *meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor*. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, Dinas Perhubungan menetapkan indikator kinerja program yaitu : **Persentase peningkatan uji KIR Angkutan Darat tepat waktu**

Realisasi Peningkatan Uji KIR Angkutan Darat Tahun 2023

No	Keterangan	Satuan	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Kinerja 2023
1.	Peningkatan Uji KIR Angkutan Darat tepat waktu	%	120	41	112	45	40	98%

Jumlah Uji KIR Angkutan Darat pada tahun 2023 sebanyak 598 unit, sehingga pencapaian indikator persentase peningkatan uji KIR Angkutan Darat tepat waktu adalah 98% atau 40% dari target yang sebesar 45%. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil.**

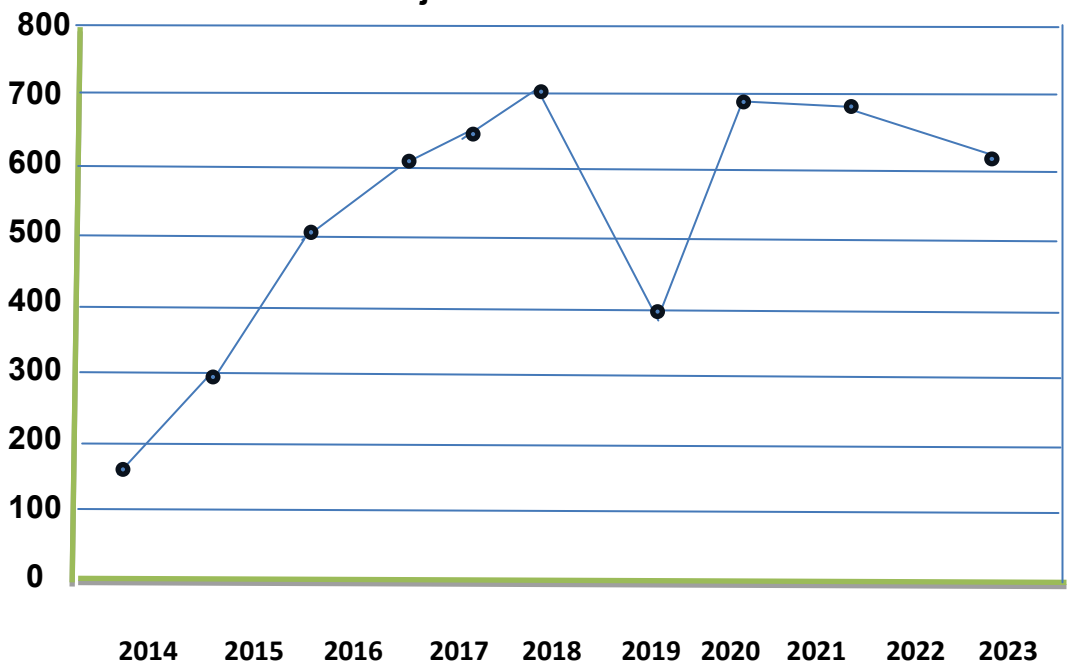
Grafik 3.5
Capaian Kinerja Peningkatan
Uji KIR Angkutan Darat



Jumlah kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang melakukan pengujian di unit layanan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendara	Tahun								Ket
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pick Up	450	450	505	485	515	515	438	343	
2	Mini Bus	2	2	3	3	3	3	2	3	
3	Truck	65	65	91	143	202	202	236	252	
4	Tangki	1	1	6	6	6	6	3	4	
TOTAL		**164**	**313**	**518**	**605**	**637**	**726**	**679**	**602**	

Grafik 3.6
Jumlah Uji KIR Kendaraan Umum



Pencapaian Indikator Kinerja **Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor,** didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

Pengadaan Material dan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan sasaran kegiatan Tersedianya material pengujian kendaraanbermotor, dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah material pengujian kendaraan bermotor, capaian indikator ini mencapai 1000 Unit atau 100% dari target sebesar 1000 unit, realisasi pelaksanaan kegiatan ini terlaksana pada triwulan Ii tahun 2023, capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian SANGAT BERHASIL.

Realisasi Jumlah Kendaran Uji KIR Baru

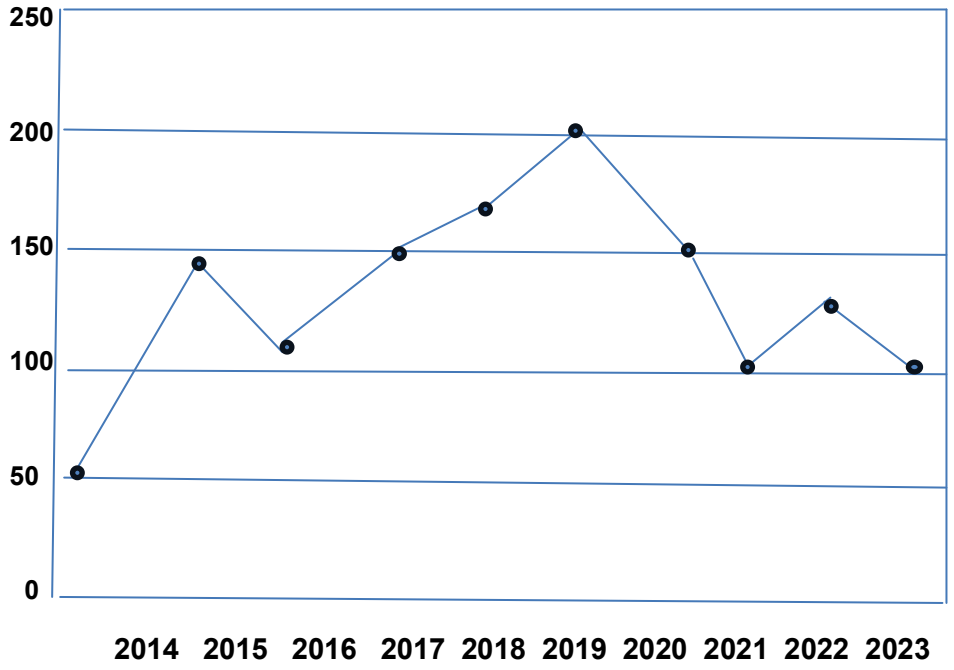
No	Keterangan	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi `2018	Realisasi 2019	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian Kinerja 2023
1.	Jumlah Kendaraan Uji KIR Baru	Unit	150	160	200	200	140	200	206	53%

Jumlah kendaraan bermotor Uji KIR Baru yang melakukan pengujian di unit layanan

pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Satuan	Tahun									Ket
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	
1	Uji KIR	Unit	63	138	103	150	160	200	145	140	106	
		-		-	-	-	-					
TOTAL		164	63	138	103	150	160	200	145	140	106	

Grafik 3.8
Jumlah Uji KIR Baru



Adapun jenis kendaraan yang telah dilakukan uji berkala pada tahun 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Kendaraan Jenis Pick Up sebanyak 343 unit.

Kendaraan Jenis Mini Bus sebanyak 3 unit.

Kendaraan Jenis Truck sebanyak 253 unit.

Kendaraan Jenis Tangki sebanyak 4 unit

Apabila dibandingkan dengan capaian target indikator kinerja tahun 2022 (tahun sebelumnya), persentase peningkatan Uji KIR Angkutan Darat tepat waktu tahun 2022 sebesar 45%, maka terjadi peningkatan pencapaian target kinerja indikator pada tahun 2023 sebesar 98 %.

Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas menargetkan pada tahun anggaran berikutnya dapat mengupayakan pencapaian indikator ini sesuai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, upaya pencapaian target pada tahun anggaran berikutnya, Dinas Perhubungan akan kembali melakukan sosialisasi kepada pihak perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha perusahaan serta pemilik kendaraan untuk melakukan uji KIR tepat waktu

3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Perhubungan Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan meliputi manajemen operasional serta pembangunan sektor lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melakukan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bidang Perhubungan Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Indikator Kinerja berdasarkan :

Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2023

Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan

a. Pelayanan Bidang Lalu Lintas

Tahun anggaran 2023 pelayanan yang berhasil ditingkatkan antara lain pemliharaan traffic light tenaga surya dan adanya jembatan timbang portable.

b. Pembinaan kesadaran tertib berlalu lintas

Kegiatannya berupa pembinaan keselamatan lalu lintas kepada pelajar, pembinaan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melibatkan Satlantas dan Perangkat Daerah yang terkait.

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Jumlah Kendaraan Uji KIR baru	200	106
2.	Jumlah Arus Penumpang	16.000	52.374
3.	Rasio Izin Trayek	-	-
4.	Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor	1000	598
5.	Jumlah Bandara	1	1
6.	Jumah Terminal Bis	1	1
7.	Jumlah Rambu Lalu Lintas	-	-
8.	Panjang Marka Jalan	-	-
9.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	2%	50%
10.	Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas	-	-
11.	Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan	40%	45,14%
12.	Persentase peningkatan Uji KIR Angkutan Darat Tepat Waktu	45%	40%

Sarana Prasarana dan fasiltas keselamatan transportasi yang telah dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas :

1. Mendirikan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor/KIR yang pembangunannya dilakukan secara bertahap yang dimulai pada Tahun Anggaran 2011.
2. Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
3. Peningkatan Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas,

4. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan,
5. Pengadaan Warning Lamp,
6. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor,
7. Pengadaan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Papan peringatan keselamatan berlalu lintas,
9. Papan penerangan rambu lalu lintas,
10. Pengadaan Marka Jalan,
11. Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan,
12. Pembangunan Pos Pengawasan Lalu Lintas,
13. Pembangunan Halte,
14. Pengadaan rambu-rambu sungai.
15. Pembangunan Dermaga Ferry Penyeberangan di Tumbang Empas dan Tumbang Kajuei.
16. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL).

II. 4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Bidang Perhubungan Kabupaten Gunung Mas telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan perhubungan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perhubungan Kabupaten Gunung Mas antara lain :

Belum memiliki Angkutan Umum Dalam Trayek maupun Tidak Dalam Trayek yang melayani wilayah jalan kabupaten.

Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi dintaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.

Rendahnya disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan

tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Belum memiliki Angkutan Umum yang melayani trayek yang menghubungkan daerah antar kecamatan/desa dengan ibukota kabupaten.

Minimnya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Gunung Mas, seperti Marka Jalan, Rambu, RPPJ, Guardrail, Deleniator, Warning Light, Traffic Light dan lain sebagainya. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan adanya aksi pencurian dan perusakan/*vandalism*.

Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah.

Belum memiliki terminal penumpang tipe C yang memenuhi standar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.

Minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis dan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan.

Terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan

Kurang kondusifnya para pemilik angkutan umum secara pribadi dengan adanya pengelolaan angkutan umum harus berbentuk badan usaha.

Belum adanya management permintaan angkutan (Traffic Demand Management) terhadap penggunaan kendaraan Pribadi.

Belum adanya subsidi operator angkutan umum.

Tantangan yang dihadapi :

Belum tersedianya angkutan umum yang melayani rute dalam wilayah kabupaten.

Masih adanya parkir tepi jalan umum yang mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Belum tersedia pelayanan bidang Perhubungan yang berbasis IT (Information Technologi).

II. 5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, Ada Beberapa Perubahan perbedaan yang signifikan pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Perangkat Daerah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel II.5 berikut ini:

II. 6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkaitlangsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan. Usulan tersebut diakomodir dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kecamatan sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan dalam merumuskan program dan kegiatan untuk tahun rencana yang akan berjalan dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Penelitian, Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, ***Belum Ada*** usulan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas selama 5 (lima) tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategi menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat diprediksi indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah kedalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja pada setiap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) dengan efektif dan efisien.

III. 1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumberdaya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan

sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian

Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

   Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

   1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :
      i. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi.
      ii. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang keselamatan transportasi.
      iii. Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam peningkatan

kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

iv. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini.

v. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar keselamatan .

vi. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

vii. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan.

viii. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

ix. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya;

x. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah. RUNK adalah rencana keselamatan jalan jangka panjang yang diilhami oleh semangat *Decade of Action for Road Safety* 2011-2020 Perserikatan Bangsa Bangsa yang dideklarasikan pada Maret 2010. Untuk itu maka 10 tahun pertama dari RUNK telah ditetapkan menjadi Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020

dengan Instruksi Presiden No. 4/2013 tertanggal 11 April 2013.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan 5 Pilar Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang meliputi:

1) Manajemen keselamatan jalan, dikoordinasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tanggung jawabnya adalah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral.

2) Jalan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

3) Kendaraan yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

4) Perilaku pengguna yang berkeselamatan, dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian RI.

5) Penanganan pra dan pasca kecelakaan, dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan

2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui strategi :

i. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi.

ii. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan keamanan transportasi .

iii. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam keamanan penumpang

iv. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme, perompakan, pembajakan, teroris, dll)

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

i. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

ii. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

iii. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan.

iv. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.

v. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan.

vi. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi.

vii. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

i. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda.

ii. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang.

iii. Meningkatnya layanan transportasi didaerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia.

iv. Meningkatnya pelayanan angkutan umum missal perkotaan.

v. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PD

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas pada Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan serta meningkatkan pembangunan sarana prasarana sesuai fungsinya untuk kelestarian kawasan kawasan Tahura lapak Jaru
3. Mewujudkan kepastian hukum status kawasan, inventarisasi dan rehabilitasi kawasan Tahura Lapak Jaru
4. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi antar wilayah

Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas

Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas pada Rencana Kerja Tahun 2025 adalah :

a. Mewujudkan layanan transportasi publik yang aman dan lancar.

b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan kebijakan dan program sebagaimana telah diuraikan, kegiatan Dinas Perhubungan disusun suatu kegiatan Rencana Kerja (RENJA) dari semua bidang/bagian, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan dalam kurun waktu selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2025.

Adapun Kegiatan Tahun 2025 yang di rencanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas besrta atribut kelengkapannya

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
   - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
   - Sub Kegiatan Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   a. KegiatanPenyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
      - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
      - Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintahan Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
   a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
      - Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat.
9. Program Pengelolaan Persampahan
   a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
      - Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
      - Sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

- Sub Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- Sub Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
- Sub Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TP3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya Dengan Peraturan Perundangan

10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
        - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
        - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor
        - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan Kabupaten/Kota
        - Pengadaan dan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
        - Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
        - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

c. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
   - Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

11. Program Pengelolaan Pelayaran
    a. Kegiatan Penerbitan izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha
        - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan domisili orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota
12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
    a. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/kota
        - Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Kabupaten/kota
        - Sub Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Tahura Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/Kota
        - Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Tahura

Faktor – Faktor yang Menjadi Pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, adalah:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah yaitu potensi dari hasil retribusi parkir, terminal pengujian kendaraan bermotor, retribusi sampah, retribusi tempat pariwisata (tahura) dan retribusi penyeberangan air.

Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 12 program dengan total kegiatan 22 kegiatan dan 46 Sub Kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah berpusat di Kabupaten Gunung Mas yang mencangkup wilayah kecamatan dan kelurahan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 16.817.495.472 yang sumber pendanaannya adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.

INDIKATOR KINERJA

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
6. Luas Kawasan Tahura Lapak Jaru yang terpelihara dan terjaga kebersihannya

KELOMPOK SASARAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

1. Meningkatnya baku mutu air, udara dan tanah
2. Terpeliharanya Kawasan Tahura Lapak Jaru
3. Keselamatan

   Menurunnya tingkat kecelakaan angkutan kabupaten dengan menetapkan standar teknis ketentuan/aturan serta peningkatan SDM. Hal ini dapat terlaksana dengan penataan organisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan daerah, keputusan bupati dan instruksi maupun petunjuk teknis.
4. Kualitas Pelayanan

   Meningkatkan standar kualitas pelayanan sesuai ketentuan dengan menyelenggarakan manajemen lalu lintas darat, sungai dan udara melalui kegiatan pembinaan teknis dan pendidikan latihan teknis fungsional maupun struktural.
5. Aksebilitas dan Konektivitas

   Mewujudkan penyelenggaraan transportasi angkutan yang mampu mengakses seluruh wilayah kabupaten.
6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan, melalui kegiatan pembangunan dermaga sungai, pembangunan

gedung pengujian kendaraan bermotor (KIR), terminal, rambu-rambu lalu lintas dan pengadaan peralatan teknis.

7. Lingkungan

   Menciptakan sistem transportasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan survey lapangan, koordinasi teknis, pengawasan lapangan dan pengendalian penetiban perijinan.

IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Pakaian Dinas besrta atribut kelengkapannya

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. KegiatanPenyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPMD

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota

b. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

6. **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

      Pengawasan Perizinan Berusaha Atau Persetujuan Pemerintahan Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
   a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

      Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
8. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**.
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota

      Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
9. **Program Pengelolaan Persampahan**
   a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

      Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.
      Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi Daerah Pengolahan Sampah Kabupaten/Kota

Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan kembali Sampah

Sub Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TP3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya Dengan Peraturan Perundangan

10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

b. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

c. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

11. Program Pengelolaan Pelayaran

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota

12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

a. Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota

Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA

Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota

Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota

Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Perencanaan Pengelolaan TAHURA

V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tahun 2025 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunung Mas. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas. Selain itu, ketersediaan kapasitas sumber daya aparatur perlu sekali ditingkatkan baik mutu dan jumlahnya. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur (keahlian dan keterampilan) sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan. Namun demikian apabila terjadi ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan rencana kerja, maka program/kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan harus ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu.

Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu (RKP, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra PD).
2. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan

dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

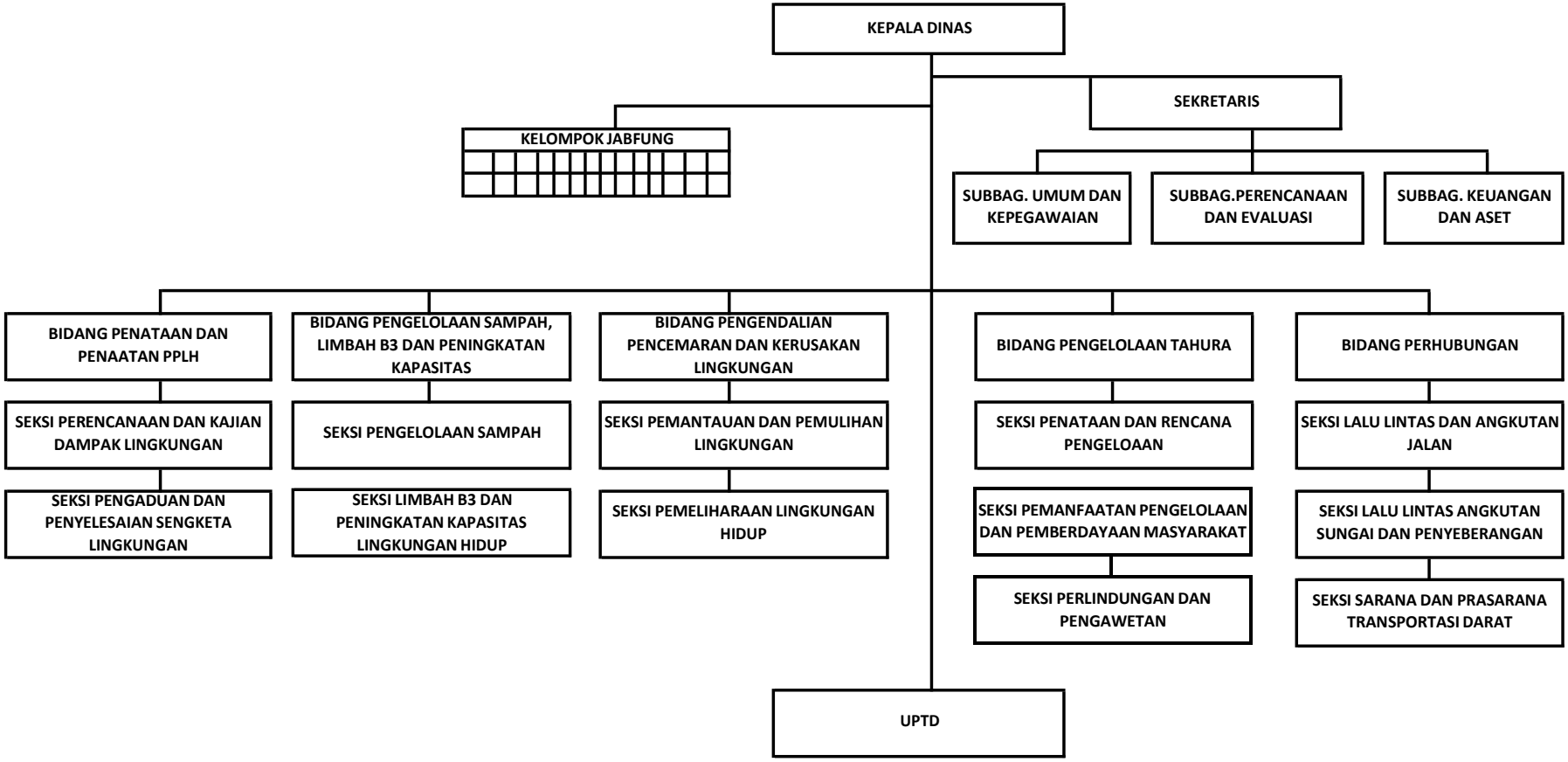
Apabila dalam perjalanan organisasi, terjadi perubahan kebijakan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian.

Kuala Kurun, Juni 2024
Kepala Dinas,



RODY ARISTO ROBINSON, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196712191996031002

NAMA INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS



TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaiaan Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas
Periode sampai dengan Tahun 2024

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2022 (n-2)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2024	
											TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1					2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						URUSAN WAJIB										
						BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN										
1	2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	2	1	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Jenis	35	7	7	35	100	7	35	100
	2	1	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji	Jumlah	300	60	60	300	100	60	300	100
	2	1	01	2.03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset	Jumlah	5	1	1		100	1	5	100
	2	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Jumlah	-	-	50	50	100	50	50	100
	2	1	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Jumlah	15	3	3	15	100	3	15	100
	2	1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang tersedia	Jenis	45	9	9	45	100	9	45	100
	2	1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Lembar	262,500	52,500	52,500	262,500	100	52,500	262,500	100
	2	1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKH tersedia	SKH	20	4	4	4	100	4	4	100
	2	1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor tersedia	Jenis	160	32	32	160	100	32	160	100
	2	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	Jenis	45	9	9	45	100	9	45	100
	2	1	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Daam dan Luar Daerah	Kali	625	125	125	625	100	125	625	100
	2	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Tersedia	Lembar	5,000	1,000	1,000	5,000	100	1,000	5,000	100
	2	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas air, telpon, listrik dan internet kantor	Jumlah	15	3	3	15	100	3	15	100
	2	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	Jenis	80	16	16	80	100	16	80	100
	2	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Operasional dan Mobil Jabatan dalam Keadaan Baik	Jumlah	10	2	2	10	100	2	10	100
	2	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan an Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Pelengkpan Kantor terpelihar dalam kondisi baik	Jumlah	210	42	42	210	100	42	210	100
	2	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara dalam kondisi baik	Jumlah	10	2	2	10	100	2	10	100
2	2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Lingkungan									
	2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan Hidup	Jumlah	5	1	1	5	100			
	2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS Revisi RTRWK	Dokumen	-	1	1	1	100			#DIV/0!
	2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD	Dokumen	-	-	-	-	#DIV/0!	1		#DIV/0!
3	2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hdup									
	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan akan terhadap Mela Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersedianya alat sistem pemantauan kualitas air	Paket	-	1	1	2	100	1	2	#DIV/0!
	2	11	03	2.01	03	Pengeloalaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan Kualitas Air	Sungai	20	4	4	20	100	4	20	100
4	2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)										
	2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Pembangunan RTH	lokasi		-	-	-	#DIV/0!	5		
5	2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)										
	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	tersedianya data pelaku usaha terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah	30	6	6	30	100	6	30	100
6	2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)										
	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wajib Usaha yang dilakukan Pengawasan	Jumlah	30	6	6	44	100	20	44	147
7	2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan										
	2	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan	Terlaksananya rapat kampanye pembatasan, daur ulang dan pengurangan sampah	Kegiatan		1	1	5	100	1		
	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengolahan Sampah di TPA	Tahun	5	1	1	5	100	1	5	100

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2019	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D. TAHUN 2022 (n-2)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D. TAHUN 2023	
											TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	1					2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan di Kecamatan	Kecamatan			-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!
	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	Paket	5	1	1	5	100	1	5	100
8	2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										
	2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya sosialisasi, identifikasi dan sertifikat pembentukan MHA	Kegiatan	5	1	1	5	100	1	5	100
9	2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat										
	2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Sekolah	60	12	12	60	100	12	60	100
10	2	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Wajib Uji KIR	Unit	65	13	13	65	100	13	65	100
11	2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bahan bakar pengujian kendaraan bermotor	liter	18,000	3,600	3,600	18,000	100	3,600	18,000	100
	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu Lulus Uji	kartu	2,000	400	400	400	100	-	1,600	80
	2	15	02	2.05	07	Pemiliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Genset Pengujian Kendaraan berotor	Jenis	5	1	1	5	100	1	5	100
	2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Rutin LLAJ	orang	130	26	26	130	100	26	130	100
	2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas	orang	60	12	12	60	100	12	60	100
12	2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran										
	2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian rutin LLASP	orang	115	23	23	115	100	23	115	100
	2	15	03	2.05	01	Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terpeliharanya PJU dermaga ferry penyeberangan	Unit	25	5	5	22	100	2	22	88
13	3	28	04			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya										
	3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Tahura	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Tahura Lapak aru	bulan	60	12	12	60	100	12	60	100
	3	28	04	2.01	02	Pengamanan kawasan Tahura Lapak Jaru	Terpeliharanya Batas Kawasan Tahura Lapak Jaru	Meter	50,000	10,000	10,000	50,000	100	10,000	50,000	100
	3	28	04	2.01	02	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura Kabupaten/kota	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman	hekar	80	16	16	80	100	16	80	100
	3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Kabupaten/kota	Sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan kelompok tani, kelompok usaha dan kelompok masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Tahura Lapak Jaru	Kegiatan	5	1	1	5	100	1	5	100
	3	28	04	2.01	11	Perencanaan Pegelolaan Tahura	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Tahura		4	2	2	6	100	2	6	150

Kuala Kurun, Juni 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan

Kabupaten Gunung Mas,

RODY, ARISTO ROBINSON, SP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19671219 199603 1 002

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN							PROYEKSI	CAT.
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1
I.	IKK PP NO. 6 TAHUN 2008																	
	I). LINGKUNGAN HIDUP																	
	a). Persentase Penanganan Sampah			2%	2.43%	2.54%	2.63%	2.73%	2.83%	3.05%	30%	30%	30%				35.00%	
	b). Persentase Penduduk Berakses Air Minum			-	-	-		-	-	-	-	-	-					
	c). Persentase Luas Permukiman yang tertata			-	-	-		-	-	-	-	-	-					
	II). PERHUBUNGAN																	
	a). Jumlah Arus Penumpang			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	51,755	52,374	6,120	6,120				-	
	b). Rasio Ijin Trayek			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-
	c). Jumlah Uji KIR Kendaraan Bermotor			600	1,000	1,100	1,200	1,250	1,300	726	399	659	679				500	
	d). Jumlah Bandara			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	
	e). Jumlah Terminal Bis			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	

TABEL
2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2025 KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN

No.	Kode					RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
						PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU NIDIKATIF	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Kantor DLHKP	Jumlah Laporan	7 Laporan	1,923,610,948	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Kantor DLHKP	Jumlah Laporan	7 Laporan	1,923,610,948
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DLHKP	Jumlah PNS	50 Orang	5,543,381,751	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DLHKP	Jumlah PNS	50 Orang	5,543,381,751
	2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DLHKP	Jumlah Laporan	1 Laporan	29,685,200	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DLHKP	Jumlah Laporan	1 Laporan	29,685,200
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor DLHKP	Jumlah Paket Pakaian	50 stel	130,225,200	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor DLHKP	Jumlah Paket Pakaian	50 stel	130,225,200
	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kantor DLHKP	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	3 Orang	136,372,865	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DLHKP	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	3 Orang	136,372,865

	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DLHKP	Penyediaan Komponen Listrik	1 Paket	16,511,250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DLHKP	Penyediaan Komponen Listrik	1 Paket	16,511,250
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DLHKP	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaa n tersedia	50700 lbr	61,571,034	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DLHKP	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	50700 lbr	61,571,034
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kantor DLHKP	Jumlah SKH tersedia	12 Dokumen	9,936,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor DLHKP	Jumlah SKH tersedia	12 Dokumen	9,936,000
	2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kantor DLHKP	Jumlah jenis ATK tersedia	32 Jenis	67,751,403	Penyediaan Bahan/Material	Kantor DLHKP	Jumlah jenis ATK	32 Jenis	67,751,403
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DLHKP	Jumlah jenis Makanan dan Minuman	12 Jenis	7,326,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DLHKP	Jumlah jenis Makanan dan Minuman	12 Jenis	7,326,000
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Gunung Mas	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60 kali	293,067,402	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah Kab. Gunung Mas	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	60 kali	293,067,402
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DLHKP	Jumlah Materai tersedia	100 lembar	12,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DLHKP	Jumlah Materai	100 lembar	12,000,000
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DLHKP	Pembayaran Biaya Air dan Listrik	12 bulan	137,973,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DLHKP	Pembayaran Biaya Air dan Listrik	12 bulan	137,973,000
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DLHKP	Jumlah jenis alat kerja dan jumlah PTT Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	1 Laporan	62,478,794	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DLHKP	Jumlah jenis alat kerja dan jumlah PTT Kebersihan, Pengamanan dan Pengemudi	1 Laporan	62,478,794

	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor DLHKP	Jasa service, sparepart dan BBM Kendaraan Dinas	2 Unit	122,522,799	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor DLHKP	Jasa service, sparepart dan BBM Kendaraan Dinas	2 Unit	122,522,799
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DLHKP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor terpelihara dalam kondisi baik	3 Unit	64,963,195	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DLHKP	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor terpelihara dalam kondisi baik	3 unit	64,963,195
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor DLHKP	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara dalam Kondisi Baik	3 unit	94,394,568	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor DLHKP	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara dalam Kondisi Baik	3 unit	94,394,568
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kantor DLHKP	Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan	1 Dokumen	183,839,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kantor DLHKP	Penyusunan Dokumen Informasi	1 Dokumen	183,839,000
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kecamatan Kecamatan	Tersedianya Alat Pemantau Kualitas Air Sungai	1 Dokumen	94,376,600	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kecamatan Sepang	Tersedianya Alat Pemantau Kualitas Air Sungai	1 Dokumen	94,376,600
	2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kantor DLHKP				Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Kantor DLHKP			

	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kantor DLHKP	Tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai	1 Dokumen	190,933,400	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kantor DLHKP	Tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai	1 Dokumen	190,933,400
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kuala Kurun				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kuala Kurun			
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Gunung Mas	Pemantauan terhadap pelaku usaha terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Laporan	51,086,550	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kabupaten Gunung Mas	Pemantauan terhadap pelaku usaha terhadap pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 Laporan	51,086,550
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan lingkungan yang terbitkan oleh pemerintah daerah Provonsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Gunung Mas	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan lingkungan yang terbitkan oleh pemerintah daerah Provonsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20 Perusahaan	174.477.944	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan lingkungan yang terbitkan oleh pemerintah daerah Provonsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Gunung Mas	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah	20 Perusahaan	174.477.944

	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Gunung Mas	Pendataan Pengelolaan Sampah untuk mendukung Penilain Adipura di Kabupaten Gunung Mas	1 Dokumen	48,971,350	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Gunung Mas	Pendataan Pengelolaan Sampah untuk mendukung Penilain Adipura di Kabupaten Gunung	1 Kegiatan	48,971,350
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Kabupaten Gunung Mas	Bimtek Persampahan	3 Orang	34,450,717	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Kabupaten Gunung Mas	Bimtek Persampahan	3 Orang	34,450,717

	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Gunung Mas	Terlaksananya koordinasi pengelolaan persampahan	1 Laporan	39,117,600	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Terlaksananya koordinasi pengelolaan persampahan	1 Laporan	39,117,600
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sarana Prasarana Persampahan	1 Laporan	909,561,600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sarana Prasarana Persampahan	1 Laporan	909,561,600
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	23,001,600	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	23,001,600
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sampah yang dimanfaatkan Kembali	1 ton	38,984,832	Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sampah yang dimanfaatkan Kembali	1 ton	38,984,832

	2	11	11	2.01	0017	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3/R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/ PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah,dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Perudangan	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3/R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah,dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Perudangan	5 Ton	3,319,355,121	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3/R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa, RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah,dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Perudangan	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Sampah yang Tertangani Melalui Proses Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3/R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF,Pusat Pengomposan, Biodigester,Bank Sampah,dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Perudangan	5 Ton	3,319,355,121
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kantor DLHKP	Jumlah Sapras PKB yang terpelihara	9 Unit	83,839,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kantor DLHKP	Jumlah Sapras PKB yang terpelihara	9 Unit	83,839,000
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Luar Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Orang	3 Orang	50,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Luar Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Orang	3 Orang	50,000,000

	2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Gunung Mas				Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				
	2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Gunung Mas				Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kot	Kantor DLHKP			
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kantor DLHKP	Jumlah Jenis alat pengujian yang terpelihara	9 Jenis		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kantor DLHKP	Jumlah Jenis alat pengujian yang terpelihara	9 Jenis	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Gunung Mas	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	190.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu lintas	Gunung Mas	Jumlah Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen	190.000.000

	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	793.233.100	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	793.233.100
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	14,299,575	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	14,299,575
	2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan W arga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Penertiban Operasional Transportasi Sungai (Ferry Penyeberangan)	1 Laporan	54,834,132	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan W arga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Penertiban Operasional Transportasi Sungai (Ferry Penyeberangan)	1 Laporan	54,834,132

	2	15	02.	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Gunung Mas				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Gunung Mas			
	3	28	04	2.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Terpeliharanya Batas Kawasan Tahura	1 Operasi	1,039,602,624	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Terpeliharanya Batas Kawasan Tahura	1 Operasi	1,039,602,624
	3	28	04	2.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Luas Lahan yang di Rehabilitasi	40 Ha	184,834,120	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Luas Lahan yang di Rehabilitasi	40 Ha	184,834,120
	3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Tersedianya Jumlah Permohonan Sarana dan Prasarana jasa lingkungan Tahura Lapak jaru	1 Permohonan	468,364,438	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/ Kota	Tahura Lapak Jaru	Tersedianya Jumlah Permohonan Sarana dan Prasarana jasa lingkungan Tahura Lapak jaru	1 Permohonan	468,364,438

	3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Jumlah Desa yang di Berdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	7,171,200	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Tahura Lapak Jaru	Jumlah Desa yang di Berdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	40 Orang	7,171,200
	3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Kantor DLHKP	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tahura	3 Dokumen	109,389,560	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Kantor DLHKP	Jumlah Dokumen Pengelolaan Tahura	3 Dokumen	109,389,560
TOTAL										**16.817.495.472**					**16.817.495.472**

USULAN PROGRAM/KEGIATAN dari PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

NO.	KEGIATAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA	VOL.	CAT.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
KAB. GUNUNG MAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN						**16.817.495.472,00**							**16.632.661.352,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.008.133.530,00**							**15.008.133.530,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**13.821.927.723,00**							**13.821.927.723,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**8.713.771.409,00**						**-**	**8.713.771.409,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.923.610.948,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.923.610.948,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	1.923.610.948,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.923.610.948,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.543.381.751,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	5.543.381.751,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	5.543.381.751,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.543.381.751,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	29.685.200,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	29.685.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	29.685.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		29.685.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	266.598.065,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	266.598.065,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	130.225.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		130.225.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	136.372.865,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		136.372.865,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	456.163.089,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	456.163.089,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.511.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.511.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	61.571.034,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.571.034,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	9.936.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.936.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	67.751.403,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		67.751.403,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	7.326.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.326.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	293.067.402,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		293.067.402,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	212.451.794,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	212.451.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	137.973.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		137.973.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	62.478.794,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		62.478.794,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	281.880.562,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	281.880.562,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	122.522.799,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		122.522.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	64.963.195,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		64.963.195,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	94.394.568,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		94.394.568,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**183.839.000,00**						**-**	**183.839.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	183.839.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	183.839.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														

			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	183.839.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		183.839.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**			**-**	**285.310.000,00**						**-**	**285.310.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	285.310.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	285.310.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	94.376.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		94.376.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	190.933.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		190.933.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**-**	**-**			**-**	**51.086.550,00**						**-**	**51.086.550,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-			-	51.086.550,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	51.086.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	51.086.550,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		51.086.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**	**-**			**-**	**174.477.944,00**						**-**	**174.477.944,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	174.477.944,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	174.477.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	174.477.944,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		174.477.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**	**-**			**-**	**48.971.350,00**						**-**	**48.971.350,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	48.971.350,00			-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	48.971.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	48.971.350,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		48.971.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**34.450.717,00**						**-**	**34.450.717,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.450.717,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	34.450.717,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	34.450.717,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		34.450.717,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**4.330.020.753,00**						**-**	**4.330.020.753,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	4.330.020.753,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	4.330.020.753,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	39.117.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		39.117.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	909.561.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		909.561.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	23.001.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		23.001.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	38.984.832,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		38.984.832,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				5 Ton	3.319.355.121,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		3.319.355.121,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**1.186.205.807,00**							**1.186.205.807,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**1.131.371.675,00**						**-**	**1.131.371.675,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-			-	133.839.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	133.839.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				9 Unit	83.839.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		83.839.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	997.532.675,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	997.532.675,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	793.233.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		793.233.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	14.299.575,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		14.299.575,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
2.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**			**-**	**54.834.132,00**						**-**	**54.834.132,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	-	-			-	54.834.132,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	54.834.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	54.834.132,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		54.834.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.809.361.942,00**							**1.624.527.822,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.809.361.942,00**							**1.624.527.822,00**	
1.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**-**	**-**			**-**	**1.809.361.942,00**						**-**	**1.624.527.822,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-			-	1.809.361.942,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	1.624.527.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti				1 Permohonan	468.364.438,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		468.364.438,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif				2 Desa	7.171.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		7.171.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				3 Dokumen	109.389.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		109.389.560,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan				1 Ha	1.039.602.624,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		1.039.602.624,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota														
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				40 Ha	184.834.120,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	J U M L A H							**16.817.495.472,00**							**16.632.661.352,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN SEPANG
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025

KANTOR KECAMATAN SEPANG

Alamat : Jl. Antang Taoi No. 85 Sepang Simin Kode Pos 74571
Telp No. Email. kantorkecamatansepang@gmail.com
Website. www.kecamatansepang.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Berkat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Sepang Tahun Anggaran 2025, dapat kami rencanakan dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja ini dibuat untuk sebagai Dokumen Perencanaan, Penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD Kecamatan Sepang serta rencanaan pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD.

Rencana program dan kegiatan yang diprioritas sebagai acuan menjalakan Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakatan, menjalankan kelangsungan pembangunan ditingkat Kecamatan dan menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Tapi kita sadar bahwa dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan tidak sepenuhnya dapat mencakup seluruh aspek kepentingan masyarakat umum dan pada khususnya masyarakat Kecamatan Sepang.

Demikian Perubahan Renja ini kami susun sebagai bahan tindak lanjut penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Sepang Simin, 17 Juli 2024.

CAMAT SEPANG,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN SEPANG

SAYUSDI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19740201 200012 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2025 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPKD 20

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 27

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 29

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan nasional 29

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 30

3.3 Program dan Kegiatan 31

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 32

BAB V. PENUTUP 67

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Sepang secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Sepang membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

Persiapan Penyusunan Renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Penyusunan Rancangan.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda-Litbang dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Bappeda Litbang Kabupaten Gunung Mas menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Kantor Kecamatan Gunung Mas Tahun 2022 menjabarkan rencana kegiatan Kantor Kecamatan Gunung Mas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2019 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Litbang Kabupaten Gunung Mas untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahaan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kantor Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun satu tahun yang berisi Program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai landasan dan umpan balik untuk menjalankan Program dan kegiatan prioritas sebagai acuan menjalankan Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakatan, menjalankan kelangsungan pembangunan ditingkat Kecamatan dan menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Menindak lanjuti Program dan kegiatan Tahun 2025 yang belum direalisasikan dengan memfokuskan permasalahan atau isu yang dihadapi

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sepang Tahun Anggaran 2025 adalah :

Sebagai dasar menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik Tahun Anggaran 2025.

Memberi dasar bagi pengambilan kebijakan/keputusan untuk perbaikan kinerja dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tupoksi dalam upaya mencapai Visi dan Misi.

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengambil langkah-langkah / kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan.

Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kabijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKASANAAN RENJA SOPD

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Dalam mengukur kinerja program, indikator yang dipakai adalah indikator absolute. Capaian absolut program ini sendiri secara logika-apriori didedukasi dari hubungan sebab-akibat antara program dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yaitu berupa indikator kinerja *input,* indikator kinerja *output* dan indikator *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja program umum dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Dengan pengukuran capaian kinerja yang absolut dan terfokus pada satu atribut maka pengukuran ini dianggap akan lebih terbebas dari distorsi aritmatis pembobotan. Asumsi ini mendasari asumsi berikutnya bahwa capaian kinerja dapat melebihi 100%.

Dengan kebebasan yang tinggi maka pengukuran ini menetapkan kategorisasi pancapaian kinerja dapat digambarkan pada tabel berikut :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU (TA. 2023)

SKPD : KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran), Kegiatan dan Subkegiatan (Outcome/ Hasil)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi Tw.IV (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)	Ket
1	2	3	4	6		7		8= 7/6 x 100 %	9
				K	Rp	K	Rp	%	
I		**KECAMATAN SEPANG**			**3.114.662.771,00**		**2.875.894.267,00**	**92,33**	
	7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**2.622.129.761,00**		**2.393.035.967,00**	**91,26**	
1	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	**98%**	**2.622.129.761,00**		**2.393.035.967,00**	**91,26**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja	**98%**	**14.090.356,00**		**7.295.900,00**	**51,78**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.920.312,00	2 Dokumen	2.517.000,00	64,20	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.259.544,00		958.500,00	42,42	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.292.800,00		1.213.600,00	52,93	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.029.000,00		949.800,00	46,81	

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.588.700,00	6 Laporan	1.657.000,00	46,17	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel	**98%**	**2.010.195.232,00**		**1.864.868.369,00**	**92,77**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang /bulan	1.987.565.104,00	12 Bulan	1.842.499.069,00	92,70	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	22.630.128,00	12 Dokumen	22.369.300,00	98,85	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan	**2 Dokumen**	**1.183.300,00**		**1.033.600,00**	**87,35**	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.183.300,00	2 Laporan	1.033.600,00	87,35	
	7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan		**4.212.200,00**		**3.840.200,00**	**91,17**	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	4.212.200,00	12 Laporan	3.840.200,00	91,17	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah	**99%**	**179.219.003,00**		**178.420.776,00**	**99,55**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17 Paket	3.237.537,00	17 Paket	3.229.452,00	99,75	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	28.559.261,00	8 Kegiatan	28.305.414,00	99,11	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.378.893,00	1 Kegiatan	7.356.500,00	99,70	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.271.112,00	12 Laporan	4.269.000,00	99,95	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan	135.772.200,00	2 Kegiatan	135.260.410,00	99,62	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lancarnya pelayanan SOPD	**100%**	**299.944.750,00**		**227.901.922,00**	**75,98**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000,00	12 Laopran	1.500.000,00	100,00	

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.510.000,00	12 Laporan	13.965.928,00	90,04	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.837.072,00	2 Kegiatan	5.670.300,00	97,14	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	277.097.678,00	12 Laporan	206.765.694,00	74,62	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya	**100%**	**113.284.920,00**		**109.675.200,00**	**96,81**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.069.442,00	2 Kegiatan	35.376.600,00	95,43	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	76.215.478,00	2 Kegiatan	74.298.600,00	97,48	
2	**07.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**100%**	**5.090.127,00**		**5.046.000,00**	**99,13**	
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase peningkatan pelayanan di tingkat Kecamatan	**100%**	**5.090.127,00**		**5.046.000,00**	**99,13**	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan	5.090.127,00	4 Kegiatan	5.046.000,00	99,13	
3	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**100%**	**363.863.832,00**		**354.585.200,00**	**97,45**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan	**100%**	**6.884.200,00**		**6.884.200,00**	**100,00**	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan	6.884.200,00	1 Kegiatan	6.884.200,00	100,00	

	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Tersedianya penunjang Kegiatan kemasyarakatan ditingkat Kecamatan	**7 Lembaga Kemasyaraatan**	**356.979.632,00**		**347.701.000,00**	**97,40**	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyaraatan	319.055.128,00	5 Lembaga Kemasyaraatan	318.611.000,00	**99,86**	
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyaraatan	37.924.504,00	1 Kegiatan	29.090.000,00	**76,71**	
4	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Umum	**100%**	**79.338.051,00**		**79.209.600,00**	**99,84**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya penunjang kegiatan paskibra dan pembinaan daerah bawahan	**2 kegiatan**	**79.338.051,00**		**79.209.600,00**	**99,84**	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32 Orang	78.793.621,00	1 Kegiatan	78.665.600,00	99,84	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	544.430,00	1 Dokumen	544.000,00	99,92	
5	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**100%**	**44.241.000,00**		**44.017.500,00**	**99,49**	

	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase peningkatan data administrasi desa yang akuntabel		**44.241.000,00**		**44.017.500,00**	**99,49**	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	41.897.800,00	1 Kegiatan	41.675.000,00	99,47	
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	1.706.900,00	1 Kegiatan	1.706.500,00	99,98	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 Laporan	636.300,00	1 Kegiatan	636.000,00	**99,95**	
II		**KELURAHAN SEPANG SIMIN**			**600.000.000,00**		**544.604.292,00**	**90,77**	
	7.01	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**600.000.000,00**		**544.604.292,00**	**90,77**	
1	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	**98%**	**135.607.995,00**		**122.086.456,00**	**90,03**	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah	**99%**	**124.638.667,00**		**114.836.856,00**	**92,14**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.109.889,00	1 Kegiatan	1.109.889,00	100,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	62.751.020,00	1 Kegiatan	62.729.800,00	99,97	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	26.387.527,00	1 Kegiatan	26.201.527,00	99,30	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.475.500,00	1 Kegiatan	10.755.640,00	69,50	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.000.331,00	1 Kegiatan	1.835.000,00	91,73	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	16.914.400,00	1 Kegiatan	12.205.000,00	72,16	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lancarnya pelayanan SOPD	**100%**	**6.536.020,00**		**3.066.600,00**	**46,92**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	1 Kegiatan	1.000.000,00	100,00	

	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.670.000,00	1 Kegiatan	2.066.600,00	77,40	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2.866.020,00	0	0,00	0,00	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya	**100%**	**4.433.308,00**		**4.183.000,00**	**94,35**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	4.433.308,00	1 Kegiatan	4.183.000,00	94,35	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000,00		0,00	0,00	
2	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Capain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**100%**	**464.392.005,00**		**422.517.836,00**	**90,98**	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase tersedianya pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan masyarakat di kelurahan	**99%**	**464.392.005,00**		422.517.836,00	90,98	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.255.905,00	1 Kegiatan	2.249.900,00	99,73	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	208.607.806,00	1 Kegiatan	207.551.000,00	99,49	

	7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	253.528.294,00	1 Kegiatan	212.716.936,00	83,90	

Sepang Simin, 17 Juli 2024
Camat Sepang,

SAYUSDI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19740201 200012 1 003

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang pemerintahan, oleh karena itu, Kecamatan Sepang tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sepang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah	Proyeksi Realisasi Capaian	Catatan Analisis
1	Persentase tingkat partsisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaam pembangunan			90%	90%	
2	Persentase pembinaan kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan			90%	90%	
3	Persentase pembinaan daerah bawahan			95%	90%	
4	Persentase capaian Laporan Kinerja Kecamatan			70,45%	90%	
5	Persentase capaian Laporan Keuangan Kecamatan			79,50%	90%	
6	Persentase rata-rata aparatur yang mengikuti Bimtek			85%	90%	
7	Persentase palayanan yang tepat waktu			85%	90%	
8	Persentase pengaduan tentang pelayanan administrasi terpadu yang tertangani			80%	90%	
9	Persentase sarana dan prasarana pelayanan publik yang tersedia			80%	90%	

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 478) di Lingkungan Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintah dalam hal Pelayanan Publik; dan

Pengkoordinasian Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Sepang.

Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Sepang, dari hasil analisis jabatan yang dilakukan, jumlah pegawai yang seharusnya ada di kecamatan sekitar 45 orang sementara keadaan riil yang ada jumlah pegawai hanya sejumlah 16 orang untuk menangani semua bidang yang ada. Selain itu keterbatasan dana juga menjadi hambatan. Dana yang ada sebagian besar masih terkonsentrasi untuk kegiatan rutin sehingga kegiatan utama belum dapat optimal karena pagu dana yang kecil.

Strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Sepang yaitu :

Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Memanfaatkan / menerapkan kemajuan teknologi.

Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tupoksi.

Menggunakan pedoman dan juknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Memanfaatkan uraian tugas / kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten dan otonomi daerah.

Memanfaatkan peran swasta untuk melengkapi sarana dan prasarana serta menggali potensi SDA yang ada.

Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan teknologi yang canggih.

Capaian kinerja tugas pokok dan fungsi kecamatan ini telah mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas yaitu terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang Bermartabat, Maju Berdaya saing, Sejahtera dan Mandiri (Berjuang Bersama) yang dijabarkan dalam misi ke-3 dan misi ke-5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan. Kecamatan merupakan OPD yang tidak menerapkan pencapaian SPM karena merupakan OPD sebagai fungsi penunjang bidang pemerintahan

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sepang dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sepang sebagai berikut :
Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Sepang yang dilakukan oleh Kabupaten Gunung Mas;
Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Sepang yang dilakukan oleh Kabupaten Gunung Mas;
Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sepang.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sepang dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sepang, sebagai berikut :
Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
Masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD tentang program dan kegiatan;
Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat SKPD, hal ini di karenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008;
Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang bersangkutan;
Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sepang sebagai berikut :
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan erutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sepang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sepang, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas antara lain :

Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;

Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;

Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;

Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;

Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (komputer).

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas adalah :

Adanya multi interprestasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana.

Akar Permasalahan :

Rendahnya Jumlah ketersediaan Fasilitas Latop

Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terkait Pengoperasian Tehnologi (IT)

Rendahnya Pengetahuan Aparatur terkait Pengoperasian Tehnologi (IT)

Kurangnya Komunilasi struktural Internal maupun Eksternal

Terbatasnya SDM yang memadai

Analisa :

Seluruh ASN mampu mengaplikasikan Administrasi Perkantoran berbasis IT maka dalam hal ini diperlukan Program Program penguatan IT guna menyeselesaikan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas fungsi dan Pelayanan Kecamatan.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 2025-2026, adalah sebagai berikut :

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan

pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten Gunung Mas terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen strandar pelayanan minimal *public services and public complaint.*

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good govermance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "pelayan masyarakat". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sepang dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan good governance.

Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *stakeholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada *entreupreneurnal management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*performance Budget*), bukan pada kebijakan *(Policy Budget*).

System manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;

terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;

pengamanan barang daerah;

tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sepang berdasarkan RKPD Kabupaten Gunung Mas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sepang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SKPD Kecamatan Sepang Rancangan Awal RKPDnya adalah Renja dan Hasil Analisis Kebutuhannya adalah DPA sehingga dapat dibandingkan antara renja dengan DPA apakah ada perubahan baik program/kegiatan, lokasi maupun besaran anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

tahun 2025 Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat dalam tabel 2.4.1, sebagai berikut

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas

Nama SKPD : KECAMATAN SEPANG

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu, Tersedianya kebutuhan atribut ASN, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Jumlah pengunjung pameran pembangunan, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu, Tersedianya kebutuhan atribut ASN, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Jumlah pengunjung pameran pembangunan, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan realisasi kinerja**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen perencanaan yang akuntabel	27,82	**38.127.150**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen perencanaan yang akuntabel	27,82	**38.127.150**	**Sesuai**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen RKA yang akuntabel	16,04	**5.555.450,**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen RKA yang akuntabel	16,04	**5.555.450,**	**Sesuai**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen DPA yang akuntabel	16,27	**4.511.800**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen DPA yang akuntabel	16,27	**4.511.800**	**Sesuai**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen DPA Perubahan yang akuntabel	14,40	**5.155.450**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya dokumen DPA Perubahan yang akuntabel	14,40	**5.155.450**	**Sesuai**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja SKPD	25,47	**10.993.267**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya Dokumen laporan capaian kinerja SKPD	25,47	**10.993.267**	**Sesuai**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersusunnya administrasi pengelolaan keuangan yang akuntabel**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	98,93	**2.330.656.515**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Sepang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	98,93	**2.330.656.515**	**Sesuai**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sepang	Terlaksananya penatausahaan keuangan yang akuntabel	1,07	**60.567.372**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Sepang	Terlaksananya penatausahaan keuangan yang akuntabel	1,07	**60.567.372**	**Sesuai**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan**			**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase tersedianya administrasi pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan**			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kec. Sepang	Tersusunnya dokumen Rekonsiliasi laporan barang milik daerah	100,00	**18.168.000**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kec. Sepang	Tersusunnya dokumen Rekonsiliasi laporan barang milik daerah	100,00	**18.168.000**	**Sesuai**

	SKPD					SKPD					
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		**Persentase tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan**			**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Persentase tersedianya data Penerimaan Asli Daerah Tingkat Kecamatan**			
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Sepang	Tersedianya laporan penerimaan retribusi dan pajak daerah	100,00	**7.062.942**	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Sepang	Tersedianya laporan penerimaan retribusi dan pajak daerah	100,00	**7.062.942**	**Sesuai**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	2,16	**9.947.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	2,16	**9.947.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya bahan keperluan logistik Kantor Kecamatan dan Kelurahan	19,27	**99.130.614**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya bahan keperluan logistik Kantor Kecamatan dan Kelurahan	19,27	**99.130.614**	**Sesuai**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi Kantor	4,92	**2.600.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Sepang	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi Kantor	4,92	**2.600.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang keikutsertaan Pemeran Pembangunan	20,51	**39.526.950**	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang keikutsertaan Pemeran Pembangunan	20,51	**39.526.950**	**Sesuai**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepang	Tersedianya makan dan minum tamu kantor	2,86	**2.500.000**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Sepang	Tersedianya makan dan minum tamu kantor	2,86	**2.500.000**	**Sesuai**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	50,28	**165.300.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sepang	Tersedianya jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	50,28	**165.300.000**	**Sesuai**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya**			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	**9.157.500**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sepang	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	**9.157.500**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Lancarnya pelayanan SOPD**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lancarnya pelayanan SOPD**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sepang	Tersedianya Jasa surat menyurat	0,49	**5.150.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Sepang	Tersedianya Jasa surat menyurat	0,49	**5.150.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepang	Tersedianya tagihan sumber daya listrik, air dan TV Kabel	6,39	**13.800.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sepang	Tersedianya tagihan sumber daya listrik, air dan TV Kabel	6,39	**13.800.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,66	**4.318.600**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3,66	**4.318.600**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepang	Persentase ketersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum Kantor Kecamatan dan Kelurahan	89,46	**193.816.540**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sepang	Persentase ketersedianya kebutuhan jasa pelayanan umum Kantor Kecamatan dan Kelurahan	89,46	**193.816.540**	**Sesuai**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya**	16,67		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya**	16,67		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan Kantor Kecamatan Sepang	34,35	**43.440.829**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan mobil jabatan Kantor Kecamatan Sepang	34,35	**43.440.829**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan dan Kelurahan	65,65	**63.209.174**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sepang	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor Kecamatan dan Kelurahan	65,65	**63.209.174**	**Sesuai**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Terlaksananya kegiatan PATEN Kecamatan**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Terlaksananya kegiatan PATEN Kecamatan**			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Meningkatnya pelayanan publik di Tingkat Kecamatan**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**Meningkatnya pelayanan publik di Tingkat Kecamatan**			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sepang	Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan	100,00	**8.133.000**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepang	Terselenggaranya pelayanan administrasi yang terpadu Kecamatan	100,00	**8.133.000**	**Sesuai**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sepang	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat di willayah kecamatan	100,00	**5.579.955**		Kec. Sepang	Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat di willayah kecamatan	100,00	**5.579.955**	**Sesuai**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase kelurahan yang dibangun, Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Persentase organisasi keagamaan yang dibina, Persentase organisasi Keagamaan yang dibina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase kelurahan yang dibangun, Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Persentase organisasi keagamaan yang dibina, Persentase organisasi Keagamaan yang dibina**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Terlaksananya kegitan forum musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan**			**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Terlaksananya kegitan forum musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan**			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Terselenggaranya musyawarah pembangunan di Kecamatan	100,00	**8.557.200**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	erselenggaranya musyawarah pembangunan di Kecamatan	100,00	**8.557.200**	**Sesuai**

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		**Terlaksananya penyelenggaraaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**			**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Terlaksananya penyelenggaraaan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan**			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang keikutsertaan kegiatan festival budaya dan kegiatan keagamaan	87,05	**160.538.000**	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang keikutsertaan kegiatan festival budaya dan kegiatan keagamaan	87,05	**160.538.000**	**Sesuai**
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang kegiatan PKK Kecamatan	12,95	**63.959.815**	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang kegiatan PKK Kecamatan	12,95	**63.959.815**	**Sesuai**
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kegiatan penunjang kegiatan paskibra tingkat Kecamatan, Cakupan pembinaan wilayah**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kegiatan penunjang kegiatan paskibra tingkat Kecamatan, Cakupan pembinaan wilayah**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Terlaksananya kegiatan penunjang Paskibra dan pembinaan daerah bawahan**			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terlaksananya kegiatan penunjang Paskibra dan pembinaan daerah bawahan**			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang kegiatan Paskibra HUT RI Tingkat Kecamatan	95,95	**94.956.350**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Sepang	Tersedianya penunjang kegiatan Paskibra HUT RI Tingkat Kecamatan	95,95	**94.956.350**	**Sesuai**
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepang	Terselenggaranya Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/Kepala Adat	4,05	**5.970.762**	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Sepang	Terselenggaranya Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/Kepala Adat	4,05	**5.970.762**	**Sesuai**
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Rata-rata tingkat serapan keuangan desa**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Rata-rata tingkat serapan keuangan desa**			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Persentase terpasilitasinya pembinaan pemerintah desa**			**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Persentase terpasilitasinya pembinaan pemerintah desa**			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sepang	Persentase terfasilitasinya peningkatan sistim pengelolaan keuangan dan aset desa	86,97	**45.000.000**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sepang	Persentase terfasilitasinya peningkatan sistim pengelolaan keuangan dan aset desa	86,97	**45.000.000**	**Sesuai**
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sepang	Persentase tersedianya penunjang ketertiban umum	4,94	**6.036.000**	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sepang	Persentase tersedianya penunjang ketertiban umum	4,94	**6.036.000**	**Sesuai**
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sepang	Terlaksananya program kegiatan desa	8,09	**23.001.600**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Sepang	Terlaksananya program kegiatan desa	8,09	**23.001.600**	**Sesuai**

6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN SEPANG SIMIN**		**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu, Tersedianya kebutuhan atribut ASN, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Jumlah pengunjung pameran pembangunan, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KELURAHAN SEPANG SIMIN**		**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu, Tersedianya kebutuhan atribut ASN, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Jumlah pengunjung pameran pembangunan, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Lancarnya pelayanan administrasi umum penujang perangkat daerah**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	92,00	**40.950.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	92,00	**40.950.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,36	**64.550.000**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,36	**64.550.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Peralatan rumah tangga	19,53	**89.640.200**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Peralatan rumah tangga	19,53	**89.640.200**	**Sesuai**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya bahan keperluan logistik Kantor Kelurahan	9,56	**86.198.730**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya bahan keperluan logistik Kantor Kelurahan	9,56	**86.198.730**	**Sesuai**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi Kantor	1,65	**34.650.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan administrasi Kantor	1,65	**34.650.000**	**Sesuai**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sepang Simin	Tersedianya jumlah perjalanan dinas biasa dan dalam kota	13,98	**19.377.300**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sepang Simin	Tersedianya jumlah perjalanan dinas biasa dan dalam kota	13,98	**19.377.300**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Lancarnya pelayanan di Kantor Kelurahan Sepang Simin**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Lancarnya pelayanan di Kantor Kelurahan Sepang Simin**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Jasa surat menyurat	15,30	**5.000.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Sepang Simin	Tersedianya Jasa surat menyurat	15,30	**5.000.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sepang Simin	Tersedianya tagihan sumber daya listrik, air dan TV Kabel	40,85	**2.742.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sepang Simin	Tersedianya tagihan sumber daya listrik, air dan TV Kabel	40,85	**2.742.000**	**Sesuai**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	43,85	**2.654.800**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sepang Simin	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	43,85	**2.654.800**	**Sesuai**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional dan bangunan gedung kantor/bangunan lainnya**			

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan	100,00	**4.018.300**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kantor Kelurahan	100,00	**4.018.300**	**Sesuai**
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, KELURAHAN SEPANG SIMIN**		**Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase kelurahan yang dibangun, Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Persentase organisasi keagamaan yang dibina, Persentase organisasi Keagamaan yang dibina**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, KELURAHAN SEPANG SIMIN**		**Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase keterwakilan stakeholder dalam perumusan perencanaan lingkup kecamatan, Persentase kelurahan yang dibangun, Persentase terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan, Persentase organisasi keagamaan yang dibina, Persentase organisasi Keagamaan yang dibina**			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan**			**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Terlaksananya pemberdayaan masyarakat kelurahan**			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan	0,49	**4.895.400**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Terselenggaranya musyawarah pembangunan tingkat kelurahan	0,49	**4.895.400**	**Sesuai**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	44,06	**23.723.270**	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Tersedianya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan	44,06	**23.723.270**	**Sesuai**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Terlaksananya pemberdayaan kegiatan PKK, Posyandu, penunjang upaya pencegahan bencana darurat, jasa petugas pelayanan tingkat RT, RW di tingkat Kelurahan	55,45	**221.600.000**	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sepang Simin	Terlaksananya pemberdayaan kegiatan PKK, Posyandu, penunjang upaya pencegahan bencana darurat, jasa petugas pelayanan tingkat RT, RW di tingkat Kelurahan	55,45	**221.600.000**	**Sesuai**

PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar SKPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agara tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

Tahapan musrenbang dapat diskriptifkan fungsi dan perencanaan serta kerangka waktu masing-masing tahapan musrenbang :

Musrenbang tingkat RT/RW adalah tahapan penggalian usulan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini dibuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (minggu II s/d minggu IV bulan januari);

Musrenbang tingkat kelurahan adalah tahapan penentuan prioritas usulan program/kegiatan dari masing-masing RT/RW serta pengklasifikasian usulan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (minggu IV bulan januari s/d minggu I bulan februari);

Musrenbang tingkat kecamatan adalah tahapan pemantapan usulan program/kegiatan yang akana disampaikan pada forum SKPD. Pada tahap ini peranan SKPD sangat besar dalam membantu masyarakat memfoumulasikan usulan program/kegaiatan mereka (minggu II bulan februari);

Forum SKPD adalah tahapan sinkronisasi usulan program/kegiatan SKPD dengan usulan masyarakat hasil usulan musrenbang kecamatan. Pada tahap ini usulan-usulan program/kegaiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD sesuai misi dalam RPJMD. Minggu II s/d minggu IV bulan Februari);

Musrenbang tingkat kabupaten adalah puncak dari pelaksanaan musrenbang di kabupaten ini adalah tahapan finalisasi usulan program/kegiatan dari masyarakat yang akan diimplementasikan oleh masing-masing SKPD terkait.

Secara garis besar usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditampung kecamatan Sepang pada tahun 2025 di bagi beberapa bidang, antara lain :

Bidang Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wira Usaha pada program/kegiatan;

Bidang Penguatan Usaha Mikro berbasis Potensi Unggulan pada program/kegiatan;

Peningkatan Infrastruktur program/kegiatan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :

Manajemen perubahan (mind set dan culture set)

Penguatan pengawasan

Penguatan akuntabilitas kinerja

Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :

Penataan dan penguatan organisasi

Penataan sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :

Penataan peraturan penundang-undangan

Penataan tatalaksana

Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum *(publik)* di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini *(new publik management)* yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang ***"menyentuh hati"*** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham *(shareholder)* sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari ***"dilayani"*** menjadi ***"melayani".***

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang brsifat

administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se Indonesia. Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajeman penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dariperencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini telah sejalan dengan visi Kabupaten Gunung Mas yang dijabarkan ke dalam misi -misi yang telah ditetapkan. Untuk kecamatan menjalankan amanat Misi Keempat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sepang tahun 2025 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

Misi Ke-4 : Mempercepat Reformasi Birokrasi

Tujuan OPD : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien, sasaran ini dapat diukur dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, pencapaian sasaran tersebut dapat diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi.

Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sepang maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Sepang adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Sepang agar dapat menyajikan pelayanan

publik yang prima bagi masyarakat Kecamatan Sepang. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Sepang melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Sepang pada tahun 2025 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu "**TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)**".

Jumlah seluruh program di tahun 2025 di Kecamatan Sepang sebanyak 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu kecamatan Sepang dengan total kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 4.154.427.835**,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2025.

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Penetapan Kinerja Jumlah seluruh program di tahun 2025 Kantor Kecamatan Sepang dan Kantor Kelurahan Sepang Simin sebanyak 6 (enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu kecamatan Sepang dengan total kebutuhan anggaran sebesar **Rp. 4.154.427.835**,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Gunung Mas. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun 2025 dan perkiraan maju Tahun 2026 :

Menetapkan Pelayanan Administrasi Perkantoran sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Indikator Kinerja adalah :

Fasilitas kantor dapat dioperasi

Lancarnya kegiatan operasional kantor

Lancar kegiatan pelayanan publik

Meningkatkan keamanan Lingkungan

Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor

Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur, Indikator Kinerjanya adalah :

Tersedianya fasilitas pendukung kantor

Tersedianya kendaraan operasional

Terpeliharanya rumah dinas.

Terpeliharanya gedung kantor.

Lancarnya operasional kendaraan jabatan

Lancarnya operasional kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya fasilitas kerja kantor

Lancarnya kegiatan pelayanan publik

Meningkatkan disiplin dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sasaran yang ingin dicapai, Indikator Kinerja adalah :

Tersedianya fasilitas aparatur

Terselenggaranya pelatihan dan bimbingan teknis aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan, sasaran yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem pelaporan keuangan yang akuntabel, Indikator Kinerjanya adalah :

Tersedianya Laporan Keuangan Triwulan.

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya Laporan Keuangan Tahunan

Tersedianya LAKIP

Terkelola Laporan Aset Milik Daerah

Program pembinaan daerah bawahan tersenggaranya Pemerintahan Umum yang koordinatif dan simultan, Indikator Kinerjanya adalah :

Terselenggaranya lomba tingkat desa

Terselenggaranya koordinasi lintas sektor ditingkat Kecamatan

Program pembinaan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan terselenggaranya peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan Indikator Kinerjanya adalah :

Terselenggarannya pembinaan kepada kegiatan organisasi wanita.

Terselenggaranya pembinaan kepada kegiatan kemasyarakatan.

Terselenggaranya pembinaan kepada kegiatan keagamaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan indikator kinerja adalah :

Terselenggaranya fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan Festival Budaya Mihing Manasa

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan indikator kinerja adalah :

Terselenggaranya fasilitasi keikutsertaan dalam pameran pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan indikator kinerja adalah :

Terselenggaranya fasilitasi kegiatan paskibra

Terselenggaranya fasilitasi kegiatan paskibra dengan indikator kinerja adalah :

Terselenggaranya fasilitasi kegiatan liga pelajar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja adalah :

Terselenggaranya kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan indikator adalah :

Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan keuangan desa

TABEL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN SEPANG KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SEPANG						**3.554.427.835,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.551.927.835,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.551.927.835,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.130.195.153,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	64.343.117,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	38.127.150,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.555.450,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.511.800,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.155.450,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.993.267,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.391.223.887,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	2.330.656.515,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	60.567.372,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	18.168.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.168.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.062.942,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	7.062.942,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	316.504.564,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.947.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.130.614,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.600.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	39.526.950,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165.300.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	9.157.500,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	9.157.500,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	217.085.140,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.150.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.318.600,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	193.816.540,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	106.650.003,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	43.440.829,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	63.209.174,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**13.712.955,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	8.133.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	8.133.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	5.579.955,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	5.579.955,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**233.055.015,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.557.200,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	8.557.200,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG

	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	224.497.815,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	160.538.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	63.959.815,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**100.927.112,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	100.927.112,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				34 Orang	94.956.350,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	5.970.762,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**74.037.600,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	74.037.600,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	6.036.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profi essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	23.001.600,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	X	**NON URUSAN**						**2.500.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**2.500.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**						**-**	**0,00**	
	X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**			**-**	**2.500.000,00**			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profi essional dan responsif dalam rangka percepatan	-	**-**	**0,00**	KECAMATAN SEPANG

												pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital				
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN SEPANG
	J U M L A H							**3.554.427.835,00**							**0,00**	
		KELURAHAN SEPANG SIMIN						**600.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**600.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**600.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**195.104.600,00**						**-**	**0,00**	

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	179.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN-ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN-ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	11.086.300,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.742.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	5.344.300,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.018.300,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	5.018.300,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**404.895.400,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	404.895.400,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	4.895.400,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Sepang Simin, Sepang Simin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	J U M L A H							**600.000.000,00**							**0,00**	

BAB. V
PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PUblik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Sepang maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Sepang adalah penyediaan pelayanan public bagi masyarakat,oleh karena itu optimalisasi pelayanan public yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Sepang agar dapat menyajikan pelayanan public yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Sepang antara lain :

1. Reformasi Biokrasi pemerintah daerah (pelayanan publik)
2. Pendayaangunaan sumber daya aparatur daerah.
3. Penataan organisasi dan manajemen public.
4. Pengelolaan keuangan dan barang.

Tetapi didalam proses pelaksanaannya Kecamatan Sepang masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran Staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload.
2. Masih belum optimalnya Kecamatan Sepang dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA SKPD.
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji.
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang sangat vital kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Sepang, maka diperlukan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengoptimalkan pemahaman penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan kepada semua PPTK ;
2. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen public konvensional dengan menggunakan manajemen public yang berbasis IT.
3. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kantor Kecamatan Sepang pada tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan ke depan.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Kecamatan Sepang, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan. Apabila pada saat penentuan plafon prioritas anggaran ternyata pagu anggaran Kecamatan Sepang tidak sebesar sebagaimana yang direncanakan dalam Renja, maka akan dilakukan rasionalisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan, dengan mengutamakan kegiatan prioritas. Rasionalisasi diputuskan melalui rapat koordinasi internal, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan sampaikan atas perkenan dan perhatian semua pihak kami ucapkan terima kasih.

RENCANA KERJA TAHUN 2025
SKPD KECAMATAN SEPANG KABUPATEN GUNUNG MAS

DIBUAT DI : SEPANG SIMIN
PADA TANGGAL : 17 Juli 2024

CAMAT SEPANG
KABUPATEN GUNUNG MAS,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN SEPANG

SAYUSDI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19740201 200012 1 003

RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KUALA KURUN
2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama dua tahun kedepan, dimana rencana kerja Tahun 2025 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung selama Tahun 2025.

Dalam penyusunan Renja ini kami juga mempertimbangkan arah serta pedoman kerja berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renja 2025 ini memuat Maksud dan Tujuan Renja; Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; dan Pagu Indikatif serta Sumber Dananya. Selain itu Renja ini juga memuat solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan baik kepada SKPD lainnya maupun kepada masyarakat.

Kuala Kurun Juli 2024

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas

HARDEMAN, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196604061994031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 1

I.3. Maksud dan Tujuan 4

I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 6

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22

II.4 Review 23

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 34

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 34

III.3. Program dan Kegiatan 34

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

IV.1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan 48

IV.2. Indikator Kinerja 49

IV.3. Dana Indikatif Tahun 2025 55

IV.4. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif 55

BAB V. PENUTUP 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas No. 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memuat pedoman kerja unit tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 serta memuat penjabaran pelaksanaan program kegiatan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun untuk menyajikan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan Renstra 2019-2024.

Rencana Kerja SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

1.3.2. Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset yang mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perencanaan tahunan Badan untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

1.4.1. Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

1.4.2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.4.3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Program dan Kegiatan.

1.4.4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; memuat Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Indikator Kinerja dan Dana Indikatif Tahun 2025 serta Prakiraan Maju berdasarkan Pagu Indikatif.

1.4.5. Bab V Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Uraian Pendapatan dan Belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Secara keseluruhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 menganggarkan pembiayaan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp. 210.374.969.396,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 99.406.556.813,00 atau 47,17 %

Rincian Anggaran dan Realisasi adalah sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.144.660.931.162,00	1.144.909.195.111,38	99,85
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.362.416.530,00	4.781.949.007,38	57,18
	Retribusi Daerah	108.000.000,00	79.407.000,00	73,53
	Retribusi Jasa Usaha	108.000.000,00	79.407.000,00	73,53
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	108.000.000,00	79.407.000,00	73,53
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	65.000.000,00	10.000.000,00	15,38
	Retribusi Pemakaian Ruangan	43.000.000,00	69.407.000,00	161,41
	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11
	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11
	Lain-Lain PAD yang SAH	8.230.416.530,00	4.621.394.578,42	56,15
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.337.995,00	227.132.800,00	58,19
	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	390.337.995,00	227.132.800,00	58,19
	Hasil Penjualan Alat Angkutan	380.337.995,00	227.132.800,00	58,19
	Hasil Penluaian Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00
	Jasa Giro	1.713.078.535,00	1.571.073.547,00	91,71
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.713.078.535,00	1.571.073.547,00	91,71
	Penerimaan atas Tuntuntan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	12.000.000,00	0,00	0,00
	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	105.000.000,00	109.490.276,00	104,27
	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	34.622.891,00	34,62
	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.000.000,00	34.622.891,00	34,62
	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.000.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.000.000,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.993.000.000,00	2.426.546.966,42	40,49
	Remunerasi	0,00	252.528.098,00	-
	Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Fasility (TDF)	0,00	252.528.098,00	-
	PENDAPATAN TRANSFER	1.132.550.474.632,00	1.135.524.590.828,00	102,24
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	105,95
	Dana Perimbangan	969.050.672.000,00	967.710.343.580,00	99,86
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	529.366.223.000,00	529.272.767.216,00	99,98
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.996.025.000,00	72.770.345.330,00	98,34
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	117.356.238.000,00	107.100.756.799,00	91,26
	Dana Insentif Daerah (DID)	9.487.123.000,00	15.456.199.000,00	162,92
	Dana Desa	95.278.770.000,00	95.043.161.190,00	99,75

	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58
	Pendapatan Bagi Hasil	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80
	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80
	BELANJA DAERAH	210.885.921.340,00	194.507.850.286,00	92,23
	BELANJA OPERASI	17.043.341.706,00	15.696.302.954,00	92,09
	Belanja Pegawai	4.971.602.374,00	4.260.827.292,00	85,70
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.354.852.374,00	2.773.784.863,00	82,68
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.449.934.378,00	2.032.114.634,00	82,95
	Belanja Barang dan Jasa	11.971.739.332,00	11.435.475.862,00	95,52
	Belanja Barang	7.409.942.793,00	7.148.638.774,00	96,47
	Belanja Jasa	2.069.818.883,00	1.841.600.768,00	88,97
	Belanja Pemeliharaan	661.521.156,00	659.030.320,00	99,62
	Belanja Perjalanan Dinas	1.830.456.500,00	1.786.205.800,00	97,58
	BELANJA MODAL	1.065.288.704,00	1.001.456.360,00	94,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.588.704,00	923.781.360,00	93,54
	Belanja Modal Alat Angkutan	492.386.010,00	488.226.700,00	99,15
	Belanja Modal Alat Alat Kantor dan Rumah Tangga	243.022.879,00	180.574.790,00	74,30
	Belanja Modal Komputer	252.179.815,00	244.979.870,00	97,14
	Belanja Modal Aset Lainnya	77.700.000,00	77.675.000,00	99,97
	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	77.700.000,00	77.675.000,00	99,97
	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.580.000.000,00	212.500.000,00	22,18
	BELANJA TRANSFER	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94
	Belanja Bagi Hasil	10.655.216.000,00	5.391.902.399,00	50,60
	Belanja Bantuan Keuangan	172.542.074.930,00	172.205.688.573,00	99,81
	SURPLUS / DEFISIT	933.775.009.822,00	950.401.344.825,38	101,78
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.547.383.201,00	135.547.383.201,20	100,00
	Pelampauan Penerimaan PAD	5.248.175.874,00	0,00	0,00
	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	70.278.019.024,00	0,00	0,00
	Penghematan Belanja	48.021.188.203,00	124.164.090.677,57	258,56
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal Daerah	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	11.968.000.000,00	11.968.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	123.579.383.201,00	123.579.383.201,20	100,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**1.057.354.393.023,00**	**1.073.980.728.026,58**	**128,99**

Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung 5 (lima) sasaran adalah Rp. 210.374.969.396,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 99.406.556.813,00 atau 47,17 %

Data akuntabilitas kinerja keuangan pada masing - masing sasaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	BAGIAN DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Sekretariat	14.402.516.383,00	13.354.632.682,00	92,72
2.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1.219.143.026,00	1.201.002.612,00	98,51
3.	Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Keuangan Daerah	660.576.865,00	583.990.900,00	88,40
4.	Bidang Perbendaharaan Daerah	193.290.303.982,00	83.509.807.912,00	43,14
5.	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	900.811.487,00	757.122.707,00	84,04
JUMLAH		210.374.969.396,00	99.406.556.813,00	94,17

Analisis antara anggaran keuangan dibandingkan dengan realisasinya telah diuraikan pada masing-masing sasaran.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

TABEL T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2023

Kabupaten Gunung Mas

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02	**KEUANGAN**		**192.466.766.957**	**190.480.600.373**	**172.296.938.954**	**70.360.828.515**	**40,83**	**192.794.518.465**	**453.635.947.353**	**235,69**
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksanannya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**6.135.862.374**	**5.792.893.302**	**8.303.582.844**	**7.045.052.884**	**84,89**	**10.281.052.217**	**23.122.998.403**	**376,85**
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**39.041.140**	**27.443.400**	**5.907.500**	**3.676.500**	**62,23**	**17.950.840**	**49.070.740**	**125,68**
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Buku DPA						6.016.992	2.437.500	40,51
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Buku Perubahan DPA						5.994.348	1.964.800	32,78
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Data Penyusunan Renja, Renstra dan LAKIP	39.041.140	27.443.400	**5.907.500**	**3.676.500**	**62,23**	5.939.500	37.059.400	94,92
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**4.108.079.973**	**3.933.646.942**	**5.135.562.553**	**4.139.978.183**	**80,61**	**5.217.667.000**	**13.291.292.125**	**323,54**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	4.017.549.693	3.849.171.730	5.118.087.053	4.128.330.183	80,66	5.200.000.000	13.177.503.913	327,99
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	5.635.300	5.247.500	5.405.300	3.698.000	68,41	5.445.300	8.945.500	158,74

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	81.665.480	76.805.712	8.560.100	5.525.000	64,54	8.691.600	91.022.312	111,45
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.229.500	2.420.000	3.510.100	2.425.000	69,09	3.530.100	8.375.100	259,33
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**110.142.190**	**104.583.887**	**148.125.736**	**124.344.473**	**83,95**	**143.148.600**	**372.076.960**	**337,81**
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Pakaian Dinas Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	40.501.560	39.435.000	58.125.816	55.956.600	96,27	51.466.000	146.857.600	362,59
5.02.01.2.05.0011	Bimbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	69.640.630	65.148.887	89.999.920	68.387.873	75,99	91.682.600	225.219.360	323,40
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**641.784.720**	**615.500.701**	**842.075.986**	**820.190.424**	**97,40**	**560.983.031**	**1.996.674.156**	**311,11**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	9.254.100	8.606.000	11.964.385	9.969.000	85,25	25.071.903	43.646.903	471,64
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	273.457.360	268.586.000	338.939.961	330.118.150	97,40	777.000	559.481.150	219,22

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023 (Tahun n-1)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	53.628.430	51.657.000	31.974.600	30.124.000	94,21	41.745.362	123.526.362	230,33
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	20.530.950	20.463.600	20.530.950	17.177.200	83,66	20.530.671	58.171.471	283,33
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	20.996.700	20.760.000	18.388.500	18.360.000	99,85	18.388.500	57.508.500	273,89
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.917.180	245.428.101	380.501.800	260.333.380	68,42	380.501.800	886.263.281	335,81
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.829.828.000**	**1.626.408.000**	**57,47**	**1.973.019.000**	**3.599.427.000**	-
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas			**2.829.828.000**	**1.626.408.000**	**57,47**	**1.973.019.000**	**3.599.427.000**	-
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**516.196.080**	**411.866.272**	**725.253.332**	**545.020.904**	**75,15**	**760.566.801**	**1.717.453.977**	**332,71**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Surata Menyurat BKAD Kabupaten Gunung Mas	7.867.200	6.274.100	7.867.200	6.048.000	76,88	8.732.592	21.054.692	267,62
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Rekening Jasa sumber	232.014.000	149.231.452	339.339.000	170.412.026	50,22	355.848.000	675.491.478	291,14

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Sumber Daya Air dan Listrik	daya yang dibayar setiap bulan								
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Fasilitas Penunjang Untuk Mendukung Pelayanan Kerja Kantor BKAD Kab. Gunung Mas	276.314.880	256.360.720	378.047.132	368.560.878	97,49	395.986.209	1.020.907.807	369,47
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**720.618.271**	**699.852.100**	**689.759.546**	**666.842.400**	**96,67**	**728.166.607**	**2.094.861.107**	**290,70**
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	334.310.080	322.467.600	386.348.470	384.555.400	99,54	398.684.178	1.105.707.178	330,74
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor dan GPU	386.308.191	377.384.500	303.411.076	282.287.000	93,04	329.482.429	989.153.929	256,05
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	**185.432.247.421**	**183.863.315.372**	**172.296.938.954**	**70.360.828.515**	**40,83**	**181.912.852.299**	**428.280.850.253**	**230,96**
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		**500.158.420**	**478.661.706**	**853.641.787**	**800.239.999**	**93,74**	**181.808.174.092**	**183.087.075.797**	**36,60**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya KUA dan PPAS	18.907.100	17.628.200	22.053.260	22.001.800	99,77	17.358.735	55.988.735	301,41
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan	18.907.100	17.626.100	22.053.260	22.008.200	99,80	17.358.735	56.995.035	301,44
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA	5.983.550	5.975.600	10.542.730	10.490.800	99,51	6.799.638	23.266.038	388,83
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	5.983.550	5.975.600	9.684.730	9.633.800	99,47	6.799.638	22.409.038	374,51
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	2.581.800	2.581.600	9.684.730	9.583.050	98,85	11.948.928	24.113.578	933,98
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	2.581.800	2.581.600	9.684.730	9.523.700	98,34	9.679.565	21.784.865	843,78
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda dan Perbup APBD	119.569.930	112.536.500	110.394.378	88.271.600	79,96	101.478.139	302.286.239	252,81
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda dan Perbup Perubahan APBD	103.442.220	100.680.800	130.680.378	127.435.200	97,52	120.577.939	348.693.939	337,09
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Terlaksananya Penyusunan Regulasi	86.578.920	84.023.200	70.817.070	70.408.736	99,40	36.759.043	191.190.979	220,82

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-2)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Anggaran	serta Kebijakan Bidang Anggaran								
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya Alokasi Dana Perencanaan Anggaran Pendapatan	19.098.500	18.910.000	11.481.900	11.254.700	98,45	11.421.900	41.586.600	217,74
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya Anggaran Belanja Daerah Kabupaten	52.403.040	50.585.606	10.169.000	9.517.300	93,59	10.154.500	70.257.306	134,07
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten	10.948.000	10.564.000	7.081.000	6.888.200	97,97	7.024.100	24.476.300	223,56
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penganggaran Daerah	53.172.910	48.992.000	-	-	0,00	176.522.795	225.514.795	424,11
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**677.330.760**	**655.766.091**	**596.671.716**	**553.609.845**	**92,78**	**706.036.424**	**1.915.412.360**	**282,78**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya dan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah	50.857.440	48.567.800	92.906.193	61.734.700	66,45	77.992.258	188.294.758	370,24
5.02.02.2.02.0002	Pegelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terwujudnya Laporan DAK Non Fisik	11.298.000	10.700.700	4.380.200	3.544.000	80,91	-	14.244.700	126,08
5.02.02.2.02.0004	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD)	10.519.300	10.470.500	7.062.000	7.059.000	99,96	15.168.816	32.698.316	310,84
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keuangan	69.456.160	68.621.658	61.347.650	61.331.807	99,97	47.314.400	177.267.865	255,22

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2025 (Tahun n-1)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank	39.483.550	39.255.000	6.123.200	6.053.000	98,85	6.582.300	51.890.300	131,42
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Terwujudnya Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	126.645.160	125.434.059	92.124.147	92.248.961	100,14	81.134.672	298.817.692	235,94
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terwujudnya Hasil Koordinasi Piutang dan Utang Daerah	10.610.000	10.541.400	10.348.800	10.128.000	97,87	10.442.880	31.112.280	293,235
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Terlaksananya Penerbitan SP2D	166.228.960	165.148.510	141.573.076	140.631.450	99,33	134.647.698	440.427.658	264,95
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan	192.232.190	177.036.663	180.806.450	170.878.027	94,51	255.053.400	602.958.791	313,66
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelapran Keuangan Daerah**		**598.988.690**	**416.831.622**	**376.235.999**	**256.517.597**	**78,81**	**529.498.215**	**1.242.847.434**	**207,49**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan	Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi	55.971.590	47.081.800	42.045.500	30.670.600	72,95	42.045.100	119.797.500	214,03

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Daerah								
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunya Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	35.708.780	18.915.051	16.925.500	14.027.200	82,87	17.041.100	49.983.351	139,97
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD	86.324.550	70.469.096	84.154.384	74.328.800	88,32	90.081.844	234.879.740	272,08
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjaberan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	189.423.640	151.559.040	195.801.815	176.450.997	90,12	187.165.751	517.176.788	273,02
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2.498.130	-	3.690.300	1.040.000	28,18-	11.404.500	12.444.500	498,15
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Daerah	9.733.350	9.600.000	9.752.500	-	0,00	44.829.570	54.429.570	559,20

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PENYIMPANGAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	27.724.000	-	23.865.000	-	0,00	24.887.130	24.887.130	89,76
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Keuangan	191.604.650	117.206.635	-	-	0,00	112.042.220	229.248.855	119,64
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**183.413.472.028**	**182.076.453.715**	**161.155.145.537**	**60.742.141.751**	**37,69**	**179.756.474.930**	**422.575.070.396**	**230,39**
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Penyaluran DD ADD dan Bantuan Keuangan	179.338.372.207	179.338.372.119	156.405.145.537	60.526.396.357	38,69	175.006.474.930	414.871.243.406	**231,33**
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Darurat dan Mendesak	4.075.099.821	2.738.081.596	4.750.000.000	215.745.394	4,54	4.750.000.000	7.703.826.990	189,04
5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**		**242.397.523**	**235.602.238**	**429.394.621**	**403.223.013**	**93,90**	**282.280.868**	**921.106.119**	**379,99**
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya Anggaran Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Informasi Keuangan Daerah	242.397.523	235.602.238	429.394.621	403.223.013	93,90	282.280.868	921.106.119	379,99

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	**898.657.162**	**824.391.699**	**1.011.741.071**	**807.093.049**	**79,77**	**831.122.227**	**2.463.606.975**	**274,14**
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**898.657.162**	**824.391.699**	**1.011.741.071**	**807.093.049**	**79,77**	**831.717.350**	**2.463.606.975**	**274,14**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Standar Biaya	71.786.220	63.452.800	117.100.700	97.814.400	83,53	70.357.979	231.625.179	322,65
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	8.608.100	7.444.800	14.469.100	11.178.154	77,26	24.420.850	43.043.804	500,03
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Bupati yang Berkaitan Dengan Pengelolaan BMD dan Persediaan	26.559.230	23.674.000	26.505.770	9.633.200	36,34	26.505.770	59.812.970	225,20
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	156.454.620	148.426.190	154.691.113	107.872.849	69,73	123.456.774	379.755.813	242,72
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			237.578.568	177.881.638	74,87	126.214.500	304.096.138	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Penilaian	145.235.230	124.276.700	64.778.382	22.540.650	34,80	42.162.132	188.979.482	2.744,64
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	369.877.712	354.550.059	235.247.890	231.760.264	99,35	267.391.650	853.701.973	290,80
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Penggunaan, Pemanfaatan,	57.344.390	42.094.750	43.475.352	40.468.694	93,08	39.044.744	121.608.188	212,06

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGAAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021 (Tahun n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD Tahun n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA SKPD (Tahun n-2)	REALISASI RENJA SKPD (Tahun n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	45.460.660	44.177.400	80.057.356	69.301.800	86,57	77.822.190	191.301.390	420,80
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	17.331.000	16.295.000	39.836.840	38.641.400	97,00	61.251.408	116.187.803	670,40

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kajian capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan kelompok sasaran dan indikator kinerja adalah sebagaimana tercantum dalam bagan berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2025 (Thn n+2)	Tahun 2026 (Thn n+3)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel		Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	%	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	92,5	93,5	93,5	93,5	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD, terdapat sejumlah isu-isu penting yang perlu dijabarkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja

Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam LAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah secara umum sudah berjalan dengan baik. Koordinasi dan sinergi program antara perangkat milik daerah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan juga telah dijalankan melalui:

a. Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Tugas Perbantuan Tingkat Wilayah di Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. Pendampingan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah untuk pengelolaan keuangan maupun aset Perangkat Daerah dan Kabupaten Gunung Mas;
c. Bekerja sama dengan PT. Taspen dalam rangka sosialisasi dan pelatihan aplikasi Simgaji;
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya maupun dengan Pemerintah Pusat di Jakarta;

2. Permasalahan dan hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

a. Sumber daya manusia yang harus ditingkatkan sesuai dengan cepatnya perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Kurangnya kerja sama dari Perangkat Daerah lain dalam hal pelaporan keuangan SKPD dan pelaporan aset Perangkat Daerah;
c. Data dari unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran sering terlambat sehingga kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tugas Perbantuan Tingkat Wilayah menjadi terhambat.

3. Dampak dari Permasalahan

Dampak dari permasalahan dan hambatan di atas terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kurang maksimalnya tupoksi di dalam pencatatan Aset Daerah terhadap penyajian neraca di dalam Laporan Keuangan Daerah;
b. Kurang tepatnya penilaian Laporan Keuangan secara keseluruhan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
c. Terhambatnya Laporan Keuangan Daerah dan Laporan Aset milik Daerah.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan Eksternal

1. Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui jaringan internet;
2. Perubahan aturan yang cepat membuat penatausahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada;
3. Sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh K/L kurang tersosialisasi;
4. Pemeriksaan bertumpuk pada saat bersamaan.

b. Tantangan Internal

1. Banyaknya program pendidikan kilat, pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi yang ditawarkan oleh Lembaga Pemerintahan, perguruan tinggi maupun oleh pihak swasta;
2. Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Pengelolaan Keuangan dan Aset secara profesional;
3. Harmonisnya hubungan antra eksekutif dan legislatif;
4. Dukungan kuat dari DPRD melalui Peraturan Daerah, maupun upaya untuk memperoleh dana dari Provinsi dan Pemerintah Pusat;
5. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

5. Formulasi Isu-Isu

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review

1. Proses yang dilakukan
2. Penjelasan mengenai
3. Penjelasan temuan

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.973.437.517**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.973.437.517**	
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.950.840**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.950.840**	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	6.016.992	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	6.016.992	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	5.994.348	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	5.994.348	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	5.939.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	5.939.500	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.217.667.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**5.217.667.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	100%	5.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	100%	5.200.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	100%	5.445.300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	100%	5.445.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	8.691.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	8.691.600	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	3.510.100	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	3.510.100	

3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**143.148.600**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**143.148.600**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	**51.466.000**	**Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	**51.466.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	**91.682.600**	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	**91.682.600**	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**687.063.817**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**687.063.817**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	25.071.903	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	25.071.903	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	306.826.292	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	306.826.292	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	41.745.362	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	41.745.362	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	20.530.671	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	20.530.671	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	100%	18.388.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	18.388.500	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	100%	30.000.000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan	100%	30.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	189.362.041	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	189.362.041	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	20.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	20.000.000	

5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.496.828.000**					**2.496.828.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	2.296.828.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	2.296.828.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	200.000.000	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**764.756.337**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**764.756.337**	
	Penyediaan Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	78.732.592	Penyediaan Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	78.732.592	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	355.848.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbaer Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	355.848.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	400.175.745.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	400.175.745.	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**646.022.923**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**646.022.923**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	397.110.398	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	397.110.398	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	248.912.525	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	248.912.525	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel		**181.808.174.092**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel		**181.808.174.092**	
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu		**533.883.655**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**		Persentase dokumen penyusunan rencana anggaran daerah yang ditetapkan tepat waktu		**533.883.655**	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	17.358.735	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	17.358.735	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	17.358.735	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	17.358.735	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	6.799.638	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	6.799.638	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	6.799.638	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	6.799.638	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	11.948.928	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	11.948.928	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	9.679.565	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	9.679.565	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	101.478.139	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	101.478.139	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	120.577.939	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	120.577.939	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	36.759.043	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	36.759.043	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	11.421.900	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	100%	11.421.900	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	10.154.500	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	100%	10.154.500	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100%	7.024.100	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100%	7.024.100	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	176.522.795	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	176.522.795	
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**706.036.424**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**706.036.424**	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	77.992.258	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	77.992.258	

	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	15.168.816	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	15.168.816	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	47.314.400	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	47.314.400	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	6.582.300	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Jumlah Dokumen Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%	6.582.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	81.134.672	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	81.134.672	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	10.442.880	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	10.442.880	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	100%	134.647.698	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	100%	134.647.698	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yng Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	332.753.400	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yng Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	332.753.400	

3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**529.498.215**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**529.498.215**	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	42.045.100	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	42.045.100	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	17.041.100	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	17.041.100	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	90.081.844	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	90.081.844	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	187.166.751	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	187.166.751	
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	11.404.500	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	11.404.500	
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	44.829.570	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	44.829.570	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	24.887.130	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	24.887.130	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	112.042.220	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	112.042.220	

4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**179.756.474.930**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**179.756.474.930**	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	175.006.474.930	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	175.006.474.930	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	4.750.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	4.750.000.000	
5	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**				**282.280.868**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**				**282.280.868**	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	282.280.868	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%	282.280.868	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**831.717.350**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**831.717.350**	
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**831.717.350**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**831.717.350**	
	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	70.357.979	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	70.357.979	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	24.420.850	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	24.420.850	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	123.051.897	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	123.051.897	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	126.214.500	Inventarisasi Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	100%	126.214.500	
	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	42.162.132	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	100%	42.162.132	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasn dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	267.391.650	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasn dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	267.391.650	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	39.044.744	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	39.044.744	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	77.822.190	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%	77.822.190	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	61.251.408	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	100%	61.251.408	
					192.613.328.959					**192.613.328.959**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak ada karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun.....

Kabupaten Gunung Mas

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia adalah menciptakan Tata Pemerintah yang baik (good governance). Salah satu cara untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik adalah dengan menjalankan pengelolaaan keuangan dan aset yang transparan, efisien, efektif, ekonomis, adil, merata, akuntabel, dan auditabel sesuai dengan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Di dalam tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas yang utama adalah penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Perencanaan Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 kemudian disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yaitu prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 berdasarkan RPJM Kabupaten Gunung Mas; Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; kemampuan keuangan daerah; sumber pendanaan dan sumber daya manusia yang dimiliki.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Tahun 2025 selaras dengan tujuan Renstra dan tujuan RPJM Kabupaten Gunung Mas serta visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

a. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

3.2.2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerh

3.3. Program dan Kegiatan

Program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025 terdiri dari 3 Program dan 63 Kegiatan dan Sub Kegiatan. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah 23 kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah berjumlah 32 kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berjumlah 8 kegiatan;

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**								
5	**02**				**KEUANGAN**				**249.545.132.659**				**193.791.543.923**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**54.775.119.634**				**9.623.688**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**17.735.631**				**19.000.000**
5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	100%	6.016.992	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		100%	6.500.000
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	100%	5.994.348	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		100%	6.500.000
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	100%	5.724.291	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		100%	6.000.000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.645.906.921**				**5.448.000.000**
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	4.629.164.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	5.400.000.000
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	5.589.539	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	16.000.000

5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	7.669.606	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	16.000.000
5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	3.483.306	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	16.000.000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Admrinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**225.505.550**				**155.000.000**
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	93.822.750	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	50.000.000
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	131.682.800	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	105.000.000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Admrinistrasi Umum Perangkat Daerah**				**1.786.533.381**				**781.860.000**
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	18.986.528	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	26.000.000
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	469.887.076	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	200.000.000
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	44.998.286	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	139.860.000
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	20.530.671	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	21.000.000
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	18.388.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	18.500.000
5	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	-
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	36.028.380	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		90%	36.500.000

5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	370.561.900	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	320.000.000
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	807.152.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	20.000.000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**15.447.569.905**				**1.836.828.000**
5	02	01	2.07	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	15.447.569.905	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	1.836.828.000
5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	-
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**647.007.953**				**734.000.000**
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	8.924.400	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	9.000.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	277.848.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	360.000.000
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	360.235.553	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	365.000.000
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**32.004.860.293**				**649.000.000**
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	435.123.851	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	400.000.000
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	31.569.736.442	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	249.000.000-

5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**193.909.544.241**				**183.473.716.360**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang Ditetapkan tepat waktu**			**936.871.991**				**806.000.000**
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	46.820.412	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	18.000.000
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	47.325.021	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	18.000.000
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	26.498.915	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	8.000.000
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	27.198.581	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	8.000.000
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	14.612.016	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	15.000.000
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	35.178.987	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	15.000.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	178.033.916	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	137.000.000
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	204.898.650	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	137.000.000

5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	107.323.837	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	105.000.000
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	21.580.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	120.000.000
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	22.180.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	20.000.000
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	21.380.500	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	20.000.000
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	183.840.156	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	185.000.000
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**1.122.403.090**				**836.604.430**
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	129.951.794	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	104.000.000
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	15.135.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	16.000.000
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	74.096.252	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	120.600.000

5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	6.541.865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	50.000.000
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	129.570.874	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	180.000.000
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	10.318.727	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	25.000.000
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	185.007.127	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	135.000.000
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	571.781.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	206.604.430

5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**				**7293.995.484**				**780.511.930**
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	52.572.333	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	123.500.000
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	30.857.698	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	83.500.000
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	158.937.913	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	170.800.000
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	248.551.792	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	195.711.930
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	13.197.423	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	22.000.000
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Kab Gunung	90%	52.163.911	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	45.000.000

					Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Akuntansi Pemerintah Daerah	Mas, Kurun, Kuala Kurun						
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	25.029.010	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	25.000.000
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	142.685.404	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	115.000.000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**				**190.925.733.630**				**180.750.000.000**
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	186.175.733.630	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Umum		90%	176.000.000
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	4.750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90%	4.750.000.00
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**				**200.540.046**				**300.000.000**

5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	90%	200.540.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	300.000.000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**860.468.784**				**694.739.563**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**				860.468.784				694.739.563
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	64.831.035	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			60.148.570
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	17.092.419	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	25.000.000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	106.773.428	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	149.153.113
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	-
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	-	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	94.423.220
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	301.101.333	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	199.805.020

5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangaran, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	114.979.215	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	18.604.300
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	63.561.648	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	66.005.200
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disususn	Kab Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	95%	82.913.112	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		90%	81.600.140
								TOTAL	**249.545.132.659**				**193.791.543.923**

Perbandingan Program, Kegiatan dan Pagu Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024 secara Global

Tahun Kegiatan	2024	2023	2022
Jumlah Program	3	3	3
Jumlah Kegiatan	63	65	63
Pagu Belanja	Rp. 218.343.777.059	Rp. 172.296.937.954,00	Rp. 181.288.864.065,00

Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran Berjalan (Tahun Anggaran 2024)

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Rencana Pagu Tahun 2025 (Rp)	Pagu Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
I.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**54.775.119.634**	**23.573.764.034**
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.735.631**	**17.735.631**
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.016.992	6.016.992
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.994.348	5.994.348
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.724.291	5.724.291
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.645.906.921**	**4.645.906.921**
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.164.570	4.629.164.570
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.589.539	5.589.539
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.669.506	7.669.506
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.483.306	3.483.306
	5.02.01.2.05	**Admrinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**225.505.550**	**225.505.550**
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.822.750	93.822.750
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	131.682.800	131.682.800
	5.02.01.2.06	**Admrinistrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.786.533.381**	**1.786.533.381**
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.986.528	18.986.528
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.887.076	469.887.076
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.998.286	44.998.286
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.530.671	20.530.671
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.388.500	18.388.500
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	-	36.028.380
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.028.380	36.028.380
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.561.900	370.561.900
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	807.152.040	807.152.040
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**15.447.569.905**	**15.447.569.905**
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.447.569.905	15.447.569.905
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**647.007.953**	**647.007.953**
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Surat Menyurat	8.924.400	8.924.400
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.848.000	277.848.000
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.235.553	360.235.553
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.004.860.293**	**803.504.693**
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.123.851	435.123.851
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.569.736.442	368.380.842

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Rencana Pagu Tahun 2025 (Rp)	Pagu Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
II.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**193.909.544.241**	**193.909.544.241**
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**936.871.991**	**936.871.991**
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	46.820.412	46.820.412
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	47.325.021	47.325.021
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	26.498.915	26.498.915
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	27.198.581	27.198.581
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	14.612.016	14.612.016
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35.178.987	35.178.987
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	178.033.916	117.033.916
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	204.898.650	204.898.650
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	107.323.837	107.323.837
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	21.580.500	21.580.500
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	22.180.500	22.180.500
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	21.380.500	21.380.500
	5.02.02.2.01.0013	Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	183.840.156	183.840.156
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.122.403.090**	**1.122.403.090**
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	129.951.794	129.951.794
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	15.135.003	15.135.003
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	74.096.252	74.096.252
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.541.865	6.541.865
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	129.570.874	129.570.874
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	10.318727	10.318727
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	185.007.127	185.007.127
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	571.781.448	571.781.448
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**723.995.484**	**723.995.484**
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	52.572.333	52.572.333
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	30.857.698	30.857.698
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	158.937.913	158.937.913
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	248.551.792	248.551.792
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	13.197.423	13.197.423

No.	Kode	Program dan Kegiatan	Rencana Pagu Tahun 2025 (Rp)	Pagu Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	52.163.911	52.163.911
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	25.029.010	25.029.010
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	142.685.404	142.685.404
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**190.925.733.630**	**190.925.733.630**
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	186.175.733.630	186.175.733.630
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.750.000.000	4.750.000.000
	5.02.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**200.540.046**	**200.540.046**
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	200.540.046	200.540.046
	5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**860.468.784**	**860.468.784**
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**860.468.784**	**860.468.784**
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	64.831.035	64.831.035
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	17.092.419	17.092.419
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	106.773.428	106.773.428
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	-	-
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	109.216.594	109.216.594
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	301.101.333	301.101.333
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	114.979.215	114.979.215
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.561.648	63.561.648
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82.913.112	82.913.112
		TOTAL	**249.545.132.659**	**218.343.777.059**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4. 1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Sasaran, Strategi dan kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran
   a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
   b. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
2. Strategi
   a. Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
   b. Memahami dan melaksanakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Memahami dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   d. Memahami dan Melaksanakan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
   e. Memahami dan melaksanakan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Kebijakan
   a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
   b. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang efektif dan efisien;
   c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset;
   d. Menerapkan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   e. Memberikan Pelayanan Publik yang optimal.

Tabel Pencapaian Sasaran, Strategi dan Kebijakan berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan

No	Kelompok	TA 2022	TA 2023
1.	Sasaran		
	a. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;	V	V
	b. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;	V	V
2.	Strategi		
	a. Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;	V	V
	b. Memahami dan melaksanakan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;	V	V
	c. Memahami dan Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	V	V
	d. Memahami dan Melaksanakan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;	V	V
	e. Memahami dan Melaksanakan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas	V	V
3.	Kebijakan		
	a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;	V	V
	b. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang efektif dan Efisien;	V	V
	c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset;	V	V
	d. Menerapkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	V	V
	e. Memberikan Pelayanan Publik yang optimal	V	V

4. 2. Indikator Kinerja

Tabel Indikator Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
I.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/Kota***				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Data Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Sekretariat
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Data Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Sekretariat
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersedianya Data Penyusunan Renja, Renstra dan LAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Dokumen	Sekretariat

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah ASN BKAD Kabupaten Gunung Mas	43 Orang	Sekretariat
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKAD Kabupaten Gunung Mas	1 Laporan	Sekretariat
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Sekretariat
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Sekretariat
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian-Pakaian Dinas Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 Stell	Sekretariat
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Sekretariat
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instaslasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Gedung/Kantor	Sekretariat
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Gedung/Kantor	Sekretariat
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Sekretariat
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	Sekretariat
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Bahan Bacaan	Sekretariat
6.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/material untuk Kantor BKAD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Sekretariat
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi untuk Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Sekretariat
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Dana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Stekholder	Sekretariat
9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Data Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Sekretariat
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	BKAD
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	3 Unit	Sekretariat

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
	Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Layanan Jasa Surat Menyurat BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	612 Lembar/Paket	Sekretariat
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar setiap bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Rekening	Sekretariat
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Fasilitas Penunjang Untuk Mendukung Pelayanan Kerja Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Jenis	Sekretariat
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Kantor BKAD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Sekretariat
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Berkala Gedung Kantor dan GPU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	Sekretariat
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
3.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi RKA	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
4.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
5.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
6.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
7.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Perda dan Perbup APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
8.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perda dan Perbup Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
9.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Tersedianya Alokasi Dana Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
		Pendapatan	Anggaran Pendapatan		
11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Tersedianya Anggaran Belanja Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Tersedianya Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
13.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya dan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah
2.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	39 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah
3.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersusunya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah
4.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	39 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terwujudnya Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Laporan	Bidang Perbedaharaan Daerah
6.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terwujudnya Hasil Koordinasi Piutang dan Utang Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah
7.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	Terlaksananya Penerbitan SP2D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi terkait	39 Dokumen	Bidang Perbedaharaan Daerah

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
8.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang	Bidang Perbedaharaan Daerah
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	39 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
2.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersusunya Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan LKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terkonsolidasi	39 Laporan	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
6.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
7.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
8.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertarggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Keuangan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinsan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
1.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Bidang Perbedaharaan Daerah

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	2	3	4	5	6
2.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Bidang Perbedaharaan Daerah
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				
1.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tersedianya Anggaran Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah				
1.	Penyusunan Standar Harga	Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Standar Biaya	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Keputusan Sekretaris Daerah tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi BMD Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Penilaian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
6.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	39 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disususn	1 Laporan	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. 3. Dana Indikatif Tahun 2025

Sumber dana kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berjumlah 66 kegiatan (termasuk sub kegiatan), semua berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten.

Untuk Sub Unit PPKD terdapat dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Desa.

4. 4. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

Untuk Tahun +1 dan seterusnya, dengan memperhatikan angka inflasi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta pertumbuhan ekonomi Nasional dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah maka Belanja Langsung diperkirakan naik sebesar 2,5% dari Tahun Rencana (2025).

Untuk Belanja tidak Langsung khususnya belanja Gaji PNS diperkirakan naik sebesar 2,5% mengikuti kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan gaji PNS.

Mengacu pada Pagu Indikatif belanja langsung yang dikeluarkan Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp. 249.545.132.659,- .

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**246.545.132.658,00**							**183.761.343.023,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**246.545.132.658,00**							**183.761.343.023,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**246.545.132.658,00**							**183.761.343.023,00**	
1.	5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	54.775.119.654,00						-	6.823.680.008,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.739.431,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	18.000.008,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0804	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.810.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0805	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	5.904.348,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0806	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.724.281,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.645.869.921,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	5.408.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/Bulan	4.639.164.272,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital			5.400.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.2005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.086.539,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.5017	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	7.664.936,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Progress Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran				12 Dokumen	3.460.336,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Pelayanan Perangkat Daerah	-	-			-	225.520.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	69.822.750,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Dukungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	131.660.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan tata kelola yang SDM dengan peralihan	-		102.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.786.533.381,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	781.868.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.8601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RANCANGAN TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kompenan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.088.328,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		26.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	469.887.375,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.998.895,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		139.998.220,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10.638.671,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			21.808.330,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	18.088.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		19.500.330,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	16.028.990,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER LBIUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.500.330,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	312.161.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		120.000.330,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDICATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Dinamis pada SKPD				15000000 Dokumen	887.153.840,00	Kec. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BADI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.447.568.809,00			-		-	-	1.800.928.080,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diadakan				12 Unit	15.447.568.809,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAK LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BADI HASIL PAJAK	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemerintahan dan dukung terhadap pembangunan daerah. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		1.800.928.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	847.007.953,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	734.009.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.324.420,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital			6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dialokasikan				6 Laporan	277.840.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dialokasikan				2 Laporan	360.235.553,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital	-		365.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	32.904.980.253,00				Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital			840.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	435.123.551,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kel-Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	31.869.736.442,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital	-		240.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-	-			-	**103.809.544.241,00**						-	**109.473.118.380,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	838.871.881,00				Peningkatan Tata Kerja pemerintahan ke arah digital	-	-	800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	46.820.412.00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		16.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.52.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	47.226.021,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		16.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	20.288.010,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		16.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	27.168.561,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		8.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	14.812.016,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		15.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				42 Dokumen	35.178.957,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		15.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.52.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	179.033.919,00	Kec. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis digital	-		137.000.000,00	SADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.52.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perdusan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	204.668.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		127.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta kebijakan bidang Anggaran				4 Dokumen	107.323.037,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Penerusunan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penerusunan Anggaran Pendapatan				2 Dokumen	31.580.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Penerusunan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penerusunan Anggaran Belanja Daerah				12 Dokumen	22.180.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Penerusunan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penerusunan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	31.580.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Penilaian Penerusunan Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penilaian Pengelolaan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Orang	102.840.156,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	1.122.450.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	930.464.436,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				24 Dokumen	128.651.784,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		134.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyajian, Pelaksanaan Pengelolaan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPE														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPE				36 Dokumen	15.120.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				10 Dokumen	74.596.250,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		108.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Kiri Turki dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Kiri Turki dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				36 Dokumen	6.541.865,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Akhir Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Pemungutan/ Pemotongan Pihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Akhir Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pemotongan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Laporan Akhir Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pemotongan Pihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	129.372.874,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUN	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisa Pembayaran dan Penerimaan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pajdang dan Uang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas; Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Penerimaan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				5 Dokumen	10.316.727,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.000.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Rekonsiliasi Data Pendapatan dan Pengelolaan Kas serta Penagihan dan Pemotongan atas SPDD dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Pendapatan dan Pengelolaan Kas serta Penagihan dan Pemotongan atas SPDD dengan Instansi Terkait				20 Dokumen	185.397.127,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		150.000.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				99 Orang	571.781.448,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		555.684.436,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-				-	723.882.484,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	780.311.936,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Penyajian LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Penyajian LO dan Beban				30 Dokumen	92.570.333,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		125.500.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	35.857.038,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		83.508.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				20 Laporan	118.837.913,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		170.808.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	248.331.782,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		165.711.936,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	19.137.453,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	52.163.911,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	25.029.010,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				105 Orang	142.985.454,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	192.829.733.931,00			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-	-	160.703.808.910,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisa Rekomendasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisa Rekomendasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	166.170.733.931,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke arah digital	-		176.033.808.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp.)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	4.750.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-				-	200.540.040,88			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				4 Dokumen	200.540.040,88	Kab. Gunung Mas, Kuluh, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-			-	**800.468.794,88**						-	**894.739.563,88**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	800.468.794,88			-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	894.739.563,88	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	64.831.035,88	Kab. Gunung Mas, Kuluh, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		69.140.575,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	17.082.418,00	Kab. Gunung Mas, Kuluh, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	100.773.430,00	Kab. Gunung Mas, Kuluh, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		149.151.113,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Pemilaran Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	100.245.594,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		84.423.229,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				38 Laporan	201.101.303,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		169.835.208,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Penghapusan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Penghapusan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah				8 Dokumen	114.078.213,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		76.874.208,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	83.561.849,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		89.901.208,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	82.413.112,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		81.830.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							240.545.133.859,00							193.761.540.923,00	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan aset yang profesional, akuntabel dan auditabel, serta upaya peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, maka tugas utama yang diharapkan khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas melaksanakan analisa, monitoring dan evaluasi keuangan daerah serta bina aset sehingga pelaporan keuangan dan aset pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan sesuai dengan peraturan perudangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar tentunya tidak luput dari dukungan dan komitmen para pimpinan pemerintah daerah serta penyediaan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia yang memadai dan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini masih banyak terdapat keurangan-kekurangan dan agar penyusunan ini dapat bermanfaat dan berdaya guna serta berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan maka kami mohon dengan hormat adanya koreksi yang membangun dalam penyusunan yang lebih sempurna di tahun mendatang.

Kuala Kurun, Juli 2024

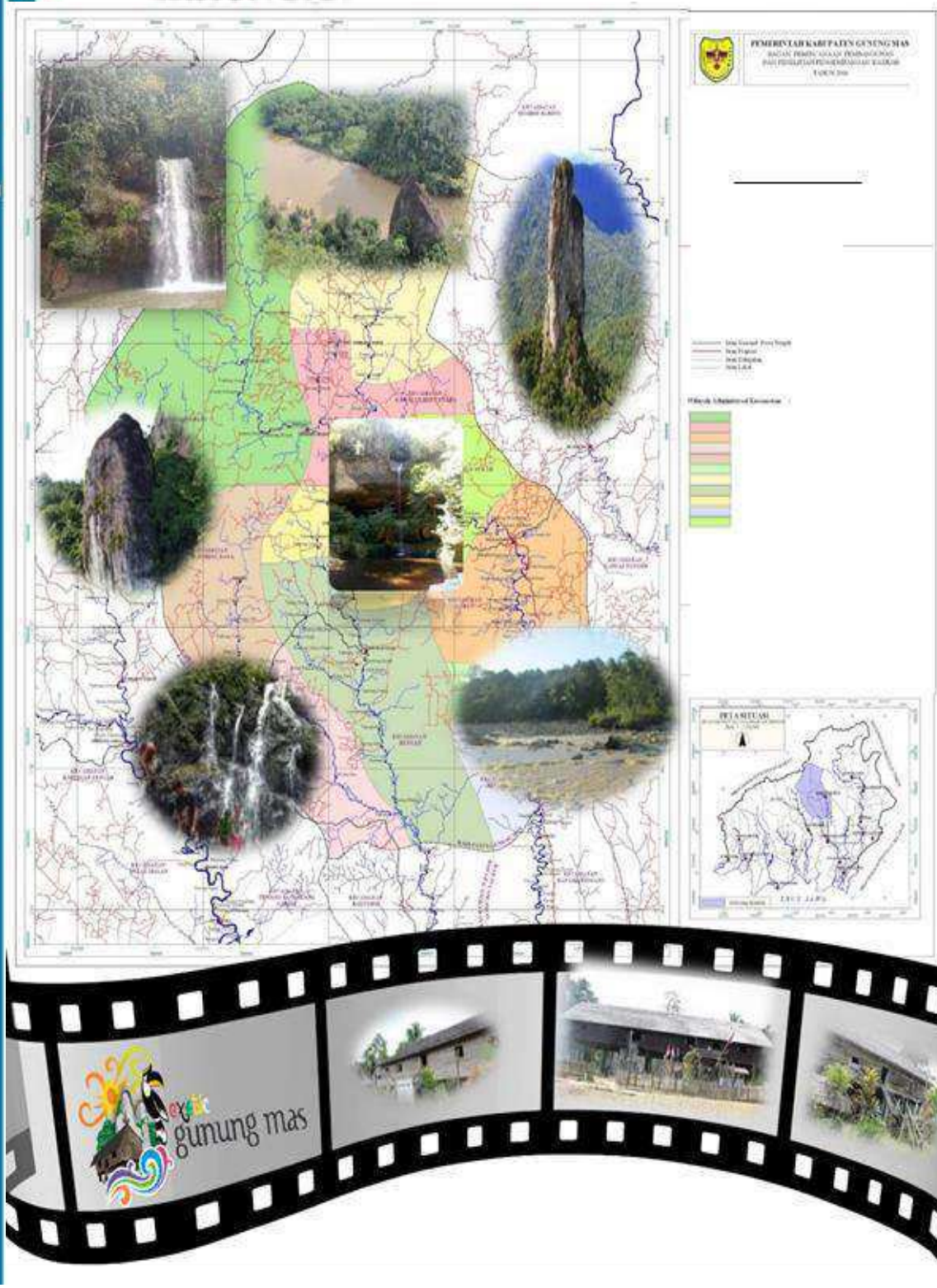
Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas,

HARDEMAN, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196604061994031009

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Pangeran Diponegoro No. Telp.Fax : (0537) 3032898 Kode Pos : 74511
KUALA KURUN

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sebagai penjabaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 -2024, merupakan dokumen perencanaan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, kegiatan, sub kegiatan, sasaran dan target sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta evaluasi hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2022.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan dalam pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja pemerintahan, khususnya Dinas Kebudayaa dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, terima kasih.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas,

Drs. HANSLI GONAK.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660407 199403 1 012

\

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun lalu 5

2.2 Analis Kinerja Pelayanan SKPD 17

2.3 Isu – isu penting penyelenggraan tugas dan fungsi SKPD 17

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD 18

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional 25

3.2 Tujuan dan sasaran renja SKPD 26

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan pada beberapa Satuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami beberapa perubahan pada struktur organisasinya, dengan adanya perubahan tersebut maka Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas mengalami beberapa penyesuaian kegiatan agar dapat berdampak lebih maksimal terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Sejalan dengan konsep tersebut, pemerintah yang baik, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2028, maka kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 -2024 yang selanjutnya ditungankan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. Adapun RENJA tersebut memuat kebijakan, program, kegiatan, pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perwujudan dari Rencana Kerja tersebut tertuang dalam bentuk program dan kegiatan adalah Pengelola kekayaan Budaya, Pengelolaan Keragaman, Pengembang Karakter dan pekerti Bangsa, Peningkatan Seni Budaya, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pariwisata yang merupakan bagian penting dalam pembanguan dari masa depan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

1.2 LANDASAN HUKUM

a. Landasan Idiil : Pancasila
b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
c. Landasan Manajerial : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dimaksud untuk perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanaan tugas dan fungsi selama tahuun 2024 dan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembanguan Kabupaten Gunung Mas serta Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas terpilih.

B. Tujuan

1. Acuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dalam mengimplementasi RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Landasan Hukum

- Maksud dan Tujuan
- Sistematika

- **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISTA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024**
  - Evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024
  - Analis kinerja pelayanan SKPD
    - Isu – isu Strategis
    - Penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

- **BAB III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
  - Tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024
- **BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SKPD TAHUN 2024**
- **BAB V. PENUTUP**

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN 2024

2.1 EVALUASI PELAKSANAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kabupaten Gunung Mas merupakan penalahan dan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas tersebut. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat diamati dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dinas tersebut. Pada pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan secara optimal yang tentunya mendukung terwujudnya misi organisasi. Hal ini kemudian dipertanggung jawabkan secara periodik dengan waktu yang telah ditentukan setiap tahunnya.

Lebih lanjut lagi, dalam pengukuran kinerja dan pencapaian hasil kegiatan tahun anggaran 2024 dan perkiraan target tahun 2024 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas menetapkan dasar sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan penetapan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang memberikan gambaran tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, bersadasarkan hasil diperoleh melalui penilaian kinerja tehadap program maupun kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran;

2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia salam perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan;
    a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan program dan kegiatan yang menyebabkan rendanya kerterpanduan dalam fungsi peencananaan, monitoring dan evaluasi;
    b. Kurang dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasi sasaran program yang menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
    c. Perlunya Peningkatan komikmen dan pemahaman untuk mempedomani panduan kegiatan dalam Restra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
    d. Adanya penyesuaian anggaran dikarenakan harga – harga di pasaran yang meningkat.

Dalam rangka memujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasrkan Restra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupate Gunung Mas tahun 2019 – 2024 maka strategis dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gungung Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan
2. Strategi mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskam perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku kepastian hukumnya di laksanakan dengan arah kebijakan
3. Strategi pemberdayaan seluruhpotensi yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan kualitas rencana pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektin dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berada untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan – kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan.

Tabel T-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Gunung Mas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**9.897.065.189,00**							**9.231.254.207,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.250.065.189,00**							**8.844.254.207,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.250.065.189,00**							**8.844.254.207,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.092.861.653,00**						**-**	**4.687.050.671,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	28.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	28.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				10 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.615.730.671,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	3.615.730.671,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3.379.325.585,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		3.379.325.585,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	222.405.086,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		222.405.086,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	114.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	114.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				36 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan	-		25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	89.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		89.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	382.270.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	150.070.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	64.270.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		64.270.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		39.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	228.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		22.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	274.360.982,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	274.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	124.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		124.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	150.360.982,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	347.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	176.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	97.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		97.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	190.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		19.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	329.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	329.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	159.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		159.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		170.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	2.500.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				0 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Terlaksananya Festival Mihing Manasa dan keikutsertaan dalam Festival Isen Mulang, pembinaan sanggar seni serta pemajuan elola adat***	**-**			**2 Kegiatan**	**3.200.000.000,00**						**-**	**3.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Mewujudkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas*	-			2 Sub Kegiatan	1.500.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	12 Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas	-	1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				15 Objek	1.500.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	12 Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.700.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	1.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				1 Objek	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	1.550.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		1.550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**200.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				80 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**120.000.000,00**						**-**	**120.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				20 Orang	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**507.043.366,00**						**-**	**507.043.366,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	143.253.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	143.253.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	73.253.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		73.253.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	363.790.366,00			-	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	363.790.366,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				15 Objek	263.790.366,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		263.790.366,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				3 Objek	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**	**-**			**-**	**130.160.170,00**						**-**	**130.160.170,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	130.160.170,00			-	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-	-	130.160.170,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	5.160.170,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		5.160.170,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	-		125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**647.000.000,00**							**387.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**647.000.000,00**							**387.000.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.000.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-	-	7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata elola pemerintahan daerah	-		7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**				**410.000.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Membangun Daya Tarik Wisata yang Berdaya Saing*	-			1 Sub Kegiatan	60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Usaha Kepariwisataan, Perangkat Desa wilayah Destinasi Wisata	-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Kelompok Sadar Wisata, Pelaku Usaha Kepariwisataan, Perangkat Desa wilayah Destinasi Wisata		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Melaksanakan Pengembangan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten*	-			1 Sub Kegiatan	150.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pemangku Kepentingan, Pelaku Usaha Kepariwisataan	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pemangku Kepentingan, Pelaku Usaha Kepariwisataan		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	-	-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	-		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Terlaksananya beberapa event pariwisata dan pemilihan Putra Putri Pariwisata yang dibentuk dalam lomba, festival atau kontes; Keikutsertaan dalam sejumlah event Pameran dalam rangka promosi pariwisata***	**-**			**3 Kegiatan**	**230.000.000,00**						**-**	**80.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Meningkatkan Kunjungan Wisatawan*	-			1 Sub Kegiatan	230.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Turis Nusantara dan Macanegara	-	80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Turis Nusantara dan Macanegara		80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengembangan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Turis Nusantara dan Macanegara		0,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi, maka disusun Standar Pelayanan Minimun (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Namun pada saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga sebagai dasar dalam menganalisis digunakan IKK, yaitu yntuk urusan Budaya, seperti penyelenggaraan festival seni dan budaya dan sasaran penyenggaraan seni dan budaya. Kemudian untuk urusan pariwisata, seperti kunjungan wisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, dimana tugas pokok, fungsi dan wewenang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas berdasarkan peraturan perundang – undangan;
2. Perencanaan, pengembangan dan pelestarian kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata
3. Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
5. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tabel T.C 30
Pencapaian Kinerja Pelayana Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas

NO	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n+2)	Tahun 2024 (thn n+3)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2024 (thn 1)	
(1)	(2	(3	(4		(5	(6	(7	(8	(9	(1	(1	(12)	(13)	(14)
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB			%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.				%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.				%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4.				%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berapa isu strategis yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara Lain :

a. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menhilangkan jejak kebudayaan dan kesenian lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.

b. Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak.

c. Cepatnya kemanjuan dunia IT menuntut sektor kebudayaan dan pariwisata untuuk lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkan fasilitas IT sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih tersebar dan massal.

d. Kebutuhan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan.

e. Tingginya kebutuhan akan SDM pariwisata yang berkompetensi dan memiliki wawasan yang luas.

f. Peningkatan penataan insfastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan destinasi pariwisata, mengingat begitu besarnya niat wisatawan yang masuk ke Kabupaten Gunung Mas.

g. Promosi Kebudayaan dan Pariwisata melalui penyelenggaraan event – event nasional dan internasional yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke Kabupaten Gunung Mas.

h. Peningkatan pelayanan investasi, pengembangan destinasi unggulan (wisata alam, budaya, religi) serta pembinaan pengelolaan sektor kepariwisataan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal terhadap RKPD telah me-review menenai analis kebutuhan, tentang keterkaiatan pengalokasian kebutuhan dana masing – masing kegiatan. Penyesuaian terhadap alokasi dana tersebut telah melalui proses yang disesuaikan pada perkembangan yang terjadi dimasa mendatang. Sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun dapat tercapai sesuai penetapan target. Begitu pula dengan penyusaian yang juga dilakuakan pada rincian detail kegiatan , termasuk lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, sampai pada outcome yang mengacu pada proses penyusaian kebutuhan kegiatan untuk pencapaian target kegiatan.

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**										
1	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Kegiatan	478.658 .700	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Kegiatan	478.658 .700	
2	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Kesenian Tradisional	148.596.900	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Kesenian Tradisional	148.596.900	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Tersedianya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional Kabupaten Gunung Mas yang berkompetensi dan berdaya saing serta Terbangunnya Kantor Kedemangan	3 Lembaga	1.060.000.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		Tersedianya Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional Kabupaten Gunung Mas yang berkompetensi dan berdaya saing serta Terbangunnya Kantor Kedemangan	3 Lembaga	1.060.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**					
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Terlaksananya pelatihan bagi Pelaku Seni dan Pengelola Sanggar se- Kabupaten Gunung Mas	1 Kegiatan	89.999.600	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Terlaksananya pelatihan bagi Pelaku Seni dan Pengelola Sanggar se- Kabupaten Gunung Mas	1 Kegiatan	89.999.600	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Tersedianya sarana sanggar seni dan budaya serta terlaksananya pembinaan bagi pelaku seni dan pengelola sanggar se-Kabupaten Gunung Mas	2 Kegiatan	298.934.700	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional		Tersedianya sarana sanggar seni dan budaya serta terlaksananya pembinaan bagi pelaku seni dan pengelola sanggar se-Kabupaten Gunung Mas	2 Kegiatan	298.934.700	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**					
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Terlaksananya Lomba Menulis Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Dokumen	29.625.700	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Terlaksananya Lomba Menulis Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas	1 Dokumen	29.625.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**					
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
5	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Registrasi Nasional Diduga Cagar Budaya	5 Objek	125.696.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Registrasi Nasional Diduga Cagar Budaya	5 Objek	125.696.000	
	Penetapan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya	2 Objek	62.534.600	Penetapan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya	2 Objek	62.534.600	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**					
6	Perlindungan Cagar Budaya		Terjaga dan Terpeliharanya	15 Objek	427.777.640	Perlindungan Cagar Budaya		Terjaga dan Terpeliharanya	15 Objek	427.777.640	
	Perlindungan Cagar Budaya					Perlindungan Cagar Budaya					
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**										
7	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	3 Orang	67.391.030	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman	3 Orang	67.391.030	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum	1 Kegiatan	341.600	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Penyediaan Sarana dan Prasarana Museum	1 Kegiatan	341.600	
	PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					**PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	13.717.440	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen	13.717.440	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Penyediaan Dana untuk penyusunan RKA/RKA perubahan - SKPD dan	26 Dokumen	15.238.960	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Penyediaan Dana untuk penyusunan RKA/RKA perubahan - SKPD dan	26 Dokumen	15.238.960	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan	29 ASN	2.823.375.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kantor Disbudpar	29 ASN	2.823.375.245	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				170.228.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				170.228.480	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya pakain dinas beserta atribut perlengkapannya kantor Disbudpar		42.002.401	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya pakain dinas beserta atribut perlengkapannya kantor Disbudpar		42.002.401	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimtek untuk keperluan ASN dan PTT kantor Disbudpar		85.276.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimtek untuk keperluan ASN dan PTT kantor Disbudpar		85.276.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan bahan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Disbudpar Kab. Gunung Mas		11.950.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan bahan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Disbudpar Kab. Gunung Mas		11.950.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan kantor Disbudpar		95.042.860	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan kantor Disbudpar		95.042.860	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Disbudpar		55.121.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Disbudpar		55.121.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.413.480	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.413.480	
	Penyediaan Bahan/Material		Terlaksananya keikutsertaan Disbudpar pada kegiatan pameran pembangunan tingkat Kabupaten Gunung Mas		26.184.030	Penyediaan Bahan/Material		Terlaksananya keikutsertaan Disbudpar pada kegiatan pameran pembangunan tingkat Kabupaten Gunung Mas		26.184.030	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah untuk keperluan kantor Disbudpar		523.584.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah untuk keperluan kantor Disbudpar		523.584.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**435.125.130**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**435.125.130**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas penunjang peralatan kerja Disbudpar Kab. Gunung Mas	1 Unit	323.000.040	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas penunjang peralatan kerja Disbudpar Kab. Gunung Mas	1 Unit	323.000.040	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya		Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas penunjang peralatan kerja Disbudpat Kab. Gunung Mas	3 Unit	112.125.090	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya		Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas penunjang peralatan kerja Disbudpat Kab. Gunung Mas	3 Unit	112.125.090	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Materai untuk keperluan kantor Disbudpar			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Penyediaan Materai untuk keperluan kantor Disbudpar			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya kebutuhan listrik dan air keperluan kantor Disbudpar Kabupaten Gunung Mas keperluan kantor Disbudpar		48.960.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya kebutuhan listrik dan air keperluan kantor Disbudpar Kabupaten Gunung Mas keperluan kantor Disbudpar		48.960.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan kebutuhan jasa perbaikan peralatan/fasilitas kerja keperluan kantor Disbudpar keperluan kantor Disbudpar		41.933.320	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan kebutuhan jasa perbaikan peralatan/fasilitas kerja keperluan kantor Disbudpar keperluan kantor Disbudpar		41.933.320	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Disbudpar keperluan kantor Disbudpar		188.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor Disbudpar keperluan kantor Disbudpar		188.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Target Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kantor Disbudpar		165.673.530	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kantor Disbudpar		165.673.530	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan umum Disbudpar		73.672.500	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan layanan umum Disbudpar		73.672.500	
	Penataan Organisasi					**Penataan Organisasi**					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Tersedianya ANJAB dan ABK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		7.047.100	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Tersedianya ANJAB dan ABK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		7.047.100	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										
	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Penetapan Daya Tarik Wisata Melalui Keputusan Bupati		202.084.240	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Penetapan Daya Tarik Wisata Melalui Keputusan Bupati		202.084.240	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Penetapan Daya Tarik Wisata Melalui Keputusan Bupati		152.482.320	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Penetapan Daya Tarik Wisata Melalui Keputusan Bupati		152.482.320	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		133.069.200	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi		133.069.200	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Rencana dan Desain Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		350.000.000	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersusunnya Rencana dan Desain Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten		350.000.000	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**					
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Pendukung Objek Wisata Daerah		13.282.500	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Pendukung Objek Wisata Daerah		13.282.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terbangunnya Destinasi yang Aman, Nyaman, Menarik, dan Mensejahterakan Masyarakat			Pengadaan/Pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Terbangunnya Destinasi yang Aman, Nyaman, Menarik, dan Mensejahterakan Masyarakat			
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**					
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**					
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya Sarana Promosi Kepariwisataan Daerah		438.655.030	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya Sarana Promosi Kepariwisataan Daerah		438.655.030	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Pendukung Pariwisata		213.636.500	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Fasilitas Pendukung Pariwisata		213.636.500	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata untuk Pengembangan Aplikasi Smart Tourism		173.809.480	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata untuk Pengembangan Aplikasi Smart Tourism		173.809.480	
					9.507.811.755					**9.507.811.755**	

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas.

Drs. HANSLI GONAK.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660407 199403 1 012

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas belum mendapati dan melakukan penelaahan secara mendalam terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang berkaiatan langsung dengan program dan kegiatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang kemudian menjadi bahan telaahan. Sebagai salah satu ujung tombak dari mengelolaan dan pelestraian sektor kebudayaan dan pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas selalu memprioritaskan untuk mengapresiasi pelestarian budaya – budaya lokal selain memperkuat potensi – potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan umum.

Tabel T-.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4*	*(5)*	*(6)*
~	~	~	~	~	~

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).dalam penyususnan perencanaanya memerlukan telaahaan dan materi yang komprehensif yang dikoordinasikan dengan semua pihak yang terkait.

Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata ataupun hal – hal yang dianggap perlu dalam pengembangan kedua bidang ini menjadi lebih baik dalam penyusunan perencanaan progaram kegiatan.

Agenda priolitas nasional yaitu Nawacita yang terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia;
6. Meningkatakan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakan sektor – sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restoritas sosial Indonesia.

Bidang Kebudayaan tidak menjadi prioritas nasional namun kebudayaan menjadi penopang untuk mewujudkan prioritas nasional, kebudayaan sangat berhubungan erat dengan Revolusi Mental yang digaungkan oleh pemerintah.

Dalam bidang pariwisata, pemerintah menjadikan paariwisata dalam dimensi pembangunan sektor unggulan pada poin pariwisata dan industri. Pariwisata merupa sektor unggulan yang diharapkan menjadi penyumbang devisa tersebar, destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Mas didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung destinasi prioritas yang ada.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. TUJUAN

1. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat lokal umumnya dalam upaya pelestarian budaya Kabupaten Gunung Mas;
2. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjuutan;
3. Meningkatkan pariwisata Kabupaten Gunung Mas melalui promosi yang optimal dan efektif;
4. Mengelola sistem pemasaran dan promosi DTW Kabupaten Gunung Mas;
5. Memproteksi situs sejarah dan situs kepurbakalaan;
6. Menjalin dialog antar budaya lokal dan nasional secara optimal sehingga mempererat keutuhan bangsa;

7. Memanfaat potensi objek wisata secara optimal dan pemeliharaan secara intensif;
8. Menyelenggaraan actraction untuk menarik minat kunjungan wisatawan lokal, nusantara bahkan internasional.

B. SASARAN

1. Meningkatnya kuantitas objek pariwisata Kabupaten Gunung Mas, kualitas fasilitasi pemasaran, kerjasama pemasaran, paket – paket wisata, sadar wisata masyarakat dan terciptanya sistem jaringan informasi pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
2. Mendorong dan terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan investasi industri pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
3. Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata unggulan, meningkatnya kualitas pelayanan, dan persiapan daerah tujuan wisata (DTW), serta terjaganya aset – aset warisan budaya Dayak dan wisata alam sebagai ODTW yang kompetitif;
4. Terkelolanya dan terlaksananya revitalisasi sarana dan prasaranan kawasan wisata baru di Kabupaten Gunung Mas
5. Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan situs sejarah dan kepurbakalaan, revitalisasi obyek wisata an visualisasi budaya Dayak di media masa nasional dan internasional;
6. Terkelolanya nilai budaya, seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan terselenggaranya pangelaran, festival, pameran seni dan budaya;
7. Tersedianya sumber daya manusia seni budaya;
8. Meningkatnya minat, bakat, dan kreativitas mengenai cerita rakyat;
9. Terkelolanya keragaman budaya lokal dan nasional;
10. Terpeliharanya benda cagar budaya, dan meningkatnya partisipasi festival budaya skala lokal, nasional dan internasional;
11. Meningkatnya jalinan dialog antara budaya lokal dan nasional,yang menjalankan fungsi pembinaan nilai budaya dan seni budaya dayak dalam memperkuat kualitas hidup bangsa dan meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Potensi Kabupaten Gunung Mas terutama Sumber Daya Alam (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan pertambangan) sangat menjanjikan untuk dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatiakan perkembangan berkelanjutan. Namun tidak hanya potensi – potensi ini yang sangat potensi untuk dikembangkan dan dikemas bagi kesejahteraan masyarakat, ada budaya sebagai hasil dari kearifan lokal yang juga perlu dikelola sebagai sebuah nilai yang patut dijaga kelestariannya.

Pola pikir yang melihat kebudayaan sebagai penghambat pembangunan karena berisi adat istiadat dan trasdisi lampau yang dipandang tidak lagi mampu menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan zaman sekarang harus segera dikikis. Karena Kebudayaan merupakan penyimbang atau penyelaras dari sebuah pola hidup masyaratkat yang berbudaya, serta telah menjadi karakteristik

manusia Dayak khusunya yang menepatkan kebudayaan sebagai identitas aslu yang membanggakan. Oleh karena itu, pembangunan perlu memberikan ruang bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.

Dicermati lebih lanjut lagi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas sebagai leading sector pengembangan kebudayaan sekaligus pariwisata harus juga memikirkan kedua bidang ini dapat saling bersinergi untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya membangunan identitas tetapi juga memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat salam hal peningkatan kesejahteraannya atau dengan kata lain kebudayaan dan pariwisata juga punya andil dalam penggerakan roda perekonomian masyarakat dan daerah secara umum.

Untuk itu, masyarakat umum perlu menumbuhkan kesadarannya pada potensi pariwisata yang ada disekitar mereka. Hal ini tentunya disertai dengan kajian yang memadai pada hal – hal yang dapat menumbuhkan daya dorong pada perekonomian lokal. Besarnya sebaran luas daerah Kabupaten Gunung Mas memerlukan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang pembangunan pariwisata. Potensi – patensi wisata yang masih belum dikelola dengan optimal diharapkan pula dapat mendapat perhatian dari pemerintah setempat yang dalam semangat otonomi daerahnya mampu secara komprehensif mengambil dan menetapkan kebijakan – kebijakan yang mewakili kebudayaan dan pariwisata, serta secara dasar bahwa potensi pengembangan pariwisata

secara khusus dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah apabila dikelola dengan baik dan secara langsung pula turut bertanggung jawab bagi pelestarian budaya.

Indonesia salah satu negara yang menandatangani deklarasi milenium yang merupakan kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000. Dan disahkan oleh Mejelis Umum PBB kedalam resolusi Nomor 55/2 , tanggal 18 september 2000 tentang Deklarasi milinium PBB atau dikenal dengan tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang bertujuan menempatkan manusia sebaggai fokus utama pembangunan yang mencangkup semua komponen kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Tujuan utama Millenium Development dengan indikator terukur secara kuantitatif secara waktu pencapaiannya sebagai berikut :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dam pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatakan kesehatan ibu hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas tugas untuk dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan dalam kaitannya dengan program dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata secara kreatif mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta terkhusus dibidang kebudayaan yang menjadi prioritas pengembangan dan perbaikan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).dalam penyususnan perencanaanya memerlukan telaahaan dan materi yang komprehensif yang dikoordinasikan dengan semua pihak yang terkait.

Pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata ataupun hal – hal yang dianggap perlu dalam pengembangan kedua bidang ini menjadi lebih baik dalam penyusunan perencanaan progaram kegiatan.

Agenda priolitas nasional yaitu Nawacita yang terdiri dari:

10. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
11. Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
12. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
13. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
14. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia;
15. Meningkatakan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa – bangsa Asia lainya;
16. Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakan sektor – sektor strategis ekonomi domestik;
17. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa;
18. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restoritas sosial Indonesia.

Bidang Kebudayaan tidak menjadi prioritas nasional namun kebudayaan menjadi penopang untuk mewujudkan prioritas nasional, kebudayaan sangat berhubungan erat dengan Revolusi Mental yang digaungkan oleh pemerintah.

Dalam bidang pariwisata, pemerintah menjadikan paariwisata dalam dimensi pembangunan sektor unggulan pada poin pariwisata dan industri. Pariwisata merupa sektor unggulan yang diharapkan menjadi penyumbang devisa tersebar, destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Gunung Mas didukung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung destinasi prioritas yang ada.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

A. TUJUAN

1. Menumbuhkan kesadaran pada masyarakat lokal umumnya dalam upaya pelestarian budaya Kabupaten Gunung Mas;
2. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjuutan;
3. Meningkatkan pariwisata Kabupaten Gunung Mas melalui promosi yang optimal dan efektif;
4. Mengelola sistem pemasaran dan promosi DTW Kabupaten Gunung Mas;
5. Memproteksi situs sejarah dan situs kepurbakalaan;
6. Menjalin dialog antar budaya lokal dan nasional secara optimal sehingga mempererat keutuhan bangsa;
7. Memanfaat potensi objek wisata secara optimal dan pemeliharaan secara intensif;
8. Menyelenggaraan actraction untuk menarik minat kunjungan wisatawan lokal, nusantara bahkan internasional.

B. SASARAN

1. Meningkatnya kuantitas objek pariwisata Kabupaten Gunung Mas, kualitas fasilitasi pemasaran, kerjasama pemasaran, paket – paket wisata, sadar wisata masyarakat dan terciptanya sistem jaringan informasi pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
2. Mendorong dan terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan investasi industri pariwisata Kabupaten Gunung Mas;
3. Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata unggulan, meningkatnya kualitas pelayanan, dan persiapan daerah tujuan wisata (DTW), serta terjaganya aset – aset warisan budaya Dayak dan wisata alam sebagai ODTW yang kompetitif;
4. Terkelolanya dan terlaksananya revitalisasi sarana dan prasaranan kawasan wisata baru di Kabupaten Gunung Mas

5. Meningkatnya pengembangan nilai budaya dan situs sejarah dan kepurbakalaan, revitalisasi obyek wisata an visualisasi budaya Dayak di media masa nasional dan internasional;
6. Terkelolanya nilai budaya, seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan terselenggaranya pangelaran, festival, pameran seni dan budaya;
7. Tersedianya sumber daya manusia seni budaya;
8. Meningkatnya minat, bakat, dan kreativitas mengenai cerita rakyat;
9. Terkelolanya keragaman budaya lokal dan nasional;
10. Terpeliharanya benda cagar budaya, dan meningkatnya partisipasi festival budaya skala lokal, nasional dan internasional;
11. Meningkatnya jalinan dialog antara budaya lokal dan nasional,yang menjalankan fungsi pembinaan nilai budaya dan seni budaya dayak dalam memperkuat kualitas hidup bangsa dan meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Potensi Kabupaten Gunung Mas terutama Sumber Daya Alam (hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan pertambangan) sangat menjanjikan untuk dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatiakan perkembangan berkelanjutan. Namun tidak hanya potensi – potensi ini yang sangat potensi untuk dikembangkan dan dikemas bagi kesejahteraan masyarakat, ada budaya sebagai hasil dari kearifan lokal yang juga perlu dikelola sebagai sebuah nilai yang patut dijaga kelestariannya.

Pola pikir yang melihat kebudayaan sebagai penghambat pembangunan karena berisi adat istiadat dan trasdisi lampau yang dipandang tidak lagi mampu menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan zaman sekarang harus segera dikikis. Karena Kebudayaan merupakan penyimbang atau penyelaras dari sebuah pola hidup masyaratkat yang berbudaya, serta telah menjadi karakteristik

manusia Dayak khusunya yang menepatkan kebudayaan sebagai identitas aslu yang membanggakan. Oleh karena itu, pembangunan perlu memberikan ruang bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal.

Dicermati lebih lanjut lagi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas sebagai leading sector pengembangan kebudayaan sekaligus pariwisata

harus juga memikirkan kedua bidang ini dapat saling bersinergi untuk dapat memberikan kontribusi positif tidak hanya membangunan identitas tetapi juga memberikan kemanfaatan secara ekonomi bagi masyarakat salam hal peningkatan kesejahteraannya atau dengan kata lain kebudayaan dan pariwisata juga punya andil dalam penggerakan roda perekonomian masyarakat dan daerah secara umum.

Untuk itu, masyarakat umum perlu menumbuhkan kesadarannya pada potensi pariwisata yang ada disekitar mereka. Hal ini tentunya disertai dengan kajian yang memadai pada hal – hal yang dapat menumbuhkan daya dorong pada perekonomian lokal. Besarnya sebaran luas daerah Kabupaten Gunung Mas memerlukan infrastruktur yang diharapkan dapat menunjang pembangunan pariwisata. Potensi – patensi wisata yang masih belum dikelola dengan optimal diharapkan pula dapat mendapat perhatian dari pemerintah setempat yang dalam semangat otonomi daerahnya mampu secara komprehensif mengambil dan menetapkan kebijakan – kebijakan yang mewakili kebudayaan dan pariwisata, serta secara dasar bahwa potensi pengembangan pariwisata secara khusus dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah apabila dikelola dengan baik dan secara langsung pula turut bertanggung jawab bagi pelestarian budaya.

Indonesia salah satu negara yang menandatangani deklarasi milenium yang merupakan kesepakatan para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa Bangsa di New York pada bulan September tahun 2000. Dan disahkan oleh Mejelis Umum PBB kedalam resolusi Nomor 55/2 , tanggal 18 september 2000 tentang Deklarasi milinium PBB atau dikenal dengan tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang bertujuan menempatkan manusia sebaggai fokus utama pembangunan yang mencangkup semua komponen kegiatan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Tujuan utama Millenium Development dengan indikator terukur secara kuantitatif secara waktu pencapaiannya sebagai berikut :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dam pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatakan kesehatan ibu hamil;

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan;
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas tugas untuk dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan dalam kaitannya dengan program dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata secara kreatif mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta terkhusus dibidang kebudayaan yang menjadi prioritas pengembangan dan perbaikan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program kerja dan pendanaan pada bidang kebudayaan dan pariwisata dalam peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas, pada bidang kebudayaan dan pariwisata sangat diperlukan perencanaan yang mendukung sektor pembangunan yang diharapkan dapat menjadi penyumbang devisa daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan dalam kaitannya dengan program dan kegiatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata secara kreatif mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta terkhusus dibidang kebudayaan yang menjadi prioritas pengembangan dan perbaikan.

Dalam program dan kegiatan perencanaan pendanaan yang dianggarakan untuk tahun 2024, yang mengacupada pada Restra 2019 – 2024, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, yang diharapkan dapat memenuhi wisi dan misi dari kepala daerah.

kkkkk

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Gunung Mas

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
URUSAN : PILIHAN									
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**								
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas		95%	**478.658.700**	APBD/ DAU		95%	**478.658.700**
2.22.02.2.01	**Pengeloaan Kebudayaan yang Masyarakatnya Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								
2.22.02.2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gunung Mas		95%	478.658.700		95%		478.658.700
3.30.02.2.06	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaPengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan**								
Dst..	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				148.596.900				148.596.900
Dst…	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1.060.000.000				1.060.000.000
Dst	Dst……								
Dst…	Dst……..								
	Dst……								

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan sitematis dalam proses penyusunan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Renja ini pula yang kemudian mampu menjembatani pengelolaan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Gunung Mas lebih berkembang secara kualitas dan kuantitas, profesional, terpadu dan memberikan kemanfaatan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat, serta memandu terkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan.

Lebih lanjut lagi, penyusunan Renja 2024 merupakan menterjermakan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 dengan visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas, yaitu " *Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju,berdaya saing, sejahtera dan mandiri (Berjuang Bersama).*Yang kemudian diamanatkan kedalam misi pembangunan yang salah satu misinya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, yaitu yang terdapat dalam Misi ke tiga meningkatkan perekonomian daerah dan Misi ke enam mengembangkan nilai – nilai budaya dan kearipan lokal.

Kebudayaan dan Pariwisata merupakan sektor yang mampu melibatkan banyak pihak yang tentunya akan memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat umum untuk berkembang dan meningkatkan perekonamiannya. Hal ini tidak lepas dari pengembnagan kebudayaan dan pariwisata yang melibatakan pengembangan infrastruktur yang menopangnya. Dengan kata lain pengembangan kedua sektor ini akan bersinergi dengan sektor pembagunan lainnya, sampai akhirnya memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Gunung Mas secara umum.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas,

Drs. HANSLI GONAK.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660407 199403 1 012

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA
TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Kami mengucap syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, yang di dalamnya berisi uraian tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas ini sudah disusun sedemikian rupa, yaitu menyesuaian dokumen RPJMD Kabupaten Gunung Mas, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sehingga bisa dijadikan dasar dalam proses perencanaan pada tahun 2025 yang mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Gunung Mas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas ini mengacu pada Renja Tahun 2022 menggunakan Nomenklatur Baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Meskipun kami sudah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025, kami menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam dokumen ini. Untuk itu kami berbagai masukan dan saran, untuk kami jadikan perbaikan di masa yang akan datang.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunung Mas



SALAMPAK HARIS, S.Sos.,M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808171989111002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. 1

DAFTAR ISI …….. 1

Bab I-PENDAHULUAN ……..…… 2

1.1 Latar Belakang …… 2

1,2 Landasan Hukum …… 2

1.3 Maksud dan Tujuan …….. 4

1.4 Sistematika Penulisan …….. 4

Bab II-HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2022 ……..…….. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Capaian Renstra PD di Tahun 2023…… 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja……... 9

2,3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ……..……. 13

Bab III-TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA…… .. 14

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ……... 14

3.2 Progam dan Kegiatan…… 15

Bab IV-RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA…….. 16

Bab V-PENUTUP …….. 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam hal pencantuman nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka nomenklatur, program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kodefikasi perangkat daerah telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan dimungkinkan dilakukan pemutakhiran setiap tahunnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2010, Tentang Satuan Polisi Pamog Praja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 40 Tahun 2011, Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor. 2 Tahun 2008, Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, Nomor. 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010, Nomor 116);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor. 4 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 214);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor. 12 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014, Nomor. 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor. 10 Tahun 2015, Tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015, Nomor. 225);

14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor. 12 Tahun 2017, Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017, Nomor. 398);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 50 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan

1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2025;
2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB-I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB-II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD di Tahun 2023

BAB-III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.2. Usulan Inovasi Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB-IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB-V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA PD DI TAHUN 2023

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, predikat kinerja program masuk kategori sangat tinggi (93.58%).

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

ODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.344.000,00	0,00	11.283.200,00	0,00	11.283.200,00	99,46	60.800,00
	TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11.344.000,00	0,00	11.283.200,00	0,00	11.283.200,00	99,46	60.800,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.02.1	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.197.967.272,00	2.894.671.039,00	0,00	0,00	2.894.671.039,00	90,52	303.296.233,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.197.967.272,00	2.894.671.039,00	0,00	0,00	2.894.671.039,00	90,52	303.296.233,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.03.6	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	4.196.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	99,26	31.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.196.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	99,26	31.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.05.11	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.640.000,00	0,00	23.970.000,00	0,00	23.970.000,00	89,98	2.670.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	132.577.056,00	0,00	166.462.364,00	0,00	166.462.364,00	125,56	-33.885.308,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.4		11.614.000,00	0,00	9.514.000,00	0,00	9.514.000,00	81,92	2.100.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.5		170.831.056,00	0,00	199.946.364,00	0,00	199.946.364,00	117,04	-29.115.308,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.6								
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.7		4.957.000,00	0,00	4.946.000,00	0,00	4.946.000,00	99,78	11.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.8		1.831.500,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	92,82	131.500,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.9		154.992.200,00	0,00	154.810.000,00	0,00	154.810.000,00	99,88	182.200,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.06.10		9.450.000,00	0,00	9.424.500,00	0,00	9.424.500,00	99,73	25.500,00
		7.555.500,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	51,62	3.655.500,00
	Penyediaan Bahan/Material Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.087.165,00	0,00	26.603.000,00	0,00	26.603.000,00	71,73	10.484.165,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.791.000,00	0,00	7.716.000,00	0,00	7.716.000,00	99,04	75.000,00
	TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	254.526.700,00	0,00	254.351.724,00	0,00	254.351.724,00	99,93	174.976,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443.655.588,00	0,00	310.462.552,00	0,00	310.462.552,00	69,98	133.193.036,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	921.846.653,00	0,00	772.213.776,00	1.700.000,00	773.913.776,00	83,95	147.932.877,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.400.000,00	0,00	0,00	380.900.000,00	380.900.000,00	97,82	8.500.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.07.2	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	523.809.000,00	0,00	0,00	515.722.000,00	515.722.000,00	98,46	8.087.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	913.209.000,00	0,00	0,00	896.622.000,00	896.622.000,00	98,18	16.587.000,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	100,00	0,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.2	**DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	44.705.000,00	0,00	34.289.171,00	0,00	34.289.171,00	76,70	10.415.829,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.08.4	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	100,00	0,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.405.000,00	0,00	51.989.171,00	0,00	51.989.171,00	83,31	10.415.829,00
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.1	Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	98.663.800,00	0,00	98.426.000,00	0,00	98.426.000,00	99,76	237.800,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum							
0.00 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 1.2.09.6		34.094.200,00	0,00	34.050.000,00	0,00	34.050.000,00	99,87	44.200,00
		5.414.556.981,00	**2.894.671.039,00**	**1.172.073.511,00**	**898.322.000,00**	**4.965.066.550,00**	**91,70**	**449.490.431,00**
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01								
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01		132.758.000,00	0,00	132.476.000,00	0,00	132.476.000,00	99,79	282.000,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.1		2.563.327.308,00	0,00	2.414.890.544,00	55.448.300,00	2.470.338.844,00	96,37	92.988.464,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.01.4		113.761.300,00	0,00	106.475.200,00	0,00	106.475.200,00	93,60	7.286.100,00
	TOTAL KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.677.088.608,00	0,00	2.521.365.744,00	55.448.300,00	2.576.814.044,00	96,25	100.274.564,00
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	268.158.048,00	0,00	242.595.848,00	0,00	242.595.848,00	90,47	25.562.200,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.2	**TOTAL PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	62.313.600,00	0,00	62.257.000,00	0,00	62.257.000,00	99,91	56.600,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 2.2.02.3	TOTAL KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	141.353.000,00	0,00	136.339.917,00	0,00	136.339.917,00	96,45	5.013.083,00
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana							
	Kabupaten/Kota Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	**3.148.913.256,00**	**0,00**	**2.962.558.509,00**	**55.448.300,00**	**3.018.006.809,00**	**95,84**	**130.906.447,00**
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02	**TOTAL PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,**							

	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	471.824.648,00	0,00	441.192.765,00	0,00	441.192.765,00	93,51	30.631.883,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02	TOTAL KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA							
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.192.800,00	0,00	16.185.000,00	0,00	16.185.000,00	99,95	7.800,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 3.2.02.3	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	177.225.315,00	0,00	121.525.750,00	28.224.900,00	149.750.650,00	84,50	27.474.665,00
		193.418.115,00	**0,00**	**137.710.750,00**	**28.224.900,00**	**165.935.650,00**	**85,79**	**27.482.465,00**
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01								
		193.418.115,00	0,00	137.710.750,00	28.224.900,00	165.935.650,00	85,79	27.482.465,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01								
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01.0.0 . 4.2.01.9		1.133.251.836,00	0,00	1.069.583.448,00	36.240.800,00	1.105.824.248,00	97,58	27.427.588,00
	Jumlah	**9.890.140.188,00**	**2.894.671.039,00**	**5.341.926.218,00**	**1.018.236.000,00**	**9.254.833.257,00**	**93,58**	**635.306.931,00**

Adapun capaian Renstra di tahun 2023, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.2

Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN		INDIKATOR SASARAN		CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		TINGKAT PENCAPAIAN (%)	PREDIKAT
					TARGET	REALISASI		
1		2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan Satuan Polisi Pamong Praja	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja	82.05	82.31	100.08	Sangat Berhasil
		2	Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Hasil Penilaian Kementerian PAN dan RB	A	belum ada	belum ada	belum ada
2	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1	Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban , penegakkan Perda dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat	Rata-rata realisasi kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan; Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan; Persentase anggota Linmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	55.3	59.70%	107.95	Sangat Berhasil
		2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran dalam Wilayah WMK yang tertangani yang memenuhi target respons time dibagi jumlah kasus kebakaran dalam WMK dikalikan 100 %	95	91.80%	96.60	Sangat Berhasil

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor : 50 Tahun 2019, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, maka susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai Tugas Memimpin dan Menyelenggarakan Kewenangan Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Peraturan Daerah, dan Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku untuk Pemerataan Pembangunan.

b. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai Tugas Memimpin dan Merencanakan Operasional Sekretariat yang meliputi Urusan Perencanaan, Keuangan dan Aset Serta Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Memimpin dan melaksanakan Kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi Kepegawaian sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai Tugas Memimpin dan melaksanakan Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku agar Pelaksanaan Program Kegiatan dapat dilaksanaakan sesuai dengan Rencana yang ditetapkan

c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Operasional dan Pengendalian, sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian;

Seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di seksi Ketertiban Umum, Operasional dan Pengendalian berdasarkan Rencana Operasional Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

b. Seksi Perlindungan Masyarakat;

Seksi Perlindungan Masyarakat Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Perlindungan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari :

a. Seksi Penegakan;

Seksi Penegakan mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Penegakan berdasarkan Rencana Operasional Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

b. Seksi Penyuluhan;

Seksi Penyuluhan mempunyai Tugas memimpin dan melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan Seksi Penyuluhan berdasarkan Rencana Operasional Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

e. Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.
Bidang Damkar terdiri dari:

a. Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana;

Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Mempunyai Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Ketenagaan, Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi Berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pemadam Kebakaran yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Mempunyai Tugas Memimpin dan Melaksanakan Pelayanan dan Pengawasan di Seksi Penyelamatan dan Evakuasi berdasarkan Rencana Operasional Bidang Pemadam Kebakaran yang berlaku untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satuan Polisi Pamong Praja.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban
2. Pelayanan Perlindungan Masyarakat
3. Pelayanan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
4. Pelayanan Pemadam Kebakaran

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut :

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Penanggung Jawab**	**Sumber Data**
1	***2***	***3***	***4***	***5***
Mewujudkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan nyaman serta bebas resiko kebakaran	Jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang diselesaikan	80%	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Bidang Perlindungan Masyarakat	Laporan Kegiatan bidang Tibum dan Bidang Linmas
	Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap Perda / Perkada	80%	Bidang Penegakkan Perda dan Produk Hukum Lainnya	Laporan Kegiatan Bidang Perda
	Persentase korban jiwa yang selamat akibat kebakaran	80%	Bidang Pemadam Kebakaran	Laporan Kegiatan Bidang Damkar

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya	80%	Bidang Sekretariat	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	Bidang Sekretariat	Laporan pertanggungjawaban
	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana	80%	Bidang Sekretariat	Laporan Pertanggungjawaban pemeliharaan aset tetap

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa isu penting sebagai berikut :

Dari hasil kajian berdasarkan review terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP diatas maka isu strategis yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2025-2026 adalah :

- Masih adanya pelanggaran terhadap perda dan perbup yang dilakukan oleh masyarakat;
- Penguatan Penegakan Perda;
- Penurunan angka kriminalitas, pelanggaran terhadap K3 dan penyakit masyarakat;
- Koordinasi dan kerjasama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait;
- Kualitas, kuantitas dan ketrampilan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar;
- Sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan;
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Tingkat waktu penanganan (responsif) terhadap bencana kebakaran;
- Penurunan tingkat kejadian kebakaran.

Di samping itu isu strategis yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada saat ini yakni :

- Belum adanya peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Menciptakan suasana aman dan tenteram pasca pilkada.
- Harmonisasi antara investor baik dibidang tambang, kehutanan dan perkebunan yang ada di kabupaten Gunung Mas.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dan Tujuan pelayanan Satpol PP merupakan implementasi dari pernyataan misi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang ke 1 yaitu : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan pelayanan Satpol PP untuk tahun 2025 ke depan yaitu :

a. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermartabat;
b. Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran.

Sedangkan sasaran yang dicapai yaitu :

1. Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Perda dan Perkada;
3. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran.

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran
Tahun 2025

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SATPOL PP KAB. GUNUNG MAS

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah		Angka Penurunan Penyakit Masyarakat					
			Angka Kriminalitas yang Tertangani					
			Persentase penanganan pelanggaran K3					
		Terwujudnya ketertiban Umum, Ketentraman, Perlindungan Masyarakat	Cakupan patroli petugas Satpol PP					
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten					
		Penegakan Hukum	Penegakan Perda					

	Terwujudnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten					
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran					
			Penurunan kejadian kebakaran					

3.2. Program dan Kegiatan

Untuk Tahun Angggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja akan melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan penunjang dan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, 3 (Tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan, dengan anggaran awal sebesar **Rp10.241.758.770,00** seperti terlihat dalam tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2024

(jumlah urusan, program dst. Dilihat di tabel Rencana Kerja dan Pendanaan)

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Pendanaan (Rp)
1	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	10.241.758.770,00
	Jumlah Program	3	
	Jumlah Kegiatan	10	
	Jumlah Sub Kegiatan	30	
	Total Jumlah		10.241.758.770,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 sebagai berikut:

(ambil dari tabel Rencana Kerja yang ada di bit.ly/perencanaansatpolpp2025), Nanti setelah selesai input di SIPD

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**10.241.758.770,00**							**10.241.758.770,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.241.758.770,00**							**10.241.758.770,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.241.758.770,00**							**10.241.758.770,00**	
1,	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.322.936.892,00**						**-**	**6.322.936.892,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	13.784.000,00			-	-	-	-	13.784.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.892.152.933,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	4.892.152.933,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				20 Orang/bulan	4.892.152.933,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.892.152.933,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	9.523.660,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	9.523.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				4 Laporan	9.523.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.523.660,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	486.434.612,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	486.434.612,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				30 Paket	31.274.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		31.274.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				12 Dokumen	418.342.950,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		418.342.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				6 Orang	36.817.412,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.817.412,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	591.496.979,00			-	-	-	-	591.496.979,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-				-	21.670.501,00	-	-	-	-	-		21.670.501,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				4 Paket	213.130.342,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		213.130.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				4 Paket	14.781.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		14.781.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*				4 Dokumen	7.555.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.555.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*				10 Paket	30.389.025,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.389.025,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*				20 Laporan	9.883.440,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.883.440,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				60 Laporan	203.255.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		203.255.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*				4 Dokumen	90.830.971,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		90.830.971,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.561.045,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	80.561.045,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	44.705.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		44.705.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				12 Laporan	31.856.045,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		31.856.045,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.983.663,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	248.983.663,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				15 Unit	101.033.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		101.033.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				15 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				20 Unit	35.950.347,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.950.347,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-				-	61.999.716,00	-	-	-	-	-		61.999.716,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2,	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**2.668.543.588,00**						**-**	**2.668.543.588,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.171.761.565,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.171.761.565,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*				12 Dokumen	94.082.505,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		94.082.505,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*				12 Dokumen	91.559.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		91.559.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*				20 laporan	1.986.119.860,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.986.119.860,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	496.782.023,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	496.782.023,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				12 dokumen	15.256.325,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.256.325,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	-				-	287.013.980,00	-	-	-	-	-		287.013.980,00	SATUAN POLISI PAMONG

		Daerah														PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*				4 Laporan	160.044.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		160.044.560,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				12 Laporan	34.467.158,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		34.467.158,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3,	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**268.409.800,00**						**-**	**268.409.800,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	268.409.800,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	268.409.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya*				4 laporan	268.409.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		268.409.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
4,	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**981.868.490,00**						**-**	**981.868.490,00**	

	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	981.868.490,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	981.868.490,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran*				12 Dokumen	981.868.490,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		981.868.490,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH							**10.241.758.770,00**							**10.241.758.770,00**	

BAB-V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Perangkat Daerah.
2. Penjabaran lebih lanjut Renja PD Tahun 2025 dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.
3. Renja PD tahun 2025 harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4. Renja PD Tahun 2025 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam Renja PD, maka akan dilakukan perubahan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunung Mas



SALAMPAK HARIS, S.Sos.,M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196808171989111002



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

KECAMATAN TEWAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Jalan Perintis Nomor 63 RT. XX Kelurahan Tewah
Kode Pos 74552
TEWAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan Nya lah kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Hal-hal yang kami kemukakan dalam dokumen ini kami sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan dokumen ini dan kami mengharapkan semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat berguna bagi kita semua.

Tewah, Juli 2024

CAMAT TEWAH,

HENDRA SURYA, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19720208 201001 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor) dan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 Tanggal 01 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor).

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tewah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja memuat program dan kegiatan serta sub kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Sesuai Pasal 143 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah pada Tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan Tewah Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Renja Kantor Kecamatan Tewah menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gunung Mas ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Agar dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Tewah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program/kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118):
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tewah adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tewah guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tewah adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian serta memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Tewah.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Tewah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB. II
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas/ Badan /Satuan : KECAMATAN TEWAH

Formulir 11

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. IV (2023)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW. IV 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW IV (2023)		Ket
1	2	3	4	5		6		7		8= 7/6 x 100 %		9 = 5 + 7		10
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**												
	7.01	**KECAMATAN**		**95.75**	**10,866,574,364**	**98 %**	**4,287,636,305**	**93.82 %**	**4,022,701,623**	**95.74 %**	**93.82%**	**189.57 %**	**14,889,275,987**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**9,096,612,524**	**98 %**	**3,159,033,683**	**92.46 %**	**2,920,691,681**	**94.34 %**	**92.46%**	**92.46 %**	**12,017,304,205**	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**39,162,300**	**98 %**	**33,505,014**	**96.62 %**	**32,372,454**	**98.59 %**	**96.62%**	**96.62 %**	**71,534,754**	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	10,711,900	2 dokumen	22,795,054	2 dokumen	22,029,954	100.00 %	96.64%	6 dokumen	32,741,854	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	6,332,500	1 dokumen	2,817,000	1 dokumen	2,609,100	100.00 %	92.62%	2 dokumen	8,941,600	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	4,875,500	1 dokumen	1,688,000	1 dokumen	1,666,800	100.00 %	98.74%	2 dokumen	6,542,300	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	3,623,600	1 dokumen	1,774,400	1 dokumen	1,763,700	100.00 %	99.40%	2 dokumen	5,387,300	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4,740,400	1 dokumen	2,290,460	1 dokumen	2,187,600	100.00 %	95.51%	2 dokumen	6,928,000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	8,878,400	6 dokumen	2,140,100	6 dokumen	2,115,300	100.00 %	98.84%	18 dokumen	10,993,700	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah**		**6,759,593,774**	**98 %**	**2,267,251,279**	**90.73 %**	**2,056,992,989**	**92.58 %**	**90.73%**	**90.73 %**	**8,816,586,763**	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51	6,682,364,046	25 orang	2,205,851,455	23 orang	1,997,252,375	92.00 %	90.54%	74 orang	8,679,616,421	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Biaya Transfer Transaksi dan Buku Cek	1	40,000		-		-	#DIV/0! %	#DIV/0!	1 0	40,000	
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			50 dokumen	20,818,700	119 dokumen	20,695,450	238.00 %	99.41%	119 dokumen	20,695,450	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	3,111,300	0 dokumen	-	0	-	#DIV/0! %	#DIV/0!	0 0	3,111,300	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	74,078,428	12 Laporan	40,581,124	12 Laporan	39,045,164	100.00 %	96.22%	24 Laporan	113,123,592	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah**		**3,947,850**	**98 %**	**-**	**#DIV/0! %**	**-**	**#DIV/0! %**	**#DIV/0!**	**#DIV/0! %**	**3,947,850**	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Sensus Barang	1	3,947,850	0 dokumen	-	- dokumen	-	#DIV/0! %	#DIV/0!	1 dokumen	3,947,850	
	7.01.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah**		**51,844,812**	**98 %**	**6,748,540**	**96 %**	**6,453,200**	**97.58 %**	**95.62%**	**95.62 %**	**58,298,012**	
	7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	51,844,812	12 Laporan	6,748,540	12 Laporan	6,453,200	100.00 %	95.62%	24.0 Laporan	58,298,012	
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**151,247,880**	**98 %**	**76,121,064**	**97.07 %**	**73,890,664**	**99.05 %**	**97.07%**	**97.07 %**	**225,138,544**	
	7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk PNS dan dan Pakaian Putih Hitam untuk PTT Kantor	2	76,131,250	34 Stell	24,686,400	34 Stell	24,646,400	100.00 %	99.84%	36 Stell	100,777,650	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	61,016,630	12 Laporan	40,634,664	12 Laporan	39,644,264	100.00 %	97.56%	24 Laporan	100,660,894	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	14,100,000	2 orang	10,800,000	2 orang	9,600,000	100.00 %	88.89%	6 orang	23,700,000	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**457,792,522**	**98 %**	**265,593,241**	**94.88 %**	**251,992,625**	**96.82 %**	**94.88%**	**94.88 %**	**709,785,147**	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	8,452,900	14 jenis	7,782,800	14 jenis	7,739,500	100.00 %	99.44%	44 jenis	16,192,400	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1	12,565,500	1 jenis	1,400,000	1 jenis	1,400,000	100.00 %	100.00%	2 jenis	13,965,500	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Spanduk dan Umbul-Umbul serta Bendera, dan BBM Mesin Pemotong Rumput dan BBM Mobil Dinas/Operasional	84	97,933,600	46 jenis	65,882,570	46 jenis	65,024,290	100.00 %	98.70%	130 jenis	162,957,890	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Penjilidan	16554	10,086,500	13762 Lembar	6,001,671	20,004 Lembar	6,001,200	145.36 %	99.99%	36558 Lembar	16,087,700	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material untuk Keikutsertaan dalam Kegiatan Pameran Pembangunan di Kabupaten		-	1 Kegiatan	1,227,300	**1** Kegiatan	1,200,000	100.00 %	97.78%	1 Kegiatan	1,200,000	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan/Minuman Ringan untuk Tamu	6	8,334,600	7 Jenis	6,102,000	**7** Jenis	6,101,800	100.00 %	100.00%	13 Jenis	14,436,400	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Perjalanan Dalam Daerah dan Luar Daerah	134	320,419,422	204 Kali	177,196,900	245 Kali	164,525,835	120.10 %	92.85%	379 Kali	484,945,257	

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. IV (2023)			Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW. IV 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW IV (2023)			Ket
1	2	3	4	5		6			7			8= 7/6 x 100 %		9 = 5 + 7			10
				K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**584,510,000**	**98**	**%**	**89,470,857**	**100**	**%**	**89,079,400**	**101.59 %**	99.56%	**99.56**	**%**	**673,589,400**	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Operasional Double Cabin 4x4	1	502,375,000	0	Unit	-	-	Unit	-	#DIV/0! %	#DIV/0!	1	Unit	502,375,000	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi Kerja dan Meja Kerja serta Lemari Arsip	2	11,374,000	3	Jenis	37,243,275	3	Jenis	37,231,600	100.00 %	99.97%	5	Jenis	48,605,600	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kipas Angin Gantung, Komputer PC, Lap Top dan	2	82,135,000	4	Jenis	52,227,582	4	Jenis	51,847,800	100.00 %	99.27%	6	Jenis	133,982,800	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor**		**739,134,686**	**98**	**%**	**306,296,378**	**96.62**	**%**	**295,949,797**	**98.59 %**	**96.62%**	**96.62**	**%**	**1,035,084,483**	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	8310	9,069,000	322	Lembar	3,220,000	322	Lembar	3,200,000	100 %	99.38%	8632	Lembar	12,269,000	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pembayaran Rek. Listrik dan Air	11	73,599,552	5	Rekening	32,952,000	5	Rekening	30,415,029	100 %	92.30%	16	Rekening	104,014,581	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium PTT, Bahan dan Peralatan Kerja	16	656,466,134	7	orang	270,124,378	7	orang	262,334,768	100 %	97.12%	23	orang	918,800,902	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah**		**309,378,700**	**98**	**%**	**114,047,310**	**99.92**	**%**	**113,960,552**	**101.96 %**	**99.92%**	**99.92**	**%**	**423,339,252**	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Kendaraan	3	86,440,400	3	Unit	36,373,366	3	Unit	36,297,800	100 %	99.79%	6	Unit	122,738,200	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pajak Kendaraan Operasional	6	120,566,300	3	Unit	46,845,120	3	Unit	46,844,002	100 %	100.00%	9	Unit	167,410,302	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	17,784,000	13	Unit	8,917,424	14	Unit	8,911,000	108 %	99.93%	26	Unit	26,695,000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	84,588,000	3	Unit	21,911,400	3	Unit	21,907,750	100 %	99.98%	6	Unit	106,495,750	
2	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**1,356,713,600**	**98**	**%**	**883,979,875**	**97.69**	**%**	**863,539,580**	**99.68 %**	**97.69%**	**97.69**	**%**	**2,220,253,180**	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terpenuhnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**		**114,540,800**	**98**	**%**	**75,580,101**	**98.56**	**%**	**74,493,400**	**100.57 %**	**98.56%**	**98.56**	**%**	**189,034,200**	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa	3	46,842,900	2	kegiatan	17,855,415	2	kegiatan	17,647,600	100 %	98.84%	5	kegiatan	64,490,500	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terselenggaranya Rapat Kerja Camat dan Lurah	9	28,869,400	5	kali	13,514,900	7	kali	13,441,300	140 %	99.46%	16	kali	42,310,700	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan PKK dan Kegiatan Gotong Royong Kecamatan	2	38,828,500	2	kegiatan	44,209,786	2	kegiatan	43,404,500	100 %	98.18%	4	kegiatan	82,233,000	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan**		**1,242,172,800**	**98**	**%**	**495,561,960**	**96.41**	**%**	**477,779,680**	**98.38 %**	**96.41%**	**96.41**	**%**	**1,719,952,480**	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan	2	9,985,000	1	kegiatan	2,643,735	1	kegiatan	2,638,500	100 %	99.80%	3	kegiatan	12,623,500	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Plang Papan Nama Jalan dan Plang Batas RT yang Tersedia		438,979,400	85	Buah	58,025,250	**85**	Buah	58,002,700	100 %	99.96%	85	Buah	**496,982,100**	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Posyandu, Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan RT/RW, Kegiatan PKM, Kegiatan Pengelolaan Persampahan di Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong, Kegiatan PKK Kelurahan,	8	784,343,100	6	Kegiatan	431,721,375	6	Kegiatan	413,974,280	100 %	95.89%	14	Kegiatan	1,198,317,380	
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Rapat Kerja Lurah	3	8,865,300	6	Kali	3,171,600	6	Kali	3,164,200	100 %	99.77%	9	Kali	12,029,500	
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Keikutsertaan dan Partisipasi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan**		-	**98**	**%**	**312,837,814**	**100**	**%**	**311,266,500**	**102.04 %**	99.50%	**100.00**	**%**	**311,266,500**	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		-	5	kegiatan	312,837,814	5	kegiatan	311,266,500	100 %	99.50%	5	kegiatan	311,266,500	
3	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**81,115,900**	**98**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**%**	**-**	**#DIV/0! %**	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**%**	**81,115,900**	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum**		**81,115,900**	**98**	**%**	**-**	**#DIV/0!**	**%**	-	**#DIV/0! %**	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**%**	**81,115,900**	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pos Komando Covid-19 di Kelurahan		81,115,900	2	kegiatan	-		kegiatan	-	0 %	#DIV/0!	0	kegiatan	81,115,900	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**-**	**98**	**%**	**50,901,435**	**50**	**%**	**50,889,450**	**51.02 %**	99.98%	**50.00**	**%**	**50,889,450**	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**-**	**98**	**%**	**50,901,435**	**50**	**%**	**50,889,450**	**51.02 %**	99.98%	**50.00**	**%**	**50,889,450**	

No	kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. IV (2023)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW. IV 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW IV (2023)		Ket
1	2	3	4	5		6		7		8= 7/6 x 100 %		9 = 5 + 7		10
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terselenggaranya Kegiatan 17 Agustus untuk Paskibra dan Pramuka di Kecamatan		-	2 kegiatan	50,901,435	2 kegiatan	50,889,450	**100.00** %	99.98%	2 kegiatan	**50,889,450**	
5	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**332,132,340**	**98 %**	**193,721,312**	**96.83 %**	**187,580,912**	**98.81** %	**96.83%**	**96.83 %**	**519,713,252**	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**332,132,340**	**98 %**	**193,721,312**	**96.83 %**	**187,580,912**	**98.81** %	**96.83%**	**96.83 %**	**519,713,252**	
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa serta Honorarium PTT	15	49,432,136	15 Desa	41,601,564	15 Desa	39,200,864	**100.00** %	94.23%	30 Desa	88,633,000	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tertibnya Administrasi Keuangan Desa dan Aset Desa	15	82,417,000	15 Desa	39,476,000	15 Desa	38,660,600	**100.00** %	97.93%	30 Desa	121,077,600	
	7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Tertibnya Administrasi Pemilihan Kepala Desa	9	14,599,100	0 Desa	-	- Desa	-	**#DIV/0!** %	#DIV/0!	9 Desa	14,599,100	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Honorarium PTT	12	124,128,680	12 Laporan	68,735,684	12 Laporan	66,976,984	**100.00** %	97.44%	24 Laporan	191,105,664	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tersedianya Laporan Rencana Peningkatan Peran Masyarakat dan Honorarium PTT	15	76,154,524	15 Desa	43,908,064	12 Desa	42,742,464	**80.00** %	97.35%	27 Desa	118,896,988	
rata - rata capaian kinerja (%)														
Predikat kinerja														

keterangan :
kolom 1 diisi nomor urut
kolom 2 diisi kode urusan ,bidang urusan program dan kegiatan
kolom 3 diisi nama urusan / Bidang urusan serta nama program, kegiatan dan sub kegiatan
kolom 4 diisi dengan indikator kinerja program (outcome) /kegiatan (output) sesuai dengan didokumen RKPD
kolom 5 K = diisi realisasi kinerja Rp = realisasi anggaran tahun 2020
kolom 6 K = diisi dengan target kinerja dan Rp = anggaran yang direncanakan pada dokumen **RKPD**
kolom 7 K = diisi realisasi capaian target kinerja Rp = realisasi anggaran sampai dengan TW.II
Kolom 8 K = diisi sesuai dengan rumus yang ada Rp = diisi sesuai dengan rumus yang ada
Kolom 9 K dan Rp = diisi sesusai rumus yang ada
Kolom 10 diisi keterangan **contoh sub kegiatan ini tidak muncul di APBD atau Sub kegiatan ini muncul di APBD tapi tidak di RENJA.**

Tewah, 31 Januari 2023
CAMAT TEWAH,

HENDRA SURYA, SE, MM
Pembina / (IV.a)
NIP. 19720208 201001 1 003

Analisis tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan capaian Renstra tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan yang berbeda karena perubahan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Tahun 2023. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah
3. Terlaksananya Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah
4. Terpenuhnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Terpenuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor
8. Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah
9. Terpenuhnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
10. Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan
11. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Tewah secara keseluruhan adalah sebesar 93, 82 % atau Rp. 4.022.701.623,- dari pagu anggaran Rp. 4.287.636.305 dan pencapaian masing-masing beberapa program dan kegiatan dan sub kegiatan dan dapat dilihat pada tabel di atas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tewah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tewah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

Terpenuhnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terpenuhnya Penyediaan dan Adminstrasi Keuangan Daerah

Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah

Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terpenuhnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terpenuhnya Penyediaan Jasa Penunjang untuk Kebutuhan Kantor dan Pegawai Kantor

Terpenuhnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Perangkat Daerah

Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan

Meningkatkan Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tewah meliputi analisis :

Kekuatan :

Visi dan misi Kecamatan yang jelas

Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan

Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan

Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan

Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan:

Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai

Belum adanya Standart Pelayanan Minimal Kecamatan Tewah

Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi

Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

Ancaman :

Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan

Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.

Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tewah ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat;
2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kecakapan dalam berkinerja, Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

3) Untuk perencanaan pembangunan di kecamatan Tewah tahun 2024 sudah melalui mekanisme diadakannya musrenbang tingkat kecamatan dari Tahun 2015 dengan menggali seluruh usulan dari Desa/Kelurahan yang kemudian di prioritaskan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja Kecamatan Tewah sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tewah.

Pada sub ini dimunculkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD analisis kebutuhan yang termuat dalam RKA setelah pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Gunung Mas.

Ketidaksesuaian reviuw dan kebutuhan analisis hanya terlihat lebih banyak pada perbedaan besaran dana, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan alokasi dana pada program/kegiatan, dimana ada program yang tidak muncul di reviuw Tahun 2024 harus muncul di analisis kebutuhan RKA Tahun 2024 mengingat kebutuhan akan program tersebut harus dipenuhi. Hal tersebut yang banyak mempengaruhi perubahan dana pada besaran dana Program dan Kegiatan Renja Tahun 2024 dan RKA Tahun 2024.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tewah tidak lepas dari koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan demi suksesnya pembangunan khususnya Kecamatan Tewah, umumnya Kabupaten Gunung Mas.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam pengumpulan usulannnya dimulai dari usulan dari daerah bawahan yang disebut Musrenbang Desa/Kelurahan yang mana usulan Desa/Kelurahan tersebut dibawa ke dalam Musrenbang Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya diolah sebagai usulan Kabupaten ke tingkat selanjutnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam masa jabatan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 dan Perangkat Daerah Kecamatan Tewah berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

Di masing-masing Perangkat Daerah khususnya pada pemerintahan Kecamatan Tewah dibuat suatu Rencana Startegis 2 tahunan dari Tahun 2025-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas sehingga dengan demikian kebijakan pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tewah

Kecamatan Tewah sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Sehingga dalam menjabarkan visi Kecamatan Tewah harus mengacu pada visi Kabupaten Gunung Mas serta memperhatikan potensi-potensi yang tersedia di Kecamatan Tewah, maka Visi Pemerintah Kecamatan Tewah adalah:

"Terwujudnya Pemerintah Yang Profesional Dan Aspiratif Dalam Membina, Melayani Dan Menfasilitasi Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk dapat mewujudkan *Visi* tersebut telah ditetapkan beberapa *Misi* Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik.

3. Pembinaan dan pemantapan koordinasi dengan daerah bawahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan disegala bidang.
5. Menumbuhkembangkan budaya gotong royong di masyarakat.
6. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya daerah
7. Memotivasi masyarakat ikutserta dalam merencanakan Pembangunan Daerah

4.2. Tujuan & Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah seperti terlihat pada tabel berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Melaksanakan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.	Menghasilkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Persentase Peningkatan dalam melayani masyarakat. Persentase Peningkatan koordinasi ke dalam dan luar daerah
Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik	Menghasilkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kemampuan/kapasitas seorang aparatur Pemerintahan
Pembinaan dan pemantapan koordinasi dengan daerah bawahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik.	Menghasilkan Pemerintahan daerah bawahan lebih baik agar tupoksinya lebih difungsikan untuk dapat meningkatkan Pemerintahannya	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja Daerah Bawahan
Meningkatkan peran serta masyarakat, Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan disegala bidang. Menumbuhkembangkan budaya gotong royong di masyarakat.	Mewujudkan masyarakat, perempuan dan pemuda yang lebih produktif berkarya dan berfungsi di masyarakat, terwujudnya masyarakat yang lebih beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan lebih peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan bergotong royong.	Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan pada organisasi wanita Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Gotong Royong dalam masyarakat

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya daerah	Mewujudkan kepedulian terhadap keragaman budaya serta olahraga-olahraga daerah yang dikhawatirkan akan terkikis bila tidak dilestarikan	Persentase Peningkatan kualitas pengetahuan terhadap budaya daerah
Memotivasi masyarakat ikutserta dalam merencanakan Pembangunan Daerah	Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar tempat tertuangnya Aspirasi masyarakat tentang harapan Pembangunan Daerah yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri	Persentase Peningkatan kualitas dokumen skala prioritas tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan untuk pedoman pembangunan daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Pada Tahun 2025 Rencana Kerja Kecamatan Tewah termasuk Kelurahan Tewah memuat 4 (Empat) program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
- Administasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjanh Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Sub Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ada 39 (Tiga Puluh Sembilan) di Sub Unit Organisasi Kecamatan Tewah dan 18 (Delapan Belas) di Sub Unit Organisasi Kelurahan Tewah. Sub-Sub Kegiatan ini dapat dilihat pada Bab selanjutnya Tabel Penyusunan Rumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tewah Tahun 2025 ini.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN TEWAH KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN TEWAH						**3.973.115.311,00**							**3.985.615.311,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.973.115.311,00**							**3.985.615.311,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.973.115.311,00**							**3.985.615.311,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.378.011.668,00**						**-**	**3.397.671.168,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	43.000.713,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	43.000.713,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	31.858.406,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		31.858.406,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.734.360,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.734.360,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.674.921,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.674.921,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.686.316,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.686.316,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen Dokumen	2.902.208,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.902.208,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.144.502,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.144.502,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.428.964.052,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.428.964.052,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2.371.932.835,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.371.932.835,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				90 Dokumen	21.500.177,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		21.500.177,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	35.531.040,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.531.040,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.797.493,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	7.797.493,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	7.797.493,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.797.493,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	82.593.450,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	82.593.450,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 dokumen Unit	23.115.750,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		23.115.750,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	35.824.020,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.824.020,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	23.653.680,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		23.653.680,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	254.272.638,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	254.272.638,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.746.300,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.746.300,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	16.096.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.096.000,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	61.215.002,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.215.002,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.928.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.928.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	31.223.236,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		31.223.236,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	7.572.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.572.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	130.492.100,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		130.492.100,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	151.071.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	158.230.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	91.242.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		91.242.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	20.979.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.979.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	38.850.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.009.500,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	265.279.235,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	265.279.235,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.120.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.120.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	32.340.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		32.340.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	230.819.235,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		230.819.235,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	135.033.087,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	145.033.087,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	36.113.537,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.113.537,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	49.993.890,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		49.993.890,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	9.325.887,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		9.325.887,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	39.599.773,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		49.599.773,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	10.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	12.500.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.500.000,00	KECAMATAN TEWAH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**295.720.862,00**						**-**	**295.720.862,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	90.072.234,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	90.072.234,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	18.618.921,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		18.618.921,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				5 Dokumen	17.985.531,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		17.985.531,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	53.467.782,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		53.467.782,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	205.648.628,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	205.648.628,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Kemasyarakatan	205.648.628,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		205.648.628,00	KECAMATAN TEWAH
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**72.761.800,00**						**-**	**72.761.800,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	72.761.800,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	72.761.800,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				45 Orang	72.761.800,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		72.761.800,00	KECAMATAN TEWAH
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**226.620.981,00**						**-**	**219.461.481,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	226.620.981,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	219.461.481,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	66.087.269,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		66.087.269,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				15 Dokumen	50.009.361,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.009.361,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	7.159.500,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	65.609.048,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		65.609.048,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	37.755.803,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.755.803,00	KECAMATAN TEWAH
	J U M L A H							**3.973.115.311,00**							**3.985.615.311,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN TEWAH KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN TEWAH						**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**230.924.636,00**						**-**	**230.924.636,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	26.967.240,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	26.967.240,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	15.140.400,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.140.400,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	11.826.840,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		11.826.840,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	87.085.184,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	87.085.184,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.341.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.341.600,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	20.060.120,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.060.120,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.854.764,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.854.764,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				87 Laporan	61.828.700,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.828.700,00	KELURAHAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	71.586.683,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	71.586.683,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25.197.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.197.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			-				-	4.549.224,00	-	-	-	-	-		4.549.224,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	41.840.459,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		41.840.459,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.570.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	14.570.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		1.100.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.470.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		13.470.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.715.529,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	30.715.529,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	7.545.600,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.545.600,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	7.670.000,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.670.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.499.929,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.499.929,00	KELURAHAN TEWAH
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**619.075.364,00**						**-**	**619.075.364,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	619.075.364,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	619.075.364,00	KELURAHAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	2.714.979,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.714.979,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	220.047.696,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		220.047.696,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	392.988.796,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		392.988.796,00	KELURAHAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	3.323.893,00	Kab. Gunung Mas, Tewah, Tewah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.323.893,00	KELURAHAN TEWAH
	J U M L A H							**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	

BAB VI

P E N U T U P

Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Tewah merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tewah selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun sebelumnya masih diperlukan perbaikan atau peningkatan kegiatan yang diharapakan dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya sebagai dasar peningkatan kinerja yang telah dicapai organisasi melalui kegiatan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Pagu Indikatif (sesuai pagu rancangan Teknokratik 2025-2026 untuk Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tewah Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah secara keseluruhan sebesar Rp. 4.835.615.311,-. Sub Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ada 39 (Tiga Puluh Sembilan) dengan Pagu Anggaran Rp. 3.985.615.311,- di Sub Unit Organisasi Kecamatan Tewah dan 18 (Delapan Belas) dengan Pagu Anggaran Rp. 850.000.000,- di Sub Unit Organisasi Kelurahan Tewah.

Anggaran dana yang diberikan akan digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan semua Program dan kegiatan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah membantu dalam penyusunan Renja Kecamatan Kecamatan Tewah Tahun 2025, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Kecamatan Tewah ini banyak kekurangan dan kami mengharapkan ada masukan demi lebih baiknya Penyusunan Renja Kecamatan ini selanjutnya.

CAMAT TEWAH,

HENDRA SURYA, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19720208 201001 1 003

RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN



Alamat :

Jalan Ahmad Yani No.43
Kuala Kurun (74511)
Kalimantan Tengah

rsudkualakurun@yahoo.co.id

http://bludrsud.gunungmaskab.go.id

RSUD KUALA KURUN

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN







KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaanNya maka Rencana Kerja Tahun 2025 UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tahun 2025 merupakan perencanaan dan penganggaran yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja Rumah Sakit periode satu tahun, Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Besar harapan kami Rencana Kerja Tahun 2025 ini mendapat dukungan luas dari semua pihak untuk suksesnya program peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit.

Kiranya Rencana Kerja pada UPT RSUD Kuala Kurun ini dapat berguna sebagai salah satu syarat administrasi Badan Layanan Umum Daerah.

Kuala Kurun, Juli 2025

DIREKTUR,

dr. RUSNI D MAHAR
Pembina Tingkat I
NIP. 19780803 200604 2 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN *1*
1.1 LATAR BELAKANG *3*
1.2 LANDASAN HUKUM *2*
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN *6*
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN *7*

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024 ..... *9*
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD *9*
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD *9*
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..... *9*
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD *10*
2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT *10*

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *11*
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL *11*
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA..... *11*
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... *12*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025 ..... *16*

BAB V PENUTUP *21*
LAMPIRAN

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun terletak di Jln. Ahmad Yani No. 43 Kuala Kurun, dengan luas 26.721 M^2 berdasarkan sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor 031, Tanggal 16 Februari 2008, dan mendapat hibah dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 Tanggal 17 Januari 2007 dengan Luas 3.536 M^2 sehingga Total Luas UPT RSUD Kuala Kurun adalah 30.257 M^2. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pertama kali dibangun pada tahun 1982 berupa sebuah bangunan dengan konstruksi kayu sebagai Poliklinik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun pertama kali beroperasi pada tanggal 19 September 1986, dengan fasilitas 2 (dua) buah bangunan berupa 1 (satu) buah bangunan poliklinik dan 1 (satu) buah bangunan ruang rawat inap. Pada tahun 1999 kegiatan pembangunan ruang kebidanan, tahun 2003 rehab bangunan rawat inap (bangsal), tahun 2004 pembuatan selasar depan ruang kebidanan sampai kamar jenazah dan gudang dan rehab bangunan Poliklinik.

Pada Tahun 2013 dengan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh diberikan kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan dimana Rumah Sakit sebagai Unit Layanan Publik dituntut untuk dapat memberikan Pelayanan secara Profesional, Fleksibel, Efisien dan Efektif agar dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Dimulai pada Tahun 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun melakukan survey akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit).

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dinyatakan telah memenuhi standar pelayanan sesuai dengan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/240/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dinyatakan LULUS Tingkat PERDANA.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan survey akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 September 2019 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memenuhi standar pelayanan, peningkatan mutu dan budaya keselamatan serta etika profesi dengan dikeluarkannya sertifikat dan dinyatakan LULUS Tingkat UTAMA (Bintang Empat).

Pada bulan mei Tahun 2024 tanggal 27 s.d 30 dilaksanakan Penilaian Survey Akreditasi Rumah Sakit Oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dan mendapat status Akreditasi Lulus “PARIPURNA” melalui Sertifikat Nomor 00332/V/VI/2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kuala Kurun Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Penyusunan Renja 2025 UPT RSUD Kuala ini untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA UPT RSUD Kuala Kurun.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada. Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh UPT RSUD Kuala Kurun ini dapat berhasil.

UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai peran peyelenggaraan pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaa Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan permasalahan RSUD yang begitu komplek Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2025 (Renja TA 2025) UPT. RSUD Kuala Kurun disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
22. Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 118.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah kabupaten Gunung mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);
27. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas;
28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
29. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
30. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud :

a) Tersedianya dokumen perencanaan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.
b) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.
c) Menjadi Tolok Ukur kinerja dalam mencapai misi dan tujuan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan :

a) Menjabarkan rencana strategis UPT RSUD Kuala Kurun Tahun 2019-2024 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit.
b) Menjadi pedoman bagi UPT RSUD Kuala Kurun dalam melaksanakan seluruh kegiatan UPT RSUD Kuala Kurun .
c) Menjadi acuan bagi UPT RSUD Kuala Kurun dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2025.

d) Menciptakan sinergisitas dan kepastian dalam perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja UPT RSUD Kuala Kurun disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja K/L dan Renja provinsi/ kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2.1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah lainnya, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

3.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

4.1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

3.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

4.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

5.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

6.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

5.1. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Disamping itu dengan telah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah pada UPT. RSUD Kuala Kurun yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja UPT RSUD Kuala Kurun dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 disajikan dengan Tabel T-C.29 pada lampiran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501), dapat disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tabel T-C.30 pada lampiran.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

UPT RSUD Kuala Kurun adalah rumah sakit yang sedang berkembang sehingga masih sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Klasifikasi Rumah Sakit sampai saat ini Kelas C Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Permasalahan yang dihadapi UPT RSUD Kuala Kurun saat ini perlu mendapat perhatian dalam rangka menyusun rencana strategi rumah sakit. Dengan mengetahui permasalahan yang ada maka akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan

yang dapat menjawab berbagai tantangan ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal melalui analisa SWOT.

Untuk mewujudkan hal tersebut UPT RSUD Kuala Kurun merencanakan :

a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, paramedis profesional dan profesional non medis.
b. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan pada tiap unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan standar.
c. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah
d. Mengupayakan untuk menempuh akreditasi sekaligus menata kualitas standar pelayanan.
e. Pembangunan ruang rawat inap sesuai standar.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat terlihat jelas di Tabel T-C.31 pada lampiran.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan UPT. RSUD Kuala Kurun dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penambahan pelayanan kesehatan rumah sakit menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
2. Pelayanan maksimal terhadap masyarakat melalui pelayanan BPJS.
3. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan UPT RSUD Kuala Kurun .

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 sesuai dengan Tabel T-C.32 pada lampiran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Kesehatan (RPJMD) kondisi pembangunan dibidang kesehatan diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional tersebut yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka UPT RSUD Kuala Kurun berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal kepada masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.2.1. Tujuan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga menumbuh kembangkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.

Terciptanya sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit Kelas C.

3.2.2. Sasaran

Meningkatnya kualitas dan terintegrasinya pelayanan kepada pelanggan sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan meningkat.

Meningkatnya etos kerja dan disiplin para pegawai UPT RSUD Kuala Kurun

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas dan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT RSUD Kuala Kurun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai dengan Tabel T-C.33 pada lampiran.

3.3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Tujuan :
   1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor;
   2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
   3. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
   4. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub kegiatan :
         a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD
         d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
         e. Koordinasi dan Penyusunan DPPA-SKPD
         f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan
        a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)
        c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Peningkatan Pelayanan BLUD
    1) Sub kegiatan
        a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
h. Kegiatan Penataan Organisasi
    1) Sub Kegiatan
        a. Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

3.3.2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Tujuan : Presentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan
         a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
         b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rehap Selasa Tahap II)
         c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
         d. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
         e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan
         a. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkunganKegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
         b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
      1) Sub Kegiatan
         a. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
         b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
   d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
      1) Sub kegiatan
         a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3.3.3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Tujuan : Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan
2. Sasaran : Pegawai di rumah sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
    a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
    b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.3.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Tujuan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
    a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dalam penyusunannya berpedoman secara umum pada Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas serta secara khusus berpedoman pada Visi dan Misi UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, maka di susunlah program-progam Tahun 2025 sebagaimana tertuang didalam tabel berikut ini :

.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UPT. RSUD KUALA KURUN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2025
	BELANJA	**58.220.344.004**
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**46.002.330.774**
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**156.262.210**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.488.380
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi & Penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.424.630
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.530.600
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	1.545.000
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi & Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.423.400
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	2.850.200
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.947.207.212**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	29.947.207.212
1.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**123.465.360**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	123.465.360
1.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**455.033.015**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.296.960
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	4.968.000
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	18.845.755
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	93.922.300
1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.391.873.200**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Surat Menyurat	10.193.200
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.381.680.000
1.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**419.356.737**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	20.798.733
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan	170.543.136

	kendaraan dinas operasional atau lapangan	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.014.868
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.500.000.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.500.000.000
1.02.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**9.133.040**
1.02.01.2.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.133.040
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**3.668.153.878**
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.252.458.618**
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	194.873.925
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	69.904.680
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.413.689.251
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	573.990.762
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**186.140.520**
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	11.986.500
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	174.154.020
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**156.195.200**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.195.200
1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**73.359.540**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	73.359.540
01.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**8.493.277.332**
1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Di wilayah Kabupaten/Kota**	**8.142.936.792**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	8.142.936.792
1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**350.340.540**

1.02.03.2.03.0001	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.340.540
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**56.582.020**
1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**56.582.020**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.582.020

B A B V
P E N U T U P

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tahun 2025 merupakan hasil komitmen perencanaan awal yang sekaligus memberikan arah pada pemangku kepentingan di UPT RSUD Kuala Kurun untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

Rencana kerja ini dibuat dengan analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu renja ini menggambarkan kebutuhan awal UPT RSUD Kuala Kurun dalam rangka mencapai visi misi yang diharapkan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

TABEL T - C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	TOTAL BELANJA								**24.422.090.743**	
	BELANJA		**7.514.291.130,50**	**45.092.061.452,00**	**58.646.452.882,42**	**50.475.018.780,00**		**58.694.172.154**	**16.475.169.944**	
	BELANJA MODAL								**102.279.000**	
	BELANJA BARANG JASA BLUD								**7.946.920.799**	
1.02.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**4.830.981.172,50**	**26.629.336.152,00**	**49.024.028.410,42**	**42.178.319.011,00**	**86,04**	**51.114.593.831**	**13.852.247.453**	**86,04**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**5.000.000,00**	59.277.780,00	102.253.440,00	**101.637.938,00**	**99,40**	**76.191.430**	**64.390.377**	**99,40**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan		47.322.400,00	90.052.640	89.727.538,00	**99,64**	63.417.600	60.778.077	189,61
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	5.000.000,00	3.480.000,00	3.331.800	3.233.000,00	**97,03**	3.424.630	828.800	92,90
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan		3.249.000,00	3.530.600	3.405.300,00	**96,45**	3.530.600	-	104,81
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan		1.349.800,00	1.233.000	1.232.500,00	**99,96**	1.545.000	1.532.500,00	91,31
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan		1.423.400,00	1.423.400	1.393.000,00	**97,86**	1.423.400	-	97,86
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja yang dihasilkan		2.453.180,00	2.682.000	2.646.600,00	**98,68**	2.850.200	1.251.000	107,88
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**-**	**14.315.999.224,00**	**21.826.743.304,00**	**19.616.071.579,00**	**89,87**	**26.615.575.568**	**13.173.554.257**	**89,87**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar		14.315.999.224,00	21.826.743.304	19.616.071.579,00	**89,87**	26.615.575.568	13.173.554.257	137,02
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**650.000.000,00**	**126.135.190,00**	**125.658.000,00**	**120.331.748,00**	**95,76**	**123.465.360**	**43.911.944**	**95,76**
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	650.000.000,00	126.135.190,00	125.658.000	120.331.748	**95,76**	123.465.360	43.911.944	95,40
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	**813.440.000,00**	**422.237.280,00**	**469.640.215,00**	**463.729.054,00**	**98,74**	**552.549.015**	**226.634.035**	**98,74**
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum untuk pasien UPT. RSUD Kuala Kurun	450.000.000,00	337.296.960,00	337.296.960	337.182.000,00	**99,97**	337.296.960	159.044.000	99,97
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian buku dan surat kabar/majalah	38.440.000,00	2.484.000,00	2.484.000	1.800.000,00	**72,46**	2.484.000	900.000	72,46
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25.000.000,00		15.244.155	12.870.000,00	**84,43**	29.916.255	-	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	300.000.000,00	82.456.320,00	114.615.100	111.877.054,00	**97,61**	82.851.800	66.690.035	135,68
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit**	**1.000.000.000,00**	**330.000.000,00**	**3.667.920.000,00**	**3.482.190.000,00**	**94,94**	**892.612.432**	**-**	**-**
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Ambulance)	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1.000.000.000,00	330.000.000,00	618.492.000	608.140.000,00	**98,33**	618.492.200		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						100.000.000		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						157.920.232		
01.02.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			3.049.428.000,00	2.874.050.000,00	**94,25**	16.200.000		
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**771.182.000,00**	**406.941.280,00**	**729.628.000,00**	**679.618.192,00**	**93,15**	**759.446.000**	**305.435.140**	**249**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan pengiriman/pemaketan dokumen	6.348.000,00	7.966.000,00	7.938.000	6.413.500,00	**80,79**	7.966.000	2.000.000	80,51
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	764.834.000,00	398.975.280,00	721.690.000	673.204.692,00	**93,28**	751.480.000	303.435.140	168,73
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	**1.591.359.172,50**	**468.745.398,00**	**489.692.322,00**	**468.266.013,00**	**95,62**	**482.260.897**	**38.321.700**	**361**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	36.368.750,00	16.465.928,00	20.968.015	9.172.800,00	**43,75**	20.968.015		55,71
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Rumah Sakit	474.990.422,50	154.319.500,00	154.426.722	145.621.213,00	**94,30**	154.426.722	4.431.700	94,36
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rumah Sakit	550.000.000,00	112.008.270,00	119.510.345	119.439.000,00	**99,94**	112.078.920	33.890.000	106,63
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.000.000,00	185.951.700,00	194.787.240	194.033.000,00	**99,61**	194.787.240		104,35
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	**9.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	**21.612.493.129,42**	**17.246.474.487,00**	**79,80**	**21.612.493.129,00**	**7.946.920.799,00**	**79,80**
1.02.01.2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Belanja Operasional Rumah Sakit	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	21.612.493.129	17.246.474.487,00	**79,80**	21.612.493.129,00	7.946.920.799	164,25
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.082.400,00**	**1.598.400,00**	**17,60**	**22.417.530,00**		
01.02.01.02.13	**KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI**				**9.082.400,00**	**1.598.400,00**	**17,60**	**22.417.530,00**		
01.02.01.02.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				9.082.400,00	1.598.400,00	**17,60**	22.417.530		
1.02.02.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**2.646.301.118,00**	**4.391.871.180,00**	**1.670.888.274,00**	**1.566.822.789,00**	**93,77**	**1.560.859.779,00**	**158.428.099,00**	**93,77**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	**2.265.351.118,00**	**4.124.780.330,00**	**1.253.943.345,00**	**1.242.389.100,00**	**99,08**	**1.143.914.770**	**107.829.000**	**99,08**
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Sesuai Standar	174.133.575,00	326.184.000,00	617.460.000	608.468.000,00	**98,54**			186,54
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	222.140.325,00	69.993.000,00	69.903.800	69.593.000,00	**99,56**	69.903.800		99,43

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan sesuai standar	1.049.077.218,00	3.112.759.050,00			**#DIV/0!**	500.000.000		-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan	820.000.000,00	615.844.280,00	566.579.545	564.328.100,00	**99,60**	574.010.970	107.829.000,00	91,63
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**330.950.000,00**	**120.308.910,00**	**187.340.929,00**	**141.369.129,00**	**75,46**	**187.340.929**	**4.478.000**	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan uji sampel secara berkala	40.000.000,00	11.998.350,00	11.986.729		**-**	11.986.729		-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan akreditasi Rumah Sakit	290.950.000,00	108.310.560,00	175.354.200	141.369.129,00	**80,62**	175.354.200	4.478.000	130,52
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**50.000.000,00**	129.526.640,00	**156.195.300,00**	**110.158.260,00**	**70,53**	**156.195.380**	**4.161.180**	**70,53**
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00	129.526.640,00	156.195.300	110.158.260,00	**70,53**	156.195.380	4.161.180	85,05
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**-**	**17.255.300,00**	**73.408.700,00**	**72.906.300,00**	**99,32**	**73.408.700**	**41.959.919**	**99,32**
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyusunan SOP, SPM, Juknis, Protokol Rumah Sakit		17.255.300,00	73.408.700	72.906.300,00	**99,32**			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						73.408.700	41.959.919	
1.02.03.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	**-**	**14.014.125.920,00**	**7.885.601.778,00**	**6.697.420.839,00**	**84,93**	**5.939.718.994**	**2.362.215.392**	**84,93**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	**-**	**13.664.023.570,00**	**7.535.499.578,00**	**6.351.948.274,00**	**84,29**	**5.589.616.794**	**2.360.051.392**	**84,29**
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Honorarium pegawai ASN dan Kontrak pada RSUD Kuala Kurun	-	13.664.023.570,00	7.535.499.578	6.351.948.274,00	**84,29**	5.589.616.794	2.360.051.392	46,49
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**-**	**350.102.350,00**	**350.102.200,00**	**345.472.565,00**	**98,68**	**350.102.200**	**2.164.000**	**98,68**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Kesehatan (Perawat dan Bidan) Berkualitas	-	350.102.350,00	350.102.200	345.472.565,00	**98,68**	350.102.200	2.164.000	98,68
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase cakupan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**37.008.840,00**	**56.728.200,00**	**56.852.020,00**	**30.857.741,00**	**54,28**	**56.582.020**	**-**	**54,28**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**37.008.840,00**	**56.728.200,00**	**56.852.020**	**30.857.741,00**	**54,28**	**56.582.020**	**-**	**54,28**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan promosi kesehatan	37.008.840,00	56.728.200,00	56.852.020	30.857.741,00	**54,28**	56.582.020		54,40

TABEL T - C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 BULAN JUNI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	TINGKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Rasio Pegawai RSUD Kuala Kurun	10 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	14 DOKTER SPESIALIS	15 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	12 DOKTER SPESIALIS	11 DOKTER SPESIALIS	9 DOKTER SPESIALIS	12 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	9 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	
2	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Jumlah Unit Pelayanan Yang Mendapatkan Peralatan Kesehatan	55%	65%	75%	80%	85%	87%	62,06%	76,71%	85,43%	93,06%	99,50%	-	-	-			
3	JUMLAH KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Terpenuhinya Obat Dan Perbekalan Pasien Pada Tiap Unit Pelayanan	60%	65%	75%	80%	85%	87%	-	43,72%	89,51%	99,09%	99,98%	64,98%		-			
4	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Tersediaan Peralatan Rumah Tangga Pada Tiap Unit Pelayanan	60%	65%	75%	80%	85%	87%	93,66%	70,45%	73,40%	98,50%	93,28%	98,70%	-	-			
5	JUMLAH KETERSEDIAAN BANGUNAN, GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pada Tiap Unit Pelayanan Rsud Kuala Kurun	33%	33%	40%	50%	50%	50%	78,60,%	98,22%	99,87%	98,79%	99,61%	-	-	-			
6	JUMLAH PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Rsud Kuala Kurun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,71%	83,05%	93,57%	63,00%		-	-	-			
7	JUMLAH PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,12%	95,38%	67,42%	99,99%	99,99%	99,78%	-	-			
8	JUMLAH PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Ruitn/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rsud Kuala Kurun Pada Tiap Unit Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,20%	90,84%	91,45%	77,86%	99,60%	18,79%	-	-			
9	JUMLAH PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Penunjang Rsud Kuala Kurun Pada Tiap Unit Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,20%	87,20%	73,40%	90,20%	99,60%		-	-			
10	PENINGKATAN PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	57%	65%	67%	70%	75%	75%	37.15%	26.94%	35.47%	25.60%	25,84%	36%	-	-			
11	PENINGKATAN JUMLAH BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 TAHUN) TEMPAT TIDUR	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	47,72 Kali	47,4 Kali	54,25 Kali	55,70 Kali	55,80 Kali	56,01 Kali	11.9 Kali	31 Kali	35 Kali	29 Kali	26 Kali	19 Kali	-	-			
12	PENURUNAN JUMLAH TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2,73 Hari	2,73 Hari	2,70 Hari	2,68 Hari	2,60 Hari	2,30 Hari	5,76 Hari	9 Hari	7 Hari	9 Hari	10,41 Hari	6,16 Hari	-	-			
13	PENINGKATAN JUMLAH RAWAT INAP	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2.726	2.830	2.895	3.233	3.500	3.500	2.707	1.825	2.340	2.107	2,474	1.698	-	-			
14	PENINGKATAN JUMLAH TEMPAT TIDUR	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	53	90	110	140	150	150	53	59	76	108	103	103	-	-			
15	TERTATANYA DATABASE RUMAH SAKIT	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	60%	65%	75%	80%	85%	85%	100%	100%	92,15%	98,92%	70,53%	2,88%	-	-			
16	PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	14.040	15.000	15.777	18.777	30.550	30.986	14.040	10.662	11.974	12.117	19,335	9.735	-	-			
17	PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET DEATH RATE (NDR)	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	4,02 ‰	4,01 ‰	4,00 ‰	3,80 ‰	3,50 ‰	3,00 ‰	3,3 ‰	6,5 ‰	19,61 ‰	17 ‰	7,09 ‰	9,5 ‰	-	-			
18	GDR	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	14,27 ‰	14,27 ‰	13,57 ‰	12,95 ‰	12,37 ‰	11,85 ‰	11.47 ‰	14,75 ‰	35,47 ‰	25,63 ‰	21,66 ‰	16,5 ‰	-	-			

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 BULAN JUNI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
19	PENINGKATAN JUMLAH AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA-RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2,70 Hari	2,70 Hari	2,37 Hari	2,30 Hari	2,24 Hari	2,19 Hari	2.7 Hari	2 Hari	3 Hari	2 Hari	2,63 Hari	2,4 Hari	-	-			
20	AKREDITASI RUMAH SAKIT TERLAKSANA 15 POKJA	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-			
21	PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP UNIT LAYANAN	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	81%	83%	85%	88%	90%	90%	-	-	-	68,48%	-	-	-	-			
22	PENINGKATAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	-	-			
23	PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 60%	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Jumlah Magang, Bimtek, Pelatihan Dan Seminar Bagi Pegawai Rsud Kuala Kurun	87%	88%	89%	90%	95%	95%	-	62,20%	99,76%	87,60%	95,76%	35,57%	-	-			
24	TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN	Penyusunan Standar Analis Belanja Pelayanan Kesehatan	Adanya Dokumen/ Peraturan Daerah Mengenai Retribusi Menyesuaikan Dengan Standar Harga Barang Dan Jasa Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-			Dengan status BLUD retribusi berubah menjadi pendapatan lain-lain yang sah.
25	PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100%	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Meningkatnya Kemampuan Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI BLUD TERLAKSANA 100%	Laporan keuangan BLUD	Jumlah Dana Operasional Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

CATATAN : *angka sementara

TABEL T - C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
	BELANJA			**58.220.344.004**	
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**46.002.330.774**	
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**156.262.210**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	143.488.380	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi & Penyusunan dokumen RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	3.424.630	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	3.530.600	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1.545.000	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi & Penyusunan perubahan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1.423.400	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja yang dihasilkan	2.850.200	
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**29.947.207.212**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	29.947.207.212	
1.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT. RSUD Kuala Kurun Kabupaten gunung Mas**	**123.465.360**	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	123.465.360	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
1.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	**455.033.015**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	337.296.960	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.968.000	
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18.845.755	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.922.300	
1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**1.391.873.200**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Surat Menyurat	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.193.200	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.381.680.000	
1.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	**419.356.737**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20.798.733	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170.543.136	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228.014.868	
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.500.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13.500.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
1.02.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	UPT. RSUD Kuala Kurun	**Terwujudnya Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat dan sesuai dengan standar type rumah sakit**	**9.133.040**	
1.02.01.2.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.133.040	
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**3.668.153.878**	
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	**3.252.458.618**	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	194.873.925	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	69.904.680	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2.413.689.251	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	573.990.762	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**186.140.520**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.986.500	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	174.154.020	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	**156.195.200**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.195.200	
1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**73.359.540**	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME TAHUN 2025	CATATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	73.359.540	
01.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	**8.493.277.332**	
1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Di wilayah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	**8.142.936.792**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8.142.936.792	
1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**350.340.540**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350.340.540	
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**56.582.020**	
1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**56.582.020**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.582.020	

TABEL T - C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
BELANJA				**58.220.344.004**				**58.076.855.624,00**
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**46.002.330.774**	**DAU & BLU**		100%	**45.858.842.394**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**156.262.210**	DAU		100%	**12.773.830,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPT. RSUD Kuala Kurun	10 Dokumen	143.488.380	DAU		100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	3.424.630	DAU		100%	3.424.630
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	3.530.600	DAU		100%	3.530.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	1.545.000	DAU		100%	1.545.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	1.423.400	DAU		100%	1.423.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Laporan	2.850.200	DAU		100%	2.850.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**29.947.207.212**	DAU		100%	**29.947.207.212**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	UPT. RSUD Kuala Kurun	272 Orang/bulan	29.947.207.212	DAU		100%	29.947.207.212

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**123.465.360**	DAU		100%	**123.465.360**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UPT. RSUD Kuala Kurun	11 Orang	123.465.360	DAU		100%	123.465.360
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**455.033.015**	DAU		100%	**455.033.015**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Paket	337.296.960	DAU		100%	337.296.960
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	4.968.000	DAU		100%	4.968.000
Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Paket	18.845.755	DAU			18.845.755
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	29 Laporan	93.922.300	DAU		100%	93.922.300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**1.391.873.200**	DAU		100%	**1.391.873.200**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Laporan	10.193.200	DAU		100%	10.193.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Laporan	1.381.680.000	DAU		100%	1.381.680.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**419.356.737**	DAU		100%	**419.356.737,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	20.798.733	DAU		100%	20.798.733
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	170.543.136	DAU		100%	170.543.136

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	228.014.868	DAU		100%	228.014.868
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**13.500.000.000**	**BLUD**		100%	**13.500.000.000,00**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit Kerja	13.500.000.000	BLUD		100%	13.500.000.000
Kegiatan Penataan Organisasi	**Terwujudnya Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat dan sesuai dengan standar type rumah sakit**	UPT. RSUD Kuala Kurun	**1 Kegiatan**	**9.133.040**	**PAD**		100%	**9.133.040,00**
Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	9.133.040	PAD		100%	9.133.040
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	92%	**3.668.153.878**	**DAU**		100%	**3.668.153.878,00**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	UPT. RSUD Kuala Kurun	92%	**3.252.458.618**	DAU		100%	**3.252.458.618,00**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	UPT. RSUD Kuala Kurun	16 Unit	194.873.925	DAU		100%	194.873.925
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	UPT. RSUD Kuala Kurun	14 Unit	69.904.680	DAU		100%	69.904.680
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	10 Unit	2.413.689.251	DAU		100%	2.413.689.251
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	UPT. RSUD Kuala Kurun	276 Unit	573.990.762	DAU		100%	573.990.762
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**92%**	**186.140.520**	**DAU**		**100%**	**186.140.520,00**
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	11.986.500	DAU		100%	11.986.500
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	**Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota**	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit	174.154.020	DAU		100%	174.154.020
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**100%**	**156.195.200**	DAU			**156.195.200,00**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun		156.195.200	DAU			156.195.200
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**92%**	**73.359.540**	**DAU**		**92%**	**73.359.540**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit	73.359.540	DAU		92%	73.359.540
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	90%	**8.493.277.332**	**DAU**		100%	**8.493.277.332**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	UPT. RSUD Kuala Kurun	83%	**8.142.936.792**	DAU		83%	**8.142.936.792**
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	UPT. RSUD Kuala Kurun	164 Orang	8.142.936.792	DAU		83%	8.142.936.792
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**83%**	**350.340.540**	**DAU**		**100%**	**350.340.540**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	UPT. RSUD Kuala Kurun	62 Orang	350.340.540	DAU		100%	350.340.540
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase cakupan pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**100%**	**56.582.020**	**DAU**		100%	**56.582.020**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten / Kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**56.582.020**	DAU		100%	**56.582.020**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Dokumen	56.582.020	DAU		100%	56.582.020

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
KABUPATEN GUNUNG MAS

Alamat : Alamat : Jl. Damang Pijar No 108 Tumbang Miri
TUMBANG MIRI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan Nya lah kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas.

Hal-hal yang kami kemukakan dalam dokumen ini kami sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan dokumen ini dan kami mengharapkan semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini dapat berguna bagi kita semua.

Tumbang Miri, Juli 2024
CAMAT KAHAYAN HULU UTARA,

LIANSYAH, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196708301987071001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU 6

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra SOPD 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD..... 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 27

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan.. 27

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional 28

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD..... 28

3.3. Program dan Kegiatan 33

BAB IV. PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara dan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) harus menyusun Rencana Kerja SOPD (Renja SOPD).

Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030. Renja Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gunung Mas ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Kahayan Hulu Utara mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025-2026 (Renstra SOPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Agar dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program/kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

7. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informatika Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian serta memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SOPD
3.3 Program Dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk terlaksananya urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 2.103,573,.553,00

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 724,431,476,00.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini bertujuan untuk terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 112,064,327,00.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp. 56,976,132,00

Untuk lebih jelasnya tentang rekap hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Kahayan Hulu Utara dapat dilihat Tabel 2.1 di bawah ini

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA

KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2023

SASARAN RKPD YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA
SKPD :

Meningkatnya Kinerja Pegawai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat

---

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (*OUTCOME)*/KEGIATAN (*OUTPUT*)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)		REALISASI CAPIAN KINERJA RENSRTA SKPD s>d. RENJA SKPD TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN LALU YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN 2023 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2020 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023)		TINGKAT CAPIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 X 100%		14 = 6 + 12		15=14/5X 100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

	7.01	KECAMATAN			16.846.669.573		**2,709,588,106**		2,997,045,588	12,69 %	368,578,471	38,89%	1,255,208,131	57,89 %	1,868,193,498	88,26 %	2,870,910,571	**95,79 %**	**2,870,910,571**	**89,05 %**	**89,05 %**		5,580,498,677		33,12 %		
	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Terlaksanaya urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)		11.661.955.413	97	1.879.636.538	97	2,103,573,653	8,98 %	233,405,795	33.06%	859,002,980		1,824,012,980	58,10 %	2.331.256.838	**95,39 %**	**2,006,838,116**	72,94%	72,94 %		3.879.548.910		0		
	70101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penggganggaran dan laporan realisasi kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)		12.279.840	Dokumen	1.022.500	Dokumen	6,540,676		0		0		0		0		6,539,760	99,98	6,539,760		0		00	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	tersediannya Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan (Dengan Satuan:D		12.279.840	Dokumen	1.022.500	Dokumen	6,540,676	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	6,539,760	99,98	6,539,760		0		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

		SKPD	okumen)																							
	701012002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Dengan Satuan:1 Tahun)	97 %	7.878.724.515	97 %	1.495.546.244	97 %	1,345,302,250	6,1 %	162.189.959	39,21 %	569,315,010		952,945,274	87,50 %	1.209.051.130	94,08	**1,265,677,251**	**94,08**	**1,265,677,251**		2,704597,374		0		
	70101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gajidan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	0	7.878.724.515	17 Orang	1.495.546.244	12 Orang	,345,302,250	6,1 %	162.189.959	39,21 %	569,315,010	17 Orang	952,945,274	87,50 %	1.209.051.130	12 Orang	1,265,677,251	94,08	1,265,677,251		2,704597,374		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	lancarnya pelayanan administrasi umum penunjang perankat Daerah (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	1.209.626.564	8 Jenis	248,648,930	8 Jenis	**426,269,571**		62.278.493	62,70%	155,914,630		200,939,830	93,26 %	287.185.955	**98,46**	**419,839,891**	**98,46**	**419,839,891**		535,834,885		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	701012060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor (Dengan Satuan:8 Jenis)	0	20.492.200	12 Bulan	4,235,550	12 Bulan	5,786,985	3 Bulan	0	100 %	4,235,550	100 %	4,235,550	100 %	4,235,550	12 Bulan	5,786,985	100,00%	100,00 %		24,727,750		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	701012060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Keperluan Logistik Kantor KecamatanDan Kelurahan (Dengan Satuan:27 Jenis)	0	196.316.600	12 Bulan	41,304,400	12 Bulan	201,947,077	3 Bulan	10.325.830	59,65%	24,641,120	74,73	30870720	78,26 %	37,549,945	12 Bulan	195,604,412	100	195,604,412		78,854,345		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	701012060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan administrasi Kantor (Dengan Satuan:2 Jenis)	0	53.549.960	12 Bulan	10,314,480	12 Bulan	13,855,309	3 Bulan	3.337.265	54,75%	5,647,960	54,75	5,647,960	78,23 %	10,286,460	12 Bulan	13,854,605	99,99	13,854,605		20,600,940		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	70101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersediannya Dana Perjalanan Dinas (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	864.270.000	12 Bulan	102.500.000	12 Bulan	204,680,200	3 Bulan	35721000	62,96%	121,390,000	83,08	160,182,600	96,93%	235,114,000	99,90	204,593,889	99,90	204,593,889		337,614,000		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Benda Pos (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	976.908.530	2 Jenis	225.155.210	2 Jenis	220,945,581		35,494,836	48,78%	95,521,460	66,13	129,480,996	97,55%	174.222.432	**96,51**	**213,238,484**	**96,51%**	**97,55%**		399,377,642		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya materai Kantor (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	13.605.000	2 Jenis	4.325.000	232 Keping	1,500,000	0	0	100%	2,320,000	100%	2,230,000	230 Keping	2,320,000	150 Keping	1,500,000	100,00%	100,00%		6.645.000		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Tagihan air dan Listrik (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	75.738.360	5 Rekening	12.702.360	5 Rekening	17,664,000	5 Rekening	470,850	18,50%	2,891,050	24,18	3,778,550	5 Rekening	15,447,950	5 Rekening	15,344,900	86,87	98,37%		28,150,310		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersdianya Alat/Bahan Kebersihan dan Honor PTT (Dengan Satuan:1	0	887.565.170	12 Bulan	208.127.850	12 Bulan	201,781,581	3 Bulan	35,023,986	50,77%	90,310,410	69,37	123,382,446	97,39%	156,454,482	12 Bulan	196,393,584	97,32 %	97,39%		372.531.524		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

			2 Bulan)																						
	70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya kendaraan Jabatan, KendaraanDinas /Operasional dan peralatan kantordan Bangunan (Dengan Satuan:12 Unit)	0	630.605.954	11 Unit	16.420.584	11 Unit	104,519,572		0	21,74%	38,271,880	21,74	38,271,880	91,16%	131.782.321	97,15	**101,542,730**	**91,16%**	**91,16%**		148,202,905		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersediannya Dana untuk Pajak dan perawatan Mobil Dinas Jabatan (Dengan Satuan:1 Unit)	0	156.567.880	1 Unit	5.000.000	1 Unit	24,595,488	1 Unit	0	1 Unit	11,146,880	29,41	11,146,880	99,85%	23,768,780	1 Unit	23,371,000	99,85%	99,85%		28,768,780		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	701012090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersediannya Dana untuk Perawatan Peralatan Kantor (Dengan Satuan:3 Jenis)		98.409.170	1 Jenis	26.966.390	3 Jenis	6,016,8700			54,41%	16,880,000	54,41	16,880,000	100%	31,020,000	3 Jenis	6,010,000	100%	100%		129,429,170		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	701012090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya dana untuk Pajak dan Perawatan Mobil dan Perawatan Mobil dan Motor Dinas Operasional KantorKecamatan dan Keluraha n (Dengan Satuan:unit)		355.767.194	6 Unit	9.420.584	6 unit	58,129,892	6 unit	12.919.791	10,94%	10,245,000	10,94	10,245,000	89,70%	68,393,541	6 unit	56,391,730	89,70%	89,70%		77,814,125		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	701012090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC,Personal KOmputer dan Printer)	0	19.861.710	1 Kegiatan	0	-	15,773,322	-	0	-	0	-	0	63,79%	8,600,000	99,97	15,770,000	63,79 %	63,79 %		8,600,000		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dengan Satuan:91 %)	91 %	4.116.877.675	91 %	491.063.750	91 %	724,431,476	4,61%	9,682,970	8,78 %	22,862,970	24,11%	62,762,970	75,68 %	205,163,310	**85,00**	**706,534,639**	**75,68%**	**75,68 %**		696,227,060		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya musyawarah pembangunan pembangunan di kelurahan dan Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	90.534.920	1 Kegiatan	9.496.520	1 Kegiatan	10,510,590	100 %	9,682,970	100 %	9,682,970	100	9,682,970	100 %	9,682,970	100	10,507,096	100,00%	100,00 %		100,217,890		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70103201001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya kegiatan Forum musyawarah perencanaan tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	41.784.920	1 Kegiatan	8.700.000	1 Kegiatan	10,510,590	100	9,682,970	100	9,682,970	100	9,682,970	100 %	9,682,970	1 Kegiatan	10,507,096	100,00%	100,00 %		18,382,970		0%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:1 tahun)	0	3.453.745.580	1 tahun	709.195.510	1 tahun	445,931,946			19,95 %	39,900,000	19,95	39,900,000	69,91 %	139.832.340	96,29	429,388,746	69,91%	69,91 %		849,027,850		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersediannya Dana Pembangunan sarana Prasarana Kelurahan (Dengan Satuan:1 Paket)	0	2.814.515.350	1 Paket	378.283.750	-	245,931,600	-	0	-	0	-	0	-	0	0	244,100,000	-			0			KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersediannya Dana untuk kegiatan Posyandu, Stunting, PKK, Mantir Adat, RT/RW Kelurahan (Dengan Satuan:1 Tahun)	0	632.308.930	1 Tahun	130.289.710	1 Tahun	196,567,449	-	-	-20,25%	39,900,000	20,25	39,900,000	70,97 %	139.832.340	1 Tahun	181,856,269	70,97%	70,97 %		270,122,050		01%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	7010320201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kelurahan (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	6.921.300	1 Kegiatan	2.430.000	-	3,432,477	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4,432,477	100%	100%		0		0%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010323	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan, oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Terlakananya penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan (Dengan Satuan:kegiatan)	0	572.597.175	0	18.001.460	0	267,988,940		4.366.710	26,04%	-13,180,000	26,04	13,180,000	26,04%	13,180,000	**99,49**	**266,638,797**	90,61%	90,61%		73,649,460		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010320301	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Penunjang Pembinaan Keikutsertaan	0	493.591.335	0	0	0	198,833,990	-	0	-	0	-	0	-	0	99,99	198,833,787	0,00%	0,00%		0		0,00%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

			Kegiatan Festival Budaya, dan Keagamaan. (Dengan Satuan:Kegiatan)																						
	70103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Program Kegiatan PKK Kecamatan (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	79.005.840	12 Bulan	7.000.000	12 Bulan	69,154,950	-	-	-26,04%	13,180,000	26,04	13,180,000	90,61%	55,648,000	12 Bulan	67,805,010	98,04%	90,61%		62,648,000		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Kegiatan)	100	229.995.900	100	4.996.860	1	112,064,327		0		0		-	100%	5.374.270		112,006,316	88,88%	100,00%		4.996.860		0%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	7010521	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersediannya Penunjang Kegiata Paskibraka HUTRI dan terselenggaranya Rapat Kerja Camat,Ka	0	229.995.900		4.996.860	0	112,064,3276		0		0		-		0		112,006,316	88,88%	0%		0		0	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

			des/Lurah dan Damang/ KepalaAdat (Dengan Satuan:2 Kegiatan)																						
	70105201001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Tersedianya Penunjang Kegiatan Paskibra HUT RI Tingkat Kecamatan Kaahayan Hulu Utara. (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	210.008.460	0	0	0	97,691,816		0		0		-		0		97,691,816	100 %						

		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																								
	70105201008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Rapat Kerja Camat, Kades/Lurah dan Damang/ KepalaAdat seKecamatan Kahayan Hulu Utara. (Dengan Satuan:1 Kegiatan)	0	19.987.440	0	0	1 Kegiatan	5,352,511		0			1 Kegiatan	-	100%	5,314,500	12 Bulan	-5,314,500	98,92%	100,00%					KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK)						9,000,000									9,000,000	100 %							
	70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:12 Bulan)	100	887.220.160	12 Bulan	160.418.700	12 Bulan	56,976,132	15,34 %	-38,938,845	34,01%	86,358,072	34,01	132,813,590	65,42 %	143.609.688	65,42	45,531,500	79,84	679,84 %					KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	70106201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terpasilitasinya Pembinaan Pemerintah Desa (Dengan Satuan:2 Kegiatan)	0	887.220.160	2 Kegiatan	160.418.70	2 Kegiatan	56,976,132	15,34 %	--38,938,845	34,01%	86,358,072	44,43	-112,813,590	45,531,500	45,531,500	79,94	45,531,500	79,94	65,42 %					KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

	701062010 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersediannya PenunjangKetertiban Umum (HonorPTT) (Dengan Satuan:12 Bulan)	0	679.327.360	0	40,831,308	12 Bulan	22,200		0	0	-0	0	0	0	0	-	0	-	-		-		-	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	
	701062010 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terbayarnya Jasa Upah Tim Verivikasi Evaluasi Anggaranddan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan. (Dengan Satuan:5 Orang)	0	207.892.800	5 Orang	43,413,800	5 Orang	56,953,932	5 Orang	0	41,63%	21,300,000	41,63	21,300,000	87,30%	44,669,650	5 Orang	45,531,500	87,30%	87,30%		88,562,450		42,60%	KEC. KAHAYAN HULU UTARA	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Anggaran dana yang digunakan untuk program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang terdiri dari 4 (Empat) program dan 10 (Sepuluh) serta menjadi 24 (Dua Puluh Empat) Sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 6,540,676 volume kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6,539,760 atau 99,98% dan realisasi kegiatan 99,98 % (sangat berhasil)

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 1,345,302,250 dipergunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 1,265,677,251 atau 94,08 % dan realisasi kegiatan tercapai 94,08 % (Berhasil);

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 5,786,985,00,- volume kegiatan pembelian lampu dan alat listrik selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5,786,985,00,- atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 % (Sangat berhasil) ;

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 201,947,077,00,- volume kegiatan dipergunakan

untuk Pembelian Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover dan bahan-bahan keperluan kantor lainnya, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 195,604,412,00,- atau 96,85% dan realisasi kegiatan 100 % (berhasil) ;

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 13,855,309,00,- dipergunakan untuk pengadaan barang cetakan berupa laporan-laporan dan penggandaan berupa fotocopy dokumen selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 13,854,60500,- atau 99,99% dan realisasi kegiatan tercapai 100% (Sangat berhasil) ;

d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 204,680,200,00,- volume kegiatan selama 1 tahun berupa Perjalanan Dinas Ke Dalam dan Luar Daerah OPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 204,593,889,00 atau 99,90 % dan realisasi kegiatan 100 % (berhasil) ;

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1,500,000,00 dipergunakan untuk pencetakan amplop surat dan meterai selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 1,500,000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100% (sangat berhasil) ;

b) Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 17,664,000,00 dipergunakan untuk pembayaran paket listrik dan rekening air selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp 15,344,900,00 atau 86,87 % dan realisasi kegiatan tercapai 100% (berhasil) ;

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 201,781,581,00 volume kegiatan selama 12 Bulan berupa Honorarium 6 (Enam) Orang Honorer pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 196,393,584,00,- atau 97,32 % dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil) ;

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 24,595,488,00 volume kegiatan selama 12 Bulan , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23,371,000,00 atau 95,02% dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil) ;

B. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 58,129,892,00 volume kegiatan selama 12 Bulan berupa pemeliharaan dan pembayaran pajak bagi 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 5 Unit Kendaraan Roda Dua pada Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 56,391,730,00 atau 97,00% dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil) ;

a) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 15,773,322,00 volume 1 kegiatan berupa Pemeliharaan Ac, Personal Computer/Nootbook dan Printer Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15,770,000,00 atau 99,97 % dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil) ;

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 6,016,870,00 volume 1 kegiatan berupa Pemeliharaan Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6,010,000,00 atau 100% dan realisasi kegiatan 100 % (sangat Berhasil) ;

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a) Peningkatan Partisipasi Musyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Musyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi dana sebesar Rp. 10,510,590 volume 1 kegiatan berupa Musrenbang Tingkat Kecamatan Kahayan Hulu Utara adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10,507,096,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 % (Sangat Berhasil) ;

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 3,432,897,,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3,432,477,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100, % (Sangat Berhasil) ;

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 245,931,600,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa Pembuatan Jalan Cor Beton Siram Aspal di Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 244,100,000,,00 atau 99,25 % dan realisasi kegiatan 100 % (Cukup Berhasil)

c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 196,567,449,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa insentif dan pemberian TMT pada posyandu di Kelurahan Tumbang Miri, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 181,856,269,00 atau 70,97% dan realisasi kegiatan 100 % (Cukup Berhasil) ;

c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

a) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 198,833,990,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa Pesparawi, Pestival Budaya,MTQ Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 198,833,787,00 atau 99,99% dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil)

b) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 69,154,950,00 volume 1 Tahun kegiatan berupa operasional TP PKK Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 67,805,010,00 atau 98,04% dan realisasi kegiatan 100 % (Berhasil)

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 97,691,816,00 volume 1 kegiatan untuk kegiatan Pelaksanaan HUT RI dan Kegiatan Pramuka di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 97,691,816 atau 100% dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) ;

b) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi)

Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (BIMTEK, Sosialisasi, Konsultasi) dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 9,000,000,00 volume 1 kegiatan untuk kegiatan Kontribusi Bimtek, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9,000,000, atau 100% dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) ;

c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 5,372,511,00 volume 1 kegiatan untuk kegiatan Rapat Kerja Camat dengan Kepala Desa/Lurah dan BPD di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5,314,500 atau 98,92% dan realisasi kegiatan 100,00 % (Sangat Berhasil) ;

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 56,953,932,00 volume 12 Bulan kegiatan untuk kegiatan pembayaran insentif Tim Pembinaan dan Verifikasi Keuangan Desa di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 45,531,500,00 atau 87,30 % dan realisasi kegiatan 100,00 % (Berhasil) ;

b) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran dana sebesar Rp. 22,000,00 volume 12 Bulan kegiatan untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kahayan Hulu Utara, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dan realisasi kegiatan 100 % (Kurang Berhasil) ;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kahayan Hulu Utara ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kecakapan dalam berkinerja, Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Untuk perencanaan pembangunan di kecamatan Kahayan Hulu Utara tahun 20245 sudah melalui mekanisme diadakannya musrenbang tingkat kecamatan dari Tahun 2023 dengan menggali seluruh usulan dari Desa/Kelurahan yang kemudian di prioritaskan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a) Rancangan kerangka ekonomi daerah
b) Program Prioritas pembangunan daerah dan
c) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA - PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara berdasarkan RKPD Kabupaten Gunung Mas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kahayan Hulu Utara tidak lepas dari koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan demi suksesnya pembangunan khususnya Kecamatan Kahayan Hulu Utara, umumnya Kabupaten Gunung Mas.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam pengumpulan usulannnya dimulai dari usulan dari daerah bawahan yang disebut Musrenbang Desa/Kelurahan yang mana usulan Desa/Kelurahan tersebut dibawa ke dalam Musrenbang Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya diolah sebagai usulan Kabupaten ke tingkat selanjutnya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam masa jabatan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan SKPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

Di masing-masing SKPD khususnya pada pemerintahan Kecamatan Kahayan Hulu Utara dibuat suatu Rencana Startegis Tahun 2025-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas sehingga dengan demikian kebijakan pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat SKPD dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kecamatan Kahayan Hulu Utara

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis kecamatan dan permasalahan pembangunan kecamatan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun ke depan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026 diatas maka dapat dirumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien.

   Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

   Terwuudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas

   Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah

2. Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas.

   Permasalahan pelayanan publik terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan. Kendala utama penerapan SPM adalah belum tersedianya sarana dan prasarana pelayanan serta kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai. Disamping itu, penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama pada OPD yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui **sasaran** sebagai berikut:

   Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Tujuan 3 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar wilayah

Infrastruktur merupakan salah satu pendukung dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk melengkapi dan mendukung aktivitas masyarakat, terutama mendukung untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa infrastrukur yang ingin ditekankan adalah dengan pembangunan seperti pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi, penyediaan air baku, perumahan dan pemukiman yang layak, dsb. Untuk mencapai tujuan dilakukan melalui sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Promosi

4. Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian masyarakat

Tabel 3.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025 -2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien**		**Predikat Akuntabilitas Kinerja**					
		Terwuudnya Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen TEPRA yang dibuat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya pengelolaan Keuangan Desa yang efektif dan	Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan Keuangan	11	11	11	11	11

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
		akuntabel						
2.	**Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesionalisme**		**Indeks Kepuasan Masyarakat**					
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran lebih berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana dalam mempelancar pekerjaan aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaaan, pelatihan serta pemantapan pegawai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pembinaan Bawahan agar tupoksinya lebih difungsikan	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja Daerah Bawahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Pembinaan Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan kepada kegiatan Sosial Keagamaandan Kemasyarakatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya peran serta	Keikut sertaan peran serta	100	100	100	100	100

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
		kepemudaan	kepemudaan dalam kegiatan 17 Agustus	%	%	%	%	%
		Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar yang tertuang dalam Aspirasi masyarakat dengan harapan peningkatan pembangunan daerahnya sendiri.	Persentase Peningkatan kualitas dokumen skala prioritas tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan untuk pedoman pembangunan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	**Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah**		Jumlah event penyelenggaraa n budaya daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Keikutsertaan Kecamatan dalam Pelestarian Budaya	Jumlah Keikut sertaan dalam festival dan pelestarian budaya daerah	2	2	2	2	2

3.3. Program Dan Kegiatan

a. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Pada tahun 2025 Rencana kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara memuat 4 (Empat) program sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ada 12 (Dua Belas) kegiatan dan diuraikan kedalam 30 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

TABEL 3.3

LAMPIRAN RENJA KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

DAN KANTOR KELURAHAN TUMBANG MIRI

TAHUN 2025

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA						**2.648.305.884,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.648.305.884,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.648.305.884,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.139.017.338,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	44.943.317,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7.667.200,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	7.667.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	14.274.127,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	7.667.590,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.427.397.662,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.419.730.462,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				29 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	5.750.400,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				10 Laporan	5.750.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	36.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	36.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	221.586.151,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.146.123,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				47 Paket	59.375.340,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	12.510.588,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Meningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				157 Laporan	110.554.100,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	189.339.808,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	18.688.488,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	168.151.320,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	134.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	59.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**259.196.600,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	51.347.174,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	23.546.931,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	27.800.243,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjuta Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	207.849.426,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga Kemasyarakatan	155.350.338,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	52.499.088,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**156.426.207,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	156.426.207,00			-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				65 Orang	117.163.087,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5 Orang	28.626.240,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	10.636.880,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**93.665.739,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	93.665.739,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	15.334.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	68.747.339,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	5.750.400,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	J U M L A H							**2.648.305.884,00**							**0,00**	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN TUMBANG MIRI KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN TUMBANG MIRI						**600.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**600.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**600.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**111.023.352,00**						**-**	**0,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.297.397,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5.463.420,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				27 Paket	20.873.991,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.831.986,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	42.128.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.680.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	4.680.000,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.045.955,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	11.379.301,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.145.848,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.520.806,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**488.976.648,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	488.976.648,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.443.154,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	288.966.045,00	Kab. Gunung Mas, Kahayan Hulu Utara, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	196.567.449,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	J U M L A H							**600.000.000,00**							**0,00**	

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahayan Hulu Utara Tahun 2025, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja Tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi,misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Kecamatan Kahayan Hulu Utara dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku dengan memperhatikan :

1. Penata personil sesuai dengan kompetensinya

2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan

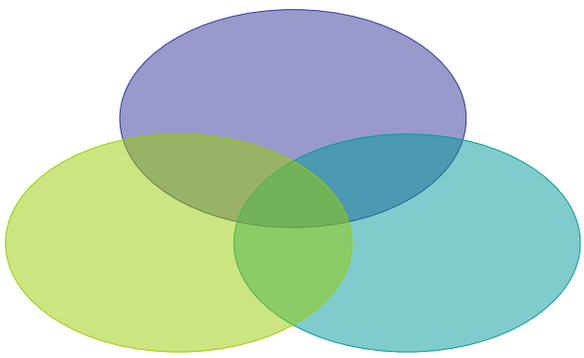
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (sesuai dengan amanat Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10)

4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi Aparatur Pemerintah melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi.

Akhirnya kata, Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten Gunung Mas ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

RENCANA KERJA
(RENJA)

KANTOR KECAMATAN RUNGAN HULU
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN RUNGAN HULU
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGAKAT DAERAH 5

2.1. Evaluasi Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun Lalu 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu..... 6

2.3. Isu – isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu..... 7

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 9

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 10

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 10

A. Tujuan 10

B. Sasaran 10

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RUNGAN HULU 11

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 11

A. Program 11

B. Kegiatan 11

C. Sub Kegiatan 12

BAB V. PENUTUP 15

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkahnya kepada Tim Penyusun Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun Anggaran 2025, sehingga penyusunan serta perencanaan anggaran belanja yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rungan Hulu Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun rencana perangkat daerah dengan berpedoman pada RKPD, dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Rungan Hulu memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Rungan Hulu. Penyusunan Renja Kerja Kecamatan Rungan Hulu Tahun 2025, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Rungan Hulu Tahun 2025 - 2026.

Rencana Kerja ini secara garis besar memberikan informasi mengenai Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Rungan Hulu guna pencapaian visi dan misi organisasi.

Pada akhirnya kami berharap bahwa dengan adanya Rencana Kerja ini akan dijadikan acuan bagi Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1(satu) tahun ke depan.

Tumbang Rahuyan, 18 Juli 2024

CAMAT RUNGAN HULU

JENGGO, S.Pd, SD., M.M

Pembina

NIP. 19690701199103100

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dalam regulasi tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan yang harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD. Renja PD disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya, Renja PD disusun berdasarkan pada RKPD.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan, yaitu mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam Renja PD mengandung strategi yang menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Rungan Hulu 2025 dengan dokumen - dokumen perencanaan lainnya adalah bahwa Renja Kecamatan Rungan Hulu sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Rungan Hulu 2025 memuat arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu satu tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rungan Hulu Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi bisa sesuai dengan peraturan di tingkat pusat maupun daerah. Adapun peraturan dan perundang-undangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentuhan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembar Negara RI No 18 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara RI No 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Menyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2026 yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Rungan Hulu.

1.3.2. Tujuan

a. Memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di Kecamatan Rungan Hulu baik Pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

b. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;

c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan Rungan Hulu.

d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

e. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun 2025 disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN RUNGAN HULU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Rungan Hulu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN RUNGAN HULU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rungan Hulu

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Sasaran dan Program/Kegiatan

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN RUNGAN HULU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Renja Kecamatan Rungan Hulu Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rungan Hulu dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Dalam bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Rungan Hulu tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan terlihat dalam Tabel 2.1 berikut :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, bidang ekonomi dan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kesejahteraan rakyat, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing–masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu di Kecamatan.

Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan Kecamatan Rungan Hulu terdiri dari :

2.2.1. PARIPURNA

a. Surat Keterangan Pindah Masuk dan Pindah Keluar
b. Surat Keterangan Perekaman E-KTP

2.2.2. REKOMENDASI

a. Surat Keterangan Tidak Mampu, Bantuan Sosial
b. Proposal Kelompok Tani dan Keagamaan

2.2.3 PENGESAHAN / LEGALISASI

a. SPPT (Surat Pernyataan Pemilik Tanah)

Dalam kurun waktu Empat tahun yang akan datang kinerja pelayanan Kecamatan Rungan Hulu dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana strategis tahun 2025– 2026. Adapun factor-faktor yang di perkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Faktor Perencanaan

   Perencanaan anggaran kas yang kurang efektif akan menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana penarikan dana per triwulan atau anggaran kas yang tercantum dalam DPA.

b. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa

   Adanya permasalahan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang ada dengan spesifikasi dalam dokumen perencanaan.

c. Faktor Regulasi

Kurangnya beberapa item barang pada penetapan standar satuan harga sebagai acuan harga setiap unit barang/jasa dalam kegiatan yang mengakibatkan kurang optimalnya penganggaran.

d. Faktor Internal

Penyesuaian harga karena adanya kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perubahan satuan maupun jumlah nominal pada rekening belanja. misalnya : kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan angkutan.

e. Faktor Administrasi

Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melalui survey pasar yang memadai menyebabkan nilai alokasi anggaran kegiatan menjadi tidak tepat.

2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rungan Hulu

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rungan Hulu, maka diperlukan tentang gambaran/keadaan Kecamatan Rungan Hulu saat ini. Adapun Gambaran/keadaan dan Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rungan Hulu adalah sebagai Berikut :

2.3.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat Desa;
- Belum efektifnya pengawasan melekat;
- Masih kurangnya kesadaran masyarakat.

b. Permasalahan

- Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan;
- Kualitas sumber daya manusia melum merata;
- Belum tercukupinya kebutuhan pegawai di kecamatan
- Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2.3.2. Bidang Ekonomi

a. Kondisi

- Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
- Kurangnya masyarakat menekuni bidang pertanian dan perkebunan;
- Hanya terdapat satu pasar tradisional yang belum difungsikan;
- Kurang minatnya masyarakat menekuni bidang kerajinan dan ekonomi kreatif;

b. Permasalahan

- Belum Optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dalam kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pertanian PD maupun sumber dana;
- Belum digarapnya potensi wisata Situs Betang Tumbang Anoi dan Situs Makam Damang Pijar.
- Kecamatan Rungan Hulu secara geografis bukan terletak pada simpul jalan sehingga tidak menguntungkan untuk perkembangan sektor pertanian, pergadangan dan industri.

2.3.3. Bidang Fisik dan Prasarana

a. Kondisi

- Belum adanya listrik yang dapat dipergunakan 24 jam;
- Belum adanya jaringan telekomunikasi yang dapat di akses penuh;
- Ruas jalan dari kecamatan sampai desa masih belum beraspal;
- Masih kurang memadainya jalan dan jembatan untuk jalur transportasi angkutan barang;
- Air sungai keruh terlebih saat musim penghujan.

b. Permasalahan

- Belum adanya akses jaringan listrik yang masuk
- Masih tinggi dan mahalnya biaya dalam mengakses internet yang dikelola masyarakat
- Sering terjadinya lakalantas saat musim penghujan;
- Rawan bencana banjir pada musim penghujan.

2.3.4. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi

- Masih Pengangguran/kenakalan remaja cukup meresahkan;
- Masih Tingginya Angka anak putus sekolah tingkat SLTP;
- Masih tingginya pernikahan anak dibawah umur;

b. Permasalahan

- Kurangnya lapangan pekerjaan dan kegiatan kepemudaan;
- Kurangnya peran orang tua dalam mengawasi kegiatan si anak;
- Kurangnya sarana olah raga, kesenian dan hiburan tempat anak berkreasi.

2.4. Rewiew terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Rungan Hulu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Rungan Hulu, terkait prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan pada Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas. Telaahan rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan terlihat pada pada Tabel 2.4 berikut :

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan juga Peraturan Bupati 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam melaksanakan amanah Peraturan tersebut diatas, maka Kecamatan Rungan Hulu mempunyai prioritas dan sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan pada setiap periode tahun anggaran, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan akan sesuai dengan keinginan bersama dan dapat dicapai secara maksimal.

A. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka tertentu dalam hal ini adalah jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dimana tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Dimana indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RUNGAN HULU

4.1. Program dan Kegiatan

A. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2025, maka ditetapkan 6 (Enam) Program Kerja yang harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

B. Kegiatan

Untuk menunjang dari pada program tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2024 ditetapkanlah 17 (Tujuh Belas) Kegiatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
12. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
14. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
15. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

C. Sub Kegiatan

Untuk menunjang dari pada kegiatan tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkanlah 61 (Enam Puluh Satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
8. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.Triwulan/Semesteran SKPD;
10. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
11. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
12. Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
13. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah;
14. Pengolahan Data Retribusi Daerah;
15. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
16. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
21. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
23. Penyediaan Bahan/Material;
24. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
25. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
26. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
27. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
28. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
29. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PErizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
34. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
35. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
37. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
38. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
39. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan;
40. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
41. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
42. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
43. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
44. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
45. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukna oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
46. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
47. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
48. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan;\
49. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
50. Evaluasi Kelurahan;
51. Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
52. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
53. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
54. Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
55. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
56. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
57. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
58. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

59. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
60. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
61. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Rungan Hulu untuk Tahun 2025 berkaitan sesuai arsitektur perencaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasionsal, program dan kegiatan di pisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di sesuaikan dengan pendanaan seperti terdapat pada Tabel 4.1 berikut :

BAB. V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Rungan Hulu selama 1 (satu) tahun ke depan, mengakomodir dari perencanaan pembangunan, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap sektor pembangunan daerah di Kecamatan Rungan Hulu nantinya. Perencanaan dan penganggaran pada tiap program dan kegiatan, baik rutin maupun fisik pembangunan (pengadaan fasilitas perkantoran) merupakan prioritas penganggaran di Kantor Kecamatan Rungan Hulu pada tahun 2025.

Program dan kegiatan pada Rencana Kerja 2025 menyesuaikan atau mengadopsi dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kantor Kecamatan Rungan Hulu Tahun 2024. Dengan tersusunnya Rencana Kerja 2025 ini, kiranya mampu mengapresiasikan kehendak serta tuntutan perkembangan pembangunan di segala sektor yang sehingga dalam pelaksanaan tugasnya ASN di Kecamatan Rungan Hulu mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dari tahun ke tahun.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 dan kiranya dapat dapat menjadi tolok ukur dalam menyusun perencanaan tahun – tahun yang akan datang. khususnya untuk Kantor Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas.

RENCANA KERJA TAHUN 2025
SKPD KECAMATAN RUNGAN HULU KABUPATEN GUNUNG MAS

DIBUAT DI : TUMBANG RAHUYAN
PADA TANGGAL : 18 JULI 2024

CAMAT RUNGAN HULU

JENGGO, S.Pd, SD., M.M
Pembina
NIP. 19690701199103100

Tabel T-C.19.
EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KECAMATAN RUNGAN HULU

Formulir 8

No	kode	Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. II (2023)		Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RENJA TW. II 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW II (2023)		Ket
1	2	3	4	5		5		6		7		8= 7/6 x 100 %		9 = 5 + 7		10
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	7	Urusan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN														
2	7 01	Bid. Urusan : 7.01 KECAMATAN														
3	7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**														
4	7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
5	7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				28 Buku	Rp 2.928.600	36 Dokumen	Rp 2.760.000	100%	Rp 2.760.000	100%	Rp -			
6	7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12	Rp 75.816.860	12 Laporan	Rp 2.369.200	96%	Rp 2.273.200	96%	-Rp 96.000			
7	7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**														
8	7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17 orang	Rp 1.615.173.881	18 Orang	Rp 1.776.288.525	57%	Rp 1.015.374.242	57%	-Rp 760.914.283			
9	7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**														
10	7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				2 Kali	Rp 14.080.032	10 Orang	Rp 29.720.000	0%	Rp -	0%	-Rp 29.720.000			
11	7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
12	7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10	Rp 1.335.000									
13	7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5	Rp 99.153.000	10 Paket	Rp 141.810.825	99%	Rp 140.037.000	99%	-Rp 1.773.825			
14	7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7	Rp 9.250.000									
15	7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30	Rp 16.919.100	41 Paket	Rp 58.524.767	68%	Rp 39.874.547	68%	-Rp 18.650.220			
16	7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12650	Rp 5.283.600	6803.4425 Lembar	Rp 2.721.377	78%	Rp 2.123.200	78%	-Rp 598.177			
17	7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material				-	-	1 Paket	Rp 32.493.971	0%	Rp -					
18	7 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu				2	Rp 52.997.780									
19	7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100	Rp 123.259.330	100 laporan	Rp 60.025.500	77%	Rp 46.156.400	77%	-Rp 13.869.100			
20	7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**														
21	7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				3	Rp 776.100.078									
22	7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8	Rp 10.394.800	2 Unit	Rp 159.129.916	83%	Rp 131.623.290	83%	-Rp 27.506.626			
23	7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
24	7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp 31.292.530	4 Laporan	Rp 2.000.000	100%	Rp 2.000.000	100%	Rp -			
25	7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp 19.775.000	8 Laporan	Rp 16.890.000	15%	Rp 2.500.000	15%	-Rp 14.390.000			
26	7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				25	Rp 266.741.788	12 Laporan	Rp 513.357.598	53%	Rp 272.834.244	53%	-Rp 240.523.354			
27	7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
28	7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7	Rp 61.754.904	15 Unit	Rp 65.692.100	65%	Rp 42.738.300	65%	-Rp 22.953.800			
29	7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**														
30	7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**														
31	7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Desa/Kelurahan	Rp 63.044.326	12 Laporan	Rp 5.994.000	59%	Rp 3.550.000	59%	-Rp 2.444.000			
32	7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**														
33	7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3	Rp 14.771.500	3 Dokumen	Rp 17.668.131	45%	Rp 7.880.860	45%	-Rp 9.787.271			
34	7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**														
35	7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**														
36	7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3	-	1 Unit	275.333.874	91%	Rp 249.401.804	91%	-Rp 25.932.070			
37	7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5	-	1 Pokmas/Ormas	Rp 273.520.469	35%	Rp 96.668.869	35%	-Rp 176.851.600			
38	7 01 03 2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**														
39	7 01 03 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				3	-	100 Unit	Rp 5.764.611	0%	Rp -	0%	-Rp 5.764.611			
40	7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**														
41	7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**														
42	7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5	Rp 86.267.096	5 Laporan	Rp 10.826.000	100%	Rp 10.777.000	100%	-Rp 49.000			
43	7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**														
44	7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**														
45	7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				3	Rp 28.095.000	25 Orang	Rp 236.466.750	10%	Rp 22.500.000	10%	-Rp 213.966.750			
							Rp 3.374.434.205		***Rp 3.689.357.614***		***Rp 2.091.072.956***					

kolom 1 diisi nomor urut
kolom 2 diisi kode urusan ,bidang urusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan
kolom 3 diisi nama urusan / Bidang urusan serta nama program, kegiatan dan sub kegiatan
kolom 4 diisi dengan indikator kinerja program (outcome) /kegiatan dan Subkegiatan (output) sesuai dengan didokumen RENJA
kolom 5 K = diisi realisasi kinerja Rp = realisasi anggaran tahun 2021
kolom 6 K = diisi dengan target kinerja dan Rp = anggaran yang direncanakan tahun 2022 pada dokumen **RENJA**
kolom 7 K = diisi realisasi capaian target kinerja Rp = realisasi anggaran sampai dengan TW.I
Kolom 8 K = diisi sesuai dengan rumus yang ada Rp = diisi sesuai dengan rumus yang ada
Kolom 9 K dan Rp = diisi sesuai rumus yang ada
Kolom 10 diisi keterangan **contoh sub kegiatan ini tidak muncul di APBD atau Sub kegiatan ini muncul di APBD tapi tidak di RENJA.**

Tumbang Rahuyan, 30 Juni 2023
CAMAT RUNGAN HULU,

JENGGO, S.Pd, SD., MM
Pembina IV/a
NIP. 19690701 199103 1 009

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Kabupaten Gunung Mas

Nama SKPD : KECAMATAN RUNGAN HULU KABUPATEN GUNUNG MAS

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.
					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	**1**				**KECAMATAN**				**3,653,515,969**					**3,653,515,969**	
7	**1**	**1**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persentase peningkatan SDM Aparatur; Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu;			**2,826,041,419**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan dalam pelayanan administrasi Kantor ;Persentase sarana dan prasarana terawat dengan baik; Persentase kesiplinan pegawai; Persentase peningkatan SDM Aparatur; Persentase penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu; Persentase			**2,826,041,419**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan baik			**77.850.000**	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan dengan baik			**77.850.000**	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA/RKA Perubahan dan DPA/DPPA	Tumbang Rahuyan	28 Buku	1,350,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Tumbang Rahuyan	28 Buku	1,350,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan dan terukurnya tingkat kinerja aperatur pemerintah Kecamatan Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	12 Laporan	76,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Anggaran Kinerja SKPD yang tersusun	Tumbang Rahuyan	12 Laporan	76,500,000	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daera**				**2.040.515.479**	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan dengan baik			**2.040.515.479**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		17 orang	2,040,515,479	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Tumbang Rahuyan	17 orang	2,040,515,479	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**50.021.600,00**	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin dan SDM Aparatur Berkelanjutan			**50.021.600,00**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengk	Terlaksananya disiplin aparatur pegawai Kecamatan		35 Stell	27,201,020				35 Stell	27,201,020	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya jumlah keikutsertaan mengikuti bimtek		2 Kali	22,820,580	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Kecamatan Damang Batu	2 Kali	22,820,580	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**283,746,540**	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terakomodirnya Kebutuhan/Keperluan Dinas dalam melaksanakan Tugas			**283,746,540**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan listrik		10 jenis	10,828,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang tersedia dari Komponen Kelistrikan Kantor	Tumbang Rahuyan	10 jenis	10,828,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor		5 jenis	73,140,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Barang tersedia dari Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD	Tumbang Rahuyan	5 jenis	73,140,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga		7 Jenis	7,800,000				7 Jenis	7,800,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		30 jenis	146,266,540	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis barang ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Tumbang Rahuyan	30 jenis	146,266,540	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pekerjaan menjadi lancar dan tertib		12650 Lembar	6,400,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen tersedia dari Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	Tumbang Rahuyan	12650 Lembar	6,400,000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minim rapat dan tamu		2 jenis	39,312,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Barang dalam memfasilitasi Kunjungan Tamu di Kantor	Tumbang Rahuyan	2 jenis	39,312,000	
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**77,936,400**	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kelengkapan Penunjang sebagai pendukung kelancaran kerja			**77,936,400**	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional		3 Unit	67,980,900	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Tumbang Rahuyan	3 Unit	67,980,900	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor		8 Unit	9,955,500				8 Unit	9,955,500	
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**174,452,000**	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang untuk kelancaran Operasional Dinas			**174,452,000**	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	umlah Materai yang digunakan sebagai Bukti keabsahan Dokumen	Tumbang Rahuyan		5,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Jasa Internet yang tiap bulan Paket/Kuota	Tumbang Rahuyan		21,600,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya peralatan dan alat kebersihan gedung kantor kecamatan dan kelurahan		25 Jenis	147,852,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tumbang Rahuyan	25 Jenis	147,852,000	
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**121,519,400**	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Aset yang dimiliki Kecamatan dan Kelurahan secara			**121,519,400**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/opersional		7 Unit	64,927,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Tumbang Rahuyan	7 Unit	64,927,400	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56,592,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	umlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang	Tumbang Rahuyan		56,592,000	
7	**1**	**2**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaayanan Publik**				**65,100,000**	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan dan Urusan Pemerintah yang			**65,100,000**	
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**10,000,000**	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bersinergi dan Terkelolanya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**10,000,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		9 Desa/Kelura	10,000,000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tumbang Rahuyan	9 Desa/Kelura	10,000,000	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**				**55,100,000**	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Damang Batu			**55,100,000**	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kegiatan PKK dan Dharma		3 Jenis	26,300,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terencana terhadap Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tumbang Rahuyan	3 Jenis	26,300,000	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Desa di wilyah Kecamatan		8 Desa	28,800,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam pelaksanaan Percepatan Pencapaian SPM di	Tumbang Rahuyan	8 Desa	28,800,000	

7	**1**	**3**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**				**673,763,300**	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase daerah bawahan yang dibina; Persentase pembinaan sosial,			**673,763,300**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**671,227,700**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terkelolanya Perencanaan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Evaluasi di Wilayah Kerja Kelurahan			**671,227,700**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan di kelurahan		250 Meter	577,472,500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan yang dikerjakan	Tumbang Rahuyan	250 Meter	577,472,500	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Posyandu, PKK dan Pembinaan RT/RW		3 jenis	93,755,200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	Tumbang Rahuyan	3 jenis	93,755,200	
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**2,535,600**					**2,535,600**	
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Penunjang fasilitas kegiatan gotong royong masyarakat		3 Jenis	2,535,600				3 Jenis	2,535,600	
7	**1**	**4**			**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**58,857,250**	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat umum			**58,857,250**	
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**58,857,250**	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Rungan Batu			**58,857,250**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		5 Jenis	58,857,250	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan	Tumbang Rahuyan	5 Jenis	58,857,250	
7	**1**	**5**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**28,770,000**	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi pimpinan di wilayah kerja Kecamatan			**28,770,000**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**28,770,000**	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Terkoordinasinya Forum Pimpinan di Kerja Kecamatan			**28,770,000**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terbinanya anggota Paskibraka Kecamatan Rungan Hulu		3 Jenis	28,770,000				3 Jenis	28,770,000	
7	**1**	**6**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**984,000**	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerinta	Persentase partisipatif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; Persentase desa yang sudah terbina dalam			**984,000**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**984,000**	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya sebagian Tupoksi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Rekomendasi, Pembinaan dan			**984,000**	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya kegiatan pemilihan Kepala Desa		4 Jenis	984,000				4 Jenis	984,000	
								TOTAL	**3,653,515,969**					**3,653,515,969**	

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
Kecamatan Rungan Hulu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun (n-1)	Target Tahun n
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan publik Responsif dan Akuntabel	- Meningkatnya Pelayanan Kecamatan - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Prosentase Capaian Layanan Publik - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	84,15%	100%

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN RUNGAN HULU KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN RUNGAN HULU						**3.413.850.386,00**							**3.713.728.993,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.413.850.386,00**							**3.713.728.993,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.413.850.386,00**							**3.713.728.993,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.881.538.758,00**						**-**	**3.258.182.616,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.322.800,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	19.322.800,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	7.560.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.560.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				10 Dokumen	5.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.786.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	5.976.800,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.976.800,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.165.942.016,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.265.942.016,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	2.165.942.016,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.265.942.016,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.032.500,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-	-	37.032.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	63.032.500,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	-		37.032.500,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	410.020.977,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	392.854.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	169.940.663,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		150.800.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	66.326.314,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		68.300.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket	3.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.800.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	169.954.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		169.954.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	55.931.425,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	32.431.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	23.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32.431.425,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		32.431.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.818.740,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	418.130.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	3.130.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.130.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	56.688.740,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		400.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	92.470.300,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	92.470.300,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	92.470.300,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		92.470.300,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**12.917.034,00**						**-**	**10.200.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	12.917.034,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	10.200.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	12.917.034,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		10.200.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**150.133.299,00**						**-**	**76.085.082,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	118.121.250,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	44.755.657,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	118.121.250,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		44.755.657,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Tumbang Rahuyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		25.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	7.012.049,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-	-	6.329.425,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				5 Unit	7.012.049,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup	-		6.329.425,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**10.969.430,00**						**-**	**10.969.430,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	10.969.430,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	10.969.430,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	10.969.430,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.969.430,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**358.291.865,00**						**-**	**358.291.865,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	358.291.865,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	358.291.865,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	358.291.865,00	Kab. Gunung Mas, Rungan Hulu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		358.291.865,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	J U M L A H							**3.413.850.386,00**							**3.713.728.993,00**	

RENJA

DP2KBP3A KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Kuala Kurun Kode Pos 74511

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hikmat, berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Recana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluaraga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 ini di susun agar dapat dijadikan pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat memenuhi pelayanan pembangunan sesuai dengan rencana Kebijakan Nasional, RPJMD Kabupaten Gunung Mas dan Renstra SKPD serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada pencapaian rencana kerja tahun 2025.

Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih atas dalam pelayanan pembangunan di daerah.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, demi tercapainya kesempurnaan Rencana Kerja ini maka di harapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka kesempurnaan RENJA SKPD yang representatif dan lebih baik.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas,



dr.RINA SARI,M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19770925 2005012012

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I.	Pendahuluan	1
BAB II.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu	6
BAB III.	Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A	51
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	76
BAB V.	Penutup	77

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Untuk melaksanakan program yang terarah, terukur dan terkendali maka perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, disamping itu juga berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta menyatukan visi, misi, persepsi, strategi bagi seluruh aparatur pemerintah dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta sebagai landasan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja pada tahun yang akan datang terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dengan berdasarkan kebijakan yang terkait antara lain :

1. Undang – undang No 5 Tahun 2005 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 11

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274).

17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Derah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20).

18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dimaksud untuk menjabarkan perencanaan pembangunan sesuai dengan urusan wajib, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun anggaran 2025 yang dituangkan dalam program, kegiatan sampai Sub kegiatan Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 bertujuan untuk mensinergikan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Perangkat Darah dengan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah dan RPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2025-2026.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 L atar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP2KBP3A TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DP2KBP3ATahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP2KBP3A

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DP2KBP3A TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja dan Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Evaluasi yang dilakukan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sejak tahun 2023 untuk dilakukan perbandingan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra.

Cakupan telaahan yang dievaluasi dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pencapaian pernyataan perjanjian kinerja tahun 2023,keberhasilan dalam pencapaian indicator sangat baik terbukti dari 4 indikator pada perjanjian kinerja rata -rata 97%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel 2.1.1.
3. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja sasaran renstra DP2KBP3A tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.1.

a. Program/kegiatan yang tidak terpenuhi dalam pencapaian target kinerja sasaran sesuai Renstra, disebabkan karena minimnya atau kecilnya alokasi anggaran yang ditetapkan dari APBD untuk DP2KBP3A dan juga adanya rasionalisasi kegiatan tahun 2023.
b. Program/kegiatan tidak ada keserasian atau sinergitas dari Indikator Kinerja Program berupa ukuran atas hasil (outcome) dengan Indikator Kinerja sesuai sasaran renstra, sehingga alokasi penggunaan anggaran tidak efesien. Hal ini disebakan adanya kesalahan dalam perumusan untuk usulan kebutuhan program dan kegiatan yang tidak mengacu pada dokumen Renstra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP2KBP3A.

Berdasarkan gambaran umum capaian target kinerja sasaran strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak secara keseluruhan dilakukan kategori capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja yang terlihat pada tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DP2KBP3A sampai dengan Tahun 2023 berikut ini :

Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra DP2KBP3A sampai dengan Tahun 2023

No	kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Keluaran), Kegiatan dan Subkegiatan (Outcome/ Hasil)	Target dan Anggaran 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. IV (2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Ket
1	2				3	4	5		6		7= 6/5 x 100 %		10
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
	2	08	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			49.999.880		49.424.400			
	2	08	02	2.01	03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Adanya Pelatihan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabuapten Gunung Mas (PPRG) Pelatihan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Kabuapten Gunung Mas	1 keg	49.999.880	1keg	49.424.400	1keg	98,85	Ada di Renja Dan APBD
	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			49.999.890		49.710.900			
	2	08	02	2.02	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Adanya Bimbingan Usaha Bagi Perempuan Kepala Keluarga	60 Org	49.999.890	1keg	49.710.900	1keg	99,42	Ada di Renja Dan APBD
	2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			525.000.000		525.000.000			

	2	08	02	2.03	01				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	525.000.000	3 Organisasi	525.000.000	3	100,00	Tidak ada di Renja tetapi di APBD ada
	2	**08**	**03**				**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										
	2	**08**	**05**				**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**										
	2	**08**	**05**	**2.01**				**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**82.572.224**		**81.301.064**			
	2	08	05	2.01	01				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data Gender dan Anak kabupaten/Kota yang tersedia Terlaksananya pertemuan Forum Data	1 Keg	82.572.224	1keg	81.301.064	1keg	98,46	Ada di Renja Dan APBD
	2	**08**	**06**				**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**										
	2	**08**	**06**	**2.02**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**				**127.015.905**		**117.063.928**			
	2	08	06	2.02	01				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewengan kabupaten/Kota Tersedianyan layanan peningkatan kualitas hidup anak(Layanan PUSPAGA)	12 Kec	80.892.628	12 kec	79.086.628	0	97,77	Ada di Renja Dan APBD
	2	08	06	2.02	03				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peran Forum anak sebgai 2P(Pelopor dan Pelapor di Kabupaten Gunung Mas	12 Kec	46.123.277	12 kec	37.977.300	0	82,34	Ada di Renja Dan APBD
	2	**08**	**07**				**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**										
	2	**08**	**07**	**2.02**				**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**232.804.848**		**229.849.142**			

	2	08	07	2.02	01				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan Kabupaten/kota	5 kasus	210.862.391	0	208.593.842	0	98,92	Ada di Renja Dan APBD
	2	08	07	2.02	04				Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Pembinaan Forum PUSPA	12 Kec	21.942.457	0	21.255.300	0	96,87	Ada di Renja Dan APBD
	2	**08**	**07**	**2.03**				**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**37.429.014**		**30.731.800**			
	2	08	07	2.03	02				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terlaksananya FPK2PA di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Gunung Mas	1keg	37.429.014	1 keg	30.731.800	0	82,11	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**												
	2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											
	2	**14**	**01**	**2.01**				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**16.399.657**		**12.942.000**			
	2	14	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD Tersusunnyan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.254.000	1 Dok	2.004.000	0	0,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA -SKPD Tersusunnyan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.920.357	1 Dok	3.414.000	0	0,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.01	06				Koordinasi danPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya Penyusunan Laporan Bulanan realisasi anggaran (TEPRA)dan Laporan SAKIP	12 bulan	9.225.300	12 bulan	7.524.000	0	81,56	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.02**				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.707.463.688**		**3.540.367.472**			
	2	14	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bln	3.634.438.760	3 Bulan	3.475.984.988	3 Bulan	95,64	Ada di Renja Dan APBD

	2	14	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	37.690.864	3bln	35.859.264	3 bln	95,14	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Adanya Penyusunan Laporan keuangan semesteran Penyusunan Laporan keuangan semesteran	2 Semester	35.334.064	3bln	28.523.220	3bln	80,72	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.05**				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**70.000.000**		**58.750.000**			
	2	14	01	2.05	02				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia Terlaksnanyan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	65stel	52.000.000	65 stel	52.000.000	0	100,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.05	11				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan jasa tenaga pendukung Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	4 Orang	18.000.000	3	6.750.000	0	37,50	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.06**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**781.919.039**		**744.452.116**			
	2	14	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Adanya Penyediaan Komponen dan instalasi listrik	12 bulan	8.337.500	12 bulan	8.337.500	0	100,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Adanya Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	22.221.091	12 bulan	9.618.100	0	43,28	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang undangan	Adanya Penyediaan bahan bacaan/koran	4 jenis	7.176.000	4 jenis	6.720.000	0	93,65	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.06	07				Penyediaan Bahan/Material	Adanya Penyediaan Alat Tulis Kantor	41 Jenis	62.630.256	41 jenis	61.327.678	0	97,92	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	681.554.192	12 bulan	658.448.838	0	96,61	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.07**				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**707.020.950**		**698.462.000**			
	2	14	01	2.07	02				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Terlaksnanyan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 unit	523.809.000	1 unit	515.722.000	0	0,00	tidak ada di Renja di APBD ada

	2	14	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebel yang di adakan Terlaksananya pengadaan Mebel	15 unit	52.947.000	15 unit	52.840.000	0	0,00	tidak ada di Renja di APBD ada
	2	14	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya pengadaan Perlengkapan gedung kantor	11unit	130.264.950	11 unit	129.900.000	0	99,72	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.08**				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**301.526.864**		**279.380.014**			
	2	14	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Adanya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.000.000	12 bulan	2.000.000	0	100,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Adanya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	60.030.000	12 bulan	43.249.950	0	72,05	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Adanya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	239.496.864	12 bulan	234.130.064	0	97,76	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**01**	**2.09**				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**228.156.414**		**184.796.076**			
	2	14	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan	41.526.405	12 bulan	39.597.899	0	95,36	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	158.130.537	12 bulan	117.463.177	0	74,28	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	41 Unit	28.499.472	41 unit	27.735.000	0	97,32	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											
	2	**14**	**02**	**2.02**				**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				**319.800.082**		**303.155.764**			
	2	14	02	2.02	02				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Rumah data yang di kelola datanya Tersedianya data kependudukan	4 kali	79.800.082	4 kali	74.920.764	0	93,89	APBD tapi tidak di RENJA.
	2	14	02	2.02	09				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah kecamatan yang di bina dan di awasi penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 kec	64.200.000	12 kec	58.435.000	0	91,02	APBD tapi tidak di RENJA.

	2	14	02	2.02	12				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Faskes yang melapor data keluarga Tercatatnya data keluarga pada wilayah kerja	23 Faskes	103.800.000	23 faskes	97.800.000	0	94,22	Tidak ada di Renja tetap di APBD ada
	2	14	02	2.02	13				Pengelolahan dan pelaporan Data Pengendalian Lapangan Pelayanan KB	Jumlah Petugas yang mengelola dan melapor data Pengendalian Lapangan Pelayanan KB Tersedianya data Pengendalian Lapangan Pelayanan KB	12 balai Penyuluh KB	72.000.000	12 balai Penyuluh KB	72.000.000	0	100,00	Tidak ada di Renja tetap di APBD ada
	2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											
	2	**14**	**03**	**2.01**				**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**				**1.263.430.000**		**1.038.357.424**			
	2	14	03	2.01	01				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Adanya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Keg	80.000.000	1 Keg	62.688.400	0	78,36	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.01	02				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Adanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Kec	46.000.000	12 Kec	12.517.100	0	27,21	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.01	04				Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Materi KIE Program Banggakencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan Tersedianya Materi KIE Program Banggakencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan	3 jenis	150.000.000	3 jenis	125.140.000	0	83,43	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.01	06				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Adanya Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui RapatKoordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	12 kec	156.000.000	12 kec	116.144.010	0	74,45	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.01	07				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dukungan untuk Pengelola Operaional Balai Penyuluh KB di tiap Kecamatan	12 kec	577.800.000	12 kec	553.121.656	0	95,73	Ada di Renja Dan APBD

	2	14	03	2.01	08			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pertemuan/Rapat Koordinas Audit Kasus stunting Terlaksananya Pertemuan/Rapat Koordinasi Tim Pakar Audit Kasus stunting	12 Kec	253.630.000	12 Kec	168.746.258	0	66,53	APBD tapi tidak di RENJA.
	2	**14**	**03**	**2.02**				**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**			**1.156.260.099**		**979.162.094**			
	2	14	03	2.02	01			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Adanya Pembinaan dan Pelatihan Kader PPKBD	88 Kader PPKBD yang tidak ada PKB/PLKB	176.000.000	88 Kader PPKBD yang tidak ada PKB/PLKB	72.000.000	0	40,91	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.02	03			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,Penggerakan,Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan Pengembangan Program Bangga Kencana	12 Laporan	726.260.099	12 Laporan	653.162.094			Tidak ada di Renja tetapi di APBD ada
	2	14	03	2.02	04			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)	Adanya insentif untuk Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)	127 PPKBD	254.000.000	127 PPKBD	254.000.000	0	100,00	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**03**	**2.03**				**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**			**189.076.000**		**187.559.323**			
	2	14	03	2.03	01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obta Kontrasepsi dan sarana Penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Adanya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obta Kontrasepsi dan sarana Penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Faskes	49.800.000	18 Faskes	48.939.664	0	98,27	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.03	03			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pelayanan Bakti Sosial IBI-KB Kes Tingkat Kabupaten	12 kec	65.776.000	12 kec	65.455.467	0	99,51	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.03	08			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Bimbingan dan Konseling Calon Pengantin	4 Kali	13.500.000	4 Kali	13.277.792	0	98,35	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.03	11			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Adanya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Kali	60.000.000	6 Kali	59.886.400	0	99,81	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**03**	**2.04**				**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			**417.514.956**		**413.837.680**			

	2	14	03	2.04	02				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kampung berkualitas yang di Intervensi dengan melibatkan OPD Terlaksananya Intervensi bersama OPD Terkait	23 Kampung KB	9.000.000	23 Kampung KB	8.503.260	0	94,48	tidak ada di Renja Tetapi di APBD ada
	2	14	03	2.04	03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Operasional Penggerakan di Kampung KB	23 Kampung KB	356.500.000	23 Kampung KB	353.589.120	0	99,18	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	03	2.04	04				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Adanya Pembinaan Terpadu Kampung KB	23 Kampung KB	52.014.956	23 Kampung KB	51.745.300	0	99,48	Ada di Renja Dan APBD
	2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											
	2	**14**	**04**	**2.01**					**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**			**1.870.864.006**		**1.674.283.437**			
	2	14	04	2.01	02				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Adanya Pengadaan BKB KIT Stunting	20 unit	360.000.000	20 unit	349.260.000	0	97,02	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	04	2.01	03				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Adanya pelatihan untuk Kader BKB Terlatihanya Kader BKB	4kali	160.000.000	4kali	122.097.954		76,31	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	04	2.01	04				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Adanya Pembinaan Kelompok UPPKS	3 keg	200.000.000	3 keg	182.833.200	0	91,42	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	04	2.01	06				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Adanya Rapat Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	381 TPK	800.100.000	381 TPK	730.800.000	0	91,34	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	04	2.01	07				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Adanya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Kec	113.764.006	12 Kec	89.920.218	0	79,04	Ada di Renja Dan APBD
	2	14	04	2.01	08				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjut usian serta pengelolaan keuangan Keluarga)	Adanya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 kali	237.000.000	6 kali	199.372.065	0	84,12	Ada di Renja Dan APBD
									TOTAL			**12.134.253.516**		**11.198.586.634**		**92,29**	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP2KBP3A

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai kondisi dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Analisis kinerja pelayanan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas.

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)
A.	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**														
1	Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR)			67	62	57	56	55	54	62,33	65,70	53,10	54	50	
2.	iBangga			n/a	50,58	51,00	56,76	58,40	60,13	51,00	51.60	59,76	60.13	62.00	
3.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			1,86	1,81	1,76	1,71	1,66	1,63	1,99	1,96	1,93	1,63	1,90	
4.	Total Fertility Rate (TFR)			2,76	2,57	2,50	2,45	2,40	2,35	2,50	2,42	2,34	2,35	2,24	
5.	Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)			76,78	78,52	79,10	79,35	80,12	80,53	81,50	66,36	64,03	80,53	80,54	
6.	Unmeet Need			14,7	13,23	11,90	11,90	11,55	10,68	8,32	11,38	6.47	10,68	5,00	
7.	Persentanse pengguna MKJP			15,98	16,10	16,98	17,32	18,92	20,53	16,00	14,92	29,60	20,53	30,60	
8.	Cakupan Keluarga punya balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (BKB)			n/a	41,96	50	60	65	70	-	11,07	24,87	24,95	25,00	
9.	Prevalensi Stunting			32,83	22,87	20,65	18,43	16,21	13,99	35,90	17,60	12,9	13	11,00	
10.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi			n/a	25	30	35	40	50	250	233	250	250	260	

	dan Konseling (BKR dan PIK-R)														
11.	Kelompok BKL yang terbina			1	1	1	2	3	3	12	17	49	50	5	
12.	Cakupan Akseptor KB anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA)			n/a	55	60	65	65	70	19,04	23,21	42,02	70	45,00	
B.	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**														
13.	Persentanse ARG pada belanja langsung APBD			n/a	n/a	5	5	5	5	1,52	1,18	1,93	2,00	2,20	
13.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender			n/a	n/a	40	45	50	54	66,66	81,21	100	100	100	
14.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG**)**			88,91	88,22	89,58	89,90	90,15	90,45	88,71	89,15	89,29	90,45	90,54	
15.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			92,10	92,09	92,49	92,54	92,65	92,70	91,99	92,18	92,38	92,70	94,41	
16.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			n/a	n/a	n/a	55,17	62,52	69,87	54,13	57,38	57,38	69,87	69,89	
17.	Capaian Kabupaten Layak Anak			100	200	500	800	910	1000	283	214,55	-	400	501	
18.	Persentanse Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatakan Layanan Komprehensif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Rasio KDRT			0,016	0,013	0,010	0,008	0,008	0,008	0,015	0,002	0,007	0,005	0.004	
20.	Persentanse anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting

Penyelengaraan Tugas dan Fungsi DP2KBP3A

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tahun 2023, dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran sesuai renstra Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, maka permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pembangunan merupakan isu-isu penting yang kaitanya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian, Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

A. Isu yang di hadapi :

1. Pemahaman tentang pentingnya Program Bangga Kencana oleh semua S*takeholders*
2. Kebijkan satu data kependudukan adalah kebijkan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutahir, terpadu dan dapat di pertanggungjawabkan Kebenaranya.
3. Persepsi negatif efek dari alat kontrasepsi (jerawatan, meningkatkan nafsu makan, menyebabkan obesitas)
4. Masih beredar mitos tentang alat kontrasepsi Implan yang dapat pindah tempat/ bergeser dari tempat yang dipasang
5. Masih adanya kepercayaan terhadap pepatah lama banyak anak banyak rejeki tanpa mempertimbangkan sisi Kesehatan ibu dan bayi serta kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga
6. Penggunaan Media Sosial/HP secara berlebihan tanpa pengawasan orang tua memberikan dampak negatif terhadap perilaku dan pola hidup remaja, seperti tidak perduli pada lingkungan, bergadang, pornografi dan cyber bullying
7. Penelantaran Lansia masih sering terjadi

Rencana kerja (RENJA)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025

8. Ketergantungan keluarga untuk pemenuhan pangan keluarga kepada pedagang musiman
9. Kurangnya partisipasi lembaga/organisasi masyarakat dalam pelaksanaan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
10. Data dan Informasi Gender dan Anak sangat dibutuhkan sebagai masukan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah di semua bidang, tidak terkecuali Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
11. Tingkat kepedulian masyarakat masih kurang dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan yang berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terkait dengan prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang sudah disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasi untuk setiap program/kegiatan.

Tabel 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**12.142.279.732,00**		**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**12.142.279.732,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**12.142.279.732,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.142.279.732,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**7.098.950.782,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**7.098.950.782,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.787.760.342,00**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.787.760.342,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.377.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.377.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.150.000,00	-		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.150.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.974.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.974.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2.308.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2.308.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	1.945.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	1.945.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.159.731.999,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.159.731.999,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.101.541.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.101.541.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.045.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.045.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	28.145.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	28.145.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	136.897.672,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	136.897.672,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	97.033.980,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	97.033.980,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	39.863.692,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	39.863.692,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	569.246.984,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	569.246.984,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.998.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.998.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				

		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.176.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.176.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Bahan/Material					Penyediaan Bahan/Material				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.999.644,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.999.644,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.073.140,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.073.140,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	305.047.600,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	305.047.600,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.047.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.047.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	284.703.500,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	284.703.500,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	222.673.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	222.673.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	278.755.587,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	278.755.587,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.171.871,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.171.871,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	206.583.695,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	206.583.695,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.021,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.021,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**805.000.000,00**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**805.000.000,00**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota					Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota				
		Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	675.000.000,00		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	675.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				

		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	675.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	675.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	6 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	6 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**100.000.000,00**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

		Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**	**100.000.000,00**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**	**106.190.440,00**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**	**106.190.440,00**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	106.190.440,00		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	106.190.440,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	106.190.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	106.190.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**	**100.000.000,00**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

		Jumlah Dokumen ~~Komunikasi Informasi~~ dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ~~TRANSFER~~ UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen ~~Komunikasi Informasi~~ dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**	**100.000.000,00**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA					Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA				
		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**5.043.328.950,00**		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**5.043.328.950,00**	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**254.079.530,00**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**254.079.530,00**	

	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	26.000.000,00		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	26.000.000,00	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana					Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	228.079.530,00		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	228.079.530,00	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan					Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	67.279.530,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	67.279.530,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				

		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	100.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	100.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**	**3.379.149.420,00**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**	**3.379.149.420,00**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.409.200.000,00		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.409.200.000,00	
	Pengendalian Program KKBPK					Pengendalian Program KKBPK				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana					Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	739.200.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	739.200.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				

		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	180.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	180.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	772.357.420,00		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	772.357.420,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				

		Jumlah Kader yang ~~Mengikuti Penggerakan~~ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	254 Orang	384.000.000,00	DANA ~~TRANSFER~~ KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Kader yang ~~Mengikuti Penggerakan~~ Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	254 Orang	384.000.000,00	DANA ~~TRANSFER~~ KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	388.357.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	388.357.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	184.592.000,00		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	184.592.000,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				

		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	333 Orang	78.592.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	333 Orang	78.592.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak					Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	1.013.000.000,00		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	1.013.000.000,00	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB					Pembinaan Terpadu Kampung KB				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	23 Laporan	49.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	23 Laporan	49.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				
		Jumlah DASHAT di Kampung KB	48 Unit	690.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah DASHAT di Kampung KB	48 Unit	690.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	48 Kampung	273.250.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	48 Kampung	273.250.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**	**1.410.100.000,00**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**	**1.410.100.000,00**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	610.000.000,00		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	610.000.000,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				

		Jumlah Laporan Hasil ~~Promosi dan Sosialisasi~~ Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6 Laporan	87.496.054,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Hasil ~~Promosi dan Sosialisasi~~ Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6 Laporan	87.496.054,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	28.049.706,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	28.049.706,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				

		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150 Orang	117.110.802,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150 Orang	117.110.802,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	60 Laporan	40.347.414,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	60 Laporan	40.347.414,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	127 Kelompok	36.996.024,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	127 Kelompok	36.996.024,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	800.100.000,00		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	800.100.000,00	

	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	381.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	381.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	419.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	419.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
				12.142.279.732,00					**12.142.279.732,00**	

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan terhadap usulan program dimasud untuk melakukan pengecekan apakah program dan kegiatan merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD dan melakukan identifikasi jenis program dan kegiatan apakah sesuai dan yang tidak sesuai antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan ketersediaan sumber dana dalam rangka mencapai sasaran target Renstra, Kebijakan Nasional, Pencapaian visi-misi Kepala Daerah serta dilakukan telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat di sajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 5. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025
Kabupaten Gunung Mas

Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**12.142.279.732,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**12.142.279.732,00**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**7.098.950.782,00**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**5.787.760.342,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	53.377.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.150.000,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.974.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Dokumen	2.308.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20 Dokumen	1.945.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.159.731.999,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	4.101.541.559,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.045.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	28.145.220,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	136.897.672,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	97.033.980,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				

		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	39.863.692,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	569.246.984,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.998.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	7.176.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Bahan/Material				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.999.644,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	487.073.140,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	305.047.600,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	75.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.047.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	284.703.500,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	60.030.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	222.673.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	278.755.587,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.171.871,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	206.583.695,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	16.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15.000.021,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**805.000.000,00**	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota				

		Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	675.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Organisasi	675.000.000,00	PENDAPATAN BAGI HASIL
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	6 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	

	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**	**106.190.440,00**	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	106.190.440,00	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	106.190.440,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100.000.000,00	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**	**100.000.000,00**	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA				
		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	50.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	7 Orang	50.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**5.043.328.950,00**	
8	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**254.079.530,00**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	26.000.000,00	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana				
		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	228.079.530,00	
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	67.279.530,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				
		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12 Laporan	60.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	100.800.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
9	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**	**3.379.149.420,00**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	1.409.200.000,00	
	Pengendalian Program KKBPK				

		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	140.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana				
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	739.200.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	180.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				
		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				
		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	200.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	772.357.420,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	254 Orang	384.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				

		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	388.357.420,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	184.592.000,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 Laporan	43.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	333 Orang	78.592.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	18.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Laporan	45.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	1.013.000.000,00	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	23 Laporan	49.750.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				

		Jumlah DASHAT di Kampung KB	48 Unit	690.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	48 Kampung	273.250.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
10	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**	**1.410.100.000,00**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	610.000.000,00	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6 Laporan	87.496.054,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				
		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	28.049.706,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	300.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150 Orang	117.110.802,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL

	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	60 Laporan	40.347.414,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	127 Kelompok	36.996.024,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	800.100.000,00	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	381.000.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	419.100.000,00	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
				12.142.279.732,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DP2KBP3A

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan pencermatan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas. Prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas dan penyelengaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah urusan wajib program nasional berdasarkan RKP antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan Pengendalian penduduk Keluarga Berencana dengan program nasional antara lain :
   1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
   2) Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk
   3) Terpenuhinya Layanan dasar
   4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
   5) Terwujudnya pengentasan kemiskinan
   6) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing
   7) Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
   8) Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
   9) Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan perihal tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang isu Kependudukan terutama bonus demografi dan data Kependudukan.

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Penyuluh, Kader KKBPK dan seluruh keluarga

c. Meningkatnya Kualitas pelayanan KB, Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi

d. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

e. Meningkatkan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

f. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus terhadap Anak.

g. Meningkatkan kualitas data gender dan anak.

Untuk mencapai tujuan yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan sasaran. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran-sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pemahaman Pemangku Kepentingan tentang Program BanggaKencana

b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama Penyuluh, Kader Bangga Kencana dan seluruh keluarga.
c. Meningkatnya Kualitas data Kependudukan Pembangunan Keluarga KB
d. Meningkatkan kesadaran PUS tentang pentingnya Keluarga Berencana dengan menerapkan 4 **Terlalu** (Terlalu Muda, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak dan Terlalu Tua)
e. Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Meningkatkan kualitas pelayanan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi
f. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam bidang Hukum, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Gunung Mas
g. Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak
h. Meningkatkan Indeks Perlindungan Anak
i. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan perlindungan khusus terhadap anak

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2024 merupakan prioritas program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan rumusan rencana program dan kegiatan sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat 10 Program yang terdiri atas 21 Kegiatan dan 53 Sub Kegiatan, Sumber Dana terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat dalam table. 6 berikut ini:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**12.142.279.732,00**							**8.465.246.177,00**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.142.279.732,00**							**8.465.246.177,00**	
	2	08				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**7.098.950.782,00**							**2.028.300.000,00**	
1	2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.787.760.342,00**						**-**	**268.300.000,00**	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.377.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	64.300.000,00	
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.150.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		4.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.974.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				20 Dokumen	2.308.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				20 Dokumen	1.945.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.159.731.999,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	4.101.541.559,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.045.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10 Laporan	28.145.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

							dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan				BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	136.897.672,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	50.000.000,00	
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	97.033.980,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	39.863.692,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	569.246.984,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	19.000.000,00	
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.998.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7.176.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	49.999.644,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	487.073.140,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	305.047.600,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	115.000.000,00	
	2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150.047.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	284.703.500,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	0,00	
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	60.030.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	222.673.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	278.755.587,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	20.000.000,00	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.171.871,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	206.583.695,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	16.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.021,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**805.000.000,00**						**-**	**900.000.000,00**	

	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota														
							Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota				1 Kebijakan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	675.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	750.000.000,00	
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Organisasi	675.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	50.000.000,00	
	2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi				6 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saingPeningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				7 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2	08	04			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	

	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	04	2.02	0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															

							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2	08	05			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	**-**			**-**	**106.190.440,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	106.190.440,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	110.000.000,00	
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	106.190.440,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6	2	08	06			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	150.000.000,00	
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	2	08	07			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**			**-**	**100.000.000,00**						**-**	**200.000.000,00**	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA															

							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	100.000.000,00	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				7 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saingPeningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.043.328.950,00**							**6.436.946.177,00**	
8	2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-	-			-	**254.079.530,00**						-	**290.000.000,00**	

	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	26.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	30.000.000,00	
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	26.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	228.079.530,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	260.000.000,00	
	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														

							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	67.279.530,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	100.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	-			-	**3.379.149.420,00**						-	**4.721.592.000,00**	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.409.200.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	1.430.000.000,00	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK														

							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	739.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		750.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	772.357.420,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	800.000.000,00	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				254 Orang	384.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	388.357.420,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	184.592.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	184.592.000,00	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				6 Laporan	43.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		43.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				333 Orang	78.592.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		78.592.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				3 Laporan	18.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak															
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				3 Laporan	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	1.013.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-	-	2.307.000.000,00	
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB														
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				23 Laporan	49.750.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		99.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah DASHAT di Kampung KB				48 Unit	690.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		1.440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				48 Kampung	273.250.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		768.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10	2	14	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	-			-	**1.410.100.000,00**						-	**1.425.354.177,00**	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	610.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	625.254.177,00	
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				6 Laporan	87.496.054,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		96.245.659,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	28.049.706,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		30.854.676,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R				150 Orang	117.110.802,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		117.110.802,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

							dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				60 Laporan	40.347.414,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.347.414,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				127 Kelompok	36.996.024,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.695.626,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	800.100.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	800.100.000,00	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				10 laporan	381.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		381.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				10 laporan	419.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		419.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H											**12.142.279.732,00**							**8.465.246.177,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan pagu indikatif yang sudah ditetapkan.

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah pengembangan dan peningkatan kualitas. Sumber daya manusia di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas. Rencana Program dan Kegiatan prioritas, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 6 diatas dimana Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas **10 program, 26 kegiatan dan 60 Sub Kegiatan** untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada perencanaan pembagunan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran dan kapasitas meningkat yang memadai maka semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai, demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapat hasil yang maksimal.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya akan disusun program dan kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta rencana operasional kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat memenuhi pelayanan pembangunan sesuai dengan rencana Kebijakan Nasional, RPJMD Kabupaten Gunung Mas dan Renstra Perangkat Daerah serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada pencapaian rencana kerja tahun 2025.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi unit SKPD tiap tahun dalam memprogramkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SKPD yang fungsinya untuk memprogramkan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dalam menentukan kegiatan prioritas dan sasaran kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja diharapkan dapat dimanfaatkan untuk Bahan Evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkannya; Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan berkatNya untuk pelaksanaan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Gunung Mas,

ttd

APRIANTO, ST.,M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197904012005011014

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan (*Development Planning*) merupakan aspek yang penting dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem perencanaan pembangunan sebelum otonomi daerah lebih bersifat *top-down* sehingga kurang memperhatikan kondisi riil di daerah. Akibatnya perencanaan *top-down* sering tidak mengenai sasaran karena perbedaan karakteristik antar desa. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah saat ini lebih bersifat *bottom-up*. Akan tetapi perencanaan akan berjalan efektif dan fleksibel bila menggunakan pendekatan politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up).

Ketatalaksanaan kepemerintahan yang baik (*good govermance*), lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan diatur oleh prinsip bersama, akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan *rule of law*. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yang antara lain

- Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah.
- Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat yang seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- Peran masyarakat adalah menciptakan nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun .

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi unit SKPD tiap tahun dalam memprogramkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) SKPD yang fungsinya untuk memprogramkan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan dalam menentukan kegiatan prioritas dan sasaran kegiatan pembangunan.

Sebagai dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah , Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan dokumen yang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah mengingat Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, selain itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2025 ini adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas untuk menyusun perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2025 dan selanjutnya Renja SKPD ini adalah merupakan salah satu intrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga guna mengetahui sudah sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai wujud kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2009-2028
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dimaksudkan untuk memenuhi perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dengan dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten Gunung Mas dan APBN dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Selain itu Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai upaya menyiapkan arahan dan pedoman bagi jajaran pimpinan dan staf stakeholder kependidikan lainnya dalam menyusun rencana program dan kegiatan sesuai tupoksi dan kewenangan masing-masing.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas adalah:

1. Memberikan gambaran tentang hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan;
3. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
4. Memberikan pedoman, acuan dan referensi dalam menyusun program kerja pembangunan di bidang pendidikan yang lebih rinci dan berjangka pendek pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.
5. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dipedomani para pejabat dan staf Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Tahun 2025;

6. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan, sebagai dasar penyusunan rancangan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2025 bagi Sekretariat dan Bidang-Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas disusun dengan sistematika yang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN BERJALAN SAMPAI TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat SKPD dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
4. yang direncanakan;
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing**.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
   (-) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   (-) Pencapaian SDGs,
   (-) Pengentasan kemiskinan,
   (-) Pencapaian NSPK dan SPM,
   (-) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   (-) Pengembangan daerah terisolir,
   (-) dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   (-) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   (-) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   (-) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP,

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN BERJALAN SAMPAI TRIWULAN II

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang, PAUD, Dikmas, Pendidikan Dasar, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian sarana dan prasarana bidang PAUD, Dikmas dan pendidikan dasar serta Kepemudaan dan Olahraga;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi PAUD dan Dikmas;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi SD dan SMP;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang Kepemudaan dan Olahraga
8. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi ketenagaan pada urusan Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 tahun 2017, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan SKPD dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian kinerja tersebut. Alokasi anggaran yang diterima menurut DPA 2025 sebesar Rp. 392.730.477.254,- dari keseluruh kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 19 (Sembilan belas kegiatan).

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.
5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan okumen perencanaan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas antara lain :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan target yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi secara rutin terhadap para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,
3. Kerjasama dengan pihak stakehoders lintas SOPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

Tabel 1. Target dan capaian kinerja Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No	Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi pada Tahun 2023	Target 2024	Target 2025	Sumber Data
I.	Angka Harapan lama Sekolah	12,05	12	12	Disdikpora/BPS
2.	Rata-rata lama sekolah	9,25	9,25	9,25	Disdikpora/BPS
3.	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	84,18	100	100	Disdikpora
4.	Angka Partisipasi Sekolah (7-15)	98, 27	100	100	Disdikpora

5.	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Kesetaraan	2,4	100	100	Disdikpora
6.	Rata-rata Kemampuan Literasi SD	62,64	49,17	52, 86	Disdikpora
7.	Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	62,64	64,52	68,12	Disdikpora
8.	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	36,54	36,55	37,83	Disdikpora
9.	Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	56,78	63,34	63,54	Disdikpora
10.	Iklim Keamanan SD	69,95	74,17	77,16	Disdikpora
11.	Iklim Keamanan SMP	71,57	73,95	77,6	Disdikpora
12.	Iklim kebinekaan SD	70,72	72	77,5	Disdikpora
13.	Iklim kebhinekaan SMP	74,56	71,11	79,76	Disdikpora
14.	Iklim Inklusivitas SD	51,9	60,55	61,75	Disdikpora
15.	Iklim Inklusivitas SMP	50,07	61,27	65,27	Disdikpora
16.	Proporsi Jumlah satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	30,17	30,29	30,29	Disdikpora
17.	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	62,7	61,21	64,8	Disdikpora
18.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7	50	65	Disdikpora
19.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	80,5	80	85	Disdikpora
20.	Peningkatan Prestasi Olahraga	66,65	71,11	75	Disdikpora
21.	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan		36		Disdikpora

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahunan. Misi yang telah ditetapkan diatas adalah dalam rangka mencapai suatu kondisi dalam jangka menengah yang tercermin pada tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan suatu kondisi antara yaitu kondisi yang ingin dicapai setiap akhir tahun yang tercermin pada sasaran-sasaran. Dari analisis faktor penentu keberhasilan melalui pendekatan Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) yang didukung dengan data dan fakta secara aktual sebagaimana pada Bab terdahulu, maka disusun dan ditetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

TUJUAN PERTAMA : Meningkatkan aksesibilitas pendidikan .

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu:

1) Meningkatnya Angka Partisipasi masyarakat usia sekolah dalam mengenyam Pendidikan.
2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan.

TUJUAN KEDUA : Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dengan kualitas yang kompetitif dan berdaya saing global.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu:

1) Meningkatnya kualifikasi dan dan kesejahteraan tenaga Pendidik.
2) penerapan kurikulum berstandar nasional pada Sekolah-sekolah
3) meningkatnya capaian prestasi di bidang pendidikan

TUJUAN KETIGA : Meningkatkan pendidikan keaksaraan.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu:

1) Meningkatnya pembinaan Pendidikan kesetaraan.

TUJUAN KEEMPAT : Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu :

1) Meningkatnya prestasi di bidang kepemudaan dan olah raga.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mencapai suatu keberhasilan Pendidikan di Kabupaten Gunung Mas.

1. Angka Partisipasi Sekolah 5-6
2. Angka Partisipasi Sekolah 7 - 15
3. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Kesetaraan

4. Rata-rata Kemampuan Literasi SD
5. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD
6. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP
7. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP
8. Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi Minimal B
9. Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4
10. Iklim Keamanan SD
11. Iklim Keamanan SMP
12. Iklim Kebinekaan SD
13. Iklim Kebinekaan SMP
14. Iklim Inklusivitas SD
15. Iklim Inklusivitas SMP
16. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
17. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
18. Peningkatan Prestasi Olahraga
19. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan

BAB III

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat, yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pembangunan Pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan Nasional di bidang Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah :

a. Kebijakan Pencapaian Mutu Kualitas Pendidikan
b. Kebijakan Pencapaian Penerima Layanan Dasar
c. Kebijakan Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik yang prima

Secara umum Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 terdiri atas

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan
- Program Pengembangan Kepramukaan

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2. Hubungan Misi dan Kebijakan Kabupaten Gunung Mas dengan Program Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga

No	Misi Kabupaten Gunung Mas	Tujuan Pembangunan	Sasaran strategis Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Program Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga
1.	Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan yang berbudaya	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	Meningkatkan mutu, akses dan layanan pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dengan kualitas yang Kompetitif dan Berdaya saing global 3. Meningkatkan pendidikan Keaksaraan 4. Meningkatkan penyelenggaraankegiatan kepemudaan dan olahraga	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan 3. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (https://sipd-gumas.simda.net/) dapat dilihat dalam Lampiran I.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas periode 2025 sebagai agenda pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun periode Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan semua stake holder, instansi terkait, pemangku kepentingan, masyarakat, LSM, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Tahun 2025 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan **sebanyak 7 program dan 19 kegiatan.** Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

Keberhasilan pembangunan sektor Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Gunung Mas sangat ditentukan oleh sinergitas berbagai pihak, baik pemerintah sebagai perencana dan pelaksana, pihak swasta sebagai mitra, dan partisipasi masyarakat secara luas.Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan jajaran pelaksana pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian target-target kinerja dalam RENSTRA 2025-2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						**392.730.477.254,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**384.239.427.420,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**384.239.427.420,00**							**0,00**	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**300.364.823.034,00**						-	**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	301.803.164,00			-	Membangu n dan meng embangkan budaya pe mbelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menc iptakan masyarakat yang beriman, bertaqw a, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkata n kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	275.884.764,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	6.675.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	6.125.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				15 Dokumen	6.559.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.559.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan kualitas ASN melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan maupun	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KURUN
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KURUN
JL. TJILIK RIWUT KM. 3
KUALA KURUN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, yang merupakan suatu bagian dari perencanaan Pembangunan kecamatan Kurun yang berkelanjutan, dapat diselesaikan dengan waktu telah ditentukan. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 ini merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang merupakan salah suatu bagian dari Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kurun yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini,disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pembangunan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kurun ini memuat gambaran tentang pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Kurun tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kurun dan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan Pembangunan Kantor Kecamatan Kurun di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, 25 Juli 2024

Camat Kurun,

I L T E M, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19760301 201001 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KANTOR KECAMATAN KURUN TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kurun 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurun 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 9

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 10

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 12

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kurun 12

3.3 Program dan Kegiatan 15

BAB IV RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 16

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kurun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 16

BAB V P E N U T U P 87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496) dan Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Tanggal 01 Juli 2024, untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Renja Kecamatan Kurun Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Penyusunan Renja Kecamatan Kurun Tahun 2025 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2025. Renja Kantor Kecamatan Kurun menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gunung Mas ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya.

Penyusunan Renja Kecamatan Kurun mengacu pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kecamatan Kurun Tahun 2019-2025 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Agar dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Kurun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program/kegiatan Pemerintahan di Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

7. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1213);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem InformatikaPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 tanggal 30 Juni 2023;

22. Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 tanggal 01 Juli 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kurun adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kurun guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kurun adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pengendalian serta memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan Kecamatan Kurun.

1.4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kurun

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurun

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kurun

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Kurun

3.3 Program Dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KECAMATAN KURUN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kantor Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas.

Dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan dan fasilitasi pembangunan pada Kantor Kecamatan Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Kantor Kecamatan Kurun untuk Tahun 2023 memperoleh Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp **5.697.808.000,00,**- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp **5.258.495.327,00,-** dan Belanja Modal Rp **185.423.600,00** dengan pencapaian Realisasi sebesar **Rp.5.443.918.927,-** Fisik **95,54 %.**

Jumlah anggaran pada Kantor Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024. untuk anggaran pokok yang ditetapkan sebesar **Rp. 5.789.560.854,00,**- Belanja Operasi Rp. **5.606.536.784,00,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp. 183.024.070,00,-**, Adapun perincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi :

4.1 Belanja Pegawai Rp. **3.076.470.521,00,-**

4.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. **2.530.066.263,00,-**

Belanja Modal :

5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. **183.024.070,00 ,-**

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II per 30 Juni Tahun 2024 dicapai sebesar Rp. **2.934.832.877,00,-** dari anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp **2.854.727.977,00,-**. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari :

Belanja Operasi :

4.1 Belanja Pegawai Rp **1.652.850.794,00,-**

4.2 Belanja Barang dan Jasa Rp **1.111.705.483,00,-**

Belanja Modal :

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp **170.276.600,00 ,-**

Analisis tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan capaian Renstra tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai Program dan Kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    a. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    f. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    g. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    h. Tersedianya Penataan Organisasi.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    a. Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
    b. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
    c. Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
    a. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;

Kecamatan Kurun untuk Tahun 2025 menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 3 (Tiga) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kurun

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kurun dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya Ketertiban dan keseragaman berpakaian
- Meningkatkan Sumber Daya Aparatur
- Meningkatkan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja
- Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah Bawahan
- Meningkatnya Keperdulian kepada Keagamaan, kemasyarkatan dan Kualitas SDM Wanita/PKK
- Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di kelurahan
- Meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah
- Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam keikut serta Pameran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
- Meningkatkan kualitas dalam memilih/penetapan skala prioritas pembangunan
- Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
- Meningkatnya Pelayanan terhadap Publik

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kurun meliputi analisis :

Kekuatan :

- Visi dan misi Kecamatan yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan:

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Belum adanya Standart Pelayanan Minimal Kecamatan Kurun
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan Ancaman :
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masayarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kurun ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya aktivitas masyarakat;
2) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

   Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki kecakapan dalam berkinerja, Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

3) Untuk perencanaan pembangunan di kecamatan Kurun tahun 2025 sudah melalui mekanisme diadakannya musrenbang tingkat kecamatan dengan menggali seluruh usulan dari Desa/Kelurahan yang kemudian di prioritaskan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a) rancangan kerangka ekonomi daerah;

b) program prioritas pembangunan daerah dan

c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Rencana Kerja Kecamatan Kurun sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kurun.

Pada sub ini dimunculkan tabel review terhadap rancangan awal RKPD analisis kebutuhan yang termuat dalam RKA setelah pembahasan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Legislatif dan Eksekutif Kabupaten Gunung Mas.

Ketidaksesuaian reviuw dan kebutuhan analisis hanya terlihat lebih banyak pada perbedaan besaran dana, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan alokasi dana pada program/kegiatan, dimana ada program yang tidak muncul di reviuw Tahun 2025 harus muncul di analisis kebutuhan RKA Tahun 2025 mengingat kebutuhan akan program tersebut harus dipenuhi. Hal tersebut yang banyak mempengaruhi perubahan dana pada besaran dana Program dan Kegiatan Renja Tahun 2025.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kurun tidak lepas dari koordinasi berbagai pihak yang berkepentingan demi suksesnya pembangunan khususnya Kecamatan Kurun, umumnya Kabupaten Gunung Mas.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan dalam pengumpulan usulannnya dimulai dari usulan dari daerah bawahan yang disebut Musrenbang Desa/Kelurahan yang mana usulan Desa/Kelurahan tersebut dibawa ke dalam Musrenbang Kecamatan yang kemudian diteruskan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya diolah sebagai usulan Kabupaten ke tingkat selanjutnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam masa jabatan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026 dan Kecamatan Kurun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri, Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

Di masing-masing khususnya pada pemerintahan Kecamatan Kurun dibuat suatu Rencana Startegis 5 tahunan dari Tahun 2020-2025 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas sehingga dengan demikian kebijakan pembangunan di tingkat Nasional sudah sampai di tingkat Kecamatan dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan terukur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kurun

Kecamatan Kurun sebagai salah satu perangkat daerah penyelenggara kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan, dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Sehingga dalam menjabarkan visi Kecamatan Kurun harus mengacu pada visi Kabupaten Gunung Mas serta memperhatikan potensi-potensi yang tersedia di Kecamatan Kurun, maka Visi Pemerintah Kecamatan Kurun adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Prima Kecamatan Kurun Dalam Membina, Melayani Dan Menfasilitasi Menuju Masyarakat Yang Mandiri Dan Sejahtera"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk dapat mewujudkan *Visi* tersebut telah ditetapkan beberapa *Misi* Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
2. Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Pembinaan dan pemantapan koordinasi dengan daerah bawahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan disegala bidang.
5. Menumbuhkembangkan budaya gotong royong di masyarakat.
6. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya daerah
7. Memotivasi masyarakat ikutserta dalam merencanakan Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kurun mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Kecamatan Kurun seperti terlihat pada tabel berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Melaksanakan pelayanan public yang maksimal kepada masyarakat.	Menghasilkan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memuaskan	Persentase Peningkatan dalam melayani masyarakat. Persentase Peningkatan koordinasi ke dalam dan luar daerah
Pemberdayaan, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui pembinaan, pelatihan serta pemantapan pegawai sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik	Menghasilkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan kemampuan/kapasitas seorang aparatur Pemerintahan
Pembinaan dan pemantapan koordinasi dengan daerah bawahan agar terwujudnya pemerintahan yang baik.	Menghasilkan Pemerintahan daerah bawahan lebih baik agar tupoksinya lebih difungsikan untuk dapat meningkatkanPemerintahannya	Persentase Peningkatan kualitas Kinerja Daerah Bawahan

	difungsikan untuk dapat meningkatkan Pemerintahannya	
Meningkatkan peran serta masyarakat, Perempuan dan Pemuda dalam pembangunan disegala bidang.	Mewujudkan masyarakat, perempuan dan pemuda yang lebih produktif berkarya dan berfungsi di masyarakat, terwujudnya masyarakat yang lebih beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME dan lebih peduli terhadap kehidupan bermasyarakat dan bergotong royong.	• Persentase Peningkatan Kualitas Pembinaan pada organisasi wanita • Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Gotong Royong dalam masyarakat
Menumbuhkembangkan budaya gotong royong di masyarakat.		
Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap budaya daerah	Mewujudkan kepedulian keragaman serta olahraga-olahraga daerah dikhawatirkan terkikis bila dilestarikan	Persentase Peningkatan kualitas pengetahuan terhadap budaya daerah
Memotivasi masyarakat ikutserta dalam merencanakan Pembangunan Daerah	Menghasilkan Dokumen yang tepat/benar tempat tertuangnya spirasi masyarakat tentang harapan Pembangunan Daerah yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat itu sendiri	Persentase Peningkatan kualitas dokumen skala prioritas tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan untuk pedoman pembangunan daerah

3.3. Program Dan Kegiatan

a. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi dan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pada Tahun 2025 Rencana Kerja Kecamatan Kurun memuat 3 (Tiga) program dan 12 (Dua belas) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   d. Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   e. Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   f. Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   g. Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   h. Tersedianya Penataan Organisasi.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
   b. Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
   c. Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
   a. Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

BAB IV

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Kurun Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Data terlampir dari SIPD perkiraan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 pada Kantor Kecamatan Kurun .

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bekal/Material yang Disediakan				1 Paket	23.012.608,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kec. Kadungora)	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Karuri		23.012.608,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	197.119.208,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DHUA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian lingkungan dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kurun		197.119.208,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	58.008.008,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	58.008.008,00	KECAMATAN KAUR
	7.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Pelabuhan dan Alfetri Lainnya yang Dioperasikan				2 Unit	58.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangsari, Desa Kadidesa	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		58.008.808,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.80	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	237.674.971,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkecil kesenjangan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	237.674.971,00	KECAMATAN KAUR UTARA
	7.31.01.2.80.3400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.008.008,80	Kab. Garut (), Kec. Karangtengah, Kec. Kadungora, Kec. Leles, Kec. Samarang, Kec. Tarogong Kaler, Kec. Tarogong Kidul, Kec. Banyuresmi, Kec. Cilawu, Kec. Cisurupan, Kec. Pakenjeng, Kec. Pameungpeuk, Kec. Pamulihan, Kec. Peundeuy, Kec. Singajaya, Kec. Sukaresmi, Kec. Cikajang, Kec. Cilawu, Kec. Cisurupan, Kec. Pakenjeng, Kec. Pameungpeuk, Kec. Pamulihan, Kec. Peundeuy, Kec. Singajaya, Kec. Sukaresmi, Kec. Cikajang	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kurun		1.008.808,89	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.80.3902	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	57.608.008,80	Kab. Garut Kec. Karangsewu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		57.608.008,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.80.3804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dioperasikan				2 Laporan	1.75.074.977.89	Kab. Garut, Kec. Karangsewu, Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Mempertahankan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuni		1.75.074.977.89	KECAMATAN KARUNI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.89	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	219.374.371,89			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkecil kesenjangan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	219.374.371,89	KECAMATAN KAUR
	7.31.01.2.89.3801	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan dipelihara untuk Kelancaran Tugas dan Mobilitas Pejabat/Staf				9 Unit	108.500.926,80	Kab. Garut (s), Kec. Karangtengah, Kec. Kadungora, Kec. Leles, Kec. Leuwigoong, Kec. Pamulihan, Kec. Samarang, Kec. Tarogong Kaler, Kec. Tarogong Kidul, Kec. Wanaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kesetaraan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kurun		108.500.926,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.99.3902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilayankan Pupuk dan Pestisidanya				2 Unit	Rp.363.615,00	Kab. Garut, Kec. Karangtengah, Kec. Kadungora, Kec. Leles, Kec. Samarang, Kec. Tarogong Kaler, Kec. Tarogong Kidul, Kec. Wanaraja, Kec. Cibatu, Kec. Cilawu, Kec. Cisurupan, Kec. Pasirwangi, Kec. Selaawi, Kec. Singajaya	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		Rp.363.615,00	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.99.1906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk dan lainnya yang Dipelihara				15 Unit	19.607.251,89	Kab. Garut, Kec. Karangsewu Kab.Kebumen	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		19.607.251,89	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.09.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29.008.008,89	Kab. Garut (s), Kec. Karangsewu, Kec. Kadungora	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian lingkungan dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		29.008.008,89	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.13.	Perataan Organisasi	-	-			-	36.777.268,89			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh melaksanakan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	36.777.268,89	KECAMATAN KAUR UTARA
	7.31.01.2.13.1900	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilitian/ Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	36.777.268,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kab.Garut)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER LAIN/HIBAH/BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		36.777.268,80	KECAMATAN KURUN
1	7.31.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			100 persen	333.956.928,80						-	333.956.928,80	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	12.008.008,80			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian lingkungan dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	12.008.808,89	KECAMATAN KAUR
	7.31.03.2.01.3901	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Eksis/Aktif dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	12.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangtengah, Desa Kadongdong	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		12.008.808,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.91.00.2.80	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	321.966.926,80			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkecil kesenjangan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kaur	-	321.966.926,80	KECAMATAN KAUR UTARA
	7.91.00.2.80.3801	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	321.966.526,80	Kab. Garut, Kec. Karangsewu, Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER, LAIN-LAIN PAD SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		321.966.526,80	KECAMATAN KURUN
1.	7.31.06	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksannya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			100 persen	83.798.708,80						-	83.798.708,80	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.06.2.01	Fasilitasi, Rekonvensi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	60.708.708,80			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	60.708.708,80	KECAMATAN KAUR
	7.31.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	52.258.708,80	Kab. Garut, Kec. Karangsewu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		52.258.708,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kebutuhan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Kelembagaan dan Kelembagaan Umum				1 Dokumen	31.508.008,80	Kab. Garut (s) Kec. Karangsewu Kab/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER DAN LAIN-LAIN YANG SAH (BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		31.508.008,80	KECAMATAN KURUN
	JUMLAH							4.509.508.974,80							4.509.508.974,80	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.062.226,80	Kab. Garut (Kec. Karangpawitan, Kec. Singajaya, Kec. Cikelet, Kec. Pameungpeuk, Kec. Mekarmukti, Kec. Cisompet, Kec. Peundeuy, Kec. Banjarwangi, Kec. Cihurip, Kec. Caringin, Kec. Tarogong Kaler, Kec. Tarogong Kidul, Kec. Bayongbong, Kec. Cigedug, Kec. Selaawi, Kec. Garut Kota, Kec. Sukaresmi, Kec. Cilawu, Kec. Banyuresmi, Kec. Leles, Kec. Kadungora, Kec. Leuwigoong, Kec. Pasirwangi, Kec. Samarang, Kec. Wanaraja, Kec. Tarogong, Kec. Bungbulang, Kec. Pakenjeng, Kec. Cibalong, Kec. Pamulihan)	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat implementasi sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Karuri		1.062.226,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.01.2800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.217.668,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kab. Garut)	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (DAU, DBH)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		3.217.668,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.01.2804	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koreksi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.637.668,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kab.Garut)	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (DAU, DBH)	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuni		3.637.668,80	KECAMATAN KARUNI
	7.31.01.2.01.2006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3.217.668,80	Kab. Garut (Lingkup Kec. Karangsewu Kab.Garut)	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (DAU HABIS)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian lingkungan dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		3.217.668,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.01.2006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	19.693.238,80	Kab. Garut, Kec. Karangsewu Kab.Garut	DANA TRANSFER UMUM/DAU DAU HABL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		19.693.238,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.82	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.862.632.691,89			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kaur	-	3.862.632.691,89	KECAMATAN KAUR UTARA
	7.31.01.2.82.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendorong Dukungan Kepegawai ASN				30 Orang/bulan	3.076.478.921,89	Kab. Garut (s) Kec. Karan Sewu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PEMERINTAH ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian sarana dan prasarana untuk secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Karan		3.076.478.921,89	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.82.1802	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	758.008,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kec. Kadungora)	DANA TRANSFER UMUM/DAU (BAGI HASIL)	Mempercepat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mempercepat implementasi sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Karuni		758.908,80	KECAMATAN KARUNI
	7.31.01.2.82.1006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koreksi/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.127.908,80	Kab. Garut, Kec. Karangsewu Kab.Garut	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		3.127.908,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.82.1900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	2.266.368,80	Kab. Garut dan Kec. Karangsewu Kab.Garut	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		2.266.368,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.86	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	61.706.043,80			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat infrastruktur secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kuruh	-	61.706.043,80	KECAMATAN KURUH
	7.31.01.2.86.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Dinas beserta Aindul Kelengkapan				2 Paket	32.167.908,80	Kab. Gianyar, Kec. Klungkung Sema Kab/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Kuruh		32.167.908,80	KECAMATAN KURUH
	7.31.01.2.05.0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	31.538.248,80	Kab. Garut (Kec. Karangsewu Kab.Garut)	DANA TRANSFER UMUM/DHKUA (BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelembagaan, sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karum		31.538.248,80	KECAMATAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	371.958.638,80			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkecil kesenjangan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kaur	-	371.958.638,80	KECAMATAN KAUR
	7.31.01.2.06.0004	Penyediaan Sarana Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bekal Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	128.756.508,80	Kab. Garut, Kec. Karangsewu Kab.Garut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER/ DANA PERIMBANGAN (BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		128.756.508,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.06.0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Barang Cetakan dan Penggandaan yang Difasilitasi				3 Paket	16.236.758,80	Kab. Garut (c) Kec. Karangsewu Kab.Garut	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kelancaran sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		16.236.758,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diterbitkan				1 Dokumen	1.926.608,80	Kab. Garut (Kec. Kiarapedes Sering a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat kelestarian lingkungan dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Kecamatan Karuri		1.926.608,80	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.06.0002	Penyediaan Bahan/Material														

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KURUN KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KURUN						6.509.568.054,00							6.509.568.054,00	
	7	URUSAN KEWILAYAHAN						6.509.568.054,00							6.509.568.054,00	
	7.31	KECAMATAN						6.509.568.054,00							6.509.568.054,00	
1	7.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			100 p	6.091.524.526,00						-	6.091.524.526,00	
	7.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	32.808.468,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengelolaan Hasil Hutan Dan Pelayanan Dasar	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana untuk secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Kecamatan Kurun	-	32.808.468,00	KECAMATAN KURUN
	7.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor ata Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	23.668.108,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kel. Karangpawitan	DANA TRANSFER UMUM/DBHBP BAGI HASIL	-	Mempercepat terlaksana sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,38	KELURAHAN KURUN
2	7.31.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKA/ DESA DAN KELURAHAN	-			100 PERSEN	396.568.015,80						-	8,38	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.03.2.82	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pohsos dan Orsos yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			3 Lembaga Kemasyarakat	366.278.238,80			-	Memperkecil kesenjangan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	8,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.03.2.82.1001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	2.966.058,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kel. Karangpawitan	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Berpartisipasi melaksanakan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,88	KELURAHAN KURUN
	7.31.03.2.82.1900	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pahrian dan Orang yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pahrian / Orang	360.250.208,80	Kab. Garut (Kec. Mek, Karas, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DURUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakat secara berkesinambungan Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat	-		8,00	KELURAHAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.91.00.2.93	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-			3 Pokmas / Ormas	9.208.668,80			-	Mempercepat peningkatan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	9,20	KELURAHAN KURUN
	7.91.00.2.93.3901	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibinglayankan				1 Lembaga Kemasyarakatan	8.208.668,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kelurahan Karangpawitan	DANA TRANSFER UMUM/DBHBA BAGI HASIL	-	Berperan aktif melakukan pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-			KELURAHAN KURUN
JUMLAH								649.008.008,80							8,80	

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN KURUN KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINERJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN KURUN						649.008.008,00							0,00	
	7	SISUK KEWILAYAHAN						649.008.008,00							0,00	
	7.31	KECAMATAN						649.008.008,00							0,00	
1	7.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 PERSEN	246.439.961,00							0,00	
	7.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			3 Orang 11 Orang	34.533.678,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan	-	0,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.06.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	19.764.558,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Rueta Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan		0,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15.709.128,00	Kab. Garut, Kec. Karas, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat terlaksananya dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan		0,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	115.811.553,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat terlaksananya dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan	-	0,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bekal Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.972.662,80	Kab. Garut (Kec. Mek, Kores, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat kelancaran tersarna dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan		8,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.06.0008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Barang Cetakan dan Penggandaan yang Difasilitasi				1 Paket	8.401.268,80	Kab. Garut (s), Mas, Kerja, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kalsel		8,4K	KELURAHAN KUALA
	7.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Sosialisasi dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disosialisasi				1 Dokumen	2.666.508,80	Kab. Garut (1), Mas, Kirsis, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DHUA (DAU, HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kalsel		8,88	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.937.908.80	Kab. Garut (Kec. Mas, Kores, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan		5,94	KELURAHAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Paket	43.008.008,00			-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	8,00	KEUANGAN KUSUN
	7.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Pelabuhan dan Alfetri Lainnya yang Dioperasikan				3 Unit	43.008.008,00	Kab. Gianyar, Mas, Kintamani, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DBHBA BAGI HASIL	-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,00	KELURAHAN KUALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.80	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang *Disediakan*	-			1 Paket	15.041.672,80			-	Mempercepat terlaksananya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	8,86	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.80.3400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.008.008,00	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kota Garut	DANA TRANSFER UMUM/DBHBA BAGI HASIL	-	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.80.1900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.728.008,00	Kab. Garut Kec. Karangpawitan Kode Garut	DANA TRANSFER UMUM/DBHBA BAGI HASIL	-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		8,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.80.3904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dievaluasi				1 Laporan	8.621.672.800	Kab. Garut (Kec. Mas, Kores, Kuala Kurun)	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Penumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		8,6B	KELURAHAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.89	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			6 Unit	38.045.108,80			-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-	-	8,88	KEUANGAN KUSUN
	7.31.01.2.89.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan disediakan Pupuknya				1 Unit	1.197.000,00	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat meningkatkan sarana dan prasarana untuk secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.99.1906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penataan dan lainnya yang Dipelihara				5 Unit	19.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut	DANA TRANSFER UMUM/DBHBHA BAGI HASIL	-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeretan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenanganny a	-		8,00	KELURAHAN KURUN
	7.31.01.2.893808	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR						649.008.008,00							0,00	
	7	SISUK KEWILAYAHAN						649.008.008,00							0,00	
	7.31	KECAMATAN						649.008.008,00							0,00	
1	7.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	272.064.008,00						-	0,00	
	7.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	27.668.008,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR	
	7.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				12 Paket	9.668.008,00	Kab. Gunung Mas, Kecs. Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR	
	7.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang *Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*				4 Orang	13.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karas, Tarabang Asli	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,99	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ASLI
	7.01.01.2.99	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			10 Paket	104.404.008,80			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kelurahan	-	8,99	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ASLI
	7.01.01.2.99.0006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	43.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karas, Tarabang Asli	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kelurahan		8,99	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ASLI
	7.01.01.2.99.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dimediasi				3 Paket	12.008.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kelurahan		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.31.01.2.00.0000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.404.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kelurahan		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.31.01.2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	58.008.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Pegawai Kelurahan		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	08.008.008,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	08.008.008,00	Kab. Gunung Mas, Kota, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	17.429.008,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.05.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.758.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.31.01.2.80.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.178.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.31.01.2.80.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9.508.008,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.31.01.2.89	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	42.508.008,80			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG AKUN
	7.31.01.2.89.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	4.508.008,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG AKUN
	7.31.01.2.89.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	13.008.008,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anji	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG AKUN
	7.31.01.2.89.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang *Dipelihara/Direhabilitasi*				3 Unit	25.008.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Tarogong Kidul	DANA TRANSFER UMUM/DBHBA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pelayanan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG KULIN
3	7.01.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	307.938.008,80						-	8,00	
	7.01.00.2.92	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	325.538.008,80			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG KULIN
	7.01.00.2.92.2001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.208.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Tambang Arjo	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL	-	Meningkatkan pelayanan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat pasca kemasyarakatan	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.923400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pelimas dan Orniss yang Dilaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pelimas / Orniss	325.336.008,80	Kab. Garut, Kec. Karangpawitan, Tambang Arjo	DANA TRANSFER UMUM/DANA BAGI HASIL DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PEMDAYAAN BAGI KELURAHAN	-	Meningkatkan pelayanan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.91.00.2.80	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	41.408.008,80			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.91.00.2.80.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	41.408.008,80	Kab. Gunung Mas, Kurus, Tumbang Anjir	DANA TRANSFER UANG MONANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	JUMLAH							580.008.008,80							8,00	

BAB V

P E N U T U P

Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kurun merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kurun selama jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun sebelumnya masih diperlukan perbaikan atau peningkatan kegiatan yang diharapakan dapat diperbaiki pada tahun selanjutnya sebagai dasar peningkatan kinerja yang telah dicapai organisasi melalui kegiatan yang ada.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan Pagu Indikatif (sesuai pagu rancangan Teknokratik 2025-2026) untuk Renja Kecamatan Kurun Tahun Anggaran 2025 Anggaran dana yang diberikan akan digunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan semua Program dan kegiatan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua rekan kerja yang telah membantu dalam penyusunan Renja Kecamatan Kurun Tahun 2025, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Kecamatan Kurun ini banyak kekurangan dan kami mengharapkan ada masukan demi lebih baiknya Penyusunan Renja Kecamatan ini selanjutnya.

Camat Kurun,

I L T E M, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19760301 201001 1 007

RENCANA KERJA
(RENJA)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MIHING RAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan suatu pedoman dalam menentukan sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Sebagai instansi pelaksana teknis di Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, maka merupakan suatu kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang didasari atas tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu impian/harapan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Rencana Kerja ini secara garis besar memberikan informasi mengenai Rencana Kerja tahun 2025 guna pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya kami berharap bahwa dengan adanya Rencana Kerja ini akan dijadikan acuan bagi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kampuri, 22 Juli 2024

Plt. Camat Mihing Raya,



TINDUNG ASI, S.Pd
Penata
NIP. 19800205 201001 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		7
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu	7
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	9
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		14
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
	3.3	Program dan Kegiatan Prioritas	17
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		20
BAB V	**PENUTUP**		21
DAFTAR TABEL			22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efesien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : failing to plan is planning to fail : gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

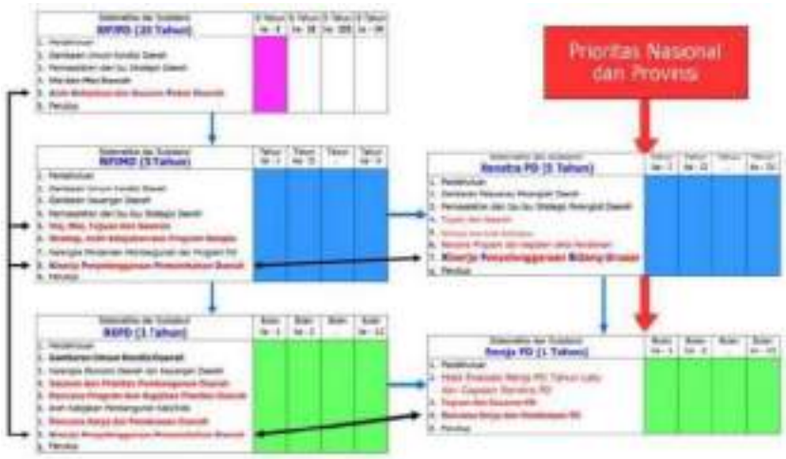
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergiskan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan ditingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.1

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RENJA PD dengan

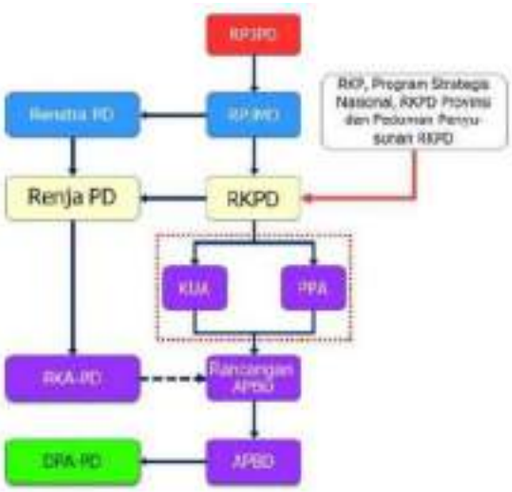
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Kerja Perangkat Daerah **(RENJA PD)** adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Lihat gambar 1.2.

Gambar 1.2

Tindak lanjut Dokumen RENJA PD dalam Penyusunan APBD



Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) memuat program, kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja PD dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan rancangan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD.
6. Verifikasi rancangan akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan, yang menjadi pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Gunung Mas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah menyiapkan perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah Sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan urusan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dan perkiraan capaiannya di tahun 2024 serta capaian Renstra tahun 2024.

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah Tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan;
4. Faktor- factor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas sebagai instansi teknis dituntut untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya meningkatkan kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai hal tersebut Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas mempunyai program kerja strategis untuk 5 (lima) Tahun sebagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dan diwujudkan dalam berbagai program maupun kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SOPD, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dengan perkembangan kedepan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilki, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Tahun 2019 – 2024 dan Indiktor Kinerja Utama pada ***Tabel 2.2*** sebagaimana terlampir.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan Renja PD tahun 2025 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas di tahun 2025 yang mengacu pada kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam Rancangan RKP 2025 dan RKPD Provinsi dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaiman tercatum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun Isu – isu penting/strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2030 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal);
6. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan;
7. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. Telaahan rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada pada **Tabel 2.4** sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Gunung Mas

NAMA SKPD : KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA

No. Kode Rek.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Progran/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**										
7.01	**KECAMATAN**				**2.783.427.616,00**					**2.783.427.616,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		**2,409.741.00,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**		**2,409.741.00,00**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Meningkatnya Laporan Renja, Lakip, DPA, RKA, Renstra		13.081.000,00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		Meningkatnya Laporan Renja, Lakip, DPA, RKA, Renstra		13.081.000,00	
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kampuri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.900.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kampuri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.900.000,00	
0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kampuri	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.331.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kampuri	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.331.000,00	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kampuri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	3.850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kampuri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	3.850.000,00	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Gaji Pokok dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		1.745.000.000,00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Tersedianya Gaji Pokok dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		1.745.000.000,00	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kampuri	Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan	20 Orang	1.710.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kampuri	Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan	20 Orang	1.710.000.000,00	
0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kampuri	Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		35.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kampuri	Meningkatnya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		35.000.000,00	
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		**5.900.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		**5.900.000,00**	
0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kampuri	Terlaksananya Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah	6 Jenis	5.900.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kampuri	Terlaksananya Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah	6 Jenis	5.900.000,00	
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri**		**44.360.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas ASN Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kampuri**		**44.360.000,00**	
0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kampuri	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	4 orang	44.360.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kampuri	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	4 orang	44.360.000,00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Barang dan Jasa Keperluan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan**		**240.500.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Tersedianya Barang dan Jasa Keperluan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan**		**240.500.000,00**	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampuri	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kampuri	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	2.500.000,00	
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampuri	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Jenis	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kampuri	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Jenis	65.000.000,00	
0004	Penyediaan logistik kantor	Kampuri	Jumlah Bahan Logistik Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Liter	5.000.000,00	Penyediaan logistik kantor	Kampuri	Jumlah Bahan Logistik Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Liter	5.000.000,00	

0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kampuri	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Jenis	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kampuri	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Jenis	10.000.000,00	
0007	Penyediaan Bahan /Material	Kampuri	Jumlah bahan/material Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Jenis	23.000.000,00	Penyediaan Bahan /Material	Kampuri	Jumlah bahan/material Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Jenis	23.000.000,00	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam/Luar Kab. Gumas	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kecamatan, Kelurahan dan PKK	Laporan	135.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam/Luar Kab. Gumas	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kecamatan, Kelurahan dan PKK	Laporan	135.000.000,00	
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Mihing Raya	3 jenis	35.000.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Tersedianya Meubel Kantor Kecamatan Mihing Raya	3 jenis	35.000.000,00	
0005	Pengadaan Mebel	Kampuri	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	35.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kampuri	Jumlah paket mebel yang disediakan	4 unit	35.000.000,00	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Barang dan Jasa Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		**178.400.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Barang dan Jasa Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		**178.400.000,00**	
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampuri	Jumlah Materai Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Jenis	2.400.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kampuri	Jumlah Materai Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Jenis	2.400.000,00	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampuri	Jumlah Rekening yang disediakan Untuk Aula, Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Rekening	16.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kampuri	Jumlah Rekening yang disediakan Untuk Aula, Kantor Kecamatan dan Kelurahan	3 Rekening	16.000.000,00	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampuri	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan dan Kelurahan	11 Orang	160.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kampuri	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan dan Kelurahan	11 Orang	160.000.000,00	
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kampuri**	**Tersedianya Barang dan Jasa Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		147.500.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kampuri**	**Tersedianya Barang dan Jasa Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Kelurahan**		147.500.000,00	
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan.	Kampuri	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Yang dipelihara	7 Unit	85.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan.	Kampuri	Jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Yang dipelihara	7 Unit	85.000.000,00	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kamouri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	12.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kamouri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	12.500.000,00	
011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kampuri	Jumlah Jasa dan Bahan Pemeliharaan Rujab Camat	6 Jenis	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kampuri	Jumlah Jasa dan Bahan Pemeliharaan Rujab Camat	6 Jenis	50.000.000,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**152.600.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**152.600.000,00**	
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kampuri**	**Tersedianyan Barang dan Jasa Musrenbang dan Pameran Pembangunan**		**7.600.000,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kampuri**	**Tersedianyan Barang dan Jasa Musrenbang dan Pameran Pembangunan**		**7.600.000,00**	
0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Jenis	7.600.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Jenis	7.600.000,00	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**145.000.000,00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**				**145.000.000,00**	
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kuala Kurun	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Mihing Raya	18 Jenis	110.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kuala Kurun	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Mihing Raya	18 Jenis	110.000.000,00	
04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kuala Kurun	Jumlah Barang dan Jasa Pameran Pembangunan	8 Jenis	35.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kuala Kurun	Jumlah Barang dan Jasa Pameran Pembangunan	8 Jenis	35.000.000,00	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**PORSENTASE PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL, KEAGAMAANDAN KEMASYARAKATAN, PORSENTASE PERAN SERTA KEPEMUDAAN**		**118.000.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**PORSENTASE PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL, KEAGAMAANDAN KEMASYARAKATAN, PORSENTASE PERAN SERTA KEPEMUDAAN**		**118.000.000,00**	

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**118.000.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**118.000.000,00**	
0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka	6 Jenis	8.500.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka	6 Jenis	8.500.000,00	
0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6 Jenis	14.500.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Kantor Kecamatan dan Kelurahan	6 Jenis	14.500.000,00	
0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka Kecamatan Mihing Raya	8 Jenis	50.000.000,00	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka Kecamatan Mihing Raya	8 Jenis	50.000.000,00	
0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan	8 Jenis	45.000.000,00,-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.	Kampuri	Jumlah Barang dan Jasa Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan	8 Jenis	45.000.000,00,-	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		103.086.618,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**PERSENTASE PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		103.086.618,00	
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Pembinaan Fasilitasi dan Peng**		**103.086.618,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tim Pembinaan Fasilitasi dan Peng**		**103.086.618,00**	
0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kampuri	Tersedianya honorarium PTT	1 orang	29.086.618,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kampuri	Tersedianya honorarium PTT	1 orang	29.086.618,00	
0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kampuri	Tersedianya Barang dan Jasa Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	49.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kampuri	Tersedianya Barang dan Jasa Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen	49.000.000,00	
0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kampuri	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Dokumen	25.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kampuri	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Dokumen	25.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten Kabupaten Gunung Mas dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.

Usulan program/ kegiatan masyarakat diperoleh melalui proses berjenjang dari tingkat desa melalui Musrenbang tingkat Desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dimana pada tahap ini usulan-usulan dari tingkat desa yang menjadi prioritas direkap menjadi usulan kecamatan untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten. Pada tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten Program/ Kegiatan yang menjadi usulan kecamatan dipilih kembali mana yang menjadi prioritas serta dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah dan dijawab melalui Program/ Kegiatan pada Perangkat Daerah masing-masing yang disesuaikan dengan Anggaran Belanja Daerah (Pagu Indikatif) yang didasari Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas serta Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025, dimana tidak semua kegiatan yang telah diusulkan dapat diakomodir mengingat keterbatasan anggaran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu identifikasi faktor – faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir – butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024. Hasil telaahan kebijakan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta RKPD Kabupaten Gunung Mas yang dikaitkan dengan Tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matrik hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan Tupoksi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas

Kebijakan Tahun 2025 Tupoksi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas			
Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 2024	**RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026**	**RPD Kab. Gunung Mas 2025 - 2026**	**Tupoksi Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas**
Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong	Visi : Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis	Visi : -	Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Percepatan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang - undangan.
1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**	**Misi 4 :** Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.	**Tujuan 1 :** Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing**	**Misi 1 :** Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreati dan Berwawasar Lingkungan	**Tujuan 3 :** Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	

3. **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan**	**Misi 5 :** Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	**Tujuan 1 :** Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	
4. **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**	**Misi 1 :** Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	**Tujuan 3 :** Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	
5. **Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa**	**Misi 5 :** Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender	**Tujuan 1 :** Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	
6. **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**	**Misi 3 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	**Tujuan 4 :** Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	
7. **Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga**	**Misi 2 :** Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global	**Tujuan 2 :** Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat	
8. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya**	**Misi 3 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	**Tujuan 4 :** Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	
9. **Sinergi Pemerintah Darah dalam Kerangka Negara Kesatuan**	**Misi 3 :** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi	**Tujuan 4 :** Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	

Bila diperhatikan tabel diatas terlihat bahwa dalam penyusunan Renja PD dimaksudkan agar terciptanya keterpaduan pembangunan baik tingkat pusat dan tingkat daerah karena beberapa alasan sebagai berikut : 17

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya – upaya strategis yang harus disinergiskan.
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama.
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menetukan kewenangan bersama, utamanya daerah – daerah yang letaknya berdekatan, dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026, yang dirumuskan bersifak spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk pada evaluasi pembangunan Tahun 2023 dan Tahun berjalan 2024 serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2024, tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas, Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indkator Sasaran
(1)	(2)	(3)
Peningkatan tata Kelola pemerintah yang professional, bersih dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan	Predikat SAKIP
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi informasi di Kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas di Kecamatan Mihing Raya	Jumlah Pembinaan Dan Pengawasan

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2024 yang berfok 18 ı pembangunan di beberapa bidang yang cukup strategis dan diharapkan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah ***"Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan".*** Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM), ekonomi masyarakat, infrastruktur, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup. Dengan Pembangunan ini diharapakan masyarakat Kabupaten Gunung Mas menjadi masyarakat yang handal, tangguh dan berperilaku baik. Sehingga menjadi masyarakat yang beradat, bermartabat dan terhormat.

Rumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Kecamatan Mihing Raya Tahun 2025.

Renja Kantor Kecamatan Mihing Raya Tahun 2025 Dalam rangka Sinkronisasi terhadap Program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang dituangkan didalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2030, maka Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Mihing Raya Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Kabupaten Gunung Mas menjadi kabupaten yang berdaya saing, mandiri, sejahtera dan bermartabat;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Gunung Mas yang memiliki keunggulan lokal;
4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tujangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.	Program Pemberdayan Masyarakat dan Kelurahan	- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan. - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intrasuku, Umat Beragam, Ras danGolongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset. - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan PMD. - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Peng

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2030. Jumlah seluruh program dan kegiatan serta total kebutuhan dana yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencaaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semoga Renja Kantor Kecamatan Mihing Raya Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Kampuri, 22 Juli 2024

Plt. Camat Mihing Raya,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN MIHING RAYA

TINDUNG ASI, S.Pd
Penata
NIP. 19800205 201101 1 011

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan pendanaan Kantor Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

Tabel 2.1
EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

SOPD : KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA **Formulir 8**

No	Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi TW. II (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW II (2024)		Ket
1	2					3	4	5		6		7		8= 7/6x 100 %		9 = 5 + 7		10
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN												
	7	01				KECAMATAN			3.054.973.855	-	2.783.427.618		1.673.733.395		60,13%		4.728.707.250	
1.	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.536.531.163	-	2.409.741.000		1.473.684.118		61,16%		4.010.215.281	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.739.300		13.081.000		3.930.000		30,04%		15.669.300	
	7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.865.300	3 Dokumen	3.900.000	2 dokumen	1.865.000		47,82%	2 dokumen	4.730.300	
	7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6.117.400	6 Dokumen	5.331.000	5 dokumen	1.805.000		33,86%	5 dokumen	7.922.400	
	7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	2.756.600	8 Dokumen	3.850.000	8 Dokumen	260.000		6,75%	8 Dokumen	3.016.600	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Keuangan, Gaji Pokok dan Tunjangan ASN		1.836.857.255		1.745.000.000		1.056.148.171		60,52%		27.388.496	
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan Kampuri	18 Orang	1.836.857.255	18 Orang	1.710.000.000	17 Orang	1.028.759.675		60,16%	17 Orang	2.865.616.930	
	7	01	01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya honorarium PTT dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	-	14 Laporan	35.000.000	17 Orang	27.388.496		78,25%	17 Orang	27.388.496	
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.926.500		5.900.000		5.048.875		85,57%		11.975.375	
	7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Mihing Raya	6 Dokumen	6.926.500	6 Dokumen	5.900.000	1 dokumen	5.048.875		85,57%	1 dokumen	11.975.375	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.		-		44.360.000		-		0,00%		-	
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.	9 Stel	-	4 Orang	44.360.000				0,00%		-	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri		379.381.240		240.500.000		226.146.484		94,03%		605.527.724	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	2.762.900	6 Jenis	2.500.000	6 Jenis	5.659.000		226,36%	6 Jenis	8.421.900	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	3 jenis	49.485.000	5 jenis	65.000.000		76.090.000		117,06%		125.575.000	
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	22 Jenis	182.774.321	100 ltr	5.000.000	22 Jenis	26.614.000		532,28%	22 Jenis	209.388.321	

	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	2 jenis	9.660.000	2 jenis	10.000.000	2 Jenis	9.580.000		95,80%	2 Jenis	19.240.000	
	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan / Material Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	25 jenis	19.396.400	4 jenis	23.000.000	25 Jenis	12.937.600		56,25%	25 Jenis	32.334.000	
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	60 laporan	115.302.619	60 laporan	135.000.000	38 Laporan	95.265.884		70,57%	38 Laporan	210.568.503	
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**35.000.000**							
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor Kecamatan Mihing Raya	2 jenis	-	2 jenis	35.000.000		52.650.000					
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah**		**205.803.018**		**178.400.000**		**110.618.888**		**62,01%**		**316.421.906**	
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	450 lbr	2.400.000	240 Lbr	2.400.000	240 lbr	3.300.000		137,50%	240 lbr	5.700.000	
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening wifi, Listrik dan Air	3 Rekening	19.213.500	3 Rekening	16.000.000	3 Rekening	23.180.100		144,88%	3 Rekening	42.393.600	
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium PTT Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	15 orang	184.189.518	5 orang	160.000.000	5 Orang	84.138.788		52,59%	5 Orang	268.328.306	
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor**		**95.823.850**		**147.500.000**		**71.791.700**		**48,67%**		**167.615.550**	
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	7 unit	61.826.350	7 Unit	85.000.000	7 Unit	37.356.000		43,95%	7 Unit	99.182.350	
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis	17.064.000	5 Jenis	12.500.000	5 Jenis	14.305.000		114,44%	5 Jenis	31.369.000	
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa dan Bahan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Kecamatan	6 Jenis	16.933.500	6 Jenis	50.000.000	6 Jenis	20.130.700		40,26%	6 Jenis	37.064.200	
2.	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**275.973.600**		**152.600.000**		**122.116.598**		**80,02%**		398.090.198	
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**leningkatnya Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD**		**7.554.300**		**7.600.000**		**10.002.000**		**131,61%**		17.556.300	
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD	5 Jenis	7.554.300	1 Dokumen	7.600.000	5 Jenis	10.002.000		131,61%	5 Jenis	17.556.300	
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksanannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**268.419.300**		**145.000.000**		**112.114.598**		**0,00%**		380.533.898	
	7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	252.649.300	18 Jenis	110.000.000	7 Jenis	91.787.750		0,00%	7 Jenis	344.437.050	
	7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	15.770.000	8 Jenis	35.000.000		20.326.848		0,00%		36.096.848	
3.	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**96.921.700**		**118.000.000**		**34.135.685**		**28,93%**		131.057.385	
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**96.921.700**		**118.000.000**		**34.135.685**		**28,93%**		131.057.385	
			05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka	5 Jenis	-	5 Jenis	8.500.000		-		0,00%			
	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Lomba Desa dan Rapat Kerja Camat	19 Jenis	14.253.500	10 Jenis	14.500.000	19 Jenis	14.531.285		100,22%	19 Jenis	28.784.785	

	7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka TingkatKecamatan Mihing Raya	11 Jenis	44.093.200	5 Jenis	50.000.000	11 Jenis	-		0,00%	11 Jenis	44.093.200	
	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragam, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Mihing Raya	14 Jenis	38.575.000	10 Jenis	45.000.000	8 Jenis	19.604.400		43,57%	8 Jenis	58.179.400	
4.	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**145.547.392**		**103.086.618**		**43.796.994**		**42,49%**		189.344.386	
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**145.547.392**		**103.086.618**		**43.796.994**		**42,49%**		189.344.386	
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya Honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Jenis	65.622.528	2 Orang	29.086.618	2 Orang	27.388.496		94,16%	2 Orang	93.011.024	
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya Honorarium Tim Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5 Orang	47.047.600	5 Orang	49.000.000	5 Orang	3.153.000		6,43%	5 Orang	50.200.600	
	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakata Desa	Tersedianya Honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakata Desa	5 Jenis	32.877.264	1 Orang	25.000.000	1 Orang	13.255.498		53,02%	1 Orang	46.132.762	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Gunung Mas

OPD : KANTOR KECAMATAN MIHING RAYA

Kode					Urusan, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Subkegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian (Program Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)	Target Program Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) (2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahunn-1) (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2					3	4	5	6	7	8	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**									
7	**01**				**KECAMATAN**									
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
7	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 dokumen	3 Dokumen	2 dokumen		3 Dokumen	9 Dokumen	
7	01	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	5 dokumen	6 Dokumen	5 dokumen		6 Dokumen	18 Dokumen	
7	01	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen	24 Dokumen	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Laporan Keuangan, Gaji Pokok dan Tunjangan ASN**								
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kelurahan Kampuri	18 Orang	17 Orang	18 orang	17 Orang		18 Orang	54 orang	
7	01	01	2.02	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya honorarium PTT dan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	17 Orang				14 Laporan	45 Laporan	
7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Kantor Kecamatan Mihing Raya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen		6 Dokumen	18 Dokumen	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.**								
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Biaya Kontribusi dan Perjalanan Dinas Bimtek bagi PNS Kecamatan Mihing Raya.	4 Orang					4 Orang	8 Orang	

7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri**								
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	2 Jenis	3 Jenis	6 Jenis		6 Jenis	11 Jenis	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	5 jenis	25 Jenis	3 Jenis			5 jenis	33 Jenis	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	100 ltr	100 ltr	100 ltr	22 Jenis		100 ltr	300 ltr	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 Jenis		2 jenis	6 jenis	
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan / Material Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	4 jenis	4 jenis	4 jenis	25 Jenis		4 jenis	12 jenis	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	60 laporan	60 laporan	60 laporan	58 laporan		60 laporan	180 laporan	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								
7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor Kecamatan Mihing Raya	2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	4 Jenis	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah**								
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	240 Lbr	240 Lbr	241 Lbr	240 lbr		240 Lbr	673 Lbr	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Rekening wifi, Listrik dan Air	3 Rekening	3 Rekening	4 Rekening	3 Rekening		3 Rekening	10 Rekening	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium PTT Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	5 orang	5 orang	6 orang	5 orang		5 orang	16 orang	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor**								
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Kecamatan Mihing Raya dan Kantor Kelurahan Kampuri	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit	21 Unit	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	12 Jenis	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa dan Bahan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Kecamatan	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis		6 Jenis	18 Jenis	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Meningkatnya Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD**								
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Musrenbang RKPD	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	5 Jenis		6 Jenis	18 Jenis	

7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Meningkatnya Barang dan Jasa Kelurahan Kampuri**								
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tersedianya Jumlah Barang dan Jasa Musrenbang Tingkat Kelurahan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis		5 Jenis	15 Dokumen	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di kelurahan Kampuri	6 jenis		4 jenis	4 jenis		6 jenis	10 jenis	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Tersedianya Honorarium RT, RW, Mantir Adat dan Kader Posyandu Kelurahan Kampuri	16 orang		16 orang	16 Orang		16 orang	32 orang	
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Terlaksanannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**								
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	18 Jenis	11 Jenis	18 Jenis	7 Jenis		18 Jenis	47 Jenis	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis			8 Jenis	24 Jenis	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								
		05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Pramuka	5 Jenis	5 Jenis				5 Jenis	10 Jenis	
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan Lomba Desa dan Rapat Kerja Camat	10 Jenis	19 Jenis	10 Jenis	19 Jenis		10 Jenis	39 Jenis	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tersedianya barang dan Jasa Kegiatan Paskibraka TingkatKecamatan Mihing Raya	16 Jenis	11 Jenis	16 Jenis	11 Jenis		16 Jenis	49 Jenis	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragam, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Tersedianya Barang dan Jasa Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan Mihing Raya	14 Jenis	8 Jenis	14 Jenis	8 Jenis		14 Jenis	36 Jenis	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tersedianya Honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang		2 Orang	6 Orang	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya Honorarium Tim Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang		5 Orang	15 Orang	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakata Desa	Tersedianya Honorarium PTT Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakata Desa	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang		1 Orang	3 Orang	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MIHING RAYA KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MIHING RAYA						**3.337.954.866,00**							**3.366.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.337.954.866,00**							**3.366.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.337.954.866,00**							**3.366.600.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**2.817.812.866,00**						**-**	**2.842.400.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	18.200.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	18.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		8.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		6.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	4.200.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.044.662.866,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.061.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	1.983.662.866,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.000.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	61.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		61.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.700.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	84.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	90.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	24.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		65.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.650.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	275.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				18 Paket	25.150.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		26.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		170.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	45.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	45.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	203.100.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	203.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	25.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	175.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		175.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	142.500.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	142.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		85.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	12.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		12.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**169.000.000,00**						**-**	**170.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	10.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	159.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	160.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				5 Lembaga Kemasyarakatan	134.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		135.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		25.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**173.142.000,00**						**-**	**174.200.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	173.142.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	174.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				10 Orang	16.642.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		16.700.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	22.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		22.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				17 Orang	74.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		75.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				35 Orang	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		60.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**			**-**	**178.000.000,00**						**-**	**180.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	178.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	69.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		70.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		68.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	41.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		42.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	J U M L A H							**3.337.954.866,00**							**3.366.600.000,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2025



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR ISI..... i
KATA PENGANTAR..... ii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Dasar Hukum..... 1
1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
1.3.1 Maksud..... 3
1.3.2 Tujuan..... 3
1.4. Sistematika Penulisan..... 3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 8
2.2. Analisis Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 19
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional..... 19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan..... 20
3.3. Program dan Kegiatan..... 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 25
BAB V PENUTUP..... 26

KATA PENGANTAR

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Visi **"Terwujudnya Pelayanan Perpustakaan dan Penataan Kearsipan di Kabupaten Gunung Mas Yang Berkualitas Berbasis IT Tahun 2025"** adalah suatu upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat dan sadar arsip yang menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 beserta rincian program dan kegiatan secara lengkap. Rencana Kerja Tahun 2025 ini menyajikan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Kepala Dinas,

Dr. MARIA EFIANTI., M.A.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700429 200012 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2025-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas berperan penting mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yaitu dengan visi ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU , BERDAYA SAING, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)".***

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 yang sesuai dengan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah seperti yang tercantum dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Mas tahun 2025-2026, landasan hukum yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerinah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);

18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024; dan
19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

1. Menyediakan dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
2. Menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata ara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 meliputi;

BAB I Pendahuluan;
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BAB V Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Benstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki Visi **)))))y))y)** **Gunung Mas Yang Berkualitas Berbasis IT Tahun 2025** . Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:

1. Terpenuhinya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Gunung Mas;
2. Terpenuhinya Penataan Kearsipan Daerah;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Mengembangkan Koleksi Buku Bacaan dan Depo Arsip Berbasis IT.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga) urusan, 5 program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan empat puluh tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Gunung Mas

Urusan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
1. Penunjang Urusan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** Sub kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perenanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusuna laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** Sub kegiatan : 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub kegiatan : 5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** Sub kegiatan : 6. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 7. Koordinasi dan pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian 8. Monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 9. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** Sub kegiatan : 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan peralatan rumah tangga 13. Penyediaan bahan logistic kantor 14. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 15. Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan 16. Penyediaan bahan / material 17. Penyediaan bahan koordinasi dan konsultasi SKPD 18. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** Sub kegiatan : 19. Penyediaan jasa surat menyurat 20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah** Sub kegiatan : 21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 22. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

		23. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya **Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota** Sub kegiatan : 24. Pengelolaan perpustakaan dan pengembangan bahan perpustakaan. 25. Pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan elektronik. 26. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Perpustakaan	2. Program Pembinaan Perpustakaan	**Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Tingkat Kabupaten / Kota** Sub kegiatan : 27. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat 28. Pengembangan literasi berbasis inklusi social 29. Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten /kota
	3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** **Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota** Sub kegiatan : 30. Pengembangan Koleksi Etnis Budaya Nusantara yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Kearsipan	4. Program Pengelolaan Arsip	**Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota** Sub kegiatan : 31. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis 32. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis 33. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / kota **Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** Sub kegiatan : 34. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

	5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	**Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota** Sub kegiatan : 35. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten /Kota. **Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun** Sub kegiatan : 36. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan,pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun .

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Tahun berjalan adalah sebagai berikut :

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE TRIWULAN IV TAHUN 2023

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB PROGRAM	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN IV	ANGGARAN TAHUN 2024
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	1. Penyusunan Dokumen Perecanaan Perangkat Daerah	74.089.864	75.501.364
			2. Koordinasi dan Penyusuna laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD	133.946.392	137.189.392
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyedaan gaji dan tunjangan ASN	1.636.787.265	2.938.619.483
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.406.002	12.191.102
			5. Penyusunan Laporan dan Analisi Prognois Realisasi Anggaran	7.541.007	7.701.957
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.214.614	9.409.920

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	66.717.828	68.528.028
			8. Monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	98.746.092	101.390.292
			9. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70.069.516	81.380.500
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.852.135	12.828.785
			11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85.775.000	87.956.955
			12. Penyediaan peralatan rumah tangga	114.785.313	117.586.754
			13. Penyediaan bahan logistik kantor	21.093.437	21.129.318
			14. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.984.400	14.985.000
			15. Penyediaan bahan bacaan dan peaturan perundang-undangan	7.650.000	7.700.400
			16. Penyediaan bahan / material	55.126.485	55.466.589
			17. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	311.874.727	301.628.200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18. Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	4.000.000
			19. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	121.710.544	124.182.792

		Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	20. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.153.382	40.398.507
			21. Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	41.518.500	43.386.415
			22. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	27.059.843	27.111.528
	2. Program Pembinaan Perpustakaan	**Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota**	23. Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	430.336.002	430.487.640
			24. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah/kabupaten/kota	539.309.991	547.402.500
			25. Pengembangan Bahan Pustaka	64.981.150	65.826.550
			26. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	275.330.165	275.468.000
			27. Penyusunan Data dan Informasi Perpustkaan, tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.666.017	69.670.823
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Tingkat Kabupaten / Kota	28. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	131.493.130	134.476.129
			29. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	12.429.793.511	12.576.910.240
			30. Pengembangan literasi berbasis inklusi social	142.674.054	143.531.244
			31. Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten /Kota	136.421.421	138.312.297

	3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota**	32. Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis Nusantara	43.132.400	43.175.644
			33. Pengolahan dan penyiangan koleksi etnis Nusantara	36.020.741	36.113.657
	4. Program Pengelolaan Arsip	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota**	34. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	160.576.453	162.020.477
			35. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	17.896.336	18.422.436
			36. Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	244.920.107	246.324.068
		Pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota	37. Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	44.459.027	44.523.781
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota	38. Pemberdayaan Kapasitas Unit kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	148.573.500	150.000.000
				18.993.678.425	19.372.978.767

2.1. Analisis Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan dan Kearsipan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 – 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan SDM bagi petugas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung	5.000	2.072	5.250	2.199
	Jumlah Anggota Perpustakaan	1.800	52	1.800	460
	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dibina	52	50	54	50
Menata Sistem Kearsipan Sesuai Standar Kabupaten	Jumlah SKPD yang mengelola Arsip dengan baik	30	32	34	32
Pengadaan dan Penggandaan berbagai koleksi buku dan bahan bacaan	Penambahan Koleksi Perpustakaan	34.000	30.424	35.000	30.324
Meningkatkan Sarana Prasarana Penunjang di Depo Arsip	Jumlah Arsip baku yang di kelola	1.035	1.010	1.100	1.121

Pada tahun 2019 tidak ada indikator yang mencapai target baik yang berhubungan dengan bidang Perpustakaan maupun bidang kearsipan. Dengan keluarnya Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/103/2018 tanggal 13 September 2018 Perihal : Rancangan JRA Fasilitatif dan Subtantif Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 14 (empat belas) urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/115/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Perihal : Rancangan JRA Subtantif Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 10 (sepuluh) urusan Pemerintah Daerah. Target yang merupakan indikator yang berhubungan dengan bidang Arsip yaitu Jumlah SKPD yang menggelola arsip secara baku dan Jumlah arsip yang dikelola setiap tahunnya menggalami peningkatan walau pun tidak bisa mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan belum tercapainya indikator pada Jumlah Pengunjung, Jumlah Anggota Perpustakaan, Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang dibina dan Penambahan koleksi bahan pustaka yang merupakan indikator yang berhubungan dengan bidang Perpustakaan hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Sarana dan Prasarana ruang layanan baca umum dan anak yang sudah terbatas dimana 1 unit Gedung yang ditempati sekarang merupakan kantor sekaligus ruang pelayanan bagi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga ruang untuk penyimpanan buku dan ruang untuk membaca sudah tidak memadai.
2. Terbatasnya dana yang dianggarkan dalam meningkatkan koleksi perpustakaan dan pengadaan buku masih belum menjadi skala prioritas utama kegiatan perpustakaan.
3. Belum ada perpustakaan percontohan untuk Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Desa.
4. Dan dengan adanya Full Day untuk anak SMP yang pulang sekolah pukul 14.00 Wib dan anak SMA pulang sekolah pukul 15.00 WIB menyebabkan kunjungan Perpustakaan menurun.

Untuk mencapai target pada setiap indikator yang telah ditetapkan maka dinas perpustakaan dan kearsipan mengambil beberapa langkah sebagai tindak lanjut hasil dari capaian tahun 2021,2022 ,2023 dan 2024 adapun langkah yang diambil pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kembali melanjutkan program kerja sebagai kelanjutan dan kegiatan bidang perpustakaan dan Kearsipan yang telah dituntaskan di tahun 2024 ke tahun 2025.
2. Mengajukan pembangunan Gedung Depo Arsip yang baru baik itu melalui APBD atau pun APBN penyaluran dana DAK.

Berikut akan disajikan Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas.

Table 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Gunung Mas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -						Realisasi Capaian				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan Perpustakaan dan Pengelolaan Kearsipan	1. Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat 2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan daerah	1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan 2. Jumlah Anggota Perpustakaan 3. Jumlah Koleksi Bahan Pustaka 4. Jumlahbuku pengelolaan arsip 5. Jumlah SKPD/Kecamatan yang menerapkan Arsip secara baku	4.500 1.850 5.500 1115 25	4.500 1.600 32.000 950 25	4.750 1.700 33.000 1.000 30	5.000 1.800 34.000 1.035 30	5.250 1.900 35.000 1.100 34	5.500 2.000 36.000 1.150 36	4.028 1.478 30.130 828 24	3.548 1.770 30.324 945 32	365 143 36.554 1.040 32	2.072 52 30.424 1.010 32	2.199 460 31.324 1.121 32
2.	Meningkatkan Aksebilitas Layanan Perpustakaan	1. Meningkatkan Aksebilitas Layanan Perpustakaan	1. Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	70	50	52	52	54	54	50	50	50	50	50

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur pelayanan publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

1. Layanan perpustakaan kepada masyarakat belum merata.
   Hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah Perpustakaan Desa yang ada di Kabupaten Gunung Mas dari 13 Kelurahan dan 115 Desa baru ada 50 perpustakaan desa/kelurahan.

2. Masih kurangnya minat dan budaya baca pelajar, masyarakat umum dan aparatur pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari indeks Pembangunan Literasi masyarakat 35,17 yang masih sangat rendah. Dan tingkat kegemaran membaca menunjukan angka 56,28 diangka sedang.

3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan, antara lain perlunya :
   - Pengadaan gedung aula perpustakaan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan promosi perpustakaan;
   - Penambahan mobil perpustakaan keliling;
   - Pengadaan motor perpustakaan keliling;
   - Peningkatan kapasitas jaringan internet di perpustakaan umum daerah;
   - Peningkatan kapasitas gedung depo arsip;

4. Belum didukungnya sumber daya manusia yang memadai baik dalam kualitas maupun kuantitas yang mengelola bidang Perpustakaan dan Kearsipan, antara lain masih sedikitnya pejabat fungsional pustakawan maupun arsiparis yang mahir dibidangnya.

5. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Dibidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan.

Untuk menuju tujuan yang diharapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas perlu mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berikut adalah identifikasi faktor-faktor lingkungan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut:

1. Percepatan dan pemerataan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat melalui pendirian dan pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
2. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi Perpustakaan akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas Perpustakaan berbasis Teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah melalui sosialisasi, supervisi, pembinaan, monitoring dan evaluasi akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih di Kabupaten Gunung Mas;
4. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan yang dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang professional dan terampil pada semua sektor dan ini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima dibidang Perpustakaan dan Kearsipan kepada masyarakat.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 Kabupaten Gunung Mas, maka visi yang hendak dicapai dalam periode 2019-2024 adalah **r w p” l) y l m l r”) t ” ”t) “ l) l ”t)** **BERMARTABAT, MAJU BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI** **Fmr w l ”t) mr l “ l GL** Memperhatikan visi serta perubahan paradigm dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan dating, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan insfraktruktur wilayah secara adil dan proposional
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)
3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
4. Mempercepat Reformasi Birokrasi
5. Penegakan dan jaminan kepastian hokum (Law Enforcement)
6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan local
7. Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development)
8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2019-2024 serta urusan pemerintah yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka Fungsi dan Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait erat dengan pencapaian misi ke 2 dan ke 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan tahun 2025 berada pada arahan RPJPN 2020-2025 untuk RPJMN 2020-2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong L**

Untuk mewujudkan visi dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Searah dengan visi RPJMN 2020-2024, tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2023 adalah **")v J) J))v))m) Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas** . Dengan 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan Pembanguan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Visi Perpustakaan Nasional 2020 – 2024 **) ") Berpengetahuan (knowledge society) Melalui Perpustakaan** . Dengan misi "Mewujudkan Perpustakaan Sebagai Wahana Belajar Spanjang Hayat dan Pelestarian Khazana Budaya Bangsa", dengan Tujuan yaitu :

1. Peningkatan Masyarakat Pembelajar Sepanjang Hayat untuk Mewujudkan Masyarakat Berbudaya Literasi; dan

2. Peningkatan Pelestarian Khazanah Intelektual Budaya Bangsa untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa.

Visi Arsip Nasional 2020 - 2024 yaitu **Menjadikan Arsip Nasional Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Melakukan Pelayanan Tugas-Tugas Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Gotong Royong** dengan misi yaitu :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Meberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan akses arsip kepada public untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundnag-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Penyelarasan RKPD dengan RKP tahun 2022, maka berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas terkait erat dengan prioritas yang ke 3 (tiga) yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas juga mengambil arah dan kebijakan sesuai dengan Visi dan Misi yang ada pada Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas mengacu pada Rencana Strategis 2025-2026 yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan Perpustakaan dan sistem administrasi kearsipan yang berkualitas di Kabupaten Gunung Mas
2. Meningkatnya budaya baca masyarakat dan tertib arsip di Kabupaten Gunung Mas
3. Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Gunung Mas

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas Periode 2024-2025 yaitu:

1. Peningkatan minat baca dan budaya gemar membaca melalui peningkatan kualitas layanan

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan yang ditandai oleh meningkatnya budaya baca, standar mutu perpustakaan dan kompetensi SDM di semua jenis perpustakaan
3. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan menyusun peraturan/pedoman sistem kearsipan
4. Optimalisasi akuisisi arsip statis pada instansi pemerintah daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencaanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusuna laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

5. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

6. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
7. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
8. Monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
9. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
12. Penyediaan peralatan rumah tangga
13. Penyediaan bahan logistic kantor
14. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16. Penyediaan bahan / material
17. Penyediaan koordinasi dan konsultasi SKPD
18. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

6). Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

19. Penyediaan jasa surat menyurat
20. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
22. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
23. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya

2.Program Pembinaan Perpustakaan

8). Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

24. Pengembangan dan pemeliharaan perpustakaan elektronik
25. Pengelolaan dan Pengembangan bahan perpustakaan

9). Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Tingkat Kabupaten / Kota

Sub kegiatan :

26. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat
27. Pengembangan literasi berbasis inklusi social
28. Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota

3.Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

10). Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

29. Pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis Nusantara

4. Program Pengelolaan Arsip

11). Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota

Sub kegiatan :

30. Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota
31. Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
32. Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
33. Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / kota

12). Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota

Sub kegiatan :

34. Akusisi,pengolahan dan preservasi dan akses arsip statis

13). Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota

Sub kegiatan :

35. Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

14). Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun

Sub kegiatan :

36. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan, pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun .

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 sejumlah 5 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.

Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci pada table berikut ini :

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**6.263.590.806,00**							**6.511.600.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.200.265.353,00**							**6.445.600.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.707.233.485,00**							**5.943.600.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.903.898.164,00**						**-**	**5.083.600.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	230.553.511,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	93.517.091,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	137.036.420,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.194.889.862,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	3.315.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.180.726.978,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		3.300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	14.162.884,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.566.481,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	7.566.481,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	347.776.160,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	368.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	77.977.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	57.337.940,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		58.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	84.723.160,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	127.737.560,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	617.174.753,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	632.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.712.330,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.452.443,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	211.128.002,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		212.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	30.627.498,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		31.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.987.680,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				42 Paket	60.027.834,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		61.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	251.480.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	15.758.366,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	403.092.843,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	403.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		1.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	401.592.843,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		402.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	102.844.554,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	107.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	75.783.642,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		77.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	27.060.912,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**			**-**	**763.335.606,00**						**-**	**820.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	441.634.693,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	460.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	108.645.393,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10 Eksemplar	232.989.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	321.700.913,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	360.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				5 Orang	108.033.212,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				6 Perpustakaan	144.644.993,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				4 Lokus	69.022.708,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**			**-**	**39.999.715,00**						**-**	**40.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	39.999.715,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				100 Eksemplar	39.999.715,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**493.031.868,00**							**502.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**478.189.193,00**						**-**	**487.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	430.810.163,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	432.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				300 Berkas	190.687.096,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		191.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				300 Berkas	19.776.484,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	-	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Laporan	220.346.583,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		221.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	37.379.030,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				200 Arsip	37.379.030,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**			**-**	**14.842.675,00**						**-**	**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-			-	14.842.675,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				150 Arsip	14.842.675,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X	**NON URUSAN**						**63.325.453,00**							**66.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**63.325.453,00**							**66.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**63.325.453,00**						**-**	**66.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	7.700.400,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.700.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	55.625.053,00			-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	55.625.053,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H							**6.263.590.806,00**							**6.511.600.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja 2025) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan SKPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas akan lebih terarah. Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenan.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

Kepala Dinas,

Dr. MARIA EFIANTI., M.A.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19700429 200012 2 001

RENJA 2025



DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan suatu pedoman dalam menentukan sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Sebagai instansi pelaksana teknis di bidang Pekerjaan Umum, penataan ruang serta perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Gunung Mas, maka merupakan suatu kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang didasari atas tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama untuk mencapai suatu impian/harapan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Rencana Kerja ini secara garis besar memberikan informasi mengenai Rencana Kerja Tahun 2025 guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026.

Akhirnya kami berharap bahwa dengan adanya Rencana Kerja ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kuala Kurun, Juni 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas,

BARYEN, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730401 199903 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu	9
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	12
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
	2.6 Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah	14
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
	3.3 Program dan Kegiatan Prioritas	20
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	
BAB V	**PENUTUP**	

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	10
Tabel 2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Gunung Mas	12
Tabel 2.4	Usulan program dan kegiatan Tahun 2025	13
Tabel 2.5	Usulan program dan kegiatan dari pada pemangku kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas	13
Tabel 3.1	Matrik hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas	14
Tabel 3.1	Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	17
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Tahun 2024	19
Tabel 3.4	Program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025	21
Tabel 3.5	Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025	24
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Gunung Mas	27

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen RENJA PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2
Gambar 1.2	Tindak lanjut Dokumen RENJA PD dalam Penyusunan APBD	2
Gambar 2.1	Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH)	15
Gambar 2.2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	15



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

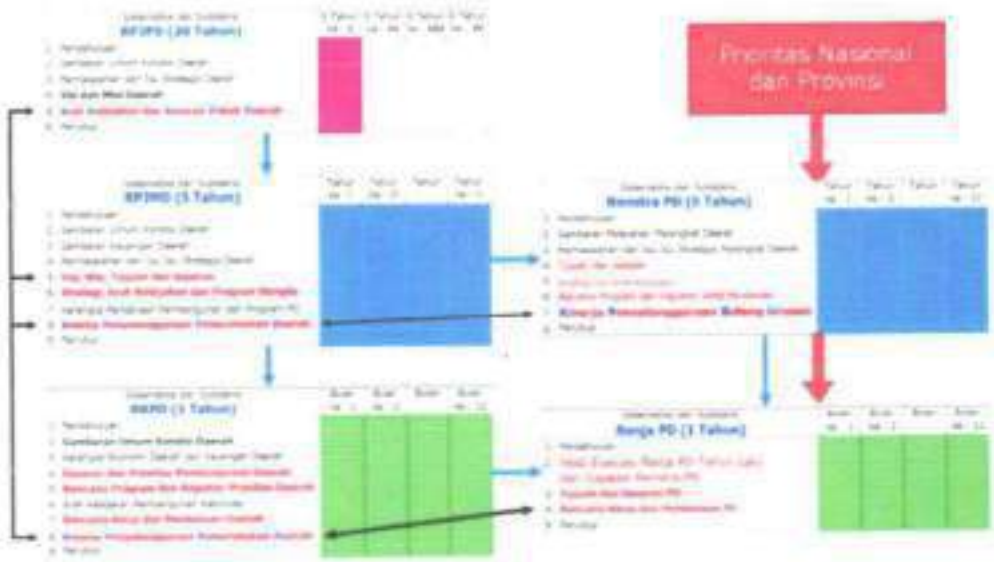
1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efesien dan efektif yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa : *failing to plan is planning to fail* : gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah, yang dikoordinasikan, disinergiskan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

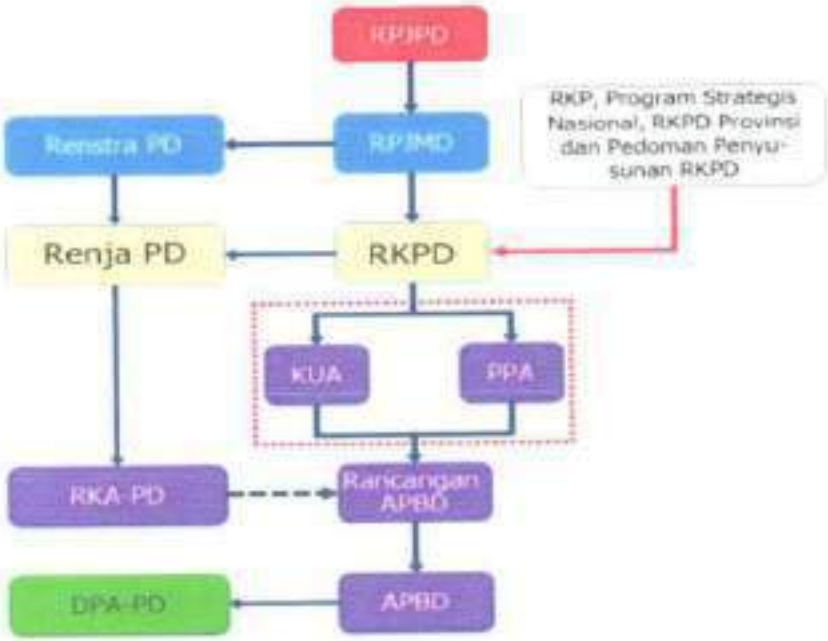
Dokumen perencanaan ditingkat perangkat daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target RPJMD, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. **Lihat gambar 1.1.**

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen RENJA PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.



Rencana kerja perangkat daerah **(RENJA PD)** adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. **Lihat gambar 1.2.**

Gambar 1.2. Tindak lanjut Dokumen RENJA PD dalam Penyusunan APBD



Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) memuat program, kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil renja PD tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja PD dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan rancangan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi rancangan akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

Keterkaitan Dokumen Rencana Kerja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1. sedangkan tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) PD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelnggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah;
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
41. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Gunung Mas;
42. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 melalui perencanaan kinerja tahunan, yang menjadi pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Gunung Mas.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah menyiapkan perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan pencapaian target

tahunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025;

b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan dan kawasan permukiman dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan urusan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya di Tahun 2024 serta capaian Renstra Tahun 2024. Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah Tabel 2.1. yang memuat rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 2024 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2024

Nama PD : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Kode	Urusan/ Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(9/4*12)		11=(10/4)
	Urusan Wajib															
	DINAS PEKERJAAN UMUM															
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor														
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	19	Dokumen	19	Dokumen	19	Dokumen	100%	4	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen RAA-SKPD	5	Dokumen	-	-	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	5	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RAA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen RAA-SKPD	5	Dokumen	-	-	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	5	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	-	-	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	5	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Dokumen DPA-SKPD	5	Dokumen	-	-	10	Dokumen	10	Dokumen	100%	5	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	7	Dokumen	7	Laporan	7	Laporan	100%	18	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	120	Orang/bulan	15	Dokumen	69	Orang/Bulan	69	Orang/Bulan	100%	120	Orang/Bulan		Orang/Bulan	
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	11	Dokumen	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	11	Dokumen	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	11	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1 03 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	10	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	4	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	13	Dokumen	63	Dokumen	63	Dokumen	100%	4	Dokumen		Dokumen	
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Pegawai Yang mengikuti BIMTEK	15	Orang	-	-	11	Orang	11	Orang	100%	20	Orang		Orang	
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik yang disediakan	1	Paket	30	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket		Paket	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	35	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket		Paket	

Kode	Urusan/ Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah/Jenis Logistik Kantor yang disediakan	2	Paket	54	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	3	Paket		Paket	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Paket	15000	Jenis	1	Paket	1	Paket	100%	2	Paket		Paket	
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah yang menjadi Langganan	2	Dokumen	119	Eksemplar	2	Eksemplar	2	Eksemplar	100%	4	Eksemplar		Eksemplar	
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	1	Paket	1	Paket	100%	-	-	-	-	-
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rata-rata Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	3	Laporan	185	Kali	100	Kali	100	Kali	100%	8	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	Unit	-	Unit	-	Unit	0%					
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebel yang disediakan	6	Unit	-	-	-	-	-	-	-	6	Unit		Unit	
1 03 01 2.07 09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6	Unit	21	Unit	7	Jenis	7	Unit	100%	11	Unit		Unit	
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat bermaterai	1	Laporan	518	Lembar	1000	Lembar	1000	Lembar	100%	1	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah/Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Setahun	1	Laporan	13	Jenis	2	Jenis	2	Jenis	100%	4	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.08 04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah/Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	4	Laporan		Laporan	
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	40	Unit	19	Jenis	68	Unit	68	Unit	100%	40	Unit		Unit	
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit	-	M²	1	Unit	1	Unit	100%	-	-	-	-	-
1 03 01 2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	-	-	1	Unit	1	Unit	100%	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**															
1 03 02 2.01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang dibangun	-	-	1026	Meter	1026	Meter	1026	Meter	100%	-	-	-	-	-
1 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-	-	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 03 02 2.01 07	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang dibangun	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	2	Unit		Unit	
1 03 02 2.01 09	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0,2	Km	-	-	-	-	-	-	-	0,2	Km		Km	
1 03 02 2.01 18	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 02 2.01 13	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang dioperasikan dan dipelihara	2	Km	-	-	-	-	-	-	-	2	Km		Km	

Kode	Urusan/ Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		(6/7)	8		10=(6+7+8)	11=(7/10)	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 02 2.02 4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi yang di bangun	0,25	Km	-	Meter	-	Meter	-	Meter	-	0,25	Km		Km	
1 03 02 2.02 8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang ditingkatkan	0,25	Km	-	-	176	Meter	176	Meter	100%	0,25	Km		Km	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,4	Km	1111	Meter	388	Meter	388	Meter	100%	0,4	Km		Km	
1 03 02 2.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1	Bendung	1	Paket	1	Unit	1	Unit	100%	1	Bendung		Bendung	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	31,2	Km	56	Daerah Irigasi	1262	Meter	1262	Meter	100%	31,3	Km		Km	
1 03 02 2.02 33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terlaksananya Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	1	D.I	-	-	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	D.I		D.I	
1 03 02 2.02 35	Penyusunan Rancana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi Rawa yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan Perluasan/Perbaikan SPAM	Panjang Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	-	-	01	Meter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	-	-	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Dibangun	-	-	979	Meter	78	SR	78	SR	100%	-	-	-	-	-
1 03 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Panjang Jaringan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaanyang Ditingkatkan	-	-	934	Meter	20	Liter/Detik	20	Liter/Detik	100%	-	-	-	-	-
1 03 03 2.01 25	Penyusunan Rancana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rancana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 03 2.01 26	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 03 2.01 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan yang dibangun	10	Liter/detik	-	-	-	-	-	-	-	1,5	Liter/Detik		Liter/Detik	
1 03 03 2.01 29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang dioperasikan dan dipelihara	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit		Unit	
1 03 03 2.01 31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum SPAM yang dioptimalisasikan	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit		Unit	
1 03 03 2.01 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang tertayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	100	SR	-	-	-	-	-	-	-	15	SR		SR	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
1 03 04 2.01	Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 04 2.01 03	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3S/TPS	Terlaksannya pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3S/TPS	-	-	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Ranja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Ranja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Ranja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(9+7+8)		11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
1 03 08 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 08 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pertusan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Kegiatan Penambahan Rumah Tangga yang terlayani melalui Optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	-	-	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 08 2.01 06	Rehabilitasi/Peningkatan/Pertusan Sistem Pengelolaan Air	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	-	-	-	-	254	Unit	254	Unit	100%	-	-	-	-	-
1 03 08 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Unit SPALD-T yang dibangun	-	-	2	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 08 2.01 39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD setempat	Jumlah Penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala setempat	120	Rumah Tangga	2	Paket	-	-	-	-	-	199	Rumah Tangga		Rumah Tangga	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung															
1 03 09 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1000	M²	384	M²	384	M²	100%					
1 03 09 2.01 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	7	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	33	Dokumen		Dokumen	
1 03 09 2.01 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilaian Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Jumlah Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilaian Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	20	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	20	Dokumen		Dokumen	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang berisikan Kebijakan	-	-	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	0	Dokumen		Dokumen	
1 03 09 2.01 02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	-	-	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Luasan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	-	-	54	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 09 2.01 10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	54	M²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
1 03 10 2.01 31	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	1	Jembatan	63,5	M	-	-	-	-	-	1	Unit		Unit	
1 03 10 2.01 32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10	Km	7,8	KM	15	KM	15	KM	100%	6,5	KM		KM	
1 03 10 2.01 33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Ditingkatkan/ Rekonstruksi	10	Km	70,3	KM	7	KM	7	KM	100%	0	KM		KM	
1 03 10 2.01 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	0	Km	2,6	KM	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1,5	KM		KM	

Kode	Uraian Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1 03 10 2.01 38	Penselharaan Rutin Jalan	Jumlah Jembatan yang dipelihara			3,2	Ls	2	Lokasi	2	Lokasi	100%	5	Jembatan		Jembatan	
1 03 10 2.01 39	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	5	Jembatan	-	-	60	Meter	60	Meter	100%	5	Jembatan		Jembatan	
1 03 10 2.01 40	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	0	Jembatan	396	M	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Jembatan		Jembatan	
1 03 10 2.01 41	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terselenggaranya Jembatan yang Dipelihara	5	Jembatan	13,5	Ls	25	Meter	25	Meter	100%	-	-	-	-	-
1 03 10 2.01 43	Survey Kondisi Jalan Jembatan	Panjang Jalan dan Jembatan yang diurvey	732,99	Km	-	-	-	-	-	-	-	738	Km		KM	
1 03 10 2.01 43	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Luas Lokasi Ruas Jalan yang di Pelihara	1	Km	-	-	-	-	-	-	-	2	Km		KM	
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terselenggaranya Penanganan Darurat Jalan/Jembatan	-	-	53,4	Ls	30	Meter	30	Meter	100%	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi															
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenagga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti Pelatihan	-	-	6	Orang	30	Orang	30	Orang	100%					
1 03 11 2.01 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenagga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang mengikuti Pelatihan	25	Orang	-	-	-	-	-	-	-	30	Orang		Orang	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
1 03 11 2.02 12	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Jenis Perangkat Pendukung Layanan Bidang Jasa Konstruksi	-	-	1	Unit	2	Unit	2	Unit	100%	1	Perangkat		Perangkat	
1 03 11 2.02 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	2	Dokumen		Dokumen	
1 03 11 2.02 14	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIFJAK	Jumlah Pengelola (SIPAJAK) yang ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	7	Orang	2	Orang	2	Orang	100%	2	Orang		Orang	
1 03 11 2.02 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang dioperasikan	1	Layanan Informasi	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Layanan Informasi		Layanan Informasi	
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Kegiatan Informasi Material dan Peralatan Jasa Konstruksi	-	-	2	Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi															
1 03 11 2.04 09	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	-	-	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	-	-	-	-	-
1 03 11 2.04 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10	Paket Pekerjaan	-	-	-	-	-	-	-	143	Paket Pekerjaan		Paket Pekerjaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota															
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Penelitian Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen/Orang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 03 12 2.01 05	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen/Orang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kaluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(9+7+8)	11=(10/4)	
1 03 12 2.01 05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.01 08	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen Persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.01 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.01 13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	1	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**															
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	1	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 03 12 2.02 06	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	2	Orang	-	-	-	-	-	-	-	2	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**															
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persetujuan Substansi dan Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	-	150	Dokumen	150	Dokumen	135	Dokumen	90%	-	-	-	-	-
1 03 12 2.03 03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	20	Dokumen		Dokumen	
1 03 12 2.03 04	Pelaksanaan Persetujuan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	5	Layanan	-	-	-	-	-	-	-	4	Laporan		Laporan	
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**															
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	-	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
1 04 02 2.01	**Pendataan Pengelolaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**															
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	-	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	-	-	-	-
1 04 02 2.01 09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen		Dokumen	
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**															
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	51	Unit Rumah	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan		Laporan	
1 04 03 2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**															

Kode	Urusan/ Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)					Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2024		
							Target Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2024 (tahun n-1)		Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(6+7+9)		11=(10/4)
1 04 02 2.06 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan		Laporan	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman															
1 04 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	-	-	-	-	-
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	31	Unit Rumah	-	-	39	Unit	39	Unit	100%	77	Unit		Unit	
1 04 03 2.03 05	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	-	50	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
1 04 04 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1 04 04 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen		Dokumen	
1 04 04 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	11	Lokasi	51	Kegiatan	11	Laporan	11	Laporan	100%	15	Lokasi		Lokasi	
1 04 04 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan		Laporan	
1 04 04 2.01 09	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	1	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	4	Lokasi		Lokasi	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai instansi teknis dituntut untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya meningkatkan kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas mempunyai program kerja strategis untuk 5 (lima) Tahunan sebagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dan diwujudkan dalam berbagai program maupun kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SOPD, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dengan perkembangan kedepan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Tahun 2019 – 2024 dan Indiktor Kinerja Utama pada **Tabel 2.2** sebagaimana terlampir.

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Gunung Mas

NO.	INDIKATOR	TARGET SPM					REALISASI SPM		PROYEKSI			IKK (PP 6/2006)	SDGs	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	19	21	22	23	24	25	26
1	Luas Wilayah Produktif (Juta Ha)													0,565	0,565	0,565	0,565	0,565		0,565	0,565	0,565		
2	Luas Wilayah Rehabilitasi (Ha)													20	20	20	20	20		20	20	20		
3	Luas Wilayah Perkotaan (Ha)													7,402	7,506	7,32	7,534	7,09		7,506	7,32	7,534		
4	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik													37,75	42,17	46,58	50,99	55		42,17	46,58	50,99		
5	Rasio Saluran Irigasi yang Berfungsi Optimal													78	76	78	78	78		76	78	78		
6	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi													55,6	60	64,4	68,8	73,2		60	64,4	68,8		
7	Rasio Rumah Layak Huni													33,05	36,47	40,3	42,12	60		36,47	38,3	42,12		
8	Pemukiman Layak Huni (Ha)													7,100	7,200	7,300	7,400	7,500		7,200	7,300	7,400		
9	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)													737,000	737,000	737,000	737,000	737,000		737,000	737,000	737,000		
10	Rasio Jalan Dalam Kondisi Baik (%)													27	28	29	30	31		28	29	30		
11	Rasio Jembatan Dalam Kondisi Baik (%)													6	7	9,3	10	11,0		7	8,3	10		
12	Jumlah Desa Yang Terhubung Dengan Kecamatan													3	3	3	3	3		3	3	3		
13	Jumlah Desa yang Dialiri Air Bersih													3	3	3	3	3		3	3	3		
14	Persentase desa yg terhubung dg jalan pasti kecamatan dalam kondisi baik													55	60	65	70	75		60	65	70		
15	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (jiwa)	40%	50%	60%	70%		40%		65%	70%				16.000	17.000	18.000	19.000	20.000		17.000	18.000	19.000		
16	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	29%	45%	50%	60%		29%		55%	60%				90,8	91,2	93,3	93,8	95		95	97	93,8		
17	Rumah Layak Huni (unit)	60%	70%	85%	90%		60%		80%	90%				33,05	36,47	40,3	42,12	60		40.083	44.831	42,12		
18	Persentase Desa yang Memiliki Permukiman dan Kawasan Perumahan yang Layak Huni													27,50	30,00	32,50	35	37,5		30,00	32,50	35		
19	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan													0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0,01		
20	Ruang Terbuka Hijau (RTH) (%)													0,02	0,02	0,03	0,03	0,03		0,02	0,03	0,03		
21	Persentase Taman/RTH Kota Dengan Kriteria Terbaik													15	15	15	15	15		15	15	15		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan Renja PD Tahun 2024 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2023 yang mengacu pada kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah yang tercantum dalam Rancangan RKP 2024 dan RKPD Provinsi dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah yang mengacu program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun rencana yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional dan Provinsi, isu strategis pada penyelenggaraan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun Isu – isu penting/strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
3. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan;
4. Reformasi Birokrasi;
5. Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal);
6. Pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan;
7. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas. Telaahan rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada **Tabel 2.3.** sebagai berikut:

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas

Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Renstra Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					DINAS PERTANIAN UMUM								167.986.270.062,00					188.704.233.933,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								167.986.270.062,00					188.704.233.933,00
3	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								150.957.341.853,00					168.844.233.933,00
3	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13.979.821.209,00					14.384.282.933,00
3	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								137.006.320,00					137.006.320,00
3	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	33.000.000,00
3	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00
3	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00
3	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	6.000.000,00
3	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Dokumen		6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	6.000.000,00
3	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		90.999.107,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	90.000.000,00
3	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.202.050.689,00					10.253.006.000,00
3	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		120 Orang/bulan		10.154.050.689,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	10.200.000.000,00
3	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000,00
2.	03	01	2.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		12 Laporan		91.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	91.000.000,00
3	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									78.714.568,00					80.000.000,00
1.	03	01	2.03	0003	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		78.714.568,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang milik Daerah SKPD	1 Dokumen	80.000.000,00
4	03	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									440.000.000,00					500.000.000,00
1.	03	01	2.03	0003	Pengelolaan Pelayan Gaji dan Suserta Ambut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pelayan Dinas beserta Ambut Kelengkapan		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pelayan Dinas beserta Ambut Kelengkapan	1 Paket	100.000.000,00
2.	03	01	2.03	0004	Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00
3	03	01	2.03	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15 Orang		300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	250.000.000,00
1	03	01	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah									761.750.094,00					800.000.000,00
2.	03	01	2.03	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000,00
3	03	01	2.03	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		20.658.744,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00
4	03	01	2.03	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2 Paket		330.092.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	400.000.000,00

1	00	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Paket		25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahap	80.000.000,00
1	00	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen		12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000,00
1	00	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan		180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	800.000.000,00
1	00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										170.600.000,00					100.000.000,00
1	00	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit		75.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	80.000.000,00
1	00	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit		87.125.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	125.000.000,00
1	00	05	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.312.440.032,00					1.937.282.032,00
1	00	05	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 persen	1 Laporan		12.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00
1	00	05	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 persen	1 Laporan		324.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000,00
1	00	05	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan		1.275.540.032,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.275.282.032,00
1	00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										680.000.000,00					750.000.000,00
1	00	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu, Rasio aduan yang ditangani	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96 persen	40 Unit		500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	650.000.000,00
1	00	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

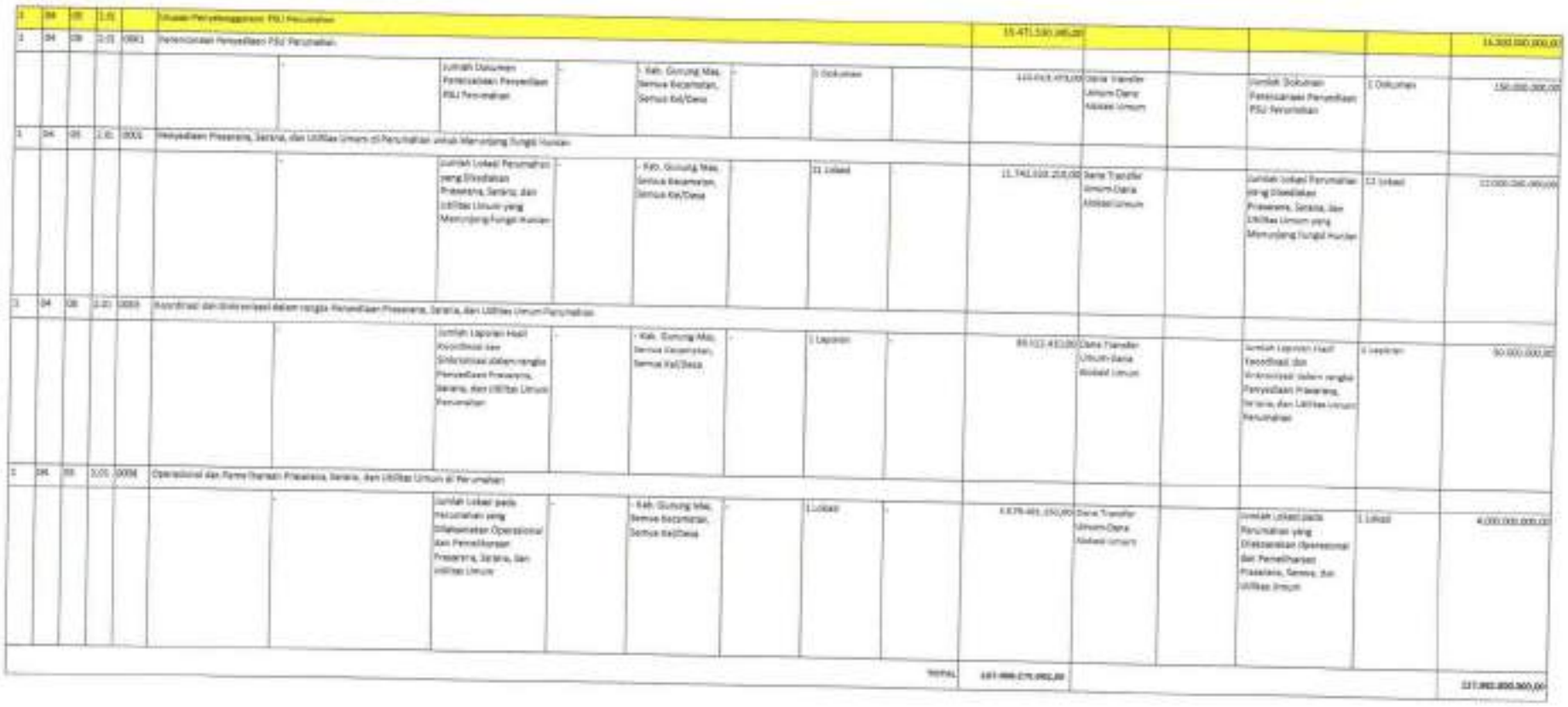
						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor, Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik, Persentase pegawai disiplin, Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, Persentase laporan kinerja dan keuangan yang sesuai tepat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Gunung Mas, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	90 persen	1 Unit	-	190.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00
1	03	01				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)													10.500.000.000,00
1	03	01	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pemda pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00							3.500.000.000,00
1	03	01	2.01	0073		Operasi dan Pemeliharaan Sungai													
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Km	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Km	800.000.000,00
1	03	01	2.01	0107		Pembangunan Unit Air Baku													
							Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit	-	1.300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	1.300.000.000,00
1	03	01	2.01	0109		Pembangunan bangunan Perkuatan Tebing													
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1,1 Km	-	2.200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,2 Km	1.500.000.000,00
1	03	01	2.01	0110		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS lintaskab/kot Kabupaten/Kota													
							Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS lintaskabupaten/Kota yang Disusun	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS lintaskabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000,00
1	03	01	2.01			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.400.000.000,00							4.900.000.000,00
1	03	01	2.01	0004		Pembangunan Jaringan Irigasi Desa													
							Panjang Jaringan Irigasi Desa yang Dibangun	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1,25 Km	-	900.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jaringan Irigasi Desa yang Dibangun	0,25 Km	1.920.000.000,00
1	03	01	2.01	0005		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan													
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1,25 Km	-	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,25 Km	500.000.000,00
1	03	01	2.01	0004		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	-	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14 Km	-	500.000.000,00			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,4 Km	1.000.000.000,00
1	03	01	2.01	0003		Rehabilitasi Bendung Irigasi													
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Bendung	-	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	600.000.000,00
1	03	01	2.01	0011		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan													
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		31,2 Km	-	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	31,2 Km	1.250.000.000,00
1	03	01	2.01	0000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penelitian dalam Kawasan Rawa													

						-	Jumlah Daerah Rawa yang memerlukan koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi dan Pengelolaan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 D.I	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Daerah Rawa yang memerlukan koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasinasi Pengelolaan	1 D.I	100.000.000,00
1	09	09			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									17.150.960.312,00						18.500.000.000,00
1	09	09	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota									17.150.960.312,00						18.000.000.000,00
1	09	09	2.01	0030	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
						-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Liter/Detik	-	2.848.786.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	2.000.000.000,00
1	09	09	2.01	0031	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
						-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Liter/Detik	-	10.703.721.312,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Detik	11.000.000.000,00
1	09	09	2.01	0032	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
						-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	948.786.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.000.000.000,00
1	09	09	2.01	0041	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
						-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalkan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	2.219.786.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalkan	1 Unit	2.500.000.000,00
1	09	09	2.01	0051	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
						-	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 SR	-	1.408.786.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	1.500.000.000,00
1	09	09			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									6.460.805.000,00						6.500.000.000,00
1	09	09	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									6.460.805.000,00						6.000.000.000,00
1	09	09	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) tertentu															
						-	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	120 Rumah Tangga	-	6.460.805.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	120 Rumah Tangga	6.000.000.000,00
1	09	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									8.859.500.922,00						300.000.000,00
1	09	09	2.03		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung									8.859.500.922,00						300.000.000,00
1	09	09	2.03	0033	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pemberdayaan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															

								Jumlah Dokumen Pembangunan, Penyelesaian, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7 Dokumen		9.337.347.965,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan, Penyelesaian, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	0,00
1	03	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
								Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30 Dokumen		100.922.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pemilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	100.000.000,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											600.000.000,00					1.000.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											600.000.000,00					3,00
1	03	09	2.01	0003	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
								Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		- Semua kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		600.000.000,00			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											95.987.520.000,00					[redacted]
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											95.987.520.000,00					[redacted]
1	03	10	2.01	0101	Penggantian Jembatan																
								Jumlah Jembatan yang Diganti		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Jembatan		10.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	10.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0102	Pembangunan Jalan																
								Panjang Jalan yang Dibangun		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 KM		18.987.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	10.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0103	Rekonstruksi Jalan																
								Panjang Jalan yang Direkonstruksi		- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 KM		43.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	45.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0104	Pemeliharaan Berkala Jalan																

							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 KM	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	5.000.000.000,00
1	01	10	1.01	0008	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Jembatan	-	3.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 Jembatan	1.500.000.000,00
1	01	10	1.01	0009	Rehabilitasi Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Jembatan	-	22.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 Jembatan	25.000.000.000,00
1	01	10	1.01	0010	Pembangunan Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Jembatan	-	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	7.500.000.000,00
1	01	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	732,891 Km	-	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	732,891 Km	800.000.000,00
1	01	10	1.02	0006	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Km	-	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Km	1.500.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										900.000.000,00				825.000.000,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										246.822.500,00				250.000.000,00
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	25 Orang	-	246.822.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	25 Orang	250.000.000,00
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										282.496.427,00				180.000.000,00
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	215.721.148,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	216.000.000,00
1	03	11	2.03	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI														
							Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	32.210.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	25.000.000,00
1	03	11	2.03	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
							Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disosialisasi	-	- Kab. Gunung Hias, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Layanan Informasi	-	85.175.801,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disosialisasi	1 Layanan Informasi	40.000.000,00
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										69.682.072,00				80.000.000,00
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

						-	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dilewati dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Paket Pekerjaan	-	85.981.511,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dilewati dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	80.000.000,00
1	00	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								400.000.000,00						800.000.000,00
1	00	11	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota								400.000.000,00						0
1	00	11	2.01	0005	Pelaksanaan Penetapan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah surat penetapan substansi RTRW Kabupaten/Kota	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	-	1 Dokumen	-	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah surat penetapan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
1	00	12	2.01	0013	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00
1	00	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
						-	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Laporan	0,00
1	00	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								80.000.000,00						75.000.000,00
1	00	12	2.02	0007	Peningkatan kompetensi SDM Bidang penataan ruang														
						-	Jumlah SDM yang memdapatkan pendidikan dan pelatihan	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Orang	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah SDM yang memdapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Orang	75.000.000,00
1	00	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								150.000.000,00						225.000.000,00
1	00	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00
1	00	12	2.03	0004	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
						-	Jumlah layanan Perizinan/Laporan RTRW sesuai dengan kewenangan wilayah yang berlaku	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Layanan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah layanan Perizinan/Laporan RTRW sesuai dengan kewenangan wilayah yang berlaku	5 Layanan	75.000.000,00
2	04				LAYANAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								17.818.918.318,00						17.830.000.000,00
2	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								805.706.218,00						800.000.000,00
2	04	02	2.01		Pendataan Pemutakhiran dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								87.558.856,00						80.000.000,00
2	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
						-	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	87.558.856,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00
2	04	02	2.02		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								349.347.414,00						700.000.000,00
2	04	02	2.02	0005	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana														
						-	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit Rumah	-	349.347.414,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	700.000.000,00
2	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								705.995.834,00						800.000.000,00
2	04	03	2.01		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								705.995.834,00						800.000.000,00
2	04	03	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
						-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	- Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	51 Unit Rumah	-	705.995.834,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	51 Unit Rumah	800.000.000,00
3	04	05			PROGRAM PENGADAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								11.471.580.340,00						16.000.000.000,00



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten Kabupaten Gunung Mas dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Usulan program/ kegiatan masyarakat diperoleh melalui proses berjenjang dari tingkat desa melalui Musrenbang tingkat Desa kemudian dibawa ke tingkat kecamatan untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan di kecamatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan dimana pada tahap ini usulan-usulan dari tingkat desa yang menjadi prioritas direkap menjadi usulan kecamatan untuk selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kabupaten.

Pada tahapan Musrenbang tingkat Kabupaten Program/ Kegiatan yang menjadi usulan kecamatan dipilih kembali mana yang menjadi prioritas serta dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah dan dijawab melalui Program/ Kegiatan pada Perangkat Daerah masing-masing yang disesuaikan dengan Anggaran belanja Daerah (Pagu Indikatif) yang didasari Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas serta Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2023, dimana tidak semua kegiatan yang telah diusulkan dapat diakomodir mengingat keterbatasan anggaran. Adapun Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Usulan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 ditunjukkan pada **Tabel 2.4 dan Tabel 2.5** sebagai berikut :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2026

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem	[illegible]	[illegible]	Cilawu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengaktifkan dan Pengembangan Desain Percepatan di Wilayah)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	Lahan Proyek tersedia sertifikat pusat maksud untuk sudah tersedia, dan saat dilakukan pencatatan saat untuk tahun ini pada tahun 2023
11	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengembangan Desain)	Jalan Hotel Bersih - Jalan Gunung Alas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	Belum dana tersedia tahun ini. Dalam Pelaksanaan. Verifikasi telah memenuhi untuk pembangunan dapat lanjut, pengajuan tersedia tahun mulai
12	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengembangan Desain)	Jalan Penggalan Jembatan, Kab. Gunung Alas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	Pembangunan belum memperlihatkan, pelanggan anggaran 2021 tidak memenuhi untuk pembangunan jalan
13	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengembangan Desain)	Jembatan Jalan - Penggalan Jembatan Penggalan Jembatan Penggalan Jembatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	Dalam tahun tersedia dana belum ada pengajuan yang masuk untuk pembangunan jalan
14	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengembangan Desain)	Jembatan Jalan - Penggalan Jembatan Penggalan Jembatan Penggalan Jembatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	Dalam tahun tersedia dana belum ada pengajuan yang masuk untuk pembangunan jalan
15	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengaktifkan dan Pengembangan Desain di Wilayah)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
16	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
17	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan dan Pengembangan Desain di Wilayah)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
18	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
19	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
20	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
21	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
22	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
23	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
24	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
25	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
26	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
27	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
28	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
29	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
30	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
31	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-
32	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaktifkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikembalikan	-	-	-	-

45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

71	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
72	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
73	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
74	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
76	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
77	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
78	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
79	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
80	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
81	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
82	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
83	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
84	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
85	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
86	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
87	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
88	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

89	103898	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas secara optimal) Orang, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kurangnya sosialisasi tentang Kebijakan Publik, Kurang modern dalam menyelesaikan...	Jl. Gili Ketapang RT. 12/RT. , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
90	103903	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas secara optimal) Orang, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan kota Kabupaten Kuala Kurun modern dalam sosialisasi Dasar	Jl. Gili Ketapang RT. 15/RW. , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	Kurangnya dana tenaga	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
91	103911	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas secara optimal) Orang, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun , rawannya kurangnya sekolah 500 meter	Jalan Gili Ketapang RT. 15/RW. , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
92	103964	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas secara optimal) Orang, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Kecamatan Kota di wilayah RT Anggota Kurun , Kapitalisme , rawannya Banyak kurangnya sekolah RT. 05 Kota area Kota Kabupaten 2000	Jl. Anggur / Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
93	103972	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Perhatikan Jalan rawang Kabupaten Kuala Kurun sudang lebih 100 Meter , rawannya Anak RT. 002 Jalan / di Kurun sudangs	Jalan Durus RT. 14 RW. Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun Kabupaten / Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
94	103979	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembangunan Jalan 1000 Meter	Jl. Gemma Jalanan RT. 12/ RW. 01 Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
95	103988	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembangunan Jalan Panjang 1km Meter x 5 Meter	Jalan G. Kapuas RT. 12/RW. 0, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
96	103998	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas secara optimal) Orang, Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perhatikan peningkatan Kabupaten Kuala Kurun RT. 01 RW. Dalam Desa Ka. 50 Jalan Jl. Kab. Gunung Mas	Jalan Kabupaten RT. 08/RW. 0, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
97	104001	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembangunan Jalan dengan Jembatan Kuala Kurun, Gunung lebih 100 meter rawannya Jalan Rusak Desa Ka 101 Lokal RT dan Jembatan	Jl. Gereja Gunung RT. 08/RW. 0, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
98	104011	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Orang, Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Jembatan)	Pembangunan Jalan Jalan & Gorong-gorong Jembatan Kuala Kurun Jalan Gang 200 Meter x 8 Meter	Jalang Baru Kumpulan 1000 RT.01/RW. 0, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
99	104014	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun , rawannya kurangnya sekolah 100 Meter/tahun 10% Kurun RT. 10/RW. 10 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun , rawannya Kurangnya500 125 meter	Gang C20 Utara RT. 10/RW. 0, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
100	104141	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Perhatikan Jalan Akses rawannya Kuala Kurun, Kurang lebih 100 meter rawannya dan Kondisi Jalan No.101 Lokal RT dan Jembatan	Jalang Gunung Kapuas RT. 10/RW. 0 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
101	104144	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun , rawannya kurangnya sekolah 125 meter	Jalan Cempaga Kecil Kurun RT. 12/RW. 0, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
102	104151	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Perhatikan Jalan rawang Kabupaten Kuala Kurun sudang lebih 100 meter rawannya dan Kondisi Jalan No.101 Lokal RT dan Jembatan	Jalan Gereja RT. 12/RW. 0, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
103	104154	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun , rawannya kurangnya sekolah 100 meter	Jalan Cempaga Kecil Kurun RT. 12/RW. 0, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
104	104123	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti Sekolah dalam jangka Kuala Kurun Kurang lebih 100 meter	Jalang Mawan RT. 03/RW. 0, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Infrastruktur	-	-	-	-
105	[illegible]	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti sekolah dalam lebih 100 meter	Jalang Mawan RT. 03/RW. 0, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Gunung	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-
106	104143	13-11-2022	MRAM-SUTR, Ida Ayu	Mahasiswa / Swasta	Belum melakukan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Cuti sekolah dalam jangka	Jl. Gili Gunung Kurun Jangka Kurang lebih 100 RT. 01/RW. 0 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Gunung	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Sertifikat Kepemilikan	-	Kurangnya dana tenaga	-	-

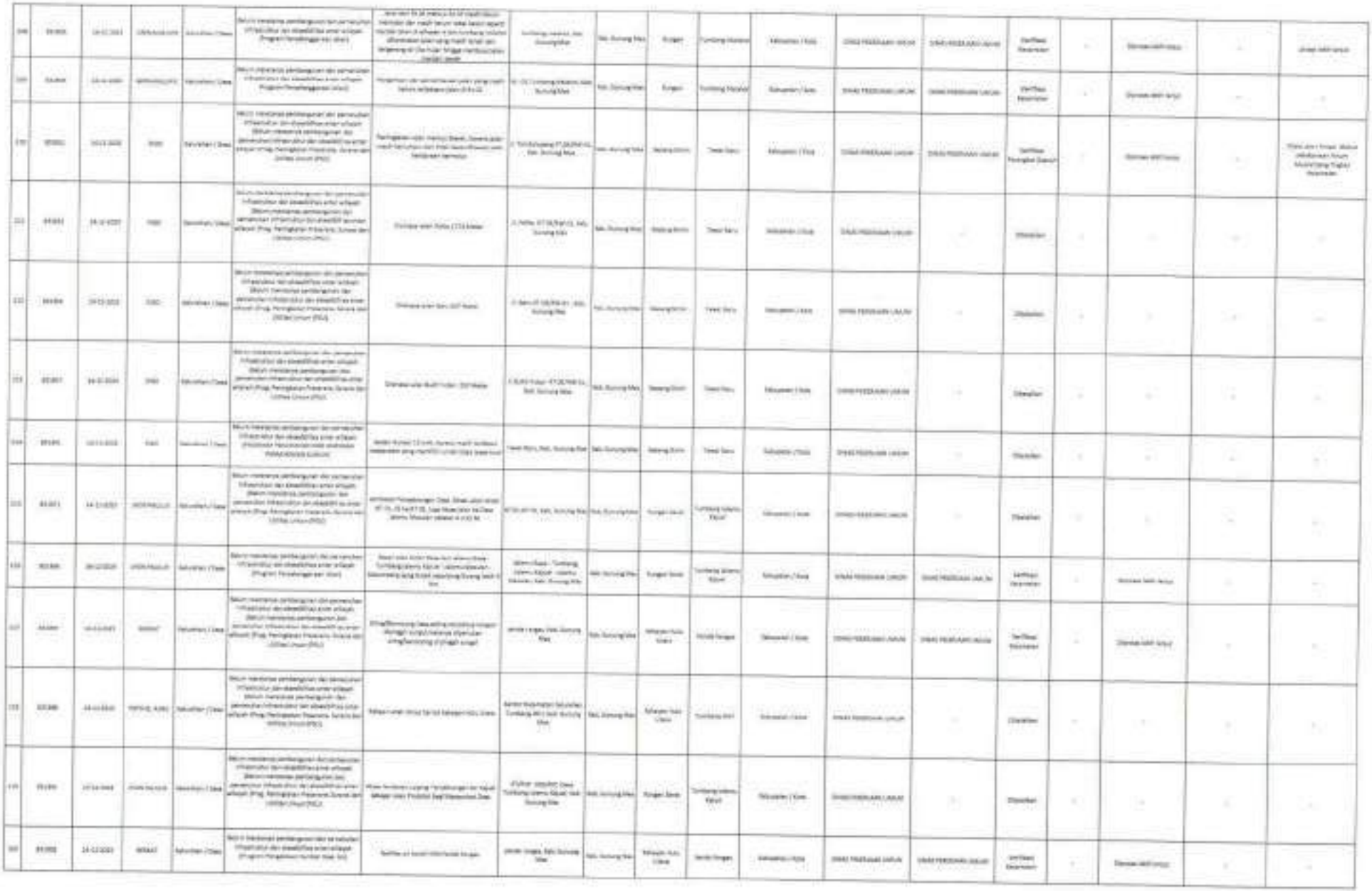
122	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Pembangunan Paggo (DD)/Gunung Gorong	Jalan Lintas Kabupaten Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Tarisa	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
123	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Pembangunan semasan Kecil Gel Tanah	Jalan Mangku Adi Jln. Di Desa Gunung Tarisa, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Tarisa	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Melalui 14 Unit Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
125	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
127	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
128	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
129	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
130	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
131	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
134	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum terdaftar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah [illegible]	Jembatan Gantung Desa Gunung Kuwak, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kunci	Gunung Kuwak	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-

137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Peningkatan Prasarana Jalan, Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	Cor beton dan aspal rusak Kurus ; rawan longsor lebih 100 meter Gang Ella Dusun 07, Cipher, 4 Kuda Dusun Pdk. Gunung Meu, Dusun Suka Dame Cor beton atau aspal Kuda kurus rawan longsor lebih 100 meter	Gang 074 Desa 07, Cipher S, Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	[illegible]	[illegible]	Pemerintah / Pusat	[illegible]	[illegible]	Dikerjakan	-	-	-	-
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	[illegible]	Pembangunan Baru Jalan & Drainase 600 Jalan x 3 Meter	Gang Aru simpak Sekitar Cipher, Jl. Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Aceh	Aceh Kecil	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Kelurahan	-	Dimasukkan [illegible]	-	-
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Peningkatan Prasarana, Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	Pengerasan atau tinggi (sekurang kurang 6,0 m), Bulang lebih 200 meter sehingga dan [illegible] 70-100 cm/ 3/ Jan Desember	1. Gang Bintang RT. sebelum V. Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Dikerjakan	-	-	-	-
140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Wisata Tuha RT. 14 RW. 5 Desa Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Durian	Kuala Kurus	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Ditindaklanjuti	-	-	-	-
141	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Peningkatan Prasarana Jalan, Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	Pembuatan Gorong-Gorong Saluran Air Jalan Kurang lebih 270 Meter , lebarnya kurang lebih 300 cm/ 50 Per Kelurahan	Lokasi RT. 08 , Kab. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Kurus	Kuala Kurus	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Pemerintah Daerah	-	Dimasukkan [illegible]	-	Untuk Akses di Jembatan ini sangat dibutuhkan
142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengerasan Jembatan Baja Ulo)	Belum terealisasi ini karena Jembatan Ulo ini dan masyarakat sangat membutuhkan jembatan ini	Desa Tumbang Serau, Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Biring Meu	Tumbang Serau	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Pemerintah Daerah	-	Dimasukkan [illegible]	-	Untuk Akses di Jembatan ini sangat dibutuhkan
143	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Peningkatan Prasarana, Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	Pembuatan gorong-gorong sangat dibutuhkan Kuala, Panjangnya 1 Kali ± 1,2m ± 120 meter lebarnya Bagi 40,50 cm/ 15 Per Kelurahan	D. Arfuna Sungai Desa Gunung Jaya, RT. 08 / RW. 0 , Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Kurus	Kuala Kurus	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Ditindaklanjuti	-	-	-	-
144	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Pengerasan Jalan Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	Pembuatan Jembatan dan Jalan Kurang lebih 1 Km x 3 Meter dan Lebar 1,5 Meter Rencana Tinggi Tiang 2015	Jl. Tanah Merah Kec. Kota Indah RT. 05 RW. 1, Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Kurus	Kuala Kurus	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Ditindaklanjuti	-	-	-	-
145	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sarana sosial (Prog. Pengerasan Jalan Irigasi dan Lintas Limun (PKL))	jalan rusak di musim dan banyak berlubang 3 x 0,50 Km, 1 x 1 Km	RT. 08 Desa Tanjung Alu, Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Kurus	Tanjung Alu	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dimasukkan [illegible]	-	-
146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (program Pengerasan dan Pengaspalan Desa Pelabuhan ke Kantor)	Tidak adanya jalan untuk masyarakat pergi kesawah, kalau dikumpulkan jalan sepanjang 1 km	Desa Tiang Kumbal , Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Durian	Tiang Kumbal	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dimasukkan [illegible]	-	-
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengaspalan dan Pengerasan Jalan Desa Limun)	Pembangunan Jembatan Pengaspalan dan Drainase/Saluran Jembatan Pembangunan Jembatan Cipta pak sampai dengan	Desa Pembagang RT.02, Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Sungai Kecil	Pembagang	Kabupaten / Kota	DINAS PERKARAN	DINAS PERKARAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dimasukkan [illegible]	-	-
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengerasan dan Pengaspalan Desa Pelabuhan ke Kantor)	Satu Kesatuan Pipa jangan Lebar PDAM dan Lebar Pipanya 91,05 Jarak 97,05 kecamatan 2,000 Meter	Desa Lubuk Kandis RT.01 Jarak 97,05 , Kec. Gunung Meu	Kec. Gunung Meu	Biring Meu	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Pemerintah Daerah	-	Dimasukkan [illegible]	-	Untuk Akses di Jembatan ini sangat dibutuhkan

132	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
133	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
134	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
135	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
140	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
141	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
143	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan ekosistem yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan asas pengakuan, subsidiaritas, dan keberagaman, antara lain: a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa; b. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi; c. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; d. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; f. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga; g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan; h. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan desa; i. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman; j. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan; k. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan; l. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan hidup; dan/atau m. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

179	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Suatu perangkat/alat perlengkapan (sigap) fasilitas/alat kerja/gedung/kantor/sarana/prasarana/alat yang digunakan untuk [illegible]	[illegible] Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rantai	Tumbang Gunjuran	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Kelengkapan air rutin)	Pembuatan Gedung/alat kerja/sarana/prasarana/perlengkapan untuk/di/ke/dari Tumbang Garing	[illegible] Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rantai	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Jaringan/ Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
181	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pertanian Tanaman)	Ada lima kabupaten di [illegible] yang memanfaatkan lahan gambut untuk pertanian di [illegible]	Kalteng Dalam RT. 05, RW. [illegible] Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rantai	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
182	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Perlengkapan/alat yang digunakan untuk [illegible]	[illegible] Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rantai	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Tidak adanya perlengkapan (alat) di desa, 22 unit	Desa Tumbang Jenaie, Kec. Sumber Mas	Kec. Gunung Mas	Rantai Rusak	Tumbang Jenaie	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan Sarana	-	[illegible]	-	Listrik desa (Kecil/desa) ke [illegible]
184	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan air rutin)	Kekurangan Peralatan untuk Tumbanggaring Kecil (rusak) sebanyak 1 unit (1 Kilometer)	[illegible] Tumbanggaring Kec.(Lokasi RT. [illegible] Lihuk, Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
185	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan air rutin)	Kekurangan/Kerusakan Alat Sudah Rusak Lama, di Ini TUMBANG DAHU GUNUNG RUSAK BERAT	Lokasi Tumbang Rahoi, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sering Rusak	Tumbang Rahoi	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan Sarana	-	[illegible]	-	Lokasi dapat dikunjungi ke [illegible]
186	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Perlengkapan air rutin)	Perlengkapan rusak lama sejak tahun 2021 hingga	Lokasi RT. 05, RW. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak Berat	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Prog. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	Perlu adanya perlengkapan (alat) [illegible] Kapasitas 10 000 ton/tahun perlengkapan	Desa Tumbang Tandarin, Kec. ... Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak	Tumbang Tumbang	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
188	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Kelengkapan air rutin)	Desa sering pengalaman (Ck. (pit dapat) Kapasitas Ekonomi	Desa Tumbang Kahoh, Kec. Kurung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak	Tumbang Kahoh	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Prog. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	Jangkauan Listrik Air jangkauan Listrik Tumbang Lihuk - ke arah kali kapuas hingga Kuala Lihuk - ke arah kali kapuas hingga Kuala Lihuk dan sekitar untuk warga sekitar	Jalan Desa ke arah kumbang Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak Ringan	Jalan Arah	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Tumbang Tumbang Kumpulan Air Lihuk - ke arah kali kapuas hingga Kuala Lihuk dan sekitar untuk warga sekitar	Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurus	Tumbang Tumpiran	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
191	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	perlengkapan dan air lahan untuk masyarakat	Desa Tumbang Tiwai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rusak Berat	Tumbang Tiwai	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
192	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Prog. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	Alat Yaitu Mpu sepanjang 1.200 m x 6 m dalam kondisi kerusakan, Kondisi alat dan unit untuk dibawah maksimal per kapasitas pengerjaan alat	Jalan Suka Maju RT.01 Desa Kurung Garus, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rusak	Hancur Kurus	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
193	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Balai / kantor/pos perlengkapan (di/ pemerintah) infrastruktur dan ekonomi/fisik antar wilayah (Program Kelengkapan air rutin)	Jalan Jembatan Sudah Rusak Sejak Tahun	Jalan Desa RT 05 Kabupaten Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mengering	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-

134	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pusat Informasi Kerja (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK)	Jalan Cibeas, Kec. Cibeas	Desa Cibeas	Kampung Cibeas	Jalan Raya	Kabupaten / Desa	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Perhubungan Cipta Jaya	Verifikasi Data Publik	-	Dinamika dalam tanya	-	-
135	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Perlu perpanjangan lampu dan penyusunan lampu Pusat Pelayanan Kesehatan di Kampung Pucuk dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jumlah dan kebutuhan standar yang diperlukan mengingat bahwa Puskesmas yang sudah tidak memenuhi untuk saat ini [illegible]	Jalan Cibeas Raya, Kampung Pucuk, Kec. Cibeas, 41.17.2020.203 (Kelurahan / Kampung Pucuk), Kab. Cibeas Raya	Cibeas Raya	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cibeas Raya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	melaksanakan pengadaan pelengkapan dalam untuk kebutuhan pembangunan pembaruan ...	Lampung kawasan ke [illegible] Kampung Pucuk, Kec. Cibeas Raya	Cibeas Raya	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
137	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Pusat Informasi Kerja (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK) di Desa Sungai Cibeas Raya (Jl. [illegible] RT 17 RW 05)	Jalan Cibeas, Kec. Cibeas Raya	Cibeas Raya	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
138	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Jembatan Sungai sekitar [illegible] yang sudah rusak dan membahayakan masyarakat yang setiap hari melintasi jembatan tersebut. Mohon segera ditindaklanjuti.	Jalan Raya Cibeas RT 04, Kampung Pucuk Asih, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	[illegible]	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Kerusakan, Pengerasan, Tinggi jalan yang rusak. Sering tumbang karena di kiri kanan tumbang tunggal dan Pohon besar, di daerah dengan volume curah hujan 12 km	Tumbang kehutan kiri dan tumbang tunggal, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung Baru	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
140	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (PELAYANAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERALATAN BANTU)	Belum terealisasi kunci sebelum [illegible] Kecamatan Tumbang Kehutan	Kecamatan / Kampung Kehutan, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
141	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Drag, Peningkatan Prasarana, Survei dan Usulan Lokasi PPK))	Belum terealisasi dasung tertancam rusak (RT.2 dekatan sepat sesak di Kecamatan Tumbang Kehutan)	Jl. Kampung Dangan RT 03 Kelurahan Tumbang Kehutan, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
142	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	pembangunan jalan Desa dekat sini yang tumbang pada 14.2 km	Jalan Tumbang Tuwa ke Desa, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung Pucuk	Tumbang Tuwa	Kabupaten / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
143	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	Pembuatan Gerbang gerong 10 Cm x 6 Meter	Jalan Kampung RT 08/RW 02, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Pucuk Asih	Kabupaten / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
144	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	[illegible]	Jl. Kampung Tumbang RT. 08/RW. 02 Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Pucuk Asih	Kabupaten / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
145	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	Jembatan rusak berat dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda empat, dan harus dua kali putar balik untuk melewati jembatan yang [illegible] sangat membahayakan	Jl. Kampung yang ke Jln. Kantor Kampung Kecamatan Tumbang Kehutan, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung Pucuk	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-
146	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	Jalan rusaknya [illegible] RT 8-11 Kampung masih belum rata dan dalam membahayakan pengendara, [illegible] kendaraan bermotor	Tumbang Kehutan, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	Dinamika dalam tanya
147	[illegible]	[illegible]	[illegible], S.H., M.A.P.	Kecamatan Cibeas	Belum memenuhi persyaratan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Program Pendampingan Usaha)	Jalan masih belum memadai untuk sebagian masih ada yang rusak berat	Jalan Tn. Cibeng Kehutan, Kab. Cibeas Raya	Pucuk Asih	Kampung	Tumbang Kehutan	Kabupaten / Desa	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Dinkes Perkebunan Cipta Jaya	Verifikasi Kelurahan	-	Dinamika dalam tanya	-	-



12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memiliki perlengkapan dan pemeliharaan infrastruktur dan aset/fisik untuk efisien (Belum memiliki perlengkapan dan pemeliharaan infrastruktur dan aset/fisik untuk efisien (Prog Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

136	[illegible]	14-11-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi persyaratan dan ketentuan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memberikan pembangunan/ dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk sehingga (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Lantai, Pembangunan Umum/Bahang belum memberikan akses Pembangun- kuan umum masih untuk hanya kepada/atau desa untuk yang efisien sangat baik	kuan masih belum ke me-nuhi unt. Jalan Gunung Mas	Jalan Gunungsitoli	Jalan Gunung Mas	Tanjung Lamat	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible] Perangkat Daerah	-	Dinkesk Milli Anka	-	-
137	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Program Pendidikan/gunaan Lokal)	Kurangnya/ kuki Desa Gunung - Tumbang Pangan	Desa Gunung - Tumbang [illegible] Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Gunung Lamat	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible] Asset Aset	-	Dinkesk Milli Anka	-	-
138	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Kesenjangan antara Desa yang [illegible]	Jl. Desa Kuala Kurun, Kec. Kurun Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible] Perangkat Daerah	-	Dinkesk Milli Anka	-	-
139	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Program Pendidikan dan Pengembangan Lokal)	Kurangnya/ terdapat Lapang pemeliharaan [illegible] Kurang Akses Masyarakat Desa dengan luas 2 x 25 M	Jl. Kuala Kurun, Kec. Kurun Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Gagam Baru	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible] Asset	-	Dinkesk Milli Anka	-	-
140	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Program Pendidikan dan Pengembangan Lokal)	Kurangnya/ terdapat Lapang pemeliharaan [illegible] Kurang Akses Masyarakat Desa dengan luas 2 x 25 M	Jalan Tumbang Talangan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Talangan	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible] Asset	-	Dinkesk Milli Anka	-	-
141	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Jembatan yang ada masih [illegible] sehingga [illegible] di jalan lainnya/gunakan jalan lain lebih [illegible]	Jl. [illegible], Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
142	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Jembatan yang ada masih [illegible] sehingga [illegible] di jalan lainnya/gunakan jalan lain lebih [illegible]	Jl. [illegible], Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
143	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Jembatan yang ada masih [illegible] sehingga [illegible] di jalan lainnya/gunakan jalan lain lebih [illegible]	Jl. [illegible], Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
144	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Jembatan yang ada masih [illegible] sehingga [illegible] di jalan lainnya/gunakan jalan lain lebih [illegible]	Jl. [illegible], Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
145	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Program Pendidikan dan Pengembangan Lokal)	Akses Jalan Desa Mantuil, kecamatan Banamang [illegible]	Desa Mantuil, Kecamatan Banamang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Bukit Rawi	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
146	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Program Pendidikan dan Pengembangan Lokal)	Kerusakan jalan, [illegible] dan [illegible] [illegible]	Jl. [illegible], Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	[illegible]	[illegible], Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tunggal Jaman	Kuala Tewi	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
148	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Akses belum ada jembatan sehingga [illegible]	Kelurahan Tumbang Miri, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-
149	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk efisien (Belum memenuhi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas sesuai [illegible] (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lokasi Untuk PPK)	Jembatan yang ada masih [illegible] sehingga [illegible] di jalan lainnya/gunakan jalan lain lebih [illegible]	Jl. [illegible], Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupat Gunung Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Dinkesk Kes	-	-	-	-

145	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
146	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
148	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
149	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
152	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
153	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
154	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
155	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
156	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
157	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
160	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

141	[illegible]	12-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	ran ramadhawan umum	Ft.Sth. Dpt. Gunung Alm	Sub. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
142	[illegible]	12-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	pemeliharaan bangunan sipil / jembatan sebesar [illegible]	SMPN 1 Lembang Alm - Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
143	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	jembatan/jalan orang harian sebesar 4jt/mn - Tunbang [illegible] unit	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
144	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	pembangunan SIC sebesar SMPN 1 Tunbang Alm	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
145	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	pemeliharaan sarana sebesar SMPN sebesarnya 1 orang	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
146	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	pemeliharaan sarana pagar sebesar SMPN sebesarnya 1 unit	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
147	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
148	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	pemeliharaan sarana pagar sebesar SMPN sebesarnya 1 unit	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
149	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
150	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
151	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
152	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-
153	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Belum Terbit	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sheetlitfas antar wilayah (Prog. Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan Lainnya Lainnya (PU))	[illegible]	SMPN 1 Lembang Alm Kab. Gunung Alm	Kab. Gunung Alm	Aktivasi (Luar Lapas)	Tunbang Alm	Mengaktifi / Aktif	[illegible]	-	Dikembalikan	-	-	-	-

177	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 30 meter	Cilawu Lembang Kec. Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
178	[illegible]	[illegible]	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan gedung sekolah [illegible]	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
179	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan gedung sekolah [illegible]	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
180	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
181	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
182	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
183	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
184	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
185	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
186	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
187	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
188	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
189	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-
190	[illegible]	14-11-2023	737V+6Q, Kr[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum merekomendasikan dan memenuhi infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Drag, Penfigabun Provinsi ora, Dinas dan Lembaga Lokum (PKL))	pembangunan rumah jagar sekuat 1 unit	Kec. Gunung Mas	Kelurahan/Desa Cilawu	Tumbang Kiri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Ditandatani	-	-	-	-

181	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Masih terdapat ruas jalan lebih dari kewenangan kabupaten/ UNGGAHAN FOTO/FOTO RUAS JALAN YANG MASIH MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	Jalan Blok 2 Kuali Penanggulan Jalan Banjir Maksimum	Kumm Kecil Pasama Kecamatan Tumbang Dahien, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupaten	Tumbang Dahien	Kecamatan / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	[illegible]	-	-
182	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Perbaikan Jalan Kabupaten	RD 01 Kecamatan Tumbang Dahien Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupaten	Tumbang Dahien	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	[illegible]	-	-
183	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembukaan Jalan Kabupaten Gunung 1 Pahat (P-B) di dan 1.2 KM	Desa Tumbang Dahien Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kabupaten	Tumbang Dahien	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Pengelola Daerah	-	[illegible]	-	Lintas Kabupaten ke Sanyan Pemerintah Daerah
184	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Belum ter anggaran Jembatan Mati ada Jalan ke Kabut Rawanbiru, Dusun Pembangunan Jembatan Gunge Sedang, 2 Desa	RT. 03 RW. 1 Desa Jekmu Hulu, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai Barat	Jekmu Hulu	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	[illegible]	-	-
185	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Gunung Gunung RT 3 Desa Kecamatan Tumbang Dahien, Kabupaten Gunung Mas	RT. 3 Desa Jekmu Hulu, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai Barat	Jekmu Hulu	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	[illegible]	-	-
186	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Masih terdapat ruas jalan lebih dari kewenangan (Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi)	Masih ada beberapa Jembatan yang Belum Kondisi Rusak Berat	RT. 3 Desa Jekmu Hulu, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai Barat	Jekmu Hulu	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	Usulan Masuk di Perbaikan ke Pemerintah Daerah	-	-
187	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Gunung Gunung RT 3 Desa Kecamatan Tumbang Dahien, Kabupaten Gunung Mas	RT. 3 Desa Jekmu Hulu, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai Barat	Jekmu Hulu	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	[illegible]	-	-
188	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Masih terdapat ruas jalan lebih dari kewenangan (Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi)	Masih ada beberapa Jembatan yang Belum Kondisi Rusak Berat	RT. 3 Desa Jekmu Hulu, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai Barat	Jekmu Hulu	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Maksimum	-	Usulan Masuk di Perbaikan ke Pemerintah Daerah	-	-
189	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum terbangun jembatan bentuk gantung 10 meter sebuah RT. 002 Jalan Desa Kabupaten.	RT.005 RW.002 Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Belum/tidak	-	Diperbaiki lebih lancar	-	-
190	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum terwaslahkan Jembatan gantung sebanyak 1 unit	RT.008 RW.002 Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-
191	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum maksimal Jembatan yang Sangat Rusak Parah Sepanjang 100 meter	RT.002 RW.002 Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-
192	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Belum ada Jembatan penghubung di Bawah yang Sudah Lama Mengakibatkan Desa Terisolasi (Jembatan 1,5 km	Kumpil Hilir, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sihong Raya	Sihong Hilir	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Pengelola Daerah	-	Diperbaiki lebih lancar	-	Jembatan ini sudah dirusakkan sebelumnya namun saat musrenbang dilaporkan kembali namun pemerintah belum ada tindakan
193	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum terwaslahkan Jembatan Sepanjang 12 Meter Lebar 1 Meter Lubuk Langkasa	RT.008/RW.002, Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-
194	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Terjadinya kerusakan yang parah sehingga Satu Lubuk Langkasa Sedang yang ada Tenggelam ke Sungai	RT.008/RW.002, Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-
195	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum terbangun Jembatan yang Sangat Rusak Parah Sepanjang 12 Meter	RT.007/RW.002, Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-
196	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Kabupaten / Desa	Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Survey dan Lintfasilitas)	Belum terbangun Jembatan yang Sangat Rusak Parah Sepanjang 12 Meter Lubuk Langkasa	RT.007/RW.002, Desa Lubuk Langkasa, Kec. Bungai , Kab. Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Bungai	Lubuk Langkasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diperbaiki	-	-	-	-

107	[illegible]	02-11-2021	08:30:05	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Belum terdaftar di PU dengan durasi P - 22 m dan L 13 m di Jl Gang Lowok Longkrap.	Jl. [illegible] Gang Lowok Longkrap, Kec. Sungai, Indi, Sirsang Mas, Sdt. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Lowok Longkrap	Kelurahan / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikerahkan	-	-	-	-
108	[illegible]	03-11-2021	08:45:05	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pengerasan dan Pengerasan Jalan Perkerasan Air (Hotmix))	Belum terdaftar di PU dengan ruas jalan Lowok Longkrap, Kec. Sungai, Indi, Sirsang Mas, Sdt. Sirsang Mas. Jl. [illegible] di Desa Lowok Longkrap.	Jl. [illegible] Gang Lowok Longkrap, Kec. Sungai, Indi, Sirsang Mas, Sdt. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Lowok Longkrap	Kelurahan / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kepala Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	[illegible] lebih lancar
109	[illegible]	04-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pengerasan dan Pengerasan Jalan Perkerasan Air (Hotmix))	Jembatan sangat rusak sehingga tidak memungkinkan untuk dilewati	[illegible] di Desa Lowok Longkrap, Kec. Sungai, Indi, Sirsang Mas, Sdt. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Sirsang Mas	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Petugas Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	Jembatan [illegible] sehingga Anda tidak dapat melewati jembatan dan perlu berputar
110	[illegible]	05-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Jembatan [illegible]	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikerahkan	-	-	-	-
111	[illegible]	06-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Belum terdaftar di PU	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikerahkan	-	-	-	-
112	[illegible]	07-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Jembatan Sirsang Mas Sangat rusak dan tidak dapat dilewati	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Dikerahkan	-	-	-	-
113	[illegible]	08-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pengerasan dan Pengerasan Jalan Perkerasan Air (Hotmix))	Tembok penahan longsor	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Lowok	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kepala Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	[illegible]
114	[illegible]	09-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pengerasan dan Pengerasan Jalan Perkerasan Air (Hotmix))	Jembatan Sirsang Mas Sangat rusak dan tidak dapat dilewati	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Dikerahkan	-	-	-	-
115	[illegible]	10-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Perbaikan Jalan dan Jembatan di Desa	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Dikerahkan	-	-	-	-
116	[illegible]	11-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pembangunan)	Perbaikan Jalan Sambung Kiring	Desa Desa, Kab. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Lowok	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kepala Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	[illegible]
117	[illegible]	12-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Jembatan Sirsang Mas Sangat rusak dan tidak dapat dilewati	[illegible] Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dikerahkan	-	-	-	-
118	[illegible]	13-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pembangunan)	Pengerasan Jalan Desa Tumbang Sirsang	Tumbang Sirsang Desa, Kab. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Rungan	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	-	-
119	[illegible]	14-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Program Pembangunan)	Jembatan sangat rusak membuat jarang dilewati karena Jembatan sangat rusak dan hampir Roboh Sirsang Mas Jembatan Desa	Jl. Sdt. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Sirsang Mas	Tumbang Sirsang	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Petugas Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	Pekerjaan pembangunan jembatan yang telah rusak parah karena jembatan sebagai penghubung masyarakat di Sirsang Mas ?
120	[illegible]	15-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Pembangunan Jembatan Sirsang Mas-Jl. Desa Tumbang Pasu Rt Nilai Kisi Rp.0.000.000.000	Desa Tumbang Pasu, Kab. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Sirsang Mas	Tumbang Pasu	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Petugas Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	Pembangunan jembatan sirsang menyebar alternatif [illegible] pembangunan
121	[illegible]	16-11-2021	[illegible]	Mahasiswa Class	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk artapati. (Prog. Peningkatan Prasarana Sosial dan Umum Umum (PSU)	Belum terdaftar di Kelurahan Sirsang Mas (Jalan Lurus 2) (1) (2)	Jl. Jembatan Tumbang Sirsang Mas, Kab. Sirsang Mas	Kab. Sirsang Mas	Sirsang Mas	Sirsang Mas	Kelurahan / Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Petugas Lapangan	-	Dikerahkan lebih banyak	-	Jalan Lokasi Proses dibuat [illegible] Mulai Sirsang Tingkat Kelurahan

110	[illegible]	14-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
111	[illegible]	15-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
112	[illegible]	16-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
113	[illegible]	17-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
114	[illegible]	18-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
115	[illegible]	19-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
116	[illegible]	20-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
117	[illegible]	21-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
118	[illegible]	22-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
119	[illegible]	23-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
120	[illegible]	24-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
121	[illegible]	25-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
122	[illegible]	26-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
123	[illegible]	27-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
124	[illegible]	28-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
125	[illegible]	29-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
126	[illegible]	30-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
127	[illegible]	31-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
128	[illegible]	01-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
129	[illegible]	02-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
130	[illegible]	03-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
131	[illegible]	04-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
132	[illegible]	05-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
133	[illegible]	06-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
134	[illegible]	07-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
135	[illegible]	08-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
136	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
137	[illegible]	10-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
138	[illegible]	11-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
139	[illegible]	12-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
140	[illegible]	13-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
141	[illegible]	14-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
142	[illegible]	15-01-2024	[illegible]	Kecamatan Cibeo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kec. Gunung Mas	Cibeureum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]

161	[illegible]	24-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan/ dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Jalan dari Lapat Kota Lama Lembah Limun (1000m)	Jl. Raya Garut-Cilawu Km. 12 Desa Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Jl. Raya	Kabupaten Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
162	[illegible]	26-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Pengadaan Air Minum)	Pembangunan Gedung Air, Kapasitas 1 Liter	Jl. Raya Garut-Cilawu Km. 12 Desa Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Mandalawangi	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
163	[illegible]	28-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 20 Kg	Desa Cilawu Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	-	Ditemukan	-	-	-	-
164	[illegible]	30-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 50 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
165	[illegible]	01-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 30 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
166	[illegible]	03-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Pengadaan Air Minum)	Pembangunan Kapasitas 40 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
167	[illegible]	05-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 10 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
168	[illegible]	07-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Pengadaan Air Minum)	Pembangunan Kapasitas 20 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
169	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 50 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
170	[illegible]	11-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 30 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
171	[illegible]	13-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 40 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
172	[illegible]	15-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 10 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
173	[illegible]	17-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 20 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
174	[illegible]	19-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 30 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
175	[illegible]	21-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 40 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
176	[illegible]	23-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 50 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
177	[illegible]	25-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 10 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
178	[illegible]	27-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 20 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
179	[illegible]	29-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 30 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-
180	[illegible]	31-12-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel. (Belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas secara adiluhung (Tugu Peringatan Proklamasi, Gunung dan Lembah Limun (PKL))	Pembangunan Kapasitas 40 Kg	Desa Cilawu, Kecamatan Cilawu, Kab. Gunung Mas	Cilawu	Gunung Mas	Cilawu	Kecamatan Cilawu	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelengkapan	-	[illegible]	-	-

151	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan 1 Unit/ set/ dengan ukuran 800 m	Tanang Emas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
152	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan 1 Paket/ 1 dengan ukuran 1000 m	Tabang Emas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
153	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan 1 Bidang dengan ukuran 0.000 m	Tabang Emas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
154	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan/ Pelepasan/ Lainnya/ luas/ dengan ukuran 0 m	Tabang Emas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
155	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain/ Biaya Hak)	Pembebasan/ Lainnya dengan luas/ dengan ukuran 0 m	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
156	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
157	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
158	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
159	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
160	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
161	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
162	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
163	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
164	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi Kompleksnya/ Lainnya/ (yang/ belum/ bersertifikat/ atau/ yang/ sudah/ bersertifikat/ yang/ belum/ atas/ nama/ Pemerintah/ Daerah) seluas/ 3 m	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
165	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain) (Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain/ Biaya/ Hak)	Hibah/ dari/ Pihak/ ke/ [illegible] seluas/ 3m (Dengan/ Batas/ Utara/ Lurus)	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
166	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
167	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan/ Lainnya/ luas/ dengan ukuran 0 m	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
168	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan/ Lainnya/ Tanah/ Kompleksnya/ (yang/ belum/ bersertifikat/ atau/ yang/ sudah/ bersertifikat/ yang/ belum/ atas/ nama/ Pemerintah/ Daerah) seluas/ 0 m	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
169	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain) (Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain/ Biaya/ Hak)	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
170	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
171	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
172	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
173	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
174	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
175	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
176	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
177	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
178	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
179	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
180	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
181	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
182	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
184	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
185	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
186	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
187	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
188	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
190	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
191	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
192	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
193	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
194	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
195	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
196	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
197	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
198	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
199	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pengadaan lahan	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]
200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab.Lain / Desa	Balai/ rawatan/ perbengkelan/ dll/ termasuk/ tanah/ dll/ atau/ fasilitas/ untuk/ difabel/ (Program/ Pengadaan/ Lain)	Pembebasan lahan Tabagi	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kapang Emas	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Sertifikat Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible]

177	[illegible]	28-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pemerintahan dan Komunal)	Pembangunan Gorong-Gorong Tumbang Kidang	Tumbang Kidang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Gorong-	Tumbang Kidang	Gelombang / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
178	[illegible]	28-11-2023	Anton	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Prog. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	perlunya pembuatan tempat penampungan (toilet) disebelah Hill yang ada di desa	RT 03, RT 02 RT 05, RT 06, RT 05, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Milling Desa	Dalam Tumbuk	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	[illegible] perlunya [illegible] di desa [illegible]
179	[illegible]	28-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Perwakilanggotaan Adat).	Pembuatan Bak Cuci dan Minggangming	Tumangmaulangbaruk, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tuang Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
180	[illegible]	28-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Prog. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pengalokasian Jalan Antar Desa Kecamatan Kabupaten Kalimantan Tengah Kecamatan Rungan Barat	Kecamatan Kabupaten Kalimantan Tengah, Kecamatan Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
181	[illegible]	28-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Prog. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pengalokasian Jalan Antar Desa Kecamatan Kabupaten Tumbang Desa Hatiai	Desa Kecamatan Kabupaten Tumbang Kidang, Kab.Jal, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
182	[illegible]	28-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Prog. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pengalokasian Jalan Antar Desa Kecamatan Kabupaten Kalimantan Tengah Kecamatan Rungan Barat	Desa Kecamatan Kabupaten Kalimantan Tengah Kecamatan Rungan Barat Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
183	[illegible]	28-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Pembangunan Desa)	Pembukaan Jalan Produksi Kecamatan Kabupaten Desa Tujuh Tumbang Rasa	Kecamatan Kabupaten Desa Tujuh Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Ditolak/Kurang	-	-	-	-
184	[illegible]	28-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Pembangunan Desa)	Pembukaan Jalan Produksi Kecamatan Kabupaten Desa Tujuh Tumbang Rasa	Kecamatan Kabupaten Desa Tujuh Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
185	[illegible]	29-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Pembukaan Hutan Kawasan Lahan Kabupaten Kecamatan)	Bantuan Bantal Kursi/Lesi Lain	Desa Kecamatan Kabupaten, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Kecamatan Desa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
186	[illegible]	29-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Pembangunan Desa)	Tidak ada Fasilitas Kesehatan yang Memadai di Desa Tumbang Rasa	Kecamatan Kabupaten Desa Tujuh Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kosong	Tumbang Rasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
187	[illegible]	30-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Pengelolaan Lumbar Desa Ari)	Kurangnya ketersediaan air bersih untuk masyarakat di wilayah RT 06 Desa Tumbang Rasa	RT 06 Desa Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sawah	Tumbang Rasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
188	[illegible]	29-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Perwakilanggotaan Lokal)	Belum adanya Partisipasi Pengelolaan Lokal Pengelolaan Tumbang Rasa dan Tumbang Bungai	Desa Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sawah	Tumbang Rasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
189	[illegible]	30-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Perwakilanggotaan Lokal)	Belum ada Partisipasi Lembaga Adat Pengelola Hutan Desa Tumbang Rasa	RT 02 Desa Tumbang Rasa, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sawah	Tumbang Rasa	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
190	[illegible]	29-11-2023	[illegible] [illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Belum maksimal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Prog. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembukaan Jalan Baru Desa Lapai Hutan Sawah Gong Sebuah Parkiran 200 meter x lebar 1,20 meter	Jalan Hutan Jamah Gong Sebuah RT. 09/04, Kec. Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kosong	Kabut Kosong	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
191	[illegible]	30-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terealisasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk terbatas (Program Perwakilanggotaan Lokal)	Jalan RT dalam Kondisi rusak parah dan pengguna sehingga harapan Truk dan kendaraan roda para sehingga pengerasan jalan RT dengan panjang 1.500 meter	Jalan RT Desa Tumbang Jumatkong, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kosong	Tumbang Jumatkong	Kabupaten / Kota	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-

333	94228	11-11-2023	1000	Mahasiswa | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan tanah yang belum diaspal, cukup dan hanya cocok untuk kendaraan roda dua saja, sehingga perlu adanya perbaikan dengan panjang 300 meter.	Desa Cumbang kampalung Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Cumbang sampalung	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswa	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
334	84142	11-11-2023	1000	Mahasiswa | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan dan Pengembangan Desain Pemerintah Ini Wilayah)	Jalan Cumbang sampalung mulai dari gang rt 1 sampai rt 2 sepanjang 300 meter dan lebar 3 meter, kondisi jalan rusak parah dan berlubang sehingga perlu perbaikan agar kendaraan dan warga dapat melintas dengan aman dan nyaman.	Desa Cumbang kampalung Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Cumbang sampalung	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswa	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
335	84556	22-11-2023	PANGKARA, Lina	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Perlu dilakukan Pengecoran Jalan Pada dengan Jenis Tiket Sesuai Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang sepanjang 400 meter.	Jl. Mahir RT. 10 Desa Tewang Rakanjan I, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tewang Rakanjan	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
336	84880	22-11-2023	PANGKARA, Lina	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan di desa belum beraspal tidak rata, banyak lubang, rusak berlubang sehingga sulit dan berbahaya untuk dilalui, perlu perbaikan lebar jalan 3 meter dan panjang 400 meter	Jl. RT. 10 Desa Desa Tewang Rakanjan I, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tewang Rakanjan	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
338	84944	22-11-2023	PANGKARA, Lina	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan dan Pengembangan Desain Pemerintah Ini Wilayah)	RT. 10 Desa Lubuk Desa Tewang Rakanjan dengan kondisi jalan berlubang dan tanah sehingga perlu adanya pengecoran tanah untuk memudahkan kendaraan melintas dan tidak terjadi kecelakaan dengan panjang 400 meter dan lebar 3 meter	RT. 10 Desa Desa Tewang Rakanjan I, Kec. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tewang Rakanjan	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
339	85018	23-11-2023	RISMA	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan dan Pengembangan Desain)	Perlu dilakukan perbaikan jalan dengan lebar 3 meter dan panjang 300 meter	Jalan Cumbang Mawalih Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Jalan Rusak	Cumbang Mawalih	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	Perlu dilakukan perbaikan Kabupaten Gunung Mas
340	84955	23-11-2023	ANGGI SEPTIANI, S.Kel	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan Rangka Sambung Rumah sebanyak satu kecil yang dan sempit, memerlukan perbaikan jalan sehingga perlu adanya perhatian dan perbaikan sebanyak 300 meter.	Jalan Rangka Kembang RT. 01 Kelurahan Tumbang Tumbang Anoi Kab. Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tumbang Anoi	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
341	84834	23-11-2023	ANGGI SEPTIANI, S.Kel	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan tersebut rusak dan berlubang sehingga perlu adanya pengecoran sepanjang 300 meter dan lebar 3 meter	Jalan Rangka Kembang RT.01 Kelurahan Tumbang Tumbang Anoi Kab. Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tumbang Anoi	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
400	84874	23-11-2023	ANGGI SEPTIANI, S.Kel	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak parah dan berlubang sehingga membutuhkan perbaikan dengan panjang 300 meter dan lebar 3 meter	Gang Kasuh Jamal RT.01 Kelurahan Tumbang Tumbang Anoi Kab. Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tumbang Anoi	Kabupaten | Aspal	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
401	84845	23-11-2023	ANGGI SEPTIANI, S.Kel	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan sebagian belum diaspal, mengakibatkan kendaraan sulit melintas dengan panjang 300 meter dan lebar 3 meter	Gang G. Kasuh Jamal RT.01 Kel. TTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Aspal	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
402	84930	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Jalan rusak dan berlubang dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Pengembangan Prasarana, Jarak dan Lebar Jalan)	Perlu Perbaikan Jalan Lubuk Sebagai Akses Utama	Kelurahan Tumbang Anoi, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
403	84933	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Jalan rusak dan berlubang dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Pengembangan Prasarana, Jarak dan Lebar Jalan)	Perlu dilakukan Pengecoran dan Perbaikan Pengelolaan Fasilitas yang ada Sehingga Mempermudah Aktivitas Masyarakat Desa	Kelurahan Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
404	84935	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak dan berlubang sehingga perlu perbaikan dan pengecoran sepanjang 400 meter	RT.03/RT.06 Kel. Kuala Kapuas	Kec. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
405	84951	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan dan pengecoran sepanjang 300 meter dan lebar 3 meter	Kelurahan Tumbang Anoi, Kec. Sebangau Kuala, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
406	84955	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan dan pengecoran sepanjang 400 meter dan lebar 3 meter	RT.03, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
407	84977	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan dan pengecoran sepanjang 400 meter dan lebar 3 meter	RT.03, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-
408	84977	24-11-2023	TOPIKAL, Kelvin	Mahasiswi | Desa	Jalan ini merupakan penghubung dari permukiman Infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengembangan Jalan)	Jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan dan pengecoran sepanjang 400 meter dan lebar 3 meter	RT.03, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kelapah Anoi Utara	Tumbang Anoi	Kabupaten | Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Mahasiswi	-	Dikerjakan oleh kelas	-	-

4.37	[illegible]	24-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas ini untuk wilayah Prog. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jalan aksesnya (jalan) kewenangan dari pemerintah (Kabupaten) [ ] ya/tidak	37 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Pidie	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.38	[illegible]	25-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Kecamatan terhubung oleh [illegible] sepanjang [illegible] km [illegible] 1.10 meter	43 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Barat	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.39	[illegible]	26-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Kecamatan terhubung dan perlu perbaikan jalan sepanjang [illegible] km 1.10 meter	37 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Utara	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.40	[illegible]	27-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Kecamatan terhubung dan perlu perbaikan jalan sepanjang [illegible] km 1.10 meter	43 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Utara	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.41	[illegible]	28-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Jembatan penghubung dan perlu perbaikan jalan sepanjang [illegible] km 1.10 meter	43 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Barat	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.42	[illegible]	29-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Jembatan penghubung dan perlu perbaikan jalan sepanjang [illegible] km 1.10 meter	43 Ds. Dalu Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Utara	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.43	[illegible]	30-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Mohon maklumnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas ini untuk wilayah Prog. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak adanya gedung kelas sekolahan dan perlu [illegible] ruang kelas 1 unit	Mencakup Sumber Kp. 147, RW. 03 Desa Mekar	Kab. Sukaraja Kec.	Kabupaten Aceh Utara	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS KEBERSIHAN	DINAS PENDIDIKAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.44	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembangunan Jembatan Produksi Dalam Dari untuk menjang kendaraan roda enam dan mengangkut penguna dan dengan ukuran 500 m x 3 m	41 Ds. Desa Sukaraja Kec. Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Aceh Tumbang	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.45	[illegible]	28-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembangunan Jembatan apabila musim hujan air banjir meluap,mobil untuk warga dan jalan terputus	Lokasi Kedesa Tasikmalaya RT.04, Kelurahan TTA Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.46	[illegible]	29-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Belum memenuhi fasilitas, antara lain jaringan air bersih ke seluruh Cimareng Sig, serta sehingga tidak dan sehingga dengan melakukan pada kantor pelanggaran PDAM	RT.03, 04, 05 dan 06, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.47	[illegible]	30-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Kantor kurangnya air jambi untuk kebutuhan, sehari hari masyarakat memerlukan 3 (tiga) kantor air bersih	RT. 02 kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.48	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan saran sanitasi, karena jalan masih bertebaran Desa/sehingga aktivitas penduduk P = 1000 jiwa, q= 10 lt/jiwa/hari	RT. 03 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.49	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Meningkatkan cakupan layanan Kelurahan karena sumber sebelumnya jalan terbatas,P = 100 jiwa, q = 10 lt/jiwa/hari	RT. 02 kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.50	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembuatan tandon 3 x 100 jiwa Sukaraja Kelurahan Tasikmalaya warga sp tersedia di sekarang jungkit	RT.04 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.51	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Perbaikan dan/atau Gili Gutawa Ilan banyak (meliputi pengembangan saran tandon jalan sarana sekolah) P = 500 m, q = 5 lt/hari/orang (sarana dan pengembangan)	RT.04 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.52	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Meningkatkan cakupan layanan air bersih masyarakat warga satu sehingga pelayanan saja oleh kantor	RT.03 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.53	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Cuci Balok Jarak Kecil ( ) dan Tandon Sig. Sehingga dimana terhubung terhubung dan dibuat P = 200 m, q = 5 lt/hari/orang	2. Kecu RT.02 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.54	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pengadaan dan Tidak Tandon Kecil Lainnya untuk terhubung kecamatan Kolangan Air media pelayanan perhatikan P = 10 m, q = 4 lt/hari/orang	Jalan Inter Tandon Kp.03 RT.03 Kelurahan TTA, Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-
4.55	[illegible]	31-12-2025	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum memenuhi persyaratan dan permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pengadaan Jaringan Meter Sig. Sehubungan Perhatikan Pengerasan Sig. APTA Air apabila musim hujan atau tidak ada Kecil P = 250 m, [illegible]	Jl. Angkut kantong Sig. APTA Air RT. 01 Kab. Sukaraja Kec.	Kab. Sukaraja Kec.	Aceh	Tumbang aceh	Kecamatan Cilawu	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-

439	[illegible]	28-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program/Kegiatan/Lokasi)	Permasalahan/kendala yang ada misalnya jalannya Pembukaan Jalan Cluster/Lokasi Pemukiman dan Pariwisata terhambat karena akses jalan belum	RT.07 Kelurahan Y16, Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi	Sukabumi	Cisaat	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
440	[illegible]	28-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Permasalahan adalah kurang lancarnya aktivitas Pemerintahan dalam Proses pelayanan masyarakat dikarenakan Kantor Kelurahan Cisaat dan Kantor Kecamatan Cilawu	Kantor Kelurahan Cisaat Kecamatan Cilawu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	Kec. Cisaat	Cisaat	Cisaat	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
441	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Perkebunan Di Cibunut)	Manajemen Desa Cipanas Tanjakan Cibunut kurang dan sebaiknya di dan untuk meningkatkan dan Wisata yang Unggulan)	Desa Cipanas Tanjakan Cibunut Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Cipanas Tanjakan	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
442	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
443	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
444	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
445	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
446	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
447	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
448	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
449	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-
450	[illegible]	27-11-2023	[illegible]	Kecamatan Cilawu	Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum terdaftarnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Prog. Perlengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	Pembangunan Jalan Lokasi Pit Desa Pemasang Lampu PJU 3 Titik	Jalan Sangkanerang RT.03/RW.02 Desa Pemasang Lampu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Kab. Sukabumi	Kec. Cisaat	Cisaat	Pemasang Lampu	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kelurahan	-	[illegible]	-	-

446	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
447	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
448	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
449	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
450	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
451	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
452	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
453	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
454	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
455	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-
456	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kelurahan / Desa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-

476	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi Atas RT.02, Desa Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
477	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
478	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
479	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
480	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
481	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
482	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
483	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
484	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-
485	8/2/2022	28-12-2022	49.0416 (S.Tk) 113.741	Kecamatan Cisaga	Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel (Belum memiliki pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk difabel Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan talud sepanjang 100 meter	Jalan Baru Kp Cisaladi RT.05, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Kurun	Kuota 5 unit	Kabupaten / Kota	Dinas Pekerjaan Umum	-	Disetujui	-	-	-	-

905	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembelian dan Bekerja sama dengan [illegible]	Jalan Asbun Sekolah Setia Budhi 17 (18) Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
906	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pengembangan Internet di [illegible]	Jalan Ir. Soekarno KM. 25 Kab. [illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
907	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Internet di [illegible]	Jalan Ir. Soekarno KM. [illegible] Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
908	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Program Pengembangan Usaha)	Ya Belum Kerjasama Di Sekolah, Ini Sekolah Sudah Ada Internet Namun Belum Maksimal Karena Sinyal Yang Kurang Stabil Dan Sering Mati Dan Sekolah Juga Belum Memiliki Wifi Dan Sekolah Juga Sangat Membutuhkan Data Terkait	Jl. Sekolah KM 10, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
909	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Program Pengembangan Usaha)	Jalan Desa Tumbang Bunut Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Rusak	Tumbang Bunut	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
910	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Akses Wifi di Desa Tumbang Koling Kec. Gunung Mas	1 Kilo Desa Tumbang Koling Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Belum Ada Sama Sekali	Tumbang Koling	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
911	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Rusak	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
912	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Koling Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Belum Ada Sama Sekali	Tumbang Koling	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
913	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
914	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Program Pengembangan Usaha)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
915	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
916	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Program Pengembangan Usaha)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
917	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
918	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
919	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jaringan Kurang Stabil	Desa Tumbang Jutuh Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sinyalnya Kurang Stabil	Tumbang Jutuh	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
920	[illegible]	28-12-2021	[illegible]	Mahasiswa / Depok	Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb (Belum melakukan pembelanjaan dan pemesanan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wifiweb Prog. Pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Balai Desa Untuk Kedepannya Desa Baru Sekolah 4 (1) Jl. Ir. Soekarno Km. 7 Kab. Gunung Mas	Desa Baru Sekolah 4 (1) Jl. Ir. Soekarno Km. 7 Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Desa	Baru Sekolah	Kecamatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]

1	[illegible]	11-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Jembatan jalan Enggo Guna dengan volume lebih besar dimana jalan sudah rusak dan butuh perhatian lebih	[illegible] Kec. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Enggang Baroh	Teluk Dalu	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible] lebih lancar	-	Data akurat (Prioritas : Bidang infrastruktur Prioritas : Mendukung Program Pemerintah)
2	[illegible]	11-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Jembatan jalan Bukit Pilah, dengan volume lebih besar, karena jalan sudah rusak dan butuh perhatian lebih	[illegible] Kec. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Enggang Baroh	Teluk Dalu	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible] lebih lancar	-	Data akurat (Prioritas : Bidang infrastruktur Prioritas : Mendukung Program Pemerintah)
3	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu adanya penerangan jalan di ruas jalan sepanjang 4 km	[illegible] Kec. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
4	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu Adanya Drainase / Gorong-gorong Pembuangan Jumlah 250 Lt Desa	Desa Tumbang Gerik, Kab. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
5	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu Adanya pembangunan Jembatan sungai, lebar 5 - 6 m di sungai Gerik	Desa Tumbang Gerik, Kab. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
6	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu adanya pembangunan jembatan 1 unit di sungai Nyiwai	Desa Tumbang Gerik, Kab. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
7	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu adanya pembangunan jembatan 1 unit di Sungai Rayonal	Desa Tumbang Gerik, Kab. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
8	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Perlu adanya pembangunan jembatan 1 unit di Sungai Rayonal	Desa Tumbang Gerik, Kab. Gunung Meo	Kec. Gunung Meo	Sedulang Baroh (Desa)	Tumbang Gerik	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
9	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan) (Belum maksimal pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah Prog. Peningkatan Prasarana Dasar dan Utilitas Lihat (PU))	Jalan menuju desa tumbang Apuat Sentral menghambat jika terjadi, perbaikan maupun pembuatan baik sangat dibutuhkan selain gotong royong semuanya sangat membutuhkan perbaikan untuk memperlancar lalu sangat dalam mengelolakan ekonomi. maka dimohonkan pemerintah untuk maupun daerah untuk dan bisa terlihat cepatnya yang lebih dalam di jalan maksimal sebuhnya terbaikan untuk nanti.	desa tumbang apuat, kecamatan sungai Selucukan gunungmeo, kab. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Tengan	Tumbang Apuat	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	[illegible] lebih lancar	-	-
10	[illegible]	09-12-2023	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah Prog. Peningkatan Prasarana Dasar dan Utilitas Lihat (PU))	Jembatan sebuh Lintas Provinsi di perumahan Mangai masih sangat gabai dikarena tidak sekarang ini.	Desa Tumgai, Kab. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Mandung	Tumgai	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	[illegible] lebih lancar	-	-
11	[illegible]	08-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Dengan Jalan dalam pembangunan secara ini banyak di Desa Barang Belawan maka [illegible] sangat Signifikan Masyarakat desa barang Belawan sangat membutuhkan [illegible] maupun di [illegible] (Banyak saya ini ini Desa).	Desa Barang Belawan, Kecamatan Sungai Laur, Kab. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Mandung	Barang Belawan	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
12	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Dalam Belum merasakan Pengalenggaran infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan) Perlu adanya Pembangunan Jembatan Penggabungan Lanjut Menuju Desa Barang Belawan Mana akan berjangan di jangan sisinya Kecukupannya mengantar di Desa, sehingga akan lebih lancar Nasional Calon Negara menuju Desa Barang Belawan ( )	Jalan Menuju Di Arah Desa Barang Belawan, Kec. Sungai Hau	Kab. Gunung Meo	Mandung	Barang Belawan	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
13	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Jembatan yang menuju arah Desa Barang Belawan sudah tidak layak untuk dilewati, ada lobi masyarakat yang mobilisasi [illegible] sudah tidak layak dan mengakibat Desa Barang Belawan ( )	Jalan Menuju Di Arah Desa Barang Belawan, Kec. Sungai Hau	Kab. Gunung Meo	Mandung	Barang Belawan	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
14	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah Prog. Peningkatan Prasarana Dasar dan Utilitas Lihat (PU))	Bantuan Pembangunan 2 Unit Rumah Adat di Desa Barang Belawan ( ) Unit Rumah Adat dan 1 Unit Gereja Katolik	Desa Barang Belawan, Kec. Sungai Hau	Kab. Gunung Meo	Mandung	Barang Belawan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
15	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Belum maksimal pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah Prog. Peningkatan Prasarana Dasar dan Utilitas Lihat (PU))	Jalan Di Dan Disarankan di Desentralisasi Musrenbang Desa masih kurang	Desa Tumbang Manduna, Desa Lubuk Tobeu, Kab. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Mahurung Raya	Tumbang Manduna	Kabupaten / Kota	[illegible]	-	Diberikan	-	-	-	-
16	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Jalan Desa Banyaknya Mahasiswa Desa masih Harus	Desa Tumbang Manduna, kantor Jangan Desa Lubuk Tobeu, Kab. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Mahurung Raya	Tumbang Manduna	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-
17	[illegible]	09-01-2024	[illegible]	Mahasiswa/Umum	Belum merasakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengalenggaran Jalan)	Jembatan jalan dan Gua Lubuk di desa pembangunan Jalan Desa Tobeu akses terdekat masih kurang sekarang 400 M	Jalan Pembangunan Jalan Desa Tobeu, Kec. Gunung Meo	Kab. Gunung Meo	Mandung	Tobeu	Kabupaten / Desa	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Masyarakat	-	Dilaksanakan lebih lancar	-	-

320	999999	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum terealisasi sejak tahun [redacted]	Jalan Tol Lau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning	Tetap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
321	999191	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum terlaksanakan. Sering kekurahan Tahang	Kec. Tahang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
322	999439	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Lahan)	Masih dinyatakan akan yang cukup	Tahang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
323	999299	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial)	Belum adanya Surat ijin yang cukup	1+20 JALAN Kec. Tahang, KAB. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
324	999317	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial)	Jalan ini belum yang baru cukup baik pun ingin	1+20 KM, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
325	999321	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum terlaksanakan sesuai (1) tahap / Tahang	Kec. tahang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
326	350811	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Lahan)	Pengadaan Lahan dari Desa Tumbang Koh Sampai Desa Jaluk Tuka (Gunung Lakih) 7 KM	Desa Jaluk Tukau Mas Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Mahuning Baan	Lawit Tuka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
327	350844	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN)	Adalah Rumah Hasil Jaluk Hutt, untuk mi Lah dan Jualan untuk Masyarakat	Desa Jaluk Tukau, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Mahuning Baan	Lawit Tuka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
328	351999	09-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terjadi di tinggi sungai tutupan di pemukiman masyarakat yang sangat dekat dengan sungai ini Pada akhir di tahunan pembangunan MITIGASI sementara STP Mesin	Jl. Lt Jaraug Baru, Kec. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Hujan	Jaraug Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
329	351992	10-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan saya untuk Desa Pangkulung akan untuk Desa Sahung Hilir	Tug Tarungan Tug Tahadi, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sahayan Hulu Desa	Tumbang Tahadi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
330	352344	10-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Adalah Jembatan yang di Desa Tarungan ini Kurang	R 1 +1, Jembatan Tumbang Tahadi Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Sahayan Hulu Desa	Tumbang Tahadi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
331	352351	10-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Lahan)	Pengadaan Lahan di Desa Tumbang Sarau sebanyak 1+ Unit	Tumbang Sarau, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tumbang Sarau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dilaksanakan	-	-	-
332	352343	10-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Program Pengadaan Lahan)	Pembangunan Jalan ke 1+ Ke Bantuh Desa Tumbang Sarau sebanyak 1+ Unit	Tumbang Sarau, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tumbang Sarau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-
333	352343	10-01-2024	[redacted]	Kecamatan / Desa	Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah (Belum mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan aksesibilitas untuk wilayah Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kondisi dimi Jingkungan yang masih rusak dimi sekitar 1,5 km	Kec. Tahang, Kab. Gunung Mas	Kec. Gunung Mas	Mahuning Baan	Tahang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dari satu	-	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Verifikasi Kecamatan	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	[illegible]	[illegible]	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	[illegible]	-	-

317	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum optimalnya pemeliharaan di saluran irigasi akibat tanggul mendukung perlindungan kesehatan tanggul	Pembangunan PAC dan tanggul kapuk mencukupi	Dekat Tambang Lokasi Ass. Rungan, Kec. Gunung Mas, Provinsi kalimantan tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jaun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Terjadinya dengan kesalahanagan Provinsi, sesudah ada prioritas pada Kabupaten Mentaya, agar memperhatikan desa Gunung	-	-
318	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kualitas irigasinya Kondisi akses prioritas dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat	Kabupaten/kota / Pemerintahan Desa/kelurahan Kab/Kota Kuran - Sesang Kuala, Bidampak Dilir wak Jalan mengakibat Desa/kelurahan sehingga kapasitas Kabupaten yang mendahili kewenangan/urusan yang ada, sehingga perlu adanya pemerintahan kapasitas dalam kasih dalam jalan prioritas kecamatan kelurahan/desa yang sehingga/akses agar penggunaj dalam kasih mengakibatkan/akses prioritas dalam kasih	Kabupaten Gunung Mas Kuala dalam Provinsi kasih Kuran - Sesang, Provinsi kalimantan tengah	Kab. Gunung Mas	Kuran	Kuala Kuran	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas kota satuhu, pertimbangkan kabupaten desa Gunung	-	-
319	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kualitas irigasinya Kondisi akses prioritas dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat	Kekurang/Kelompokan Jalan Kuala Kuran - Sesang, Jalan, Pulau dalam Dalam kapasitas/akses Jangkauan, sehingga kapasitas dalam dalam (Dikecil) kasih sesuai dan Sesang	Kabupaten Gunung Mas Kuala dalam Provinsi Kuala Kuran - Desa Kasu, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kuran	Kuala Kuran	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas kota, rencana, pertimbangkan kabupaten desa Gunung	-	-
320	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Masih tinggi/rusak kondisi tersebut prioritas dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat	Dahulu/Kasi tersebut Dai Kuran, Terjadi kerusakan pada kondisi tersebut di Dai kalian yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Desa/kota Kasi) pemakaian	Kabupaten Gunung Mas Kuala dalam Provinsi Kuala Kuran - Sesang, Kecamatan Kuran, Kuran Sebanang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kuran	Kuala Kuran	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan kabupaten desa Gunung	-	-
321	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Masih tinggi/rusak kondisi tersebut prioritas dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat	Kerusakan/akses sementara hal Kiri, Terjadi kerusakan pada kondisi tersebut sehingga sehingga akses yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Kasi/kota Kasi) pemakaian	Desa Kasu, Kecamatan Sebang Kapuk Kasu, Kasu Kecamatan Kuran, Kasu Sebanang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Sebang Kapuk	Kasu-I	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-
322	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Masih tinggi/rusak kondisi tersebut prioritas dalam kondisi rusak, baik kondisi rusak ringan maupun rusak berat	Kekurang/Kasi tersebut Dai Sesang, Terjadi kerusakan/akses pada kondisi tersebut sehingga sehingga akses yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Desa/kota Kasi) pemakaian	Desa Kasu Sebanang Dec. Kuran, Kec. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kuran	Pasar Kahumbang	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-
323	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum optimalnya pemeliharaan di saluran irigasi akibat tanggul mendukung perlindungan kesehatan tanggul	Kekurang/Kasi tersebut Dai Sesang, Terjadi kerusakan/akses pada kondisi tersebut sehingga sehingga akses yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Desa/kota Kasi) pemakaian	Kecamatan Sebanang, Kecamatan Sebanang, Kasu Kecamatan Kuran, Kasu Sebanang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Sebanang	Kasu-II	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-
324	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum optimalnya pemeliharaan di saluran irigasi akibat tanggul mendukung perlindungan kesehatan tanggul	Kekurang/Kasi tersebut Dai Sesang, Terjadi kerusakan/akses pada kondisi tersebut sehingga sehingga akses yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Desa/kota Kasi) pemakaian	Desa Tumbang Kuran, Kecamatan Kuran, Kasu Kecamatan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kuran	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-
325	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Belum optimalnya pemeliharaan di saluran irigasi akibat tanggul mendukung perlindungan kesehatan tanggul	Kekurang/Kasi tersebut Dai Sesang, Terjadi kerusakan/akses pada kondisi tersebut sehingga sehingga akses yang mempengaruhi pemakaian masyarakat yang dapat (Desa/kota Kasi) pemakaian	Desa Gunung Kuran, Kecamatan Kuran, Kasu Kecamatan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kuran	Gunung Kuran	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-
326	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pemeliharaan, Perawatan Pemasangan Dasar	Pembangunan Akses dan Jalan dan Kasi	Kabupaten/Kecamatan Dec. Sebang Kapuk, Kasu, Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Sebang Kapuk	Kahayan	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Ruang	Verifikasi Perangkat Daerah	-	terjadinya kewenangan provinsi, sesudah prioritas, rencana, pertimbangkan desa Gunung	-	-

Tabel 2.6. Usulan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2025

No	ID Usulan	Tanggal Input	Pengusul	Usulan	Rincian	Alamat Detail	Kecamatan	OPD Terkait Awal	OPD Tujuan Akhir	Status	Catatan	Volume	Satuan
1	775953	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Hagar Sekolah SDN Rangan Tala Desa Rangan Tala Kecamatan Mifring Raya	Desa Rangan Tala, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Pengajuan Usulan	-	150000000	Rupiah
2	772005	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pembuatan Jalan Produksi di Desa Sepang Kota	Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Pengajuan Usulan	-	800000000	Rupiah
3	775963	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pendidikmilan dan Pendidegurian)	Pengadaan Motor Operasional untuk Gereja GPT Mawar Sharon Desa Tewang Pajangan (Motor Toyota Avanza)	Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Ditolakkan	-	300000000	Rupiah
4	775973	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Tahun)	Pengadaan Motor Operasional untuk Gereja GPT Mawar Sharon Desa Tewang Pajangan (Motor Toyota Avanza)	Desa Tewang Pajangan Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	300000000	Rupiah
5	775953	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Tahun)	Pengadaan Mobil Operasional untuk Gereja GPT Mawar Sharon Desa Tewang Pajangan (Mobil Toyota Rush)	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	250000000	Rupiah
6	772984	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pembangunan Jalan)	Pembuatan Jalan Cor beton di Jalan Brigjen Katamso Gang Sapeka dengan ukuran Panjang 11 M dan Lebar 4	Kelurahan Tahaping Tumbang Anjir Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	200000000	Rupiah
7	772980	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Ternak Sapi untuk Desa Tumbang Hakoi	Desa Tumbang Hakoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Pengajuan Usulan	-	260000000	Rupiah
8	772986	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pengadaan tenda untuk SURGec Desa Sepang Kota	Desa Sepang Kota Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	-	Rupiah
9	773011	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Pelatihan Tenaga Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja)	Bantuan alat pertukangan untuk Desa Pelak Bahandang	Desa Pelak Bahandang Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	Rupiah
10	773041	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Belum optimalnya penyelenggaraan dan pemerataan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Media Online "Media Dayak"	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	Pengajuan Usulan	-	100000000	Rupiah
11	773061	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Tahun)	Pembangunan Pastori Gereja Pantekosta Kelurahan Kurun	Kelurahan Kuhut Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	Rupiah
12	773079	07-03-2024	RAYANGTE SUNYOTO	Masih rendahnya kualitas SDM dan keseimbangan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Tahun)	Bantuan biaya pendidikan untuk 10 orang Mahasiswa	Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Pengajuan Usulan	-	-	Rupiah
13	921719	08-03-2024	REMANTO	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengembangan Jalan)	pengaspalan jalan menuju Tumbang Kuayan Kecamatan Kurun Barat	Desa Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1	1 km
14	924459	08-03-2024	YANTOE	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Bungan Eliakurahan Jalukan Raya sebesar : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliyar Rupiah)	Kecamatan Bungan, Kelurahan Jalukan Raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1	Miliyar
15	924868	08-03-2024	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemadaian & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan ternak sapi	Tahang Kec. Manuhing Raya Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	250000000	Rupiah
16	924867	08-03-2024	CICI SUSILA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemadaian & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Ternak Sapi	Desa Lawuk Tabau Kec. Manuhing Raya Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	200000000	Rupiah

17	832294	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah. (Program Pemerataanpembangunan lokal)	Peningkatan badan jalan ke cor beton dan aspal gosreg di Jln. Hadan (aspasial 90,1 P. 4004)	Jln. Raden Jayapati Kl. 01 Sekretan Tbg MH. Kec. MAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	400	meter
18	832230	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah. (Program Pemerataanpembangunan lokal)	Peningkatan badan jalan ke 2Jln beton dan Aspal Gosreg Di Jln Tumenggung Panjang Kel. Tumbang Miri Kec. MAHUT, Kab. Gunung Mas	Jln. Tumenggung Panjang, RT 01 , Kel. Tumbang MH Kec. MAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	Meter
19	825302	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah. (Program Pemerataanpembangunan lokal)	Peningkatan Kontruksi badan Jalan ke Ujung Beton dan Aspal Gosreg Di Jln. Dambung Bangun , Kel. NAPOI , Panjang 150m	Jln. Dambung Bangun, Kel. NAPOI , Kec. MH Mantaya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	150	Meter
20	833389	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Ekbit SAPI 6 Jantan dan 6 Jantan Utk Kelompok Tani "MUKTI RAHAYU" Kel. Tbg Miri Kec. KAHUT.	Kel. Tbg Miri, Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	13	Ekor
21	825235	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Ekbit SAPI 6 Jantan dan 6 Jantan Utk Kelompok tani "TIGA SEHARAKA" Kel. Tbg Miri	Kel. Tbg Miri, Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	12	Ekor
22	833322	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Ekbit Ternak SAPI 5 jantan dan 5 betina Oleh Kelompok Tani "PANCENGKIT" Kec. Tbg BAPOI	Kel. Tbg BAPOI, Kec. MH Mantaya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	10	Ekor
23	825319	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Ekbit Babi 10 jantan dan 15 betina oleh kelompok tani "HARAPAN BERSAMA" DS. Mangkutung Kec. MH Mantaya	DS. Mangkutung Kec. MH Mantaya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	30	Ekor
24	832349	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Bantuan Ekbit babi 5 jantan dan 5 betina dari kelompok tani " HARAPAT" DS Jurlor mas Kec. Tewah	DS jurlor mas Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	10	ekor
25	827326	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Ekbit babi 11 betina dan 11 jantan dari kelompok tani"PELAMBANG TARUNG" DS Dahdang Kec. GAHUT	DS Dahdang, Kec. GAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	23	ekor
26	833382	29-03-2024	POLE L. 4EHRD 3,PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan bibit ternak babi 12 jantan dan 11 betina dari kelompok tani "TAKAKE PESAWAKAN DS Big Pesangon, Kec. GAHUT	DS Big Pesangon, Kec. GAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	23	ekor
27	827182	29-03-2024	EVAKDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Permintaan Bibit Sapi, 1Kelompok Tani Kecamatan Tewah	Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	Ekor
28	831488	29-03-2024	EVAKDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Permintaan Bibit babi untuk 10 Kelompok Tani di Kec. Tewah dan Kec. KAHUT	Kec. Tewah dan Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	800	Ekor
29	827474	29-03-2024	EVAKDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Perlindungan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permintaan Ekbit Kambing Kelompok Tani di kecamatan KAHUT	Kec. KAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	Ekor
30	833827	29-03-2024	EVAKDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembukaan Lahan Produksi di Kec. TEWAH Panjang 5 Km	Kec. TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	400	Ekor
31	825540	29-03-2024	EVAKDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN SAYA SUKA DESTINASI PARIWISATA)	Study Banding/Studi Referensi dan Pertukaran Seni oleh 100 orang peserta/ Penggiat Seni Budaya Kab. Gunung Mas di Bali	Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1	miliar
32	825502	25-03-2024	EVAKDI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah. (Program Pemerataanpembangunan lokal)	Peningkatan Jalan Lingkungan Tbg. MH	Tbg. MH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	800	Ekor

39	925583	23-05-2024	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	peningkatan jalan lingkungan tawah	Tawah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	Jalan
40	925567	23-05-2024	EVANDI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	peningkatan jalan lingkungan Tbg. Napoi	Tbg.Napoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	JUTA
41	925575	23-05-2024	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pembinaan Kilbil dan pupuk kandi untuk kelompok tani di kec. Kahut dan kec. Tewah	kec. Kahut dan Kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	JUTA
42	925682	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan Kilbil tanaman kabil 10 jantan dan 8 betina oleh Kelompok Tani " DAMDANG SEMENTARA" DI Dandang Kec. KAHUT.	DI Dandang kec. KAHUT., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	15	HKSP
43	925602	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan kilbil tanaman kabil 10 jantan dan 10 betina oleh Kelompok Tani " MANJAP" DI Upon Batu Kec. TEWAH	DI Upon Batu kec. TEWAH, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	15	HKSP
44	925697	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembinaan kilbil tanaman kabil 10 jantan dan 8 betina oleh kelompok tani "KRUE SIMPO" Kelurahan, TBG Napoi, Kec. Mnl Manasa	Kelurahan, TBG Napoi, Kec. Mnl Manasa, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	10	HKSP
45	925905	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Belum optimalnya pengembangan pariwisata pada sektor unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA)	Bantuan DANA Ritual Tahtah di DESA PUTAT DURO, KEC. MANUHING RAYA Rp 6TO	DESA PUTAT DURO, KEC. MANUHING RAYA Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	470	Juta
46	925913	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan DANA pembangunan Gedung gereja GKI Bethi Rahunia di Desa Lawang Kanji kec. DAMANG BATU . Rp.265	Desa Lawang Kanji kec. DAMANG BATU, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Sekretariat Daerah	-	24	Juta
47	925952	30-05-2024	EVANDI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengadaan alat pemanggang untuk pengembangan UKBM di kec. tewah	kec. Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	JUTA
48	925960	30-05-2024	POLIE L. MANSU S.PD	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Dana untuk pembangunan Pastori Baru semat GKE Tbg Hamaotong kec. KAHUT Rp. 100 JT	Tbg.Hamputong Kec. SAHUT, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	Juta
49	926068	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Usulan kemali kambing	Desa Bebesan Mulya Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100000000	Rupiah
44	926088	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Ternak Babi di Tumbang Talaken 2	Tumbang Talaken kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	220000000	Rupiah
45	926098	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Rumah GPT "LEMBANG TALA'EN"	Tumbang Talaken kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300000000	Rupiah
46	931124	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gereja GPDI KASIH KARUNIA DESA JALSAU RAYA	Desa Jalemo Raya Kec. Rungan Barat Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300000000	Rupiah
47	931110	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gereja GKE Kahoroi Desa Tumbang Jalemo.	Desa Tumbang Jalemo Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300000000	Rupiah
48	931120	30-05-2024	CICI SUSVA WATI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Penyediaan Air Bersih di Desa Pajar Harapan Pantaran	Desa Pajar Harapan Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100000000	Rupiah
49	931165	30-05-2024	ESPRADI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Dan Lahan 2 Titik jalan ke Kolonel Imbah Desa Talaran (150 Ha)	Desa Talaran, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	12	Meter

10	[illegible]	30-09-2024	[illegible]	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Pasar Hiburan Rakyat (250 Juta)	Desa Tabanas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	30	Mahar
11	[illegible]	30-09-2024	[illegible]	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan DPU Kel. Tumbang Talaken (1,2 M)	Kel. Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Pengajuan Usulan	-	120	Mahar
12	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	PEMBANGUNAN GA LANGSAT SEMBAB ANGGARAN RP 200JT	JUKUJANGSAT , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	200	DATA
13	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	PEMBANGUNAN JALAN RABAT TANGGA (1) (DEPAN STAKES) DENGAN ANGGARAN RP 200JT	JLN. RABAT TANGGA (1) (DEPAN STAKES) , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	200	JT
14	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	PERBAIKAN JALAN MENUJU PERKAMPAMAN DI DESA TAMPELAS DENGAN ANGGARAN RP 200JT	DESA TAMPELAS, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	200	JT
15	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Belum optimalnya pengembangan pembiayaan daerah untuk unggulan daerah (PROGRAM PENGEMBANGAN DANA TUGU DESTINASI PARIWISATA)	BANTUAN DANA PERBAIKAN/PEMUGARAN/RENOVASI TAN DI BALI DENGAN ANGGARAN RP 400JT	BALAI KURUS, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	400	JT
16	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	PENGADAAN MOBIL AMBULAN/MOBIL JENAZAH UNTUK RSUD/PUSKESMAT DAK TANJUNG SARITAK DENGAN ANGGARAN RP 300JT	DI TANJUNG SARITAK, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	JT
17	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PEMBANGUNAN MUSHOLA AL RAUDHA DI DESA DAHIAN TAMBUK DENGAN ANGGARAN RP 300JT	DESA DAHIAN TAMBUK , Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	JT
18	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerataan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	PENGADAAN LEPTOP DAN PRINTER 100 JT UNTUK PUSKESMAS KURUN,	PUSKESMAS KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	226	JT
19	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerataan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	PENGADAAN PERALATAN BIDANAN KHAS UNTUK PUSKESMAS KURUN SESUAI ANGGARAN RP 85JT	PUSKESMAS KURUN, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	85	JUTA
20	[illegible]	30-09-2024	KOU PURNAMAMAN	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pengelolaan Pendidikan)	PENGADAAN LEPTOP DAN PRINTER TK PEMBINA TUMBANG DAPAS DENGAN ANGGARAN RP 15 JT	DI TUMBANG DAPAS, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	15	JT
21	[illegible]	31-05-2024	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum Tersedianya Fasilitas Jembatan Penyeberangan untuk Akses Antar Desa di Wilayah Kecamatan Kurun (Jembatan Sei Riam)	Jl. Lintas Desa Kurun-Sepang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	80	Rp
22	[illegible]	31-05-2024	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Belum Tersedianya Fasilitas Jembatan Penyeberangan untuk Akses Antar Desa di Wilayah Kecamatan Kurun (Jembatan Sei Hilvan)	Jl. Lintas Desa Kurun-Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	80	Rp
23	[illegible]	31-05-2024	NENI YULIANI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Banyak Rumah Ibadah di Wilayah Gunung Mas Yang Sarana dan Prasarana Belum Memadai Mengingat Jumlah Jemaat Semakin Meningkat Perlu Perbaikan dan Pemerintah Gunung Mas Untuk Peningkatan Balk Gedung Ibadah, Masjid dan Balai Hindu Kaharingan sebagai Sarana Beribadah Bagi Masyarakat	Kecamatan Kurun, Kecamatan Miling Raya, Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	50	Gedung
24	[illegible]	31-05-2024	NENI YULIANI	Belum optimalnya pengembangan pembiayaan daerah untuk unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	Ulpembukannya Lokungan Dan Pemerintah Lisensi Dalam Upaya Perlingkatan Pendonomian Masyarakat, dalam hal ini Sektor Pertanian yang dapat memberikan dampak masyarakat berdiri untuk memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar untuk dapat digunakan dalam sektor pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan masyarakat juga pertumbuhan daerah.	Kecamatan Kurun, Kecamatan Miling Raya, Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	Hektare
25	[illegible]	31-05-2024	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Perlu Adanya Pembangunan Sumber Air Bersih dan Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Kecamatan Kurun, Kecamatan Miling Raya, Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	20	Unit

65	827757	01-05-2024	NENI YULIANI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (Program Pengurusan Pensil Gliser)	Diperlukan dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas SDM seperti pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan kurang mampu dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokalnya agar peningkatan kualitas SDM mendapatkan hasil yang optimalnya.	Kecamatan Kuruo, Kecamatan Bilting Raya, Kecamatan Sejang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	135	Orang
67	827765	01-05-2024	NENI YULIANI	Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat (PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGEMUDIAN)	Diperlukan dukungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelatihan Mengemudi dan Pelatihan Operator Excavator Guna Menunjang SDM Lokal	Kecamatan Kuruo, Kecamatan Bilting Raya, Kecamatan Sejang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI UMKM KOTA DAN MASYARAH	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	50	Orang
68	827764	01-05-2024	NENI YULIANI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Masih banyaknya jalan pemukiman di kota kuala kuruo yang belum dibangun.	Kecamatan Kuruo, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1000	Meter
69	827768	01-05-2024	NENI YULIANI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemasaran dan Pengembangan Produksi Perkebun)	Perlu Dukungan Dari Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Pengadaan Ternak.	Kecamatan Kuruo, Kecamatan Bilting Raya, Kecamatan Sejang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	Kilo
70	827758	01-05-2024	NENI YULIANI	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemasaran & Pengembangan Sarana Pertanian)	Perlu Dukungan Dari Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Pengadaan Bibit Ternak.	Kecamatan Kuruo, Kecamatan Bilting Raya, Kecamatan Sejang, Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1000	Ekor
71	828660	01-04-2024	SITI HUMAH	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan Gang Suka Damai	kelurahan tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	100	meter
72	828674	01-04-2024	SITI HUMAH	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan jalan S. Parman, sebarang 0,8	Kelurahan Tampang Tumbang kecm. Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Disetujui	-	-	0
73	828682	01-04-2024	SITI HUMAH	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	lanjutan pembangunan pasiran jamasi parawai kampung	kelurahan kahayan kelurahan bilting raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Disetujui	-	-	0
74	828750	01-04-2024	ICEU PURWAMASARI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wil ayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	perbaikan jalan s.parman, sebarang 0,8	kelurahan tampang tumbang anjir, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	-	0
75	828765	01-04-2024	ICEU PURWAMASARI	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wil ayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	lanjutan pembangunan pasiran jamasi parawai kampung	kelurahan kahayan kelurahan bilting raya, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Disetujui	-	-	0
76	828783	01-04-2024	GUNTUR	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wil ayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jalan Baru Menuju Air Terjun Gedang Sebanyak Tewah Panjang Kurang Lebih 1,3 Km dan Diperlebar Dana 1,5 M	Kuding Sebanyak Tewah, Kab Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1,5	M
77	828784	01-04-2024	GUNTUR	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wil ayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan Menuju Kuburan Tumbang Lamiting Tewah Panjang Kurang Lebih 300 Meter Dan Diperlebar Dana 500 Juta	Tumbang Lamiting Tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	300	Unit
78	828801	02-04-2024	SITI HUMAH	Belum meratanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas antar wil ayah (Prog. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU))	Pemeliharaan masjid darul amal	kelurahan tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Validasi Sekretariat Dewan	-	1,5	miliar

2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 yaitu Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Khususnya melaksanakan Inovasi kebijakan tersebut melalui:

a. **Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH)**

   Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk dapat mengatasi tingginya kesenjangan antara angka ketersediaan dan kebutuhan rumah atau disebut *backlog*. Berdasarkan data dari Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas angka *backlog* di Kabupaten Gunung Mas pada akhir tahun 2023 sebanyak 2.434 unit. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Gunung Mas terus berupaya menekan angka *backlog* dengan beberapa program perumahan bersubsidi. Salah satunya adalah program kawasan permukiman dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah kegiatan pemberian bantuan dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu membeli rumah sendiri program ini dilaksanakan melalui mekanisme pemberian bantuan sosial material bangunan. Berikut salah satu contoh BPKRTLH.

Gambar 2.1. Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (BPKRTLH)



b. Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana (PB Bencana)

Bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. Merupakan upaya pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pemenuhan SPM Perumahan yaitu "penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota". Mekanime dan kriteria penerima bantuan sama dengan BPKRTLH, berikut salah satu contoh Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana:

Gambar 2.2. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 merupakan salah satu identifikasi faktor – faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir – butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025. Hasil telaahan kebijakan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta RKPD Kabupaten Gunung Mas yang dikaitkan dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matrik hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

Kebijakan Tahun 2024			Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Prioritas Nasional RPJMN 2020 - 2024	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016 - 2021	RPJMD Kab. Gunung Mas 2019 - 2024	
PN 3 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing **PN 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Pemerataan Pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah	Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Bila diperhatikan tabel diatas terlihat bahwa dalam penyusunan Renja PD dimaksudkan agar terciptanya keterpaduan pembangunan baik tingkat pusat dan tingkat daerah karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Adanya persamaan kepentingan/tujuan atau upaya – upaya strategis yang harus disinergiskan.
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama.
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menetukan kewenangan bersama, utamanya daerah – daerah yang letaknya berdekatan, dan
4. Adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Dari hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat melalui Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Program Pembangunan
PN 1	**Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)**	
PP2	**Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
PN 2	**Mengembangkan wilayah untuk**	

	mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PP6	**Pengentasan Kemiskinan**	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
PN 5	**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**	
PP1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
PP2	**Infrastruktur Ekonomi**	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
PP3	**Infrastruktur Perkotaan**	
		PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024, yang dirumuskan bersifak spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Merujuk pada evaluasi pembangunan Tahun 2022 dan Tahun berjalan 2023, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2023, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3. Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Gunung Mas, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Tahun 2024.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar Wilayah	Meningkatnya pengelolaan Irigasi dan konservasi SDA yang berkelanjutan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	178.4	133.8	89.2	44.6
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69.02	73.69	79.52	85.36
	Meningkatnya penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	12.16	13.01	13.85	14.70
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	24.17	24.73	25.30	25.86

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	11.280	11.480	11.680	11.880
	Penataan Bangunan dann Lingkungannya	11.578	11.778	11.978	12.178
Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	2.72	3.12	3.63	4.08
	Ketersediaan Regulasi Penataan Ruang Daerah yang Lengkap	1	2	2	1
	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota	8.23	8.26	8.28	8.31
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaringan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	27.697	30.674	31.314	33.276
	Presentase Jembatan Kondisi Baik	37.758	39.476	40.555	41.093
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	33.33	66.67	100
Meningkatnya penyediaan hunian dan permukiman yang layak	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	1.30	5.32	8.30	20.16
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab. yang ditangani	0.42	0.99	1.56	2.13
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8.60	6.47	4.31	2.16
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	32.79	66.40	99.18

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 yang berfokus pada pembangunan di beberapa bidang yang cukup strategis dan diharapkan memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025 ini pembangunan akan dilakukan pada bidang SDM, Ekonomi, infrastruktur,

Pemerintahan dan lingkungan hidup. Pada Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu mempercepat pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Pembangunan yang stabil diperlukan dalam proses percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan dalam percepatan semua sektor harus berjalan beriringan secara seimbang, sehingga tujuan utama pembangunan dapat terwujud. Rumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Program pembangunan daerah kabupaten gunung mas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Pencapaian Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.
2. Pencapaian SDGs.
3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Pengarusutamaan Gender (PUG).
5. Upaya – upaya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim yang telah dan sudah berlangsung.
6. Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Gunung Mas

Adapun program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program Penataan Bangunan Gedung	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Jalan	- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Jasa	- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil

Konstruksi	Konstruksi - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Program Pengembangan Perumahan	- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Program Kawasan Permukiman	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Rincian rencana kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada Rekapitulasi rencana kerja program prioritas beserta pagu indikatifnya pada masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

KODE	URUSAN	PROGRAM	PAGU RKPD (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.979.811.206,00
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8.420.000.000,00
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	17.150.865.512,00

		PENYEDIAAN AIR MINUM	
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.662.605.200,00
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.956.530.915,00
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	600.000.000,00
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.987.529.000,00
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	600.000.000,00
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	600.000.000,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	801.706.270,00
1.04.03		PROGRAM KAWASAN	755.691.614,00

	PERMUKIMAN	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	15.471.530.345,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk memujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026. Jumlah seluruh program dan kegiatan serta total kebutuhan dana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 4.1**. sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM						197.986.270.062,00							195.794.233.032,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						197.986.270.062,00							195.794.233.032,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						193.057.341.833,00							195.894.233.032,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	13.870.611.206,00						-	14.364.232.093,00	
	1.03.01.2.01	Penerimaan, Pengangaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	127.999.107,00			-	Memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat secara lebih emergency	-	-	127.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	20.090.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengandalkan kecukupan sarana dan prasarana secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Penyediaan) bagi masyarakat sesuai kewenangannya	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.3.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				0 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Sarung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kecukupan tersedia dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif secara terpadu pengelolaan biaya sehingga terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata cranparency	-		8.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gorontalo Meo. Kuran; Kuala Kuran	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur / Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan	-		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gianyar, Mas, Ubud, Kuta, Kuta Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan kelengkapan rencana dan pelaksanaan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan dan Masyarakat sosial lainnya	-		9.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0035	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka pengelolaan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya			6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0067	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	83.666.137,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya kesiapsiagaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan kompeherensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik utama, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi masyarakat dan kawasan strategis.	-		80.536.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.3.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.202.053.885,00			-	Memperoleh kecukupan semua dan prasarana umum secara integratif dan tertata hasil dalam rangka pelaksanaan Bidang dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Jalan Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata wilayahnya	-		10.255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.3.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/bulan	10.154.053.465,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesetahteraan Masyarakat secara merata	-		12.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kosolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan konsisten dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pertumbuhan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan Lingkungan permukiman dan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	46.080.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemlap kedukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemenuhan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Lainnya, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhannya	-		00.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	78.714.558,00			-	Memperbaiki kecukupan semen dan pasir antara sesaat negatif dan kongres terakit dalam rangka peningkatan fisik dukung terhadap pembangunan daerah. Pemeliharaan dan pemeratan infrastruktur Pekerjaan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kebutuhannya.	-	-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0002	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	78.714.560,00	Kab. Gunung Mas: Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER, LAIN-LAIN PAD, ALOKASI UMUM		Mempercepat kesukupan terms dan prasarana umum sesuai, negative dan kompensasi dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	-	-			-	640.000.000,00			-	Mempermudah kelancaran lalulintas dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan di daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangan	-	-	520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0002	Pengelolaan Pelayanan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pelatihan Dasar beserta Ambul Kelengkapan				2 Paket	150.000.800,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat terciptanya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	0	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan dasar dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER/ UMUM/ DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas dan kompeten serta pelayanan publik yang berkualitas dan berdaya saing terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur / Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan, bagi kesejahteraan Masyarakat secara luas anonganny a	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.58	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	761.750.034,00			-	Mempercepat tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemerataan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Konstruksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dioperasikan				1 Paket	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kuayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka penyediaan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan / bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kebutuhannya	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.626.744,00	Kab. Gorontalo, Kec. Kwandang, Kwandang	DANA TRANSFER DAFUR-DANA ALOKASI UMUM	-	Kompensasi kehilangan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan penerapan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Penerangan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya.	-		25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN UMUM
	1.03.01.2.26.0.004	Penyediaan Barang Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	391.091.286,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kotak Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara/ kesemanpanny a	-	-	406.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.99.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER/A UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperwuj udkan kesukaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embangunia n daerah. Pembangu nan dan pemeliha raan infrastruktu r Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perum ahan) bagi kesejahtera an Masyarakat sesuai kew enangany a	-		30.000.000,00	DINAS PENERJAAN UMUM
	1.02.01.2.06.0008	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Ekspos dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disebarluaskan				3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Bungo; Rtbk. Kuruh; Kuala Kuruh	DANA TRANSFER UNUM-DANA ALOKASI UMUM		Mempercepat terciptanya sistem dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat khususnya yang tertinggal	-		13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.20.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	280.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kuan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/RA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	172.605.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mobel yang Disediakan				8 Unit	70.480.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuturi, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Memperlancar kelancaran lalulintas dan pelayanan umum secara mitigasi dan komprehensif dalam rangka peningkatan dan dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan lain lagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		80.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	RINCIAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan				6 Unit	87.125.000,00	Kec. Bunyeng, Mas, Runan, Kasih Kunyi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoperasikan kendaraan pelayanan umum secara integratif dan kompherensif dalam rangka peningkatan cepat dukung terhadap pembangunan dan Pertanggungjawaban pemerintah (Pelayanan Publik Lahan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai fungsinya	-		120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.36	Penyelitaan Jasa Pertunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.311.662.032,00			-	Memperoleh sistem kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan kunjara kenaik selam tingkat pertumbuhan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kebutuhannya	-	-	1.537.930.032,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.01.2.36.0001	Penyelitaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM		Mempercepat kecukupan layanan dan prasarana umum secara integratif dan kompherensif dalam rangka pemenuhan Hak dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik (jalan, jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	224.450.000,00	Kab. Gunung Mas, Kerun., Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan kelancaran sarana dan prasarana umum secara infrastruktur dan komunikasi dalam rangka pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata ruangannya	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diverifikasi				1 Laporan	1.276.582.032,00	Kab. Gunung Mas, Kuriyn, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mempermasalah kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan dan dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan penyediaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara luas sehingga	-		1.276.582.032,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	985.000.000,00			-	Meningkatkan kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemenuhan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	759.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	535.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kutai, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Pekarangan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.3009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kasik Kuran	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Memperoleh kesukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemanfaatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	1.03.01	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	8.420.000.000,00						-	10.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengairan Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Menjamin pengadaan sarana dan prasarana umum secara inklusif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan; bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	5.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0070	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL/MPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dipemeliharaan dan Dipelihara				21KM	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER LANJAR-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan, pemanfaatan, Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Lalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0197	Pembangunan Unit Air Baku														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				2 Unit	2.350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kemudahan berusaha dan pasokan air untuk secara integratif dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p emberguna n daerah Pembangu nan dan pemerataan Infrastruktu r Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perum ahan) bagi Kesejahtera an Masyarakat secara ber orientasi pa	-		2.500.000.000,00	DINAS PERKIMLIKAN LIMUM
	1.03.02.2.01.0100	Pembangunan Manajemen Perkotaan Tekno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.2 KM	2.200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat ketuntasan sarana dan prasarana umum secara integratif dan konsisten terkait salah satu upaya peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata ruang nya	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0116	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disahkan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat rekualifikasi lahan rawan bencana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif sesuai rencana rangka pemerintah daerah dalam mendukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya.	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.495.000.000,00			-	Mempercepat Kelancaran sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur / Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Penyehatan) bagi masyarakat kurang mampu	-	-	4.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.00.0.00.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0,25 KM	950.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum sesuai integrasi dan kompleksitas dalam rangka pertumbuhan dan dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.00.0006	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Pemukiman yang Dibangun/Rehab				0,00 KM	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Bermua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat terlulupan variasi dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemulihan aktifitas dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kebutuhannya	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Pemerintah yang Direhabilitasi				0,4 KM	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pengadaan dan dukungan terhadap pembangunan daerah. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata organisasi	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	384.000.000,00	Kab. Cianjur Rata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.02.0001	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				21,2 KM	1.080.000.000,00	Kab. Banyuwangi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kemudahan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi dan Perumahan, Ingkungan dan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.260.102.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.01.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Pemeliharaan Kawasan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan				1 DI	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kesukuan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Lapan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Penyehatan / lingkungan Masyarakat sekitar kawasan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	1.03.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-			-	17.158.865.312,00						-	10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.150.685.310,00			-	Mempercepat cakupan sistem dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan kesiapan dukungan terhadap pembangunan daerah; Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Bandara, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara keseimbangan	-	-	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0006	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				16 Unit Desa	63.910.721.612,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UNJUK-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kelancaran sistem dan prosedur umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, jembatan, Air Bersih, Gedung, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan	-		11.500.000.000,00	DINAS PERKIMLIKAN UMUM
	1.02.93.2.01.6029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				21 km/Desa	1.845.780.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kehandalan sarana dan prasarana air minum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Bandara, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0008	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	948.780.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempermudah kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya.	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	2.225.786.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM		Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan dan pendukung terhadap pembangunan seperti Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara keseorangannya	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0030	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani dan pelanggan Dalam Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				168 SR	1.400.798.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh keuntungan berbisnis dan pelayanan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemberian layanan dukungan terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya.	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	1.03.00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	3.902.600.200,00						-	4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengamanan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.662.800.286,00			-	Meningkatkan kesukaran rahmat dan prasarana umum secara kualitatif dan kompetitif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Dalam Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0009	Penyelenggaraan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				120 Rumah Tangga	3.662.605.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi masyarakat rentan sehingga mereka	-		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-			-	9.059.230.815,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	8.846.530.519,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara (+)signifikan dan komprehensif dalam rangka peningkatan upaya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perkerasan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0031	Pembangunan, Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	8.787.947.665,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mengenai sejak kecamatan sarana dan prasarana umum secara negatif dan kompetitif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0037	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Pencatat Tahria Pembangkitan Bangunan Gedung (PTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Pendik dan Pembatalan Bangunan Gedung melalui SIMBG				33 Dokumen	186.582.950,00	Kab. Garung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAU-DAK ALOKASI UMUM	-	Mempercepat pelayanan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kebutuhannya.	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
II.	1.03.00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	800.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Pemeriksa Teknis (TPT), Perolehan, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				20 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan darurat bencana	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.	1.03.03	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			-	830.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.09.2.01	Penyelenggaraan Pemdaan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	800.000.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pengentasan wilayah dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Pemdaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas: Bonua Kecamatan, Bonua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesukupan sarana dan prasarana umum secara magistral dan kompre hensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-			-	99.867.339.936,00						-	131.100.000.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	88.867.029.000,00			-	Meningkatkan konektivitas sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah; Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan dan Masyarakat sesuai kewenangannya		-	121.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0001	Penggantian Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dijaga				1 Jembatan	13.554.147.584,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Mengamanatkan penyelenggaraan jalan dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemerintahan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi masyarakat sesuai kewenangannya			15.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.3.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ACHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Ditangani				12 KM	11.814.084.304,00	Kab. Garung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER, UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kepuasan semua dan prasarana umum secara maksimal dan lompat terkait dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Rekonstruksi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	45.136.951.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA DI BIDANG PEKERJAAN UMUM, DBH SAWIT	-	Mengamanatkan terwujudnya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		45.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,8 KM	3.900.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Benua Kec. Kabupaten, Benua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat terciptanya lingkungan kerja dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.3030	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN KINJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET KINJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	1.803.084.201,00	Kab. Gowang Raja, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempermudah kelancaran sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		1.626.300.090,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	14.000.016.762,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kelancaran arus dan prasarana umum secara inegratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan perawatan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tekanangannya	-		28.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	8.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas: Semua Kecamatan, Semua Ibu Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesulitan secara dan prasarana umum secara integrative dan tempo hanif dalam rangka peningkatan Bayi dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur : Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Dibuntuk/ Kondisinya				732.940 KM	930.080.000,00	Kab. Bunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mempercepat kemudahan konektivitas dan pergerakan orang secara fisik/logistik dan kompetitif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) kegi tasejahteraan Masyarakat sosial kemanganinya			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.15.2.01.0048	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1.502.082.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kelancaran dan pelayanan umum secara negatif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan dan Masyarakat secara keseimbangannya	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	1.02.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.02.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	246.821.021,00			-	Memperoleh kelancaran dan pelayanan umum secara negatif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01.0018	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				23 Orang	246.621.331,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan dan pengembangan SDM dengan pelatihan	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	208.099.477,00			-		-	-	280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0013	Penyelesaian Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disebarkan				2 Dokumen	210.791.146,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kelulusan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi masyarakat secara berkeadilan Masyarakat secara berkeadilan			215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.00.11.2.00.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SPJAK														
			Jumlah Pengelola SPJAK yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	22.219.536,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh kelulusan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan			20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.00.11.2.00.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		RERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diperlakukan				1 Layanan Informasi	36.175.821,30	Kab. Gorontg Mos, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat pembukaan lahan dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Dinas Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi masyarakat Masyarakat sekitar lokasi sasarannya	-		40.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	85.052.322,06			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan penyediaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Dikawal dan Diawasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperlancar kelancaran serta ketertiban pelayanan umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, penerangan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan; bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya.	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
0.	1.01.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-			-	600.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RATR) Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	Memperoleh kelancaran semua dan prasarana umum kegiatan negatif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi keselamatan dan Keberlanjutan dari kegiatan emergency	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Penetapan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi masyarakat Masyarakat secara keseluruhan	-		0,00	SINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sistem basis pelajaran dan penyiaran perundang-undangan bidang perikanan tuang				1 Laporan	89.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Memparoses sistuhogen sarana dan prasarana secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur, Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan; bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten Kuta				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengenai sejak kecukupan sarana dan prasarana umum secara negatif dan kompetitif dalam rangka pemajakan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jambatan, Air Bersih, bantaan, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.12.2.01.0012	Evaluasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.18.0.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	53.000.000,00			-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pelaksanaan upaya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara berorganisasi	-	-	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.02.18.0.02.0000	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang meningkatkan pendidikan dan pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesejahteraan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah, Pembangunan dan pemerataan infrastruktur, Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.000.000,00			-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan kompherensif dalam rangka peningkatan efek dukung terhadap pembangunan daerah. Pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Penyediaan Fasilitas Utilitas, Jembatan, Air Bersih, Kawilasi, dan Perumahan) meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	825.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kec. Gunung Mas, Kemoe Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER/ UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pemenuhan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Pesut dll) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata cruangannya	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.1.03.03.0004	Pelaksanaan Penetapan Kawasan Kegiatan Pemanfaatan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan Penerbitan AKPW sesuai dengan Ketentuan waktu yang berlaku				2 Layanan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur / Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kemampuan	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04	URUSAN PERERITAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.020.805.229,00							17.810.000.000,00	
1	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	801.706.270,00						-	810.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	67.336.859,00			-	Mempercepat terciptanya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka pelaksanaan dana dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-	-	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.01.0005	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Desi Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	57.338.856,00	Kab. Bulung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempersiapkan kesiapsiagaan dan prasarana umum secara integratif dan terpadu dalam rangka pengurangan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		69.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	744.347.610,00			-	Memperoleh kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan konsisten dalam rangka pemenuhan saya dukung terlaksana pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jaringan, Air Bersih, bantuan, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kemampuannya	-	-	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				31 Unit Rumah	744.247.414,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kerukunan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-			-	750.851.814,00						-	800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	755.601.614,00			-	Mempercepat kesebupaten/kota dan provinsi untuk secara integratif dan kompre hensif dalam rangka peningkatan saya dukung sehingga p embangunan daerah Pembangu nan dan pemerataan infrastruktu r Pelayanan Publik Utilitas, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perum ahan bagi kesejahtera an Masyarakat sesuai kew enangannya	-	-	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				31 Unit Rumah	705.681.814,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak secara inklusif dan komoditas tahan dalam rangka pemulihan ekonomi mendukung pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jamkesda, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi masyarakat sesuai kewenangannya	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	1.04.00	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			-	15.471.030.346,00						-	16.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01	Unsur Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-			-	15.471.820.345,00			-	Mengenoskan kesukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung berkelanjutan pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat secara berkelanjutan	-	-	16.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0001	Penyelenggaraan Pengelolaan PSU Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN BAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelesaian PSU Perumahan				1 Dokumen	110.013.473,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kewenangannya	-		150.000.000,00	DINAS PERKIMAN UMUM
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				11 Lokasi	11.140.303.210,00	Kab. Gorontalo, Mas, Bemua Kecamatan, Bemua Kel/Dese	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Memperoleh ketercukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan berperan terkait dalam angka pengeluaran bisa dukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Listrik, jambatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai tata tanganny a	-		10.908.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.01.2003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	39.512.410,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER, UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempromosikan kesuksesan sinergi dan prasarana umum secara integratif dan berperan netral dalam rangka perfasilitasi dapat didukung terhadap pembangunan daerah Pembangunan dan pemerataan Infrastruktur / Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai key anangannya	-		50.830.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.06.0.01.0006	Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi pada Pelumasan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	3.573.861.252,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat mencukupi sarana dan prasarana umum secara integratif dan konsisten dalam rangka pemeliharaan daya dukung lingkungan p embangunan daerah Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Pelayanan Publik Jalan, Jembatan, ku Bencik, Sanitasi, dan Pecuni dhitri bagi kesejahteraan Masyarakat sesuai kew enangannya	-		4.008.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	JUMLAH							197.986.370.000,00							186.784.333.333,00	

BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Failing to plan is planning to fail: kegagalan kita dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah **Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman** sama dengan merencanakan kegagalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.

Renja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perencaaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk optimalitas dan memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.

Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dapat dicapai.

Perencanaan tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Karena itu, prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana akan memudahkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas untuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving (memperbaiki) kinerja.

Saat penjabaran Renja Perangkat Daerah ini ke dalam RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA

yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan capaian programnya.

Selain itu, perencanaan teknis pelaksanaan tiap – tiap kegiatan juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik dilingkungan pemerintahan maupun diluar pemeritahan.

Pelajaran yang kita dapatkan dari pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih mengarahkan kita pada optimalitas pencapaian target tahunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupatn Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.

RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berlaku sejak ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaannya tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggaran pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggaraan pemerintah lainnya dan masyarakat secara umum sehingga mampu memberikan hasil pembangunan disektor Infrastruktur yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

RANCANGAN
RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DINAS PERTANIAN

Jl. D.I. Panjaitan No. 13, Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah

Fax (0537) 3032781, email : ditanbungumas@yahoo.com

PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS

RANCANGAN KERJA (RENJA)

DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencanan Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat disusun.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, merupakan Dokumen Perencanaan untuk 1 tahun mendatang. Disusun mengacu pada RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada sektor Pertanian dalam kerangka penguatan ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memuat agenda program dan kegiatan, yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Dimana arah kebijakan yang dilaksanakan mengacu dan bertujuan untuk menuntaskan isu-isu strategis pada sektor pertanian dengan memprioritaskan sinergisitas agenda program kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Kuala Kurun, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Gunung Mas,

ARYANTONI,S.St.Pi, M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 19821204 200502 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……..... (i)

DAFTAR ISI ……..... (ii)

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 13

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenan …..... 13

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……..……..... 15

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 18

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional……..... 18

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 19

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 21

BAB V PENUTUP..... 22

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Rancangan Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas adalah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pertanian dalam kerangka penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Gunung Mas sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Rencana Kerja Dinas lingkup Pertanian tingkat Pemerintah Daerah dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dan Rencana Kerja Kementrian Pertanian Tahun 2025.

Penyusunan Rencana kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodir pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam RKPD, serta dengan menjaga kesinambungan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas periode 2025.

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Gunung Mas serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas 2025 - 2026. Sebagaimana dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian berdasarkan visi dan misi yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2030) serta Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, maka disusunlah Program dan Kegiatan dimana Program dan Kegiatan adalah instrument untuk merepresentasikan tujuan dan sasaran yang telah dibuat.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di

dalam proses perencanaan pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan telah melalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti tahapan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional serta Forum Gabungan Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalimantan Tengah guna merumuskan perencanaan Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerath Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2020 (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor Tahu tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun Nomor Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung MasTahun 2009 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dibidang pertanian yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas. Penyusunan RENJA juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas untuk secara konsekuen dan konsisten didalam penyusunan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, posisi dan peran yang diemban. Serta dimaksudkan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja SOPD yang sesuai target prestasi kerja yang akan dicapai.

Penyusunan Rancangan RENJA ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas untuk periode 1 (satu) tahun Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dalam mendukung suksesnya pencapaian target indikator serta sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Tujuan lainnya yaitu peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas SOPD kepada Pemerintah Daerah juga masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Rancangan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
4. yang direncanakan;
5. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing**.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut:

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM,
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

g.dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP,

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannyamaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun Berkenan

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Kabupaten Gunung Mas ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pertanian serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Adapun penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki; dan
c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025; dan b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas menurut rencana kerja organisasi perangkat daerah (renja opd) Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 42.094.666.131,-** dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 7 program dan 17 kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran tahun 2024 yang diterima Dinas Pertanian menurut DPPA 2024 adalah sebesar **Rp. 42.094.666.131,-** dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 7 program dan 17 kegiatan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA pada tahun 2024 terdapat 7 program dan 17 kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2024 terealisasi pada masing-masing kegiatan masih berjalan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya / rendahnya target adalah karena:

1. Proses mekanisme pencairan anggaran kegiatan OPD di Badan Pengelola Keuangan yang cukup memakan waktu;
2. Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannya.
3. Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
4. Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan untuk urutan skala prioritas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya;
2. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah;
3. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
4. Para perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan, dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

5. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan okumen perencanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Gunung Mas.

Kebijakan yang harus dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Gunung Mas antara lain :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan target yang ingin dicapai;
2. Perlu adanya koordinasi secara rutin terhadap para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan,

3. Kerjasama dengan pihak stakehoders lintas SOPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir.

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas No./Kpts/DPKP/X/2019 Tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS (RENSTRA Tahun 2025), terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan keberhasilan sasaran strategis Dinas Pertanian, antara lain yaitu :

1. Jumlah produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Jumlah produksi Tanaman Perkebunan.
3. Jumlah produksi Daging Ternak Potong.

Capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas terhadap tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Tahun 2025 tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET 2025	TARGET 2026	SUMBER DATA
1	**PopulasiTernak (Ekor/Tahun)**			
a	Sapi	4.400	4.500	Dinas Pertanian
b	Kerbau	215	220	Dinas Pertanian
c	Kambing	550	570	Dinas Pertanian
d	Babi	15.500	15.700	Dinas Pertanian
e	Ayam Buras	88.600	88.700	Dinas Pertanian
f	AyamRasPedaging	109.900	110.000	Dinas Pertanian
g	AyamRasPetelur	25.000	25.200	Dinas Pertanian
h	Itik	3.800	4.000	Dinas Pertanian
II	**ProduksiTernak (Ton/Tahun)**			
a	Sapi	111	112	Dinas Pertanian
b	Kerbau	6,10	6,15	Dinas Pertanian
c	Kambing	1,2	1,3	Dinas Pertanian
d	Babi	388	389	Dinas Pertanian
e	Ayam Buras	56	56,5	Dinas Pertanian
f	AyamRasPedaging	465	470	Dinas Pertanian
g	Itik	38,75	38,85	Dinas Pertanian
III	**ProduksiTelur (Ton/Tahun)**			
a	Ayam Buras	34,37	34,56	Dinas Pertanian
b	AyamRasPetelur	69,47	70,00	Dinas Pertanian
IV	**ProduksiTanamanPangandanHortikultura (Ton/Tahun)**			
1	**TanamanPangan**			
A	Padi	3752	3752	Dinas Pertanian
	- PadiSawah	1820	1820	Dinas Pertanian
	- PadiLadang	1932	1932	Dinas Pertanian
B	Jagung	1575	1575	Dinas Pertanian
C	UbiKayu	1680	1680	Dinas Pertanian
2	**TanamanHortikultura**			
A	CabeRawit	42,35	42,35	Dinas Pertanian
B	KacangPanjang	74,69	74,69	Dinas Pertanian
C	Durian	93,17	93,17	Dinas Pertanian
D	Pisang	8,4	8,4	Dinas Pertanian
E	Rambutan	224	224	Dinas Pertanian
F	Nanas	35	35	Dinas Pertanian
V	**ProduktivitasTanamanPangandanHortikultura (Kwintal/Ha)**			
1	**TanamanPangan**			
A	Padi	-	-	
	- PadiSawah	40	40	Dinas Pertanian
	- PadiLadang	30	30	Dinas Pertanian
B	Jagung	50	50	Dinas Pertanian

C	UbiKayu	40	40	Dinas Pertanian
2	**TanamanHortikultura**			
A	CabeRawit	11	11	Dinas Pertanian
B	KacangPanjang	11	11	Dinas Pertanian
C	Durian	11	11	Dinas Pertanian
D	Pisang	6	6	Dinas Pertanian
E	Rambutan	80	80	Dinas Pertanian
F	Nanas	10	10	Dinas Pertanian
VI	**LuasPengembanganTanamanpangandanHortikultura (Ha/Tahun)**			
1	**Tanaman Pangan**			
A	Padi	1570	1570	Dinas Pertanian
	- PadiSawah	650	650	Dinas Pertanian
	- PadiLadang	920	920	Dinas Pertanian
B	Jagung	450	450	Dinas Pertanian
C	UbiKayu	600	600	Dinas Pertanian
2	**Hortikultura**			
A	CabeRawit	55	55	Dinas Pertanian
B	KacangPanjang	97	97	Dinas Pertanian
C	Durian	121	121	Dinas Pertanian
D	Pisang	20	20	Dinas Pertanian
E	Rambutan	40	40	Dinas Pertanian
F	Nanas	50	50	Dinas Pertanian
VIII	**Pengembangan/Perluasan area perkebunan (Ha/Tahun)**			
A	Karet	64.852	65,176	Dinas Pertanian
B	KelapaSawit	4.038	4239	Dinas Pertanian
IX	**ProduksiKomoditi Perkebunan (Ton/Tahun)**			
A	Karet	20.271	20.273	Dinas Pertanian
B	KelapaSawit	3.687	3.695	Dinas Pertanian
X	**ProduktivitasKomoditi Perkebunan (Ton/Ha)**			
A	Karet	0,49	0,50	Dinas Pertanian
B	KelapaSawit	1,52	1,55	Dinas Pertanian

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan perencanaan SKPD di Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan Nasional maupun Propinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Propinsi.Pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas tidak terlepas dari keterpaduan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersinergi dan bersatu padu dalam rangka pelaksanaannya. Setiap komponen masyarakat dan stake holder diharapkan terlibat dan dilibatkan, menjadi kekuatan yang saling mengisi dan mendukung. Secara garis besar kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam bentuk RPJMD, menjadi garis besar kebijakan untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pelaku usaha agribisnis serta masyarakat. Sinergistas Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas menjadi sharing dana dalam pembangunan Pertaniandi Kalimantan Tengah. Keterpaduan serta keserasian Rencana Strategis yang dilaksanakan secara bersama-sama pada suatu prioritas program dan kegiatan dapat mempercepat pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat, yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Pembangunan Pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Arah kebijakan Nasional di bidang pertanian antara lain adalah *(sumber : Biro Perencanaan Kementrian Pertanian RI)* :

a. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan(padi, jagung, kedelai) yang berdampak bagi perekonomian.
b. Kebijakan pengembangankomoditas kedelai serta komoditas penyedia bahanbakubio-energi.

c. Kebijakan peningkatan produksi tanaman pertanian melalui bantuan alsintan dan pembangunan saluran irigasi tersier serta embung.
d. Kebijakan pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana) dan agro-industri di perdesaan, sebagai dasar / landasan pengembangan bio-industri berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 6 (Enam) arah kebijakan dan 5 (Lima) sasaran strategis. Adapun 5 (Lima) arah kebijakan Kementrian Pertanian RI (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terjaganya Ketahanan Pangan Nasional;
2. Menjaga Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
5. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Pelayanan Prima.

Adapun 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petanian Nasional;
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran Peruabahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hubungan Misi dan Kebijakan Kabupaten Gunung Mas dengan Program Dinas Pertanian

No.	Misi Kabupaten Gunung Mas	Tujuan Pembangunan	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1	Misi ke – 3 Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi pertanian 2. Meningkatnya produksi perkebunan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penanggulangan Bencana Pertanian 4. Program Perizinan Usaha Pertanian
				3. Meningkatnya produksi peternakan	1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 2. Program Penyuluhan Pertanian

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (https://sipd-gumas.simda.net/) dapat dilihat dalam Lampiran I.

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berakhir pada Tahun 2024 supaya menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2026 sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2025 -2026.

Pada Tahun 2025 Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas telah merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan **sebanyak 7 program dan 17 kegiatan.** Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kabupaten Gunung Mas.

Keberhasilan pembangunan sektor Pertanian di Kabupaten Gunung Mas sangat ditentukan oleh sinergitas berbagai pihak, baik pemerintah sebagai perencana dan pelaksana, pihak swasta sebagai mitra, dan partisipasi masyarakat secara luas. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan jajaran pelaksana pada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian target-target kinerja dalam RENSTRA 2020-2024.

Kuala Kurun, 24 Juli 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Gunung Mas,

ARYANTONI,S.St.Pi, M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 19821204 200502 1 001

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERTANIAN KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERTANIAN						**42.094.666.131,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**42.094.666.131,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**42.094.666.131,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**13.171.457.703,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	150.728.537,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen Dokumen	62.702.037,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 dokumen Dokumen	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 dokumen Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	80.026.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	10.811.625.958,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	10.785.256.858,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	26.369.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	36.144.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	36.144.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	122.494.560,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	101.430.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	21.064.560,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	472.007.683,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.311.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.793.383,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.497.400,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.968.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.447.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	298.990.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	205.187.000,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	135.753.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	69.434.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	446.116.765,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	107.280.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	333.836.765,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	927.153.200,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	295.456.300,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	31.696.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**15.910.426.466,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	2.725.837.495,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	2.305.837.495,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	420.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	13.184.588.971,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	999.998.072,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10000 Ekor	12.184.590.899,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**9.553.444.440,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	416.700.580,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	416.700.580,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	9.136.743.860,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	1.272.013.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	7.798.825.260,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	65.905.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**716.110.901,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	616.110.921,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis				1 Orang	317.110.121,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	299.000.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	99.999.980,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				1 Orang	62.038.960,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				1 Unit Usaha	37.961.020,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**194.793.682,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	194.793.682,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	125.703.432,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	69.090.250,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.173.658.460,00**						**-**	**0,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.173.658.460,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1.087.137.660,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	86.520.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindusti dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**1.374.774.479,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	1.374.774.479,00			-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-	-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	445.428.930,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	516.840.449,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	162.505.100,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan, Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata)	-		0,00	DINAS PERTANIAN
	J U M L A H							**42.094.666.131,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA

(RENJA)

2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas telah tersusun. Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan suatu pedoman dalam menentukan sasaran, program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas memiliki fungsi yang fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil yang akan dilaksanakan pada satu tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Anggaran Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih konkrit.

Rencana yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Akhirnya kami berharap bahwa dengan adanya Rencana Kerja ini akan dijadikan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Kuala Kurun, Juli 2024
Kepala Dinas,

BARTHEL, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670509 199302 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pengertian Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan 22 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas menyusun Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah untuk tahun 2025.

Rencana Kerja ini disusun dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi dan mempertimbangkan sinergis antar sektor antar wilayah serta memperhatikan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja pada Tahun 2025 yang diajukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, untuk memenuhi kebutuhan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Pengajuan Program Pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang terlaksana secara konsisten untuk mencapai Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Derah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disusun sebagai acuan bagi seluruh struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menjadi pedoman dan informasi bagi pengambil keputusan dalam merencanakan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah menyiapkan perencanaan kinerja tahunan yang operasionil :

a. Sebagai pedoman penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025.
b. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di Tahun 2025 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan Administarasi Kependudukan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
c. Tersedianya program dan kegiatan-kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam satu tahun;

d. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah Sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program pembangunan daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan urusan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dan perkiraan capaiannya di tahun 2025 serta capaian Renstra tahun 2025 -2026.

Tabel yang akan digunakan menjelaskan kedua hal tersebut adalah Tabel 2.1 yang memuat rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sampai dengan 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2025

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Sasaran	Target Capaian Kinerja	
		Jumlah 2024	2024	2025
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
1.	Kepemilikan KTP elektronik dari jumlah penduduk Wajib KTP	89.564 jiwa	99,4 %	99,5 %
2.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari Anak Usia 0 – kurang dari 17 tahun	42.434 anak	60 %	70 %
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Anak Usia 0 – 18 tahun	44.415 anak	99 %	99,10 %
4.	Kepemilikan Akta Kematian	100 %	100 %	100 %
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	45.112 Akta	30 %	35 %
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	1.340 Akta	20 %	20 %
7.	1) Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga
	2) Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	15 OPD	15 OPD	18 OPD
8.	Inovasi “Pelayanan yang Membahagiakan” dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi
9.	Ketersediaan laporan data kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai instansi teknis dituntut untuk mampu berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagi upaya meningkatkan kemajuan perekonomian di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas mempunyai program kerja strategis sebagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dan diwujudkan dalam berbagai program maupun kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas didukung ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SOPD, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dengan perkembangan kedepan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilki, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kendala dalam mewujudkan pembangunan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian Realisasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Tahun 2025 – 2026 dan Indiktor Kinerja Utama pada ***Tabel 2.2*** sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2

Pencapaian Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas (Realisasi DKB Semester I Tahun 2024)

NO.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja	
		Jumlah 2024	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepemilikan KTP elektronik dari jumlah penduduk Wajib KTP	89.564 jiwa	95,38 %	-
2.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dari Anak Usia 0 – kurang dari 17 tahun	42.434 anak	95,38 %	-
3.	Kepemilikan Akta Kelahiran dari Anak Usia 0 – 18 tahun	44.415 anak	63,29 %	-
4.	Kepemilikan Akta Kematian	100 %	100 %	-
5.	Kepemilikan Akta Perkawinan	45.112 Akta	25,58 %	-
6.	Kepemilikan Akta Perceraian	1.340 Akta	16,35 %	-
7.	1) Perjanjian Kerjasama dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	5 Lembaga	1	-
	2) Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data dengan SKPD dan Lintas Sektoral/Lembaga/Institusi terkait	15 OPD	9	-
8.	Inovasi “Pelayanan yang Membahagiakan” dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan	2 Inovasi	1 Inovasi	-
9.	Ketersediaan laporan data kependudukan skala Kabupaten	Tersedia	1 Inovasi	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Th 2006, PP 40 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus -menerus, antara lain melalui:
   a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
   b. Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll).
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, terkait prioritas program/kegiatan dan pagu

indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas. Telaahan rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan terdapat pada **Tabel 2.3** sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Gunung Mas

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						6.720.782.151,00							6.706.026.151,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANA N DASAR						6.720.782.151,00							6.706.026.151,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENC ATATAN SIPIL						6.720.782.151,00							6.706.026.151,00	
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	5.372.837.151,00						-	5.355.081.151,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.040.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	22.040.000,00	
	2	12	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	3.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	3.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	4.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.835.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	4.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.610.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kine rja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	4.995.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.995.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.934.838.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.934.838.000,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.924.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.924.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	4.971.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.971.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste ran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emest eran SKPD				20 Laporan	5.867.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.867.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	125.085.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	125.085.000,00	
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	45.288.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.288.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	79.797.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		79.797.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.144.294.151,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.139.911.151,00	
	2	12	01	2.06	0011	Penyediaan Komponen Instalasi														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.706.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		11.706.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	132.981.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		132.981.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.472.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.472.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	37.165.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.165.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.452.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material														
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	119.003.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		119.003.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.414.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.414.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165 Laporan	787.040.151,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		782.657.151,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	7.061.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.061.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	46.620.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	46.620.000,00	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	46.620.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	723.695.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	723.695.000,00	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	83.264.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		83.264.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Laporan	352.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		352.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	282.231.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		282.231.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	365.540.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	352.167.000,00	
	2	12	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pero rangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	108.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		94.727.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenda raan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	37.892.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.892.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	24.548.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		24.548.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	10.725.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	10.725.000,00	
	2	12	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	10.725.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-			-	615.945.000,00						-	615.945.000,00	

	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	231.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	231.000.000,00	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				750 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0003	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Pend uduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				750 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				150 Orang	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	99.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	81.945.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	81.945.000,00	
	2	12	02	2.02.2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														

							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				25.300 Dokumen	81.945.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		81.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	303.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	303.000.000,00	
	2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				25 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				3 Laporan	58.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		58.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Pend uduk														

							Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				70 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masya rakat Terkait Pendaftaran Penduduk														

							Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				200 Orang	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabka n Terkait Pendaftaran Penduduk														
							Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				20 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-			-	345.000.000,00						-	345.000.000,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	120.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	120.000.000,00	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan														

							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	195.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	195.000.000,00	
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	02	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil														

							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				24 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03		2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	30.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	30.000.000,00	
	2	12	03		2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusa n Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencat atan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan B asis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil													
								Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			-	355.000.000,00						-	355.000.000,00	

	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan	-	110.000.000,00	
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatkan Kualitas Layanan, Interpretasi Masyarakat dan Kualitas SDM Profesional	-			90,3,3 %,Kali,Orang	245.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN	-	245.000.000,00	
	2	12	04	2.03	0 0 2	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Ind onesia Melalui Menteri														

							Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04		2.03	005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04		2.03	008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan													
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				25 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya Informasi Kependudukan berupa Buku Profil Kependudukan	-			35 Buku	32.000.000,00							-	35.000.000,00		
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terkelolanya dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Semester II	-			35 Buku	32.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Agregat Kepeduduk an Semester II	-	35.000.000,00		
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebu tuhan yang Lain																
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				35 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Agregat Kepeduduk an Semester II		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
											J U M L A H	**6.720.782.151 ,00**							**6.706.026.151 ,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Telaahan usulan program dan kegiatan yang melalui rapat internal Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan dari usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas melalui pada badian perencanaan dan keuangan yang berada di secretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Pada tahapan usulan Program/Kegiatan yang menjadi usulan yang disesuaikan dengan Anggaran belanja Daerah (Pagu Indikatif) yang didasari Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas serta Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025, dengan keterbatasan pada anggaran ada, serta mengingat atas kewajiban terhadap pelayanan public, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dapat mengajukan usulan terkait peralatan pendukungan kelancaran operasional kegiatan Dinas ke Provinsi melalui Bapperida Kabupaten Gunung Mas serta dapat mengusulkan ke Pusat untuk mendapatkan bantuan Hibah Peralatan pendukung sarana dan prasarana Adminduk.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan salah satu identifikasi faktor – faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir – butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025. Hasil telaahan kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah serta RKPD Kabupaten Gunung Mas yang dikaitkan dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah Administrasi Kependudukan se- Kabupaten Gunung Mas, yaitu Program Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matrik Hubungan Kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dan RKPD Kabupaten Gunung Mas dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas

Kebijakan Tahun 2025			Tupoksi Dinas Dukcapil Kabupaten Gunung Mas
Prioritas Nasional RPJPN 2005 - 2025	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 - 2026	RPD Kab. Gunung Mas 2025 - 2026	
-	-	-	1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten; 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan perencanaan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; e. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugasnya; f. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas merupakan unsur pelaksana teknis daerah Kabupaten Gunung Mas yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan visi, misi dan rencana program yang jelas serta strategis untuk dapat mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, Setiap organisasi harus selalu mempunyai pandangan ke depan agar dalam bekerja tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal.

Untuk menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam memberikan dukungan yang prima, rumusan visi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian visi menggambarkan sesuatu keadaan harapan di masa mendatang, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang kompleks dan aktual yang akan dihadapi.

Visi yang relevan dengan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam upaya mewujudkan bahwa ***"Setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas memiliki dokumen kependudukan"*.**

Adapun yang dimaksud dengan **"Setiap Penduduk Kabupaten Gunung Mas"** adalah semua penduduk yang statusnya sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas, terdata dalam data base kependudukan, memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang legal dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam admnistrasi kependudukan. Kemudian **"Memiliki Dokumen Kependudukan"** adalah bahwa setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas, dapat dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukannya, dan sudah masuk dalam data base kependudukannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya kepemilikan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas, memberikan kemudahan dalam segala urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai penduduk Kabupaten Gunung Mas, dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan identitas kependudukan sebagai penduduk warga negara.

Adapun upaya yang dilakukan dalam perwujudan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, yaitu melalui kinerja Aparatur Sipil Negara dan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dalam hal upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik;
3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
4. Peningkatan kerjasama dalam administrasi kependudukan dengan pihak terkait.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2026. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Tahun 2025

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Data Awal	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Masih rendahnya kepemilikan KTP elektronik dari jumlah yang wajib KTP	Masih ada 2 kecamatan yang belum ada alat rekam KTP-El, terkendala jaringan Internet	Terbatasnya ketersediaan Anggaran untuk alat dan peralatan perekaman	Untuk kepemilikan KTP elektronik berbasis 1 NIK	Penduduk yang berusia 17 tahun keatas, belum perekaman KTP elektronik	Jumlah alat perekaman dan ketersediaannya di masing-masing Kecamatan	95,19 % yang telah dilakukan perekaman KTP elektronik	Penambahan jumlah alat dan peralatan perekaman	Optimalisasi pelayanan, penambahan alat perekaman dan peremajaan alat perekaman
2.	Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0 – kurang dari 17 tahun	Alat Cetak KIA baru dapat dianggarkan pada Tahun 2025 untuk kecamatan melaui bantuan Provinsi utuk 9 Kecamatan	Tidak dianggarkannya dana untuk KIA	Kepemilikan KIA bagi setiap anak sebagai identitas diri	Setiap Anak usia 0 – kurang dari 17 tahun	Ketersediaan alat dan peralatan KIA	15.578 anak belum memiliki KIA (100% belum memiliki KIA) tersebar pada 12 kecamatan	Pengadaan alat dan pelayanan jemput bola	Optimalisasi pelayanan, dan personil yang melayani
3.	Masih rendahnya kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 tahun	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Akta kelahiran masih belum dapat menjangkau semua anak usia 0 – 18 tahun	Untuk kepemilikan Akta Kelahiran bagi setiap anak	Setiap Anak usia 0 – 18 tahun	Jumlah alat dan peralatan di masing-masing Kecamatan	98,85 % yang telah memiliki Akta Kelahiran	Percepatan dan arah layanan untuk target 20 %	Optimalisasi pelayanan, dan personil yang melayani tepat sasaran
4.	Masih rendahnya pengurusan kepemilikan Akta Kematian oleh keluarga yang bersangkutan	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Rendahnya kesadaran masyarakat menguruskan Akta Kematian	Akuratnya Data Base dan kepentingan dokumen dari yang bersangkutan	Keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhum	Sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta Kematian	Menyesuaikan dengan data dalam Kartu Keluarga dan untuk dilaporkan dan diterbitkan Akta kematiannya	Partisipasi aktif dari keluarga yang bersangkutan dan atau Perangkat Desa/Kelurahan untuk melaporkannya	Optimalisasi pelayanan dan peningkatan peranserta Operator Dukcapil Kecamatan
5.	Masih rendahnya kepemilikan Akta Perkawinan dari jumlah satus Kawin Tercatat	Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan	Rendahnya kesadaran masyarakat menguruskan Akta Perkawinan	Untuk kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap pasangan suami-isteri	Pasangan Suami-Isteri yang belum tercatat	Sosialisasi dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta Perkawinan	Menyesuaikan dengan data dalam Kartu Keluarga bahwa status perkawinan “BELUM TERCATAT”	Kerjasama dengan Tokoh Agama dan jemput bola	Optimalisasi pelayanan dan peningkatan peranserta Tokoh Agama dan Operator Dukcapil Kecamatan
6.	Masih rendahnya Perjanjian Kerjasama dan dalam hal Pemanfaatan Data dengan SKPD dan atau Sektor terkait	Masih rendahnya akan kebutuhan data dan pemanfaatan data kependudukan	Kebutuhan data kependudukan hanya pihak tertentu saja yang berkepentingan untuk itu	Adanya kesamaan data kependudukan se-Kabupaten Gunung Mas	Semua SKPD dan sektor terkait yang ada di Kabupaten Gunung Mas	Laporan admnistrasi kependudukan selalu ada dan tersedia	Semua SKPD yang ada, dan belum ada untuk Lintas sektoral terkait	Membuat Perjanjian Kerjasama dan Upaya lanjut kerjasama dimaksud	Adanya kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK tunggal
7.	Masih rendahnya	Inovasi ada banyak, terbentur sarana-	SDM dan sarana-prasarana sangat	Untuk mewujudkan	Setiap penduduk yang	Pengurusan dan penerbitan	Kartu Keluarga dan seluruh Akta	14 langkah “Dukcapil Go	Setiap dokumen kependudukan

	Inovasi yang membahagiakan dalam pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat	prasarana dan SDM yang ada	terbatas	pelayanan yang membahagiakan masyarakat	menguruskan kepemilikan dokumen kependudukan	dokumen kependudukan yang efektif dan efesien	sudah berTTE	Digital"	dan Surat Keterangan ber-TTE
8.	Belum tersedianya selalu data base kependudukan skala Kabupaten yang setiap waktu bila dibutuhkan	Hanya 3 ADB (Admnistrator Data Base) = 1 PNS dan 2 PPPK	Masih kurang tenaga fungsional ADB	Selalu tersedianya data kependudukan yang *up to date*	Adanya Output Kertas Laporan dan dapat dilaporkan	Laporan tepat waktu, dengan data benar adanya	Hanya data bulanan namun tidak semua mencakup data layanan administrasi kependudukan	Pendampingan ADB dan bimtek/diklat	Pengangkatan Fungsional ADB sesuai syarat kepegawaian yang berlaku

3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Adapun upaya yang dilakukan dalam perwujudan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, yaitu melalui kinerja Aparatur Sipil Negara dan manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dalam hal upaya yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan publik;
3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan;
4. Peningkatan kerjasama dalam administrasi kependudukan dengan pihak terkait.

Dalam upaya mewujudkan tersebut diatas, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas melakukan :

1. Melayani masyarakat secara langsung berupa pelayanan pencatatan sipil keliling/masal;
2. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang professional dan meningkatkan pemerataan masyarakat;
3. Menyediakan peralatan pendukung pelayanan kepada masyarakat;
4. Melakukan pengawasan secara rutin tentang identitas kependudukan;
5. Menyimpan dokumen administrasi kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan;
6. Melaksanakan analisa dampak perkembangan penduduk;

Rumusan program dan kegiatan prioritas, yaitu Program Pembangunan Daerah sesuai dengan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Capil, Tahun 20253.

Program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Dasar pertimbangan penetapan program dan kegiatan prioritas ini adalah :

1. Untuk kepemilikan KTP elektronik berbasis 1 NIK;
2. Kepemilikan KIA bagi setiap anak sebagai identitas diri;
3. Untuk kepemilikan Akta Kelahiran bagi setiap anak;
4. Akuratnya Data Base dan kepentingan dokumen dari yang bersangkutan;
5. Untuk kepemilikan Akta Perkawinan bagi setiap pasangan suami-isteri;
6. Adanya kesamaan data kependudukan se-Kabupaten Gunung Mas;
7. Untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
8. Selalu tersedianya data kependudukan yang *up to date;*

Adapun Sasaran yang ingin dicapai Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas adalah "***Setiap Penduduk Kabupaten Gunung Mas Memiliki Dokumen Kependudukan*".**

Sasaran sebagai berikut :

1. Penduduk yang berusia 17 tahun keatas, belum perekaman KTP elektronik;
2. Setiap Anak usia 0 – kurang dari 17 tahun;
3. Setiap Anak usia 0 – 18 tahun;
4. Keluarga yang ditinggalkan oleh Almarhum;
5. Pasangan Suami-Isteri yang belum tercatat;
6. Semua SKPD dan sektor terkait yang ada di Kabupaten Gunung Mas;
7. Setiap penduduk yang menguruskan kepemilikan dokumen kependudukan;
8. Adanya Output Kertas Laporan dan dapat dilaporkan;

Dari sasaran tersebut di atas terdapat 20 Output Pelayanan Adminduk berupa :

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el
4. KIA
5. Suket Pindah
6. Suket Pindah Luar Negeri
7. Suket Tempat Tinggal

8. Suket Lahir Mati
9. Suket Pembatalan Perkawinan
10. Suket Pembatalan Perceraian
11. Suket Angkatan Anak
12. Suket Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
13. Suket Pengganti Tanda Indentitas
14. Suket Pencatatan Sipil
15. Akta Kelahiran
16. Akta Kematian
17. Akta Perkawinan
18. Akta Perceraian
19. Akta Pengakuan Anak
20. Akta Pengakuan Anak

Adapun program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2024 sebagai berikut :

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuanga Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Penyediaan Bahan/Material - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

	Penataan Organisasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Program Pendaftaran Penduduk	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk** - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk - Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Penataan Pendaftaran Penduduk - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
	Penyelengaraan Pendaftaran Penduduk - Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk - Penyelenggaraan Pemanfatan Data Penduduk terkait Pendaftaran Penduduk - Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk - Penyajian Data Kependudukan yang Akuran dan Dapat Dipertagungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
Program Pencatatan Sipil	**Pelayanan Pencatatan Sipil** - Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pencatan Sipil sesuai dengan kebutuhan - Pencatatan,Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil - Fasilits Terkait Pencatan Sipil - Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatan Sipil - Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatan Nikah , Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan** - Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan -Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Penerimaan dan Permintaan Data
	Penyelengaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari PErwakilan Republik Indonesia Melaui Menteri - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	**Penyusunan Profil Kependudukan** Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di bawah ini. Tabel ini berisi program pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas (program strategis daerah) dan program perangkat daerah untuk memujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026

. Jumlah seluruh program dan kegiatan serta total kebutuhan dana yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rancangan Akhir Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung M

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. GUNUNG MAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**6.720.782.151,00**							**6.706.026.151,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.720.782.151,00**							**6.706.026.151,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6.720.782.151,00**							**6.706.026.151,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.372.837.151,00**						**-**	**5.355.081.151,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	22.040.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	22.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				25 Dokumen	3.950.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				25 Dokumen	3.650.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependuduk an dan ketenagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		3.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	4.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.835.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	4.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.610.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	4.995.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.995.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.934.838.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	2.934.838.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.924.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		2.924.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	4.971.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		4.971.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	5.867.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.867.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	125.085.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	125.085.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	45.288.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.288.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	79.797.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		79.797.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.144.294.151,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	1.139.911.151,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	11.706.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		11.706.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	132.981.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		132.981.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.472.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		36.472.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	37.165.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.165.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.452.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	119.003.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		119.003.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.414.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		5.414.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				165 Laporan	787.040.151,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		782.657.151,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	7.061.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		7.061.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	46.620.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	46.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	46.620.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		46.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	723.695.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	723.695.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			5.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	83.264.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			83.264.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Laporan	352.800.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		352.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	282.231.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		282.231.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	365.540.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	352.167.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	108.100.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		94.727.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	37.892.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		37.892.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	24.548.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		24.548.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	195.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	10.725.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	10.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	10.725.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Tumbang Anjir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		10.725.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**615.945.000,00**						**-**	**615.945.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	231.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	231.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				750 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				750 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														

			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				150 Orang	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	99.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		99.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	81.945.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan	-	-	81.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

												ke arah digital				
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				25.300 Dokumen	81.945.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		81.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	303.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	303.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				25 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				3 Laporan	58.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan an daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		58.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk														

		URUSAN / BIDANG		**TARGET**	**REALISASI**	**PRAKIRAAN**	**CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**							**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026**		

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				70 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				200 Orang	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				20 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

												ke arah digital				
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**345.000.000,00**						**-**	**345.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	120.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudu kan dan ket enagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	195.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				5 Laporan	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				24 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	30.000.000,00			-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**355.000.000,00**						**-**	**355.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan	-	110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Data Kependudukan		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Meningkatkan Kualitas Layanan, Interpretasi Masyarakat dan Kualitas SDM Profesional*	-			90,3,3 %,Kali,Orang	245.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN	-	245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri														
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependuduk an dan ketenagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				25 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependuduk an dan ketenagakerja an, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	Masyarakat dan ASN		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Tersedianya Informasi Kependudukan berupa Buku Profil Kependudukan***	**-**			**35 Buku**	**32.000.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATI
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Terkelolanya dan Tersajinya Data Kependudukan Buku Profil Perkembangan Semester II*	-			35 Buku	32.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ket enagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	Data Agregat Kependudukan Semester II	-	35.000.0
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				35 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ket enagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah Peningkatan Tata Kelola pem erintahan ke arah digital	Data Agregat Kependudukan Semester II		35.000.0
		JUMLAH						**6.720.782.151,00**							**6.706.026.**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				25 Dokumen	5.628.400,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.128.400,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				25 Dokumen	5.521.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.021.600,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	7.642.800,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.842.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	-	-			-	2.464.682.373,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	2.469.692.373,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2.451.094.173,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		2.456.094.173,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				20 Laporan	5.995.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.005.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	7.592.600,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.592.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	91.738.000,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	96.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	91.738.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		96.238.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	-	-			-	680.983.410,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	709.103.290,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.904.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		11.904.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	240.175.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		240.175.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.766.590,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		41.966.590,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	44.116.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		44.116.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.452.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		7.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.498.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		1.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				114 Laporan	309.339.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,ket erbukaan kompeten si Kalangan p rofessiona l dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalis asi tata kelola pemerinta han daerah	-		359.339.700,00	DINAS KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	25.732.120,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,ket erbukaan kompeten si Kalangan p rofessiona l dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalis asi tata kelola pemerinta han daerah	-		2.600.000,00	DINAS KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	-	-			-	23.310.000,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	23.310.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		23.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	954.849.981,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	957.192.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	65.625.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		67.842.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Laporan	674.881.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	675.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	214.343.481,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		214.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	214.702.700,00			-	Optimalisasi tata kelola pemerintah an daerah	-	-	222.463.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	32.463.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintah an daerah	-		32.463.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	55.100.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	60.000.000,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	127.138.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**983.744.156,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	

	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	762.068.626,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,ket erbukaan kompeten si Kalangan p rofessiona l dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalis asi tata kelola pemerinta han daerah	-	-	770.000.000,00	DINAS KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				750 Dokumen	235.698.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,ket erbukaan kompeten si Kalangan p rofessiona l dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalis asi tata kelola pemerinta han daerah	-		240.000.000,00	DINAS KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				750 Dokumen	297.847.214,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-governm ent, Pening katan SDM aparatur bir okrasi,ket erbukaan kompeten si Kalangan p rofessiona l dan Pening katan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalis asi tata kelola pemerinta han daerah	-	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUK ANDAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				25 Laporan	228.523.112,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	221.675.530,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				25 Dokumen	221.675.530,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**			**-**	**581.563.280,00**						**-**	**585.563.280,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	581.563.280,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	585.563.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				25 Dokumen	581.563.280,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		585.563.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**			**-**	**177.835.746,00**						**-**	**178.000.000,00**	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	177.835.746,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan	-	-	178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

												daerah				
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				25 Dokumen	177.835.746,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		178.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X	**NON URUSAN**						**150.283.483,00**							**151.583.700,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**150.283.483,00**							**151.583.700,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**150.283.483,00**						**-**	**151.583.700,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi UmumPerangkat Daerah	-	-			-	85.383.700,00			-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah	-	-	85.583.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

												Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah				
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	85.383.700,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		85.583.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.400.000,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.400.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	59.499.783,00			-	Mengoptim alkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	X.XX.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENJ TAHUN 2025	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIK
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	59.499.783,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Optimalisasi tata kelola pemerintahan daerah	-		60.0
	JUMLAH							**6.351.450.529,00**							**6.424.2**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang merupakan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif sebelum dituangkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana yang telah dibuat. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sangat mengharapkan dukungan baik moril maupun materil dari Pemerintah Daerah demi terlaksananya Program dan Kegiatan untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Sangat disadari Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas ini belum mampu menampung seluruh program dan kegiatan serta aspirasi masyarakat, namun diharapkan dapat digunakan sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan program pembangunan untuk satu tahun kedepan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kuala Kurun, Juli 2024
Kepala Dinas,

BARTHEL, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670509 199302 1 002

RENCANA KERJA

DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR :
JL. BRIGJEND KATAMSO, KUALA KURUN
e-mail : perikanangumas@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 ini, disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan. Renja ini memuat gambaran tentang pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana 2025 dan penutup serta lampiran.

Dengan harapan Renja tahun 2025 ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan Sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, 23 Juli 2025

Kepala Dinas,

EIGH MANTO, S.Pi.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790910 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 6

2.4 Review Rancangan Awal RKPD 8

2.5 Telaah Usulan Masyarakat 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional 11

3.2. Tujuan dan Sasaran Parangkat Daerah 11

3.3. Program dan Kegiatan 12

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 17

BAB V PENUTUP 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 7

Tabel 2.2. Usulan Murenbang Kecamatan 2024 yang diakomodir dalam Renja 2025 ……..... 10

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan TA. 2025 …… 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan selama tahun 2025.

Penyusunan Renja mengacu kepada pencapaian target dan sasaran dalam berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, sehingga terjadi sinkronisasi program yang efektif dan efisien.

Renja ini disusun dalam rangka memanfaatkan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Gunung Mas pada umumnya dalam pemenuhan ketahanan pangan dan perikanan khususnya. Sehingga anggaran dalam Renja Tahun 2025 lebih diarahkan pada kegiatan yang menunjang Peningkatan Pemahaman masyarakat tentang konsep B2SA (Bermutu, Bergizi, Seimbang, Aman), Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Pertanian.

Dengan demikian prgram dan kegiatan dalam Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 akan ditunjang oleh semangat pada tema pembangunan tahun 2025 adalah "**Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"**.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah:

1. Landasan Idiil ; Pancasila
2. Landasan Konstitusional ; UUD 1945
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,

Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);

18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan pilihan bidang perikanan dan urusan wajib non dasar pangan yang lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas 2025 bertujuan untuk :

1. Mewujudkan penajaman penjabaran prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2025.
2. Tercapainya target pembangunan sektor pangan dan perikanan dengan menggunakan sumberdaya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V P E N U T U P

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2023 belanja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Gunung Mas mengelola urusan PANGAN dan PERIKANAN dilaksanakan melalui 6 program, 18 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2023 dengan pagu Belanja Rp9.132.587.460,0,00. Bila dilihat pencapaian target penyerapan anggaran per 31 Desember 2023 sebesar 96 % atau Rp8.783.756.979,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1 Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023.**

Berdasarkan Tabel tersebut capaian kinerja dan serapan anggaran masing-masing program. Dari 6 program, 18 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan bahwa program serapan semua di atas 90%, hanya pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang penyerapannya di bawah 90 % yang dapat dijelaskan sbb :

a. ***Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 89,8%***
   Sub Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 89,8%
b. ***Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85,7%***
   Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 44,2 %.
c. ***Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah***
   Sub Kegiatan :
   1) ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 73%***
   2) ***Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 61%***
   3) ***Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan 79%***
   4) ***Penyediaan Bahan/Material 89%***

Penyerapan anggaran di bawah 90% semua pada sub kegiatan penunjang kesekretariatan yang penggunaannya disesuaikan apabila terdapat banyak kelebihan anggaran merupakan upaya melakukan efisiensi. Sementara penyerapan anggaran dan kinerja ouput bidang teknis semua di atas 90%.

Tabel 2.1. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2023

NO	NO. REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	BOBOT	REALISASI			
					KEUANGAN		FISIK	
					RUPIAH	(%)	(%)	TTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.09	URUSAN WAJIB NON DASAR PANGAN	1.189.211.633,0	13,0	1.113.288.049	93,6		
	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.057.872.279,0	11,6	985.550.535	93,2	100,0	11,58
2	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	50.412.499,0	0,6	45.719.999,0	90,7	100,0	0,55
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50.412.499,0	0,6	45.719.999,0	90,7	100,0	0,55
3	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	751.555.100,0	8,2	692.874.700,0	92,2	100,0	8,23
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	751.555.100,0	8,2	692.874.700,0	92,2	100,0	8,23
4	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	255.904.680,0	2,8	246.955.836,0	96,5	100,0	2,80
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	255.904.680,0	2,8	246.955.836,0	96,5	100,0	2,80
	2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	131.339.354,0	1,4	127.737.514,0	97,3	100,0	1,4
5	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.339.354,0	1,4	127.737.514,0	97,3	100,0	1,44
	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	131.339.354,0	1,4	127.737.514,0	97,3	100,0	1,44
	3.25	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.070.337.432,0	52,1	4.861.079.618	95,9		
6	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.086.088,0	1,0	88.030.028,0	96,6	96,6	0,96
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah	42.508.824,0	0,5	41.480.764,0	97,6	100,0	0,47
	3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.577.264,0	0,5	46.549.264,0	95,8	100,0	0,53
7	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.598.994.887,0	39,4	3.467.573.170,0	96,3	100,0	39,41
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.527.422.669,0	38,6	3.398.515.642,0	96,3	100,0	38,62
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	71.572.218,0	0,8	69.057.528,0	96,5	100,0	0,78
8	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.348.760,0	0,0	2.109.300,0	89,8	89,8	0,02
	3.25.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.348.760,0	0,0	2.109.300,0	89,8	100,0	0,03
9	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.315.618,0	1,7	130.581.528,0	85,7	100,0	1,67
	3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	56.658.840,0	0,6	51.223.000,0	90,4	100,0	0,62
	3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72.527.928,0	0,8	69.138.528,0	95,3	100,0	0,79
	3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.128.850,0	0,3	10.220.000,0	44,2	100,0	0,25
10	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.341.645,0	7,0	605.876.850,0	94,6	100,0	7,01
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.890.540,0	0,2	10.135.000,0	73,0	100,0	0,15
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.998.455,0	1,4	121.196.450,0	95,4	100,0	1,39
	3.25.01.2.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.762.500,0	0,1	7.749.000,0	99,8	100,0	0,08
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	29.912.280,0	0,3	18.311.900,0	61,2	100,0	0,33
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	9.936.000,0	0,1	7.860.000,0	79,1	100,0	0,11
	3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	85.739.756,0	0,9	76.324.400,0	89,0	100,0	0,94
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.056.490,0	0,1	8.484.000,0	93,7	100,0	0,10
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.045.624,0	3,9	355.816.100,0	99,7	100,0	3,91
11	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.592.758,0	4,5	155.302.500,0	99,8	100,0	4,48
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain	155.592.758,0	1,7	155.302.500,0	99,8	100,0	1,70
12	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.413.594,0	2,7	241.025.112	96,6	100,0	2,73
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.260.000,0	0,0	4.260.000,0	100,0	100,0	0,05
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	46.925.500,0	0,5	43.490.616,0	92,7	100,0	0,51
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.228.094,0	2,2	193.274.496,0	97,5	100,0	2,17
13	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.244.082,0	2,0	170.581.130	94,6	100,0	1,97
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.076.407,0	1,4	124.366.425,0	97,1	100,0	1,40
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.967.675,0	0,3	21.360.000,0	89,1	100,0	0,26
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.200.000,0	0,3	24.854.705,0	88,1	100,0	0,31

	3.25.03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**372.801.622,0**	**4,1**	**359.521.592**	**96,4**		
14	3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota**	**131.551.692,0**	**1,4**	**128.838.592,0**	**97,9**	**100,0**	**1,44**
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	131.551.692,0	1,4	128.838.592,0	97,9	100,0	1,44
15	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten Kota**	**241.249.930,0**	**2,6**	**230.683.000,0**	**95,6**	**100,0**	**2,64**
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	241.249.930,0	2,6	230.683.000,0	95,6	100,0	2,64
	3.25.04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**2.314.049.118,0**	**25,3**	**2.275.359.842**	**98,3**		
16	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**330.008.856,0**	**3,6**	**325.438.856,0**	**98,6**	**100,0**	**3,61**
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pembangunan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	330.008.856,0	3,6	325.438.856,0	98,6	100,0	3,61
17	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.984.040.262,0**	**21,7**	**1.949.920.986,0**	**98,3**	**100,0**	**21,72**
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.185.464,0	0,9	75.015.864,0	93,6	100,0	0,88
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	385.558.221,0	4,2	381.415.924,0	98,9	100,0	4,22
	3.25.04.2.04.03	Penjamin Katersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	902.624.268,0	9,9	887.243.268,0	98,3	100,0	9,88
	3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	615.672.309,0	6,7	606.245.930,0	98,5	100,0	6,74
	3.25.06	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**186.187.655,0**	**2,0**	**174.507.878**	**93,7**		
18	3.25.06.2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hail Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**98.730.000,0**	**1,1**	**94.918.028,0**	**96,1**	**96,1**	**1,04**
	3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.730.000,0	1,1	94.918.028,0	96,1	100,0	1,08
19	3.25.06.2.03	**Penyediaan Data dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**87.457.655,0**	**1,0**	**79.589.850,0**	**91,0**	**100,0**	**0,96**
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	87.457.655,0	1,0	79.589.850,0	91,0	100,0	0,96
J U M L A H			**9.132.587.460,0**	**100,0**	**8.783.756.979**	**96,2**	**100,0**	**100,0**

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Pemerintah Kabupaten Gunung Mas disampaikan bahwa tahun 2023 kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih memberikan kontribusi teratas atau 31,69% dari 17 sektor PDRB Kabupaten Gunung Mas. Artinya peluang pengembangan perikanan masih sangat terbuka.

Dalam memberikan kontribusi pada tunjuan pembangunan nasional RKPD Kabupaten Gunung Mas menetapkan 4 tujuan dan 11 sasaran pembangunan, yakni:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan erdaya Saing.

   Sasaran :

   a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pendidikan;
   b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan.

2. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

   Sasaran :

   a. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat, keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator pendapatan per Kapita dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan.
   b. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Gini.
   c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

3. Peningkatan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan.
   Sasaran :
   a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda serta LPE Kategori Pariwisata.
   b. Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur.
   c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel.
   Sasaran :
   a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai LAKIP/SAKIP.
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks SPBE.
   c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran di atas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang mengampu urusan pangan serta urusan Kelautan dan Perikanan berada pada tujuan 1 dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui skor PPH konsumsi dan Angka Konsumsi Ikan. Tujuan 2 dengan sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat melalui peningkatan Indeks Ketahanan Pangan. Tujuan 3 dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui peningkatan kontribusi PDRB sektor perikanan.

2.5 TELAAH USULAN MASYARAKAT

Usulan ini disampaikan melalui proses musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Dalam proses pembahasan juga telah didiskusikan dengan para pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat, kepala desa/lurah, camat dan instansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan produksi perikanan usulan ini dapat diakomodir dalam Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Diharapkan usulan kelompok tersebut dapat menopang peningkatan produksi yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan mereka. Nantinya kelompok ini akan diberikan pelatihan dan bimbingan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Dalam Renja tahun 2025 mengakomodir usulan yang disampaikan masyarakat melalui Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan yang dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Usulan yang disampaikan berupa benih dan pakan awal, untuk jenis ikan dan jumlah pakan belum bisa ditentukan karena harus dilakukan identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL). Kelompok penerima juga harus berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Bahwa terdapat 10 lokasi Desa/Kelurahan yang mengusulkan bantuan Benih dan Pakan serta 1 Desa mengusulkan narasumber pelatihan pembudidaya ikan. Desa yang telah mengusulkan dapat dilihat pada tabel di berikut ini.

Tabel 2.2. Usulan dalam Murenbang Kecamatan 2024 yang ditampung dalam Renja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2025.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KETERANGAN
A.	**Benih dan Pakan**		
1	Kurun	Tumbang Hakau	Jenis ikan dan jumlah pakan akan ditentukan setelah dilakukan CP/CL
2		TumbangTambirah	
3		Tampang Tbg Anjir	
4	Sepang	Tewai Baru	
5	Rungan	Luwuk Langkuas	
6	Manuhing	Fajar Harapan	
7	Tewah	Tewah	
8		Sei Riang	
9	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	
10	Miri Manasa	Tumbang Napoi	
B	**Pelatihan**		
1	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Dinas Perikanan sebagai narasumber pelatihan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Dengan berakhirnya RPJMN Periode 2020-2024, maka sebagai panduan penyusunan didasarkan pada RKP Tahun 2025, dimana Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pangan berada pada Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan **ekonomi biru**.

Arah kebijakan **swasembada pangan**, melalui ...(10) meningkatkan kualitas pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan.

Arah kebijakan ekonomi biru melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru... melalui antara lain penyederhanaan perijinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan...(3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang moderen, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, an hilirisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 – 2026 menetapkan 4 tujuan dan

11 sasaran pembangunan. Atas dasar RPD disusun tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang terkait *bidang urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan dan kelautan* dan *urusan wajib non pelayanan dasar bidang pangan.* Maka Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan merumusan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran sbb :

1. **Tujuan Pertama : Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang konsep B2SA (Bermutu, Bergizi, Seimbang, Aman).**
   Sasaran :
   a. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi tahun 2025 = 90%
   b. Peningkatan Angka Konsumsi Ikan tahun 2025 = 36 kg/perkapita
2. **Tujuan Kedua : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**
   Sasaran : Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan tahun 2025 = 90%
3. **Tujuan Ketiga : Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Pertanian**
   Sasaran : Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap tahun 2025 = 1.427 ton

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan 8 Program, 20 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Dengan penjabaran sebegai berikut :

A. Urusan Kesekretariatan, terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan sbb :

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   1) Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah
   2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
   3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

5) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

7) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

12) Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan.

13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

14) Penyediaan Bahan/Material.

15) Fasilitasi Kunjungan Tamu.

16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

17) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

18) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

19) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

20) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik.

21) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
23) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Urusan Wajib Non Dasar : Pangan, terdiri dari 4 program, 6 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan, sbb :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
3) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota.
5) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan.

b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
6) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

8) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

10) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
11) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

C. Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 3 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan, sbb :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.
2) Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.

b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

4) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
5) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pembangunan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
6) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

7) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
9) Penjamin Katersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

10) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

11) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hail Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

12) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan Data dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

13) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 dengan pagu indikatif sebesar Rp8.339.222.494,00,00 terdiri dari :

1. Sekretariat terdiri 1 Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 8 Kegiatan, 24 Sub Kegiatan anggaran Rp5.700.222.494,00.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan terdiri 4 Program 6 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan anggaran Rp980.000.000,00
3. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dengan 3 Program, 6 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan anggaran Rp1.659.000.000,00.

Adapun rincian anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dijabarkan pada tabel 4.1 berikut in

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan TA. 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						**8.339.222.494,00**							**5.560.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.680.222.494,00**							**5.560.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**6.680.222.494,00**							**5.560.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah***	**-**			**A(>80) Peringkat**	**5.700.222.494,00**						**-**	**4.570.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan jenis dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah*	-			100 %	84.145.063,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	36.667.880,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	47.477.183,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan jenis laporan keuangan perangkat daerah*	-			100 %	4.181.468.671,00			-	-	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	-	4.160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				532 Orang/bulan	4.121.514.541,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Hurung Bunut	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		4.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	59.954.130,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.348.760,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				20 Laporan	2.348.760,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan jenis administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	210.000.000,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	513.000.000,00			-	-	-	-	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	30.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pemenuhan pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	226.260.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	4.260.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	52.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	170.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	183.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	23.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Jumlah Ketersediaan Pangan Utama***	**-**			**100 %**	**50.000.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				5 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita***	**-**			**100 %**	**725.000.000,00**						**-**	**755.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	125.000.000,00			-	-	-	-	55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				2 Laporan	55.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	-	-	-	500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				10 Laporan	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan***	**-**			**12 %**	**110.000.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	110.000.000,00			-	-	-	-	110.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase sampel aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)***	**-**			**90 %**	**95.000.000,00**						**-**	**75.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	95.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.659.000.000,00**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.659.000.000,00**							**0,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	**-**			**175 Ton**	**249.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	187.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				20 Dokumen	167.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				10 Unit	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	62.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				50 Orang	62.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Benih***	**-**			**1.350 Ton 150.000 Ekor**	**1.350.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase Pokdakan Berbadan Hukum*	-			3 %	90.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				2 Kelompok	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	1.260.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				5 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Jumlah produksi olahan hasil perikanan***	**-**			**35 Ton**	**60.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				20 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35 Ton	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	J U M L A H							**8.339.222.494,00**							**5.560.000.000,00**	

BAB IV
P E N U T U P

Renja tahun 2025 disusun melalui tahapan yang cukup panjang mulai dari Musrenbang Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di rencanakan. Dengan memperhatikan konsistensi Renja tahun 2025 dengan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-masing bidang tahun 2025 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Kuala Kurun, 23 Juli 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

IGI. MANTO, S.Pi.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790910 200501 1 009

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jln. Pangeran Diponegoro III, No.02, Telp./Fax. (0537) 3032763
KUALA KURUN

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang : a. Bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, perlu disusun Dokumen Rencana Kegiatan Tahun 2024 yang disusun dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 memuat pedoman kerja unit tahunan yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2006 - 2026.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.**

KESATU : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RENJA PERUBAHAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas ini.

KETIGA : Kedudukan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 di maksud Pasal 1 adalah merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : Juli 2024

Plt. Kepala Badan

KRISTENING NATALINA,S.Si.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19771226 200501 2 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Perubahan Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Renja Perubahan ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas ini semoga dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kuala Kurun, Juli 2024

Plt. KEPALA BADAN,

KRISTENING NATALINA,S.Si.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19771226 200501 2 010

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar……i
Daftar Isi.....ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Landasan Hukum.....2
1.3. Maksud dan Tujuan.....4
1.4. Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kab. Gunung Mas..... …….10
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Gunung Mas..... …….10
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... …….11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... …….11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KAB. GUNUNG MAS
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ..... …….13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas 13
3.3. Program dan Kegiatan ..... …….14

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN GUNUNG MAS
4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan ..... …….19

BAB V PENUTUP
Penutup ..... …….21

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan daerah dalam periode Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yaitu dokumen rencana kerja Perubahan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Gunung Mas disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 - 2024 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang

visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4335);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2006 - 2026.
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan,Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 - 2028;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
20. Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 050/211.A/BP3D/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional guna mendukung perencanaan tahunan Badan untuk memenuhi Peraturan Perundangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam Rencana Operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan Perencanaan Strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Badan;
c. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) perangkat daerah;
d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
e. Instrumen bagi badan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;

f. Instrumen bagi badan untuk mengukur capaian target kinerja program;

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beberapa pokok pembahasan yaitu :

BAB . I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan latar belakang penyusunan RENJA Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas, ringkasan Renja Perubahan, proses penyusunan Renja Perubahan serta keterkaitan antara Renja Perubahan dengan dokumen RKPD, Renstra, dan dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Menjabarkan landasan hukum penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas yang menjadi dasar dan Pedoman dalam proses penyusunan Renja Perubahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan di susunnya Renja Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan pokok – pokok materi yang di uraikan di dalam penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas.

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN BKPSDM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM.

Menguraikan hasil review Renja BKPSDM tahun lalu dan capaian Renja Perubahan terhadap Renstra BKPSDM.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan BKPSDM

Menguraikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM kab. Gunung Mas berdasarkan indikator yang telah ditentukan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.

Menguraikan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung tercapainya target capaian kinerja pelayanan BKPSDM.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BKPSDM

Menguraikan tentang perbandingan antara rancangan rencana awal dengan hasil analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan program dan kegiatan yang berasal dari usaulan masyarakat.

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan program kerja yang berkaitan dengan kebijakan nasional dan proiritas kebijakan pemerintah pusat.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PERUBAHAN BKPSDM

Menjabarkan tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang disusun pada Renja Perubahan BKPSDM.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB. IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BKPSDM

Menjelaskan sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan yang termuat pada Renja Perubahan BKPSDM.

BAB. V. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan seluruh uraian yang sudah di bahas dalam bab – bab sebelumnya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja. Mengingat tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas adalah melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut BKPSDM Gunung Mas selalu berkoordinasi dengan Seluruh Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada hasil capaian target keluaran dari program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Perubahan Tahun 2022 dan Renja 2023. Adapun dari hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi pokok - pokok yang harus diperhatikan yakni antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Dari semua program kegiatan yang terdapat didalam Renja Perubahan BKPSDM tahun 2024, memang terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah di tentukan, namun masih dapat di toleransi karena masih dalam kisaran 2% - 5%, artinya capaian kinerja masih berkisar 95% - 98%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah kegiatan yang indikatornya bersifat kuota, seperti jumlah peserta diklat PIM, perserta tugas belajar, dan peserta sosialisasi. Kegiatan – kegiatan ini sebelumnya telah

ditetapkan kuotanya sehingga pada pelaksanaannya akan tidak boleh melebihi atau kurang dari kuota yang telah di tetapkan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

   Meskipun tidak banyak, tetapi ada beberapa kegiatan yang capaian target kinerjanya melebihi dari target yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

   Dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan dan kegagalan selalu di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor yang sering menyebabkan kegagalan dari tercapainya target kinerja adalah aturan yang mengatur. Perubahan aturan dapat menyebabkan suatu kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Selain faktor penghambat ada faktor penunjang sehingga memungkinkan tercapainya target kinerja. Antara lain kerjasama tim, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan lain sebagainya.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra.

   Hasil dari capaian target Renja Perubahan tentunya akan berkaitan erat dengan capaian Renstra. Oleh sebab itu dalam proses pencapaian target Renstra, maka target Renja Perubahan tiap tahunnya harus tercapai sesuai target yang direncanakan. Dari hasil evaluasi terlihat bahwa capaian Renstra BKPSDM sudah mencapai 80%. Yang artinya 20% selanjutnya harus di capai pada akhir tahun 2023.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi target kinerja.

   Untuk memaksimalkan capaian kinerja Renja Perubahan, maka tentunya harus di awali dari proses perencanaan. Pada saat perencanaan, semua faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja harus menjadi perhatian, seperti kegiatan yang belum ada aturannya agar tidak dipaksakan untuk dimasukkan dalam program/kegiatan. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan juga harus direncanakan sebaik mungkin sehingga dapat menunjang pencapaian dari target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Gunung Mas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yakni melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian. Masing – masing pelayanan memiliki indikator capaian kinerja yang sudah ditetapkan sebagai tolak ukur dari keberhasilan suatu pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian. Dalam rangka mengukur capaian kinerja dari masing – indikator pelayanan tersebut maka perlu di lakukan analisis terhadap masing – masing indikator tersebut

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Gunung Mas.

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang *Good Goverment* maka perlu didukung dengan aparatur birokrasi yang kompeten dan berintegritas. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Instansi yang berperan dalam menciptakan aparatur yang kompeten memiliki tugas yang berat dilihat dari banyaknya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dimaksud. Oleh sebab itu sangat perlu adanya koordinasi dengan stakeholder dalam hal meminimalisir kendala dan permasalahan yang akan muncul. Sejauh ini, koordinasi yang di lakukan sudah cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam rangka mewujutkan aparatur yang kompeten, kendala dan permasalahan utama yang di hadapi adalah tidak tersedianya infrastruktur/sarana pendidikan dan latihan di daerah, sehingga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur selalu dilaksanakan di luar daerah. Hal ini tentu menjadi kerugian yang besar bagi daerah mengingat untuk mengirim peserta ke luar daerah memerlukan dana yang jauh lebih besar dibandingkan apabila pelaksanaanya di dalam daerah. Jika melihat keadaan keuangan daerah yang terbatas tentu pelaksanaan pendidikan dan latihan di luar daerah menjadi hal yang berat.

Akibatnya visi dan misi pemerintah daerah yakni mewujudkan pemerintahan yang *Good Goverment* menjadi tidak dapat dicapai dengan maksimal dan tergolong lamban. Hal ini tentu di sebabkan oleh program mewujutkan aparatur yang kompeten terkendala oleh permasalahan yang telah diuraikan sebelumya di atas.

Dibalik tantangan yang di hadapi oleh pemerintah daerah dalam misi mewujudkan pemerintahan yang Good Goverment, terdapat beberapa peluang yang dapat sedikit meringankan permasalahan yang di hadapi. Peluang yang dimaksud adalah telah terjalin dengan baiknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi luar terutama dalam hal pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur. Misalnya dengan beberapa lembaga pelaksanaan pendidikan dan latihan di provinsi bahkan di luar provinsi. Koordinasi yang baik ini memungkinkan pemerintah daerah selalu mendapat kuota dari lembaga diklat tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tersedianya sarana diklat di daerah merupakan kendala yang serius dalam hal peningkatan kompetensi aparatur menuju pemerintahan yang Good Goverment. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat mendukung dan mengharapkan adanya program dari pemerintah daerah untuk menyediakan sarana diklat di daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan sebuah Rencana Kerja Perubahan, tentu melalui beberapa proses seperti menyusun rancangan awal yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan yang matang. Tentu dalam proses dari rancangan menuju ke rencana kerja tentu terjadi beberapa perubahan-perubahan yang merupakan hasil dari pertimbangan, penyesuaian dan rasionalisasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukannya secara internal dengan melihat beberapa dasar penyusunan seperti RPJMD dan Renstra. Proses internal inilah yang menyebabkan hampir tidak adanya peran dari masyarakat dalam hal penyusunan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas, berbeda dengan instansi yang penyusunan program dan kegiatan melalui musrenbang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM KAB. GUNUNG MAS

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mencanangkan program percepatan reformasi birokrasi menuju aparatur yang kompeten, profesional, disiplin dan berbasis kinerja. Maka dari itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai leading sektor di daerah sebagai instansi yang membidangi kepegawaian harus bekerja keras dalam mendukung program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut. Untuk dapat melaksanakan program tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkomitmen dan menjadikan program pusat tersebut sebagai sasaran utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BKPSDM Kab. Gunung Mas

Seperti yang telah di uraikan pada pokok pembahasan di atas, dalam rangka mendukung percepatan reformasi birokrasi menuju aparatur yang kompeten, profesional, disiplin dan berbasis kinerja sesuai dengan program pemerintah pusat maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
2. Meningkatnya Kompetensi Aparatur
3. Meningkatnya Disiplin Aparatur

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun program dan kegiatan

yang nantinya diharapkan akan mampu mewujutkan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan tersebut.

3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan dan sasaran utama yang telah di tetapkan, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.02. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.03. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.04. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.05. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

2.08. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.04**.** Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

04. 02 Pengadaaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

04.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

04.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

04.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

05.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

05.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

05.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

05.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

05.07 Penyediaan Bahan/Material

05.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

06.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

07.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

07.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

07.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

08.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

08.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

08.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Kegiatan Penataan Organisasi

9.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

10. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

10.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

10.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

10.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

10.11 Pengelolaan Data Kepegawaian

11. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

11.01 Pengelolaan Mutasi ASN

11.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

11.03 Pengelolaan Promosi ASN

12. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

12.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

12.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

12.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

12.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

13. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

13.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

13.07 Pembinaan Disiplin ASN

13.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

III. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

14. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

14.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Dari uraian program dan kegiatan terdapat 15 (lima belas) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan dengan kebutuhan pagu sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu Indikatif
1.	Belanja Pegawai	3.894.709.624,00
2.	Belanja Barang Jasa	5.657.205.253,00
3.	Belanja Hibah	40.000.000,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya	-
Total Belanja Operasi		**9.591.914.877,00**

Penjabaran Program dan Kegiatan secara terperinci akan ditampilkan pada Lampiran Tabel Program kerja BKPSDM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN GUNUNG MAS

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Secara khusus maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas kegiatan apa yang harus dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan Tahun 2024.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kerangka dasar bagi RKPD Tahun Anggaran 2024.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentunya memerlukan pendanaan yang tidak sedikit mengingat tugas yang diembankan cukup berat terutama dalam hal meningkatkan kompetensi aparatur memerlukan dana yang tidak sedikit dalam pelaksanaannya.

Dalam hal pemenuhan dana untuk melaksanakan program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya menerima Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan capaian sasaran dari BKPSDM Kabupaten Gunung Mas, diharapkan adanya sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sumber-sumber dana lainnya.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan merupakan komitmen seluruh personil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas yang disusun berdasarkan Renstra yang mengacu pada RPJM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 - 2024 merupakan pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebupaten Gunung Mas dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 – 2024 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) perubahan tahun 2024.

Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen pendukung antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berwawasan kedepan;

Demikian Renja perubahan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama 1 (satu) tahun kedepan.



RENJA

DPMD

Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. AIS NASUTION KUALA KURUN
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan-Nyalah kami dapat menyelesaikan rencana renja Tahun 2025, yang merupakan suatu bagian dari perencanaan pembangunan Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan Kerja Sama Desa, Bidang Pemerintahan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan.

Informasi dan beberapa sudut pandang yang kami kemukakan dalam rencana kerja ini, kami sadari masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan lebih lanjut sangat kami harapkan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan rencana kerja ini dan kami mengharapkan semoga rencana kerja ini dapat berguna bagi kita semua dan benar-benar mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat, sekalipun tidak seluruhnya.

Kuala Kurun, 24 Juli 2024

Kepala Dinas,

YOLIUS, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681231 200312 1 001

DAFTAR ISI

Kata pengantar i

Daftar isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematik Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD dan Capaian Renstra DPMD 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi DPMD 19

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 20

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 21

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 21

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21

3.3 Program dan Kegiatan 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD 39

BAB V PENUTUP 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas menjabarkan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Tambahan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SistemInformasi Pemerintahan Daerha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Gunung Mas Nomor 274.a).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari dibuatnya rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah untuk menentukan

arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Gunung Mas.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas yaitu :

1. Mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam rencana kegiatan Pembangunan.
2. Terwujudnya kemandirian dan kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD dan Capaian Renstra DPMD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas yang menggambarkan sejauh mana target kinerja dan capaian tahun 2025 serta rencana target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) sampai tahun 2025 pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kinerja program(outcome) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Perbaan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-1)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-1)	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja SKPD Tahun (n-2)	Realisasi Reaja SKPD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	9	10	11=(10/9)	6	7	8=(7/6)	12=(5+7+10)	13=(12/4)
2.13.05	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif, Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mendapat Akses TTG; Status Perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal)										

2.13.05.2.01		**Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas**										
2.13.08.2.01.09	1.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksanannya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga	114	Desa	114	Desa	114 Desa	114	Desa	100	114 Desa	114 Desa	100%	114	Desa	100%
2.13.05.2.01.07	2	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksanannya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0	Keg	0	Keg	0 Keg	0	Keg	0	0 Keg	0 Keg	0%	0	Keg	0
2.13.05.2.01.06	3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksanannya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8	Desa /Kel	2	Desa/Kel	2 Desa/Kel	2	Desa/Kel	100	0 Desa/Kel	0 Desa /Kel	0%	4	Desa/ Kel	50%

2.13.06.2.01.05	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100%	150 Orang	33%
2.13.06.2.01.03	5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPT, RW, PSK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8 Kec	19 Desa	19 Desa	19 Desa	100	2 Kec	2 Kec	100%	14 Kec	57%
2.13.04	3	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah BUMDes Aktif; Status Klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase Pelayanan Kesehatan Aparatur Desa**										
2.13.04.3.01		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**										

2.13.04.2.01.18	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksanannya Fasilitasi Evaluasi Perkmabangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	40	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	12 Desa	12	Desa	100%	12	Desa	33.3%
-	2	Fasilitasi Pembinaan Pelaporan Kepala Desa	Kepala Desa memahami jenis laporan Kepala Desa	0	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	0 Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0%
-	3	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Meningkatnya pemahaman aparat Kecamatan dan Kepala Desa dalam proses pengangkatan pemberhentian perangkat desa	0	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	0 Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0%
2.13.04.2.01.13	4	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksannanya Pembinaan dan Penataan Aset Desa	114	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	114 Desa	114	Desa	100%	114	Desa	100%
2.13.04.2.01.04	5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksannanya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	114	Desa	114	Desa	114 Desa	114	Desa	100%	114 Desa	114	Desa		114	Desa	100%
2.13.04.2.01.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksannanya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	44	Desa	44	Desa	44 Desa	44	Desa	100%	67 Desa	67	Desa	100%	114	Desa	39%
2.13.04.2.01.03	7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksannanya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	72	Desa /Kel	55	Desa	55 Desa	55	Desa	100%	12 Desa	12	Desa	100%	122	Desa/ Kel	50%
-	8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Tersedianya Updating Profil Desa	114	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	0 Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0
2.13.04.2.01.08	10	Pendirian dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksannanya Pendirian dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	15	BUM Des	15	BUMDe s	15 BUMDes	15	BUMDe s	100%	15 BUMDes	15	BUM Des	100%	45	BUMD es	33%

2.13.04.2.01.05	9	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksanannya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	114	Desa	114	Desa	114 Desa	114	Desa	100%	114 Desa	114	Desa	100%	114	Desa	100%
-	10	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Perangkat Desa memahami teknis penyusunan produk hukum desa	0	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	0 Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0%
2.13.04.2.01.09	11	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksanannya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	45	Desa	41	Desa	41 Desa	41	Desa	100%	14 Desa	14	Desa	100%	96	Desa	43%
2.13.02	**3**	**PROGRAM PERATAAN DESA**	**Peracntase Penataan Desa**															
2.13.02.2.01		**Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Terpenuhinya Penyelenggaraa Penataan Desa**															
2.13.02.2.01.03	1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Desa mempunyai peraturan desa tentang daftar kewenangan lokal berskala desa dan hak asal usul	0	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	114 Desa	114	Desa	100%	114	Desa	100%
-	2	Pengembangan, operasi dan implementasi sistem keuangan desa	Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ((Siskeudes))	114	Desa	0	Desa	0 Desa	0	Desa	0	0 Desa	0	Desa	0%	0	Desa	0%

2.13.02.2.03.01	3	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Tersedianya pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0	0 Desa	0 Desa	0%	0 Desa	0%
2.13.01	**4**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin;Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah penggunjung pameran pembangunan**										
2.13.01.2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Paksian PDH untuk ASN dan Hitam Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti bimtek pada DPMD Kab. Gunung Mas**										

2.13.01.2.09.11	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Telaksananya Kegiatan Pelatihan dan Pendidikan Formal	3	Orang	0	Orang	0 Orang	0	Orang	0	0 Orang	0	Orang	0%	0	Orang	0%
2.13.01.2.05.02	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Kerja bagi ASN dan PTT pada DPMD Kab.Gunung Mas	52	Stel	51	Orang	51 Orang	51	Orang	100%	52 Stel	52	Stel	100%	154	Stel	34%
2.13.01.2.02		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Bulanan**															
2.13.01.2.02.07	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Adanya laporan realisasi fisik dan keuangan	14	Laporan	14	Laporan	14 Laporan	14	Laporan	100%	14 Laporan	14	Laporan	100%	42	Laporan	33%
2.13.01.2.02.01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	23	Orang	24	Orang	24 Orang	24	Orang	100%	23 Orang	23	Orang	100%	71	Orang	32%
2.13.01.2.06		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi dalam mendukung Tupoksi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas**															
2.13.01.2.06.06	1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan sebagai sarana penambah wawasan ASN	6	Jenis	6	Jenis	6 Jenis	6	Jenis	100%	6 Jenis	6	Jenis	100%	18	Jenis	33%
2.13.01.2.06.04	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik pada DPMD Kabupaten Gunung Mas	78	Jenis	78	Jenis	78 Jenis	78	Jenis	100%	78 Jenis	78	Jenis	100%	234	Jenis	33%

2.13.01.2.09.07	3	Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya bahan/material kegiatan pemerian Lingkup Kab.Gunung Mas	1	Kali	0	Kali	0 Kali	0	Kali	0	0 Kali	0	Kali	0%	0	Kali	0%
2.13.01.2.09.05	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak, spanduk, dan penggandaan dan penjilidan berkas/dokumen kantor	3	Jenis	3	Jenis	3 Jenis	3	Jenis	100%	3 Jenis	3	Jenis	100%	9	Jenis	33%
2.13.01.2.09.01	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi pada DPMD Kabupaten Gunung Mas	4	Jenis	4	Jenis	4 Jenis	4	Jenis	100%	4 Jenis	4	Jenis	100%	12	Jenis	33%
2.13.01.2.09.02	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	Jenis	7	Jenis	7 Jenis	7	Jenis	100%	6 Jenis	6	Jenis	100%	20	Jenis	30%
2.13.01.2.09.09	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi pemangkat daerah	243	kali	288	Kali	288 Kali	288	Kali	100%	243 kali	243	Kali	100%	819	kali	30%
2.13.01.2.09		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya gedung kantor, peralatan meja kantor, kenderaan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Gunung Mas**															
2.13.01.2.09.09	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	3	unit	1	Unit	1 Unit	1	Unit	100%	3 Unit	3	Unit	100%	5	unit	60%
2.13.01.2.09.10	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perabotan kantor	4	Jenis	5	Jenis	5 Jenis	5	Jenis	100%	4 Jenis	4	Jenis	100%	14	Jenis	29%

2.13.01.2.09.01	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak Tahunan dan BBM Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
2.13.01.2.09.02	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak Tahunan dan BBM Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	100%
2.13.01.2.07		**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya sarana kerja**										
2.13.01.2.07.06	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0%
2.13.01.2.07.09	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor Lainnya	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	0 Unit	100%	11 Unit	82%
2.13.01.2.08		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan dan Administrasi DPMD Kabupaten Gunung Mas										
2.13.01.2.08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan sarana informasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	100%	3 Rekening	3 Rekening	100%	3 Rekening	100%

2.13.01.2.08.04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi, kebersihan, keamanan dan pendukung pelayanan umum	7	Jenis	9	Jenis	9 Jenis	9	Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%	28	Jenis	28%
2.13.01.2.08.01	3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya keperluan material dan administrasi kesurangan	955	Lembar	915	Lembar	915 Lembar	915	Lembar	100%	1131 Lembar	1131 Lembar	100%	2.961	Lembar	3.2%
2.13.01.2.01		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya bahan evaluasi kegiatan dan laporan capaian kinerja secara berkala dengan perjanjian kinerja**														
2.13.01.2.01.06	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan perjanjian kinerja	2	Laporan	0	Laporan	0 Laporan	0	Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%	2	Dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas, merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai kondisi dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas

No	Uraian	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD tahun ke-		Realisasi Capaian pada Tahun ke-	
					2025	2026	2025	2026
1	Persentase Pengetasan desa tertinggal				100%	100%		
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				94%	95%		

2.3. Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025, dan kajian hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran sesuai renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pembangunan merupakan isu-isu penting yang kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

1. Rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pemerintahan desa
2. Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemeliharaan, pengawasan)
4. Kurangnya kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat
5. Budaya masyarakat masih dominan budaya petik
6. Belum terbangunnya interaksi dinamis antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk optimalisasi pembangunan

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan Pemangku Kepentingan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas selain melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat nasional juga mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.

Usulan program/kegiatan masyarakat diperoleh melalui proses berjenjang dari tingkat Desa melalui Musrenbang Desa, kemudian di bawa ke tingkat Kecamatan untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan di Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan dimana pada tahap ini usulan-usulan dari tingkat Desa yang menjadi prioritas direkap menjadi usulan Kecamatan untuk selanjutnya di bawa ke Musrenbang Kabupaten. Pada tahapan Musrenbang Kabupaten. Pada tahapan Musrenbang Kabupaten program/kegiatan yang menjadi usulan Kecamatan dipilih kembali serta dapat diakomodir oleh Perangkat Daerah dan dijawab oleh Perangkat Daerah melalui program kegiatan pada Perangkat daerah masing-masing.

2. Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan usulan program/kegiatan masyarakat tahun 2025 yang dibawa dalam Musrenbang Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, didapatkan bahwa semua kegiatan yang menjadi usulan sudah sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat mengakomodir semua usulan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahaan terhadap kebijakan nasional merupakan pencermatan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas. Prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas dan penyelengaraan tugas dan fungsi SKPD urusan wajib program nasional berdasarkan RKPD antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan program nasional antara lain :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    2) Program Penataan Desa
    3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
    4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yaitu memiliki Tema "BERKELANJUTAN" dengan fokus kepada "Peningkatan Instruktur Pembangunan yang Berkualitas dan Merata" dengan maksud bahwa perwujudan dari pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah dan peningkatan insfrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata. Dengan regulasi yang terus berkembang, kemudian ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang

dimutahirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara Signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembanguann dan pengganggaran menjadi dasar dokumen RPD dan Renstra. Melalui RPD dapat mengakselerasi percepatan pembanguan dan pemulihan ekonomi serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di kabupaten Gunung Mas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas menyusun tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Sasaran
1. Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Berikut ini faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas :

1. Penyusunan rencana pembangunan daerah
2. Upaya pengentasan kemiskinan
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan peran perempuan di pedesaan

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Program dan Kegiatan

1. Program dan kegiatan direncanakan dalam rencana kerja tahun 2025 sebanyak 4 program dengan kegiatan sebanyak 35 kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tahun 2025 berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan dan jenis kegiatan. Untuk kegiatan rutin di sekretariat, lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Kuala Kurun, sedangkan kegiatan bidang teknis terbagi merata baik berlokasi di desa, ibukota Kecamatan dan ada juga yang berlokasi di Kuala Kurun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan usulan kegiatan yang mengakomodir usulan program kegiatan hasil Musrenbang. Untuk fokus penerima manfaat program kegiatan bidang teknis berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah atau kelompok masyarakat tingkat pedesaan.
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah sebesar Rp. 9.799.419.726,00

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Apabila terdapat perbedaan rumusan program dan kegiatan pada rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas hal ini mungkin terjadi diakibatkan oleh hal sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan anggaran sehingga beberapa program/kegiatan/sub kegiatan
2. Adanya program/kegiatan/sub kegiatan arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang datang pada saat rencana kerja sudah disusun sehingga tidak termuat di dalam renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas.

d. Berikut ini termuat rencana program dan kegiatan tahun 2025

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN GUNUNG MAS

NAMA SKPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.799.419.726,00							9.971.537.262,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.799.419.726,00							9.971.537.262,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.799.419.726,00							9.971.537.262,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.993.927.905,00						-	5.020.888.896,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.322.220.898,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	3.520.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.204.085.308,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		3.400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				14 Laporan	118.135.590,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.515.300,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	180.000.000,00	DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.515.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	853.347.348,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	796.567.211,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.190.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	96.387.427,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		97.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				65 Paket	53.483.609,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		54.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU/RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		34.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	10.796.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		10.769.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.020.527,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		30.020.527,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	687.690.101,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30.797.184,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		30.797.184,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	305.331.336,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	315.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	10.420.000,00	Kab.Gunung Mas, Kuun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		10.420.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	74.680.000,00	Kab.Gunung Mas, Kuun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	220.021.335,00	Kab.Gunung Mas, Kuun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		230.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU/RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.623.024,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	358.571.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	79.418.226,00	Kab.Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		79.418.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	66.104.798,00	Kab.Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		98.104.798,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		49.048.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**4.039.805.719,00**						-	**4.190.948.556,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	4.039.805.719,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	4.190.948.556,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				114 Dokumen	195.087.908,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				114 Dokumen	251.158.958,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		255.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				114 Dokumen	301.232.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		384.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				114 Orang	2.108.948.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		2.108.948.556,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	129.085.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				114 Laporan	30.133.600,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				114 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	547.300.896,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		548.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				114 Dokumen	73.260.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				114 Desa	251.194.842,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		252.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	117.442.927,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		118.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-			-	**785.686.102,00**						-	**760.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	785.686.102,00				-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-	-	760.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.3.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibinadalam Kapasitasnya				114 Lembaga	170.205.064,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		180.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	77.145.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				6 Laporan	164.045.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-		155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen *Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*				118 Dokumen	364.200.500,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PELIMPAHAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		365.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	JUMLAH							9.799.419.726,00							9.871.637.262,06	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program dan kegiatan dalam rencana kerja tahun 2025 sebanyak 4 program dengan kegiatan sebanyak 35 kegiatan dengan pendanaan dari APBD sebesar Rp. 9.799.419.726,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.799.419.726,00					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.799.419.726,00					
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						9.799.419.726,00					
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	4.993.927.906,00					
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.322.220.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.204.085.308,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD				14 Laporan	118.135.590,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.515.300,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.05.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAK CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	50.515.300,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	953.347.348,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9.190.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	98.387.407,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				65 Paket	53.493.609,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	10.796.500,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material											
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	30.030.627,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				305 Laporan	567.680.101,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	30.787.154,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	305.321.335,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				9 Laporan	10.420.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				12 Laporan	74.880.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			Jumlah Laporan *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				8 Laporan	220.021.335,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	362.523.024,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	79.418.226,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya				14 Unit	98.104.798,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
2	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**4.039.505.719,00**					
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	4.039.505.719,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah *Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*				114 Dokumen	195.087.935,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa											
			Jumlah *Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*				114 Dokumen	251.158.868,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa											
			Jumlah *Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*				114 Dokumen	301.232.760,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan kapasitas				114 Orang	2.106.948.556,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa											
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				25 Dokumen	129.645.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa											
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				114 Laporan	30.133.800,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET T AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah *Dokumen Profil Desa* yang tersusun				154 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa											
			Jumlah *Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa*				1 Dokumen	547.300.888,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa											
			Jumlah *Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa*				154 Dokumen	73.260.000,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkata n daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				114 Desa	251.194.842,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan											
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	117.442.927,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
3.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-			-	785.698.102,00					
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	785.698.102,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				114 Lembaga	170.205.064,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	77.145.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna											
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				8 Laporan	154.045.220,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan	-
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				114 Dokumen	354.290.588,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PELIMPAHAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah	-
	JUMLAH							9.788.419.736,00					

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai, demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapat hasil yang maksimal.

Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya akan disusun program dan kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta rencana operasional kegiatan tahun 2025.

Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat memenuhi pelayanan pembangunan sesuai dengan rencana Kebijakan Nasional, RPJMD Kabupaten Gunung Mas dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada pencapaian rencana kerja tahun 2025.

BUKU RENJA MURNI 2025

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KUALA KURUN, 1 JULI 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No- Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email :dpmptsp@gunungmaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2010);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 408);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 587);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RENJA DPMPTSP Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

KEDUA : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai pedoman dokumen penganggaran dalam penyusunan dan penetapan antara lain :

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026.

KETIGA : Penjabaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 2 April 2024

Kepala Dinas

HARPASENO, S.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751110 2006004 1 022

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini mengacu kepada Peraturan Peraturan Mendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDARIDA Kabupaten Gunung Mas dengan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan PEMDA Kabupaten Gunung Mas.

Demikian, dengan harapan kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan rencana/ tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Kuala Kurun, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunung Mas

HARPASENO, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197511102006041022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I. 1. Latar Belakang 1

I. 2. Landasan Hukum 2

I. 3. Maksud dan Tujuan 5

I. 4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 28

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **32**

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

III. 3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA **39**

IV. 1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan 39

IV. 2. Indikator Kinerja 43

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA 55

V. 1. Dana Indikatif Tahun 2025 55

V. 2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif 55

BAB IV PENUTUP 64

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD Provinsi.

Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Renja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat

menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, khususnya di bidang penanaman modal, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali tatalaksana perizinan dalam menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan bersih. Hal ini membutuhkan perencanaan kerja DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya, DPMPTSP sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Gunung Mas, menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025 dengan menerjemahkan serta mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ke dalam program dan kegiatannya selama satu tahun ke depan. Hal tersebut karena pada dasarnya program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025 berkontribusi pada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (RENSTRA DPMPTSP) Tahun 2025-2026 sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244a);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 136);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 408);
23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 587);
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 710);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor ……);
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perizinan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perencanaan tahunan Dinas untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

I.3.2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA Perangkat Daerah;
d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Millenium Development Goals* (MDGs)
e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat.
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA

- IV.1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- IV.2. Indikator Kinerja

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA

- V.1. Dana Indikatif Tahun 2025
- V.2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk lebih meningkatkan efisiensi penyusunan Rencana Kerja yang strategis dan merupakan salah satu bahan penyusun Rencana Kerja untuk Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka hal ini dapat ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. Pelaksanaan Rencana Tahun 2025 diuraikan dengan beberapa program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.

Pelaksanaan rencana Tahun lalu serta kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun lalu cukup optimal, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut terlihat dari hasil pencapaian kinerja beberapa kegiatan yang terlaksana/terealisasi secara keseluruhan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

No	Program	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Fisik Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	***7.990.547.307,00***	***4.058.571.165,00***	**50,79**	**54,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.740.999.778,00**	**3.385.134.779,00**	**53,78**	**56,66**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah***	**13.802.400,00**	**12.952.400,00**	**74,83**	**77,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.027.500,00	4.027.400,00	**100,0**	**100,00**
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.700.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	**100,0**	**100,00**
7	Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.357.600,00	1.700.000,00	**39,01**	**39,01**
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**2.504.800.289,00**	**1.697.850.343,00**	**67,78**	**67,78**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.322.289,00	1.696.150.343,00	**67,84**	**67,84**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.778.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**194.530.500,00**	**68.186.948,00**	**35,05**	**38,75**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.788.500,00	20.790.000,00	**23,68**	**33,10**
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.742.000,00	47.396.948,00	**44,40**	**44,40**
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**722.682.725,00**	**214.754.482,00**	**29,72**	**37,24**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.481.750,00	510.000,00	**11,38**	**24,56**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.498.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.230.100,00	15.267.500,00	**71,91**	**84,22**
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.796.500,00	2.430.000,00	**35,75**	**46,80**
5	Penyediaan Bahan/Material	66.107.190,00	20.686.900,00	**31,29**	**50,11**
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.758.000,00	8.865.000,00	**22,87**	**38,85**
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.940.300,00	166.866.780,00	**41,21**	**41,21**
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.870.885,00	128.302,00	**0,81**	**12,20**
6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**2.140.799.267,00**	**513.024.500,00**	**97,94**	**97,95**
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	00,00	00,00
2	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	00,00	00,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	00,00	00,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	2.140.799.267,00	1.158.687.500,00	**54,12**	**62,90**

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**447.874.058,00**	**210.388.606,00**	**46,97**	**46,97**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	**50,00**	**50,00**
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.750.500,00	30.423.398,00	**44,91**	**44,91**
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.978.100,00	7.840.000,00	**23,07**	**23,07**
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.745.458,00	170.925.208,00	**49,72**	**49,72**
8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**259.171.362,00**	**16.574.500,00**	**6,40**	**6,40**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.180.600,00	11.934.500,00	**5,71**	**5,71**
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.990.762,00	4.640.000,00	**9,28**	**9,28**
9	***Penataan Organisasi***	**5.540.000,00**	**4.040.000,00**	**72,92**	**72,92**
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000,00	2.000.000,00	**100,00**	**100,00**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3540000	2.040.000,00	**57,63**	**57,63**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**159.566.700,00**	**35.447.400,00**	**22,21**	**22,21**
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***	**159.566.700,00**	**35.447.400,00**	**22,21**	**22,21**
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76.698.700,00	6.115.800,00	**7,97**	**7,97**
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	82.868.000,00	29.331.600,00	**35,40**	**35,40**
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**408.043.918,00**	**128.757.917,00**	**31,55**	**31,55**
1	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**408.043.918,00**	**128.757.917,00**	**31,55**	**31,55**
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	234.538.278,00	114.826.117,00	**48,96**	**48,96**
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	173.505.640,00	13.931.800,00	**8,03**	**8,03**
4	**PROGRAM PELAYANAN**	**527.744.316,00**	**233.606.097,00**	**44,27**	**49,11**

	PENANAMAN MODAL				
1	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**527.744.316,00**	**233.606.097,00**	**44,27**	**49,11**
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	293.711.464,00	128.131.344,00	**43,62**	**55,70**
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	89.304.864,00	43.703.644,00	**48,94**	**48,94**
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	144.727.988,00	61.771.109,00	**42,68**	**42,68**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**548.842.528,00**	**261.820.928,00**	**47,70**	**47,70**
1	***Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**548.842.528,00**	**261.820.928,00**	**47,70**	**47,70**
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	114.043.800,00	40.033.640,00	**35,10**	**35,10**
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	299.870.328,00	147.283.288,00	**49,12**	**49,12**
3	Pengawasan Penanaman Modal	134.928.400,00	74.504.000,00	**55,22**	**55,22**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**51.941.644,00**	**13.804.044,00**	**26,58**	**26,58**
1	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**51.941.644,00**	**13.804.044,00**	**26,58**	**26,58**
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	51.941.644,00	13.804.044,00	**26,58**	**26,58**
	Total	***5.740.999.778,00***	***7.990.547.307,00***	***4.058.571.165,00***	**50,79**

Mengacu pada pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah 2025-2026, dapat dilihat realisasi capaian per tahunnya termasuk kategori baik dan sesuai dengan ekspetasi target yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah:

Tabel Rencana dan Realisasi Kinerja pada Tahun Lalu

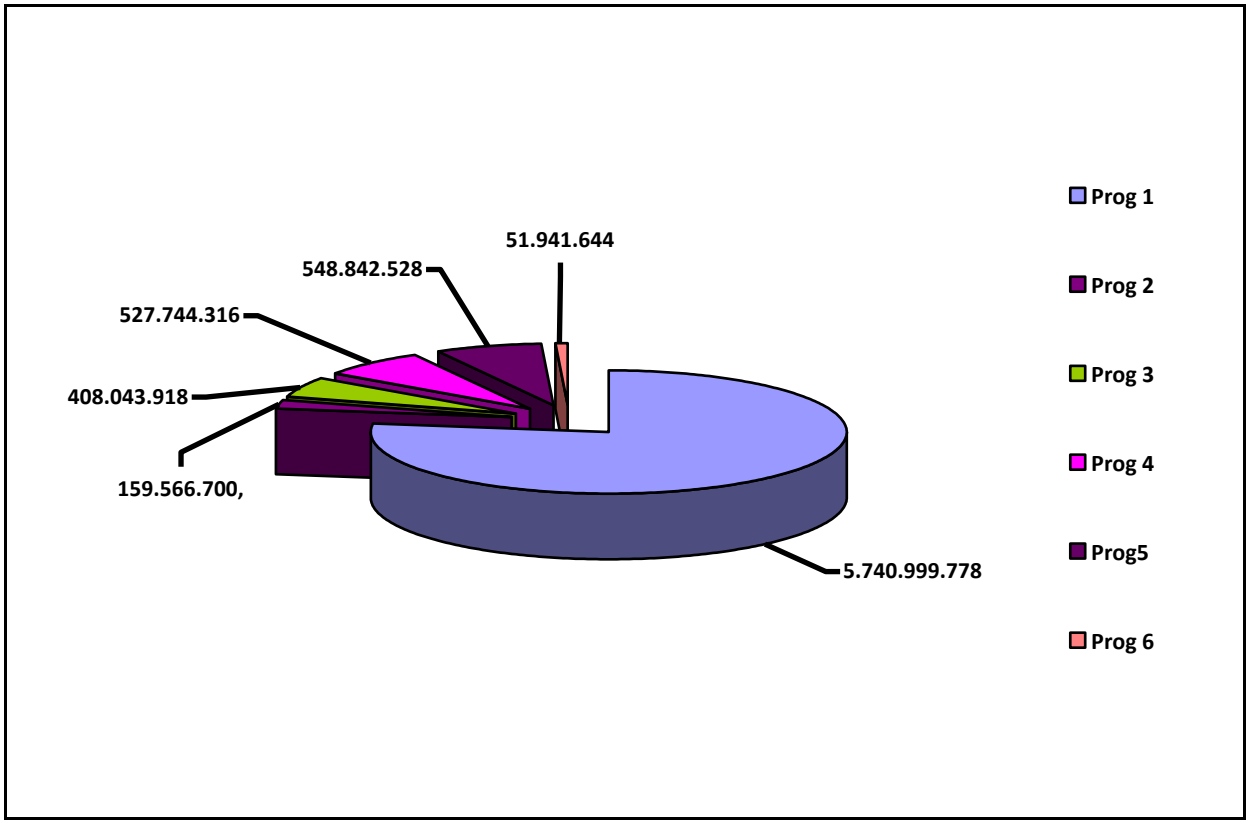
No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**2.18**	**URUSAN PENANAMAN MODAL**										
I	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
1.	**01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**										
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
7	07	Evaluasi	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
2.	**01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*25*	23,1	*25*	23,1	*25*	23,1	*25*	23,1	*100*	*92,51*
2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3.	**01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										
1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*25*	24,9	*25*	24,9	*25*	24,9	*25*	24,9	*100*	*99,05*
4.	**01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*25*	22,4	*25*	22,4	*25*	22,4	*25*	22,4	*100*	*99,21*
2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*25*	22,7	*25*	22,7	*25*	22,7	*25*	22,7	*100*	*98,17*
5	**01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*25*	21,2	*25*	21,2	*25*	21,2	*25*	21,2	*100*	*99,35*
2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*91,26*
3	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*68,93*
4	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*100*	*98,46*
5	07	Penyediaan Bahan/Material	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*91,30*
6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*100*	*99,12*
7	09	Penyelenggaraan Rapat	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*100*	*86,73*

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
6	**01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*100*	*97,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100	*97,94*
2	05	Pengadaan Mebel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*
3	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
4	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
7	**01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*100*	*80,70*
3	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*98,31*
4	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*100*	*95,47*
7	**01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*94,19*
2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*25*	24,7	*25*	24,7	*25*	24,7	*25*	24,7	*100*	*135,12*
8	**01.2.13**	**Penataan Organisasi**										
1	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
II	**02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**										
1	**02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*100*	*95,51*
2	**02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**										
1	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*100*	*81,75*
2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*97,55*
III	**03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**										
1	**03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	*25*	23,4	*25*	23,4	*25*	23,4	*25*	23,4	100	119,91
2	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*100*	*87,19*
VI	**04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**										
1	**04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*25*	23	*100*	12,5	*25*	12,5	*25*	12,5	*100*	*91,47*
2	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penananaman Modal	*25*	24,1	*100*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*96,87*
3	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	*25*	24,1	*100*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*89,22*
V	**05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**										
1	**05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	23	*100*	12,5	*25*	12,5	*25*	12,5	*100*	*93,36*
2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	21,7	*25*	21,7	*25*	21,7	*25*	21,7	*100*	*99,14*
3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*91,35*
IV	**06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**										
1	**06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**										
1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*25*	15	25	15	25	15	25	15	*100*	*97,94*

TR: Triwulan
T: Target
R: Realisasi

Bagan Kue Realisasi Belanja Langsung
Berdasarkan Rincian Belanja Tahun Lalu (TA. 2024)



Tabel Capaian Renstra Pada Tahun Anggaran 2024

No.	Kode Rek	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Yang Dievaluasi (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Relisasi Anggaran Renja PD Yang Dievalusi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra PD S/D Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD S/D Tahun 2024 (%)		Unit PD Pe-nanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 12/7 X 100%*	*14 = 6 + 12*				*15*		*16*	*17*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*K*	*K*	*Rp*		*K*	*K*		
I	***1***	***Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal***	**Persentase Laporan/ Dokumen yang berhasil dilaksanakan tepat waktu**		**7.049.435.253,00**		**5.346.552.717,00**		**5.740.999.778,00**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**5.374.187.262,00**		**100**		**10.720.739.979,00**			**DPMPTSP**	
I	***1***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase Laporan/ Dokumen yang berhasil dilaksanakan tepat waktu**		**3.781.139.593,00**		**4.008.704.167,00**		**4.038.185.294,00**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**3.755.379.439,00**		**100**		**7.764.083.606,00**			**DPMPTSP**	
	02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi		**12.952.400,00**		**13.802.500,00**		**13.802.400,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**13.802.400,00**		**100**		**27.604.900,00**			**Sekretariat**	
1	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	3	4.027.400,00	3	4.027.500,00	3	4.027.400,00	1	1.006.850,00	1	1.006.850,00	1	1.006.850,00	0	1.006.850,00	3	4.027.400,00	100	100	6	8.054.900,00	100	94	**Sekretariat**	
2	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	2.550.000,00	2	2.550.000,00	1	1.275.000,00	1	1.275.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.550.000,00	100	100	2	5.100.000,00	100	100	**Sekretariat**	
3	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	100	98,82	**Sekretariat**	
4	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	80	67,65	**Sekretariat**	
5	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	100	60	**Sekretariat**	
6	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	1	425.000,00	0	850.000,00	1	850.000,00	0	0,00	3	2.125.000,00	100	100	6	4.250.000,00	100	75,75	**Sekretariat**	
7	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
	02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	Persentase Terpunuhinya Keuangan		**2.479.323.928,00**		**2.260.865.253,00**		**2.354.118.295,00**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**2.178.198.879,00**		**100**		**4.439.064.132,00**			**Sekretariat**	
1	02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24	2.474.845.928,00	24	2.256.387.253,00	24	2.349.640.295,00	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	2.173.720.879,00	100	100	48	4.430.108.132,00	60	92,63	**Sekretariat**	
2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	00,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	100	100	4	3.400.000,00	100	100	**Sekretariat**	
3	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	2.778.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	0	0,00	1	539.000,00	1	539.000,00	1	1.700.000,00	3	2.778.000,00	100	100	6	5.556.000,00	100	61,02	**Sekretariat**	
	02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Pelaporan		**1.700.000,00**		**2.100.000,00**		**2.100.000,00**		**0,00**		**0,00**		**380.000,00**		**1.700.000,00**		**2.080.000,00**		**100**		**4.180.000,00**			**Sekretariat**	
1	03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jumlah Dokumen yang Dibutuhkan	1	1.700.000,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	1	0,00	0	0,00	1	380.000,00	1	1.700.000,00	2	2.080.000,00	100	100	4	4.180.000,00	100	99,76	**Sekretariat**	
	02.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas		**178.894.500,00**		**203.085.308,00**		**108.684.700,00**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**107.127.753,00**		**100**		**310.213.061,00**			**Sekretariat**	
1	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas	3	91.652.500,00	3	76.794.018,00	3	41.714.400,00	1	10.346.250,00	1	10.346.250,00	1	10.346.250,00	0	10.346.250,00	3	41.385.000,00	100	100	6	118.179.018,00	100	89,79	**Sekretariat**	
2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan	13	87.242.000,00	13	126.291.290,00	13	66.970.300,00	4	16.685.688,00	3	16.685.688,00	3	16.685.688,00	3	16.685.688,00	13	66.742.753,00	100	100	26	193.034.043,00	100	91,07	**Sekretariat**	

	02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan yang Dibutuhkan		**457.642.965,00**		**340.246.055,00**		**449.867.594,00**		**69.482.543,50**		**147.209.103,50**		**57.702.543,50**		**57.702543,50**		**396.818.534,00**		**100**		**737.064.589,00**			**Sekretariat**	
1	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor	1	4.481.750,00	2	1.810.600,00	2	3.530.000,00	1	876.750,00	1	876.750,00	1	876.750,00	1	876.750,00	4	3.507.000,00	100	100	6	5.317.600,00	100	84,83	**Sekretariat**	
2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor	1	107.323.000,00	1	104.602.085,00	1	98.080.290,00	0	0,00	1	89.506.560,00	0	0,00	0	0,00	1	89.506.560,00	100	100	2	194.108.645,00	100	98,53	**Sekretariat**	
3	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Perlengkapan Gedung Kantor	2	21.230.000,00	2	11.482.000,00	2	17.090.000,00	2	11.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	11.780.000,00	100	100	4	23.262.000,00	100	98,41	**Sekretariat**	
4	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan Undang-undang	4	6.299.700,00	4	6.299.700,00	4	6.596.400,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	4	6.495.000,00	100	100	8	12.272.800,00	100	99,99	**Sekretariat**	
5	06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket/Jenis	1	68.107.190,00	25	63.080.930,00	25	70.888.304,00	0	0,00	1	64.721.800,00	0	0,00	0	0,00	1	64.721.800,00	100	100	50	127.802.730,00	100	98,78	**Sekretariat**	
6	06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan	4	14.272.000,00	4	5.860.800,00	4	6.468.800,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	4	6.412.000,00	100	100	8	12.272.800,00	100	99,56	**Sekretariat**	
7	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	79	218.986.200,00	64	147.110.740,00	64	247.213.800,00	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	54	214.396.174,00	100	100	128	361.506.914,00	100	91,58	**Sekretariat**	
8	06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	16.943.125,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
	02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor		**1.500.000.003,00**		**489.369.934,00**		**523.809.000,00**		**513.024.500,00**		**00,00**		**0,00**		**00,00**		**513.024.500,00**		**100**		**1.002.394.434,00**			**Sekretariat**	
1	07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4	0	0,00	1	444.545.500,00	1	523.809.000,00	1	513.024.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	513.024.500,00	100	0	0	957.570.000,00	100	100	**Sekretariat**	
2	07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket	0	0,00	1	21.916.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**21.916.180,00**	0	0	**Sekretariat**	
3	07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	0	0,00	1	15.053.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**15.053.374,00**	0	0	**Sekretariat**	
4	07.11	Pengandaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1	1.500.000.003,00	0	7.854.880,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**7.854.880,00**	0	0	**Sekretariat**	
	02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi		**360.152.920,00**		**464.261.192,00**		**462.624.498,00**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**423.178.643,00**		**100**		**887.439.835,00**			**Sekretariat**	
1	08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Jenis Surat-menyurat yang Terpenuhi	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	1	2.400.000,00	100	100	2	4.800.000,00	100	100	**Sekretariat**	
2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air dan Listrik Gedung Kantor	2	67.750.500,00	2	44.190.000,00	2	130.482.150,00	2	26.326.244,25	0	26.326.244,25	0	26.326.244,25	0	26.326.244,25	2	105.304.897,00	100	100		149.494.897,00	100	89,44	**Sekretariat**	
3	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	1	33.978.100,00	1	13.750.670,00	1	23.710.000,00	1	5.827.500,00	0	5.827.500,00	0	5.827.500,00	0	5.827.500,00	1	23.310.000,00	100	100	2	37.460.670,00	100	96,43	**Sekretariat**	
4	08.04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor	12	256.024.320,00	12	403.920.522,00	12	306.032.348,00	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	12	292.163.746,00	100	100	24	696.084.268,00	100	89,2	**Sekretariat**	
	02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang yang Terpenuhi		**287.904.727,00**		**232.727.525,00**		**123.178.807,00**		**26.057.682,50**		**42.975.682,50**		**26.057.682,50**		**26.057.682,50**		**121.148.730,00**		**100**		**355.876.255,00**			**Sekretariat**	
1	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	14	169.980.600,00	14	85.864.250,00	14	110.658.007,00	4	26.057.682,50	4	26.057.682,50	3	26.057.682,50	3	26.057.682,50	14	104.230.730,00	100	100	28	190.094.980,00	100	96,51	**Sekretariat**	
2	00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
3	09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor	1	117.924.127,00	1	146.863.275,00	1	12.520.800,00	0	0,00	1	16.910.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.910.000,00	100	100	2	163.773.275,00	100	98,98	**Sekretariat**	
	02.13	**Penataan Organisasi**	Persentase Penataan Organisasi yang Berkualitas		**4.040.000,00**		**2.245.600,00**		**0**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		**100**		**2.245.600,00**			**Sekretariat**	
1	13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Biokrasi	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	2.000.000,00	1	1.395.600,00	1	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	100	2	1.395.600,00	100	64,49	**Sekretariat**	

2	13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Yang Terpenuhi	1	2.040.000,00	1	850.000,00	1	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	100	2	850.000,00	100	98,82	**Sekretariat**	
II	***2***	***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***	**Persentase Kegiatan yang terlaksana**		**121.604.700,00**		**184.621.580,00**		**255.982.080,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**255.982.080,00**		**100**		**440.603.660,00**			**PM**	
	02.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemberian Fasilitas yang Terpenuhi		**0,00**		**94.783.000,00**		**131.100.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**131.100.000,00**		**100**		**225.883.000,00**			**PM**	
1	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha	1	0,00	1	94.783.000,00	1	131.100.000,00	1	0,00	1	125.220.000,00	0	0,00	0	0,00	1	131.100.000,00	100	100	2	225.883.000,00	100	100	**PM**	
	02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Kebijakan Umum yang Berkualitas		**121.604.700,00**		**89.838.580,00**		**124.882.080,00**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**115.374.570,00**		**100**		**205.213.150,00**			**PM**	
1	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PERDA Rencana Umum	1	54.473.700,00	1	55.699.580,00	1	40.811.630,00	1	8.340.534,50	0	8.340.534,50	0	8.340.534,50	0	8.340.534,50	1	33.362.138,00	100	100	2	89.061.718,00	80	41,09	**PM**	
2	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Terpenuhi	1	67.131.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**PM**	
3	02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Tepenuhi	0	0,00	1	34.139.000,00	1	84.070.450,00	1	20.503.108,00	0	20.503.108,00	0	20.503.108,00	0	20.503.108,00	1	82.012.432,00	100	100	2	116.151.432,00	100	98,44	**PM**	
III	***3***	***Program Promosi Penanaman Modal***	**Persentase Jumlah Investor dan Nilai Investasi**		**472.594.950,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**267.608.454,00**		**100**		**416.272.897,00**			**PM**	
	02.01	**Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Promosi Investasi yang Terpenuhi		**472.594.950,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**267.608.454,00**		**100**		**416.272.897,00**			**PM**	
1	01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	0	0,00	4	124.621.943,00	4	73.110.200,00	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	4	87.664.467,00	100	100	8	212.286.410,00	100	93,82	**PM**	
2	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PTT/Honorer	1	289.121.310,00	1	24.042.500,00	1	206.378.432,00	1	44.985.996,75	0	44.985.996,75	0	44.985.996,75	0	44.985.996,75	1	179.943.987,00	100	100	2	203.986.487,00	100	91,46	**PM**	
3	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	183.473.640,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PM**	
IV	***4***	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	**Persentase Pelayanan yang Terpenuhi**		**570.139.900,00**		**493.549.556,00**		**514.318.480,00**		**128.386.430,00**		**150.435.911,00**		**150.435.911,00**		**48.386.430,00**		**447.644.683,00**		**100**		**971.194.238,00**			**PTSP**	
	02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah**	Persentase Pelayanan Peningkatan Pelayanan yang Terpenuhi		**570.139.900,00**		**493.549.556,00**		**514.318.480,00**		**128.386.430,00**		**150.435.911,00**		**150.435.911,00**		**48.386.430,00**		**447.644.683,00**		**100**		**941.194.239,00**			**PTSP**	
1	01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	0	0,00	5	271.848.312,00	5	264.801.188,00	2	60.000.000,00	1	76.021.264,00	1	76.021.264,00	1	30.000.000,00	5	242.042.528,00	100	100	10	513.890.840,00	100	92	**PTSP**	
2	01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	3	149.854.928,00	3	167.284.528,00	1	50.000.000,00	1	56.028.217,00	1	56.028.217,00	0	0,00	3	162.056.435,00	100	100	6	311.911.363,00	60	96,74	**PTSP**	
3	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	200	314.122.540,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
4	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Beerusaha Berbasis Risiko	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	4	83.495.820,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
5	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	25	172.521.540,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
6	01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Laporan IKM yang Terpenuhi	0	0,00	2	71.846.316,00	2	82.429.764,00	0	18.386.430,00	0	18.386.430,00	0	18.386.430,00	2	18.386.430,00	2	73.545.720,00	100	100	4	145.392.036,00	100	96,7	**PTSP**	
V	***5***	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	**Persentase Peningkatan Mutu yang**		**537.604.440,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**580.213.852,00**		**100**		**1.046.135.415,00**			**WASDAL**	

			Terpenuhi																						
	02.01	**Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Mutu yang Berkualitas		**537.604.440,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**580.213.852,00**		**100**		**1.046.135.415,00**			**WASDAL**	
1	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	8	114.043.800,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
2	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpenuhi	217	272.789.440,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
3	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Terpenuhi	14	150.771.200,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
1	01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	0	0	1	129.674.428,00	1	30.264.688,00	0	30.264.688,00	0	30.264.688,00	0	30.264.688,00	1	121.058.752,00	100	0	2	121.058.752,00	0	0	**WASDAL**	
2	01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	9	294.630.716,00	9	388.396.400,00	3	96.265.850,00	2	96.265.850,00	2	96.265.850,00	2	96.265.850,00	9	385.063.400,00	100	100	18	679.694.116,00	100	87,09	**WASDAL**	
3	01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	1	171.290.847,00	1	81.103.600,00	1	18.522.925,00	0	18.522.925,00	0	18.522.925,00	0	18.522.925,00	1	74.091.700,00	100	100	2	245.382.547,00	100	96,54	**WASDAL**	
VI	**6**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyusunan Data yang Terpenuhi**		**63.179.82,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**0,00**		**52.746.264,00**		**100**		**97.837.672,00**			**WASDAL**	
	02.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	Persentase Peningkatan Data Yang Terpenuhi		63.179.82,00		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**0,00**		**52.746.264,00**		**100**		**97.837.672,00**			**WASDAL**	
1	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi yang Terpenuhi	3	63.179.82,00	5	45.091.408,00	3	53.853.864,00	1	17.582.088,00	1	17.582.088,00	1	17.582.088,00	0	0,00	3	52.746.264,00	100	100	10	97.837.672,00	100	80	**WASDAL**	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah 36 (Tiga Puluh Enam) orang dengan rincian sebagai berikut 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 15 (Lima Belas) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian	Desember 2023	Juli 2024
1.	Pegawai Ngeri Sipil (PNS)	20	19
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-
3.	Pegawai PPPK (P3K)	-	2
3.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	19	15
	Jumlah (orang)	**39**	**36**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Usia (Tahun)														Jumlah
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/d															
IV/c															
IV/b							1		1				2	0	**2**
IV/a							1	1					1	1	**2**
III/d			1			1	2	1		1	1	1	4	4	**8**
III/c					1	1							1	1	**2**
III/b					1								1		**1**
III/a			1										1		**1**
II/d															
II/c			1								1		1		**2**
II/b						1								1	**1**
II/a															
I/d															
I/c															
I/b															
I/a															
Jumlah	0	0	3	0	2	3	4	2	1	1	2	1	12	7	**19**

Jumlah Pegawai PNS / ASN Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Formal	Usia (Tahun)														Jmlh
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S – 2 (PNS)					1	1	3	1					4	2	6
S – 1 (PNS)			2		3	1	2		1	2	1		9	3	12
S – 1 (P3K)				2										2	2
S – 1 (PTT)	2	2	1										3	2	5
SLTA (PNS)			1										1		1
SLTA (PTT)	4	1	1	2		1					1		6	4	10
Jumlah	**6**	**3**	**5**	**4**	**4**	**3**	**5**	**1**	**1**	**2**	**2**		**23**	**13**	**36**

II.2.2 KINERJA DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Utama dan target yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Gunung Mas No. 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu jumlah izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibandingkan jumlah pemohon izin dikalikan seratus persen, dikarenakan mekanisme perizinan pada DPMPTSP masih belum optimal maka dalam hal ini realisasi capaian kinerja dapat dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan pada Tahun 2024 yaitu:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	Sektor	Jumlah Izin	Nama Izin		Jumlah Izin			Keterangan
					2022	2023	2024	
1.	Pekerjaan Umum	1.	Persetujuan Bangunan Gedung		23	49	140	Manual/Melalui aplikasi SIMBG
2.	Pendapatan Daerah	2.	Reklame		194	316	411	Manual/aplikasi sipet
3.	Kesehatan	3.	1.	SIP. Perawat	182	182	114	Manual
		4.	2.	SIP. Bidan	117	117	73	Manual
		5.	3.	SIP. Dokter Umum	27	27	20	Manual
		6.	4.	SIP. Dokter Spesialis	4	4	9	Manual

		7.	5.	SIP. Dokter gigi	0	0	2	Manual
		8.	6.	SIP. Perawat Gigi	1	1	3	Manual
		9.	7.	SIP. Tenaga Gizi	7	7	0	Manual
		10.	8.	Izin Optikal	3	3	0	Manual
		11.	9.	SIP. Apoteker	13	13	11	Manual
		12.	10.	Izin Toko Obat	15	15	17	Manual/OSS
		13.	11.	Izin Klinik	4	4	0	Manual/OSS
		14.	12.	SIP. Radiografer	1	1	1	Manual
		15.	13.	Izin Operasional Puskesmas	7	7	4	Manual
		16.	14.	SIP. Akupuntur Terapis	1	1	0	Manual
		17.	15.	SIP. Tenaga Medis Kefarmasian	25	25	26	Manual
		18.	16.	SIP. Refraksionis Optisen	0	0	0	Manual
		19.	17.	SIP. Teknik Transfusi Daerah	1	1	0	Manual
		20.	18.	SIP. Apotek	4	4	8	Manual/OSS
		21.	19.	SIP. Ahli Laboratorium Medik	5	5	10	Manual
4.	Pendidikan	22.	Izin Operasional/Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, PKBM		42	33	22	Manual
5.	Pariwisata/ TDUP	23.	Hotel, Penginapan, Cafe, karaoke		3	4	3	Manual/OSS
6.	Perdagangan	24.	ITMB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)		19	42	36	Manual/OSS
		25.	1.	Karaoke	4	4	4	Manual/OSS
		26.	2.	Toko Pengecer	35	35	35	Manual/OSS
		27.	3.	Sub Distributor	3	3	3	Manual/OSS
7.	NIB	28.	1.	Skala Usaha Mikro Kecil	595	595	595	OSS
		29.	2.	Skala Non UMK	3	3	3	OSS
Total		**29**			**1785**	**1901**	**1204**	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

II.3.1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi isu yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a) Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan oleh keengganan Perangkat Daerah Teknis melimpahkan wewenang perizinan sehingga terjadi tarik-ulur kewenangan Perangkat Daerah tersebut. Selain itu Perangkat Daerah terkait masih tidak memahami dan menguasai jenis perizinan apa yang melekat pada kewenangannya dimaksud;

b) Disamping masalah kewenangan dan regulasi kebijakan, Tim Teknis Perizinan Perangkat Daerah masih belum bekerja secara maksimal sehingga Standar Pelayanan Publik belum memenuhi target yang diharapkan;

c) Belum adanya ***front office*** dan ***back office*** yang memadai pada gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas sehingga pemohon yang hendak mengurus perizinannya langsung dapat masuk ruangan pelayanan, hal ini sangat berpengaruh negatif bagi petugas yang menerima dan memeriksa berkas permohonan tersebut;

d) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP. Dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang, Idealnya Setiap ***front office(FO)*** adalah **2** orang dan ***back office (BO)*** **4** orang**.** Hal ini ditambah dengan Pelayanan di Gedung ***MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) Kabupaten Gunung Mas*** di Pasar Baru Kuala Kurun sehingga diharapkan ditambah

lagi Pegawainya 2 x lipat menjadi FO = **4** orang dan BO = **8** orang secara perhitungan keseluruhan untuk **2** lokasi Kantor Perizinan Terpadu**.** Hal ini mengakibatkan pegawai bekerja rangkap, dan lemahnya kemampuan dalam memenuhi SOP dalam kecepatan pengurusan perizinan berusaha;

e) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik di Kantor DPMPTSP dan Kantor MPP Kabupaten Gunung Mas sehingga menurunkan minat masyarakat untuk mengurus perizinan berusahanya;

f) Peraturan Perizinan yang tumpang tindih dan Peraturan Perizinan belum mencakup keseluruhan wewenang yang diperlukan untuk mengeluarkan kemampuan kemudahan dalam penguruan perizinan berusaha;

g) Belum dipetakannya peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perizinan yang ada saat ini (*Pusat Update Data Base*);

h) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha;

i) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perizinan berusaha beserta persyaratan-persyaratannya yang dilakukan secara mandiri melalui HP atau Komputer pemohon;

j) Digitaliasi pengurusan perizinan berusaha yang dirasakan masih belum menyeluruh disetiap sektor pelayanan di PTSP dan di MPP.

II.3.2. SOLUSI

a) Adanya kejelasan dan kerelaan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan dari Perangkat Daerah Teknis kepada DPMPTSP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b) Setiap Instansi/ Perangkat Daerah teknis terkait izin menempatkan tenaga teknisnya pada untuk ditempatkan di ***back office*** DPMPTSP, sehingga koordinasi dan mekanisme pelayanan dapat berjalan seperti yang diharapkan;

c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas mengusulkan peremajaan sarana prasaran khusus terkait kemudahan pelayanan perizinan berusaha, yang dilengkapi dengan saran

dan prasarana digitalisasi seperti MPP digital / PTSP Layanan Digital Mandiri sehingga dapat mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha secara maksimal dan tepat waktu.

d) Penambahan jumlah sumber daya manusia (PNS, PPPK dan PTT/honorer) terutama pada FO dan BO di pelayanan PTSP dan Mall MPP;

e) Pembiayaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari APBD agar dapat ditambahkan terutama dalam hal penambahan sarana prasarana kantor dan Belanja Pegawai untuk menambah kemampuan kecukupan pembiayaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kemudahan pelayanan perizinan berusaha;

f) Menyusun peraturan bupati yang mengatur pelimpahan wewenang dari Perangkat Daerah teknis kepada DPMPTSP;

g) Mengumpulkan dan memetakan peraturan-peraturan yang sudah ada dan sudah tidak relevan lagi serta membuat usulan perubahan peraturannya untuk memberikan payung hukum bagi Perangkat Daerah untuk mengeluarkan perizinan;

h) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis untuk melakukan pelayanan perizinan dengan metode jemput bola karena partisipasi aktif masyarakat dalam hal mengurus perizinan masih rendah;

i) Informasi perizinan kepada masyarakat luas dapat disampaikan melalui brosur, pamflet dan sosialisasi mengenai perizinan tersebut dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah teknis terkait izin, selain itu masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui situs resmi kabupaten gunung mas.

j) Membangun sistem pelayanan digital dalam pengurusan pendaftaran perizinan dan non perizinan secara digitalisasi/online, baik dikantor PTSP maupun di Mal Pelayanan Publik.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program usulan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini *belum ada atau pun usulan* dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas / Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dalam pengusunan Anggaran DPMPTSP tidak dijumpai Dana Aspirasi dari DPRD.

Usulan kegiatan yang ada berasal dari DPMPTSP Provinsi untuk mensinkronisasikan program kegiatan yang terkait dengan investasi daerah yaitu partisipasi promosi investasi daerah. Partisipasi promosi daerah di luar daerah dalam satu tahun minimal 2 (dua) kali yaitu pada Kalteng Expo dan Regional Investment Forum, namun dana Anggaran yang terbatas akan dipusatkan pada program Nasional yang menginginkan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini telah dilaksanakan sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Tujuan diselenggarakannya MPP adalah untuk (1) Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. (2) Meningkatkan daya saing dan (3) memberikan kemudahan berusaha.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini harus dilakukan secara terarah agar dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkandalam hal ini dapat diuraikan antara lain:

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas antara lain melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kearsipan serta perumusan kebijakan dan program serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 difokuskan dengan tema : *Akselesari Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.

Telaahan Kebijakan Nasional

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Program Dinas
1.	Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Urusan Pilihan : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)		2. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
3.	Program Pendaftaran dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online (OSS-RBA)		3. Program Promosi Penanaman Modal
4.	Perpres RI No.97 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5.	Pepres RI No. 89 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik		5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN** dan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN BERBASIS KOMODITAS UNGGUL**. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Peningkatkan kualitas Hidup Masyarakat;
3. Peningkatkan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas akan menunjang salah satu pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas 2025-2026, dari:

Tema	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*
2025: Pembangunan Infrastruktur Yang berkelanjutan **2026: Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan berbasis Komoditas**	1. Peningkatan kualitas SDM Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing 2. Peningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	1.1 Meningkatkan akses dan Kualitas Pendidikan; 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 2.1 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat; 2.2 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat; 2.3 Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah dengan:

1. *Mendorong peningkatan investasi daerah melalui skema promosi peluang investasi daerah yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;*
2. *Mempermudah perizinan dengan memangkas birokrasi perizinan dan penggunaan Sistem Perizinan Elektronik Terpadu baik melalui OSS-RBA (One Single Submission-Risk Based Approach) maupun SIPET (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik).*

Tema	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*
	3. Peningkatkan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	3.1 Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah; 3.2 Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas; 3.3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah: *1. Menjalankan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;* *2. Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;* 3. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penjaminan Mutu baik secara internal maupunn secara eksternal.*		
2025: Pembangunan Infrastruktur Yang berkelanjutan **2026: Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan berbasis Komoditas**	*4. Peningkatan Tata Kelola Pemeritah yang Profesional, Bersih, dan Akuntabel*	4.1 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan; 4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi; 4.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas.
Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas yaitu: *1. Pemenuhan Persyaratan lingkungan sebagaimana terdapat pada OSS bagi pemohon perizinan baru dan perpanjang;* *2. Menjalankan pengawasan Bersama Perangkat Daerah Teknis terhadap Pelaksanaan Perizinan yang ada terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan;* *3. Menjalankan kebijakan Satu Peta terkait investasi daerah.*		

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas dengan sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka DPMPTSP menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan dengan perbandingan Program Kegiatan Tahun Berjalan (2024) sebagai Berikut:

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**2.18**	**URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL**	**7.049.435.253,00**	**7.990.547.307,00**	**7.049.435.253,00**
I	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.284.311.443,00**	**6.294.408.201,00**	**5.284.311.443,00**
1.	**01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**14.652.400,00**	**17.301.000,00**	**14.652.400,00**
1	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.027.500,00	4.027.400,00	4.027.500,00
2	01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.700.000,00	2.550.000,00	1.700.000,00
3	01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4	01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5	01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
7	01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	4.357.600,00	1.700.000,00
2.	**01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.479.323.928,00**	**2.504.800.289,00**	**2.479.323.928,00**
1	01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.845.928,00	2.500.322.289,00	2.474.845.928,00
2	01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
3.	**01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
1	01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	**01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**178.894.500,00**	**194.530.500,00**	**178.894.500,00**
1	01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.652.500,00	87.788.500,00	91.652.500,00
2	01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.242.000,00	106.742.000,00	87.242.000,00
5	**01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**457.642.965,00**	**722.682.725,00**	**457.642.965,00**
1	01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.481.750,00	4.481.750,00	4.481.750,00
2	01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.323.000,00	164.498.000,00	107.323.000,00
3	01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.230.000,00	21.230.100,00	21.230.000,00
4	01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	6.299.700,00	6.796.500,00	6.299.700,00

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Peraturan Perundang-undangan			
5	01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	68.107.190,00	66.107.190,00	68.107.190,00
6	01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.272.000,00	38.758.000,00	14.272.000,00
7	01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.986.200,00	404.940.300,00	218.986.200,00
8	01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.943.125,00	15.870.885,00	16.943.125,00
6	**01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.500.000.003,00**	**2.140.799.267,00**	**1.500.000.003,00**
1	01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
2	01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3	01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.003,00	2.140.799.267,00	1.500.000.003,00
7	**01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**360.152.920,00**	**447.874.058,00**	**360.152.920,00**
1	01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.750.500,00	67.750.500,00	67.750.500,00
3	01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.978.100,00	33.978.100,00	33.978.100,00
4	01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.024.320,00	343.745.458,00	256.024.320,00
8	**01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**287.904.727,00**	**259.171.362,00**	**287.904.727,00**
1	01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.980.600,00	209.180.600,00	169.980.600,00
2	01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
3	01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.924.127,00	49.990.762,00	117.924.127,00
9	**01.2.13**	**Penataan Organisasi**	**4.040.000,00**	**5.540.000,00**	**4.040.000,00**
1	01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.040.000,00	3.540.000,00	2.040.000,00
II	**02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**121.604.700,00**	**159.566.700,00**	**121.604.700,00**
1	**02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.2.01.0001	*Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	0,00	0,00	0,00
2	**02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi**	**121.604.700,00**	**159.566.700,00**	**121.604.700,00**

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Investasi Kabupaten/Kota			
1	02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.473.700,00	76.698.700,00	54.473.700,00
2	02.2.02.0002	*Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**	0,00	0,00	0,00
3	02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	67.131.000,00	82.868.000,00	67.131.000,00
III	**03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**472.594.950,00**	**408.043.918,00**	**472.594.950,00**
1	**03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**472.594.950,00**	**408.043.918,00**	**472.594.950,00**
1	03.2.01.0001	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	289.121.310,00	234.538.278,00	289.121.310,00
3	03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	183.473.640,00	173.505.640,00	183.473.640,00
VI	**04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**570.139.900,00**	**527.744.316,00**	**570.139.900,00**
1	**04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**570.139.900,00**	**527.744.316,00**	**570.139.900,00**
1	04.2.01.0001	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	04.2.01.0002	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penananaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	04.2.01.0003	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	314.122.540,00	293.711.464,00	314.122.540,00
5	04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	83.495.820,00	89.304.864,00	83.495.820,00
6	04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	172.521.540,00	144.727.988,00	172.521.540,00
V	**05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**537.604.440,00**	**548.842.528,00**	**537.604.440,00**
1	**05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**537.604.440,00**	**548.842.528,00**	**537.604.440,00**

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	*05.2.01.0001*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	*05.2.01.0002*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	*05.2.01.0003*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	114.043.800,00	114.043.800,00	114.043.800,00
5	05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	272.789.440,00	299.870.328,00	272.789.440,00
6	05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	150.771.200,00	134.928.400,00	150.771.200,00
IV	**06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**63.179.820,00**	**53.853.864,00**	**63.179.820,00**
1	**06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**63.179.820,00**	**51.941.644,00**	**63.179.820,00**
1	06.2.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
2	06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.179.820,00	51.941.644,00	63.179.820,00
		TOTAL	***7.049.435.253,00***	***7.990.547.307,00***	**7.049.435.253,00**

Ket:
***Kegiatan Baru**
***Kegiatan yang dihapus**

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA

IV. 1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, Sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

IV.1.1. Sasaran

Sasaran strategis dalam upaya pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 antara lain :

1. **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.**

Dalam penjabarannya sasaran stategis diatas dapat dirasakan dukungan melalui hal-hal antara lain:

a. *Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas*. Pada tahun 2018 saat penyusunan Renja TA.2019, sejumlah kewenangan yang masih melekat pada Perangkat Daerah sudah dilimpahkan kepada DPMPTSP dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas namun masih ada beberapa wewenang yang belum diberikan kepada DPMPTSP, hal ini akan berpengaruh pada percepatan pelaksanaan perizinan berusaha yang lebih terintegrasi;
b. *Tersedianya tempat pelayanan perizinan satu atap yang nyaman*. Kenyataannya hingga saat ini, tempat pelayanan masih belum maksimal dari segi kenyaman dan kecepatan dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada;

c. *Meningkatnya kinerja aparatur DPMPTSP dengan sarana dan prasarana yang memadai*. Kinerja aparatur dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana masih stagnan dikarenakan sarana dan prasarana penunjang kinerja masih minim dan belum optimal;

d. *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan publik*. Pelayananan yang jujur dan transparan sudah dilakukan oleh DPMPTSP dengan menghindari praktik percaloan dan gratifikasi;

e. *Meningkatnya Nilai Investasi Daerah*. Nilai Investasi Daerah yang terus ditingkatkan dengan adanya pembaruan perizinan dan bertambahnya jumlah investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);

f. *Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional*. Jumlah investor yang berskala nasional menjadi tantangan tersendiri karena minimnya infrastruktur didaerah serta beberapa perizinan strategis terutama di bidang pertambangan dan kehutanan telah diambil alih oleh PEMDA Provinsi.

IV.1.2. Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Strategi yang dirumuskan adalah **Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi**, dalam upaya antara lain :

a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan DPMPTSP

Penetapan strategi ke belakang yang dimaksud adalah menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan peizinan di Kabupaten Gunung Mas.

b. Strategi Integrasi ke Depan

Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan perizinan yang handal profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional DPMPTSP.

c. Strategi Penguatan ke Dalam

Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi DPMPTSP.

IV.1.3. Kebijakan

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan tata Kelola Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi;**
2. **Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik**;

Penjabaran kebijakan diatas, dapat dilakukan dalam upaya antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima;
2. Meningkatkan kompentensi SDM baik dalam teknis pelayanan dengan sarana dan prasarana yang mencukupi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Tabel Pencapaian Sasaran, Strategi dan Kebijakan berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2022 Sampai Dengan TA. 2024

No	Kelompok	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Sasaran**			
	a. Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas;	*	***	***
	b. Tersedianya tempat pelayanan perizinan satu atap yang nyaman;	*	*	**
	c. Meningkatnya kinerja aparatur DPMPTSP dengan sarana dan prasarana yang memadai;	*	*	**
	d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan publik;	***	***	***
	e. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah;	*	*	*
	f. Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional.	*	*	*
	g. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;			
	h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.			
2.	**Strategi**			
	a. Integrasi ke Belakang dan Pengembangan DPMPTSP;	**	***	***
	b. Integrasi ke Depan;	*	*	*
	c. Strategi Penguatan ke Dalam.	***	***	***
	d. Percepatan implementasi reformasi birokrasi.			
3.	**Kebijakan**			
	a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;	*	**	**
	b. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang efektif dan Efisien;	**	**	**
	c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset;	**	***	***
	d. Menerapkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	***	***	***
	e. Memberikan Pelayanan Publik yang optimal.	***	***	***
	f. Penguatan tata Kelola Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi;			
	g. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik.			

IV. 2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama PD sebagaimana tercantum dalam Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis SOPD	IKU SOPD	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**1. Jumlah Investor PMDN dan PMA.** **2. Jumlah Investor PMA** **3. Nilai Investasi Daerah** **4. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi**	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal	Perencanaan, Pengumpulan data dan Potensi Investasi	Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi yang terlaksana Jumlah Potensi Investor	2 kali promosi	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Reviu 1 dokumen RUPM/5 tahun
						Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal	Tersedianya aplikasi dan inventarisasi penanaman modal	Jumlah investor yang terinvantarisir di dalam Aplikasi dan Buku Inventarisasi Penanaman Modal	1 laporan/tahun
						Promosi Potensi dan Peluang Investasi	Terlaksananya promosi daerah	Jumlah promosi investasi	2 kali/tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	**5. Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terselesaikan Tepat waktu** **6. Lamanya hari Proses Perizinan** **7. Survey Kepuasan Masyarakat** **8. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan**	3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelayanan terpadu di kecamatan dan Penerbitan Perizinan baik secara manual maupun online	Jumlah Bangunan Masyarakat yang legal	Meningkatnya jumlah perizinan yang terlayani	Pelayanan Perizinan IMB	Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan IMB di Kabupaten Gunung Mas	Jumlah masyarakat yang mengajukan IMB yang terlayani	Berapa pemohon/berapa izin
				Jumlah pelimpahan kewenangan perizinan yang ditangani	Meningkatnya jumlah perizinan	Pelayanan Perijinan Terpadu di Kecamatan	Penerbitan izin dan non perizinan di kecamatan	Jumlah Kecamatan yang terlayani	4 kecamatan per tahun dan jumlah perizinan per tahun
				Persentase Pelayanan Pendaftaran online		Pembuatan Website Perizinan dan Persyaratan Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Online	Jumlah Pelayanan yang terlayani melalui aplikasi pendaftaran online	Website dan Update Website/Tahun (SIPET)

Indikator Kinerja yang memuat Keluaran, Hasil serta Ukuran/Satuan Kegiatan selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA***				**Sekretaris**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA, RENJA Perubahan, RENJA Tahun Depan	Tersedianya Dokumen RENJA, RENJA Perubahan, RENJA Tahun Depan	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Pra RKA	Tersedianya Dokumen Pra RKA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Tersedianya Dokumen DPA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 Persen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anngaran Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anngaran Perangkat Daerah	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris BMD	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Inventaris	2 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Semesteran dan Tahunan	BMD Semesteran dan Tahunan		*Aset*
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Diadakan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Diadakan	45 Stell	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah PNS / ASN / PTT yang memperoleh Peningkatan Disiplin Aparatur yang Berkualitas	2 Orang	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik dan Lampu Listrik	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapannya Kantor yang Diadakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapannya Kantor yang Diadakan	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang dan Cetakan yang Disediakan	Tersedianya Barang dan Cetakan yang Disediakan	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Memadai	Tersedianya Bahan Bacaan yang Memadai	4 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan / Material yang Disediakan	25 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman untuk Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kunjungan Tamu	4 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Disediakan	Tersedianya Perjalanan Dinas yang Disediakan	46 Kali	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Tersediannya Pengadaan Kendaraan Dinas yang Diadakan	1 unit	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	Tersedianya Pengadaan Mebel yang Diadakan	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Diadakan	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Diadakan	1 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	Tersusunnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disediakan dan Jumlah Kendaraan Dinas	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disediakan dan Jumlah Kendaraan Dinas	3024 Liter dan 13 Unit	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
9	**Penataan Organisasi**				
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Bahan Penunjang Reformasi Birokkrasi	Terdapatnya Bahan Penunjang Reformasi Birokkrasi	1 Tahun	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal***
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif**				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dibidang Penaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Honorarium Tim Teknis Investasi	Honorarium Tim Teknis Investasi	1 Tim	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Reviu RUPM yang Disediakan untuk di Implementasikan	Tersedianya Dokumen Hasil Reviu RUPM yang Disediakan untuk di Implementasikan	1 Dokumen	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peta Potensi Investasi PMA dan PMDN	Tersedianya Dokumen Data Peta Potensi Investasi PMA dan PMDN	1 Dokumen	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal***
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Tim Koordinasi Pelayanan, Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Tersedianya Dokumen Laporan Tim Koordinasi Pelayanan, Pengendalian dan Evaluasi Investasi	1 Dokumen	*Sub koordinator Promosi Investasi Daerah*
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investasi Potensi di Bidang Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Investasi Potensi di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	*Sub koordinator Promosi Investasi Daerah*
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi/Website yang Dikembangkan / Dibuat	Tersedianya Aplikasi/Website yang Dikembangkan / Dibuat	1 Aplikasi	*Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Pemenuhan	Tersedianya Dokumen Laporan Pemantauan Pemenuhan	1 Dokumen	*Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Komitmen Perizinan dan Perizinan	Komitmen Perizinan dan Perizinan		
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelesaian Pengaduan terkait Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelesaian Pengaduan terkait Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	*Subkoordinator Informasi dan Pendaftaran*
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan**
1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Kegiatan	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan**
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Periznan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan LKPM/PBS, Perizinan/Non Perizinan, dan PMA/PMDN	Tersedianya Dokumen Laporan LKPM/PBS, Perizinan/Non Perizinan, dan PMA/PMDN	3 Dokumen	*Subkoordinator Pengolahan Data dan Pelaporan*

Berdasarkan program dan kegiatan yang disusun di atas, disajikan Rencana Aksi berdasarkan Target Kinerja (Fisik) masing-masing kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2026 adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
1.	**2.18.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**					
1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	100%
2	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100%	-%	-%	-%	100%
3	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
4	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	-%	-%	-%	100%
5	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
6	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-%	-%	-%	100%	100%
7	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja	-%	-%	-%	100%	100%
2.	**2.18.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-%	-%	-%	100%	100%
3	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-%	50%	-%	50%	100%
3.	**2.18.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
4.	**2.18.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-%	100%	-%	-%	100%
2	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-%	100%	-%	-%	100%
5	**2.18.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15%	15%	15%	15%	60%
4	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15%	15%	15%	15%	60%
5	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15%	15%	15%	15%	60%
6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15%	15%	15%	15%	60%
7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15%	15%	15%	15%	60%
8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	15%	15%	15%	15%	60%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		pada SKPD					
6	**2.18.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-%	-%	-%	100%
2	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100%	-%	-%	-%	100%
3	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-%	-%	100%	-%	100%
4	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50%	-%	50%	-%	100%
7	**2.18.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
8	**2.18.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15%	15%	15%	15%	60%
9	**2.18.01.2.13**	**Penataan Organisasi**					
1	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10%	10%	10%	10%	40%
II	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0%	0%	0%	0%	0%
2	**2.18.02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**					
1	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	10%	10%	10%	10%	40%
III	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi**					

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	15%	15%	15%	15%	60%
VI	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berbasis Resiko	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15%	15%	15%	15%	60%
V	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	10%	10%	10%	10%	40%
3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	10%	10%	10%	10%	40%
IV	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**					
1	2.18.06.2.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15%	15%	15%	15%	60%

Tabel Rencana Capaian Kinerja 2020-2024

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**16,00%**	**34,00%**	**54,00%**	**72,00%**	**100%**
1	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0%	60%	30%	60%	100%
2	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20%	40%	60%	80%	100%
3	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20%	40%	60%	80%	100%
4	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20%	40%	60%	80%	100%
5	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20%	40%	60%	80%	100%
6	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20%	40%	60%	80%	100%
7	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20%	40%	60%	80%	100%
8	01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0%	30%	60%	60%	100%
9	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20%	40%	60%	80%	100%
10	01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20%	40%	60%	80%	100%
11	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0%	0%	0%	0%	100%
12	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20%	40%	60%	80%	100%
13	01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	20%	40%	60%	80%	100%
14	01.20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	20%	40%	60%	80%	100%
15	01.21	Penataan Administrasi Kepegawaian	20%	40%	60%	80%	100%
16	01.22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20%	40%	60%	80%	100%
II	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**8,57%**	**17,14%**	**44,29%**	**64,29%**	**100%**
1	02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0%	0%	100%	0%	100%
2	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0%	0%	30%	60%	100%
3	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0%	0%	0%	50%	100%
4	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20%	40%	60%	80%	100%
5	02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20%	40%	60%	80%	100%
6	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20%	40%	60%	80%	100%
7	02.53	Lanjutan Pembangunan Gedung Baru	0%	0%	100%	100%	100%
8	02.54	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah	0%	0%	0%	50%	100%
III	**03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**12,50%**	**25,00%**	**37,50%**	**37,50%**	**100%**
1	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25%	50%	75%	75%	100%
2	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0%	0%	0%	50%	100%
IV	**05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**100%**
1	05.03	Bimbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0%	0%	0%	0%	100%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	05.05	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal	20%	40%	60%	80%	100%
V	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan**	**16,67%**	**37,50%**	**58,33%**	**79,17%**	**100%**
1	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	20%	40%	60%	80%	100%
2	06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20%	40%	60%	80%	100%
3	06.06	Penyusunan Laporan RENSTRA dan RENJA PD	0%	25%	50%	75%	100%
4	06.07	Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	20%	40%	60%	80%	100%
5	06.10	Penataan dan pelaporan barang inventaris semesteran dan tahunan PD	20%	40%	60%	80%	100%
6	06.20	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)	20%	40%	60%	80%	100%
VI	**15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**0,00%**	**0,00%**	**22,00%**	**44,00%**	**100%**
1	15.05	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
2	15.13	Pengumpulan dan updating data investasi penanaman modal	0%	0%	50%	100%	100%
3	15.14	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	0%	0%	0%	0%	100%
4	15.15	Potensi dan Peluang Investasi	0%	0%	30%	60%	100%
5	15.17	Penyusunan Promosi Investasi Daerah	0%	0%	0%	0%	100%
VII	**17**	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**100%**
1	17.XX	Inventarisasi dan Penataan Aset PD	100%	100%	100%	100%	100%
2	17.119	Pengadaan Aplikasi Penatausahaan Persediaan-PD	100%	100%	100%	100%	100%
3	17.150	Penyusunan Laporan Pajak PPh21, PPh 22, PPh 23, dan PPn	0%	0%	0%	0%	100%
VIII	**18**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi**	**0%**	**0%**	**15%**	**30%**	**100%**
1	18.01	Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
2	18.02	Sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
3	18.03	Penertiban Perizinan di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	100%
4	18.05	Rekonsiliasi Data Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	0%	0%	0%	0%	100%
X	**18**	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri**	**25%**	**25%**	**50%**	**75%**	**100%**
1	18.23	Pameran Pembangunan	25%	25%	50%	75%	100%
IX	**37**	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**9,23%**	**18,46%**	**32,31%**	**53,85%**	**100%**
1	37.01	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP*	0%	0%	0%	50%	100%
2	37.03	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	0%	0%	30%	60%	100%
3	37.04	Pelayanan Perizinan Terpadu di Kecamatan	20%	40%	60%	80%	100%
4	37.05	Sosialisasi Prolegda PTSP	100%	100%	100%	100%	100%
5	37.06	Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik	0%	0%	0%	50%	100%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6	37.07	Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik	0%	0%	0%	100%	100%
7	37.08	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Gunung Mas	0%	100%	100%	100%	100%
8	37.09	Pendataan Potensi Perizinan di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	100%
9	37.10	Pelayanan Perijinan IMB	0%	0%	30%	60%	100%
10	37.11	Penyusunan SOP Perizinan	0%	0%	100%	100%	100%
11	37.12	Evaluasi Pelayanan Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
12	37.13	Penyusunan Laporan/Pemuktahiran Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
13	37.14	Penatausahaan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
		Rata-rata	**16,46%**	**24,38%**	**41,01%**	**56,25%**	**100%**

BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

V.1. Dana Indikatif Tahun 2025

Sumber dana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 yang berjumlah 41 kegiatan, semua berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan 2 sub kegiatan berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Pemerintah Pusat.

V.2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

V.2.1. Belanja Langsung

Untuk Tahun +1 dan seterusnya, dengan memperhatikan angka inflasi nasional dan provinsi Kalimantan Tengah serta pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah maka rata-rata kegiatan pada Belanja Langsung diperkirakan naik sebesar 7% dari tahun Rencana (2025).

Selain itu pertimbangan lainnya adalah adanya komitmen bersama KPK, Ombudsman serta BKPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan berusaha dan pengeluaran izin melalui sistem elektronik yang memerlukan biaya tambahan berupa pelatihan, perawatan, pengadaan sarana serta biaya lain yang melekat pada kegiatan terkait.

V.2.2. Belanja Tidak Langsung

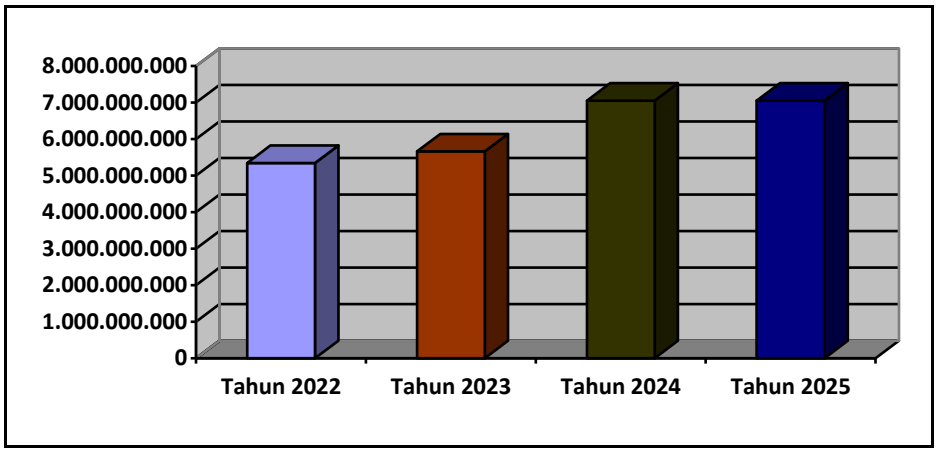
Untuk Belanja tidak Langsung khususnya belanja Gaji PNS diperkirakan tidak akan ada kenaikan mengikuti kebijakan pemerintah pusat namun tetap mengikuti trend tahun sebelumnya dimana terdapat gaji 13 (ketiga) dan ke 14 (keempat) belas.

Mengacu pada Pagu Indikatif belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dikeluarkan BAPPEDARIDA Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar **Rp.7.049.435.253,00** maka pada tahun ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan pagu indikatif belanja langsung tahun sebelumnya.

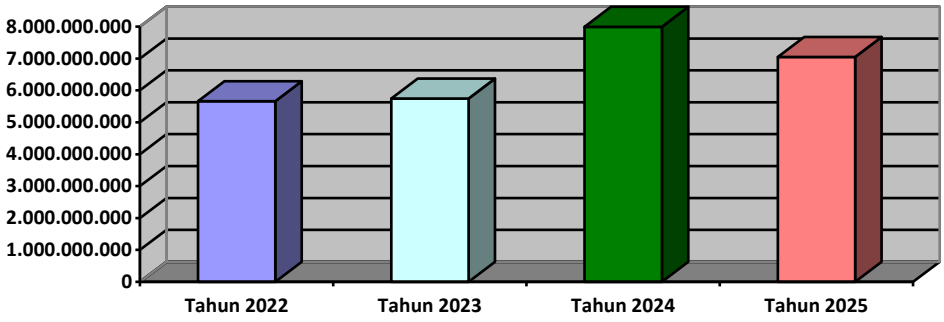
Berikut adalah tabel perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Tahun 2022 s.d 2025:

Tahun Anggaran	2022	2023	2024	2025
Pagu Indikatif	5.346.552.717,00	5.661.432.660,00	**7.049.435.253,00**	**7.049.435.253,00**
Pagu Anggaran	5.661.432.660,00	5.740.999.778,00	**7.990.547.307,00**	**7.049.435.253,00**

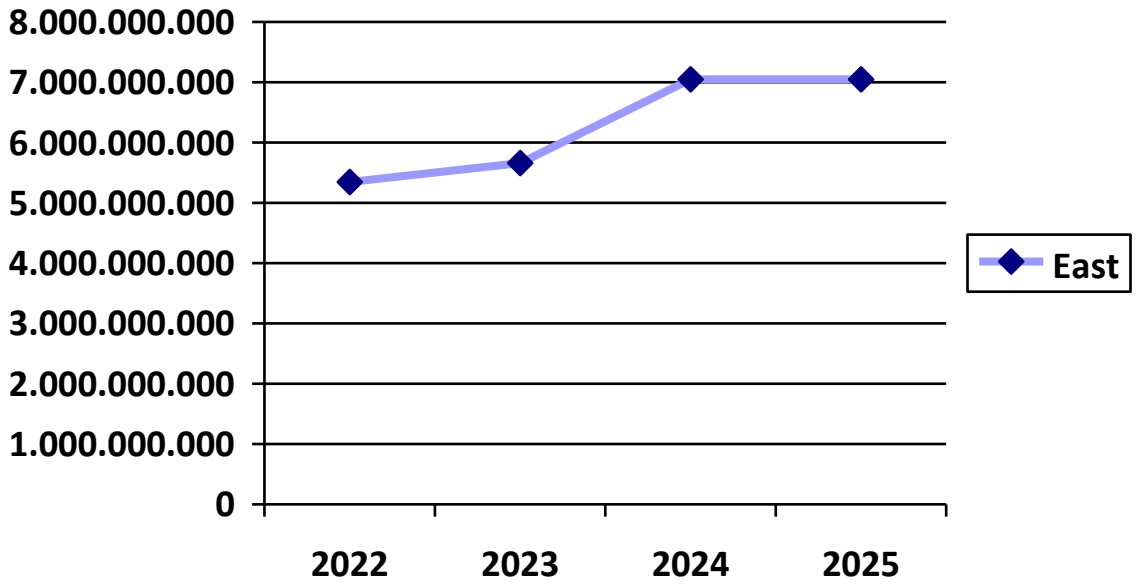
Grafik Pagu Indikatif Tahun 2022-2025



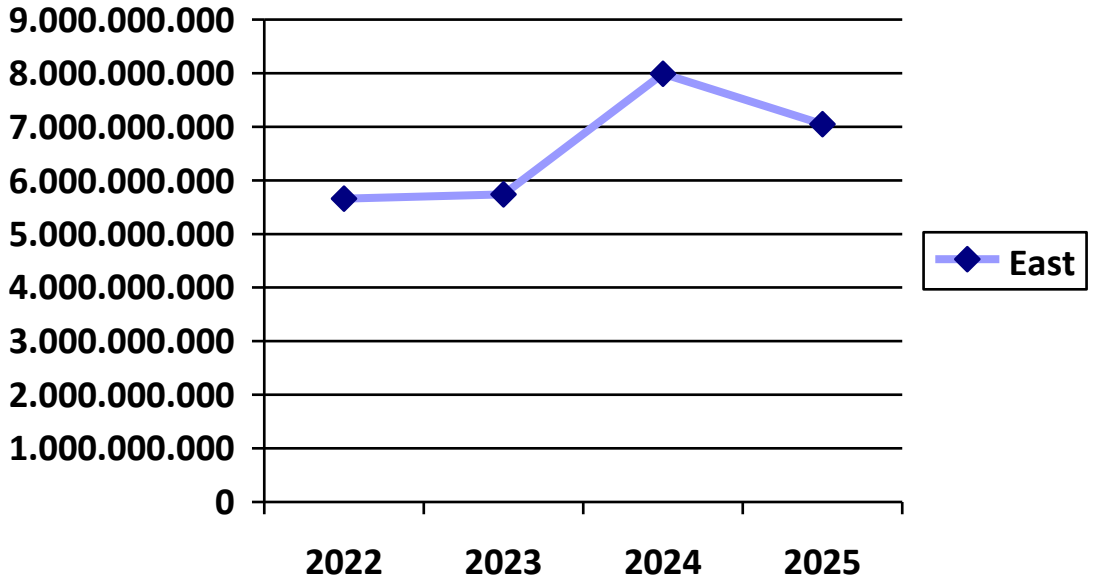
Grafik Pagu Anggaran Tahun 2022-2025



Grafik Pagu Indikatif Tahun 2022-2025



Grafik Pagu Anggaran Tahun 2021-2024



Pagu Indikatif 2021-2025 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kinerja aparatur dengan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani		***URUSAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL***				***3.380.357.111,00***												
			01	***PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN***				***857.289.820,00***												
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai		650	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terlayani		3	43.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan Kebersihan		17	12.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis peralatan yang terawat		4	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK		40	38.996.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan		3	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			12	Penyediaan instalasi listrik	Jumlah peralatan listrik		1	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		1	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik		2	18.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		4	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		30	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah PTT		19	597.089.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		18	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kabupaten Gunung Mas
			21	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	**02**	***PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR***																
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan		5	113.295.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		1	8.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		12	4.888.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			54	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Kantor/Rumah	Jumlah paket		1	345.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun

	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prisip penyelenggaraan publik	Jumlah ASN yang terlayani	03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**			1													
			01	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis Pakaian Dinas		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
		Jumlah kursus/ pendidikan	**05**	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR***																
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang terdidik		2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			5	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal	Jumlah ASN yang terdidik		6	29.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
		Jumlah (jenis) Laporan	**06**	***PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN***																
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen		3	3.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen		1	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			06	Penyusunan Laporan Renstra, Renja PD	Jumlah dokumen		3	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			07	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-PD dan DPA PD	Jumlah dokumen		4	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			10	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan PD	Jumlah dokumen		2	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			20	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)	Jumlah dokumen		1	5.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai investasi daerah	**15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**															**PM**	
			5	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen		12	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas
			18	Pameran Expo Dalam Negeri	Jumlah Pameran		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			19	Pendataan Potensi dan Peluang Investasi	Jenis Media		2	74.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			20	Informasi dan Promosi Investasi Daerah	Jumlah Video		1	68.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			21	Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta		12	21.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)**	**18**	***Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi***																
			4	Penyusunan Pelaporan Data Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan		4	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi

																				Kalteng
			5	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah kecamatan		12	74.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			6	Pembinaan Penanaman Modal SeKabupaten Gunung Mas	Jumlah kecamatan		12	15.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			8	Penyusunan Pelaporan Investasi Daerah SeKabupaten Gunung Mas	Jumlah dokumen		4	32.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			18	**PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**															**PM**	
			23	Pameran Pembangunan	Jumlah Partisipasi		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kuala Kurun
Mewujudkan perizinan terpadu satu pintu	Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas	Jumlah Regulasi yang dihasilkan	**37**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**															**PTSP**	
			1	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP	Nilai IKM dan Pelaporannya		2	10.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kuala Kurun
	Kemudahan Pelayanan	Jumlah kecamatan dan masyarakat yang terlayani	4	Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang terlayani		12	46.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			8	Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan		1	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			9	Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			10	Pelayanan Perijinan IMB	Jumlah kecamatan yang terlayani		12	34.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			11	Pengembangan Evaluasi dan Pendataan Potensi Perizinan di Kecamatan	Jumlah dokumen		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			13	Informasi Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan	Jenis materi informasi		2	14.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			14	Penerapan Aplikasi Perizinan Sektoral Berbasis Sistem Aplikasi Elektronik Terpadu	Jumlah Aplikasi		1	25.400.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kuala Kurun
			15	Pelayanan Perizinan Sektor Perindustrian Perdagangan dan Sektor Lainnya	Jumlah Kecamatan yang terlayani		12	21.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			16	Pelaksanaan PTSP Prima	Jumlah Laporan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng

Pagu Indikatif 2021-2025 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kinerja aparatur dengan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani	**2.18**	***URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL***						**4.611.904.253,00**		**5.346.552.717,00**		**5.740.999.778,00**		**7.049.435.253,00**	
			2.18.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***						**47.192.740,00**	-	**4.008.704.167,00**	-	**4.038.185.294,00**	-	**5.284.311.443,00**	
			2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					-	**47.192.740,00**		**13.802.500,00**		**13.802.400,00**		**14.652.400,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1	4.027.500,00	1	4.027.500,00	1	4.027.400,00	1	4.027.400,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3	35.515.240,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				0	0	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					-	**2.344.945.842,00**	-	**2.260.865.253,00**	-	**2.354.118.295,00**	-	**2.479.323.928,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan				100	2.294.574.642,00	100	2.256.387.253,00	100	2. 349.640.295,00	100	2.474.845.928,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				2	16.393.200,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				3	33.978.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					-	**18.795.120,00**	-	**2.100.000,00**	-	**2.100.000,00**	-	**1.700.000,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2	18.795.120,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	2	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					-	**23.788.740,00**	-	**203.085.308,00**	-	**108.684.700,00**	-	**178.894.500,00**	Kuala Kurun
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				7	17.500.450,00	5	76.794.018,00	5	41.714.400,00	5	91.652.500,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang				2	6.288.290,00	2	126.291.290,00	2	66.970.300,00	2	87.242.000,00	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					-	**185.988.210,00**	-	**340.246.855,00**	-	**449.867.594,00**	-	**457.642.965,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik				4	1.810.600,00	1	1.810.600,00	1	3.530.000,00	1	4.481.750,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/Paket				6	60.372.400,00	1	104.602.085,00	1	96.080.290,00	1	107.323.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis				2	8.607.200,00	2	11.482.000,00	2	17.090.000,00	2	21.230.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Jenis				4	6.299.700,00	2	6.299.700,00	2	6.596.400,00	2	6.299.700,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				25	55.334.510,00	25	63.080.930,00	1	70.888.304,00	1	68.107.190,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis				4	5.860.800,00	4	5.860.800,00	4	6.468.800,00	4	14.272.000,00	Kuala Kurun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
			2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas/Laporan				46	47.703.000,00	64	147.110.740,00	79	247.213.800,00	79	218.986.200,00	Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis/Paket				-	-	-	-	-	-	1	16.943.135,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					-	**52.482.188,00**	-	**489.369.934,00**	-	**523.809.000,00**	-	**1.500.000.003,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Paket				1	26.984.078,00	1	444.545.500,00	1	523.809.000,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis/Paket				5	26.984.078,00	1	21.916.180,00	0	0,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis/paket				4	16.898.09000	1	15.053.374,00	0	0,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis/Paket				1	8.600.020,00	1	7.854.880,00	1	0,00	1	1.500.000.00300	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**260.401.070,00**		**464.261.192,00**		**462.624.498,00**		**360.152.920,00**	
			2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jenis				12	45.246.000,00	12	44.190.000,00	12	130.482.150,00	12	67.750.500,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				4	14.035.530,00	4	13.750.670,00	4	23.710.000,00	4	33.978.100,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis				15	198.719.540,00	12	403.920.522,00	12	306.032.348,00	12	256.024.320,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**142.630.943,00**		**232.727.525,00**		**123.178.807,00**		**287.904.727,00**	
			2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				14	102.850.130,00	14	85.864.250,00	14	110.658.007,00	14	169.980.600,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket				2	39.780.813,00	1	146.863.275,00	1	12.520.800,00	1	117.924.127,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.13	**Penataan Organisasi**						**1.122.800,00**		**2.245.600,00**		**0,00**		**4.040.000,00**	
			2.18.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen				1	697.800,00	1	1.395.600,00	1	0,00	1	2.000.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1	425.000,00	1	850.000,00	1	0,00	1	2.040.000,00	Kuala Kurun
			2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**0,00**		**184.621.580,00**		**255.982.080,00**		**121.604.700,00**	
			2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**0,00**		**94.783.000,00**		**131.100.000,00**		**0,00**	
			2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				0	0,00	1	94.783.000,00	1	131.100.000,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**						**112.874.480,00**		**89.838.580,00**		**124.882.080,00**		**121.604.700,00**	
			2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1	90.309.280,00	1	55.699.580,00	1	40.811.630,00	1	54.473.700,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta/Dokumen				1	22.565.200,00	50	34.139.000,00	50	84.070.450,00	1	67.131.000,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**463.319.840,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**472.594.950,00**	
			2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan**						**463.319.840,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**472.594.950,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
				Daerah Kabupaten/Kota													
			2.18.03.2.01.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen				1	249.945.140,00	1	124.621.943,00	1	73.110.200,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis/Dok-umen				3	177.552.100,00	1	24.042.500,00	1	206.378.432,00	1	289.121.310,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03.2.01.03	Penyusunan Stategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	183.473.640,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**394.642.440,00**		**493.549.556,00**		**514.315.480,00**		**570.139.900,00**	
			2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Periznan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**394.642.440,00**		**493.549.556,00**		**514.315.480,00**		**570.139.900,00**	
			2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi				1	218.907.320,00	1	271.848.312,00	1	264.601.188,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen				1	123.672.880,00	1	149.854.928,00	1	167.284.528,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen				1	52.062.240,00	1	71.846.316,00	1	82.429.764,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	314.122.540,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	83.495.820,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Keg.Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	172.521.540,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**412.148.630,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**537.604.440,00**	
			2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**412.148.630,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**537.604.440,00**	
			2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan				1	101.379.440,00	1	0,00	1	129.674.428,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan				7	195.647.490,00	1	294.630.716,00	1	388.396.400,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan				1	115.121.700,00	1	171.290.847,00	1	81.103.600,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya	Keg Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	114.043.800,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Kegiatan Usahanya	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	217	272.789.440,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Keg Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	150.771.200,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**151.571.210,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**63.179.820,00**	
			2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang**						**151.571.210,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**63.179.820,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
				Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan **Non Perizinan** Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen				3	151.571.210,00	4	45.091.408,00	4	53.853.864,00	3	63.179.820,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen				0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	63.179.820,00	Kabupaten Gunung Mas

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, yang memuat program dan kegiatan prioritas dan pagu dana indikatif, merupakan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas untuk menyelenggarakan pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Kebijakan Umum APBD dan prioritas yang dimuat dalam dokumen ini merupakan penjabaran rinci dan Tema Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, semoga apa yang telah digariskan dalam Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Dengan semangat **"HABANGKALAN PENYANG KARUHEI TATAU"** kita bangun dan jaga Kabupaten Gunung Mas yang terencana, aman, tertib dan indah untuk menyongsong hari depan yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada saran dan masukan demi suksesnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini, kami dengan keadaan terbuka untuk menerimanya.

Kuala Kurun, 1 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunung Mas

HARPASENO, S.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751110 200604 1 022

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN GUNUNG MAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat disusun.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan Kerja yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi Daerah. Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan saran, ide, dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan selanjutnya.

Semoga harapan kita, adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, akan dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2024. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai serta berguna bagi kita semua.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

RUBY HARIS, S.T.

Pembina Tk. I

NIP. 19830507 200604 1 017

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	**PENDAHULUAN**	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	4 - 7
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	8 - 25
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25 - 30
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	30 - 36
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
	2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	
	3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional	82 - 92
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	92 - 94
	3.3. Program dan Kegiatan	94 - 141
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	142
BAB V	**PENUTUP**	143-145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja PD disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-lima dalam periode RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024. Renja PD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, schingga diharapkan ada keterpaduan dan sinkronisasi antara perencanaan daerah dan perencanaan PD.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun 2023 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas terbentuk tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas serta Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 58 Tahun 2019, memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 **yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)".**

Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ini, selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan dalam pelayanan masyarakat tahun 2025, serta menjadi dasar penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2025. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Renja-PD akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD tahun anggaran 2025.

1.2. Landasa Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 58 Tahun

2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas ini, adalah :

1. Sebagai Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Sebagai bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja tahun 2024;
4. Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2024 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Memuat gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses pembandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, PT maupun dari perangkat daerah yang ditujukan kepada perangkat daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari

penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor .. Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2021, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 12.322.501.124 dengan rincian terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.210.071.504 (tiga milliar dua ratus sepuluh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus empat rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.112.429.620 (sembilan milliar seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratu sdua puluh rupiah) dengan komponen pelaksanaannya 15 (lima belas) program dan 40 (empat puluh) kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realiasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dan realisasi tahun berjalan sampai dengan bulan Juni 2022 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dan pencapaian Renstra OPD seperti tercantum dalam **Tabel T-C.29.** di bawah ini :

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)
Kabupaten Gunung Mas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* /Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kelurarn Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2021			Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(outcomes)* /Kegiatan *(output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2021	Tinghat Realisasi (%)						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 202	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	1	2	3	4	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 10	Komunikasi dan Informatika							2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor						2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kelancaran penunjang administrasi dan operasional perkantoran				
								2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan				

																			SKPD				
2	10	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan	4940	507	960	5900	615 %	2	16	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan	4940	405	6303	128%
					Resi Pengiriman Surat	130	23	20	150	750 %							Jumlah Kg/Resi Pengiriman Surat	130	60	210	162%
2	10	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Bulanan Belanja (Air, Listrik dan Telpon/Faksimile)	15	3	3	18	600 %	2	16	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening Tagihan Bulanan (Air, Listrik dan Telpon/Faksimile)	15	3	3	20%
2	10	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Macam Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	107	11	19	126	663 %	2	16	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor	107	14	140	131%
2	10	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Macam Peralatan Kerja dan Mesin Kantor	58	6	11	69	627 %	2	16	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kerja dan Mesin Kantor	58	11	80	138%
											2	**16**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum SKPD**					
2	10	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	215	20	43	258	600 %	2	16	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	215	43		
2	10	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap	1500	300	300	1800	600 %	2	16	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Stopmap Dinas	1500	325		
					Jumlah Penggadaan Fotocopy	8500000	3193400	2080000	1068400	513 %							Jumlah Penggandaan (fotokopy)	5500000	5700		
2	10	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Alat Listrik dan Material Elektrikal	30	6	6	36	600 %	2	16	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30	5		
2	10	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	4	16	76	475 %	2	16	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	13		

				Kantor																
2	1 0	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKH yang tersedia	30	6	6	36	600 %	2	16	0 1	2,0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis/Eksemplar Bahan Bacaan	30	5		
2	1 0	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM tersedia	16 26 0	29 52	32 52	19 51 2	600 %	2	16	0 1	2,0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak	16 26 0	80		
2	1 0	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum Rapat Jumlah Makan dan Minum Tamu	1500 0		30 0	14 67		2	16	0 1	2,0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Dan Minum yang disediakan	1500 0	3 8 2		
2	1 0	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Penugasan Dinas ke Luar Daerah	18 5	20	30	21 5	717%	2	16	0 1	2,0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam Daerah	18 5	11		
																	Jumlah Penugasan Dinas ke Luar Daerah		9		
2	1 0	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi /Teknis Perkantoran	Jumlah Orang yang diberikan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	19 0	35	38	22 8	600 %											
2	1 0	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah*)	Jumlah Penugasan Dinas ke Dalam Daerah	12 5	14	18	14 3	794 %											
2	**1 0**	**02**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**						**2**	**10**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD**				
2	1 0	02	5	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	11		2	13												

2	10	02	11	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan /Rumah*)	Jumlah Penataan Halaman Gedung Kantor	1					2	16	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3			0%
2	10	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan	68	10	11	21	191 %	2	16	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68	10	31	46%
2	**10**	**03**		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase pegawai disiplin**						**2**	**16**	**01**	**2,02**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terwujudnya ASN/PTT disiplin dan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis**				
2	10	03	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT																
2	10	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Harian ASN dan PTT	195	61	61	61	100 %	2	16	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PTT	195	62	65	33%
2	**10**	**05**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis**																
2	10	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Penugasan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71	7	13	13	100 %	2	16	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Penugasan Pemenuhan SOM	71	9	29	41%
	11			**Program**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat**											**Perencanaan,**	**Terwujudnya Penyusunan Dokumen Laporan RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA**				

2	**0**	**06**		**Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**waktu/**						**2**	**16**	**01**	**2,01**		**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**SKPD, Penyusunan DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				
2	10	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan	15					2	16	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	15	5		
2	10	06	05	Penyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD *)	Jumlah Penyusunan Laporan	20	12	4	4	100 %	2	16	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1	17	85%
											2	16	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
											2	16	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
											2	16	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1		
											2	**16**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Laporan Penyusunan Dokumen Keuangan SKPD**				

												2	16	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan Gaji dan Tunjangan	135	27		
2	10	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	10	2	2	2	100 %	2	16	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1	5	50%
2	10	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5	1	1	1	100 %	2	16	01	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan	5	1	3	60%
2	10	06	08	Penyusunan laporan Bulanan Realisasi Anggaran (TEPRA) *)	Jumlah Pelaporan Realisasi Anggaran (TEPRA)	60	12	12	12	100 %													
												2	**16**	**01**	**2,13**		**Penataan Orgnisasi**	**Terwujudnya Penataan Organisasi SKPD**					
												2	16	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan	5	1		
												2	**16**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terwujudnya Administrasi Barang Milik SKPD**					
												2	16	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	5	1		
2	10	15		**Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa**	**Persentase peningkatan penyebaran informasi publik serta penyebaran jaringan internet dan intranet**							**2**	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi**					
												2	**16**	**0**	**2,0**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan**	**Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan**					

													3	1		**Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jaringan melalui Pengelolaan TIK**				
2	10	15	02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah lokasi yang terhubung jaringan akses internet dan intranet	58		38	38		2	16	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Terintegrasi (Internet dan Intranet)	190	38	114	197%
2	10	15	06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3		1	1													
2	10	15	10	Bimbingan Teknis Kelompok Informasi Masyarakat*)	Jumlah Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)																	
2	10	15	17	Pembangunan Tiang dan Antenna Radio SSB Kecamatan*)	Tersedianya Perangkat dan Peralatan Radio SSB Kecamatan	8																
2	10	15	18	Pembuatan website LPPL Radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh*)	Terlaksanya pembuatan Website LPPL radio Hamauh dan Streaming LPPL Radio Hamauh	2	2															
2	10	15	19	Penambahan Website Sub Domain SKPD*)	Tersedianya Website Sub Domain SKPD						2	16	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain Pemerintah Kabupaten Gunung Mas		38	38	#DIV/0!
											2	**16**	**03**	**2,02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan e-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	58	38	38	#DIV/0!
2	10	15	08	Sosialisasi Masyarakat cerdas IT dan Pemberdayaan	Terlaksananya Sosialisasi	250					2	16	03	2,0	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Arsitektur SPBE	4	2	2	1%

				Kelompok Informasi Masyarakat*)										2		Kabupaten/Kota					
2	10	15	18	Pembuatan website LPPL Radio Hamasah dan Streaming LPPL Radio Hamasah*)	Terlaksanya pembuatan Website LPPL radio Hamasah dan Streaming LPPL Radio Hamasah	2	2			#DIV/0!	2	16	03	3,02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Sidak dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemkab Gunung Mas	2,75			0%
2	10	15	19	Pemeliharaan Website Sub Domain SKPD*)	Tersedianya Website Sub Domain SKPD						2	16	03	3,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Server dan Perangkat Jaringan Internet/Intranet Pemkab Gumas	20	4	4	#DIV/0!
2	10	15	20	Pengendalian Measure Telekomunikasi *)	Jumlah Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Measure Telekomunikasi	82	16	13	13	100%	2	16	03	3,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	1	1	1%
2	10	15	21	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitasi Gedung Studio Rekaman*)	Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Studio Rekaman	1					2	16	03	3,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi Terintegrasi	5	1	1	100%
2	10	15	24	Pengembangan dan Pengadaan Fasilitas Gedung Studio Rekaman*)	Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Gedung Studio Rekaman	1	0			#DIV/0!	2	16	03	3,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Tatalelola & Perencanaan SPBE Pemkab Gunung Mas	0			0%
2	10	15	25	Pendataan Desa yang tidak bersignal *)	Tersedianya Laporan Dan Data/ Informasi Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Measure Telekomunikasi (Cell Plus)	6	3			#DIV/0!	2	16	03	3,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Lokasi Kegiatan Pemantau, Pemeliharaan dan dan Perbaikan	0	3	3	50%
											2	16	03	3,02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN yang bersertifikat GCIO	10			#DIV/0!
2	10	17		**Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi**	**Peningkatan Ketrampilan dan Wawasan Aparatur pemerintah**																
2	10	17	01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan	Terlaksanannya Pelatihan SDM Bidang Kominfo	2															

				Informasi																		
2	10	18		**Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media**	**Cakupan Penyeboran Informasi pemerintah daerah melalui media massa**						2	16	02			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan Penyeboran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi**				
2	10	18	02	Penyelenggaraan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Konten Media Cetak dan Elektronik/Online	95	24	19	19	100%	2	16	02	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**				
2	10	18	03	Penyebaran Informasi publik media massa institusional*)	Tersedianya media penunjang kegiatan penyebaran informasi melalui media institusional						2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen	1			
2	10	18	06	Penyebaran informasi publik media massa Luar ruangan*)	Tersedia Spanduk, Baliho dan Leaflet	570					2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen	1			
2	10	18	07	Penyebaran informasi publik media massa Radio, TV dan Surat Kabar*)	Jumlah Penyebaran informasi melalui media televisi	5		1	1		2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	1			
2	10	18	08	Peningkatan dan Pengembangan informasi melalui database Sistim Informasi*)	Meningkatnya sewa akses jaringan Bandwith colocation server website dan Maintenance server	1					2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perancangan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen	1			
2	10	18	10	Pemeliharaan, Pengembangan dan Perbaikan Peningkatan dan Pemeliharaan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Terpeliharanya Meningkat Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi komunikasi dan informasi	8	2			#DIV/0!	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Jenis Publikasi Penyebaran Informasi Publik	12	4		
																	Jumlah Publikasi melalui Stasiun LPPL Radio Hamasih	900	300		#DIV/0!
																	Jumlah Publikasi melalui Website Kabupaten, MMC, Website Diskominfosantik, Radio	15	3		#DIV/0!

																	Humoh, Media Sosial (FB Kominfo)				
2	16	18	12	Peningkatan dan Pembinaan Jurnalistik *)	Jumlah Sasaran Peningkatan Wawasan dan Profesionalitas Kejurnalistikan	30	6	6	6	100%	2	16	02	2.01	05	Penyiaran Informasi Publik	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang Disampaikan untuk Publik melalui Aplikasi PPID yang Terintegrasi	150	50		0%
																	Jumlah Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR terintegrasi	72	24		#DIV/0!
											2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Pelaksanaan kunjungan Pers	0	1		#DIV/0!
																	Jumlah Penyelenggaraan Konferensi Pers	0	1		#DIV/0!
																	Jumlah Pertemuan dengan Media	0	1		#DIV/0!
											2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	Jumlah Kegiatan Kemitraan dengan PWI	0	1	1	#DIV/0!
																	Jumlah Kontak dengan Media Elektronik / Penyiaran	15	3	3	#DIV/0!
																	Jumlah Kontak dengan Media Online dan Cetak	51	17	17	#DIV/0!
																	Jumlah Pemberitakan Kemitraan dengan Kelompok / Organisasi Masyarakat	3	1		#DIV/0!
2	19	19		**Program pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika *)**	**Jumlah Cakupan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi**															
2	19	19	03	Pembangunan Infrastruktur Integrasi	Jumlah Titik Jaringan Internet dan Internet yang di Bangun	45		41	41											

				Jaringan *)																
2	10	20		**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi*)**	**Persentase kegiatan pembangunan yang dapat diakses publik**															
2	10	20	01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*)	Jumlah Informasi Publikasi Daerah	36	17			#DIV/0!										
2	10	20	03	Pembinaan dan Pengelolaan Radio	Jumlah Kegiatan yang terkelola dari Radio Pemerintah Daerah	15 00	1	300	300	100%										
2	10	20	15	Penyebaran dan Pengelolaan Informasi Publik *)	Jumlah Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12		2	2											
2	10	20	16	Penyebaran Informasi Publik Media Massa Luar Ruangan *)	Jumlah Barang (Radio) dalam rangka Penyebaran Komunikasi dan Informasi melalui LPPL Radio Hamasih FM	16	4	2	2	100%										
2	10	22		**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah*)**	**Persentase Jumlah Cakupan pemanfaatan dari pengamanan Persandian**						2	21				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					
2	10	22	04	Sosialisasi Urgensi Kesadaran Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Layanan Persandian Bagi Jajaran Pimpinan Daerah dan Pengelola Informasi daerah*)	Terlaksananya Sosialisasi Urgensi Kesadaran Keamanan Informasi dan Pemanfaatan Layanan Persandian Bagi Jajaran Pimpinan Daerah dan Pengelola Informasi Daerah	3					2	21	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Jumlah Cakupan pemanfaatan dari pengamanan Persandian**				
2	10	22	05	Penerimaan SDM Sandi Daerah melalui Keikutsertaan dalam Diklat Teknis Persandian, Pembentukan Sandiman dan Diklat fungsional sandiman*)	Terlaksananya penerimaan SDM Sandi Daerah	10	2	2	2	100%	2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian bagi Pengamanan Informasi**				

2	10	23	06	Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat Keras Persandian, Perangkat Lunak Persandian dan Alat Pendukung Persandian*)	Terlaksana Pemeliharaan dan Perbaikan Perangkat Keras Persandian, Perangkat Lunak Persandian dan Alat Pendukung Persandian	12					2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	2	1		0%
2	10	23	07	Penggunaan Informasi Strategis*)	Terlaksananya Penggunaan Informasi pada tempat/ruangan strategis/kritis/penting secara berkala	75	2	15	15	100%	2	21	03	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penggunaan Perumahan SDM	15	5		0%
2	10	23	09	Penyelenggaraan Persandian Daerah*)	Terlaksanya Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah	10	8			#DIV/0!	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah atau Sistem Elektronik yang telah melaksanakan Keamanan Informasi	6	2		0%
											2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi	6	2		#DIV/0!
2	**10**	**23**		**Program Pembinaan Layanan Elektronika dan Teknologi Informasi *)**	**Persentase Jumlah Cakupan Layanan dan pengelolaan SPSE**						**2**	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten**				
2	10	23	01	Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik *)	Terkoneksinya Jaringan Internet pada LPSE Kabupaten Gunung Mas	2	1			#DIV/0!	2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Jaring Komunikasi Sandi	2	1		0%
2	10	23	02	Pengelolaan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *)	Terlaksanya Pengelolaan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	75	15			#DIV/0!												
2	10	23	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana LPSE *)	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana LPSE Kabupaten Gunung Mas	5	1			#DIV/0!												
2	10	24		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media**	**Jumlah Cakupan Pandusa hukum Impelementasi e-Government**																	

				Elektronik *)						
2	1 0	2 4	0 1	Pengkajian dan Pengembangan Tata Kelola E- Government *)	Terlaksananya kegiatan penilaian dokumen Masterplan e-Government	5	1	1	1	100%
2	1 0	2 5		**Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik *)**	**Persentase PD dan Lembaga Komunikasi Publik yang memiliki layanan informasi yang dikelola secara aktif**					
2	1 0	2 5	0 1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan untuk publik	250	40	50	50	100%
2	1 0	2 5	0 2	Pengelolaan Website *)	Jumlah Website/Sub Domain	40		4	4	
2	1 0	2 6		**Program Aplikasi dan Informatika *)**	**Cakupan penerapan E-Gov**					
2	1 0	2 6	0 1	Pengelolaan E Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)	Jumlah Penugasan Peningkatan SDM dan Dokumen Informasi e-Government	40	5	8	8	100%

4	**0 3**	**1 5**		**Program Pengembangan Data/ Informasi**	**Tersedianya Buku Selayang Pandang dan Buku Database Perencanaan Pembangunan Daerah**						**2**	**2 0**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**				
4	0 3	1 5	0 5	Penyusunan Profil Daerah	Terlaksanya Penyusunan dan terbitnya Buku Selayang Pandang Kab Gunung Mas	320	300				2	2 0	0 2	2.0 1		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten**				
4	0 3	1 5	0 6	Penyusunan Data Base Pembangunan Daerah*)	Terlaksanya Penyusunan dan terbitnya Buku Database Perencanaan Daerah	120	100				2	20	0 2	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Buku Selayang Pandang	400	1 0 0	200	167%
2	**1 4**			**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistk**							2	20	0 2	2.0 1	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	12	3	3	#DIV/0!

2	**14**	**18**		**Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah**	**Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah**						2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen				#DIV/0!
2	14	18	01	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Terlaksanya Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	12	3			#DIV/0!	2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen				0%
2	14	18	05	Koordinasi dan Konsultasi regional PDRB dan statistik daerah*)	Terlaksanya Koordinasi dan singkronisasi penyiapan PDRB Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	12															
2	14	18	06	Penyusunan Profil Kabupaten*)	Terwujudnya dan terbitnya Buku Profil Kabupaten Gunung Mas	150	40			#DIV/0!											
2	14	18	07	Penyusunan dan Pengumpulan data SSPD*)	Tersedia dan terwujud data hasil pembangunan Kab. Gunung Mas	2															
2	14	18	08	Penyusunan dan Pengumpulan data Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas*)	Buku Kajian Ekonomi Regional PDRB Kabupaten Gunung Mas tahun 2012- 2015	80	40			#DIV/0!											
2	14	18	11	Penyusunan dan Pengumpulan Profil Kesejahteraan Rakyat*)	Buku Profil Kesejahteraan Rakyat	65															
2	14	18	15	Sosialisasi Statistik Sektoral *)	Terlaksananya Sosialisasi Statistik Sektoral	120	110			#DIV/0!											
2	14	18	16	Penyusunan dan Pengumpulan Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik *)	Tersedianya Buku Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Mas 2018	50	40			#DIV/0!											
2	14	18	18	Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Statistik Sektoral *)	Jumlah Peserta Pemerintah Pengelahuan SDM Penyelenggara Statistik Sektoral	50	8	10	10	100%											
2	**14**	**16**		**Program Pengembangan Data/Informasi**	**Tersedianya Buku Selayang Pandang**																
2	14	16	05	Penyusunan Buku Selayang Pandang Kabupaten Gunung Mas *)	Tersusun dan terbitnya Buku Selayang Pandang Kab. Gunung Mas	150 0	200	100	100	100%											

4	03	16		**Program Kerjasama Pembangunan**	**Tersedia layanan informasi** **Pengadaan Barang/Jasa**						
4	03	16	06	Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)*)	Terbangun dan Terpeliharanya jaringan layanan Pengadaan secara elektronik	1					
2				**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**							
3				**Urusan Pilihan Perdagangan**							
3	**06**			**Urusan Pilihan Perdagangan**							
3	**06**	**24**		**Program penyelenggaraan ekspor perdagangan** **dalam negeri**	**Persentase Pengunjung Pameran** **Pembangunan**						
3	06	24	23	Pameran Pembangunan *)	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan	15		1	1	100%	

Dilihat dari review seperti yang tersaji dalam tabel diatas dapat dijelaskan masing-masing program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada faktor penyebab signifikan hingga tidak tercapainya target kinerja hasil/keluaran, begitu pula program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, yaitu :

- ✓ Adanya efisiensi atau penghematan dalam penggunaan anggaran, berimplikasi terhadap tidak tercapainya target kinerja sasaran dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan dalam Renstra Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024;
- ✓ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dan informasi;
- ✓ Memberikan informasi kepada masyarakat guna terbentuknya kepemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- ✓ Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan public;
- ✓ Menyediakan aplikasi sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dan portal layanan masyarakat mudah diakses.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, yaitu :

- ✓ Hendaknya kegiatan yang tidak memenuhi target tetap diprioritaskan dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya;

- ✓ Mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dengan memaksimalkan keluaran dan hasil (output dan outcome) dengan masukan (input) yang tersedia. Program dan kegiatan diarahkan untuk memecahkan isu dan masalah strategis yang dihadapi;
- ✓ Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan agar dapat meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- ✓ Efisiensi alokasi belanja;
- ✓ Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi , Informatika, Persandian dan Statistik Gunung Mas mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan tahun 2020.

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk

mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya, secara rinci penetapan indikator kinerja berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya, sebagai alat pengukuran kinerja seperti yang termuat dalam Bab VIII tabel 8.2 dari RPJMD periode tahun 2019 - 2024 pelayanan PD disampaikan dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan, sebagaimana terlihat pada **Tabel T-C. 30**, berikut ini :

TABEL T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kabupaten Gunung Mas

NO.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-6/08, PERMEDAGRI 86/2017, PERMEDAGRI 18/2020)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	**IKK (Indikator Kinerja Kunci)**											
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi		%	52%	52%	58%	60%	52%	52%	58%	60%	(PERMENDAGRI-86/2017) dengan Formula : Luas Wilayah Yang Tercoverage/Luas Wilayah Keseluruhan
2	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal		Buah	1	1	1	1	1	1	1	1	(PP-6/2008) dengan Formula : Jumlah Penyiaran Radio/TV yang masuk kedaerah
3	Persentase (%) Organisasi Peragkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		%	79%	82%	87%	92%	79%	82%	87%	92%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100%
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		%	0%	0%	8%	25%	0%	0%	8%	25%	(PERMENDAGRI-86/2017) dengan Formula : Jumlah KIM/ Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota x

												100%
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		%	20%	40%	40%	50%	20%	40%	40%	50%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x 100%
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	(PERMENDAGRI-86/2017) dengan Formula : Ada/Tidak
7	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		%	12%	20%	40%	50%	12%	20%	40%	50%	(PERMENDAGRI-18/2020) dengan Formula : Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian x 100%
II.	**Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar**											
A.	SPM (Standart Pelayanan Minimal)											
10	Komunikasi dan Informatika											Sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Urusan Komunikasi dan Informatika tidak lagi masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam Renstra 2019 - 20224 tidak ditetapkan target pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
10.1	Website milik pemerintah daerah (buah)			33								
10.2	Jumlah Menara Telekomunikasi (unit)			54								
10.3	Jumlah Radio/TV lokal			1								
10.4	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk			0								
10.5	Jumlah Kantor Pos (Unit)			6								
10.6	Jumlah Pos Jasa Titipan (lokasi)			2								
10.7	Jumlah TV Berlangganan Swasta/TV Kabel			9								
10.8	Jumlah Mobil Internet			7								

	Kecamatan (MPLIK											
10.9	Jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan			14								
10.10	Jumlah akses broadband(Hotspot WIFI)			2								
10.11	Jumlah Sambungan Telepon Rumah (unit)			624								
10.12	Jumlah Radio Komunitas/ORARI/RAPI			0								
10.13	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			24								
10.14	Jumlah Forum Komunitas Forum Koenunitas Media Tradisional			2								
10.15	Pameran / expo			1								
10.16	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)			85,8								
10.17	Buletin/Majalah/Brosur/Tabloid/Koran Lokal			14	10.17							
10.18	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan			17	10.18							
10.19	Media Luar Ruangan (Papan Informasi, Baliho, Spanduk, Videotron) / Kegiatan			49,16	10.19							
14	**Statistik**				**14**							
14.1	Buku "Gunung Mas dalam Angka"			1 Buku	14.1							
14.2	Buku "PDRB Kabupaten Gunung Mas"			1 Buku	142							

Dari tabel T-C. 30 di atas terlihat bahwa target Renstra untuk indikator kinerja pelayanan khususnya SPM (standar pelayanan minimal) kosong (kolom 6-8), karena dalam Renstra 2019-2024 tidak ditetapkan targetnya. Hal ini dikarenakan, sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12, terdapat perubahan tentang urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana disebutkan bahwa urusan wajib yang terkait dengan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selanjutnya SPM (Standar Pelayanan Minimal) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Sub Urusan Sosial, Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP), Sub Urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota, sedangkan komunikasi dan informatika masuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pada Renstra 2019 - 2024 tidak ditetapkan targetnya. Namun demikian, seperti yang termuat dalam Bab VIII tabel 8.2 dari RPJMD 2019 - 2024, sehingga penyusunan evaluasi pelaksanaan SPM masih mengacu pada Undang - Undang lama dengan tetap melaporkan urusan SPM termasuk didalamnya bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya tetap dievaluasi dan dilaporkan sampai tahun ini.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diiringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua

bidang.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

   Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan di implementasi e-Government baru akan dikembangkan di Kabupaten Gunung Mas, oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2. Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta integrasi data

   Untuk pengelolaan data, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sudah mempunyai berbagai macam aplikasi/sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan kebijakan, namun masih terpisah - pisah dan berdiri sendiri - sendiri, sehingga diperlukan suatu integrasi dari berbagai aplikasi tersebut untuk memudahkan dalam penyajian data dan memantu pimpinan dalam mengambil kebijakan pembangunan secara cepat dan berbasis data yang akurat. Serta telah memiliki ruang server dan ruang pantau yang tersebar di sebagian titik kota kuala kurun.

3. Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi & Transparansi.

   Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.

   Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan

tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hingga nantinya terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.

4. Layanan informasi masyarakat dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembangunan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi diperlukan. Dalam rangka menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah baik dalam penyebaran informasi maupun dalam penyerapan informasi, maka dikembangkan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat. Selain itu guna mengoptimalkan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan pembinaan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang beroperasi setiap hari dan penyebaran informasi dan komunikasi melalui media website resmi dan web sub domain SOPD serta web sub domain radio.
5. Pengembangan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

   Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan terwujud jika infrastruktur TIK sebagai tempat jalannya lalu lintas data tersedia dengan baik. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas jaringan dan NOC yang mendukung terhubungnya berbagai aplikasi internet dan intranet guna mendukung transparansi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Gunung Mas. Selain itu tuntutan terkait dengan pengambilan kebijakan yang cepat dan efektif dari pimpinan semakin meningkat, namun terkendala dengan lokasi yang terpisah dan tingginya aktivitas pimpinan, maka dikembangkan teleconference untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi biaya dari pertemuan secara fisik
6. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Masih adanya wilayah/desa desa yang terisolir yang tidak terkoneksi jaringan telekomunikasi, maka perlu dilakukan pemetaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan terkait penyedian akses internet dan intranet melalui kegiatan pembangunan infrastruktur integrasi, baik di lingkungan SOPD Kabupaten Gunung Mas.

7. Peningkatan jaminan keamanan informasi guna meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi, maka dilaksanakan pengelolaan persandian dan keamanan informasi. Fungsi dari kegiatan ini adalah memberikan layanan persandian dan keamanan informasi, melaksanakan audit keamanan inofrmasi, mengelola informasi berklasifikasi, meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemerintah daerah.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah:

1. Minimnya SDM tenaga programer untuk membangun dan mengembangkan aplikasi e-government.
2. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan TIK Kabupaten Gunung Mas.
3. Masih rendahnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi.
4. Belum maksimalnya operator website sub domain SOPD membuat dan mempublikasikan berita SOPD di website masing - masing SOPD.

5. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap SOPD.
6. Masih terdapatnya wilayah blank spot yang belum terlayani akses informasi.

2.3.3 Dampak isu - isu penting terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditumbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-goverment maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat Informasi Indonesia.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Pesatnya kemajuan dalam bidang TIK tidak dapat diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempuni, sehingga pelayanan informasi antar SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan masyarakat kurang optimal;
2. Belum optimalnya pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas;
3. Minimnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menunjang kinerja birokrasi yang cepat, tepat dan berdaya guna;
4. Masih Minimnya Sewa Bandwidth Akses Internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. Belum adanya legalitas yang mengatur penggunaan dan

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dari tantangan tersebut adalah :

1. Adanya peluang PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Gunung Mas dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Adanya peluang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan pada Kabupaten Gunung Mas;
3. Adanya peluang untuk meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas;
4. Adanya peluang untuk penambahan Bandwidth Akses Internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan pihak penyedia (Telkom dan Icon Plus);
5. Adanya peluang pengkajian, penyusunan dan penerbitan Legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu - isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal - hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Perlunya mengikutsertakan PNS untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibiaya oleh APBD Kabupaten Gunung Mas dan APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
2. Perlunya meningkatkan volume kegiatan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

3. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Gunung Mas;
4. Perlunya peningkatan Bandwidth Akses Internet yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan pihak penyedia (Telkom dan Icon Plus);
5. Perlunya untuk kegiatan pengkajian, penyusunan dan penerbitan Legalitas yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Proses perencanaan yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas salah satunya adalah dengan melakukan pengumpulan informasi usulan dari kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musresnbang) baik tingkat kecamatan dan Kabupaten.

Kegiatan ini merupakan salah satu sarana Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan sehingga diharapkan adanya peran serta masyarakat yang nantinya akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Selain melalui forum tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas juga menerima masukan dan usulan yang berasal dari instansi – instansi terkait lainnya.

Pada tahun 2025 telah diinventarisir beberapa usulan yang berkaitan dengan pembangunan diantaranya berkaitan dengan isu – isu penting yang menjadi prioritas program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2025, usulan tersebut diatas secara umum akan diakomodir tentunya

dengan menyesuaikan kriteria teknis dan kewenangan dari urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Kabupaten yang telah ditetapkan.

TABEL T-C. 31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. GUNUNG MAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**12.442.494.519,00**							**13.469.340.899,00**	
	2	**URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT**						**12.442.494.519,00**							**13.469.340.899,00**	
	2.16	**URUSAN BIDANG DAN INFORMATIKA**						**12.173.450.253,00**							**13.304.340.899,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**5.558.604.351,00**						-	**5.562.904.351,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja	-	-			-	69.867.324,00			-	Mewujudkan pemer yang	-	-	69.867.324,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												bersih ession dan respon dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 1.0000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD dan Hasil Dokumen RKA-				1 Dokum en	17.248.122,0 0	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respon dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta	-		17.248.122,0 0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ke digital				
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.192.282,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsive dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata	-		6.192.282,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	3.352.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif	-		3.352.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			DPA-SKPD									dalam rangka percepatan pembangunan				
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.315.460,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan	-		2.315.460,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah				6	40.759.260,0	-	DANA TRANSFE	-		-		40.759.260,0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				Laporan	0		UMUM-ALOKASI					0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Perangkat	-	-			-	4.098.960.969,00			-	Mewujun pemer yang berah ession dan respon dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-	-	4.098.960.969,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/	4.067.070.819,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Penigkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		4.067.070.819,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan	1.651.680,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profes	-		1.651.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Keuangan Akhir Tahun SKPD									sional dan respon sive dalam rangk a percep				
	2.16.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	30.238.470,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		30.238.470,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Administrasi Barang	-	-			-	200.000,00			-	Mewujudkan pemer	-	-	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	Milik Daerah pada Perangkat Daerah										yang bersih essicn dan respon dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 3.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Daerah pada				1 Lapora n	200.000,00	-	DANA TRANSFE ÚMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih essicn dan respon dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola	-		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												erinta digital				
	2.16.01.2.05	Administrasi Perangkat	-	-			-	152.458.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-	-	155.458.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	86.800.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam	-		86.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.0 5.0000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Berdasarkan Fungsi yang Pendidikan dan				9 Orang	65.658.000,00	-	DANA TRANSFE ÜMUM-ALOKASI	-	Mewuj udkan pemer intah yang bersih , profes sional dan respo naive dalam rangk a	-		68.658.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Administrasi Perangkat	-	-			-	430.227.191,0			-	Mewuj udkan	-	-	430.227.191,0	DINAS KOMUNIKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6							0				pemerintah yang bersih, profesional dan responsive dalam ranak			0	DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.999.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsive dalam	-		4.999.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rangk				
	2.16.01.2.06.0000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	105.251.180,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsive dalam rangk	-		105.251.180,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional	-		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan responsive dalam rangk -				
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29.985.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsive dalam rangk -	-		29.985.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan				1 Dokumen	11.812.800,00	-	-	-	Mewujun pemer yang bersih	-		11.812.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan									ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	60.157.121,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		60.157.121,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.06.0009	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.999.990,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang berah easion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		9.999.990,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa Koordinasi dan SKPD				1 Laporan	200.021.600,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang berah easion dan respo dalam	-		200.021.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	220.150.000,00			-	Mewujn pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	220.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit				2 Unit	58.900.000,0	-	DANA TRANSFE	-	Mewuj n	-		58.900.000,00	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0		UMUM-ALOKASI		pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka				1 Unit	161.250.000,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata	-		161.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n									Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	470.807.227,00			-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	470.807.227,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.840.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo	-		4.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 9.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	79.393.250,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih eassion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		79.393.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	67.813.857,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		67.813.857,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	318.760.120,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk	-		318.760.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.933.640,00			-	Mewuj n pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	114.933.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Perorangan Kendaraan				13 Unit	89.938.259,0	-	DANA TRANSFE UMUM-	-	Mewuj n pemer	-		89.938.259,00	DINAS KOMUNIKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yang Dipelihara dibayarkan					0		ALOKASI		yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 0.0000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	24.995.381,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola	-		24.995.381,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												erinta ke digital				
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	1.000.000,00			-	Mewujn pemer yang bersih esaion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Pengelolaan dan Analisis				1 Dokumen	1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujn pemer yang bersih esaion dan respo dalam	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
2	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-			-	**2.856.436.548,00**						-	**3.016.436.548,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	2.856.436.548,00			-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-	-	3.016.436.548,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas				1 Komunitas	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kominfo									rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.02.2.0	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Informasi Publik diselesaikan peraturan				2 Permo	175.439.323,00	-	DANA TRANSFE ÜMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih eesion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				70 Persen	2.211.099.830,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		2.211.099.830,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar				1 Media	469.897.395,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan	-		469.897.395,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			sesuai kriteria/ juknis									Peningn Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.02.2.0 1.0002	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				2 Konten	0,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Peningn Tata Kelola erinta ke digital	-		90.439.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0004	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang				6 Orang	0,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang	-		30.000.000,0 0	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan									bersih esion dan respo dalam rangk percep pemba an Penin n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMATIKA**	-	-			-	**3.758.409.354,00**						-	**4.725.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/K	-	-			-	62.000.000,00			-	Mewuj n pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pembe an Penin n Tata	-	-	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ota										Kelola erinta ke digital				
	2.16.03.2.0	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Pengelolaan dan Sub Domain Daerah serta Pemerintah				1 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke digital	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-Gov di Lingkup Daerah	-	-			-	3.696.409.354,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan	-	-	4.655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	35.650.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.0	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah keterhubungan dengan Pusat				2 Dokumen	113.475.217,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan				2 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			peta rencana yang diusulkan									persepsi pembaan Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.03.2.0	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mas, Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang berah eesion dan respo dalam rangk persep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintsh daerah														
			Jumlah				1	69.000.000,00	Kab.	DANA	-	Mewuj	-		120.000.000,0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			aplikasi *khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah*				Aplikasi		Mas, Kuala	TRANSFE UMUM-ALOKASI		n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital			0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	41.500.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan reapo dalam rangk percep pemba an Pening	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.03.2.0	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Daerah	188.087.330,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih easion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatka				2 Layana n	25.000.000,00	Kab. Mas, Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data									session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	25.000.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewu n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.0	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				38 Daerah	3.133.196.807,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN**						**149.045.290,00**							**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-			-	**149.045.290,00**						-	**165.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten/Kot	-	-			-	149.045.290,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-	-	165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat				90 Persen	89.994.570,00	Kab. Mas, Kecamatan Semua	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, transparan dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			waktu									dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.20.02.2.0	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				5 Dokumen	59.050.720,00	Kab. Mas, Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN**						**119.998.976,**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIDANG PERSANDIAN						**00**								
1	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PENGAMANAN INFORMASI**	-	-			-	**119.998.976,00**						-	**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Pemerintah Kabupaten/Kot	-	-			-	112.884.976,00			-	Memastikecukasaran prasarumumsecara integrdan hensif dalam rangkngkat daya dukun terhad emban Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				12 Dokum	8.458.600,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata Semua	PENDAPASLI (PAD)	-	Mempat kecuksaran prasarumum secara integr dan hensif dalam rangkngkat daya dukun terhad emba n Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0 1.0009	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan				1 Laporan	82.559.376,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata Semua Kab. Mas, Kecamata	PENDAPASLI (PAD)	-	Mempat kecuksaran prasarumum secara integr	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Semua			dan hensif dalam rangk ngkat daya dukun terhad emba n Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				2 Perang Daerah	21.867.000,00	Kab. Mas, Kuala	PENDAPASLI (PAD)	-	Memp at kecuk saran prasar umum secara integr dan hensif dalam rangk ngkat daya dukun terhad	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												emban Peningn Tata Kelola erinta ke digital				
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.114.000,00			-	Mempat kecuk saran prasar umum secara integr dan benaif dalam rangk ngkat daya dukun terhad emba n Peningn Tata Kelola erinta ke digital	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				0 Daerah	7.114.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata Semua	PENDAPASLI (PAD	-	Mempat kecuksaran prasarumum secara integrdan bensif dalam rangkngkat daya dukun terhad emban Penting Tata Kelola erinta ke cigital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	JUMLAH							**12.442.494.519,00**							**13.469.340.899,00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Arah kebijakan Nasional

Tematik dan arah kebijakan pembangunan nasional dijabarkan dalam RKP tahun 2025. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 yaitu

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN tahun 2020-2025, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023-2024, evaluasi kebijakan tahun 2023-2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan antara lain:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Gambar 4. 1. Agenda Pembangunan Nasional pada RKP 2025

Dari lima agenda pembangunan tersebut, kemudian dijabarkan dalam penekanan tema pembangunan pembangunan yaitu:

A. SDM Berdaya Saing dan Produktif

1. Transformasi Sosial, dengan penekanan tema pembangunan:
    a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun.
    b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan.
    c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting.
    d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif.
    e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.
    f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system.
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:
    a) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti).

B. Infrastruktur untuk Peningkatan Produktifitas
1. Transformasi Ekonomi, dengan penekanan tema pembangunan:
    a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
    b) Penguatan infrastruktur digital.
    c) Pengembangan infrastruktur transisi energi.
    d) Percepatan infrastruktur IKN.

2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan penekanan tema pembangunan:
    a) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

C. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan
1. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, dengan penekanan tema pembangunan:
    a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

b) Pengembangan skema graduasi bansos.
c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya.
d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat.
e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja.
f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan.
g) Peningkatan produksi industri pengolahan
h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan mendukung pada agenda pembangunan tranformasi ekonomi dengan fokus penguatan infrastruktur digital.

Adapun terdapat 8 Prioritas Nasional (PN) pada wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang masuk dalam RKP 2025 antara lain :

A. Prioritas Nasional (PN) 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
    1) Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat.
    2) Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik.
    3) Pembangunan dan revitalisasi Museum PETA (Pembela Tanah Air).
B. Prioritas Nasional (PN) 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
    1) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Mojolagres (100 liter/detik).
    2) Pembangunan Intake Sungai Rejoso (1.000 liter/detik) dan Jaringan Pipa

3) Transmisi Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Kali Rejoso (1.000 liter/detik).
5) Sistem Penyediaan Air Minum Regional Umbulan.
6) Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama Kabupaten-Kota Probolinggo.
7) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Kabupaten Mojokerto.
8) Peningkatan logistik dan perdagangan berbasis biru berkelanjutan.
9) Penguatan industri manufaktur berbasis kelautan – perkapalan dan garam.
10) Pengembangan industrialisasi perikanan yang modern terintegrasi, dan berkelanjutan.
11) Penguatan Pangkalan Utama Angkatan Laut Surabaya dalam rangka penguatan pengamanan maritim terhadap Surabaya dan garda maritim Indonesia bagian timur.
12) Fasilitasi business matchmaking startup digital.
13) Fasilitasi digital technopreneur.
14) Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian.
15) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi serta tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle

C. Prioritas Nasional (PN) 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
1) Penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah vokasi yang memiliki interlinkage and match yang kuat dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
2) Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Buntung (akses Bandara Juanda).
3) Lanjutan Pengendalian Banjir Sungai Lamong.

4) Revitalisasi pelatihan vokasi di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Surabaya.
5) Pembangunan Rumah Susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
6) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Beran.
7) Pembangunan Jalan Pansela.
8) Preservasi Jalan mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik Ruas Sadang (Bts. Kabupaten Lamongan) - Bts. Kota Gresik.
9) Preservasi Jembatan Manyar mendukung Java Integrated and Industrial Port Estate Gresik.
10) Penggantian dan Duplikasi Jembatan Modangan
11) Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Nasional Ruas Bulu - Bts. Kota Tuban.
12) Pelebaran Jalan Nasional Situbondo-Ketapang.
13) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Jalan Nasional.
14) Pengolahan Perikanan Bengkorok (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terpadu).
15) Peningkatan sarana dan prasarana Bandara Abdurrachman Saleh.
16) Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman.
17) Penguatan produktivitas industri tekstil dan produksi tekstil dan alas kaki.
18) Penguatan ekosistem kuliner.
19) Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan
20) infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola
21) Revitalisasi Pipa Jaringan Distribusi Utama KabupatenKota Probolinggo
22) Rehabilitasi Daerah Irigasi Pondok dan Pacal.
23) Pengendalian banjir Kali Jeroan, Ring Ngotok Kanal, dan Kali Konto Hilir
24) Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi.

25) Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif.
26) Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim.

D. Prioritas Nasional (PN) 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
   1) Optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di semua jenjang Pendidikan.
   2) Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan.
   3) Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sistem pemagangan dalam negeri.
   4) Penurunan kematian ibu dan bayi.
   5) Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria).
   6) Pembangunan kualitas keluarga.
   7) Percepatan penurunan ketimpangan gender melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang pada wilayah kantong pekerja migran.
   8) Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
   9) Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan melalui pengembangan IAIN Kediri.
   10) Fasilitasi literasi digital.
   11) Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan bertaraf internasional pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui proyek Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) "Higher Education for Technology and Innovation Project" (HETI) dan Universitas Brawijaya melalui proyek

Pinjaman Luar Negeri KfW "Quality Improvement of Academic Hospital of Brawijaya University".

12) Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik sciences, technology, engineering, art, dan mathematics unggulan pada Politeknik Negeri Madura, Politeknik Negeri Madiun, dan Politeknik Negeri Malang.

E. Prioritas Nasional (PN) 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

1) Hilirisasi industri tembaga dan bauksit.
2) Hilirisasi industri sawit, kelapa, dan karet.
3) Hilirisasi industri rumput laut.
4) Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi.
5) Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar.
6) Pengembangan industri elektronik dan digital.
7) Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan.
8) Pengadaan kapal perintis.
9) Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistic.
10) Pengembangan Bandara Hub Juanda.

F. Prioritas Nasional (PN) 6: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

1) Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif danterpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
2) Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Wilayah Madura.
3) Surabaya Regional Railway Line.
4) Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Metropolitan Surabaya.

G. Prioritas Nasional (PN) 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

1) Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

H. Prioritas Nasional (PN) 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
   1) Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan.
   2) Rehabilitasi kerusakan lahan.
   3) Pengembangan perhutanan sosial melalui sarana ekonomi produktif, penyediaan tenaga pendamping, fasilitasi penyusunan dan pengesahan rencana kerja/pengelolaan kelompok perhutanan sosial, dan fasilitasi peningkatan kelompok usaha perhutanan sosial ke kelas gold.
   4) Pengendalian lahar Gunung Semeru.

Pada Prioritas Pembangunan nasional, adapun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan masuk pada prioritas nasional :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fokus Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan fokus Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba denga fokus Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis online single submission dan mal pelayanan publik digital.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

   Tujuan Diskominfosantik Kabupaten Gunung Mas jangka waktu 1 (dua) tahun yaitu tahun 2025 adalah : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel (RPD 2025-2026)

2. Sasaran

   Sasaran yang ditetapkan sebagai penjabaran dari tujuan Diskominfosantik tahun 2025 adalah:

   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (RPD 2025-2026)
   b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;

2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level dibawahnya. Cascading kinerja menjabarkan secara jelas dan logis dan memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Pada tabel berikut disajikan cascading kinerja terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Diskominfosantik tahun 2025 - 2026.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Target Kinerja Proyeksi 2025
1	2	3	4	5
1.	Tujuan : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel (RPD 2025-2026)	Indeks RB	Nilai	52,6
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (RPD 2025-2026)	Indeks SPBE	Nilai	2,65
	Program :			

	1)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (RPD 2025-2026)	Persentase layanan publik dan Layanan Adminitrasi Pemerintah dalam satu portal	%	50
			Persentase kinerja infrastruktur TIK yang baik	%	100
	2)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase penilaian resiko keamanan informasi	%	18,72
			persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah	%	10,25
	Sasaran 2 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	30,25
	Program :				
	1)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase lembaga binaan dan mitra diseminasi informasi Diskominfosantik yang aktif	%	25
			Persentase terselenggaranya diseminasi informasi melalui kanal media elektronik dan non elektronik	%	30
			Persentase tindak lanjut laporan dan aduan masyarakat melalui kanal aduan yang dikelola Diskominfosantik	%	50
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	10
	2)	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	2
			Ketersedian data statistik sektoral	Ada/ Tidak Ada	Ada

3.1.2 Telaah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas

Mengacu visi RPD 2025-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian dalam Renstra tahun 2025 -2026 akan fokus membangun tata kelola pusat informasi data, sektor infrastruktur informasi dan telekomunikasi, dan tata kelola e-government.. Maka tujuan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 adalah: "Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)"

Sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi".

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran PD didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. Sasaran PD dirumuskan berdasar pada sasaran daerah yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan dalam sasaran PD tahun 2022 sebagaimana telah disajikan dalam Rancangan RKPD Tahun 2022. Dari beberapa point dapat diambil pokok - pokok kesimpulan indentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas, yang berhubungan dengan isu - isu strategis Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-gov) belum optimal dan belum bersinergis;
2. Penyebarluasan komunikasi dan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;

3. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral terkait perkembangan pembangunan daerah belum optimal; dan
4. Pemanfaatan Teknologi Perangkat Persandian bagi penyelenggara pemerintah daerah masih belum optimal.

Prioritas dan sasaran, serta Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel (RPD 2025-2026	1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (RPD 2025-2026)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Meningkatkan infrastruktur jaringan internet berbasis FO hingga tingkat Kecamatan
			Pengembangan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan untuk pelayanan publik Peningkatan kualitas dan kuantitas pengamanan sistem informasi	Membangun dan mengembangkan layanan SPBE dalam pelayanan publik Menetapkan standar keamanan sistem informasi
			Perluasan cakupan keamanan sistem informasi dilingkup Pemerintah Daerah	Membangun sistem keamanan yang terintegrasi melalui CSIRT (Computer Security Incident Respon Team) Pemerintah Daerah

	2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi
			Peningkatan layanan komunikasidan informasi publik	Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam komunikasi dan informasi publik	Meningkatkan peran serta kelompok informasi masyarakat dalam mengakses dan menyampaikan informasi
			Peningkatan layanan komunikasidan informasi publik	Meningkatkan kualitas SDM dan peran serta pejabat pengelola informasi publik pada badan publik di semua tingkatan
			Pengoptimalan tim monitoring dan tindak lanjut layanan laporan dan aduan	Meningkatkan waktu respon dan penanganan terhadapaduan dan kedepan akan dibuat Perbub atau NSPK tentang Layanan dan Tindak Lanjut Aduan
			Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral	Mengoptimalkan ketersediaan data statistik sektoral pembangunan daerahmelalui single data

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 jika dikaitkan

dengan capaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Diskominfosantik. Secara rinci permasalahan-permasalahan yang dihadapi Diskominfosantik Kabupaten Gunung Mas sebagaimana yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik pada badan publik	Kesadaran badan publik akan pentingnya keterbukaan informasi masih belum merata	• Kompetensi SDM Aparatur badan publik yang belum merata dalam hal pengolahan informasi publik • Belum optimalnya pembentukan KIM • Masih minimnya kelompok informasi masyarakat yang berperan aktif dalam penyebaran informasi
2	Belum optimalnya integrasi layanan publik secara elektronik	Banyaknya sistem informasi yang belum difungsikan dan dikelola dengan baik	• Optimalisasi operasional sistem informasi oleh OPD masih belum sesuai ekspektasi • Masih rendahnya tingkat keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah • Belum adanya regulasi yang mengatur teknis dan standar baku pengelolaan sistem informasi
3	Belum optimalnya integrasi infrastruktur TIK hingga tingkat kecamatan/desa	Belum tercukupinya kebutuhan ideal sarpras pendukung integrasi infrastruktur TIK antara kabupaten dan kecamatan/desa	• Faktor topologi geografis membuat kebutuhan peralatan infrastruktur memakan biaya besar sehingga beberapa desa berinisiatif menggunakan layanan yang sudah ada di luar jaringan pemkab

3.3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

Jumlah program yang direncanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 5 (lima) program, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin, 4 (empat) program operasional/prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Program Rutin)
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik (Program Operasional/Prioritas)
3. Program Aplikasi Informatika (Program Operasional/Prioritas)
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Program Operasional/Prioritas)
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Program Operasional/Prioritas)

Dari 5 (lima) program tersebut, dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan urgensinya. Dalam rancangan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, total kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kegiatan serta 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Kegiatan - kegiatan dan sub - sub kegiatan tersebut disusun sesuai dengan indikator kinerja, target, lokasi, sasaran dan kebutuhan dana (pagu indikatif).

Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 12.442.494.519,-. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif disajikan dalam tabel T-C 33 sebagai berikut :

TABEL T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Gunung Mas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. GUNUNG MAS

TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						12.442.494.519,00							13.469.340.899,00	
	2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT						12.442.494.519,00							13.469.340.899,00	
	2.16	URUSAN BIDANG DAN INFORMATIKA						12.173.450.253,00							13.304.340.899,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**2.16.01**	**PROGRAM URUSAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**5.558.604.351,00**						-	**5.562.904.351,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Kinerja	-	-			-	69.867.324,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka persepsi pembangunan Pening Tata Kelola erinta ke digital	-	-	69.867.324,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Dokumen RKA-				1 Dokumen	17.248.122,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan	-		17.248.122,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke Digital				DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 + 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.192.282,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		6.192.282,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.352.200,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Pening Tata Kelola erintah ke digital	-		3.352.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan				1 Dokumen	2.315.460,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan respo	-		2.315.460,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hasil Koordinasi Penyusunan *Dokumen Perubahan* *DPA-SKPD*									dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	40.759.260,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		40.759.260,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Perangkat	-	-			-	4.098.960.969,00			-	Mewujn pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	4.098.960.969,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				32 Orang/	4.067.070.819,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujn pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an	-		4.067.070.819,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			ASN									Peningn Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.651.680,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pemba an Peningn Tata Kelola erinta ke digital	-		1.651.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INPORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan				3 Lapora	30.238.470,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang	-		30.238.470,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				n					bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	200.000,00			-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-	-	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.09.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Daerah pada				1 Laporan	200.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke digital	-		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Perangkat	-	-			-	152.458.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangk percep	-	-	155.458.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pembaan Peningn Tata Kelolaerintake digital				
	2.16.01.2.05.0000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	86.800.000,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewujn pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pembaan Peningn Tata Kelolaerintake digital	-		86.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan				9	65.658.000,00	-	DANA TRANSFE	-	Mewujn	-		68.658.000,0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Fungsi yang Pendidikan dan				Orang			UMUM-ALOKASI		pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital			0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Perangkat	-	-			-	430.227.191,00			-	Mewuj ri pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta	-	-	430.227.191,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ke digital				
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	4.999.500,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke digital	-		4.999.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				5 Paket	105.251.180,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan	-		105.251.180,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan									dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik *Kantor yang Disediakan*				2 Paket	8.000.000,00	-	DANA TRANSFE ÜMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	29.985.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		29.985.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				1 Dokumen	11.812.800,00	-	-	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam	-		11.812.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan									rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.0 6.0007	Penyediaan Bahan/ Material														
			Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan				3 Paket	60.157.121,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		60.157.121,0 0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	9.999.990,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Pening Tata Kelola erintah ke digital	-		9.999.990,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan SKPD				1 Laporan	200.021.600,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan	-		200.021.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Peningin Tata Kelolaerintake digital				
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	220.150.000,00			-	Mewujn pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Peningin Tata Kelolaerintake digital	-	-	220.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau				2 Unit	58.900.000,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewujn pemer yang bersih ession	-		58.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lapangan yang Disediakan									dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.6011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	161.250.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih esaion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		161.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	470.807.227,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Penunjang Tata Kelola pemerintah ke digital	-	-	470.807.227,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.840.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan responsif dalam rangka percepatan	-		4.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pembaan Peningn Tata Kelolaerintake digital				
	2.16.01.2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	79.393.250,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewujn pemeryang bersiheasiondan respodalamrangkpercep pembaan Peningn Tata Kelolaerintake digital	-		79.393.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INPORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah				12	67.813.857,00	-	DANA TRANSFE	-	Mewujn	-		67.813.857,0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Laporan			UMUM-ALOKASI		pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital			0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	318.760.120,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata	-		318.760.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Kelola erinta ke digital				
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	114.933.640,00			-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	114.933.640,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Perorangan Kendaraan yang Dipelihara dibayarkan				13 Unit	89.938.259,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo	-		89.938.259,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	Organisasi										n pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital				KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Pengelolaan dan Analisis				1 Dokumen	1.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												n Tata Kelola erinta ke digital				
2	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**	-	-			-	**2.856.436.548,00**						-	**3.016.436.548,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	2.856.436.548,00			-	Mewujn pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	3.016.436.548,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah				2	0,00	-	DANA TRANSFE	-	Mewujn	-		25.000.000,0	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di *Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*				Laporan			UMUM-ALOKASI		pemerintah yang bersih session dan respon dalam rangka persepsi pembaran Peningkatan Tata Kelola erintah ke digital			0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif menyebarkan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih session dan respon dalam rangka persepsi pembaran Peningkatan Tata	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Kelola erinta ke digital				
	2.16.02.2.0 1.0013	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Informasi Publik diselesaikan peraturan				2 Permoh	175.439.323,0 0	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih essicn dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		160.000.000, 00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0009	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi				70 Persent	2.211.099.830 ,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih essicn	-		2.211.099.83 0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			publik									dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.0 1.0001	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	469.897.395,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih esion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		469.897.395,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.16.02.2.01.0004	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				2 Konten	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintah ke digital	-		90.439.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0004	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti				6 Orang	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			bintek/pelatihan									rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMATIKA**	-	-			-	**3.758.409.354,00**						-	**4.725.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	62.000.000,00			-	Mewuj n pemer yang bersih easion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-	-	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Pengelolaan dan Sub Domain Daerah serta Pemerintah				1 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih session dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola erintah ke digital	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-di Lingkup Daerah	-	-			-	3.696.409.354,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih session dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan	-	-	4.655.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Penin n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.03.2.0	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	35.650.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Penin n Tata Kelola erinta ke digital	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah keterhubungan dengan Pusat				2 Dokum	113.475.217,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							en					bersih session dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang disusun				2 Dokumen	40.500.000,00	Kab. Mas, Kusla	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih session dan respo dalam rangk percep pembe an Pening n Tata Kelola erinta	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ke digital				
	2.16.03.2.0	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Mas, Kecamata Semua	DANA TRANSFE ÜMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai				1 Aplikasi	69.000.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE ÜMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo	-		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Aplikasi	41.500.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.09.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Daerah	188.087.330,00	-	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.09.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi,				2 Layanan	25.000.000,00	Kab. Maa, Kecamatan Semua	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data									pembaan Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.16.03.2.0	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	25.000.000,00	Kab. Mas, Kuala	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuin pemer yang bersih easion dan respo dalam rangk percep pembaan Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.0	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang				38 Daerah	3.133.196.807,00	-	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuin pemer yang	-		4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas									bersih ession dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN BIDANG STATISTIK**						**149.045.290,00**							**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	-	-			-	**149.045.290,00**						-	**165.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten/Kot	-	-			-	149.045.290,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke digital	-	-	165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang				90 Persen	89.994.570,00	Kab, Mas, Kecamatan Semua	DANA TRANSFER UMUM-ALOKASI	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif dan responsif	-		95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			rilis tepat waktu									dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke digital				DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.0	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				5 Dokumen	50.050.720,00	Kab. Mas, Kecamata Semua	DANA TRANSFE UMUM-ALOKASI	-	Mewuj n pemer yang bersih esaion dan respo dalam rangk percep pemba an Pening n Tata Kelola erinta ke	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.21	**URUSAN BIDANG PERSANDIAN**						**119.998.976,00**							**0,00**	
1	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	-	-			-	**119.998.976,00**						-	**0,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Pemerintah Kabupaten/Kot	-	-			-	112.884.976,00			-	Mempat kecuk saran prasar umum secara integr dan hensif dalam rangk ngkat daya dukun terhad emban Pening n Tats Kelola erinta ke	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digital				
	2.21.02.2.0	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				12 Dokum	8.458.600,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata Semua	PENDAPASLI (PAD)	-	Mempat kecuksaran prasarumum secars integr dan hensif dalam rangkngkat daya dukun terhad emban Pening n Tata Kelola erinta ke digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK A, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Kesmanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis				1 Lapora	82.559.376,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata	PENDAPASLI (PAD)	-	Mempat kecuksaran	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				n		Semua Kab. Mas, Kecamata Semua			prasar umum secara integr dan hensif dalam rangk ngkat daya dukun terhad emba n Pening n Tata Kelola erinta ke digital				INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.0	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunaka n Layanan Keamanan Informasi				2 Perang Daerah	21.867.000,00	Kab. Mas, Kuala	PENDAP ASLI (PAD)	-	Memp at kecuk saran prasar umum secara integr dan hensif dalam rangk	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ngkat daya dukun terhad emba n Pening n Tata Kelola erinta ke digital				
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.114.000,00			-	Memp st kecuk saran prasar umum secara integr dan bensif dalam rangk ngkat daya dukun terhad emba n Pening n Tata Kelola erinta	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ke digital				
	2.21.02.2.0	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				0 Daerah	7.114.000,00	Semua Kota/Kab Semua Kecamata Semua	PENDAPASLI (PAD)	-	Mempat kecuksaran prasarumum secara integrdan hensifdalam rangkrngkatdaya dukunterhademban Peningn Tata Kelolaerintake digital	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	JUMLAH							**12.442.494.519,00**							**13.469.340.899,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) serta Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan SOPD yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 - 2029. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 berisi rancangan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun 2025.

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga Musrenbang tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum SOPD tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang

ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders)*, tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan StatistikKabupaten Gunung Mas sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Kuala Kurun, Juli 2024

Kepala Dinas,

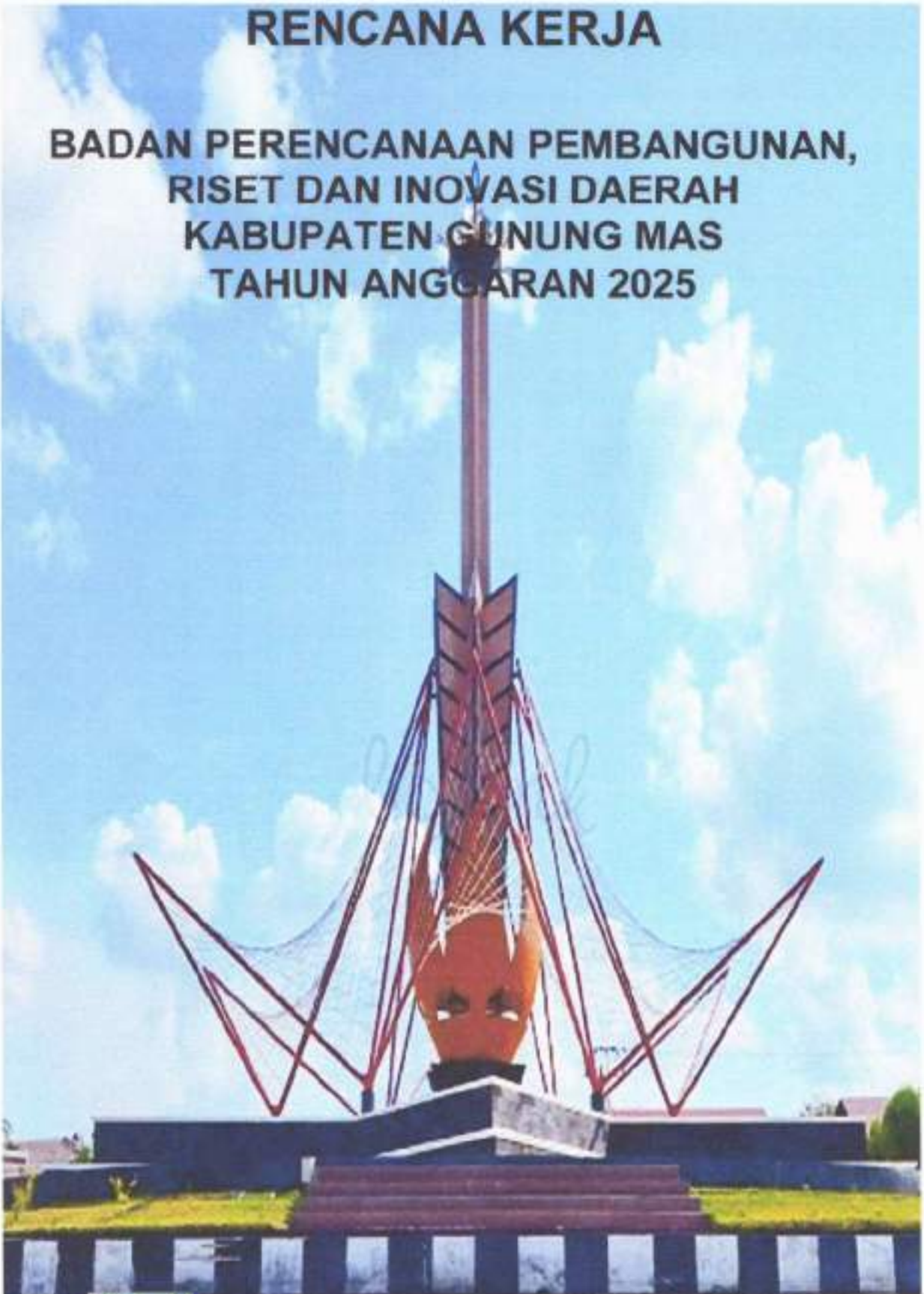
RUBY HARIS, S.T.

Pembina

NIP. 19830507 200604 1 017

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan ini yaitu berupa Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang merupakan acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam Tahun 2025.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada lima tahun kedepan dapat meningkatkan peran perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Kepala Badan,

Yantrio Julis, M.Ec.Dev
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19780119 200602 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang, bidang urusan perencanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 disusun untuk mendukung pencapaian yang dituangkan melalui Tujuan ke empat : Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel Good and clean governance memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini dapat diukur keberhasilannya dengan indikator Indeks Reformasi Birokasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Nilai LAKIP/SAKIP.
b) Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks SPBE.
c) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai pedoman pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yaitu **tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas** serta **penelitian dan pengembangan yang inovatif**.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini penting disusun untuk terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat Daerah dengan perencanaan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sehingga perencanaan tersusun dengan baik dan konsisten.

Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan terhadap dokumen perencanaan dalam menghadapi kondisi yang ada, perlu dilakukan. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RPJMD dapat dilakukan apabila terjad yang mendasar mencakup terjadinya bencana non alam maupun kebijakan nasional. RPJMD diikuti dengan Renstra Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas dimulai dengan persiapan Penyusunan Renja 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui penyusunan rancangan

awal, penyusunan rancangan Renja, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas disusun secara simultan bersamaan dengan penyusunan Renstra yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 untuk jangka waktu II (dua) Tahun.

Berpedoman dengan cara menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian untuk tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional, selain itu memperhatikan juga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat bersinergi dengan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas dengan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung mas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang akan ditempuh dalam manajemen perencanaan pembangunan, sehingga unsur Bapperida sebagai salah satu unsur yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan dapat berperan secara optimal.

Adapun maksud penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Bapperida dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai Pedoman bagi aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang profesional dan handal dalam menjalankan tugas serta pencapaian *Reformasi Birokrasi*.

Sedangkan Tujuan khusus penyusunan dari Renja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) adalah :

- Memberikan pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja selama kurun waktu satu Tahun
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, dan
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Tujuan dan dadaran Daerah.

Sedangkan kegunaan Renja sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan, untuk mengetahui capaian hasil, kemajuan dan kendala guna mewujudkan Target Kinerja dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu di Bapperida Kabupaten Gunung Mas, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut terlampir tabel 1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida , sejauh mana target - target kinerja dan capaian tahun 2025 serta capaian target kinerja pada sub kegiatan tahun berjalan :

Tabel

EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Formulir 12

No	Kode				Uraian, Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Capaian/Keluaran), Kegiatan dan Subkegiatan (Outcome/ Input)	Realisasi Capaian Kinerja RENJA s/d Tahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun Berjalan yang di evaluasi (2024)		Analisis Capaian Kinerja dan anggaran RENJA yang di evaluasi Tw III (2024)		Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJA TW I (2024)		Ket.
1	2				3	4	5		6		7		8=7/6 x 100%		9=4+7		10
							a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	a	Rp	
1	5.01				PERENCANAAN			0.001.264.567,00		30.479.379.571,00		6.201.616.990,00		02%		31.132.988.137,00	
	5.01	01			PROGRAM PENGARAHAN DAN JALINAN PEMBERITAHUAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Keberuntuan Pelayanan Urusan pemerintahan		6.751.641.156,84		7.380.342.171,00		5.631.451.354,00		89%		13.284.302.062,84	
	5.01	01	2.01		Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan RENJA, Dok Anggaran yang tepat waktu dan Prosentase Dokumen Penganggaran yang dievaluasi tepat waktu		79.201.192,84		127.232.500,00		41.202.644,00		30%		121.364.176,84	
	5.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.911.400,00	2 Dokumen	22.617.720,00	1 Dokumen	1.307.020,00	50%	6%	3	23.218.420,00	
	5.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perubahan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	1.992.000,00	3 Dokumen	7.128.870,00	1 Dokumen	1.970.000,00	100%	66%	4	9.162.000,00	
	5.01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.874.000,00	1 Dokumen	6.701.640,00	-	1.900.000,00	0%	30%	1	1.900.000,00	
	5.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SKPD	1 Laporan	0.990.500,00	1 Laporan	11.873.850,00	0	14.952.000,00	100%	90%	1	15.942.500,00	
	5.01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	0.174.191,00	11 Laporan	44.011.503,00	3 Laporan	18.908.444,00	27%	43%	11	63.482.179,00	
	5.04	04	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Bilnaja dan Keuangan yang tepat waktu		4.198.067.885,00		6.394.845.537,00		3.274.444.263,00		54%		7.472.512.148,00	
	5.04	04	2.02	01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji dan Tunjangan dan Kesejahteraan	30 Orang	3.599.051.111,00	30 Orang	4.750.308.641,00	30 Orang	2.932.556.700,00	100%	54%	30	6.531.607.811,00	
	5.04	04	2.02	08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan	1 dokumen	41.307.564,00	1 Laporan	46.545.644,04		41.807.443,00	0%	90%	1	97.354.918,00	
	5.04	04	2.02	17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	7.000.000,00	3 Laporan	7.000.000,00	-	-	0%	0%	3	7.000.000,00	
	5.03	03	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Buku Inventaris Barang Negara/Daerah		14.048.090,00		22.000.000,00		-		0%		14.048.090,00	
	5.03	03	2.03	06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.998.090,00	1 Laporan	12.600.540,00	-	-	0%	0%	1	14.998.090,00	
	5.05	05	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan yang tepat pengelolaan pendidikan Aparat		93.078.800,00		91.010.614,00		5.470.200,00		6%		175.548.950,00	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	74 Pakai	60.321.350,00	71 Pakai	74.295.800,00			0%	0%	74	137.371.150,00	
					Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendidikan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	19.695.500,00	20 Dokumen	6.810.850,00	1 Dokumen	1.970.200,00	5%	29%	20	26.075.600,00	
	5.05	05	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	17.130.000,00	9 Orang	19.412.414,00	1 Orang	6.500.000,00	25%	0%	9	43.030.000,00	
	5.21	21	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor		811.589.350,00		988.281.618,00		284.931.868,00		40%		1.352.984.301,00	
	5.21	21	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	11.118.450,00	12 Paket	20.315.850,00	1 Paket	3.951.000,00	8%	33%	13	48.971.450,00	
	5.21	21	2.06	02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia	8 Paket	9.996.900,00	8 Paket	11.610.350,00	1 Paket	1.542.000,00	13%	40%	10	15.138.900,00	

	1.01	01	1.06	01	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Contoh: Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dialokasikan	1 Paket	31.831.300,00	1 Paket	26.800.648,00	1 Paket	25.981.826,00	71%	40%	1	40.901.300,00	
	1.01	01	1.09	06	Pengadaan Bahan Bacaan dan Pemutakhiran Perpustakaan Lembaga	Contoh: Dokumen Bahan Bacaan dan Pemutakhiran Perpustakaan yang Dialokasikan	1 Dokumen	9.600.000,00	1 Dokumen	9.756.800,00	-	1.830.000,00	0%	45%	1	10.000.000,00	
	1.01	01	1.10	07	Pengadaan Bahan/Material	Contoh: Kayu Balok/Material yang Dialokasikan	Paket	167.880.912,00	Paket	167.134.347,00	-	71.190.168,00	0%	43%	0	193.178.739,00	
	1.01	01	1.28	08	Pengadaan Sandangan Lainnya	Contoh: Seragam Pendidikan Sandangan Lainnya	1 Lainnya	9.540.900,00	1 Lainnya	10.001.500,00	-	4.700.000,00	0%	47%	0	10.000.000,00	
	1.01	01	1.06	05	Pengadaan/pencetakan Majalah Kecamatan dan Kumpulan SKRD	Contoh: Laporan Pertanggungjawaban Majalah Kecamatan dan Kumpulan SKRD	110 Laporan	990.123.912,00	110 Laporan	908.912.500,00	50 Laporan	279.012.375,00	46%	43%	460	960.000.000,00	
	1.01	01	2.20	22	Pengadaan/pemeliharaan Alat Pemadam (APAR)	Contoh: Dokumen Pengadaan/Pemeliharaan Alat Pemadam (APAR)				24.800.350,00		-	0%	0%	0	-	
	1.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan rancangan dan pelaporan dalam bentuk buku		775.000.000,00		630.760.500,00		500.971.000,00		71%		1.000.000.000,00	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Contoh: Unit Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan yang Dialokasikan	1 Unit	420.722.000,00	-	-	-	-				515.722.000,00	
	1.01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Contoh: Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dialokasikan	1 Unit	150.879.900,00	2 Unit	200.750.000,00	1 Unit	160.000.000,00	50%	77%	3	300.000.000,00	
	1.01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Contoh: Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dialokasikan	1 Unit	87.000.000,00	2 Unit	80.613.842,00	2 Unit	30.370.000,00	44%	67%	3	150.000.000,00	
	1.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan pelaporan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran		121.000.000,00		101.710.263,00		91.000.160,00		41%		210.000.000,00	
	1.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Jurnal Mengurut	Contoh: Laporan Penyediaan Jasa Jurnal Mengurut	1 Laporan	7.000.000,00	1 Laporan	7.000.000,00	-	-	0%	0%	0	7.000.000,00	
	1.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Sumber Daya Yang Dibayar Setiap Bulan	1 Langganan	32.271.200,00	2 Langganan	48.501.600,00	1 Langganan	50.530.581,00	80%	53%	2	130.781.870,00	
	1.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Contoh: Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dialokasikan	11 Laporan	134.032.932,00	11 Laporan	105.211.203,00	3 Laporan	41.978.000,00	25%	12%	14	170.611.740,00	
	1.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeriksaan rancangan dan pelaporan dalam bentuk buku		844.104.016,00		525.171.381,00		126.239.150,00		89%		990.983.190,00	
	1.01	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Contoh: Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72.740.403,00	1 Unit	78.531.278,00	1 Unit	42.068.850,00	100%	78%	2	89.331.311,00	
	1.01	01	2.09	03	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Contoh: Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	263.347.327,00	11 Unit	205.800.126,00	4 Unit	44.430.100,00	19%	15%	35	306.377.427,00	
	1.01	01	2.09	05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Contoh: Peralatan Mesin dan Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	10.680.000,00	25 Unit	17.807.188,00	5 Unit	21.740.000,00	25%	27%	30	40.400.000,00	
	1.01	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Contoh: Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.145.149,00	2 Unit	172.676.775,00	-	-	0%	0%	2	134.147.134,00	
	1.01	01			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rapat Koordinasi Perencanaan daerah dan perangkat daerah yang terkait lintas sektor		1.035.314.083,00		1.726.980.571,00		648.601.771,00		33%		3.210.710.853,00	
	1.01	01	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terselenggaranya Dokumen Perencanaan Daerah dan Rancangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan penganggaran		1.354.512.000,00		1.462.640.263,00		490.110.883,00		84%		1.844.611.230,00	
	1.01	01	1.01	01	Analisis Kebijakan Daerah, Perumusan dan Isi Strategis Pembangunan Daerah	Contoh: Dokumen Perencanaan Awal RKPD/RANHIR/RKPD Lintas Kabupaten atau RPJPD Akhir	3 Dokumen	911.296.800,00	3 Dokumen	976.091.863,00	3 Dokumen	180.363.883,00	19%	19%	4	Variabel 111.00	
	1.01	01	1.01	03	Koordinasi Pembahasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Instansi Kabupaten Lainnya	Contoh: Dokumen Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	43.670.200,00	2 Dokumen	61.861.133,00	-	-	0%	0%	1	63.670.000,00	
	1.01	01	1.01	05	Pelaksanaan Sosialisasi Kabid	Contoh: Buku Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	31.194.139,00	1 Berita Acara	17.372.840,00	1 Berita Acara	31.983.850,00	100%	100%	1	51.830.000,00	
	1.01	01	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Tahun 2025 (Lap. 24h)	Contoh: Berita Acara Rapat Penyelesaian Tindak/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	31.800.200,00	1 Berita Acara	23.110.708,00	2 Berita Acara	31.017.250,00	100%	100%	4	50.000.250,00	
	1.01	01	1.01	06	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Contoh: Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	41.436.350,00	2 Berita Acara	46.740.800,00	2 Berita Acara	48.731.300,00	100%	100%	4	94.134.150,00	
	1.01	01	1.01	08	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Contoh: Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1.123 Usulan	41.421.150,00	1.128 Usulan	91.285.300,00	1.128 Usulan	35.400.450,00	98%	90%	1128	93.115.400,00	

	3.14	03	3.14	01	Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditelaah (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	186.710.114,00	1 Dokumen	618.570.760,00	2 Dokumen	135.425.850,00	50%	27%	3	779.161.724,00	
	3.26	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemeliharaan Daerah Bidang Pengembangan Pembangunan Daerah	Presentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Pembangunan		72.272.950,00		64.500.000,00		3.600.000,00		5%		76.097.300,00	
	3.27	01	3.01	07	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pengembangan Pembangunan (APD)	Jumlah Orang yang Dilatih dalam Pemanfaatkan Data dan Informasi	200 Orang	81.830.804,00	101 Orang	54.600.200,00	-	3.825.400,00	0%	5%	200	90.000.000,00	
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	11 Buku	7.221.200,00	30 Buku							7.221.200,00	
	3.01	02	2.02		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggara laporan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pemeliharaan serta upaya tindak lanjutnya untuk dapat dimanfaatkan		208.213.100,00		229.160.760,00		41.282.700,00		20%		278.491.124,00	
	3.31	02	2.02	03	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaporan Pembangunan Kabupaten Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang Selesai Tepat Waktu	3 Laporan (0%)	31.550.410,00	3 Laporan (0%)	114.231.540,00	3 Laporan	22.008.300,00	33%	17%	7	169.330.950,00	
	3.32	03	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah)	3 Laporan 3 Dokumen	125.827.130,00	3 Laporan 4 Dokumen	94.660.210,00	3 Laporan	22.456.800,00	33%	24%	9	247.631.750,00	
	3.33	03	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			12.817.500,00		15.298.160,00		2.172.700,00		25%		33.288.360,00	
	3.34	01	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	12.817.500,00	3 Dokumen	13.298.160,00		2.172.700,00	0%	25%	3	33.288.360,00	
	3.00	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Cakupan wilayah pembangunan terkoordinasi pemerintah, 2. Tersedianya dokumen perumusan kebijakan, pemberadan pengembangan data - data informasi dan basis 3. Data - data capaian kinerja dokumen rencana OPD (Bidang pemerintah wilayah dan sumber daya alam), 4. Persentase pembangunan administrasi yang terkoordinasi 1. Base-line capaian kinerja dokumen rencana OPD bidang ekonomi 2. Data - data capaian kinerja dokumen rencana OPD bidang sosial budaya		1.218.526.721,00		1.328.237.815,00		180.385.965,00		20%		1.611.550.721,00	
	3.01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Rancangan Kebijakan dalam bidang Perencanaan dan Pembangunan Manusia		141.662.630,00		614.602.334,00		178.802.965,00		39%		935.066.471,00	
	3.21	03	2.03	04	Koordinasi Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RENSTRA pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	113.060.164,00	3 Laporan	187.328.960,00	3 Laporan	31.282.900,00	50%	21%	9	247.204.571,00	
	3.22	03	2.03	08	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RENSTRA pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	147.308.136,00	4 Laporan	427.110.204,00	3 Laporan	135.179.802,00	33%	25%	9	910.978.204,00	
	3.03	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Terselenggara Dokumen Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup		52.290.940,00		454.991.671,00		87.160.488,00		25%		611.443.387,00	
	3.23	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RENSTRA pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	103.107.208,00	3 Laporan	185.520.605,00	3 Laporan	32.740.148,00	33%	17%	9	230.588.033,00	
	3.33	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RKPD/RENSTRA pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	135.213.051,00	Laporan	515.802.715,00	Laporan	91.011.244,00	0%	23%	9	644.014.410,00	
	3.05	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terselenggara Koordinasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Infrastruktur		861.031.104,00		440.404.070,00		114.972.429,00		20%		977.103.103,00	
	3.11	03	2.03	05	Koordinasi Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Perencanaan Infrastruktur	0 Laporan	156.612.250,00	4 Laporan	248.870.260,00	3 Laporan	57.729.901,00	60%	23%	9	464.962.104,00	

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	5.00				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			730.954.115,00		1.126.289.804,00		174.999.129,00		16%		16%		914.960.382,00
	5.08	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Nasio-lasi penelitian yang dikerjakan/dikembangkan		730.954.115,00		1.126.289.804,00		174.999.129,00		16%		16%		914.960.382,00
	5.08	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terwujudnya Tujuan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara Melalui Kegiatan ASN		7.186.600,00		35.516.500,00		21.176.808,00		60%		60%		28.363.408,00
	5.08	02	2.01	03	Kajian, Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Keuangan			7.186.600,00		35.516.500,00		21.176.808,00		59%		60%		28.363.408,00
	5.08	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kesejahteraan			765.841.600,00		325.383.680,00		8.320.800,00		3%		3%		325.383.680,00
	5.08	02	2.02	04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			765.841.600,00	1 Dokumen	325.383.680,00	-	8.320.800,00		3%		3%		329.167.680,00
	5.08	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup			-		160.983.680,00		-		0%		0%		-
	5.08	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			-	2 Dokumen	160.983.680,00	-	-		0%		0%		-
	5.08	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terfasilitasinya Kegiatan Litbang Inovasi Perangkat Daerah, terfasilitasinya Invidikasi Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan terpublikasinya hasil Penelitian dan Pengembangan		965.813.115,00		405.186.944,00		340.713.109,00		35%		35%		519.595.382,00
	5.08	02	2.04	03	Diseminasi Hasil, Prosedur dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Hasil, Prosedur dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas Inovatif		415.148.180,00	Laporan	108.442.864,00	Laporan	120.720.189,00		29%		33%		401.468.375,00
	5.08	02	2.04	08	Validasi dan Diseminasi Hasil Litbangjirap	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan validasi dan Diseminasi Hasil Hasil Litbangjirap	3 Laporan	78.721.764,00	1 Laporan	77.249.180,00	3 Laporan	20.353.249,00		97%		26%	3	114.974.908,00
Keterangan :								13.308.335.520,00		13.605.600.335,00		4.628.412.519,00				80%		15.026.799.059,00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Bapperida Kabupaten Gunung Mas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2025-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapperida Kabupaten Gunung Mas dalam 2 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Gunung Mas.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD untuk dilakukan indentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPD, sesuai pada Tabel 2 dibawah ini Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bapperida Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAPPERIDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja	Target Kinerja	Kondisi Akhir RPD
				2025	2026	
1	Konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	100%	100%	100%
		Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Riset dan Inovasi daerah	Meningkatnya Kualitas Riset dan Pemanfaatanya dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah	2 Kajian	3 Kajian	3 Kajian
		Meningkatnya Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Indikator Kinerja Perangkat Daerah adalah tolak ukur untuk menilai kinerja Badan Perencanaan Pembagunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melakukan analisis mendalam terkait kinerja pelayanan yang dirangkum melalui yang diperkirakan untuk tahun anggaran 2025-2026 yang mengacu pada RPJP dan RPD Tahun 2025-2026 Kabupaten Gunung Mas :

Dengan adanya indikator Kinerja Utama Bapperda ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi personil untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam perjanjian kinerja.

2.2.2 Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan peran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Gunung Mas. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan yang dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui kebijakan, koordinasii, sinkronisasi dan pengendalian perencanaan, riset, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi didaerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bapperida menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di Badan Perencanaan Pembanguan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan Koordinasi badan dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
3. Koordinasi badan kebijakan di bidang riset dan inovasi, ekonomi, social budaya, sarana dan prasarana infrastruktur, kependudukan dan pemerintahan, pengendalian dan pemerintahan;
4. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut Tingkat dan tahapannya;
5. Penyusunan program-program jangka Panjang menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah kabupaten;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten;
8. Pelaksanaan kerjasama antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota lain dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri;
9. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
10. Pemberian masukan dan usulan serta saran dan pertimbangan kepada Bupati baik dalam menyusun kebijakan daerah dalam perencanaan pembangunan;
11. Pembagian habis tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
12. Penilaian tehadap kinerja bawahan; dan
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam rangka pelayanan kinerja Bapperida memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahkan :
   a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
   b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset;
   c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang, terdiri dari :
   a. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   b. Bidang Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan;
   c. Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
   d. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Isu Strategis Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembangunan manusia sesuai mutu pelayanan dasar;

   Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja,jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki values dan berketrampilan, akan sangat

bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi.

2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesiblitas wilayah;

   Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan Pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangasung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kinerja pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Gunung Mas merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Optimalisasi penaggulangan kemiskinan;

   Salah satu contoh sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangya pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Sehingga salah satu cara memutus rantai kemiskinan

adalah dengan adanya memfasilitasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan crucial problem. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi dan pendidikan diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang, pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

4. Percepatan reformasi birokrasi;

   Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah,

murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik. Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Gunung Mas.

5. Peningkatan perekonomian melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah; dan Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan.

Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan Aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu implementasi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan ini maka diperlukan kemandirian dan keberdayaan masyarakat sebagai prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Memahami kondisi dan situasi saat ini Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang mendorong pengembangan dan peningkatan serta pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini harus disikapi dengan adanya mitigasi terhadap perusakan lingkungan hidup (kebakaran hutan, bencana alam, polusi air, polusi udara, limbah B3), pengelolaan sampah, rencana aksi nasional penurunan emisisi sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hal ini perlu disikapi dengan serius oleh Pemerintah Daerah agar mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan keterpaduan kehidupan yang lebih dinamis.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bapperida

Dari hasil tarik data pada RPD dan Renstra terhadap gambaran umum dan analisis permasalahan pembangunan pada tahun pelaksanaan pembangunan 2019-2023 maupun sebelumnya, maka permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah

"Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas". Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik;dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Permasalahan utama Kabupaten yang juga menjadi permasalahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah **Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik**. Dalam menunjang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, di dalamnya harus termuat beberapa standar diantaranya : *accountability, transparancy, predictability*, dan *participation*. Sesuai dengan data yang di peroleh pada Dokumen RPD Kabupaten Gunung Mas TA. 2025-2026 Penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari beberapa indikator.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

1. Arah Pembangunan Tahun 2025

Dengan melanjutkan pembangunan tahun 2024, pada tahun 2025 ini pembangunan Kabupaten Gunung Mas menitikberatkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur yang memadai sebagai percepatan aksesibilitas wilayah, hal ini diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan terkait Ekonomi, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan. Dampak yang cukup terasa pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam rangka menangani hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2025 adalah **"Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan"**. Dengan tema ini beberapa fokus pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi Masyarakat;
b. Peningkatan daya saing SDM dengan pelatihan;
c. Peningkatan kerja sama penempatan tenaga kerja daerah dengan Perusahaan/Pelaku Usaha di Daerah;
d. Pembangunan dan pemeratan Infrastruktur Pelayanan Publik (Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, dan Perumahan) bagi kesejahteraaan Masyarakat sesuai kewenangannya;
e. Perluasan dan peningkatan produktivitas ekonomi terhadap komoditas unggulan daerah (Agro dan Wisata);

f. Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup;
g. Peningkatan kualitas ASN melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan maupun Daerah Lain yang berprestasi; dan
h. Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital.

Kebijakan yang dilakukan Bapperida Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, riset dan inovasi daerah yang terkandung dalam tujuan ke- empat adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan seseuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja;
3. Melaksanakan Pengendalian data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan Daerah;
4. Melaksanakan pengkajian dan Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
5. Fasilitasi dan Pelaksanaan inovasi daerah.

Tabel 3

Strategi dan Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Gunung Mas terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam 5 Tahun Mendatang.

Tujuan	Sasaran	Arah kebijakan				Baseline	Target	Anggaran			
S4.9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penguatan tata kelola kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	90%	100%	27.556	100%	28.000	Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	90%	100%	1.759	100%	1.850	Bapperida / Bappedalitbang
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	90%	100%	21.876	100%	22.000	Sekretariat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan Bapperida Kabupaten Gunung Mas mengacu pada **Tujuan 4 :** Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel dijabarkan dengan capaian program kerja Tujuan Bapperida yang merupakan kondisi lima tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai mana Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu **Tata kelola perencanaan pembangunan yang berkualitas** serta **penelitian dan pengembangan yang inovatif.** *Good and clean governance* memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan public untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ini dapat diukur keberhasilannya dengan indikator Indeks Reformasi Birokasi. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut

2. Sasaran

Perumusan dari sasaran Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas mengacu pada arah tujuan itu sendiri, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Hasil penelitian yang ditindaklanjuti;
3. Kebijakan terhadap inovasi.

Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel	Konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
			Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100 %	100 %	100 %	100%
2		Meningkatnya Pelaksanaan Riset dan Inovasi daerah	Meningkatnya Jumlah Riset dan Pemanfaatanya dalam Pengambilan Kebijakan	2 Hasil Penelitian pengembangan	3 Hasil Penelitian pengembangan	4 Hasil Penelitian pengembangan	5 Hasil Penelitian pengembangan	5 Hasil Penelitian dan Pengembangan
			Meningkatnya Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat Inovatif	Predikat Inovatif	Predikat Terinovatif	Predikat Terinovatif	Predikat Inovatif

Berdasarkan Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Tujuan Bapperida Kabupaten Gunung Mas maka disusun lah Indikator Kinerja Utama serta Target Kinerja sebagai pedoman pada tahun 2025 sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Bapperida

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Kinerja
				2025
1	Konsistensi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase	100%
		Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase	100%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Riset dan Inovasi daerah	Meningkatnya Kualitas Riset dan Pemanfaatanya dalam Pengambilan Kebijakan	Jumlah	2 Kajian
		Meningkatnya Predikat Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif

Dengan tersusunnya target dan indikator kinerja Bapperida berkaitan Secara khusus maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan Tahun 2024.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Menjadi salah satu bahan dalam penyusunan kerangka dasar bagi RKPD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai upaya untuk mewujudkan sosok aparatur Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang profesional dan handal dalam menjalankan tugas serta terwujudnya pola pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil secara proporsional, berjenjang dan berkelanjutan menuju *Good Governance*.

Sedangkan Tujuan khusus penyusunan dari Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada tujuan masa depan (*future Goals*).
5. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk menghadapi tindakan masa depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

Sedangkan kegunaan Rencana Strategis sebagai alat kendali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas untuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2025.

3.3 PROGRAM KEGIATAN DAN KELOMPOK SASARAN

3.3.1 Program Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang di dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 44 Tahun 2023 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas. Bapperida merupakan Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mempunyai tugas pokok " Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui kebijakan, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Gunung Mas. Dengan demikian kegiatan/sub kegiatan merupakan penjabaran lebih

lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan Bapperida Kabupaten Gunung Mas di bagi atas 2 (dua) urusan yaitu Perencanaan dan Penelitian Pengembangan. Terdapat 4 program yang termuat di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini berisi kegiatan dan sub kegiatan yang memuat pelayanan dasar dan oprasional kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas harian aparatur sipil negara dan pegawai harian tidak tetap. Kegiatan dimaksud diantaranya : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan-kegiatan ini kemudian dijabarkan kembali secara mendetail ke dalam Sub-Sub kegiatan yang termuat di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Program ini berisi berbagai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida dalam bidang perencanaan daerah, kelengkapan data perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah yang memuat kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Kegiatan-kegiatan ini kemudian dijabarkan kembali secara mendetail ke dalam Sub-Sub kegiatan yang termuat di dalam Renja

Perubahan Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari terlaksananya tugas dan pekerjaan pada Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah untuk mencapai target kinerja terwujudnya konsistensi program RPJMD kedalam Dokumen RKPD Kabupaten Gunung Mas.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini berisi berbagai kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida sebagai fungsi koordinasi dalam kegiatan pembangunan daerah di bidang perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia selain itu sebagai Fungsi koordinasi Kegiatan Perencanaan pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur, Pengembangan wilayah dan tata ruang serta Sumber Daya Alam dan Kewilayahan. Kegiatan kegiatan yang termuat dalam program ini yaitu : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Kegiatan-kegiatan ini kemudian dijabarkan kembali secara mendetail ke dalam Sub-Sub kegiatan yang termuat di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari terlaksananya tugas dan pekerjaan pada Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah untuk mencapai target kinerja terwujudnya konsistensi program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Gunung Mas.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini berisi bebagai kegiatan pelaksanaan tugas dan Fungsi Bapperida sebagai Penentuan Kebijakan dan fungsi koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi. Kegiatan yang termuat diantaranya : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Kegiatan-kegiatan ini kemudian dijabarkan kembali secara mendetail ke dalam Sub-Sub kegiatan yang

termuat di dalam Renja Perangkat Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dari terlaksananya tugas dan pekerjaan pada Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah adalah wujud tercapainya target kinerja peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan meningkat indeks inovasi daerah kabupaten Gunung Mas.

3.3.2 Kelompok Sasaran

Program-program yang ada di dalam Renja melalui kegiatan/ Sub Kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, adalah memberikan pelayanan kepada para Aparatur Sipil Negara serta Pegawai Harian Tidak Tetap dalam menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsinya maupun masyarakat umum baik dalam kerangka organisasi, kelompok, maupun perorangan. Disamping itu untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Aparaturnya yang diharapkan dapat menciptakan ASN yang netral dan sejahtera sehingga dapat memberikan pelayanan prima baik kepada sesama ASN maupun kepada masyarakat umum.

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel berikut:

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, sebagai langkah awal untuk mewujudkan Konsistensi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas dan Bapperida Kabupaten Gunung Mas sehingga mampu menjadi patok tuju (*Benchmark)* bagi pelaksanaan kegiatan.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan untuk itu diperlukan adanya kerjasama antar bidang-bidang di Bapperida Kabupaten Gunung Mas untuk peningkatan dan pengembangan perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunung Mas sehingga tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan dan dapat meningkatkan citra Bapperida Kabupaten Gunung Mas pada umumnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas khususnya agar menjadi lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN						11.525.066.225,00							1.847.925.380,00	
	X	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.486.157.765,00							1.847.925.380,00	
	X.01	PERENCANAAN						10.355.887.961,00							1.847.925.380,00	
1.	X.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	7.306.991.943,00						-	0,00	
	X.01.01.0.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-			-	82.320.940,00			-	Mewujudkan pemerintah yang lebih profesional responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	X.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	83.017.720,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Rasia Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang lebih profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	X.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.626.000,00	Kab. Gunung Mas, Kecat, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.701.400,00	Kab. Gunung Mas, Kecat, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan di daerah Peningkatan Tata kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	13.573.800,00	Kab. Gunung Mas, Kecat, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.713.443.672,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		5,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	4.484.399.672,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			5,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	35.565.096,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (SKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan (Konsolidasi SKPD				1 Laporan	7.665.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	2.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.040,00			-		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	2.01.01.2.03.3006	Pemeliharaan/Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.040,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 0003	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PEMBIAYAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0.01.01.2.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	99.637.000,00			-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	14.290.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pemerintah pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.05.0003	Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Penatausaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	10.287.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.05.2011	Sosialisasi Tatanis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PENANGGAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	69.920.666,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	970.715.999,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.06.3001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	99.315.900,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.01.2.06.3004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RPJMD/ RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	19.638.380,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pemerataan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	48.926.164,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pemerataan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.700.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurus, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka pemerataan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Monesor yang Disediakan				5 Paket	187.110.252,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Meneruskan pemerintah yang lancar, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	13.035.180,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Meneruskan pemerintah yang lancar, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	830.912.690,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	Meneruskan pemerintah yang lancar, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Aset Tetap/ Inventaris pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perlaksanaan Anjab Ornanisi pada SKPD				1 Dokumen	16.568.180,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	454.649.677,80			-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	332.950.635,30	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Gedung dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	PENILAIAN CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Rangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	191.568.342,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		5,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	231.714.000,00			-		-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	1.500.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Pasak Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		3,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	CODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Konsultasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	98.000.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0004	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	129.212.292,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	519.636.367,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0007	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PERKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	58.025.278,80	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perlengkapannya				21 Unit	335.800.139,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	92.332.174,69	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dioptimalkan/Direhabilitasi				2 Unit	12.475.776,00	Kab. Gunung Mas, Kotan, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Percepatan Tata kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.758.880.547,00						-	1.847.920.080,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan						1.402.080.019,00				Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Percepatan Tata kelola pemerintahan berbasis digital			1.908.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kinerja Daerah, Perencanaan, dan/atau Strategi Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Status Kelaikan/tidak Jika RPJMD Maka Rancangan Tersusunnya)				2 dokumen Dokumen	519.892.110,00	Kab. Gunung Mas, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka peningkatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		545.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Tersedia Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 dokumen Dokumen	44.601.133,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka peningkatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		47.155.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 berita acara Berita Acara	21.770.940,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka peningkatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		22.954.089,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 3026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah Untuk Perangkat Daerah				2 berita acara Berita Acara	26.564.706,65	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penciptaan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			27.982.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten Kota				2 berita acara Berita Acara	122.084.900,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penciptaan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			122.104.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0009	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1128 Usulan	61.996.133,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penciptaan pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital			83.994.065,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 dokumen Dokumen	658.470.200,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		591.462.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	83.349.403,00			-		-	-	89.140.569,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0003	Penyimpan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemetaandan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dilatih dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				269 Orang	83.349.403,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		68.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET PENUTUP OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	209.149.798,00			-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	242.597.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	134.661.540,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		161.426.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 laporan Laporan	84.649.225,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		99.171.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.00.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-	-			-	13.298.163,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	13.963.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 dokumen Dokumen	13.298.163,00	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER LAIN/ DANA KONDISI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	13.963.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
5.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-			-	1.938.886.371,84						-	0,00	
	5.01.03.5.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	322.480.078,20			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, prof esional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				5 Laporan	186.328.182,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang aman, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				5 Laporan	443.379.484,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang aman, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.3.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	454.981.625,00			-	Mewujudkan pemerintah yang aman, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.3.02.0001	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	390.533.809,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02.3008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	139.480.016,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03	Koordinasi Penyelarasan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	449.496.670,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelesaian pembangunan di daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.3004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi /Renstra/Renja dengan RKPD/PPJMD pada Bidang Infrastruktur				0 Laporan	600.874.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.03.0006	Koordinasi Fasilitasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi /Renstra/Renja dengan RKPD/PPJMD pada Bidang Kewilayahan				0 Laporan	182.923.982,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan berbasis digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.126.289.834,00							0,00	
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-			-	1.126.289.834,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	35.530.000.00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang digital	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.2003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Sidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	35.530.000,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	325.650.660,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang digital	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03.3001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Dasar				1 Dokumen	320.083.690,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.06.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	320.083.690,00			-		-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.06.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0 Dokumen	320.083.690,00	Kab. Gunung Mas, Kuran, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	0.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			-	420.588.844,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berdaya Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berdaya Inovatif				1 Laporan	326.342.954,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	0.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	77.244.090,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintahan ke arah digital	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	X	NON URUSAN						44.811.080,00							0,00	

NO	CODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						44.011.560,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	44.011.560,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	44.011.560,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis elektronik	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
	X.XX.01.2.01.0027	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	44.011.560,00	Kab. Gunung Mas, Kurun, Rusia Kurun	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah Peningkatan Tata Kelola pemerintah berbasis elektronik	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
		JUMLAH						11.020.806.335,00							1.847.933.000,00	

RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025

UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN



Alamat :

Jalan Ahmad Yani No.43
Kuala Kurun (74511)
Kalimantan Tengah

rsudkualakurun@yahoo.co.id

http://bludrsud.gunungmaskab.go.id

RSUD KUALA KURUN

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN







KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaanNya maka Rencana Kerja Tahun 2025 UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tahun 2025 merupakan perencanaan dan penganggaran yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja Rumah Sakit periode satu tahun, Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Besar harapan kami Rencana Kerja Tahun 2025 ini mendapat dukungan luas dari semua pihak untuk suksesnya program peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit.

Kiranya Rencana Kerja pada UPT RSUD Kuala Kurun ini dapat berguna sebagai salah satu syarat administrasi Badan Layanan Umum Daerah.

Kuala Kurun, Juli 2025

DIREKTUR,

dr. RUSNI D MAHAR
Pembina Tingkat I
NIP. 19780803 200604 2 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN *1*
1.1 LATAR BELAKANG *3*
1.2 LANDASAN HUKUM *2*
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN *6*
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN *7*

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024 ..... *9*
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD *9*
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD *9*
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..... *9*
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD *10*
2.5 PENELAAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT *10*

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *11*
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL *11*
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA..... *11*
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... *12*

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025 ..... *16*

BAB V PENUTUP *21*
LAMPIRAN

B A B I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun terletak di Jln. Ahmad Yani No. 43 Kuala Kurun, dengan luas 26.721 M^2 berdasarkan sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai Nomor 031, Tanggal 16 Februari 2008, dan mendapat hibah dari Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 23 Tanggal 17 Januari 2007 dengan Luas 3.536 M^2 sehingga Total Luas UPT RSUD Kuala Kurun adalah 30.257 M^2. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pertama kali dibangun pada tahun 1982 berupa sebuah bangunan dengan konstruksi kayu sebagai Poliklinik. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun pertama kali beroperasi pada tanggal 19 September 1986, dengan fasilitas 2 (dua) buah bangunan berupa 1 (satu) buah bangunan poliklinik dan 1 (satu) buah bangunan ruang rawat inap. Pada tahun 1999 kegiatan pembangunan ruang kebidanan, tahun 2003 rehab bangunan rawat inap (bangsal), tahun 2004 pembuatan selasar depan ruang kebidanan sampai kamar jenazah dan gudang dan rehab bangunan Poliklinik.

Pada Tahun 2013 dengan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh diberikan kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan dimana Rumah Sakit sebagai Unit Layanan Publik dituntut untuk dapat memberikan Pelayanan secara Profesional, Fleksibel, Efisien dan Efektif agar dapat memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

Dimulai pada Tahun 2015 Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun melakukan survey akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan (Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit).

Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dinyatakan telah memenuhi standar pelayanan sesuai dengan sertifikat dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/240/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dinyatakan LULUS Tingkat PERDANA.

Pada Tahun 2019 dilaksanakan survey akreditasi rumah sakit yang dilaksanakan pada tanggal 17 s.d 19 September 2019 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun memenuhi standar pelayanan, peningkatan mutu dan budaya keselamatan serta etika profesi dengan dikeluarkannya sertifikat dan dinyatakan LULUS Tingkat UTAMA (Bintang Empat).

Pada bulan mei Tahun 2024 tanggal 27 s.d 30 dilaksanakan Penilaian Survey Akreditasi Rumah Sakit Oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP) dan mendapat status Akreditasi Lulus “PARIPURNA” melalui Sertifikat Nomor 00332/V/VI/2024.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat evaluasi program, kegiatan dan pendanaan indikatif pada tahun sebelumnya serta rencana untuk tahun yang akan datang, baik program dan kegiatan rutin maupun strategis.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kuala Kurun Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Penyusunan Renja 2025 UPT RSUD Kuala ini untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan RENJA UPT RSUD Kuala Kurun.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada. Berdasarkan landasan diatas, maka dengan optimalisasi sumber daya serta pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja yang baik dan tepat, diharapkan pelaksanaan RENJA yang dimiliki oleh UPT RSUD Kuala Kurun ini dapat berhasil.

UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mempunyai peran peyelenggaraan pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaa Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan permasalahan RSUD yang begitu komplek Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi keuangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Tahun 2025 (Renja TA 2025) UPT. RSUD Kuala Kurun disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
22. Peraturan Gubenur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 118.a);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah kabupaten Gunung mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);
27. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Gunung Mas;
28. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
29. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
30. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud :

a) Tersedianya dokumen perencanaan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.
b) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.
c) Menjadi Tolok Ukur kinerja dalam mencapai misi dan tujuan UPT. RSUD Kuala Kurun Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan :

a) Menjabarkan rencana strategis UPT RSUD Kuala Kurun Tahun 2019-2024 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan kesehatan rumah sakit.
b) Menjadi pedoman bagi UPT RSUD Kuala Kurun dalam melaksanakan seluruh kegiatan UPT RSUD Kuala Kurun .
c) Menjadi acuan bagi UPT RSUD Kuala Kurun dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2025.

d) Menciptakan sinergisitas dan kepastian dalam perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja UPT RSUD Kuala Kurun disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja K/L dan Renja provinsi/ kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2.1. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah lainnya, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

3.1. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah.

4.1. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

3.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

4.1. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

5.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

6.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

5.1. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Disamping itu dengan telah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah pada UPT. RSUD Kuala Kurun yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja UPT RSUD Kuala Kurun dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 disajikan dengan Tabel T-C.29 pada lampiran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501), dapat disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tabel T-C.30 pada lampiran.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

UPT RSUD Kuala Kurun adalah rumah sakit yang sedang berkembang sehingga masih sangat diperlukan peningkatan sarana dan prasarana. Klasifikasi Rumah Sakit sampai saat ini Kelas C Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Permasalahan yang dihadapi UPT RSUD Kuala Kurun saat ini perlu mendapat perhatian dalam rangka menyusun rencana strategi rumah sakit. Dengan mengetahui permasalahan yang ada maka akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan

yang dapat menjawab berbagai tantangan ke depan. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal melalui analisa SWOT.

Untuk mewujudkan hal tersebut UPT RSUD Kuala Kurun merencanakan :

a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, paramedis profesional dan profesional non medis.
b. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan pada tiap unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan standar.
c. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah
d. Mengupayakan untuk menempuh akreditasi sekaligus menata kualitas standar pelayanan.
e. Pembangunan ruang rawat inap sesuai standar.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat terlihat jelas di Tabel T-C.31 pada lampiran.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan UPT. RSUD Kuala Kurun dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penambahan pelayanan kesehatan rumah sakit menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
2. Pelayanan maksimal terhadap masyarakat melalui pelayanan BPJS.
3. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan UPT RSUD Kuala Kurun .

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2022 sesuai dengan Tabel T-C.32 pada lampiran.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Kesehatan (RPJMD) kondisi pembangunan dibidang kesehatan diharapkan mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional tersebut yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka UPT RSUD Kuala Kurun berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal kepada masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.2.1. Tujuan

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga menumbuh kembangkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.

Terciptanya sarana dan prasarana sesuai standar Rumah Sakit Kelas C.

3.2.2. Sasaran

Meningkatnya kualitas dan terintegrasinya pelayanan kepada pelanggan sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan meningkat.

Meningkatnya etos kerja dan disiplin para pegawai UPT RSUD Kuala Kurun

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas dan penjabaran tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPT RSUD Kuala Kurun Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sesuai dengan Tabel T-C.33 pada lampiran.

3.3.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Tujuan :
   1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor;
   2. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik;
   3. Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis;
   4. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu.
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Sub kegiatan :
         a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAP-SKPD
         d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
         e. Koordinasi dan Penyusunan DPPA-SKPD
         f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    1) Sub Kegiatan
        a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)
        c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
        d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Sub kegiatan
        a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Peningkatan Pelayanan BLUD
    1) Sub kegiatan
        a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
h. Kegiatan Penataan Organisasi
    1) Sub Kegiatan
        a. Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

3.3.2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Tujuan : Presentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan
         a. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
         b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Rehap Selasa Tahap II)
         c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
         d. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
         e. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan
         a. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkunganKegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
         b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
   c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
      1) Sub Kegiatan
         a. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
         b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota
   d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
      1) Sub kegiatan
         a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3.3.3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Tujuan : Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan
2. Sasaran : Pegawai di rumah sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
    a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
    b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.3.4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Tujuan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan
2. Sasaran : Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
3. Kegiatan dan Sub kegiatan :
    a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
        1) Sub kegiatan
            a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Tahun 2025 Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dalam penyusunannya berpedoman secara umum pada Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati Gunung Mas serta secara khusus berpedoman pada Visi dan Misi UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, maka di susunlah program-progam Tahun 2025 sebagaimana tertuang didalam tabel berikut ini :

.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN UPT. RSUD KUALA KURUN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2025
	BELANJA	**58.220.344.004**
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**46.002.330.774**
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**156.262.210**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.488.380
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi & Penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.424.630
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.530.600
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	1.545.000
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi & Penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.423.400
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	2.850.200
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**29.947.207.212**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	29.947.207.212
1.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**123.465.360**
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	123.465.360
1.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**455.033.015**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	337.296.960
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	4.968.000
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	18.845.755
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	93.922.300
1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.391.873.200**
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Surat Menyurat	10.193.200
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.381.680.000
1.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**419.356.737**
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	20.798.733
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan	170.543.136

	kendaraan dinas operasional atau lapangan	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.014.868
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.500.000.000**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	13.500.000.000
1.02.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**9.133.040**
1.02.01.2.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.133.040
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**3.668.153.878**
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.252.458.618**
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	194.873.925
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	69.904.680
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.413.689.251
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	573.990.762
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**186.140.520**
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	11.986.500
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	174.154.020
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**156.195.200**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.195.200
1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**73.359.540**
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	73.359.540
01.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**8.493.277.332**
1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Di wilayah Kabupaten/Kota**	**8.142.936.792**
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	8.142.936.792
1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**350.340.540**

1.02.03.2.03.0001	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.340.540
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**56.582.020**
1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**56.582.020**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.582.020

B A B V
P E N U T U P

Rencana Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tahun 2025 merupakan hasil komitmen perencanaan awal yang sekaligus memberikan arah pada pemangku kepentingan di UPT RSUD Kuala Kurun untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

Rencana kerja ini dibuat dengan analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada. Oleh karena itu renja ini menggambarkan kebutuhan awal UPT RSUD Kuala Kurun dalam rangka mencapai visi misi yang diharapkan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

TABEL T - C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	TOTAL BELANJA								**24.422.090.743**	
	BELANJA		**7.514.291.130,50**	**45.092.061.452,00**	**58.646.452.882,42**	**50.475.018.780,00**		**58.694.172.154**	**16.475.169.944**	
	BELANJA MODAL								**102.279.000**	
	BELANJA BARANG JASA BLUD								**7.946.920.799**	
1.02.01.2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**4.830.981.172,50**	**26.629.336.152,00**	**49.024.028.410,42**	**42.178.319.011,00**	**86,04**	**51.114.593.831**	**13.852.247.453**	**86,04**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**5.000.000,00**	59.277.780,00	102.253.440,00	**101.637.938,00**	**99,40**	**76.191.430**	**64.390.377**	**99,40**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan		47.322.400,00	90.052.640	89.727.538,00	**99,64**	63.417.600	60.778.077	189,61
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	5.000.000,00	3.480.000,00	3.331.800	3.233.000,00	**97,03**	3.424.630	828.800	92,90
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan		3.249.000,00	3.530.600	3.405.300,00	**96,45**	3.530.600	-	104,81
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan		1.349.800,00	1.233.000	1.232.500,00	**99,96**	1.545.000	1.532.500,00	91,31
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan		1.423.400,00	1.423.400	1.393.000,00	**97,86**	1.423.400	-	97,86
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja yang dihasilkan		2.453.180,00	2.682.000	2.646.600,00	**98,68**	2.850.200	1.251.000	107,88
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**-**	**14.315.999.224,00**	**21.826.743.304,00**	**19.616.071.579,00**	**89,87**	**26.615.575.568**	**13.173.554.257**	**89,87**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar		14.315.999.224,00	21.826.743.304	19.616.071.579,00	**89,87**	26.615.575.568	13.173.554.257	137,02
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**650.000.000,00**	**126.135.190,00**	**125.658.000,00**	**120.331.748,00**	**95,76**	**123.465.360**	**43.911.944**	**95,76**
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	650.000.000,00	126.135.190,00	125.658.000	120.331.748	**95,76**	123.465.360	43.911.944	95,40
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	**813.440.000,00**	**422.237.280,00**	**469.640.215,00**	**463.729.054,00**	**98,74**	**552.549.015**	**226.634.035**	**98,74**
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum untuk pasien UPT. RSUD Kuala Kurun	450.000.000,00	337.296.960,00	337.296.960	337.182.000,00	**99,97**	337.296.960	159.044.000	99,97
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembelian buku dan surat kabar/majalah	38.440.000,00	2.484.000,00	2.484.000	1.800.000,00	**72,46**	2.484.000	900.000	72,46
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25.000.000,00		15.244.155	12.870.000,00	**84,43**	29.916.255	-	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	300.000.000,00	82.456.320,00	114.615.100	111.877.054,00	**97,61**	82.851.800	66.690.035	135,68
1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						100.000.000		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Rumah Sakit**	**1.000.000.000,00**	**330.000.000,00**	**3.667.920.000,00**	**3.482.190.000,00**	**94,94**	**892.612.432**	**-**	**-**
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Ambulance)	Tersedianya kendaraan dinas operasional	1.000.000.000,00	330.000.000,00	618.492.000	608.140.000,00	**98,33**	618.492.200		
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						100.000.000		
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						157.920.232		
01.02.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			3.049.428.000,00	2.874.050.000,00	**94,25**	16.200.000		
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**771.182.000,00**	**406.941.280,00**	**729.628.000,00**	**679.618.192,00**	**93,15**	**759.446.000**	**305.435.140**	**249**
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, buku cek dan pengiriman/pemaketan dokumen	6.348.000,00	7.966.000,00	7.938.000	6.413.500,00	**80,79**	7.966.000	2.000.000	80,51
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	764.834.000,00	398.975.280,00	721.690.000	673.204.692,00	**93,28**	751.480.000	303.435.140	168,73
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	**1.591.359.172,50**	**468.745.398,00**	**489.692.322,00**	**468.266.013,00**	**95,62**	**482.260.897**	**38.321.700**	**361**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	36.368.750,00	16.465.928,00	20.968.015	9.172.800,00	**43,75**	20.968.015		55,71
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional Rumah Sakit	474.990.422,50	154.319.500,00	154.426.722	145.621.213,00	**94,30**	154.426.722	4.431.700	94,36
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rumah Sakit	550.000.000,00	112.008.270,00	119.510.345	119.439.000,00	**99,94**	112.078.920	33.890.000	106,63
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Telaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	530.000.000,00	185.951.700,00	194.787.240	194.033.000,00	**99,61**	194.787.240		104,35
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	**9.500.000.000,00**	**10.500.000.000,00**	**21.612.493.129,42**	**17.246.474.487,00**	**79,80**	**21.612.493.129,00**	**7.946.920.799,00**	**79,80**
1.02.01.2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Belanja Operasional Rumah Sakit	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	21.612.493.129	17.246.474.487,00	**79,80**	21.612.493.129,00	7.946.920.799	164,25
01.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.082.400,00**	**1.598.400,00**	**17,60**	**22.417.530,00**		
01.02.01.02.13	**KEGIATAN PENATAAN ORGANISASI**				**9.082.400,00**	**1.598.400,00**	**17,60**	**22.417.530,00**		
01.02.01.02.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring ,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				9.082.400,00	1.598.400,00	**17,60**	22.417.530		
1.02.02.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**2.646.301.118,00**	**4.391.871.180,00**	**1.670.888.274,00**	**1.566.822.789,00**	**93,77**	**1.560.859.779,00**	**158.428.099,00**	**93,77**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	**2.265.351.118,00**	**4.124.780.330,00**	**1.253.943.345,00**	**1.242.389.100,00**	**99,08**	**1.143.914.770**	**107.829.000**	**99,08**
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan Sesuai Standar	174.133.575,00	326.184.000,00	617.460.000	608.468.000,00	**98,54**			186,54
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	222.140.325,00	69.993.000,00	69.903.800	69.593.000,00	**99,56**	69.903.800		99,43

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM KEGIATAN TAHUN LALU 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n - 1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Alat Kesehatan sesuai standar	1.049.077.218,00	3.112.759.050,00			**#DIV/0!**	500.000.000		-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat kesehatan	820.000.000,00	615.844.280,00	566.579.545	564.328.100,00	**99,60**	574.010.970	107.829.000,00	91,63
1.02.02.2.02	**Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**330.950.000,00**	**120.308.910,00**	**187.340.929,00**	**141.369.129,00**	**75,46**	**187.340.929**	**4.478.000**	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya kegiatan uji sampel secara berkala	40.000.000,00	11.998.350,00	11.986.729		**-**	11.986.729		-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan akreditasi Rumah Sakit	290.950.000,00	108.310.560,00	175.354.200	141.369.129,00	**80,62**	175.354.200	4.478.000	130,52
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**50.000.000,00**	129.526.640,00	**156.195.300,00**	**110.158.260,00**	**70,53**	**156.195.380**	**4.161.180**	**70,53**
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	50.000.000,00	129.526.640,00	156.195.300	110.158.260,00	**70,53**	156.195.380	4.161.180	85,05
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**-**	**17.255.300,00**	**73.408.700,00**	**72.906.300,00**	**99,32**	**73.408.700**	**41.959.919**	**99,32**
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Penyusunan SOP, SPM, Juknis, Protokol Rumah Sakit		17.255.300,00	73.408.700	72.906.300,00	**99,32**			
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan						73.408.700	41.959.919	
1.02.03.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	**-**	**14.014.125.920,00**	**7.885.601.778,00**	**6.697.420.839,00**	**84,93**	**5.939.718.994**	**2.362.215.392**	**84,93**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	**-**	**13.664.023.570,00**	**7.535.499.578,00**	**6.351.948.274,00**	**84,29**	**5.589.616.794**	**2.360.051.392**	**84,29**
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terpenuhinya Honorarium pegawai ASN dan Kontrak pada RSUD Kuala Kurun	-	13.664.023.570,00	7.535.499.578	6.351.948.274,00	**84,29**	5.589.616.794	2.360.051.392	46,49
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**-**	**350.102.350,00**	**350.102.200,00**	**345.472.565,00**	**98,68**	**350.102.200**	**2.164.000**	**98,68**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Kesehatan (Perawat dan Bidan) Berkualitas	-	350.102.350,00	350.102.200	345.472.565,00	**98,68**	350.102.200	2.164.000	98,68
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase cakupan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**37.008.840,00**	**56.728.200,00**	**56.852.020,00**	**30.857.741,00**	**54,28**	**56.582.020**	**-**	**54,28**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**37.008.840,00**	**56.728.200,00**	**56.852.020**	**30.857.741,00**	**54,28**	**56.582.020**	**-**	**54,28**
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan promosi kesehatan	37.008.840,00	56.728.200,00	56.852.020	30.857.741,00	**54,28**	56.582.020		54,40

TABEL T - C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 BULAN JUNI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	TINGKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Rasio Pegawai RSUD Kuala Kurun	10 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	14 DOKTER SPESIALIS	15 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	12 DOKTER SPESIALIS	11 DOKTER SPESIALIS	9 DOKTER SPESIALIS	12 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	9 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	
2	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Jumlah Unit Pelayanan Yang Mendapatkan Peralatan Kesehatan	55%	65%	75%	80%	85%	87%	62,06%	76,71%	85,43%	93,06%	99,50%	-	-	-			
3	JUMLAH KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Terpenuhinya Obat Dan Perbekalan Pasien Pada Tiap Unit Pelayanan	60%	65%	75%	80%	85%	87%	-	43,72%	89,51%	99,09%	99,98%	64,98%		-			
4	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Tersediaan Peralatan Rumah Tangga Pada Tiap Unit Pelayanan	60%	65%	75%	80%	85%	87%	93,66%	70,45%	73,40%	98,50%	93,28%	98,70%	-	-			
5	JUMLAH KETERSEDIAAN BANGUNAN, GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT PELAYANAN	Manajemen asset SKPD	Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Pada Tiap Unit Pelayanan Rsud Kuala Kurun	33%	33%	40%	50%	50%	50%	78,60,%	98,22%	99,87%	98,79%	99,61%	-	-	-			
6	JUMLAH PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana Prasarana Rsud Kuala Kurun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,71%	83,05%	93,57%	63,00%		-	-	-			
7	JUMLAH PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,12%	95,38%	67,42%	99,99%	99,99%	99,78%	-	-			
8	JUMLAH PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Ruitn/ Berkala Alat-Alat Kesehatan Rsud Kuala Kurun Pada Tiap Unit Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,20%	90,84%	91,45%	77,86%	99,60%	18,79%	-	-			
9	JUMLAH PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA KURUN	Besaran belanja pemeliharaan	Adanya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Penunjang Rsud Kuala Kurun Pada Tiap Unit Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,20%	87,20%	73,40%	90,20%	99,60%		-	-			
10	PENINGKATAN PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	57%	65%	67%	70%	75%	75%	37.15%	26.94%	35.47%	25.60%	25,84%	36%	-	-			
11	PENINGKATAN JUMLAH BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 TAHUN) TEMPAT TIDUR	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	47,72 Kali	47,4 Kali	54,25 Kali	55,70 Kali	55,80 Kali	56,01 Kali	11.9 Kali	31 Kali	35 Kali	29 Kali	26 Kali	19 Kali	-	-			
12	PENURUNAN JUMLAH TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2,73 Hari	2,73 Hari	2,70 Hari	2,68 Hari	2,60 Hari	2,30 Hari	5,76 Hari	9 Hari	7 Hari	9 Hari	10,41 Hari	6,16 Hari	-	-			
13	PENINGKATAN JUMLAH RAWAT INAP	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2.726	2.830	2.895	3.233	3.500	3.500	2.707	1.825	2.340	2.107	2,474	1.698	-	-			
14	PENINGKATAN JUMLAH TEMPAT TIDUR	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	53	90	110	140	150	150	53	59	76	108	103	103	-	-			
15	TERTATANYA DATABASE RUMAH SAKIT	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	60%	65%	75%	80%	85%	85%	100%	100%	92,15%	98,92%	70,53%	2,88%	-	-			
16	PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	14.040	15.000	15.777	18.777	30.550	30.986	14.040	10.662	11.974	12.117	19,335	9.735	-	-			
17	PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET DEATH RATE (NDR)	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	4,02 ‰	4,01 ‰	4,00 ‰	3,80 ‰	3,50 ‰	3,00 ‰	3,3 ‰	6,5 ‰	19,61 ‰	17 ‰	7,09 ‰	9,5 ‰	-	-			
18	GDR	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	14,27 ‰	14,27 ‰	13,57 ‰	12,95 ‰	12,37 ‰	11,85 ‰	11.47 ‰	14,75 ‰	35,47 ‰	25,63 ‰	21,66 ‰	16,5 ‰	-	-			

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024 BULAN JUNI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
19	PENINGKATAN JUMLAH AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA-RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	2,70 Hari	2,70 Hari	2,37 Hari	2,30 Hari	2,24 Hari	2,19 Hari	2.7 Hari	2 Hari	3 Hari	2 Hari	2,63 Hari	2,4 Hari	-	-			
20	AKREDITASI RUMAH SAKIT TERLAKSANA 15 POKJA	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-			
21	PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP UNIT LAYANAN	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah	Keberadaan standard Operating Procedure (SOP)	81%	83%	85%	88%	90%	90%	-	-	-	68,48%	-	-	-	-			
22	PENINGKATAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS	Program Nasional (yang melekat di kementerian) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	Kelas C	-	-			
23	PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 60%	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Jumlah Magang, Bimtek, Pelatihan Dan Seminar Bagi Pegawai Rsud Kuala Kurun	87%	88%	89%	90%	95%	95%	-	62,20%	99,76%	87,60%	95,76%	35,57%	-	-			
24	TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN	Penyusunan Standar Analis Belanja Pelayanan Kesehatan	Adanya Dokumen/ Peraturan Daerah Mengenai Retribusi Menyesuaikan Dengan Standar Harga Barang Dan Jasa Yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-			Dengan status BLUD retribusi berubah menjadi pendapatan lain-lain yang sah.
25	PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100%	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Meningkatnya Kemampuan Tenaga Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI BLUD TERLAKSANA 100%	Laporan keuangan BLUD	Jumlah Dana Operasional Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Blud	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

CATATAN : *angka sementara

TABEL T - C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
	BELANJA			**58.220.344.004**	
1.02.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**46.002.330.774**	
1.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**156.262.210**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	143.488.380	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi & Penyusunan dokumen RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	3.424.630	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	3.530.600	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi & Penyusunan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1.545.000	
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi & Penyusunan perubahan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1.423.400	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja yang dihasilkan	2.850.200	
1.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**29.947.207.212**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	29.947.207.212	
1.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT. RSUD Kuala Kurun Kabupaten gunung Mas**	**123.465.360**	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	123.465.360	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
1.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	**455.033.015**	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	337.296.960	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4.968.000	
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18.845.755	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.922.300	
1.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	**1.391.873.200**	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Surat Menyurat	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.193.200	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.381.680.000	
1.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	**419.356.737**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20.798.733	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	170.543.136	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228.014.868	
1.02.01.2.10	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	**13.500.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13.500.000.000	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
				TAHUN 2025	
1.02.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	UPT. RSUD Kuala Kurun	**Terwujudnya Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat dan sesuai dengan standar type rumah sakit**	**9.133.040**	
1.02.01.2.13.0004	Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.133.040	
01.02.02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**3.668.153.878**	
1.02.02.2.01	**Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	**3.252.458.618**	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	194.873.925	
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	69.904.680	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2.413.689.251	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	573.990.762	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**186.140.520**	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.986.500	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	174.154.020	
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	**156.195.200**	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	156.195.200	
1.02.02.2.04	**Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**73.359.540**	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME TAHUN 2025	CATATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	73.359.540	
01.02.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	**8.493.277.332**	
1.02.03.2.02	**Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Di wilayah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	**8.142.936.792**	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8.142.936.792	
1.02.03.2.03	**Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**350.340.540**	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350.340.540	
01.02.05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**Persentase cakupan Pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**56.582.020**	
1.02.05.2.01	**Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**56.582.020**	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT. RSUD Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	56.582.020	

TABEL T - C.33.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
BELANJA				**58.220.344.004**				**58.076.855.624,00**
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	**Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**46.002.330.774**	**DAU & BLU**		100%	**45.858.842.394**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**156.262.210**	DAU		100%	**12.773.830,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	UPT. RSUD Kuala Kurun	10 Dokumen	143.488.380	DAU		100%	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	3.424.630	DAU		100%	3.424.630
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	3.530.600	DAU		100%	3.530.600
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	1.545.000	DAU		100%	1.545.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	1.423.400	DAU		100%	1.423.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Laporan	2.850.200	DAU		100%	2.850.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksanya kegiatan pengelolaam administrasi keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**29.947.207.212**	DAU		100%	**29.947.207.212**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	UPT. RSUD Kuala Kurun	272 Orang/bulan	29.947.207.212	DAU		100%	29.947.207.212

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**123.465.360**	DAU		100%	**123.465.360**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UPT. RSUD Kuala Kurun	11 Orang	123.465.360	DAU		100%	123.465.360
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan pengelolaan administrasi umum pada perangkat daerah**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**455.033.015**	DAU		100%	**455.033.015**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Paket	337.296.960	DAU		100%	337.296.960
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	4.968.000	DAU		100%	4.968.000
Penyediaan Bahan/Material (Kegiatan Pameran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Paket	18.845.755	DAU			18.845.755
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	UPT. RSUD Kuala Kurun	29 Laporan	93.922.300	DAU		100%	93.922.300
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada UPT.RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**1.391.873.200**	DAU		100%	**1.391.873.200**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Laporan	10.193.200	DAU		100%	10.193.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Laporan	1.381.680.000	DAU		100%	1.381.680.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan Kabuaten Gunung Mas**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**419.356.737**	DAU		100%	**419.356.737,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	20.798.733	DAU		100%	20.798.733
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	170.543.136	DAU		100%	170.543.136

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Bulan	228.014.868	DAU		100%	228.014.868
Peningkatan Pelayanan BLUD	**Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD**	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**13.500.000.000**	**BLUD**		100%	**13.500.000.000,00**
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit Kerja	13.500.000.000	BLUD		100%	13.500.000.000
Kegiatan Penataan Organisasi	**Terwujudnya Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat dan sesuai dengan standar type rumah sakit**	UPT. RSUD Kuala Kurun	**1 Kegiatan**	**9.133.040**	**PAD**		100%	**9.133.040,00**
Sub.Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	9.133.040	PAD		100%	9.133.040
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	92%	**3.668.153.878**	**DAU**		100%	**3.668.153.878,00**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Kesehatan yang Berkualitas dan sesuai standar**	UPT. RSUD Kuala Kurun	92%	**3.252.458.618**	DAU		100%	**3.252.458.618,00**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	UPT. RSUD Kuala Kurun	16 Unit	194.873.925	DAU		100%	194.873.925
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	UPT. RSUD Kuala Kurun	14 Unit	69.904.680	DAU		100%	69.904.680
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	UPT. RSUD Kuala Kurun	10 Unit	2.413.689.251	DAU		100%	2.413.689.251
Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	UPT. RSUD Kuala Kurun	276 Unit	573.990.762	DAU		100%	573.990.762
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**92%**	**186.140.520**	**DAU**		**100%**	**186.140.520,00**
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	**Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Dokumen	11.986.500	DAU		100%	11.986.500
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	**Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota**	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit	174.154.020	DAU		100%	174.154.020
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**100%**	**156.195.200**	DAU			**156.195.200,00**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	RENCANA KERJA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun		156.195.200	DAU			156.195.200
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**92%**	**73.359.540**	**DAU**		**92%**	**73.359.540**
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	UPT. RSUD Kuala Kurun	1 Unit	73.359.540	DAU		92%	73.359.540
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan**	UPT. RSUD Kuala Kurun	90%	**8.493.277.332**	**DAU**		100%	**8.493.277.332**
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pegawai Kontrak RSUD Sesuai dengan Standar**	UPT. RSUD Kuala Kurun	83%	**8.142.936.792**	DAU		83%	**8.142.936.792**
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	UPT. RSUD Kuala Kurun	164 Orang	8.142.936.792	DAU		83%	8.142.936.792
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Rumah Sakit**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**83%**	**350.340.540**	**DAU**		**100%**	**350.340.540**
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	UPT. RSUD Kuala Kurun	62 Orang	350.340.540	DAU		100%	350.340.540
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase cakupan pemberdayaan SDM Bidang Kesehatan**	**UPT. RSUD Kuala Kurun**	**100%**	**56.582.020**	**DAU**		100%	**56.582.020**
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Kabupaten / Kota	UPT. RSUD Kuala Kurun	100%	**56.582.020**	DAU		100%	**56.582.020**
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	UPT. RSUD Kuala Kurun	12 Dokumen	56.582.020	DAU		100%	56.582.020

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS

Rencana Kerja (RENJA)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan pengasihan-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dapat terlaksana dan diselesaikan.

Buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 memaparkan mengenai latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja ini. Selain itu buku ini memuat hasil evaluasi pelaksana Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya, pembahasan mengenai isu-isu penting serta penelaahan usulan program dan kegiatan dengan pendekatan kombinasi antara Bottom-Up dan Top-Down sehingga didapat hasil penyusunan rencana kerja perubahan Kabupaten Gunung Mas yang berkualitas dan terukur.

Kami menyadari bahwa Buku Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu, kami sangat terbuka terhadap koreksi dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan kedepan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung tersusunnya buku rencana kerja ini.

Semoga seluruh upaya kita dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia terkhususnya Kabupaten Gunung Mas dapat terwujud dan terlaksana secara optimal.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun, September 2025

Kepala Dinas,



ARNOLD, SKM., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660323 198902 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Grafik vi

Daftar Gambar vii

Bab I Pendahuluan 1

1.1. Pendahuluan 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas 12

2.2. Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah 47

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 65

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 69

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 95

Bab III Tujuan, Sasaran, Progran dan Kegiatan 99

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nassional 99

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 103

3.3. Program dan Kegiatan..... 107

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan 144

Bab V Penutup 148

Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (TC 29)	20
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2024	48
Tabel 2.3.	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024	50
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (TC 30)	52
Tabel 2.5.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Gunung Mas (TC 31)	70
Tabel 2.6.	Usulan Murenbang Tahun 2025	80
Tabel 2.7.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (TC 32)	97
Tabel 3.1.	Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	102

Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025	105
Tabel 3.3.	Program dan Kegiatan Perubahan	107
Tabel 4.1.	Program dan Penganggaran Perubahan	144
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Program, Pagu, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	146

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1. Perbandingan IPKM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dan Tahun 2018 65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan (Tipe B) 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional). Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan kesehatan Kabupaten Gunung Mas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia yang produktif di Kabupaten Gunung Mas dapat tercapai apabila derajat kesehatan masyarakat Gunung Mas meningkat, dimulai dari setiap individu sehat, meningkat mejadi satu

keluarga sehat, satu rukun tetangga sehat, satu rukun warga sehat, satu desa/kelurahan sehat, satu kecamatan sehat, hingga menjadi satu Kabupaten Gunung Mas sehat yang dapat diindikasikan dan dilihat melalui meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Oleh karena itu, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Gunung Mas menjadi indikator kesehatan utama yang sebagai isu penting dalam peningkatan indeks pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas (Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029).

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas telah berjalan dan telah memasuki Tahun Ke-3 Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 sehingga perlu dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2025 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun Ke-IV dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, dengan mengacu pada:

a. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029;
c. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan periode sebelumnya; dan
d. Bedasarkan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rencana kerja perubahan dinas kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Persiapan;
b. Penyusunan Rancangan Awal;
c. Penyusunan Rancangan;
d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
f. Penetapan Peraturan Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam PenyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sisitem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJP Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 118.a);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a); dan

41. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah:

a. Tersedianya dokumen rencana kerja yang sistematis;
b. Sebagai acuan kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas; dan
c. Menyelaraskan kinerja pembangunan kesehatan yang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dan hasil evaluasi rencana kerja tahun berjalan sehingga menjadi satu kesatuan yang konsisten dan berkesinambungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan
   a. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
   b. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas

   Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten..
3. Fungsi

   Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
d. pelaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Pasal 7 terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan;
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
    1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    2) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

3) Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
   1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
   2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
   3) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
   1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan;
   2) Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT; dan
   3) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

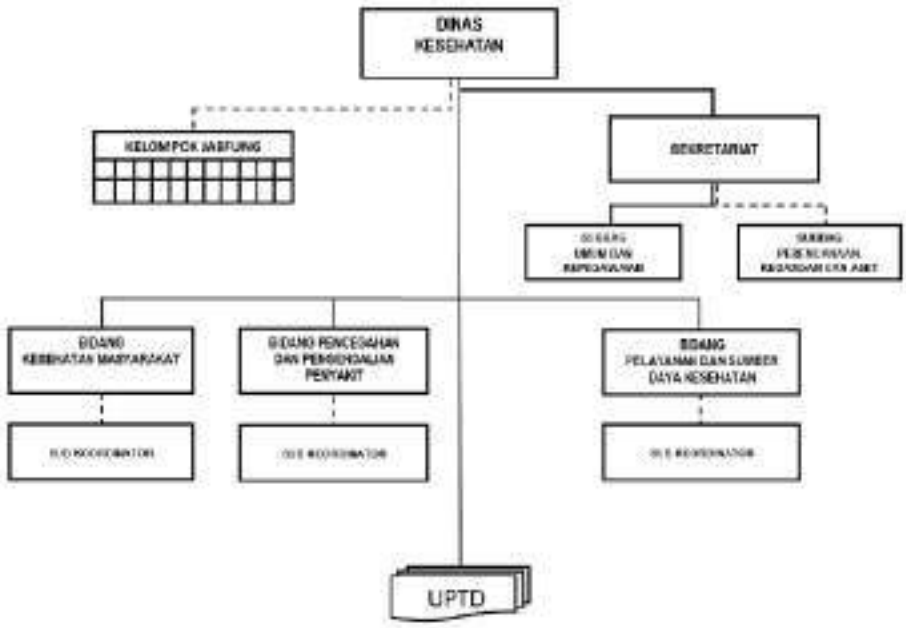
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja perubahan merupakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dan hasil RKPD kabupaten/kota mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA- Perangkat Daerah kabupaten/kota, digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah lingkup kabupaten/kota

(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan (Tipe B)



Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui proses yang sistematis dan berkesinambungan dengan membandingkan antara indikator tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dengan realisasi/hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas pada tahun sebelumnya dengan melakukan perbandingan antara target yang terdapat pada program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan realisasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud, dengan hasil sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan, antara lain sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar 77,16
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal sebesar 100%, realisasi untuk Tahun 2023 hanya sebesar 74,62%. Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dari target sebesar 28,52%, realisasi Tahun 2023 sebesar 35,9% atau tingkat realisasi meningkat sebesar 1,26%;
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar 82,35%, realisasi Tahun 2023 sebesar 15,78%; dan
d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre

dan post market pangan sesuai standar sebesar 100%, realisasi Tahun 2023 sebesar 85%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular sebesar 100%, realisasi Tahun 2023 sebesar 100%; dan
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan sebanyak 4 Kebijakan, realisasi Tahun 2023 sebesar 4 Kebijakan atau tingkat realisasi sebesar 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 adalah Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar sebesar 60%, realisasi Tahun 2023 sebesar 63%, atau tingkat realisasi seberas 105%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
   a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Perubahan Sistem Informasi Perencanaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 98 Tahun 2018, sehingga menyebabkan perubahan sistem penganggaran pada pemerintah daerah;
2) Keluarnya pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pemetaan Dana Insentif Daerah (DID) di pertengahan tahun berjalan sehingga menyebabkan pergeseran anggaran menyesuaikan hasil pemetaan;
3) Lemahnya Sistem Informasi Kesehatan sehingga data/informasi kesehatan tidak sinkron; dan

b. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1) Adanya pendukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik dan Dana Insentif Daerah, sehingga kebutuhan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan dapat terpenuhi; dan
2) Kegiatan yang akan dilaksanakan telah terpetakan dengan target yang akan dicapai sehingga mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

a. Tidak tercapaiannya tujuan dan sasaran pada akhir periode Rencana Strategis Dinas Kesehetan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029;
b. Terjadinya pemborosan anggaran dan pendanaan kegiatan yang tidak berimpliksi pada peningkatan upaya pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas; dan
c. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat, sehingga indeks pembangunan kesehatan masyarakat akan menjadi rendah.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   a. Upaya percepatan pada program/kegiatan yang belum mencapai target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas;
   b. Penguatan pada Sistem Informasi Kesehatan dan sinkronisasi data kesehatan sehingga target kinerja dapat ditetapkan secara realistis yang berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi perencanaan/penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas; dan
   c. Peningkatan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan pengetahun, sikap, dan perilaku masyarakat tehadap pentingnya kesehatan.

Tabel 2.1. (TC 29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	80,00%	74,56%	77,16	77,16	100,00	78,11	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase alokasi anggaran kesehatan	10%	10%	10%	10%	100	10%		12,65%	126,50 %
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen		1 Dokumen	50%
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		0	0
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		0	0
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen		1 Dokumen	50%
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen		0	0
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen Kinerja (LAKIP,	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen		5 Dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2023)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SAKIP, IKU, PK, dan Pakta Integritas) yang dihasilkan								
1	0 2	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji ASN sesuai standar	100	100	100	100	100	100	33,33	33,33
1	0 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	532 orang	467 orang	532 orang	469 orang	100	532 orang	33%	33%
1	0 2	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dihasilkan	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	0	
1	0 2	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	0	0
1	0 2	0 1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	33,33	33,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen inventarisir Barang Milik Daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	33,33	33,33
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0			0	0	0	
1	02	01	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	0	0
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	33,33	33,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah fasilitas yang mendapatkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	100	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	33%	33%
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket		
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100	2 Paket		
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan ang dihasilkan	518 buah/137.743 lembar	518 buah/137.743 lembar	518 buah/137.743 lembar	518 buah/137.743 lembar	100	518 buah/137.743 lembar	33%	33%
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	4 media massa	4 media massa	4 media massa	4 media massa	100	4 media massa		
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan penyediaan bahan material	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	218 orang/kali	218 orang/kali	218 orang/kali	218 orang/kali	100	218 orang/kali	33%	33%
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	20	0		
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	0	0	0
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair yang diadakan	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	1 paket	0	0
1	02	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	0
1	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	0
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibangun/diadakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	0	0	4 Paket	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%		
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	15000 lembar meterai	15000 lembar meterai	15000 lembar meterai	15000 lembar meterai	100	15000 lembar meterai	5000 lembar materai	33,33%
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	100	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	33,33%	33,33%
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	80 Unit	13 Unit	80 Unit	27 Unit	100	80 Unit	16 Unit	20%
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	100	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	33,33%	33,33%
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik	80%	60%	65%	65%	100	70%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	33,33%	33,33%
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100	23 Unit	33,33%	33,33%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	269 Unit		269 Unit	269 Unit	100	269 Unit		
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/rehabilitasi	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket Pemeliharaan Kantor	33,33%	33,33%
1	02	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kegiatan penataan organisasi	100%	100%	100%	100%	50	100%	0	0
1	02	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitas kesehatan yang	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas	0	0	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						mengikuti kegiatan RAKERKESKAB	& Jaringannya	& Jaringannya	& Jaringannya			& Jaringannya		
1	02	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	100	17 Puskesmas & Jaringannya	0	0
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar	75,00%	50,54%	60,00%	63%	105,00	65,00%	33,33%	33,33%
						Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal	100%	100%	100%	74,62%	74,62	100%	33,33%	33,33%
						Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas	19%	22,87%	28,526	35,90%	1,26	23,684	33,33%	33,33%
						Persentase capaian rata-rata pengendalian dan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	33,33%	33,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2022)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2022)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2		3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						pencegahan penyakit menular dan tidak menular								
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana kesehatan sesuai standar	75%	50,54%	60,00%		71,80	65,00%		
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dibangun	8 Paket	4 Paket Pustu	2 Paket Puskesmas & 6 Paket Pustu	2 Paket Puskesmas & 6 Paket Pustu	100	0	0	0
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang diadakan	1 paket	1 paket	0	0	0	0	0	0
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun		1 paket	0	0	0	2 Paket	20%	20%
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/ruang rumah sakit yang dibangun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	0	0	0
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dikembangkan	1 fasilitas kesehatan	0	1 fasilitas kesehatan	1 fasilitas kesehatan	100	0	0	0
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 paket	1 paket Pemeliharaan	2 paket & 1 paket Pemeliharaan	2 paket & 1 paket Pemeliharaan	100	1 paket	0	0
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	1 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	7 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	7 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	100	4 Paket	20%	20%
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	1 paket	1 Paket	0	0	0	2 paket	0	0
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan			6 Paket Puskesmas, 10 Paket Pustu	6 Paket Puskesmas, 10 Paket Pustu	100	10 paket	0	0
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100	5 paket	20%	20%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	10 Paket Alkes	10 Paket	10 Paket Alkes	20 Paket Alkes	200%	10 Paket Alkes	0	0
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat yang diadakan	200 jenis obat	200 jenis obat	200 jenis obat	150 jenis obat	75	200 jenis obat	0	0
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	97 jenis BMHP	97 jenis BMHP	97 jenis BMHP	97 jenis BMHP	100	97 jenis BMHP	0	0
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medis yang dilakukan pemeliharaan	17 Paket	17 Paket	17 Paket	17 Paket	100	17 Paket	0	0
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	100	17 Puskesmas & Jaringannya	0	0
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Kabupaten Gunung Mas	60	60%	70%			80%	0	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3299 Orang	1776	3072 Orang	2179 Orang	92,34	3146 Orang	604 Orang	25,68
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3151 Orang	700	2933 Orang	696 Orang	30,06	3004 Orang	197 Orang	8,78
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3000 Orang	1806	2793 Orang	2140 Orang	100	2860 Orang	468 Orang	21,89
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14239 Orang	7772	13258 Orang	8820 Orang	80,7	13577 Orang	1834 Orang	16,90
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	5642 Orang	496	5235 Orang	10895 Orang	56,19	5380 Orang	0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						kesehatan sesuai standar								
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	81044 Orang	14233	75456 Orang	56662 Orang	66,42	75456 Orang	16233 Orang	22,73
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12628 Orang	8173	11757 Orang	5389 Orang	50,57	12040 Orang	1775 Orang	15,62
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11403 Orang	3127	10617 Orang	8457 Orang	76,39	10873 Orang	2324 Orang	23,14
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65 Orang	440	37 Orang	36 Orang	100	45 Orang	114 Orang	62,30

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	194 Orang	215	177 Orang	212 Orang	100	181 Orang	22 Orang	12,29
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1868 Orang	1048	1739 Orang	1120 Orang	59,4	1781 Orang	95 Orang	4,53
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3770 Orang	1692	3510 Orang	1808 Orang	63	3595 Orang	406 Orang	14,22
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB yang ditangani	2 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kasus yang berpotensi bencana ditangani	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	0	0%
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1617 orang	1799 Orang	1772 orang	1740 Orang	98,19	1718 orang	0	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	17 Puskesmas	3 Puskesmas	17 Puskesmas	3 Puskesmas	17,65	17 Puskesmas	0	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	1 Kegiatan	33,33%
1	02	02		18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 kasus	100	3 Kasus	2 kasus	66,67%
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	228 Orang	337 Orang	222 Orang	222 Orang	100	228 Orang	225 orang	98,68%
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang di Skrinning NAFZA	228 Orang	337 Orang	222 Orang	222 Orang	100	228 Orang	0	0%
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	791 Orang	0	791 Orang	0	0	791 Orang	0	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	54,54%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	25000 Jiwa	14.800 Jiwa	15.000 Jiwa	14.800 Jiwa	98,66	17.000 Jiwa	14.800 Jiwa	50%
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Kasus yang dilakukan Pengambilan Spesimen	3 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	1 Kasus	40	3 Kasus	2	66,66%
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	1 Rumah sakit	0	1 Rumah sakit	1 Rumah sakit	100	1 Rumah sakit	1 Rumah sakit	15%
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	100	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	15%
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 fasilitas kesehatan	0	1 fasilitas kesehatan	0	0	1 fasilitas kesehatan	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilaksanakan re-akreditasi	12 Fasilitas Kesehatan	0	11 Puskesmas dilaksanakan Re-akreditasi	0	0	17 Puskesmas dilaksanakan Re-akreditasi	0	0
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kasus yang dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Kasus	0	3 Kasus	3 Kasus	100	3 Kasus	0	0%
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus penyakit yang dilakukan pengawasan	3 Kasus	0	3 Kasus	3 Kasus	100	3 Kasus	0	0
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi	70%	70%	70%			70%	0	
1	02	02	2.03	01		Jumlah data/dokumen informasi kesehatan yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Jumlah aplikasi SIK yang diintegrasikan			1 Aplikasi			1 Aplikasi	0	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan cakupan pelayanan rumah sakit sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100	100%	0	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan workshop akreditasi	17 Puskesmas	17 Puskesmas	17 Puskesmas	17 Puskesmas	100	17 Puskesmas	0	100
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar	90%	82,35%	82,35%	15,78%	19,16	85,00%	33,33%	33,33%
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	0	0
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	17 Puskesmas & Jaringannya	100	17 Puskesmas & Jaringannya	0	0
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	85	75%	80%			80		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100	50 orang	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar	100	100	100	85	85	100	0	0
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat rekomendasi pemberian izin	100	100	100	100	100	100		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Apotek/Toko Obat	15 Apotek/Toko Obat	15 Apotek/Toko Obat	15 Apotek/Toko Obat	100	15 Apotek/Toko Obat	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	yang dilakukan pengendalian, pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan perijinan								
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	0%	0	0%		100%		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	100 P-IRT	0	100 P-IRT	20 P-IRT	20	100 P-IRT	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2		3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan								
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Perentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapatkan sertifikat laik higiene	100	70%	80%	80%				
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Sampel Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang	130 Sampel	73 Sampel	90 Sampel	15 Sampel	16,67	0	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	dilakukan pemeriksaan								
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	0	0	0		90		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	130 Sampel	0	50 post market	12 post market	24	100 Sampel	0	0
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Jumlah kebijakan publik berwawasan	4 Kebijakan	3 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	100%	4 Kebijakan	1 Kebijakan	25%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	kesehatan yang dihasilkan								
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya	2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya	2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya	2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya	100	2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya	33,33%	33,33%
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	0	0
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kampanye gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100	5 Kali		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2 = 2021)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1 = 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2022)	
									Target Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Realisasi Renja PD tahun (n-2 = 2021)	Tingkat Realisasi (%) (n-2 = 2021)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (n-1 = 2022)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	5 Tema	5 Tema	5 Tema	5 Tema	100	5 Tema	3 Tema	60,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas merupakan proses sistematika yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029, dimana Visi yang akan dicapai adalah "TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYASAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)", dan Misi yang menjadi urusan bidang kesehatan dalam Misi Ke-2 Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2024 yaitu "MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)".

Adapun Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2023, tujuan yang dicapai dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas adalah Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian kinerja tahun 2023 sebesar 71,03 dari target kinerja tahun 2023 sebesar 71,13. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kabupaten Gunung Mas dimana target kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 meningkat menjadi 71,70. Namun Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas optimis bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 dapat tercapai, hal tersebut dapat terlihat melalui capaian sasaran pembangunan kesehatan dimana terdapat 2 (dua) indikator dimana capaian Indeks Kesehatan tahun 2023 tercapai sebesar XXXX, meningkat dari target Indeks Kesehatan Tahun 2023 sebesar 77,63. Selain itu, indikator sasaran Angka Prevalensi Stunting dapat diturunkan dari target kinerja tahun 2023 sebesar 21,56 menurun menjadi 20,16.

Tabel 2.2.

Capaian Kinerja Bidang Kesehatan
Tahun 2021 dan 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2021	Target Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2023
Meningkatkan Daya Saing SDM		IPM	-	71,13	71,03	72,09	73,18
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Tahun	77,63	Belum launching*)	77,89	Belum launching*)
	Menurunnya Prevalensi Stunting	Angka Prevalensi Stunting	(%)	21,56	20,16	16,01	13,94

Melalui program unggulan Smart Human Resources, pembangunan kesehatan menitikberatkan capaian pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Kabupaten Gunung Mas, dimana Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) menjadi tolok ukur dalam peningkatan sumber daya manusia, yang dicapai melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai tujuan dalam rencana strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 dengan sasaran:

1. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar, dengan indikator sebagai berikut:
   a. Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar;
   b. Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal;
   c. Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas; dan
   d. Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar, dengan indikator persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar;

3. Meningkatnya mutu/kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar.
4. Meningkatnya upaya promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat dengan indikator jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan
5. Meningkatnya mutu dan tata kelola administrasi pelayanan publik Dinas Kesehatan dan Jaringannya dengan indikator Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Indikator sasaran sebagaimana telah dipaparkan di atas menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan menilai capaian seperangkat Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk setiap urusan yang dibebankan kepada masing-masing daerah. Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan tersebut akan menunjukkan seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan Pemerintah kepada setiap daerah.

Dengan dilakukannya evaluasi ini, maka setiap daerah akan didorong untuk melaporkan berbagai capaian kinerja setiap urusan yang dilaksanakannya sesuai dengan indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya capaian setiap indikator

kinerja kunci ini akan dituangkan dalam berbagai laporan pelaksanaan pemerintahan daerah yang disampaikan kepada Pemerintah, terutama dalam Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD). Berikut disampaikan hasil evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dan 2023.

Tabel 2.3.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024

No	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	Target 2022	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar ASPAK	%	60,00	63	65,00	Berhasil
			Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal	%	100,00	74,62	100,00	Belum mencapai target
			Menurunnya angka Stunting	%	21,56	20,16	18,55	Berhasil
			Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	%	100,00	100	100	Berhasil
2	Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas	Meningkatnya kualitas SDM Kesehatan sesuai standar	Persentase cakupan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar	%	82,35	15,78	85	Belum mencapai target
3	Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman di Kabupaten Gunung Mas	Meningkatnya mutu/kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar	%	100,00	70	100	Belum mencapai target
4	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Gunung Mas	Meningkatnya upaya promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan	Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	Berhasil

5	Optimalisasi tatakelola pelayanan kesehatan yang bersih, transparan dan akuntabel pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya	Meningkatnya mutu dan tata kelola administrasi pelayanan publik Dinas Kesehatan dan Jaringannya	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	%	77,16		79,05	Tidak dilakukan penilaian di Tahun 2021 karena pandemi Covid 19

Tabel 2.4. (TC 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Usisa Harapan Hidup (tahun)		V	70,91	71,09	71,28	71,46	72,17	70,91	100,00	70,46	99,11	71,46	72,17	Realisasi belum mencapai target 99,11% dari target sebesar 71,09 tahun tercapai sebesar 70,46. Indikator kinerja perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023 karena selain belum mencapai target, target tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 72,17
2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)		V	117	95	93	91	90	117	100,00	183	192,90	91	90	Belum mencapai target, AKI masih tinggi, realisasi sebesar 183/100.000LH dari target yang ditetapkan sebesar 95/100.000LH, perlu dianggarkan kembali dalam Renja 2023
3	Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)		V	7	7	7	7	7	7	100	11	157,14	7	7	Belum mencapai target, AKB masih tinggi, realisasi sebesar 11/1.000LH dari target yang ditetapkan sebesar 7/1.000LH, perlu dianggarkan kembali dalam Renja 2023

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
4	Angka Stunting (%)		V	22,87	21,56	18,55	16,01	13,94	22,87	100,00	35,90	166,51	16,01	13,94	Angka Stunting masih belum mencapai target, meningkat signifikan dari target sebesar kurang dari 21,58%, angka stunting sebesar 35,90%. Perlu dianggarkan kembali pada renja 2023 untuk menekan angka Stunting dibawah 16,01%, mengingat angka stunting selain menjadi indikator IKK juga merupakan indikator kinerja tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas dan Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
5	Angka Gizi Buruk (%)		V	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,90	190,00	1,00	1,00	Angka Gizi Buruk masih tinggi, belum mencapai target, dari target sebesar 1,00%, realisasi pada tahun 2021 sebesar 1,90%, perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023 untuk pemantauan tumbuh kembang dan intervensi gizi spesifik sehingga angka Gizi Buruk dapat ditekan di bawah 1,00%.
6			V	100	100,00	100	100	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100	100,00	Realisasi sesuai target, tetapi Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan harus tetap dipertahankan dan dianggarkan kembali pada renja 2023 mengingat angka Gizi buruk di Gunung Mas masih tinggi diatas target

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
															yang ditetapkan sebesar 1,00 %
7	Persentase anggaran Kesehatan terhadap APBD (%)		V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,16	111,60	12,68	126,80	10,00	10,00	Realisasi melebihi target yang ditetapkan, dimana anggaran kesehatan Kabupaten Gunung Mas sebesar 12,68% dari target sebesar 10% anggaran kesehatan dari total APBD, harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan mengingat permasalahan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas sangat kompleks
8	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)		V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi sesuai target, tetapi tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 untuk pendampingan reakreditasi Puskesmas
9	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)		V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
10	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada FKTP (%)		V	61,69	60,00	65,00	70,00	75,00	61,69	100,00	63,00	105,00	70,00	75,00	Realisasi tahun 2021 tercapai dan melebihi target, dari taget sebesar 60% tercapai sebesar 63% atau meningkat sebesar 105% dari taget yang ditetapkan. Namun perlu dianggarkan kembali agar ketersediaan S,P,A di Puskesmas dapat tersedia sesuai standar mengingat target pada tahun 2023 meningkat menjadi 70%.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
11	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) pada Pada RS Milik Pemerintah Daerah (%)		V	46,16	60,00	65,00	70,00	75,00	46,16	100,00	69,00	115,00	70,00	75,00	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
12	Persentase cakupan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)		V	77,23	95,00	95,00	95,00	95,00	65,52	84,83	65,52	68,97	95,00	95,00	Realisasi 2021 belum mencapai target, perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023 mengingat Kepesertaan JKN merupakan siklus tahunan yang wajib dianggarkan
13	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksinasi Esensial (%)		V	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	94,12	106,95	75,15	83,50	94,00	96,00	Belum mencapai target, realisasi Tahun 2021 hanya sebesar 83,50% dari target sebesar 90%, perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023 mengingat target di tahun 2023 meningkat menjadi 94%
14	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 penduduk)		V	9,00	12,00	12,00	13,00	13,00	9,00	100,00	11,00	91,67	13,00	13,00	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
15	Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)		V	28,00	38,00	38,00	40,00	40,00	28,00	100,00	39,00	102,63	40,00	40,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
16	Rasio Dokter Gigi (per 100.000 penduduk)		V	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	2,00	100,00	3,00	150,00	4,00	4,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
17	Rasio Perawat (per 100.000 penduduk)		V	332,00	350,00	360,00	370,00	380,00	332,00	100,00	456,00	130,29	370,00	380,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
18	Rasio Bidan (per 100.000 penduduk)		V	185,00	260,00	260,00	270,00	270,00	185,00	100,00	279,00	107,31	270,00	270,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
19	Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat (per 100.000 penduduk)		V	7,00	11,00	11,00	12,00	12,00	7,00	100,00	17,00	154,55	12,00	12,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
20	Rasio Tenaga Sanitasi Lingkungan (per 100.000 penduduk)		V	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	13,00	130,00	10,00	10,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
21	Rasio Nutrisonis (per 100.000 penduduk)		V	19,00	25,00	25,00	27,00	27,00	19,00	100,00	30,00	120,00	27,00	27,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
22	Rasio Tenaga Apoteker dan /atau Tenaga Teknis Kefarmasian (per 100.000 penduduk)		V	20,00	28,00	28,00	30,00	30,00	20,00	100,00	37,00	132,14	30,00	30,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
23	Rasio Ahli Teknologi Laboratorium medik (per 100.000 penduduk)		V	21,00	22,00	22,00	25,00	25,00	21,00	100,00	25,00	113,64	25,00	25,00	Realisasi tercapai tetapi perlu dianggarkan kembali untuk mencapai target pemenuhan SDM Kesehatan di akhir Rentra
24	Persentase Sarana air minum yang memenuhi syarat (%)		V	38,10	64,00	68,00	72,00	76,00	38,10	100,00	36,60	57,19	72,00	76,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 64,00% dapat direalisasi sebesar 57,00%. Perlu dianggarkan kembali mengingat target pada tahun 2021 belum tercapai dan target pada tahun 2023 meningkat menjadi 72,00%.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
25	Persentase keluarga dengan akses sanitasi yang layak (%)		V	89,36	67,00	77,00	82,00	94,00	88,76	99,33	88,76	132,48	82,00	94,00	Realisasi tercapai dan melebihi target, dari target sebesar 67,00% dapat direalisasi sebesar 88,76% atau meningkat sebesar 132% dari target yang ditetapkan
26	Persentase desa yang melaksanakan STBM (%)		V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi sesuai target
27	Persentase desa /kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		V	47,24	50,00	60,00	70,00	90,00	47,24	100,00	47,24	94,48	70,00	90,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 50,00% dapat direalisasi sebesar 47,24%. Perlu dianggarkan kembali mengingat target pada tahun 2021 belum tercapai dan target pada tahun 2023 meningkat menjadi 70,00%.
28	Jumlah Rumah Tangga yang ber - PHBS (rumah tangga)		V	4495,00	4720,00	4956,00	5204,00	5464,00	4495,00	100,00	2393,00	50,70	5204,00	5464,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 4.720 rumah tangga dapat direalisasi sebesar 2.393 rumah tangga atau sebesar 50,70%. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
29	Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	60,64	60,64	92,34	92,34	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 92,34% dikarenakan kunjungan ibu hamil menurun ke posyandu dan puskesmas karena takut terhadap penularan covid-19, beberapa daerah zona merah penularan covid-19 tidak diadakan posyandu ibu balita dan kelas hamil, hanya dilakukan kunjungan rumah pada ibu hamil dengan faktor resiko dan resiko tinggi. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,03	25,03	30,06	30,06	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 30,06%, dikarenakan persalinan di fasilitas kesehatan sangat rendah dan tidak semua Puskesmas mampu melaksanakan pelayanan persalinan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang persalinan di faskes, tidak semua ibu hamil memiliki JKN. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.
31	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	V		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	67,82	67,82	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi sesuai target, tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 karena merupakan program yang masuk dalam SPM

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
32	Pelayanan Kesehatan Balita (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,48	61,48	80,70	80,70	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 56,19%, dikarenakan kunjungan balita menurun ke posyandu karena orang tua takut terhadap penularan covid-19, beberapa daerah zona merah penularan covid-19 tidak diadakan posyandu balita, hanya dilakukan kunjungan rumah pada bulan timbang dan bulan pemberian vit.A (Ferbuari dan Agustus), serta pada kunjungan rumah rutin pada balita dengan masalah gizi (Underweight, Wasting, Stunting). Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.
33	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	9,90	9,90	56,19	56,19	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 56,19%, dikarenakan tatap muka masih belum sepenuhnya/terjadwal dan saat pelaksanaan pelayanan kesehatan di sekolah siswa banyak tidak hadir. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
34	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	19,78	19,78	66,42	66,42	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 66,42%, dikarenakan pelayanan kesehatan luar gedung terhambat karena ketakutan masyarakat terhadap pandemi Covid-19. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.
35	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72,91	72,91	50,57	50,57	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 50,57%, dikarenakan kunjungan lansia menurun ke Posyandu ketakutan terhadap penularan covid-19, beberapa daerah zona merah penularan covid-19 tidak diadakan posyandu lansia, hanya dilakukan kunjungan rumah pada lansia resiko tinggi. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.
36	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,89	30,89	76,39	76,39	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 76,39%, dikarenakan ketakutan masyarakat tertular Covid-19, sehingga tidak mau mengikuti skrining kesehatan. Perlu dianggarkan kembali pada tahun 2023.

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
37	Pelayanan kesehatan Penderita Diabeter Melitus (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	244,44	244,44	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi tercapai sesuai target, tetapi tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 karena merupakan program yang masuk dalam SPM
38	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	119,44	119,44	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi tercapai sesuai target, tetapi tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 karena merupakan program yang masuk dalam SPM
39	Pelayanan kesehatan orang terduga TB (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	63,21	63,21	55,36	55,36	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 55,36%, hal tersebut dikarenakan Tidak semua Puskesmas memiliki Laboratorium dan Adanya ketakutan pada petugas dalam melakukan pemeriksaan dahak Pasien di masa pandemi Covid - 19, anggaran untuk investigasi kontak tidak ada sehingga dirasa sangat perlu untuk mencapai/meningkatkan penemuan kasus, perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023.
40	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	V	V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,55	50,55	63,00	63,00	100,00	100,00	Realisasi belum mencapai target, dari target sebesar 100% dapat direalisasi sebesar 63,00%, dikarenakan pengelola Program Puskesmas yang tidak hanya memegang satu program saja dan rata-rata ikut Tim Vaksinator, sehingga tidak fokus dengan program yang

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
															dipegangnya, perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023
41	Angka kesakitan akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) (per 100.000 penduduk)		V	34,00	84,00	73,00	62,00	49,00	34,00	100,00	49,00	58,33	62,00	49,00	Realisasi tercapai sesuai/melebihi target, dari target sebesar 84/100.000 penduduk angka DBD dapat diturunkan sebesar 49/100.000 penduduk atau mampu diturunkan sebesar 58,33%. Namun perlu dianggarkan kembali pada Renja 2023 karena karena kasus DBD yang tidak diintervensi secara tepat dan cepat dapat menyebabkan KLB.
42	Angka kesakitan API (Annual Parasite Incidence) Malaria (per 1.000 penduduk)		V	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	<1	100,00	<1	100,00	< 1	< 1	Realisasi sesuai target, tetapi tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 karena kasus Malaria tidak dapat diduga sehingga perlu untuk penanganannya dan perlu dianggarkan untuk persiapan Eliminasi Malaria Tahun 2023 di Kabupaten Gunung Mas
43	Jumlah kasus kronis filariasis (kasus)		V	<2	<2	<2	<2	<2	0,00	<2	0,00	<2	<2	<2	Realisasi sesuai target, tetapi tetap harus dianggarkan kembali pada renja 2023 untuk persiapan eliminasi filariasis di Kabupaten Gunung Mas

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
44	Persentase kejadian Luar Biasa (KLB)		V	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Realisasi sesuai target
45	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		V	86,61	90,00	90,00	90,00	90,00	86,61	100,00	55,90	62,11	90,00	90,00	Target UCI masih belum tercapai, realisasi UCI dari target yang telah ditetapkan hanya sebesar 62,11%, perlu dilakukan intervensi lebih lanjut dan perlu dianggarkan kembali dalam renja 2023
46	Persentase Penerapan KTR (%)		V	59,00	65,00	70,00	75,00	80,00	59,00	100,00	25,00	38,46	75,00	80,00	Penerapan KTR belum tercapai, realisasi penerapan KTR dari target yang telah ditetapkan hanya sebesar 38,48% perlu dilakukan intervensi lebih lanjut, dan perlu dimasukan dalam renja
47	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan Limbah medis sesuai standar (unit)		V	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	100,00	2 RS & 17 Puskesmas	100,00	2 RS & 17 Puskesmas	2 RS & 17 Puskesmas	Realisasi sesuai target
48	Cakupan kunjungan rawat jalan (%)		V	15,35	15,00	15,00	15,00	15,00	15,35	100,00	7,70	51,33	15,00	15,00	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
49	Cakupan kunjungan rawat inap (%)		V	1,79	3,00	3,00	3,00	3,00	1,79	100,00	0,37	12,33	3,00	3,00	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
50	Jumlah RSUD kabupaten / kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib) (unit)		V	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	1 RSUD	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
51	Angka Kematian umum / Gross Death Rate (GDR)		V	<45	<45	<45	<45	<45	18,23	#VALUE!	35,47	#VALUE!	<45	<45	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2020		2021		2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
	di RS (per 1.000 pasien keluar)														
52	Angka Kematian Murni /Nett Death Rate (NDR) di RS (per 1.000 pasien keluar)		V	<25	<25	<25	<25	<25	3,40	#VALUE!	19,61	#VALUE!	<25	<25	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
53	Tingkat Keterisian Tempat Tidur /Bed Occupation Rate (BOR) di RS (%)		V	15,72	60-85	60-85	60-85	60-85	15,72	100,00	35,47	#VALUE!	60-85	60-85	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
54	Angka Penggunaan Tempat Tidur / Bed Turn Over (BTO) (kali)		V	26,55	40-50	40-50	40-50	40-50	26,55	100,00	35,00	#VALUE!	40-50	40-50	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
55	Tenggang Perputaran Tempat Tidur / Turn Of Interval (TOI) di RS (hari)		V	11,59	1-3	1-3	1-3	1-3	11,59	100,00	7,00	0,02	1-3	1-3	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun
56	Rata - rata lama pasien dirawat / Avarage Length of Stay (ALOS) di RS (hari)		V	3,17	6-9	6-9	6-9	6-9	3,17	100,00	3,00	0,01	6-9	6-9	IKK UPT BLUD RSUD Kuala Kurun

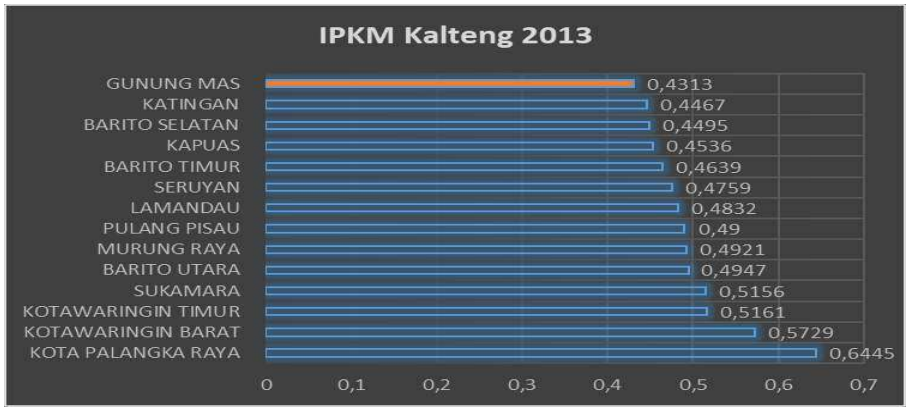
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

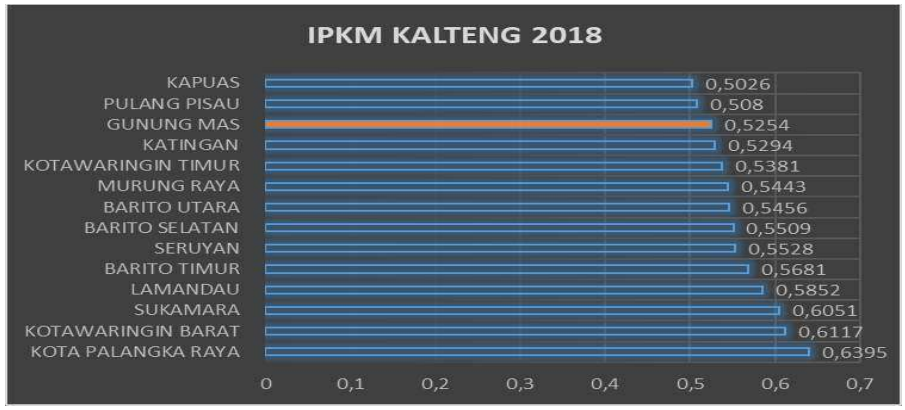
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas menjadi masalah pokok dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas terlihat dari nilai Indeks Pembangunan Kesehatam Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gunung Mas.

Grafik 2.1.

Perbandingan IPKM Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2013 dan Tahun 2018





Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada Grafik 2.1., Indeks Pembangunan Kesehatam Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan nilai 0,4313 menempati urutan ke 14 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Indeks Pembangunan Kesehatam Masyarakat (IPKM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 0,5254 menempati urutan 12 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peningkatan tersebut tidak signifikan karena diiringi peningkatan IPKM kabupaten lain yang lebih signifikan sehingga Kabupaten Gunung Mas hanya mengalami peningkatan dari Peringkat ke 14 dari 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peringkat 12 dari 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, di tingkat nasional peringkat Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan yang signifikan, pada tahun 2013 peringkat nasional IPKM Kabupaten Gunung Mas pada peringkat 457, tetapi pada Tahun 2018 peringkat IPKM Kabupaten Gunung Mas kembali turun ke posisi 464.

Apabila dibandingkan dengan IPKM Provinsi Kalimantan Tengah dan IPKM Nasional, IPKM Kabupaten Gunung Mas masih lebih rendah dari IPKM Provinsi Kalimantan Tengah dan IPKM Nasional. Pada Tahun 2013 IPKM Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dengan jilai 0,4313 masih lebih rendah dari IPKM Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 0,5053 dan IPKM Nasional dengan nilai 0,5404. Sedangkan pada Tahun 2018, IPKM Kabupaten Gunung Mas dengan nilai 05254 lebih rendah dari IPKM Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 0,5500 dan IPKM Nasional dengan nilai 0,6087.

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil IPKM di atas merupakan pokok masalah yang disebabkan oleh masalah kesehatan yaitu belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas yang dapat dilihat dari Indeks Kesehatan dan Angka Prevalensi Stunting di

Kabupaten Gunung Mas. Beberapa akar masalah yang menjadi isu-isu penting yang menyebabkan belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas, adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas dan aksesibulitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas, ditandai dengan:
    a. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan belum sesuai standar;
    b. Cakupan standar pelayanan minimal masih rendah;
    c. Tingginya angka prevalensi sunting;
    d. Pencegahan dan pengendalian penyakit belum optimal.

2. Rendahnya ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, ditandai dengan:
    a. Cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan belum sesuai standar.
3. Rendahnya kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman ditandai dengan:
    a. Pengawasan perijinan sarana kefarmasian (apotek dan toko obat) belum sesuai standar;
    b. Pengawasan pre dan post market pangan belum sesuai standar; dan
    c. Pengawasan Tempat Pengeloaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) belum sesuai standar.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kesehatan, ditandai dengan:
    a. Pengembangan kebijakan publik berwawasan kesehatan belum optimal;

b. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat belum optimal; dan
c. Peningkatan upaya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga belum maksimal.

5. Belum optimalnya tatakelola pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan jaringannya, ditandai dengan:
   a. Peningkatan mutu dan tatakelola administrasi pelayanan publik belum optimal;
   b. Penguatan akuntabilitas kinerja aparatur belum optomal; dan
   c. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah belum sesuai standar.

Belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas, berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029. Optimalisasi pelayanan kesehatan akan menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Gunung Mas yang akhirnya akan mendorong tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Gunung Mas.

Adapun Visi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdayasaing, Sejahtera, dan Mandiri" dengan urusan bidang kesehatan yang terdapat dalam Misi Ke-2 yaitu: "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)" dengan tujuan meningkatkan daya saing SDM dan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran utama pembangunan di bidang kesehatan pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah dengan upaya "Meningkatkan

Derajat Kesehatan Masyarakat" dengan indikator Peningkatan Indeks Kesehatan dan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Kabupaten Gunung Mas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan sebagai upaya sinkronisasi untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD yang disusun pada awal Desember 2024 dengan hasil analisis kebutuhan yang akan menjadi panduan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Tabel 2.5. (TC 31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

Kabupaten Gunung Mas

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**					
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**64,15%**	**43.833.457.938**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**64,15%**	**54.020.928.828**	
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase alokasi anggaran kesehatan**	**10%**	**384.076.400**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase alokasi anggaran kesehatan**	**10%**	**377.617.800**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	338.617.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	338.617.800	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	0	-	Anggaran dihapus
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	15.000.000	0	0	0	0	-	Anggaran dihapus
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	2 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	1 Dokumen	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen Kinerja (LAKIP, SAKIP, IKU, PK, dan Pakta Integritas) yang dihasilkan	5 Dokumen	7.458.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen Kinerja (LAKIP, SAKIP, IKU, PK, dan Pakta Integritas) yang dihasilkan	5 Dokumen	15.000.000	
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan gaji ASN sesuai standar**	**100**	**35.535.136.518**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan gaji ASN sesuai standar**	**100**	**46.061.270.408**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	532 orang	35.413.322.758	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	532 orang	46.000.363.528	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	1 dokumen	60.906.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	1 dokumen	60.906.880	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**157.084.800**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi barang milik daerah**	**100%**	**157.084.800**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen inventarisir Barang Milik Daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	157.084.800	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen inventarisir Barang Milik Daerah yang dihasilkan	1 Dokumen	157.084.800	
d	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**256.597.180**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian**	**100%**	**456.597.180**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	200.000.000	Sub Kegiatan ditambahlan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	30 orang	256.597.180	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	30 orang	256.597.180	
e	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor**	**100%**	**1.654.469.200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor**	**100%**	**1.154.469.200**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas yang mendapatkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas yang mendapatkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	50.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	500.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	300.000.000	0	0	0	0	-	Anggaran dihapus
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah barang cetakan dan penggandaan ang dihasilkan	518 buah/137.743 lembar	70.121.920	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah barang cetakan dan penggandaan ang dihasilkan	518 buah/137.743 lembar	70.121.920	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	4 media massa	11.081.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	4 media massa	11.081.400	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan penyediaan bahan material	1 Kegiatan	23.265.880	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan penyediaan bahan material	1 Kegiatan	23.265.880	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	218 orang/kali	700.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	218 orang/kali	500.000.000	
f	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100**	**3.000.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**100**	**3.000.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	-	0	0	0	0	-	Anggaran dihapus

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Mebel	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah pengadaan meubelair yang diadakan	1 paket	1.000.000.000	0	0	0	0	-	Anggaran dihapus
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah aplikasi yang dihasilkan			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	1 Paket	100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Paket	1.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Paket	2.500.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibangun/diadakan	4 Paket	1.000.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibangun/diadakan	1 Paket	400.000.000	
g	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.447.897.480**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**1.415.693.080**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	15000 lembar meterai	163.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	15000 lembar meterai	163.350.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	856.627.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	856.627.200	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	80 Unit	57.204.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	80 Unit	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	370.715.880	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	370.715.880	
h	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik**	**75%**	**1.144.630.080**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik**	**75%**	**1.144.630.080**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	38.990.050	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	38.990.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	998.621.030	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit	998.621.030	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/rehabilitasi	3 Paket	107.019.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/rehabilitasi	3 Paket	107.019.000	
i	**Penataan Organisasi**	**Kab. Gunung Mas, Kurun,**	**Persentase pemenuhan kegiatan**	**100%**	**253.566.280**	**Penataan Organisasi**	**Kab. Gunung Mas, Kurun,**	**Persentase pemenuhan kegiatan**	**100%**	**253.566.280**	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kuala Kurun	**penataan organisasi**				**Kuala Kurun**	**penataan organisasi**			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengikuti kegiatan RAKERKESKAB	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas & Jaringannya	141.777.780	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengikuti kegiatan RAKERKESKAB	2 Rumah Sakit, 17 Puskesmas & Jaringannya	141.777.780	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik	17 Puskesmas & Jaringannya	111.788.500	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik	17 Puskesmas & Jaringannya	111.788.500	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar**	**70,00%**	**78.082.187.640**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar**	**70,00%**	**68.989.527.950**	
			Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal	**100%**				**Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal**	**100%**		
			Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas	**18,842**				**Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas**	**18,842**		
			Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	**100%**				**Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular**	**100%**		
a	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase ketersediaan sarana kesehatan sesuai standar**	**70,00%**	**26.874.809.259**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase ketersediaan sarana kesehatan sesuai standar**	**70,00%**	**38.694.996.840**	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n					n				
	Pembangunan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dibangun	8 Paket	7.000.000.000	Pembangunan Puskesmas	Tumbang Mahuroi; Bereng Malaka; Bereng Balawan, Tumbang Korik, Mangkuhung, Sei Riang, Sumur Mas, Tumbang Mantuhe	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dibangun	1 Paket Pembangunan/Relokasi Puskesmas 6 Paket Pembangunan Pustu	8.500.000.000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas lainnya yang diadakan	1 paket	1.000.000.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kuala Kurun	Jumlah fasilitas lainnya yang diadakan	1 paket	1.000.000.000	Pembangunan Gedung PSC 119
						Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sepang (2 Unit), Tumbang Mahuroi, Tumbang Ponyoi, Tehang	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	5 Paket	2.000.000.000	Sub Kegiatan ditambahlan
	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan/ruang rumah sakit yang dibangun	1 paket	500.000.000	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan/ruang rumah sakit yang dibangun	2 Paket	800.000.000	Operasional Rumah Sakit Pratama
						Pengembangan Puskesmas	Puskesmas Tewah;	Jumlah bangunan/ruangan Puskesmas yang dibangun/dikembangkan	1 Paket Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas	1.000.000.000	Sub Kegiatan ditambahlan

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 Paket	60.821.200	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	1 Paket Pemeliharanan RS	70.000.000	Operasional Rumah Sakit Pratama
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	7 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	5.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	6 Paket Rehabilitasi Pustu; 2 Patet Rehabilitasi Poskesdes; 17 Paket Pemeliharaan	4.795.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah dinas yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	2 Paket	2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah dinas yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	0	-	Anggaran Dihapus
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	10 Paket	2.000.000.000	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	0	-	Anggaran Dihapus

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	10 Paket	2.605.182.079	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tumbang Mahuroi, Tumbang Marikoi; Kuala Kurun, Kampuri, Tumbang Rahuyan, Tumbang Talaken, Tumbang Napoi, Tehang; Tumbang Tariak, Tanjung Karitak, Tumbang Malahui, Tumbang Pasangon, Kasintu, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Pajangei; Tumbang Rahuyan; Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Rangan Hiran; Tampelas, Sei Antai, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tumbang Langgah, Tusang Raya, Takaras, Luwuk Tukau, Tumbang	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 Unit Ambulance/Pusling 5 Paket Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas; 8 Paket Penatanan Pagar & Halaman Pustu/Poskesdes; 1 Paket Garase/Parkir Kendaraan 3 Paket Penyediaan Air Bersih; 9 Paket Meubelair Pustu/Poskesdes; 1 Paket Pembangunan Dapur Pustu; 2 Paket Sollar Cell Pustu; 1 Paket Pembangunan Siring 2 Paket Lanjutan Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas	8.975.000.000	Usulan Musrenbang

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Sian; Tumbang Sian; Rangan Hiran, Tumbang Lapan; Batu Nyapau; Kuala Kurun, Tewah.				

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	10 Paket Alkes	2.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Hurung Bunut, Bereng Baru, Jalemu Raya, Tumbang Bahanei, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tusang Raya, Taringin, Tumbang Samui, Rangan Hiran, Krason Raya, Tumbang Habaon; Tewai Baru, Tangki Dahuyan, Batu Nyapau; Tumbang Takaoi; Tumbang Tambirah 17 Puskesmas RS Pratama Tumbang Talaken	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	12 Paket Pustu Set; 3 Set Alkes Poskesdes; 1 Unit Ranjang Periksa; 2 Unit Tabung O2 17 Paket Alkes Puskesmas 1 Paket Alkes RS Pratama	6.955.000.000	Usulan Musrenbang dan Alkes RS Pratama
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah obat yang diadakan	200 jenis obat	2.635.492.090	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah obat yang diadakan	200 jenis obat	2.000.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	97 jenis BMHP	1.599.999.560	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	97 jenis BMHP	2.000.000.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medis yang dilakukan pemeliharaan	17 Paket	149.996.840	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medis yang dilakukan pemeliharaan	17 Paket	149.996.840	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar	17 Puskesmas & Jaringannya	323.317.490	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar	17 Puskesmas & Jaringannya	450.000.000	
b	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Kabupaten Gunung Mas**	**90%**	**50.340.016.921**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Kabupaten Gunung Mas**	**90%**	**30.033.774.370**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3222 Orang	194.333.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3222 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3077 Orang	689.692.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3077 Orang	600.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kelurahan					Kelurahan				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2929 Orang	132.614.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2929 Orang	150.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13904 Orang	102.483.590	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13904 Orang	150.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5510 Orang	155.271.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5510 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79136 Orang	71.221.920	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79136 Orang	300.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12330 Orang	132.952.410	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12330 Orang	200.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11135 Orang	64.721.800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11135 Orang	120.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 Orang	30.749.830	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54 Orang	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	187 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	187 Orang	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1824 Orang	77.308.910	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1824 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3682 Orang	170.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3682 Orang	200.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KLB yang ditangani	2 Kasus	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KLB yang ditangani	2 Kasus	500.000.000	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang berpotensi bencana ditangani	2 Kasus	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang berpotensi bencana ditangani	2 Kasus	500.000.000	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1667 orang	843.871.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1667 orang	500.000.000	Konfergensi Stunting
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar		50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	17 Puskesmas	100.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	475.413.120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan	4 kegiatan	250.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatanyang dilaksanakan	4 Kegiatan	14.503.463.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatanyang dilaksanakan	4 Kegiatan	250.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	3 Kasus	50.000.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	3 Kasus	50.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	233 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	233 Orang	50.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang di Skrinning NAFZA	228 Orang	50.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah orang yang di Skrinning NAFZA	228 Orang	50.000.000	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	791 Orang	50.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	791 Orang	200.000.000	Operasi Katarak, Sunat Masal, Operasi Bibir Sumbing, Kesehatan Bergerak
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	700.000.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	22500 Jiwa	10.974.823.282	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	22500 Jiwa	10.974.823.282	Premi, Kapitasi dan Non Kapitasi
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dilakukan Pengambilan Spesimen	3 Kasus	50.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dilakukan Pengambilan Spesimen	3 Kasus	20.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	1 RS	2.417.147.878	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	1 RS	2.000.000.000	Operasional Rumah Sakit Pratama
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	17 Puskesmas & Jaringannya	16.384.339.351	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	17 Puskesmas & Jaringannya	10.000.000.000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Faskes Lainnya	1.000.000.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Faskes Lainnya	428.951.088	Operasional PSC 119
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilaksanakan re-akreditasi	17 Puskesmas	1.309.609.830	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilaksanakan re-akreditasi	17 Puskesmas	500.000.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Kasus	10.000.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3 Kasus	10.000.000	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus penyakit yang dilakukan pengawasan	3 Kasus	50.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kasus penyakit yang dilakukan pengawasan	3 Kasus	50.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	27804 Keluarga	100.000.000	Sub Kegiatan Baru
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		60.000.000	Sub Kegiatan Baru
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		75.000.000	Sub Kegiatan Baru
						Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	<1/1000	75.000.000	Sub Kegiatan Baru
						Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)		70.000.000	Sub Kegiatan Baru
c	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi**	**70%**	**144.014.460**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi**	**70%**	**60.756.740**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah data/dokumen informasi	1 Dokumen	60.756.740	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Kurun,	Jumlah data/dokumen informasi	1 Dokumen	60.756.740	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kesehatan yang dihasilkan				Kuala Kurun	kesehatan yang dihasilkan			
d	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan cakupan pelayanan rumah sakit sesuai standar**	**100%**	**723.347.000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**Persentase pemenuhan cakupan pelayanan rumah sakit sesuai standar**	**100%**	**200.000.000**	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan workshop akreditasi	17 Puskesmas	723.347.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan workshop akreditasi	17 Puskesmas	200.000.000	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar**	**85%**	**417.466.240**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar**	**85%**	**470.000.000**	
a	**Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**2 Kegiatan**	**216.878.300**	**Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas**	**2 Kegiatan**	**270.000.000**	
						Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen analisis data kepegawaian yang dihasilkan	1 dokumen	120.000.000	Sub Kegiatan Baru
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamata	Jumlah dokumen kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	6 Dokumen	150.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamata	Jumlah dokumen kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	6 Dokumen	150.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n, Semua Kelurahan					n, Semua Kelurahan				
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	17 Puskesmas & Jaringannya	66.878.300	0	0	0	0	-	Anggaran Dihapus
b	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar**	**85%**	**200.587.940**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar**	**85%**	**200.000.000**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	50 orang	200.587.940	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	50 orang	200.000.000	
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar**	**100%**	**293.342.660**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar**	**100%**	**356.000.000**	
a	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat**	**100**	**18.912.600**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Keluraha**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat**	**100**	**96.000.000**	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		n	rekomendasi pemberian izin				n	rekomendasi pemberian izin			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengendalian, pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan perijinan	15 Apotek/Toko Obat	18.912.600	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengendalian, pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan perijinan	15 Apotek/Toko Obat	96.000.000	
b	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100%**	**99.895.000**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**100%**	**100.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100 P-IRT	99.895.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100 P-IRT	100.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Sertifikat Produksi Pangan					Sertifikat Produksi Pangan			
c	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Perentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapatkan sertifikat laik higiene**	**100**	**89.225.100**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Perentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapatkan sertifikat laik higiene**	**100**	**80.000.000**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampel Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang dilakukan pemeriksaan	115 Sampel	89.225.100	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampel Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang dilakukan pemeriksaan	115 Sampel	80.000.000	
d	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**	**100**	**85.309.960**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**	**100**	**80.000.000**	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	50 post market	85.309.960	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	50 post market	80.000.000	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan**	**4 Kebijakan**	**1.710.002.300**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan**	**4 Kebijakan**	**500.000.000**	
a	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat**	**2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya**	**250.000.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat**	**2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya**	**250.000.000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	3 kegiatan	250.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	3 kegiatan	250.000.000	
b	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan kampanye gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan**	**5 Kali**	**1.460.002.300**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan kampanye gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan**	**5 Kali**	**150.000.000**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	5 Tema	1.460.002.300	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	5 Tema	150.000.000	

No	Rencana Tahun (2024)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c										**100.000.000**	**Kegiatan Baru**
						Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah posyandu aktif yang dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	xxx Posyandu Balita; xxx Posyandu Lansia	100.000.000	Sub Kegiatan Baru
	TOTAL				**159.032.436.747**	**TOTAL**				**159.032.436.747**	-

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat berupa data usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran Dewan (Pokir) yang tertuang dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD). Berdasarkan berita acara Musrenbang Tingkat Kabupaten Gunung Mas untuk usulan Tahun 2025, terdapat 17 Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DU RKP) yang telah disetujui, yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Usulan Murenbang Tahun 2025

No	KECAMATAN	USULAN MASUK	USULAN TERAKOMODIR
1	KURUN	25	10
2	MIHING RAYA	6	3
3	SEPANG	12	5
4	RUNGAN HULU	17	8
5	RUNGAN	16	7
6	RUNGAN BARAT	15	12
7	MANUHING	15	6
8	MANUHING RAYA	13	2
9	TEWAH	29	12
10	DAMANG BATU	9	5
11	KAHAYAN HULU UTARA	16	6
12	MIRI MANASA	40	12
	TOTAL	**213**	**88**

Berdasarkan tabel 2.6. di atas, terdapat 12 Kecamatan yang menyampikan DU RKP, dengan jumlah usulan bidang kesehatan sebanyak 213 usulan dan usulan yang diakomodir sebanyak 88 usulan bidang kesehatan. Adapaun usulan-usulan musrenbang yang terakomodir tersebut, dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2.7. (TC 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	64,15%	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan gaji ASN sesuai standar	100	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tampang Tumbang Anjir; Sei Antai; Tumbang Rahuyan; Tumbang Tuwe; Luwuk Kantor; Talangkah; Jalemu Masulan; Rabambang; Fajar Harapan; Karetau Rambangun; Buntoi; Harowu; Tumbang Napoi; Tumbang Masukih; Siruk	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	1 Dokter Gigi; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Bidan; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Perawat; 1 Tim NS; 1 Tim NS; 1 Bidan;	Diusulkan melalui P3K dan Nusantara Sehat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar	70,00%	
			Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal	100%	
			Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas	18,842	
			Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	100%	
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketersediaan sarana kesehatan sesuai standar	70,00%	
	Pembangunan Puskesmas	Tumbang Mahuroi; Bereng Malaka; Bereng Balawan, Tumbang Korik, Mangkuhung, Sei Riang, Sumur Mas,	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dibangun	1 Paket Pembangunan/Relokasi Puskesmas 6 Paket Pembangunan Pustu	- Relokasi Puskesmas Tumbang Mahuroi Diusulkan melalui DAK Fisik Bidang Kesehatan - Pembangunan Pustu Diakomodir
	Pengembangan Puskesmas	Puskesmas Tewah;	Jumlah Puskesmas yang dilaksanakan renovasi/penambahan ruang	1 Paket Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas	Diakomodir
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Pilang Munduk, Dahian Tambuk, Luwuk Langkuas, Parempei, Tusang Raya, Tumbang Lapan; Tanjung Riu, Tewai Baru; 17 Puskesmas Se-Gunung Mas	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu/Poskesdes yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	6 Paket Rehabilitasi Pustu; 2 Patet Rehabilitasi Poskesdes; 17 Paket Pemeliharaan	Diakomodir
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sepang (2 Unit), Tumbang Mahuroi, Tumbang Ponyoi	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	4 Paket	- Puskesmas Sepang 2 unit Rumah Dinas Dokter - Puskesmas Tumbang Mahuroi 1 Unit - Pustu Tumbang Ponyoi 1 unit

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tumbang Mahuroi, Tumbang Marikoi;Kuala Kurun, Kampuri, Tumbang Rahuyan, Tumbang Talaken, Tumbang Napoi, Tewah; Tumbang Tariak, Tanjung Karitak, Tumbang Malahui, Tumbang Pasangon, Kasintu, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Pajangei; Tumbang Rahuyan;Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Rangan Hiran; Tampelas, Sei Antai, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tumbang Langgah, Tusang Raya, Takaras, Luwuk Tukau, Tumbang Sian;Tumbang Sian;Rangan Hiran, Tumbang Lapan;Batu Nyapau	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	3 Unit Ambulance/Pusling5 Paket Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas; 8 Paket Penatanan Pagar & Halaman Pustu/Poskesdes; 1 Paket Garase/Parkir Kendaraan3 Paket Penyediaan Air Bersih; 9 Paket Meubelair Pustu/Poskesdes;1 Paket Pembangunan Dapur Pustu;2 Paket Sollar Cell Pustu;1 Paket Pembangunan Siring	Diakomodir
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Hurung Bunut, Bereng Baru, Jalemu Raya, Tumbang Bahanei, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tusang Raya, Taringin, Tumbang Samui, Rangan Hiran, Krason Raya, Tumbang Habaon; Tewai Baru, Tangki Dahuyan, Batu Nyapau; Tumbang Takaoi; Tumbang Tambirah	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	12 Paket Pustu Set; 3 Set Alkes Poskesdes; 1 Unit Ranjang Periksa; 2 Unit Tabung O2	Diakomodir

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma"ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan Kesehatan di Indonesia dalam Nawacita Kedua ditetapkan pada Misi I yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia", dimana masuk dalam arahan utama strategi pelaksanaan

misi nawacita pada Arahan Presiden yang pertama yaitu "Pembangunan Sumber Daya Manusia" dengan strategi membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, yang dititikberatkan pada :

1. Tatakelola Kependudukan;
2. Perlindungan Sosial;
3. Kesehatan;
4. Pendidikan;
5. Pengentasan Kemiskinan; dan
6. Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan guna tercapainya Misi "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia", ditetapkanlah Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun

2009-2024, ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya kesehatan; dan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
			tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah bidang kesehatan yang memiliki sinergitas dengan tujuan pembangunan nasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas menetapkan Tujuan dan Sasaran Stretegis, sebagai berikut:

1. Tujuan

   Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Gunung Mas adalah:

   a. Optimalisasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas;
   b. Peningkatan jumlah dan kapitas sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Gunung Mas;
   c. Peningkatan persediaan Farmasi, alat kesehatan, dan kualitas keamanan makanan/minuman di Kabupaten Gunung Mas;
   d. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di Kabupaten Gunung Mas; dan
   e. Optimalisasi tata kelola pelayanan kesehatan yag bersih, transparan dan akuntabel pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Gunung Mas adalah:

a. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar.
    1) Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar;
    2) Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal;
    3) Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas; dan
    4) Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

b. Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar.
    1) Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar.

c. Meningkatnya mutu/kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.
    1) Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar.

d. Meningkatnya upaya promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat.
    1) Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan.

e. Meningkatnya mutu dan tata kelola administrasi pelayanan publik Dinas Kesehatan dan Jaringannya.
    1) Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

Berdasarkan data di atas, maka Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	77,76	77,89
		Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar	65,00	70,00
			Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal	100,00	100,00
			Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas	18,55	16,01
			Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	100,00	100,00
		Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM Kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas	85,00	85,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
		sesuai standar	SDM Kesehatan sesuai standar		
		Meningkatnya mutu/kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar	100,00	100,00
		Meningkatnya upaya promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat	Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan	4 Kebijakan	4 Kebijakan
		Meningkatnya mutu dan tata kelola administrasi pelayanan publik Dinas Kesehatan dan Jaringannya	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	78,11	79,05

3.3. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan

Tabel 3.3 (TC.33)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				126.712.308.472				131.478.871.724
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas		100%	54.020.928.828			100 %	56.546.114.228
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase alokasi anggaran kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	377.617.800			100 %	377.617.800

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	338.617.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	338.617.800
1	2	1	02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	0	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran dihapus		-
1	2	1	02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran yang dihasilkan	0	0	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Anggaran dihapus	-	-
1	2	1	02.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	2 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	20.000.000
1	2	1	02.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Dokumen	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	4.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Kinerja (LAKIP, SAKIP, IKU, PK, dan Pakta Integritas) yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	5 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	15.000.000
1	2	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji ASN sesuai standar	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100	**46.061.270.408**			100	**46.061.270.408**
1	2	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	532 orang	46.000.363.528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		532 orang	46.000.363.528
1	2	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 dokumen	60.906.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	60.906.880

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi barang milik daerah	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	**157.084.800**			100%	**157.084.800**
1	2	1	02.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen inventarisir Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	157.084.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	157.084.800
1	2	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	**456.597.180**			100%	**456.597.180**
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Paket	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan ditambahlan		200.000.000
1	2	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 orang	256.597.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang	256.597.180

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	**1.154.469.200**			100%	**1.654 .469.200**
1	2	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah fasilitas yang mendapatkan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	50.000.000
1	2	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	500.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	0	0	-	0	Anggaran dihapus	-	0
1	2	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan ang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	518 buah/137.743 lembar	70.121.920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		518 buah/137.743 lembar	70.121.920
1	2	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah berlangganan surat kabar/majalah	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	4 media massa	11.081.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 media massa	11.081.400
1	2	1	02.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan penyediaan bahan material	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Kegiatan	23.265.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Kegiatan	23.265.880
1	2	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218 orang/kali	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		218 orang/kali	700.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**1**	**02.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**		**3.000.000.000**			**100%**	**5.100.000.000**
1	2	1	02.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0	-	0	Anggaran dihapus	-	-
1	2	1	02.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair yang diadakan	0	0	-	0	Anggaran dihapus	-	-
1	2	1	02.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	100.000.000
1	2	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Paket	2.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	3.000.000.000
1	2	1	02.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dibangun/diadakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	2.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**1**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**1.415.693.080**			**100%**	**1.447.897.480**
1	2	1	02.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	15000 lembar meterai	163.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15000 lembar meterai	163.350.000
1	2	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air dan listrik yang disediakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	856.627.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kantor, 2 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	856.627.200
1	2	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Unit	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		80 Unit	57.204.400

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum yang disediakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	370.715.880	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kantor, 1 RS, 17 Puskesmas & Jaringannya	370.715.880
1	**2**	**1**	**02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**75%**	**1.144.630.080**			**80%**	**1.144.630.080**
1	2	1	02. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	38.990.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.990.050

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Unit	998.621.030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Unit	998.621.030
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara/rehabilitasi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	107.019.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	0
1	**2**	**1**	**02.13**		**Penataan Organisasi**	**Persentase pemenuhan kegiatan penataan organisasi**	**Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun**	**100%**	**253.566.280**			**100%**	**253.566.280**
1	2	1	02.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengikuti kegiatan RAKERKESKAB	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas & Jaringannya	141.777.780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Rumah Sakit, 17 Puskesmas & Jaringannya	141.777.780

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	02.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas pelayanan publik	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	17 Puskesmas & Jaringannya	111.788.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Puskesmas & Jaringannya	111.788.500
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S,P,A) sesuai standar**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**70,00%**	**71.365.379.644**			**75,00%**	**74.162.757.496**
						Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal		**100%**				**100%**	
						Angka Stunting Kabupaten Gunung Mas		**18,842**				**19%**	
						Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular		**100%**				**100%**	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**2**	**02.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan sarana kesehatan sesuai standar**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**41.070.848.534**			**100 %**	**23.181.983.835**
1	2	2	02.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dibangun	Tumbang Mahuroi; Bereng Malaka; Bereng Balawan, Tumbang Korik, Mangkuhung, Sei Riang, Sumur Mas, Tumbang Mantuhe	1 Paket Pembangunan/Relokasi Puskesmas 6 Paket Pembangunan Pustu	8.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Paket	7.000.000.000
1	2	2	02.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas lainnya yang diadakan	Kuala Kurun	1 paket	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pembangunan Gedung PSC 119		1.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Sepang (2 Unit), Tumbang Mahuroi, Tumbang Ponyoi, Tehang	5 Paket	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan ditambahlan		0
1	2	2	02.01	5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/ruang rumah sakit yang dibangun	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Operasional Rumah Sakit Pratama		500.000.000
				6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah bangunan/ruang Puskesmas yang dibangun/dikembangkan	-	2 paket	3.375.851.694	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan ditambahlan		1.000.000.000
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Paket Pemeliharaan RS	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Operasional Rumah Sakit Pratama	1 Paket	60.821.200
1	2	2	02. 01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah bangunan Puskesmas/Pustu yang dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Paket Rehabilitasi Pustu;	4.795.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Paket Rehabilitasi & 17 Paket Pemeliharaan	5.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
								2 Patet Rehabilitasi Poskesdes; 17 Paket Pemeliharaan					
1	2	2	02.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-	0	Anggaran Dihapus	0	0
1	2	2	02.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-	0	Anggaran Dihapus	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Tumbang Mahuroi, Tumbang Marikoi;	3 Unit Ambulance/Pusling	8.975.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Musrenbang	2 Paket	1.000.000.000
							Kuala Kurun, Kampuri, Tumbang Rahuyan, Tumbang Talaken, Tumbang Napoi, Tehang;	5 Paket Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas;					
							Tumbang Tariak, Tanjung Karitak, Tumbang Malahui, Tumbang Pasangon, Kasintu, Taja Urap, Tanjung Untung, Tumbang Pajangei;	8 Paket Penatanan Pagar & Halaman Pustu/Poskesdes;					
							Tumbang Rahuyan;	1 Paket Garase/Parkir Kendaraan					
							Tewang Pajangan, Tumbang Lampahung, Rangan Hiran;	3 Paket Penyediaan Air Bersih;					
							Tampelas, Sei Antai, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tumbang Langgah, Tusang Raya, Takaras, Luwuk Tukau, Tumbang Sian;	9 Paket Meubelair Pustu/Poskesdes;					

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tumbang Sian;	1 Paket Pembangunan Dapur Pustu;					
							Rangan Hiran, Tumbang Lapan;	2 Paket Sollar Cell Pustu;					
							Batu Nyapau;	1 Paket Pembangunan Siring					
							Kuala Kurun, Tewah.	2 Paket Lanjutan Penataan Pagar dan Halaman Puskesmas					
1	2	2		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	Hurung Bunut, Bereng Baru, Jalemu Raya, Tumbang Bahanei, Jalemu Kajuei, Tumbang Kuayan, Tusang Raya, Taringin, Tumbang Samui, Rangan Hiran, Krason Raya, Tumbang Habaon;	12 Paket Pustu Set;	6.955.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usulan Musrenbang dan Alkes RS Pratama	10 Paket Alkes	2.912.356.655

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tewai Baru, Tangki Dahuyan, Batu Nyapau;	3 Set Alkes Poskesdes;					
							Tumbang Takaoi;	1 Unit Ranjang Periksa;					
							Tumbang Tambirah	2 Unit Tabung O2					
							17 Puskesmas	17 Paket Alkes Puskesmas					
							RS Pratama Tumbang Talaken	1 Paket Alkes RS Pratama					
1	2	2	02.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat yang diadakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 jenis obat	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 jenis obat	2.635.492.090

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang diadakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97 jenis BMHP	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97 jenis BMHP	1.599.999.560
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medis yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Paket	149.996.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Paket	149.996.840
1	2	2	02.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas & Jaringannya	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Puskesmas & Jaringannya	323.317.490

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**2**	**02.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase cakupan pelayanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Kabupaten Gunung Mas**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**90%**	**30.033.774.370**			**100%**	**50.340.016.921**
1	2	2	02.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3222 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3299 Orang	194.333.000
1	2	2	02.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3077 Orang	600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3151 Orang	689.692.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2929 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3000 Orang	132.614.200
1	2	2	02.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13904 Orang	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14239 Orang	102.483.590
1	2	2	02.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5510 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5642 Orang	155.271.600
1	2	2	02.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79136 Orang	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		81044 Orang	71.221.920

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12330 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12628 Orang	132.952.410
1	2	2	02.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11135 Orang	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11403 Orang	64.721.800
1	2	2	02.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65 Orang	30.749.830

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187 Orang	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		194 Orang	50.000.000
1	2	2	02.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1824 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1868 Orang	77.308.910
1	2	2	02.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3682 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3770 Orang	170.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah KLB yang ditangani	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kasus	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	2 Kasus	50.000.000
1	2	2	02.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah kasus yang berpotensi bencana ditangani	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Kasus	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	2 Kasus	50.000.000
1	2	2	02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1667 orang	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Konfergensi Stunting	1617 orang	843.871.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			50.000.000
1	2	2	02.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	475.413.120
1	2	2	02.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatanyang dilaksanakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Kegiatan	14.503.463.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kasus	50.000.000
1	2	2	02.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	233 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		238 Orang	50.000.000
1	2	2	02.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang di Skrinning NAFZA	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	228 Orang	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		228 Orang	50.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan khusus sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	791 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Operasi Katarak, Sunat Masal, Operasi Bibir Sumbing, Kesehatan Bergerak	791 Orang	50.000.000
1	2	2	02.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		22 Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.000.000
1	2	2	02.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22500 Jiwa	10.974.823.282	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Premi, Kapitasi dan Non Kapitasi	25000 Jiwa	10.974.823.282

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Kasus yang dilakukan Pengambilan Spesimen	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kasus	50.000.000
1	2	2	02.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Manuhing, Tumbang Talaken	1 RS	2.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Operasional Rumah Sakit Pratama		2.417.147.878
1	2	2	02.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas & Jaringannya	10.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.384.339.351

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Faskes Lainnya	428.951.088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Operasional PSC 119		1.000.000.000
1	2	2	02.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilaksanakan re-akreditasi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17 Puskesmas	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.309.609.830
1	2	2	02.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Kasus yang dilakukan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kasus	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	02.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus penyakit yang dilakukan pengawasan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kasus	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kasus	50.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27804 Keluarga	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	27804 Keluarga	100.000.000
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 orang	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	200 orang	60.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 orang	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	100 orang	75.000.000
					Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<1/1000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	<1/1000	75.000.000
					Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 tatanan	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	4 tatanan	70.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**2**	**02.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100 %**	**60.756.740**			**100%**	**60.756.740**
1	2	2	02.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah data/dokumen informasi kesehatan yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	1 Dokumen	60.756.740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	60.756.740
1	**2**	**2**	**02.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan cakupan pelayanan rumah sakit sesuai standar**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100%**	**200.000.000**			**100%**	**200.000.000**
1	2	2	02.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan workshop akreditasi	Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun	17 Puskesmas	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17 Puskesmas	200.000.000
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase cakupan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan sesuai standar		0,85	**470.000.000**			90	**120.000.000**
1	**2**	**3**	**02.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada Dinas Kesehatan**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**120.000.000**			**2 Kegiatan**	**120.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kabupaten Gunung Mas							
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen analisis data kepegawaian yang dihasilkan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	1 dokumen	120.000.000
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	0
1	2	3	02.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	0	0	-	0	Anggaran Dihapus	17 Puskesmas & Jaringannya	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**3**	**02.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**0,85**	**200.000.000**			**0,85**	
1	2	3	02.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 orang	0
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase pengawasan perizinan sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan UMOT serta pengawasan pre dan post market pangan sesuai standar**		**100**	**356.000.000**			**100**	**250.000.000**
1	**2**	**4**	**02. 01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat rekomendasi pemberian izin**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100**	**96.000.000**			**100**	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	4		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan pengendalian, pengawasan, serta tindak lanjut pengawasan perijinan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Apotek/Toko Obat	96.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Apotek/Toko Obat	**0**
1	**2**	**4**	**02.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase cakupan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**95%**	**100.000.000**			**95%**	**100.000.000**
1	2	4	02.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 P-IRT	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 P-IRT	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**4**	**02.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Perentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang mendapatkan sertifikat laik higiene**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**95**	**80.000.000**			**95**	**150.000.000**
1	2	4	02.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sampel Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang dilakukan pemeriksaan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115 Sampel	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		130 Sampel	150.000.000
1	**2**	**4**	**02.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**100**	**80.000.000**			**0**	**0**
1	2	4	02.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 post market	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang dihasilkan**		**4 Kebijakan**	**500.000.000**			**4 Kebijakan**	**400.000.000**
1	**2**	**5**	**02.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya**	**250.000.000**			**2 RS, 17 Puskesmas dan Jaringannya**	**150.000.000**
1	2	5	02.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 kegiatan	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	150.000.000
1	**2**	**5**	**02.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan kampanye gerakan hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan**	**Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**5 Kali**	**150.000.000**			**5 Kali**	**150.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	5	02.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Tema	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Tema	150.000.000
							Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		**100.000.000**		**Kegiatan Baru**		**100.000.000**
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu aktif yang dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kab. Gunung Mas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sub Kegiatan Baru	1 dokumen	100.000.000
TOTAL									**126.712.308.472**				**131.478.871.724**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas kesehatan Kabupaten Gunung Mas secara rinci Tahun 2025 termuat dalam tabel 4.1., sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Program Dan Penganggaran

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.557.243
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.898.606.417
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	256.660.577
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	342.088.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.088.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.073.370.428
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	845.081.712
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.036.376.755
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.616.643

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.332.765.011
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.481.432.101
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	31.000.000
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	455.196.285
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	976.330.430
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.000.000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	99.228.000

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	164.353.000
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	729.773.645
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	217.782.188
TOTAL DINAS KESEHATAN		159.032.436.747

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	156.262.210
	Administrasi keuangan perangkat daerah	29.947.207.212
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	123.465.360
	Administrasi umum perangkat daerah	455.033.015
	Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.391.873.200
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	419.356.737

	Peningkatan pelayanan BLUD	13.500.000.000
	Penataan organisasi	9.133.040
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.252.458.618
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	186.140.520
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	156.195.200
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.195.200
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.142.936.792
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.340.540
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.582.020
TOTAL		58.220.344.004

Tabel 4.2.
Program, Pagu, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

PROGRAM	PAGU	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.712.358.275	8	20
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	74.845.197.112	3	38
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.431.526.715	2	2
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	313.581.000	3	3
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	729.773.645	2	2
TOTAL PAGU INDIKATIF DINAS KESEHATAN	159.032.436.747	18	65

PROGRAM	PAGU	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.002.330.774	8	19
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.668.153.878	4	8
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.493.277.332	2	2
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	56.582.020	1	1
TOTAL PAGU INDIKATIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	58.220.344.004	15	30

BAB V
PENUTUP

1. Renja Dinas Perubahan Kesehatan Tahun 2025 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh personil Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan sebagai implementasi dari misi Dinas Kesehatan;
2. Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Gunung Masyarakat yang Sehat dan Mandiri, dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdayaguna, serta mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, maka pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada nilai-nilai pro rakyat, inklusif, responsif,efektif, efisien, serta transparan dan akuntabel;
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai; dan
4. Pada akhir tahun anggaran 2025 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

BUKU RENJA MURNI 2025

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KUALA KURUN, 1 JULI 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Diponegoro No- Kuala Kurun 74511 Kalimantan Tengah
email :dpmptsp@gunungmaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan Renstra DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2010);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244a);
12. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 408);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 587);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
15. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025.

KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RENJA DPMPTSP Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026.

KEDUA : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan dan berfungsi sebagai pedoman dokumen penganggaran dalam penyusunan dan penetapan antara lain :

1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 - 2026.

KETIGA : Penjabaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas ini.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada tanggal : 2 April 2024

Kepala Dinas

HARPASENO, S.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751110 2006004 1 022

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini mengacu kepada Peraturan Peraturan Mendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kedua Pasal 11 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan pembahasan yang dikoordinasikan antara BAPPEDARIDA Kabupaten Gunung Mas dengan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan PEMDA Kabupaten Gunung Mas.

Demikian, dengan harapan kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan rencana/ tindak lanjut dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

Kuala Kurun, 19 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunung Mas

HARPASENO, S.T.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197511102006041022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I. 1. Latar Belakang 1

I. 2. Landasan Hukum 2

I. 3. Maksud dan Tujuan 5

I. 4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **8**

II. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

II. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 28

II. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

II. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **32**

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

III. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 33

III. 3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA **39**

IV. 1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan 39

IV. 2. Indikator Kinerja 43

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA 55

V. 1. Dana Indikatif Tahun 2025 55

V. 2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif 55

BAB IV PENUTUP 64

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan, Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD Provinsi.

Penyusunan berbagai dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Renja Perangkat Daerah dengan demikian akan sangat

menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan perizinan, khususnya di bidang penanaman modal, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas perlu mengedepankan pola pelaksanaan administrasi publik dan perizinan yang lebih mudah bagi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan penyempurnaan kembali tatalaksana perizinan dalam menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan bersih. Hal ini membutuhkan perencanaan kerja DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya, DPMPTSP sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Gunung Mas, menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025 dengan menerjemahkan serta mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ke dalam program dan kegiatannya selama satu tahun ke depan. Hal tersebut karena pada dasarnya program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2025 berkontribusi pada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (RENSTRA DPMPTSP) Tahun 2025-2026 sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244a);
21. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 136);
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 408);
23. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 587);
24. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 696);
25. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 710);
26. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor ……);
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 – 2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,

pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perizinan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Gunung Mas.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional, guna mendukung perencanaan tahunan Dinas untuk memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

I.3.2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan dinas;
c. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA Perangkat Daerah;
d. Mengkaji kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKDP dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Millenium Development Goals* (MDGs)
e. Instrumen bagi dinas untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
f. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
g. Instrumen bagi dinas untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
h. Instrumen bagi dinas sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat.
i. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- III.3. Program dan Kegiatan

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA

- IV.1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- IV.2. Indikator Kinerja

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA

- V.1. Dana Indikatif Tahun 2025
- V.2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk lebih meningkatkan efisiensi penyusunan Rencana Kerja yang strategis dan merupakan salah satu bahan penyusun Rencana Kerja untuk Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka hal ini dapat ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu. Pelaksanaan Rencana Tahun 2025 diuraikan dengan beberapa program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas.

Pelaksanaan rencana Tahun lalu serta kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun lalu cukup optimal, program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Hal tersebut terlihat dari hasil pencapaian kinerja beberapa kegiatan yang terlaksana/terealisasi secara keseluruhan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

No	Program	Alokasi Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Tahun 2024		Realisasi Fisik Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	***7.990.547.307,00***	***4.058.571.165,00***	**50,79**	**54,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.740.999.778,00**	**3.385.134.779,00**	**53,78**	**56,66**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah***	**13.802.400,00**	**12.952.400,00**	**74,83**	**77,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.027.500,00	4.027.400,00	**100,0**	**100,00**
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.700.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	**100,0**	**100,00**
7	Evaluasi Kinerja dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.357.600,00	1.700.000,00	**39,01**	**39,01**
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**2.504.800.289,00**	**1.697.850.343,00**	**67,78**	**67,78**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.322.289,00	1.696.150.343,00	**67,84**	**67,84**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	**100,0**	**100,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.778.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**194.530.500,00**	**68.186.948,00**	**35,05**	**38,75**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.788.500,00	20.790.000,00	**23,68**	**33,10**
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	106.742.000,00	47.396.948,00	**44,40**	**44,40**
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**722.682.725,00**	**214.754.482,00**	**29,72**	**37,24**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.481.750,00	510.000,00	**11,38**	**24,56**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.498.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.230.100,00	15.267.500,00	**71,91**	**84,22**
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.796.500,00	2.430.000,00	**35,75**	**46,80**
5	Penyediaan Bahan/Material	66.107.190,00	20.686.900,00	**31,29**	**50,11**
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.758.000,00	8.865.000,00	**22,87**	**38,85**
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.940.300,00	166.866.780,00	**41,21**	**41,21**
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.870.885,00	128.302,00	**0,81**	**12,20**
6	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**2.140.799.267,00**	**513.024.500,00**	**97,94**	**97,95**
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	00,00	00,00
2	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	00,00	00,00
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	00,00	00,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	2.140.799.267,00	1.158.687.500,00	**54,12**	**62,90**

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**447.874.058,00**	**210.388.606,00**	**46,97**	**46,97**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	**50,00**	**50,00**
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.750.500,00	30.423.398,00	**44,91**	**44,91**
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.978.100,00	7.840.000,00	**23,07**	**23,07**
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.745.458,00	170.925.208,00	**49,72**	**49,72**
8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**259.171.362,00**	**16.574.500,00**	**6,40**	**6,40**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.180.600,00	11.934.500,00	**5,71**	**5,71**
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.990.762,00	4.640.000,00	**9,28**	**9,28**
9	***Penataan Organisasi***	**5.540.000,00**	**4.040.000,00**	**72,92**	**72,92**
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000,00	2.000.000,00	**100,00**	**100,00**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3540000	2.040.000,00	**57,63**	**57,63**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**159.566.700,00**	**35.447.400,00**	**22,21**	**22,21**
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1	***Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***	**159.566.700,00**	**35.447.400,00**	**22,21**	**22,21**
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	76.698.700,00	6.115.800,00	**7,97**	**7,97**
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	82.868.000,00	29.331.600,00	**35,40**	**35,40**
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**408.043.918,00**	**128.757.917,00**	**31,55**	**31,55**
1	***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**408.043.918,00**	**128.757.917,00**	**31,55**	**31,55**
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	234.538.278,00	114.826.117,00	**48,96**	**48,96**
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	173.505.640,00	13.931.800,00	**8,03**	**8,03**
4	**PROGRAM PELAYANAN**	**527.744.316,00**	**233.606.097,00**	**44,27**	**49,11**

	PENANAMAN MODAL				
1	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**527.744.316,00**	**233.606.097,00**	**44,27**	**49,11**
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	293.711.464,00	128.131.344,00	**43,62**	**55,70**
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	89.304.864,00	43.703.644,00	**48,94**	**48,94**
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	144.727.988,00	61.771.109,00	**42,68**	**42,68**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**548.842.528,00**	**261.820.928,00**	**47,70**	**47,70**
1	***Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	**548.842.528,00**	**261.820.928,00**	**47,70**	**47,70**
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	114.043.800,00	40.033.640,00	**35,10**	**35,10**
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	299.870.328,00	147.283.288,00	**49,12**	**49,12**
3	Pengawasan Penanaman Modal	134.928.400,00	74.504.000,00	**55,22**	**55,22**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**51.941.644,00**	**13.804.044,00**	**26,58**	**26,58**
1	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	**51.941.644,00**	**13.804.044,00**	**26,58**	**26,58**
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	51.941.644,00	13.804.044,00	**26,58**	**26,58**
	Total	***5.740.999.778,00***	***7.990.547.307,00***	***4.058.571.165,00***	**50,79**

Mengacu pada pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah 2025-2026, dapat dilihat realisasi capaian per tahunnya termasuk kategori baik dan sesuai dengan ekspetasi target yang sudah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah:

Tabel Rencana dan Realisasi Kinerja pada Tahun Lalu

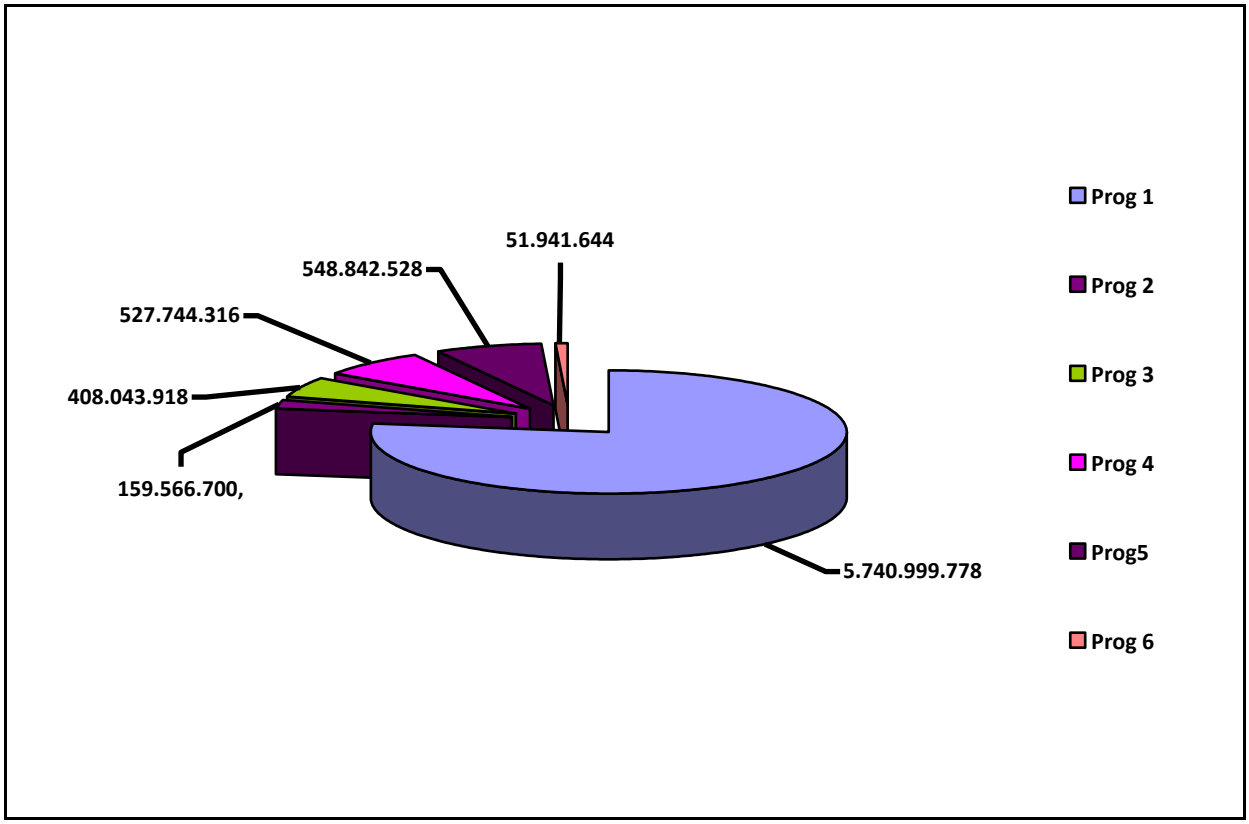
No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
I	**2.18**	**URUSAN PENANAMAN MODAL**										
I	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**										
1.	**01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**										
1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
4	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
5	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
6	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
7	07	Evaluasi	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
2.	**01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*25*	23,1	*25*	23,1	*25*	23,1	*25*	23,1	*100*	*92,51*
2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
3.	**01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										
1	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*25*	24,9	*25*	24,9	*25*	24,9	*25*	24,9	*100*	*99,05*
4.	**01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										
1	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*25*	22,4	*25*	22,4	*25*	22,4	*25*	22,4	*100*	*99,21*
2	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*25*	22,7	*25*	22,7	*25*	22,7	*25*	22,7	*100*	*98,17*
5	**01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*25*	21,2	*25*	21,2	*25*	21,2	*25*	21,2	*100*	*99,35*
2	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*91,26*
3	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*68,93*
4	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*25*	*24,9*	*100*	*98,46*
5	07	Penyediaan Bahan/Material	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*91,30*
6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*25*	*24,8*	*100*	*99,12*
7	09	Penyelenggaraan Rapat	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*100*	*86,73*

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
6	**01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*100*	*97,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100	*97,94*
2	05	Pengadaan Mebel	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0	*0*
3	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
4	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
7	**01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*25*	25	*100*	*100*
2	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*100*	*80,70*
3	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*98,31*
4	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*25*	22,3	*100*	*95,47*
7	**01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										
1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*94,19*
2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*25*	24,7	*25*	24,7	*25*	24,7	*25*	24,7	*100*	*135,12*
8	**01.2.13**	**Penataan Organisasi**										
1	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	0	*0*	*0*
II	**02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**										
1	**02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*100*	*95,51*
2	**02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**										
1	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*25*	10,2	*100*	*81,75*
2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*25*	24,6	*100*	*97,55*
III	**03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**										
1	**03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										

No.	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja									
			Tr. I		Tr. II		Tr. III		Tr. IV		2024	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	*25*	23,4	*25*	23,4	*25*	23,4	*25*	23,4	100	119,91
2	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*25*	22,8	*100*	*87,19*
VI	**04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**										
1	**04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*25*	23	*100*	12,5	*25*	12,5	*25*	12,5	*100*	*91,47*
2	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penananaman Modal	*25*	24,1	*100*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*96,87*
3	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	*25*	24,1	*100*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*89,22*
V	**05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**										
1	**05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										
1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	23	*100*	12,5	*25*	12,5	*25*	12,5	*100*	*93,36*
2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	21,7	*25*	21,7	*25*	21,7	*25*	21,7	*100*	*99,14*
3	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*25*	24,1	*100*	*91,35*
IV	**06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**										
1	**06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**										
1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*25*	15	25	15	25	15	25	15	*100*	*97,94*

TR: Triwulan
T: Target
R: Realisasi

Bagan Kue Realisasi Belanja Langsung
Berdasarkan Rincian Belanja Tahun Lalu (TA. 2024)



Tabel Capaian Renstra Pada Tahun Anggaran 2024

No.	Kode Rek	Nama Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra PD Pada Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Yang Dievaluasi (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Relisasi Anggaran Renja PD Yang Dievalusi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra PD S/D Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD S/D Tahun 2024 (%)		Unit PD Pe-nanggung Jawab	Ket
										I		II		III		IV												
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9*		*10*		*11*		*12 = 8+9+10+11*		*13 = 12/7 X 100%*	*14 = 6 + 12*				*15*		*16*	*17*
				K	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*Rp*	*K*	*K*	*K*	*Rp*		*K*	*K*		
I	***1***	***Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal***	**Persentase Laporan/ Dokumen yang berhasil dilaksanakan tepat waktu**		**7.049.435.253,00**		**5.346.552.717,00**		**5.740.999.778,00**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**5.374.187.262,00**		**100**		**10.720.739.979,00**			**DPMPTSP**	
I	***1***	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	**Persentase Laporan/ Dokumen yang berhasil dilaksanakan tepat waktu**		**3.781.139.593,00**		**4.008.704.167,00**		**4.038.185.294,00**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**1.006.546.298,50**		**3.755.379.439,00**		**100**		**7.764.083.606,00**			**DPMPTSP**	
	02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi		**12.952.400,00**		**13.802.500,00**		**13.802.400,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**3.450.600,00**		**13.802.400,00**		**100**		**27.604.900,00**			**Sekretariat**	
1	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	3	4.027.400,00	3	4.027.500,00	3	4.027.400,00	1	1.006.850,00	1	1.006.850,00	1	1.006.850,00	0	1.006.850,00	3	4.027.400,00	100	100	6	8.054.900,00	100	94	**Sekretariat**	
2	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	2.550.000,00	2	2.550.000,00	1	1.275.000,00	1	1.275.000,00	0	0,00	0	0,00	2	2.550.000,00	100	100	2	5.100.000,00	100	100	**Sekretariat**	
3	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	100	98,82	**Sekretariat**	
4	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	80	67,65	**Sekretariat**	
5	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	0	0,00	1	1.700.000,00	100	100	2	3.400.000,00	100	60	**Sekretariat**	
6	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	1	425.000,00	0	850.000,00	1	850.000,00	0	0,00	3	2.125.000,00	100	100	6	4.250.000,00	100	75,75	**Sekretariat**	
7	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1.700.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
	02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	Persentase Terpunuhinya Keuangan		**2.479.323.928,00**		**2.260.865.253,00**		**2.354.118.295,00**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**544.549.719,75**		**2.178.198.879,00**		**100**		**4.439.064.132,00**			**Sekretariat**	
1	02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24	2.474.845.928,00	24	2.256.387.253,00	24	2.349.640.295,00	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	543.430.219,75	21	2.173.720.879,00	100	100	48	4.430.108.132,00	60	92,63	**Sekretariat**	
2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1.700.000,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	00,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	100	100	4	3.400.000,00	100	100	**Sekretariat**	
3	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	2.778.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	0	0,00	1	539.000,00	1	539.000,00	1	1.700.000,00	3	2.778.000,00	100	100	6	5.556.000,00	100	61,02	**Sekretariat**	
	02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Administrasi Pelaporan		**1.700.000,00**		**2.100.000,00**		**2.100.000,00**		**0,00**		**0,00**		**380.000,00**		**1.700.000,00**		**2.080.000,00**		**100**		**4.180.000,00**			**Sekretariat**	
1	03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Jumlah Dokumen yang Dibutuhkan	1	1.700.000,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	1	0,00	0	0,00	1	380.000,00	1	1.700.000,00	2	2.080.000,00	100	100	4	4.180.000,00	100	99,76	**Sekretariat**	
	02.05	**Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas		**178.894.500,00**		**203.085.308,00**		**108.684.700,00**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**26.781.938,25**		**107.127.753,00**		**100**		**310.213.061,00**			**Sekretariat**	
1	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang Menerima Pakaian Dinas	3	91.652.500,00	3	76.794.018,00	3	41.714.400,00	1	10.346.250,00	1	10.346.250,00	1	10.346.250,00	0	10.346.250,00	3	41.385.000,00	100	100	6	118.179.018,00	100	89,79	**Sekretariat**	
2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan	13	87.242.000,00	13	126.291.290,00	13	66.970.300,00	4	16.685.688,00	3	16.685.688,00	3	16.685.688,00	3	16.685.688,00	13	66.742.753,00	100	100	26	193.034.043,00	100	91,07	**Sekretariat**	

	02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Layanan yang Dibutuhkan		**457.642.965,00**		**340.246.055,00**		**449.867.594,00**		**69.482.543,50**		**147.209.103,50**		**57.702.543,50**		**57.702543,50**		**396.818.534,00**		**100**		**737.064.589,00**			**Sekretariat**	
1	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor	1	4.481.750,00	2	1.810.600,00	2	3.530.000,00	1	876.750,00	1	876.750,00	1	876.750,00	1	876.750,00	4	3.507.000,00	100	100	6	5.317.600,00	100	84,83	**Sekretariat**	
2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlengkapan Gedung Kantor	1	107.323.000,00	1	104.602.085,00	1	98.080.290,00	0	0,00	1	89.506.560,00	0	0,00	0	0,00	1	89.506.560,00	100	100	2	194.108.645,00	100	98,53	**Sekretariat**	
3	06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Perlengkapan Gedung Kantor	2	21.230.000,00	2	11.482.000,00	2	17.090.000,00	2	11.780.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	11.780.000,00	100	100	4	23.262.000,00	100	98,41	**Sekretariat**	
4	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bacaan Undang-undang	4	6.299.700,00	4	6.299.700,00	4	6.596.400,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	1	1.623.750,00	4	6.495.000,00	100	100	8	12.272.800,00	100	99,99	**Sekretariat**	
5	06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket/Jenis	1	68.107.190,00	25	63.080.930,00	25	70.888.304,00	0	0,00	1	64.721.800,00	0	0,00	0	0,00	1	64.721.800,00	100	100	50	127.802.730,00	100	98,78	**Sekretariat**	
6	06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan	4	14.272.000,00	4	5.860.800,00	4	6.468.800,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	1	1.603.000,00	4	6.412.000,00	100	100	8	12.272.800,00	100	99,56	**Sekretariat**	
7	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	79	218.986.200,00	64	147.110.740,00	64	247.213.800,00	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	14	53.599.043,50	54	214.396.174,00	100	100	128	361.506.914,00	100	91,58	**Sekretariat**	
8	06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	1	16.943.125,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
	02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor		**1.500.000.003,00**		**489.369.934,00**		**523.809.000,00**		**513.024.500,00**		**00,00**		**0,00**		**00,00**		**513.024.500,00**		**100**		**1.002.394.434,00**			**Sekretariat**	
1	07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4	0	0,00	1	444.545.500,00	1	523.809.000,00	1	513.024.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	513.024.500,00	100	0	0	957.570.000,00	100	100	**Sekretariat**	
2	07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket	0	0,00	1	21.916.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**21.916.180,00**	0	0	**Sekretariat**	
3	07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	0	0,00	1	15.053.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**15.053.374,00**	0	0	**Sekretariat**	
4	07.11	Pengandaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit	1	1.500.000.003,00	0	7.854.880,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	**7.854.880,00**	0	0	**Sekretariat**	
	02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi		**360.152.920,00**		**464.261.192,00**		**462.624.498,00**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**105.794.660,75**		**423.178.643,00**		**100**		**887.439.835,00**			**Sekretariat**	
1	08.01	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah Jenis Surat-menyurat yang Terpenuhi	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	0	600.000,00	1	2.400.000,00	100	100	2	4.800.000,00	100	100	**Sekretariat**	
2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air dan Listrik Gedung Kantor	2	67.750.500,00	2	44.190.000,00	2	130.482.150,00	2	26.326.244,25	0	26.326.244,25	0	26.326.244,25	0	26.326.244,25	2	105.304.897,00	100	100		149.494.897,00	100	89,44	**Sekretariat**	
3	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	1	33.978.100,00	1	13.750.670,00	1	23.710.000,00	1	5.827.500,00	0	5.827.500,00	0	5.827.500,00	0	5.827.500,00	1	23.310.000,00	100	100	2	37.460.670,00	100	96,43	**Sekretariat**	
4	08.04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor	12	256.024.320,00	12	403.920.522,00	12	306.032.348,00	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	3	73.040.936,50	12	292.163.746,00	100	100	24	696.084.268,00	100	89,2	**Sekretariat**	
	02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang yang Terpenuhi		**287.904.727,00**		**232.727.525,00**		**123.178.807,00**		**26.057.682,50**		**42.975.682,50**		**26.057.682,50**		**26.057.682,50**		**121.148.730,00**		**100**		**355.876.255,00**			**Sekretariat**	
1	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	14	169.980.600,00	14	85.864.250,00	14	110.658.007,00	4	26.057.682,50	4	26.057.682,50	3	26.057.682,50	3	26.057.682,50	14	104.230.730,00	100	100	28	190.094.980,00	100	96,51	**Sekretariat**	
2	00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**Sekretariat**	
3	09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor	1	117.924.127,00	1	146.863.275,00	1	12.520.800,00	0	0,00	1	16.910.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.910.000,00	100	100	2	163.773.275,00	100	98,98	**Sekretariat**	
	02.13	**Penataan Organisasi**	Persentase Penataan Organisasi yang Berkualitas		**4.040.000,00**		**2.245.600,00**		**0**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		0,00		**100**		**2.245.600,00**			**Sekretariat**	
1	13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Biokrasi	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	2.000.000,00	1	1.395.600,00	1	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	100	2	1.395.600,00	100	64,49	**Sekretariat**	

2	13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Yang Terpenuhi	1	2.040.000,00	1	850.000,00	1	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	100	100	2	850.000,00	100	98,82	**Sekretariat**	
II	***2***	***Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal***	**Persentase Kegiatan yang terlaksana**		**121.604.700,00**		**184.621.580,00**		**255.982.080,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**63.995.520,00**		**255.982.080,00**		**100**		**440.603.660,00**			**PM**	
	02.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemberian Fasilitas yang Terpenuhi		**0,00**		**94.783.000,00**		**131.100.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**32.775.000,00**		**131.100.000,00**		**100**		**225.883.000,00**			**PM**	
1	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Kemudahan Berusaha	1	0,00	1	94.783.000,00	1	131.100.000,00	1	0,00	1	125.220.000,00	0	0,00	0	0,00	1	131.100.000,00	100	100	2	225.883.000,00	100	100	**PM**	
	02.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Kebijakan Umum yang Berkualitas		**121.604.700,00**		**89.838.580,00**		**124.882.080,00**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**28.843.642,50**		**115.374.570,00**		**100**		**205.213.150,00**			**PM**	
1	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen PERDA Rencana Umum	1	54.473.700,00	1	55.699.580,00	1	40.811.630,00	1	8.340.534,50	0	8.340.534,50	0	8.340.534,50	0	8.340.534,50	1	33.362.138,00	100	100	2	89.061.718,00	80	41,09	**PM**	
2	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang Terpenuhi	1	67.131.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	**PM**	
3	02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha yang Tepenuhi	0	0,00	1	34.139.000,00	1	84.070.450,00	1	20.503.108,00	0	20.503.108,00	0	20.503.108,00	0	20.503.108,00	1	82.012.432,00	100	100	2	116.151.432,00	100	98,44	**PM**	
III	***3***	***Program Promosi Penanaman Modal***	**Persentase Jumlah Investor dan Nilai Investasi**		**472.594.950,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**267.608.454,00**		**100**		**416.272.897,00**			**PM**	
	02.01	**Penyelenggaran Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Promosi Investasi yang Terpenuhi		**472.594.950,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**66.902.113,50**		**267.608.454,00**		**100**		**416.272.897,00**			**PM**	
1	01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	0	0,00	4	124.621.943,00	4	73.110.200,00	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	1	21.916.116,75	4	87.664.467,00	100	100	8	212.286.410,00	100	93,82	**PM**	
2	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PTT/Honorer	1	289.121.310,00	1	24.042.500,00	1	206.378.432,00	1	44.985.996,75	0	44.985.996,75	0	44.985.996,75	0	44.985.996,75	1	179.943.987,00	100	100	2	203.986.487,00	100	91,46	**PM**	
3	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	183.473.640,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PM**	
IV	***4***	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	**Persentase Pelayanan yang Terpenuhi**		**570.139.900,00**		**493.549.556,00**		**514.318.480,00**		**128.386.430,00**		**150.435.911,00**		**150.435.911,00**		**48.386.430,00**		**447.644.683,00**		**100**		**971.194.238,00**			**PTSP**	
	02.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Daerah**	Persentase Pelayanan Peningkatan Pelayanan yang Terpenuhi		**570.139.900,00**		**493.549.556,00**		**514.318.480,00**		**128.386.430,00**		**150.435.911,00**		**150.435.911,00**		**48.386.430,00**		**447.644.683,00**		**100**		**941.194.239,00**			**PTSP**	
1	01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	0	0,00	5	271.848.312,00	5	264.801.188,00	2	60.000.000,00	1	76.021.264,00	1	76.021.264,00	1	30.000.000,00	5	242.042.528,00	100	100	10	513.890.840,00	100	92	**PTSP**	
2	01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	3	149.854.928,00	3	167.284.528,00	1	50.000.000,00	1	56.028.217,00	1	56.028.217,00	0	0,00	3	162.056.435,00	100	100	6	311.911.363,00	60	96,74	**PTSP**	
3	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	200	314.122.540,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
4	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Beerusaha Berbasis Risiko	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	4	83.495.820,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
5	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Dokumen Laporan yang Terpenuhi	25	172.521.540,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**PTSP**	
6	01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Laporan IKM yang Terpenuhi	0	0,00	2	71.846.316,00	2	82.429.764,00	0	18.386.430,00	0	18.386.430,00	0	18.386.430,00	2	18.386.430,00	2	73.545.720,00	100	100	4	145.392.036,00	100	96,7	**PTSP**	
V	***5***	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	**Persentase Peningkatan Mutu yang**		**537.604.440,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**580.213.852,00**		**100**		**1.046.135.415,00**			**WASDAL**	

			Terpenuhi																						
	02.01	**Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Mutu yang Berkualitas		**537.604.440,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**145.053.463,00**		**580.213.852,00**		**100**		**1.046.135.415,00**			**WASDAL**	
1	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	8	114.043.800,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
2	0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpenuhi	217	272.789.440,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
3	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Terpenuhi	14	150.771.200,00	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0			**WASDAL**	
1	01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	0	0	1	129.674.428,00	1	30.264.688,00	0	30.264.688,00	0	30.264.688,00	0	30.264.688,00	1	121.058.752,00	100	0	2	121.058.752,00	0	0	**WASDAL**	
2	01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	9	294.630.716,00	9	388.396.400,00	3	96.265.850,00	2	96.265.850,00	2	96.265.850,00	2	96.265.850,00	9	385.063.400,00	100	100	18	679.694.116,00	100	87,09	**WASDAL**	
3	01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Terpenuhi	0	0,00	1	171.290.847,00	1	81.103.600,00	1	18.522.925,00	0	18.522.925,00	0	18.522.925,00	0	18.522.925,00	1	74.091.700,00	100	100	2	245.382.547,00	100	96,54	**WASDAL**	
VI	**6**	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**Persentase Penyusunan Data yang Terpenuhi**		**63.179.82,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**0,00**		**52.746.264,00**		**100**		**97.837.672,00**			**WASDAL**	
	02.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota**	Persentase Peningkatan Data Yang Terpenuhi		63.179.82,00		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**17.582.088,00**		**0,00**		**52.746.264,00**		**100**		**97.837.672,00**			**WASDAL**	
1	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi yang Terpenuhi	3	63.179.82,00	5	45.091.408,00	3	53.853.864,00	1	17.582.088,00	1	17.582.088,00	1	17.582.088,00	0	0,00	3	52.746.264,00	100	100	10	97.837.672,00	100	80	**WASDAL**	

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung sampai dengan tahun anggaran 2024 adalah 36 (Tiga Puluh Enam) orang dengan rincian sebagai berikut 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan 15 (Lima Belas) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Jumlah Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Kepegawaian	Desember 2023	Juli 2024
1.	Pegawai Ngeri Sipil (PNS)	20	19
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-
3.	Pegawai PPPK (P3K)	-	2
3.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	19	15
	Jumlah (orang)	**39**	**36**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Usia (Tahun)														Jumlah
	<30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV/d															
IV/c															
IV/b							1		1				2	0	**2**
IV/a							1	1					1	1	**2**
III/d			1			1	2	1		1	1	1	4	4	**8**
III/c					1	1							1	1	**2**
III/b					1								1		**1**
III/a			1										1		**1**
II/d															
II/c			1								1		1		**2**
II/b						1								1	**1**
II/a															
I/d															
I/c															
I/b															
I/a															
Jumlah	0	0	3	0	2	3	4	2	1	1	2	1	12	7	**19**

Jumlah Pegawai PNS / ASN Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Formal	Usia (Tahun)														Jmlh
	< 30		31-40		41-45		46-50		51-55		> 55		Jumlah		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
S – 2 (PNS)					1	1	3	1					4	2	6
S – 1 (PNS)			2		3	1	2		1	2	1		9	3	12
S – 1 (P3K)				2										2	2
S – 1 (PTT)	2	2	1										3	2	5
SLTA (PNS)			1										1		1
SLTA (PTT)	4	1	1	2		1					1		6	4	10
Jumlah	**6**	**3**	**5**	**4**	**4**	**3**	**5**	**1**	**1**	**2**	**2**		**23**	**13**	**36**

II.2.2 KINERJA DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Utama dan target yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Gunung Mas No. 6 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yaitu jumlah izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibandingkan jumlah pemohon izin dikalikan seratus persen, dikarenakan mekanisme perizinan pada DPMPTSP masih belum optimal maka dalam hal ini realisasi capaian kinerja dapat dilihat dari jumlah izin yang diterbitkan pada Tahun 2024 yaitu:

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan
Tahun 2022, 2023 dan 2024

NO	Sektor	Jumlah Izin	Nama Izin		Jumlah Izin			Keterangan
					2022	2023	2024	
1.	Pekerjaan Umum	1.	Persetujuan Bangunan Gedung		23	49	140	Manual/Melalui aplikasi SIMBG
2.	Pendapatan Daerah	2.	Reklame		194	316	411	Manual/aplikasi sipet
3.	Kesehatan	3.	1.	SIP. Perawat	182	182	114	Manual
		4.	2.	SIP. Bidan	117	117	73	Manual
		5.	3.	SIP. Dokter Umum	27	27	20	Manual
		6.	4.	SIP. Dokter Spesialis	4	4	9	Manual

		7.	5.	SIP. Dokter gigi	0	0	2	Manual
		8.	6.	SIP. Perawat Gigi	1	1	3	Manual
		9.	7.	SIP. Tenaga Gizi	7	7	0	Manual
		10.	8.	Izin Optikal	3	3	0	Manual
		11.	9.	SIP. Apoteker	13	13	11	Manual
		12.	10.	Izin Toko Obat	15	15	17	Manual/OSS
		13.	11.	Izin Klinik	4	4	0	Manual/OSS
		14.	12.	SIP. Radiografer	1	1	1	Manual
		15.	13.	Izin Operasional Puskesmas	7	7	4	Manual
		16.	14.	SIP. Akupuntur Terapis	1	1	0	Manual
		17.	15.	SIP. Tenaga Medis Kefarmasian	25	25	26	Manual
		18.	16.	SIP. Refraksionis Optisen	0	0	0	Manual
		19.	17.	SIP. Teknik Transfusi Daerah	1	1	0	Manual
		20.	18.	SIP. Apotek	4	4	8	Manual/OSS
		21.	19.	SIP. Ahli Laboratorium Medik	5	5	10	Manual
4.	Pendidikan	22.	Izin Operasional/Pendirian Satuan Pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, PKBM		42	33	22	Manual
5.	Pariwisata/ TDUP	23.	Hotel, Penginapan, Cafe, karaoke		3	4	3	Manual/OSS
6.	Perdagangan	24.	ITMB (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)		19	42	36	Manual/OSS
		25.	1.	Karaoke	4	4	4	Manual/OSS
		26.	2.	Toko Pengecer	35	35	35	Manual/OSS
		27.	3.	Sub Distributor	3	3	3	Manual/OSS
7.	NIB	28.	1.	Skala Usaha Mikro Kecil	595	595	595	OSS
		29.	2.	Skala Non UMK	3	3	3	OSS
Total		**29**			**1785**	**1901**	**1204**	

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

II.3.1. PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi isu yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a) Pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Hal ini disebabkan oleh keengganan Perangkat Daerah Teknis melimpahkan wewenang perizinan sehingga terjadi tarik-ulur kewenangan Perangkat Daerah tersebut. Selain itu Perangkat Daerah terkait masih tidak memahami dan menguasai jenis perizinan apa yang melekat pada kewenangannya dimaksud;

b) Disamping masalah kewenangan dan regulasi kebijakan, Tim Teknis Perizinan Perangkat Daerah masih belum bekerja secara maksimal sehingga Standar Pelayanan Publik belum memenuhi target yang diharapkan;

c) Belum adanya ***front office*** dan ***back office*** yang memadai pada gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas sehingga pemohon yang hendak mengurus perizinannya langsung dapat masuk ruangan pelayanan, hal ini sangat berpengaruh negatif bagi petugas yang menerima dan memeriksa berkas permohonan tersebut;

d) Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia pada DPMPTSP. Dengan Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang, Idealnya Setiap ***front office(FO)*** adalah **2** orang dan ***back office (BO)*** **4** orang**.** Hal ini ditambah dengan Pelayanan di Gedung ***MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) Kabupaten Gunung Mas*** di Pasar Baru Kuala Kurun sehingga diharapkan ditambah

lagi Pegawainya 2 x lipat menjadi FO = **4** orang dan BO = **8** orang secara perhitungan keseluruhan untuk **2** lokasi Kantor Perizinan Terpadu**.** Hal ini mengakibatkan pegawai bekerja rangkap, dan lemahnya kemampuan dalam memenuhi SOP dalam kecepatan pengurusan perizinan berusaha;

e) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik di Kantor DPMPTSP dan Kantor MPP Kabupaten Gunung Mas sehingga menurunkan minat masyarakat untuk mengurus perizinan berusahanya;

f) Peraturan Perizinan yang tumpang tindih dan Peraturan Perizinan belum mencakup keseluruhan wewenang yang diperlukan untuk mengeluarkan kemampuan kemudahan dalam penguruan perizinan berusaha;

g) Belum dipetakannya peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perizinan yang ada saat ini (*Pusat Update Data Base*);

h) Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha;

i) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perizinan berusaha beserta persyaratan-persyaratannya yang dilakukan secara mandiri melalui HP atau Komputer pemohon;

j) Digitaliasi pengurusan perizinan berusaha yang dirasakan masih belum menyeluruh disetiap sektor pelayanan di PTSP dan di MPP.

II.3.2. SOLUSI

a) Adanya kejelasan dan kerelaan pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan dari Perangkat Daerah Teknis kepada DPMPTSP sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b) Setiap Instansi/ Perangkat Daerah teknis terkait izin menempatkan tenaga teknisnya pada untuk ditempatkan di ***back office*** DPMPTSP, sehingga koordinasi dan mekanisme pelayanan dapat berjalan seperti yang diharapkan;

c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas mengusulkan peremajaan sarana prasaran khusus terkait kemudahan pelayanan perizinan berusaha, yang dilengkapi dengan saran

dan prasarana digitalisasi seperti MPP digital / PTSP Layanan Digital Mandiri sehingga dapat mempercepat proses pelayanan perizinan berusaha secara maksimal dan tepat waktu.

d) Penambahan jumlah sumber daya manusia (PNS, PPPK dan PTT/honorer) terutama pada FO dan BO di pelayanan PTSP dan Mall MPP;

e) Pembiayaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas yang bersumber dari APBD agar dapat ditambahkan terutama dalam hal penambahan sarana prasarana kantor dan Belanja Pegawai untuk menambah kemampuan kecukupan pembiayaan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kemudahan pelayanan perizinan berusaha;

f) Menyusun peraturan bupati yang mengatur pelimpahan wewenang dari Perangkat Daerah teknis kepada DPMPTSP;

g) Mengumpulkan dan memetakan peraturan-peraturan yang sudah ada dan sudah tidak relevan lagi serta membuat usulan perubahan peraturannya untuk memberikan payung hukum bagi Perangkat Daerah untuk mengeluarkan perizinan;

h) Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis untuk melakukan pelayanan perizinan dengan metode jemput bola karena partisipasi aktif masyarakat dalam hal mengurus perizinan masih rendah;

i) Informasi perizinan kepada masyarakat luas dapat disampaikan melalui brosur, pamflet dan sosialisasi mengenai perizinan tersebut dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah teknis terkait izin, selain itu masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui situs resmi kabupaten gunung mas.

j) Membangun sistem pelayanan digital dalam pengurusan pendaftaran perizinan dan non perizinan secara digitalisasi/online, baik dikantor PTSP maupun di Mal Pelayanan Publik.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan Perangkat Daerah kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Program usulan oleh pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini *belum ada atau pun usulan* dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas / Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dalam pengusunan Anggaran DPMPTSP tidak dijumpai Dana Aspirasi dari DPRD.

Usulan kegiatan yang ada berasal dari DPMPTSP Provinsi untuk mensinkronisasikan program kegiatan yang terkait dengan investasi daerah yaitu partisipasi promosi investasi daerah. Partisipasi promosi daerah di luar daerah dalam satu tahun minimal 2 (dua) kali yaitu pada Kalteng Expo dan Regional Investment Forum, namun dana Anggaran yang terbatas akan dipusatkan pada program Nasional yang menginginkan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap Kabupaten/Kota. Hal ini telah dilaksanakan sesuai amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Tujuan diselenggarakannya MPP adalah untuk (1) Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. (2) Meningkatkan daya saing dan (3) memberikan kemudahan berusaha.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini harus dilakukan secara terarah agar dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkandalam hal ini dapat diuraikan antara lain:

III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas antara lain melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kearsipan serta perumusan kebijakan dan program serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 difokuskan dengan tema : *Akselesari Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.

Telaahan Kebijakan Nasional

No.	Prioritas Nasional	Urusan Pemerintahan	Program Dinas
1.	Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Urusan Pilihan : Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)		2. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
3.	Program Pendaftaran dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Online (OSS-RBA)		3. Program Promosi Penanaman Modal
4.	Perpres RI No.97 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5.	Pepres RI No. 89 Th. 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik		5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 adalah **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN** dan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 adalah **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN BERBASIS KOMODITAS UNGGUL**. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Peningkatkan kualitas Hidup Masyarakat;
3. Peningkatkan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas akan menunjang salah satu pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gunung Mas 2025-2026, dari:

Tema	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*
2025: Pembangunan Infrastruktur Yang berkelanjutan **2026: Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan berbasis Komoditas**	1. Peningkatan kualitas SDM Yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing 2. Peningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	1.1 Meningkatkan akses dan Kualitas Pendidikan; 1.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 2.1 Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat; 2.2 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat; 2.3 Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja.

Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah dengan:

1. *Mendorong peningkatan investasi daerah melalui skema promosi peluang investasi daerah yang dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Gunung Mas;*
2. *Mempermudah perizinan dengan memangkas birokrasi perizinan dan penggunaan Sistem Perizinan Elektronik Terpadu baik melalui OSS-RBA (One Single Submission-Risk Based Approach) maupun SIPET (Sistem Informasi Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik).*

Tema	Tujuan	Sasaran
1	*2*	*3*
	3. Peningkatkan Perekonomian yang Maju, Terintegrasi dan Berkelanjutan	3.1 Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah; 3.2 Penyediaan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas; 3.3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah: *1. Menjalankan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;* *2. Menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;* 3. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penjaminan Mutu baik secara internal maupunn secara eksternal.*		
2025: Pembangunan Infrastruktur Yang berkelanjutan **2026: Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan berbasis Komoditas**	*4. Peningkatan Tata Kelola Pemeritah yang Profesional, Bersih, dan Akuntabel*	4.1 Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan; 4.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi; 4.3 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas.
Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas yaitu: *1. Pemenuhan Persyaratan lingkungan sebagaimana terdapat pada OSS bagi pemohon perizinan baru dan perpanjang;* *2. Menjalankan pengawasan Bersama Perangkat Daerah Teknis terhadap Pelaksanaan Perizinan yang ada terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan;* *3. Menjalankan kebijakan Satu Peta terkait investasi daerah.*		

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas disusun dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Gunung Mas dengan sasaran-sasaran yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas dan fungsi DPMPTSP;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka DPMPTSP menyusun Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan dengan perbandingan Program Kegiatan Tahun Berjalan (2024) sebagai Berikut:

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	**2.18**	**URUSAN PEMERINTAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL**	**7.049.435.253,00**	**7.990.547.307,00**	**7.049.435.253,00**
I	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.284.311.443,00**	**6.294.408.201,00**	**5.284.311.443,00**
1.	**01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**14.652.400,00**	**17.301.000,00**	**14.652.400,00**
1	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.027.500,00	4.027.400,00	4.027.500,00
2	01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.700.000,00	2.550.000,00	1.700.000,00
3	01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4	01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5	01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6	01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
7	01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	4.357.600,00	1.700.000,00
2.	**01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.479.323.928,00**	**2.504.800.289,00**	**2.479.323.928,00**
1	01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.845.928,00	2.500.322.289,00	2.474.845.928,00
2	01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
3.	**01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
1	01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
4.	**01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**178.894.500,00**	**194.530.500,00**	**178.894.500,00**
1	01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.652.500,00	87.788.500,00	91.652.500,00
2	01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87.242.000,00	106.742.000,00	87.242.000,00
5	**01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**457.642.965,00**	**722.682.725,00**	**457.642.965,00**
1	01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.481.750,00	4.481.750,00	4.481.750,00
2	01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.323.000,00	164.498.000,00	107.323.000,00
3	01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.230.000,00	21.230.100,00	21.230.000,00
4	01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	6.299.700,00	6.796.500,00	6.299.700,00

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Peraturan Perundang-undangan			
5	01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	68.107.190,00	66.107.190,00	68.107.190,00
6	01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.272.000,00	38.758.000,00	14.272.000,00
7	01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.986.200,00	404.940.300,00	218.986.200,00
8	01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.943.125,00	15.870.885,00	16.943.125,00
6	**01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.500.000.003,00**	**2.140.799.267,00**	**1.500.000.003,00**
1	01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
2	01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3	01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.003,00	2.140.799.267,00	1.500.000.003,00
7	**01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**360.152.920,00**	**447.874.058,00**	**360.152.920,00**
1	01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2	01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.750.500,00	67.750.500,00	67.750.500,00
3	01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.978.100,00	33.978.100,00	33.978.100,00
4	01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.024.320,00	343.745.458,00	256.024.320,00
8	**01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**287.904.727,00**	**259.171.362,00**	**287.904.727,00**
1	01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.980.600,00	209.180.600,00	169.980.600,00
2	01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
3	01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.924.127,00	49.990.762,00	117.924.127,00
9	**01.2.13**	**Penataan Organisasi**	**4.040.000,00**	**5.540.000,00**	**4.040.000,00**
1	01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2.040.000,00	3.540.000,00	2.040.000,00
II	**02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**121.604.700,00**	**159.566.700,00**	**121.604.700,00**
1	**02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02.2.01.0001	*Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	0,00	0,00	0,00
2	**02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi**	**121.604.700,00**	**159.566.700,00**	**121.604.700,00**

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Investasi Kabupaten/Kota			
1	02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.473.700,00	76.698.700,00	54.473.700,00
2	02.2.02.0002	*Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota**	0,00	0,00	0,00
3	02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	67.131.000,00	82.868.000,00	67.131.000,00
III	**03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**472.594.950,00**	**408.043.918,00**	**472.594.950,00**
1	**03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**472.594.950,00**	**408.043.918,00**	**472.594.950,00**
1	03.2.01.0001	*Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	289.121.310,00	234.538.278,00	289.121.310,00
3	03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	183.473.640,00	173.505.640,00	183.473.640,00
VI	**04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**570.139.900,00**	**527.744.316,00**	**570.139.900,00**
1	**04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**570.139.900,00**	**527.744.316,00**	**570.139.900,00**
1	04.2.01.0001	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	04.2.01.0002	*Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penananaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	04.2.01.0003	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	314.122.540,00	293.711.464,00	314.122.540,00
5	04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	83.495.820,00	89.304.864,00	83.495.820,00
6	04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	172.521.540,00	144.727.988,00	172.521.540,00
V	**05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**537.604.440,00**	**548.842.528,00**	**537.604.440,00**
1	**05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**537.604.440,00**	**548.842.528,00**	**537.604.440,00**

No.	Kode	Program/Kegiatan	2024		2025
			Murni	Perubahan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	*05.2.01.0001*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	*05.2.01.0002*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	*05.2.01.0003*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	114.043.800,00	114.043.800,00	114.043.800,00
5	05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	272.789.440,00	299.870.328,00	272.789.440,00
6	05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	150.771.200,00	134.928.400,00	150.771.200,00
IV	**06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**63.179.820,00**	**53.853.864,00**	**63.179.820,00**
1	**06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**	**63.179.820,00**	**51.941.644,00**	**63.179.820,00**
1	06.2.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
2	06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	63.179.820,00	51.941.644,00	63.179.820,00
		TOTAL	***7.049.435.253,00***	***7.990.547.307,00***	**7.049.435.253,00**

Ket:
***Kegiatan Baru**
***Kegiatan yang dihapus**

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA

IV. 1. Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026, Sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

IV.1.1. Sasaran

Sasaran strategis dalam upaya pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2026 antara lain :

1. **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;**
2. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.**

Dalam penjabarannya sasaran stategis diatas dapat dirasakan dukungan melalui hal-hal antara lain:

a. *Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas*. Pada tahun 2018 saat penyusunan Renja TA.2019, sejumlah kewenangan yang masih melekat pada Perangkat Daerah sudah dilimpahkan kepada DPMPTSP dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas namun masih ada beberapa wewenang yang belum diberikan kepada DPMPTSP, hal ini akan berpengaruh pada percepatan pelaksanaan perizinan berusaha yang lebih terintegrasi;
b. *Tersedianya tempat pelayanan perizinan satu atap yang nyaman*. Kenyataannya hingga saat ini, tempat pelayanan masih belum maksimal dari segi kenyaman dan kecepatan dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada;

c. *Meningkatnya kinerja aparatur DPMPTSP dengan sarana dan prasarana yang memadai*. Kinerja aparatur dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana masih stagnan dikarenakan sarana dan prasarana penunjang kinerja masih minim dan belum optimal;

d. *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan publik*. Pelayananan yang jujur dan transparan sudah dilakukan oleh DPMPTSP dengan menghindari praktik percaloan dan gratifikasi;

e. *Meningkatnya Nilai Investasi Daerah*. Nilai Investasi Daerah yang terus ditingkatkan dengan adanya pembaruan perizinan dan bertambahnya jumlah investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA);

f. *Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional*. Jumlah investor yang berskala nasional menjadi tantangan tersendiri karena minimnya infrastruktur didaerah serta beberapa perizinan strategis terutama di bidang pertambangan dan kehutanan telah diambil alih oleh PEMDA Provinsi.

IV.1.2. Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Strategi yang dirumuskan adalah **Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi**, dalam upaya antara lain :

a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan DPMPTSP

Penetapan strategi ke belakang yang dimaksud adalah menginventarisir dasar-dasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP. Acuan terhadap wewenang dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam fungsi dan peran DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan peizinan di Kabupaten Gunung Mas.

b. Strategi Integrasi ke Depan

Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan DPMPTSP sebagai fasilitator pelayanan perizinan yang handal profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional DPMPTSP.

c. Strategi Penguatan ke Dalam

Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi DPMPTSP.

IV.1.3. Kebijakan

Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan tata Kelola Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi;**
2. **Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik**;

Penjabaran kebijakan diatas, dapat dilakukan dalam upaya antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan pelayanan yang prima;
2. Meningkatkan kompentensi SDM baik dalam teknis pelayanan dengan sarana dan prasarana yang mencukupi;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Tabel Pencapaian Sasaran, Strategi dan Kebijakan berdasarkan pelaksanaan Program/Kegiatan TA. 2022 Sampai Dengan TA. 2024

No	Kelompok	TA 2022	TA 2023	TA 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Sasaran**			
	a. Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas;	*	***	***
	b. Tersedianya tempat pelayanan perizinan satu atap yang nyaman;	*	*	**
	c. Meningkatnya kinerja aparatur DPMPTSP dengan sarana dan prasarana yang memadai;	*	*	**
	d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip penyelenggaraan publik;	***	***	***
	e. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah;	*	*	*
	f. Meningkatnya Jumlah Investor berskala nasional.	*	*	*
	g. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;			
	h. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.			
2.	**Strategi**			
	a. Integrasi ke Belakang dan Pengembangan DPMPTSP;	**	***	***
	b. Integrasi ke Depan;	*	*	*
	c. Strategi Penguatan ke Dalam.	***	***	***
	d. Percepatan implementasi reformasi birokrasi.			
3.	**Kebijakan**			
	a. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur;	*	**	**
	b. Melakukan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang efektif dan Efisien;	**	**	**
	c. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Keuangan dan Aset;	**	***	***
	d. Menerapkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	***	***	***
	e. Memberikan Pelayanan Publik yang optimal.	***	***	***
	f. Penguatan tata Kelola Kelembagaan dan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang terintegrasi;			
	g. Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik.			

IV. 2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama PD sebagaimana tercantum dalam Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis SOPD	IKU SOPD	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	**1. Jumlah Investor PMDN dan PMA.** **2. Jumlah Investor PMA** **3. Nilai Investasi Daerah** **4. Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi**	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal	Perencanaan, Pengumpulan data dan Potensi Investasi	Jumlah Promosi dan Kerjasama Investasi yang terlaksana Jumlah Potensi Investor	2 kali promosi	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Reviu 1 dokumen RUPM/5 tahun
						Pengumpulan dan Updating Data Investasi Penanaman Modal	Tersedianya aplikasi dan inventarisasi penanaman modal	Jumlah investor yang terinvantarisir di dalam Aplikasi dan Buku Inventarisasi Penanaman Modal	1 laporan/tahun
						Promosi Potensi dan Peluang Investasi	Terlaksananya promosi daerah	Jumlah promosi investasi	2 kali/tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	**5. Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang terselesaikan Tepat waktu** **6. Lamanya hari Proses Perizinan** **7. Survey Kepuasan Masyarakat** **8. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan**	3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelayanan terpadu di kecamatan dan Penerbitan Perizinan baik secara manual maupun online	Jumlah Bangunan Masyarakat yang legal	Meningkatnya jumlah perizinan yang terlayani	Pelayanan Perizinan IMB	Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan IMB di Kabupaten Gunung Mas	Jumlah masyarakat yang mengajukan IMB yang terlayani	Berapa pemohon/berapa izin
				Jumlah pelimpahan kewenangan perizinan yang ditangani	Meningkatnya jumlah perizinan	Pelayanan Perijinan Terpadu di Kecamatan	Penerbitan izin dan non perizinan di kecamatan	Jumlah Kecamatan yang terlayani	4 kecamatan per tahun dan jumlah perizinan per tahun
				Persentase Pelayanan Pendaftaran online		Pembuatan Website Perizinan dan Persyaratan Perizinan	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Online	Jumlah Pelayanan yang terlayani melalui aplikasi pendaftaran online	Website dan Update Website/Tahun (SIPET)

Indikator Kinerja yang memuat Keluaran, Hasil serta Ukuran/Satuan Kegiatan selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA***				**Sekretaris**
1	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA, RENJA Perubahan, RENJA Tahun Depan	Tersedianya Dokumen RENJA, RENJA Perubahan, RENJA Tahun Depan	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Pra RKA	Tersedianya Dokumen Pra RKA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA	Tersedianya Dokumen DPA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 Persen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anngaran Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Realisasi Anngaran Perangkat Daerah	3 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris BMD	Tersusunnya Dokumen Laporan Barang Inventaris	2 Dokumen	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Semesteran dan Tahunan	BMD Semesteran dan Tahunan		*Aset*
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Diadakan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Diadakan	45 Stell	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah PNS / ASN / PTT yang memperoleh Peningkatan Disiplin Aparatur yang Berkualitas	2 Orang	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik dan Lampu Listrik	Terpeliharanya Gedung Kantor	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapannya Kantor yang Diadakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapannya Kantor yang Diadakan	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang dan Cetakan yang Disediakan	Tersedianya Barang dan Cetakan yang Disediakan	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Memadai	Tersedianya Bahan Bacaan yang Memadai	4 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Disediakan	Tersedianya Bahan / Material yang Disediakan	25 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman untuk Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Kunjungan Tamu	4 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang Disediakan	Tersedianya Perjalanan Dinas yang Disediakan	46 Kali	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang diadakan	Tersediannya Pengadaan Kendaraan Dinas yang Diadakan	1 unit	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	Tersedianya Pengadaan Mebel yang Diadakan	2 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Diadakan	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Diadakan	1 Jenis	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	Tersusunnya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sunber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disediakan dan Jumlah Kendaraan Dinas	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang Disediakan dan Jumlah Kendaraan Dinas	3024 Liter dan 13 Unit	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	*Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*
9	**Penataan Organisasi**				
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersedianya Bahan Penunjang Reformasi Birokkrasi	Terdapatnya Bahan Penunjang Reformasi Birokkrasi	1 Tahun	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Tahun	*Sub koordinator Perencanaan, Keuangan dan Aset*
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal***
1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif**				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dibidang Penaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Honorarium Tim Teknis Investasi	Honorarium Tim Teknis Investasi	1 Tim	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**				
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Reviu RUPM yang Disediakan untuk di Implementasikan	Tersedianya Dokumen Hasil Reviu RUPM yang Disediakan untuk di Implementasikan	1 Dokumen	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peta Potensi Investasi PMA dan PMDN	Tersedianya Dokumen Data Peta Potensi Investasi PMA dan PMDN	1 Dokumen	*Sub koordinator Pengembangan Iklim Investasi*
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal***
1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Tim Koordinasi Pelayanan, Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Tersedianya Dokumen Laporan Tim Koordinasi Pelayanan, Pengendalian dan Evaluasi Investasi	1 Dokumen	*Sub koordinator Promosi Investasi Daerah*
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investasi Potensi di Bidang Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Investasi Potensi di Bidang Penanaman Modal	1 Dokumen	*Sub koordinator Promosi Investasi Daerah*
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				***Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu***
1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi/Website yang Dikembangkan / Dibuat	Tersedianya Aplikasi/Website yang Dikembangkan / Dibuat	1 Aplikasi	*Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Pemenuhan	Tersedianya Dokumen Laporan Pemantauan Pemenuhan	1 Dokumen	*Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Penanggung Jawab
		Keluaran	Hasil	Ukuran/ Satuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Komitmen Perizinan dan Perizinan	Komitmen Perizinan dan Perizinan		
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Penyelesaian Pengaduan terkait Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Dokumen Laporan Penyelesaian Pengaduan terkait Perizinan dan Non Perizinan	1 Dokumen	*Subkoordinator Informasi dan Pendaftaran*
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan**
1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Kegiatan	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Tersedianya Dokumen Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dokumen	*Subkoordinator Pengawasan dan Pengendalian*
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan**
1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Periznan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Laporan LKPM/PBS, Perizinan/Non Perizinan, dan PMA/PMDN	Tersedianya Dokumen Laporan LKPM/PBS, Perizinan/Non Perizinan, dan PMA/PMDN	3 Dokumen	*Subkoordinator Pengolahan Data dan Pelaporan*

Berdasarkan program dan kegiatan yang disusun di atas, disajikan Rencana Aksi berdasarkan Target Kinerja (Fisik) masing-masing kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2026 adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
1.	**2.18.01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**					
1	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25%	25%	25%	25%	100%
2	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100%	-%	-%	-%	100%
3	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
4	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	-%	-%	-%	100%
5	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
6	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-%	-%	-%	100%	100%
7	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja	-%	-%	-%	100%	100%
2.	**2.18.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-%	-%	-%	100%	100%
3	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-%	50%	-%	50%	100%
3.	**2.18.01.2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-%	-%	100%	-%	100%
4.	**2.18.01.2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-%	100%	-%	-%	100%
2	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-%	100%	-%	-%	100%
5	**2.18.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
1	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15%	15%	15%	15%	60%
4	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15%	15%	15%	15%	60%
5	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15%	15%	15%	15%	60%
6	2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15%	15%	15%	15%	60%
7	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15%	15%	15%	15%	60%
8	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	15%	15%	15%	15%	60%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		pada SKPD					
6	**2.18.01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	-%	-%	-%	100%
2	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	100%	-%	-%	-%	100%
3	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-%	-%	100%	-%	100%
4	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50%	-%	50%	-%	100%
7	**2.18.01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
4	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15%	15%	15%	15%	60%
8	**2.18.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
1	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15%	15%	15%	15%	60%
9	**2.18.01.2.13**	**Penataan Organisasi**					
1	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10%	10%	10%	10%	40%
II	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.02.2.01**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0%	0%	0%	0%	0%
2	**2.18.02.2.02**	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**					
1	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.02.2.02.0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	10%	10%	10%	10%	40%
III	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.03.2.01**	**Penyelenggaraan Promosi**					

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Triwulan				Target 2025
			I	II	III	IV	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
1	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	15%	15%	15%	15%	60%
2	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	15%	15%	15%	15%	60%
VI	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.04.2.01**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berbasis Resiko	15%	15%	15%	15%	60%
3	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15%	15%	15%	15%	60%
V	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.05.2.01**	**Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
1	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10%	10%	10%	10%	40%
2	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	10%	10%	10%	10%	40%
3	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	10%	10%	10%	10%	40%
IV	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					
1	**2.18.06.2.01**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**					
1	2.18.06.2.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15%	15%	15%	15%	60%

Tabel Rencana Capaian Kinerja 2020-2024

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**16,00%**	**34,00%**	**54,00%**	**72,00%**	**100%**
1	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0%	60%	30%	60%	100%
2	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20%	40%	60%	80%	100%
3	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20%	40%	60%	80%	100%
4	01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20%	40%	60%	80%	100%
5	01.10	Penyediaan alat tulis kantor	20%	40%	60%	80%	100%
6	01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20%	40%	60%	80%	100%
7	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20%	40%	60%	80%	100%
8	01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0%	30%	60%	60%	100%
9	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20%	40%	60%	80%	100%
10	01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20%	40%	60%	80%	100%
11	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	0%	0%	0%	0%	100%
12	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20%	40%	60%	80%	100%
13	01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	20%	40%	60%	80%	100%
14	01.20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	20%	40%	60%	80%	100%
15	01.21	Penataan Administrasi Kepegawaian	20%	40%	60%	80%	100%
16	01.22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20%	40%	60%	80%	100%
II	**02**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**8,57%**	**17,14%**	**44,29%**	**64,29%**	**100%**
1	02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0%	0%	100%	0%	100%
2	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0%	0%	30%	60%	100%
3	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0%	0%	0%	50%	100%
4	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	20%	40%	60%	80%	100%
5	02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20%	40%	60%	80%	100%
6	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	20%	40%	60%	80%	100%
7	02.53	Lanjutan Pembangunan Gedung Baru	0%	0%	100%	100%	100%
8	02.54	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Lapangan/Rumah	0%	0%	0%	50%	100%
III	**03**	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**12,50%**	**25,00%**	**37,50%**	**37,50%**	**100%**
1	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25%	50%	75%	75%	100%
2	03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0%	0%	0%	50%	100%
IV	**05**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**10,00%**	**20,00%**	**30,00%**	**40,00%**	**100%**
1	05.03	Bimbangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0%	0%	0%	0%	100%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	05.05	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal	20%	40%	60%	80%	100%
V	**06**	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan**	**16,67%**	**37,50%**	**58,33%**	**79,17%**	**100%**
1	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	20%	40%	60%	80%	100%
2	06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	20%	40%	60%	80%	100%
3	06.06	Penyusunan Laporan RENSTRA dan RENJA PD	0%	25%	50%	75%	100%
4	06.07	Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA	20%	40%	60%	80%	100%
5	06.10	Penataan dan pelaporan barang inventaris semesteran dan tahunan PD	20%	40%	60%	80%	100%
6	06.20	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)	20%	40%	60%	80%	100%
VI	**15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**0,00%**	**0,00%**	**22,00%**	**44,00%**	**100%**
1	15.05	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
2	15.13	Pengumpulan dan updating data investasi penanaman modal	0%	0%	50%	100%	100%
3	15.14	Partisipasi Pameran Dalam Negeri	0%	0%	0%	0%	100%
4	15.15	Potensi dan Peluang Investasi	0%	0%	30%	60%	100%
5	15.17	Penyusunan Promosi Investasi Daerah	0%	0%	0%	0%	100%
VII	**17**	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**66,67%**	**100%**
1	17.XX	Inventarisasi dan Penataan Aset PD	100%	100%	100%	100%	100%
2	17.119	Pengadaan Aplikasi Penatausahaan Persediaan-PD	100%	100%	100%	100%	100%
3	17.150	Penyusunan Laporan Pajak PPh21, PPh 22, PPh 23, dan PPn	0%	0%	0%	0%	100%
VIII	**18**	**Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi**	**0%**	**0%**	**15%**	**30%**	**100%**
1	18.01	Pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
2	18.02	Sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada penanaman modal	0%	0%	30%	60%	100%
3	18.03	Penertiban Perizinan di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	100%
4	18.05	Rekonsiliasi Data Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	0%	0%	0%	0%	100%
X	**18**	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri**	**25%**	**25%**	**50%**	**75%**	**100%**
1	18.23	Pameran Pembangunan	25%	25%	50%	75%	100%
IX	**37**	**Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	**9,23%**	**18,46%**	**32,31%**	**53,85%**	**100%**
1	37.01	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP*	0%	0%	0%	50%	100%
2	37.03	Sosialisasi Pelayanan Perijinan	0%	0%	30%	60%	100%
3	37.04	Pelayanan Perizinan Terpadu di Kecamatan	20%	40%	60%	80%	100%
4	37.05	Sosialisasi Prolegda PTSP	100%	100%	100%	100%	100%
5	37.06	Penatausahaan Pelayanan Perizinan Online Aplikasi Sicantik	0%	0%	0%	50%	100%

No.	Kode	Program/Kegiatan	Target Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6	37.07	Bimbingan Teknis Aplikasi Sicantik	0%	0%	0%	100%	100%
7	37.08	Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Gunung Mas	0%	100%	100%	100%	100%
8	37.09	Pendataan Potensi Perizinan di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	100%
9	37.10	Pelayanan Perijinan IMB	0%	0%	30%	60%	100%
10	37.11	Penyusunan SOP Perizinan	0%	0%	100%	100%	100%
11	37.12	Evaluasi Pelayanan Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
12	37.13	Penyusunan Laporan/Pemuktahiran Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
13	37.14	Penatausahaan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan	0%	0%	0%	0%	100%
		Rata-rata	**16,46%**	**24,38%**	**41,01%**	**56,25%**	**100%**

BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

V.1. Dana Indikatif Tahun 2025

Sumber dana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025 yang berjumlah 41 kegiatan, semua berasal dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan 2 sub kegiatan berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF) Pemerintah Pusat.

V.2. Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

V.2.1. Belanja Langsung

Untuk Tahun +1 dan seterusnya, dengan memperhatikan angka inflasi nasional dan provinsi Kalimantan Tengah serta pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah maka rata-rata kegiatan pada Belanja Langsung diperkirakan naik sebesar 7% dari tahun Rencana (2025).

Selain itu pertimbangan lainnya adalah adanya komitmen bersama KPK, Ombudsman serta BKPM dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan berusaha dan pengeluaran izin melalui sistem elektronik yang memerlukan biaya tambahan berupa pelatihan, perawatan, pengadaan sarana serta biaya lain yang melekat pada kegiatan terkait.

V.2.2. Belanja Tidak Langsung

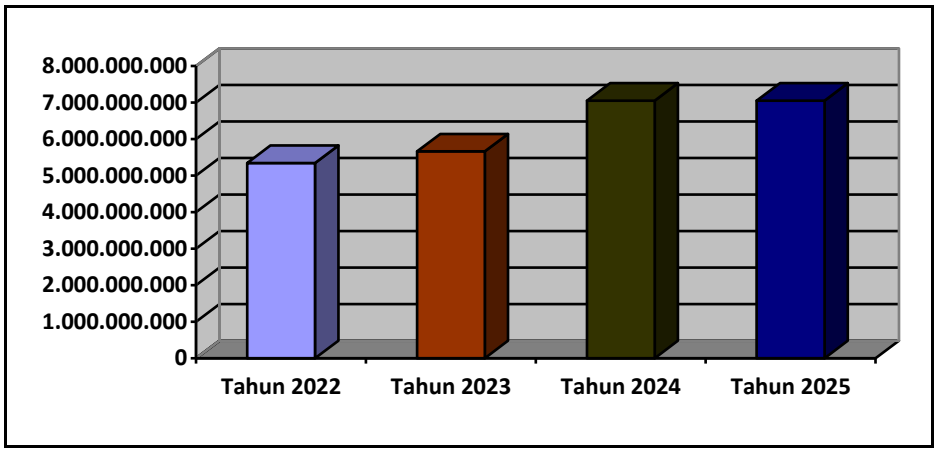
Untuk Belanja tidak Langsung khususnya belanja Gaji PNS diperkirakan tidak akan ada kenaikan mengikuti kebijakan pemerintah pusat namun tetap mengikuti trend tahun sebelumnya dimana terdapat gaji 13 (ketiga) dan ke 14 (keempat) belas.

Mengacu pada Pagu Indikatif belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dikeluarkan BAPPEDARIDA Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar **Rp.7.049.435.253,00** maka pada tahun ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan pagu indikatif belanja langsung tahun sebelumnya.

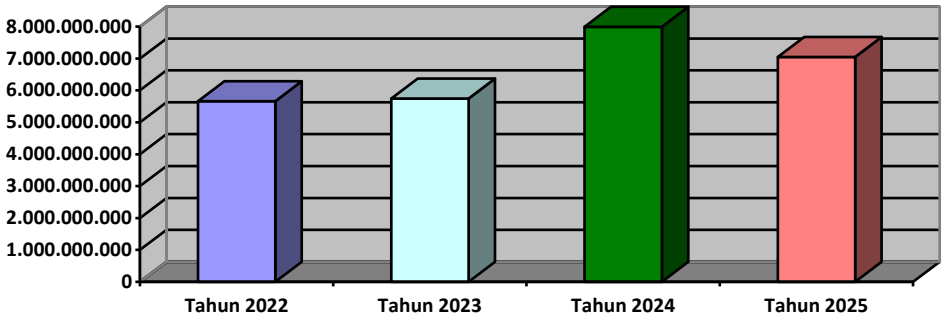
Berikut adalah tabel perbandingan Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Tahun 2022 s.d 2025:

Tahun Anggaran	2022	2023	2024	2025
Pagu Indikatif	5.346.552.717,00	5.661.432.660,00	**7.049.435.253,00**	**7.049.435.253,00**
Pagu Anggaran	5.661.432.660,00	5.740.999.778,00	**7.990.547.307,00**	**7.049.435.253,00**

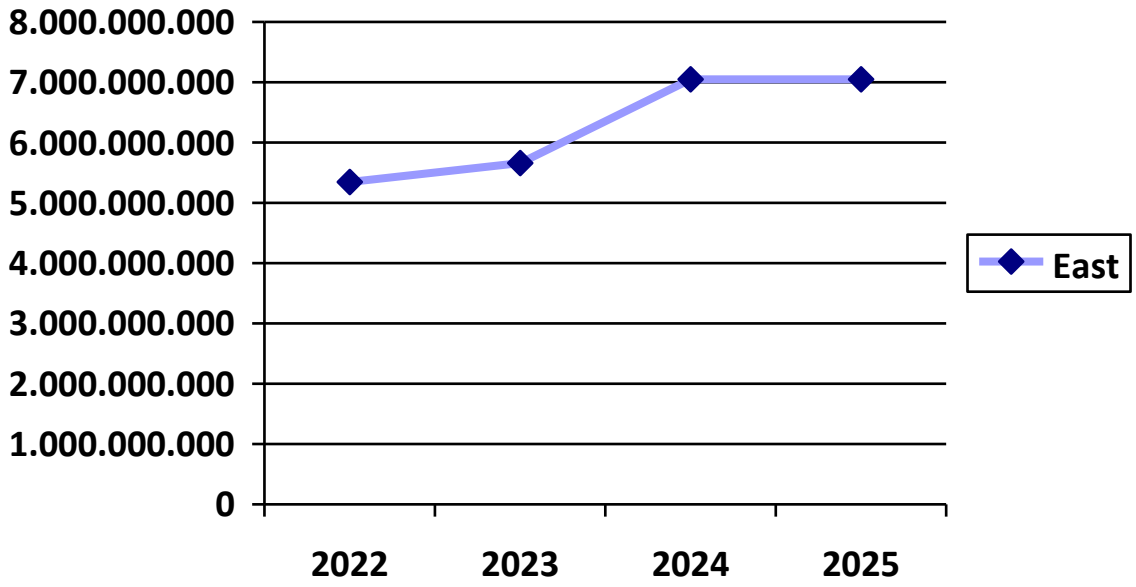
Grafik Pagu Indikatif Tahun 2022-2025



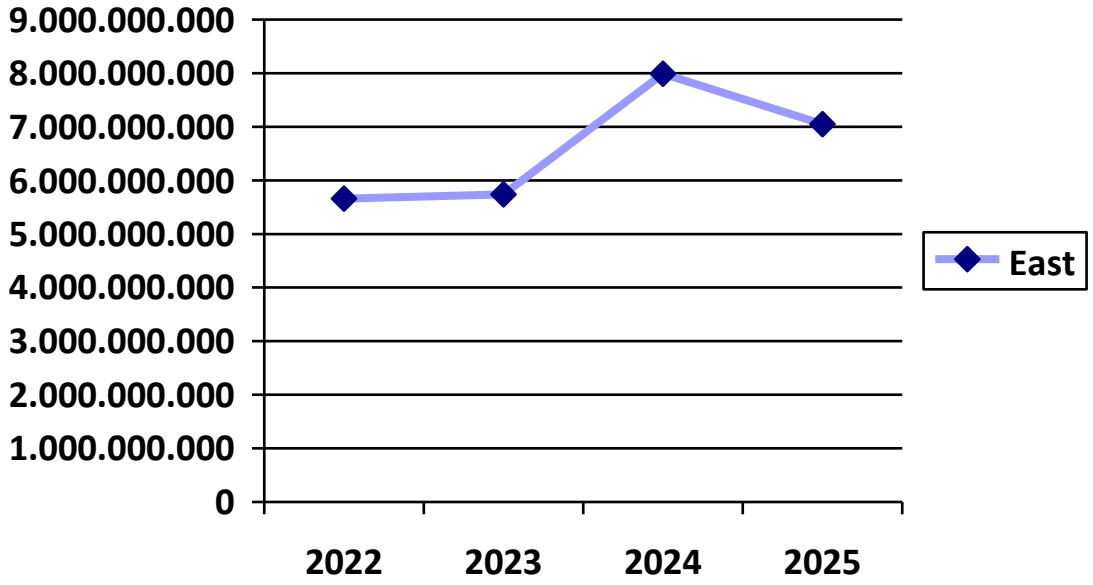
Grafik Pagu Anggaran Tahun 2022-2025



Grafik Pagu Indikatif Tahun 2022-2025



Grafik Pagu Anggaran Tahun 2021-2024



Pagu Indikatif 2021-2025 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kinerja aparatur dengan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani		***URUSAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL***				***3.380.357.111,00***												
			01	***PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN***				***857.289.820,00***												
			1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai		650	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang terlayani		3	43.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Peralatan Kebersihan		17	12.695.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jenis peralatan yang terawat		4	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK		40	38.996.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan		3	15.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			12	Penyediaan instalasi listrik	Jumlah peralatan listrik		1	1.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan		1	6.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik		2	18.360.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		4	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		30	68.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah PTT		19	597.089.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah		18	45.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kabupaten Gunung Mas
			21	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	**02**	***PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR***																
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan 4		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			9	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jenis Peralatan		5	113.295.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara		1	8.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		12	4.888.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			54	Pengadaan Pagar dan Penataan Halaman Gedung/Kantor/Rumah	Jumlah paket		1	345.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun

	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan penerapan prisip penyelenggaraan publik	Jumlah ASN yang terlayani	03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**			1													
			01	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jenis Pakaian Dinas		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
		Jumlah kursus/ pendidikan	**05**	***PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR***																
			1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang terdidik		2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			5	Magang Studi Banding/Kursus Singkat Non Formal	Jumlah ASN yang terdidik		6	29.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
		Jumlah (jenis) Laporan	**06**	***PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN***																
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja PD	Jumlah dokumen		3	3.370.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen		1	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			06	Penyusunan Laporan Renstra, Renja PD	Jumlah dokumen		3	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			07	Penyusunan RKA/RKA Perubahan-PD dan DPA PD	Jumlah dokumen		4	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			10	Penataan dan Pelaporan Barang Inventaris Semesteran dan Tahunan PD	Jumlah dokumen		2	2.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
			20	Penyusunan laporan bulanan realisasi anggaran (TEPRA)	Jumlah dokumen		1	5.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretaris	Kuala Kurun
Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi Daerah	Nilai investasi daerah	**15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**															**PM**	
			5	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah dokumen		12	36.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas
			18	Pameran Expo Dalam Negeri	Jumlah Pameran		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			19	Pendataan Potensi dan Peluang Investasi	Jenis Media		2	74.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			20	Informasi dan Promosi Investasi Daerah	Jumlah Video		1	68.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
			21	Pemetaan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Peta		12	21.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalimanta n Tengah
	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional	**Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)**	**18**	***Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi***																
			4	Penyusunan Pelaporan Data Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan		4	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas dan Provinsi

																				Kalteng
			5	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah kecamatan		12	74.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			6	Pembinaan Penanaman Modal SeKabupaten Gunung Mas	Jumlah kecamatan		12	15.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			8	Penyusunan Pelaporan Investasi Daerah SeKabupaten Gunung Mas	Jumlah dokumen		4	32.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**WASDAL**	Kabupaten Gunung Mas
			18	**PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI**															**PM**	
			23	Pameran Pembangunan	Jumlah Partisipasi		0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PM**	Kuala Kurun
Mewujudkan perizinan terpadu satu pintu	Tersedianya regulasi pelimpahan kewenangan yang jelas	Jumlah Regulasi yang dihasilkan	**37**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**															**PTSP**	
			1	Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan di DPMPTSP	Nilai IKM dan Pelaporannya		2	10.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kuala Kurun
	Kemudahan Pelayanan	Jumlah kecamatan dan masyarakat yang terlayani	4	Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang terlayani		12	46.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			8	Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Laporan		1	8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			9	Pendataan dan Pembinaan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			10	Pelayanan Perijinan IMB	Jumlah kecamatan yang terlayani		12	34.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			11	Pengembangan Evaluasi dan Pendataan Potensi Perizinan di Kecamatan	Jumlah dokumen		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			13	Informasi Pendaftaran Perizinan dan Nonperizinan	Jenis materi informasi		2	14.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			14	Penerapan Aplikasi Perizinan Sektoral Berbasis Sistem Aplikasi Elektronik Terpadu	Jumlah Aplikasi		1	25.400.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kuala Kurun
			15	Pelayanan Perizinan Sektor Perindustrian Perdagangan dan Sektor Lainnya	Jumlah Kecamatan yang terlayani		12	21.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Kabupaten Gunung Mas
			16	Pelaksanaan PTSP Prima	Jumlah Laporan		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**PTSP**	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng

Pagu Indikatif 2021-2025 yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kinerja aparatur dengan sarana dan prasarana yang memadai	Jumlah administrasi perkantoran yang terlayani	**2.18**	***URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL***						**4.611.904.253,00**		**5.346.552.717,00**		**5.740.999.778,00**		**7.049.435.253,00**	
			2.18.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***						**47.192.740,00**	-	**4.008.704.167,00**	-	**4.038.185.294,00**	-	**5.284.311.443,00**	
			2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					-	**47.192.740,00**		**13.802.500,00**		**13.802.400,00**		**14.652.400,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1	4.027.500,00	1	4.027.500,00	1	4.027.400,00	1	4.027.400,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	2.550.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3	35.515.240,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	3	2.125.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				0	0	0	0,00	0	0,00	1	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					-	**2.344.945.842,00**	-	**2.260.865.253,00**	-	**2.354.118.295,00**	-	**2.479.323.928,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan				100	2.294.574.642,00	100	2.256.387.253,00	100	2. 349.640.295,00	100	2.474.845.928,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				2	16.393.200,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	2	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				3	33.978.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	3	2.778.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**					-	**18.795.120,00**	-	**2.100.000,00**	-	**2.100.000,00**	-	**1.700.000,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2	18.795.120,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	2	1.700.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					-	**23.788.740,00**	-	**203.085.308,00**	-	**108.684.700,00**	-	**178.894.500,00**	Kuala Kurun
		Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				7	17.500.450,00	5	76.794.018,00	5	41.714.400,00	5	91.652.500,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang				2	6.288.290,00	2	126.291.290,00	2	66.970.300,00	2	87.242.000,00	Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					-	**185.988.210,00**	-	**340.246.855,00**	-	**449.867.594,00**	-	**457.642.965,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik				4	1.810.600,00	1	1.810.600,00	1	3.530.000,00	1	4.481.750,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/Paket				6	60.372.400,00	1	104.602.085,00	1	96.080.290,00	1	107.323.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis				2	8.607.200,00	2	11.482.000,00	2	17.090.000,00	2	21.230.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Jenis				4	6.299.700,00	2	6.299.700,00	2	6.596.400,00	2	6.299.700,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				25	55.334.510,00	25	63.080.930,00	1	70.888.304,00	1	68.107.190,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis				4	5.860.800,00	4	5.860.800,00	4	6.468.800,00	4	14.272.000,00	Kuala Kurun

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
			2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas/Laporan				46	47.703.000,00	64	147.110.740,00	79	247.213.800,00	79	218.986.200,00	Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalteng dan Luar Provinsi Kalteng
			2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis/Paket				-	-	-	-	-	-	1	16.943.135,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					-	**52.482.188,00**	-	**489.369.934,00**	-	**523.809.000,00**	-	**1.500.000.003,00**	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Paket				1	26.984.078,00	1	444.545.500,00	1	523.809.000,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis/Paket				5	26.984.078,00	1	21.916.180,00	0	0,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis/paket				4	16.898.09000	1	15.053.374,00	0	0,00	0	0,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis/Paket				1	8.600.020,00	1	7.854.880,00	1	0,00	1	1.500.000.00300	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**260.401.070,00**		**464.261.192,00**		**462.624.498,00**		**360.152.920,00**	
			2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jenis				12	45.246.000,00	12	44.190.000,00	12	130.482.150,00	12	67.750.500,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				4	14.035.530,00	4	13.750.670,00	4	23.710.000,00	4	33.978.100,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis				15	198.719.540,00	12	403.920.522,00	12	306.032.348,00	12	256.024.320,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**142.630.943,00**		**232.727.525,00**		**123.178.807,00**		**287.904.727,00**	
			2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				14	102.850.130,00	14	85.864.250,00	14	110.658.007,00	14	169.980.600,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket				2	39.780.813,00	1	146.863.275,00	1	12.520.800,00	1	117.924.127,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.13	**Penataan Organisasi**						**1.122.800,00**		**2.245.600,00**		**0,00**		**4.040.000,00**	
			2.18.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen				1	697.800,00	1	1.395.600,00	1	0,00	1	2.000.000,00	Kuala Kurun
			2.18.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1	425.000,00	1	850.000,00	1	0,00	1	2.040.000,00	Kuala Kurun
			2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**0,00**		**184.621.580,00**		**255.982.080,00**		**121.604.700,00**	
			2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**0,00**		**94.783.000,00**		**131.100.000,00**		**0,00**	
			2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Inisiatif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				0	0,00	1	94.783.000,00	1	131.100.000,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**						**112.874.480,00**		**89.838.580,00**		**124.882.080,00**		**121.604.700,00**	
			2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1	90.309.280,00	1	55.699.580,00	1	40.811.630,00	1	54.473.700,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta/Dokumen				1	22.565.200,00	50	34.139.000,00	50	84.070.450,00	1	67.131.000,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**463.319.840,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**472.594.950,00**	
			2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan**						**463.319.840,00**		**148.664.443,00**		**279.488.632,00**		**472.594.950,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
				Daerah Kabupaten/Kota													
			2.18.03.2.01.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen				1	249.945.140,00	1	124.621.943,00	1	73.110.200,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis/Dok-umen				3	177.552.100,00	1	24.042.500,00	1	206.378.432,00	1	289.121.310,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.03.2.01.03	Penyusunan Stategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	183.473.640,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**394.642.440,00**		**493.549.556,00**		**514.315.480,00**		**570.139.900,00**	
			2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Periznan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**394.642.440,00**		**493.549.556,00**		**514.315.480,00**		**570.139.900,00**	
			2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi				1	218.907.320,00	1	271.848.312,00	1	264.601.188,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen				1	123.672.880,00	1	149.854.928,00	1	167.284.528,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen				1	52.062.240,00	1	71.846.316,00	1	82.429.764,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	200	314.122.540,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	83.495.820,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Keg.Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	25	172.521.540,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**412.148.630,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**537.604.440,00**	
			2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**412.148.630,00**		**465.921.563,00**		**599.174.428,00**		**537.604.440,00**	
			2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan				1	101.379.440,00	1	0,00	1	129.674.428,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan				7	195.647.490,00	1	294.630.716,00	1	388.396.400,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan				1	115.121.700,00	1	171.290.847,00	1	81.103.600,00	1	0,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Masalah dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan kegiatan Usahanya	Keg Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	114.043.800,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Kegiatan Usahanya	Pelaku Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	217	272.789.440,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Keg Usaha				0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	150.771.200,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**151.571.210,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**63.179.820,00**	
			2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang**						**151.571.210,00**		**45.091.408,00**		**53.853.864,00**		**63.179.820,00**	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi
							Tahun-1 (2021)		Tahun-2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun-4 (2024)		Tahun-5 (2025)		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	
				Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan **Non Perizinan** Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen				3	151.571.210,00	4	45.091.408,00	4	53.853.864,00	3	63.179.820,00	Kabupaten Gunung Mas
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen				0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	63.179.820,00	Kabupaten Gunung Mas

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, yang memuat program dan kegiatan prioritas dan pagu dana indikatif, merupakan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas untuk menyelenggarakan pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Kebijakan Umum APBD dan prioritas yang dimuat dalam dokumen ini merupakan penjabaran rinci dan Tema Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, semoga apa yang telah digariskan dalam Rencana Kerja ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang.

Dengan semangat **"HABANGKALAN PENYANG KARUHEI TATAU"** kita bangun dan jaga Kabupaten Gunung Mas yang terencana, aman, tertib dan indah untuk menyongsong hari depan yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada saran dan masukan demi suksesnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini, kami dengan keadaan terbuka untuk menerimanya.

Kuala Kurun, 1 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gunung Mas

HARPASENO, S.T
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751110 200604 1 022